

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum PT Pegadaian (Persero)

Sejarah Pegadaian di mulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan BANK VAN LEENING yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan '*cultuur stelsel*' dimana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh

pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad (Stbl)* No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara

(PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2011.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun, manfaat semakin dirasakan oleh masyarakat, meskipun perusahaan membawa misi *public service obligation*, ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada Pemerintah, disaat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

4.2 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero)

Visi PT Pegadaian (Persero) adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

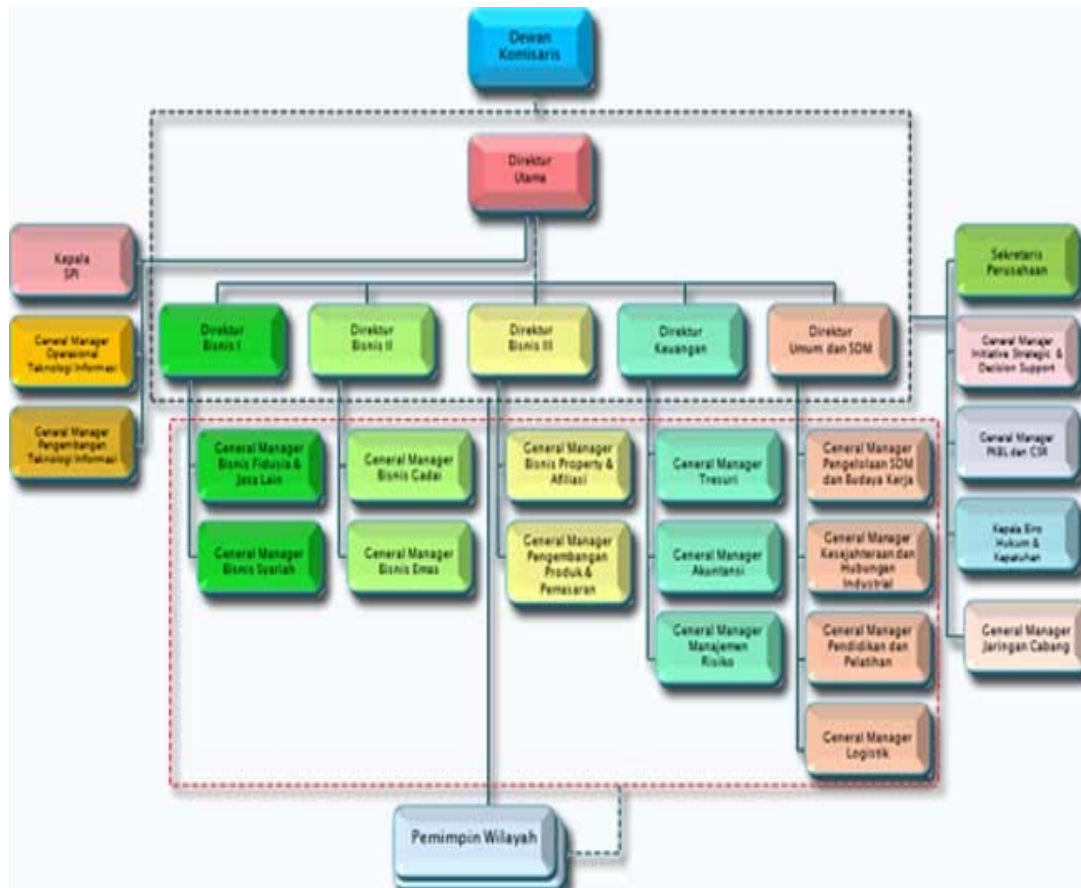
Misi PT Pegadaian (Persero) adalah:

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4.3 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero)

Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) terdiri dari Direktur Utama, dibantu oleh lima direktur lainnya yaitu Direktur Bisnis I, Direktur Bisnis II, Direktur Bisnis III, Direktur Keuangan, dan Direktur Umum dan SDM. Setiap anggota direksi dibantu oleh pegawai dengan tugas dan fungsi masing-masing.



Gambar 4.1. Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero)
Sumber : PT Pegadaian (Persero)

4.4 Kegiatan Usaha PT Pegadaian (Persero)

PT Pegadaian (Persero) adalah satu-satunya lembaga keuangan pemerintah yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat umum atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak. PT Pegadaian (Persero) mempunyai kegiatan usaha diantaranya sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Dana yang diperoleh oleh PT Pegadaian (Persero) untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari:

1. Pinjaman jangka pendek dari Perbankan
2. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya
3. Penerbitan obligasi
4. Modal sendiri

2. Pengguna Dana

Dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut ini:

1. Uang kas dan dana likuid lain
2. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap dan inventaris.
3. Pendanaan kegiatan operasional
4. Penyaluran Dana

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai. Lebih dari 50 % dana yang telah dihimpun oleh Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang

merupakan penerimaan utama bagi Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.

5. Investasi lain

Kelebihan dana atau *idle fund*, yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun penyaluran dana belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanam dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Pegadaian.

4.5 Produk dan Jasa PT Pegadaian (Persero)

Dengan perkembangan jaman dan teknologi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat, PT Pegadaian (Persero) selalu memberikan alternatif produk dan jasa yang bervariasi guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabahnya. Saat ini pegadaian telah memiliki 17 jenis produk yang ditawarkan kepada masyarakat, namun ada beberapa produk yang masih dalam tahap coba, karena hanya ditawarkan pada beberapa lokasi yang memang benar-benar sangat membutuhkan produk tersebut.

a. KCA (Kredit Cepat Aman)

Kredit gadai adalah pemberian pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak. Sasaran dari produk ini adalah masyarakat yang membutuhkan dana tunai

dalam waktu cepat. Barang jaminan yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah barang jaminan emas perhiasan, kendaraan, elektronik, barang rumah tangga dan kain.

b. RAHN

Pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Barang jaminan yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah barang jaminan perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor. Lima belas menit dana pun cair. Jangka waktu kredit ini adalah maksimal 120 hari atau 4 bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan keinginan nasabah.

c. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fidusia)

KREASI adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah. Sasaran kredit kreasi ini adalah pengusaha mikro/kecil baik perorangan maupun berbadan hukum yang membutuhkan modal. Kredit diberikan berdasarkan analisis kelayakan usaha dan analisi barang jaminan, dengan jangka waktu pelunasan 12, 18, 24 dan 36 bulan dan angsuran *flat* (tetap).

d. KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Krasida adalah suatu bentuk skim kredit bagi para pengusaha mikro/kecil yang memerlukan bantuan kredit untuk keperluan usaha produktif pada semua sector ekonomi dengan jaminan dikuasai oleh pegadaian. Pada prinsipnya krasida ini hamper sama dengan kredit kreasi, hanya saja agunan yang diserahkan (dijaminkan) dikuasai sepenuhnya oleh pegadaian. Pelunasan pinjaman dengan cara angsuran tiap bulan dengan sewa modal tetap dan jangka waktu 12,18,24 atau 36 bulan. Keunggulan produk ini adalah proses cepat hanya dalam hitungan menit, sewa modal ringan, pinjaman mulai dari 20 juta hingga 250 juta.

e. KRISTA (Kredit Angsuran Rumah Tangga)

Krista adalah pinjaman (kredit) lunak yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) kepada kelompok wanita pengusaha rumah tangga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan pola tanggung renteng. Sistem tanggung renteng adalah suatu system dimana setiap anggota kelompok harus saling bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang akan mengganggu dan mengancam keberlangsungan angsuran dari masing-masing anggota kelompok.

Sasaran produk ini adalah kelompok wanita pengusaha yang anggota kelompoknya terdiri dari pengusaha sangat mikro dan memiliki seorang ketua kelompok, seretaris dan bendahara.

Produk ini diberikan dengan jaminan agunan alat produksi dengan nilai minimal 20% dari uang pinjaman, status agunan dikuasai oleh nasabah, pelunasan dengan angsuran tetap dan jangka waktu 12, 18, 24 dan 36 bulan.

f. AMANAH

Program AMANAH pembiayaan berprinsip syariah dari Pegadaian melayani karyawan swasta atau pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman.

g. ARRUM

Pembiayaan ARRUM dari Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

h. KREMADA (Kredit Perumahan Rakyat)

KREMADA adalah pinjaman (kredit) lunak yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk kebutuhan renovasi atau pembangunan rumah. Nasabah yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang memiliki penghasilan kurang dari 2 juta perbulan. Nasabah tergabung dalam suatu kelompok usaha.

i. KAGUM (Kredit Aneka Guna Untuk Umum)

KAGUM adalah kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem fidusia yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi

yang telah memiliki penghasilan tetap. Layanan KAGUM dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pegadaian KAGUM dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegunaan seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain sebagainya. KAGUM merupakan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan.

j. INVESTA (Investasi Harta Berharga Milik Anda)

INVESTA adalah pinjaman dengan system gadai yang diberikan kepada nasabah perseorangan maupun institusi dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan berbentuk saham dan obligasi yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Layanan INVESTA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek para pelaku pasar modal secara cepat, aman dan terpercaya

k. KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)

KTJG adalah pinjaman atau talangan dana cepat kepada petani saat panen raya dengan jaminan gabah kering giling (GKG) untuk digunakan menutup biaya hidup dan modal budidaya. Dengan penyediaan modal budidaya yang cukup diharapkan para petani dapat memperoleh modal lebih cepat untuk usaha pertanian pada periode musim tanam berikutnya. Selanjutnya dengan usaha yang bersifat lindung nilai gabah ini, diharapkan mereka dapat memperoleh daya saing dipasar domestik sehingga memberikan peluang tambahan pendapatan dan sekaligus

memberikan pendidikan bagi para petani untuk menjadikan hasil panen sebagai komoditas bisnis.

l. MULIA

Layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel logam mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

m. Multi Pembayaran Online

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik, Telepon, PDAM dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

n. Persewaan Gedung

Pegadaian memiliki Langen Palikrama yaitu auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara dan seremoni. Auditorium dengan arsitektur Belanda yang dipadukan dengan interior elegan nan artistik serta dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, dapat menjadi tempat ideal guna mensukseskan setiap momen berharga anda.

o. Jasa Sertifikasi Batu Mulia

Pegadaian menyediakan berbagai layanan professional untuk sertifikasi keaslian dan identifikasi kualitas batu permata, dengan dukungan gemologist dan peralatan gemologi berstandar internasional dari Gemological Institute of America. Layanan ini dilakukan oleh unit Pegadaian Gemologi Lab.

p. Jasa Taksiran

Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya. Sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.

q. Jasa Titipan

Layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box.

4.6 Kinerja Keuangan Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah diperoleh, baik berupa data kuantitatif maupun kualitatif yang didukung oleh dasar teori dan metode penelitian yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, maka dilakukan analisis

kinerja aspek keuangan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor 100 Tahun 2002 pada PT Pegadaian (Persero) dari tahun 2009-2012 untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan oleh penulis. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 100 Tahun 2002 menyatakan bahwa penilaian kinerja aspek keuangan Badan Usaha Milik Negara dibagi menjadi delapan indikator, dimana dalam hal ini analisis kinerja keuangan PT Pegadaian (Persero) yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Untuk lebih jelasnya akan disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Analisa Kinerja Aspek Keuangan 2009-2012

Tahun	Penilaian Kinerja Aspek Keuangan		Tingkat Kesehatan
	Nilai Murni	Nilai Ekuivalen	Kinerja Aspek
	(%)	(%)	Keuangan
(1)	(2)	(3) = 2 : 70%	(4)
2009	56	80	A (Sehat)
2010	56,5	81	AA (Sehat)
2011	56	80	A (Sehat)
2012	56,5	81	AA (Sehat)

Sumber : Penelitian 2014

Berdasarkan hasil analisa yang terlihat pada Tabel 4.1 tersebut, diketahui bahwa kesehatan keuangan PT Pegadaian (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 100 Tahun 2002 pada tahun 2009 & 2011 berada pada klasifikasi sehat predikat A sedangkan pada tahun 2010 & 2012 berada pada klasifikasi sehat predikat AA.

Selain itu juga disajikan hasil perhitungan kinerja keuangan PT Pegadaian (Persero) pada Tabel berikut :

Tabel 4.2 Kinerja Keuangan PT Pegadaian (Persero) Periode 2009-2012

Indikator Penilaian	Nilai Persentase Rasio pada Tahun				Rata-rata	Skor	Skor	Kategori
	2009	2010	2011	2012		Penilaian	Maksimal KEPMEN	
<i>ROE (%)</i>	31,41	35,80	36,21	35,36	34,70	20	20	Sangat Sehat
<i>ROI (%)</i>	15,86	16,12	15,01	16,15	15,79	13,5	15	Sehat
<i>Cash Ratio (%)</i>	2,72	2,58	2,57	3,46	2,83	0	5	Tidak Sehat
<i>Current Ratio (%)</i>	155,52	141,72	142,91	152,50	148,16	5	5	Sangat Sehat
<i>Collection Periods (hari)</i>	63,19	62,2	66,23	60,32	62,99	4,5	5	Sehat
Perputaran Persediaan (hari)	4,67	3,32	1,69	1,46	2,79	5	5	Sangat Sehat
<i>Total Asset Turn Over (%)</i>	25,63	26,84	23,66	26,76	25,72	2	5	Kurang Sehat
<i>Total Equity to Total Asset (%)</i>	16,01	16,25	14,45	18,33	16,26	6	10	Kurang Sehat

Sumber : Penelitian 2014

Berdasarkan Tabel 4.2, menunjukkan bahwa *ROE* tahun 2009 adalah sebesar 31,41 %. Itu artinya setiap Rp 1 modal pemilik akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 0,3141. Pada tahun 2009 nilai *ROE* adalah 31,41%. Pada tahun 2010 nilai *ROE* adalah 35,80% atau naik sebesar 4,39% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai *ROE* adalah 36,21% atau naik sebesar 0,41% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai *ROE* adalah 35,36% atau turun sebesar 0,85% dari tahun sebelumnya. Skor penilaian *ROE* selama tahun 2009-2012 adalah 20.

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa *ROI* tahun 2009 adalah 15,86%, yang artinya setiap Rp 1 aktiva perusahaan mampu menghasilkan laba kotor sebesar Rp 0,1586. Pada tahun 2009 nilai *ROI* adalah 15,86%. Pada tahun 2010 nilai *ROI* adalah 16,12% atau naik sebesar 0,26% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai *ROI* adalah 15,01% atau turun sebesar 1,11% dari tahun

sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai *ROI* adalah 16,15% atau naik sebesar 1,14%. Skor penilaian *ROI* selama tahun 2009-2012 adalah 13,5.

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa *cash ratio* tahun 2009 adalah 2,72% yang artinya setiap Rp 1 hutang lancar dapat dijamin dengan Rp 0,0272 kas atau setara kas. Pada tahun 2009 nilai *cash ratio* adalah 2,72%. Pada tahun 2010 nilai *cash ratio* adalah 2,58 atau turun sebesar 0,14% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai *cash ratio* adalah 2,57% atau turun sebesar 0,01% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai *cash ratio* adalah 3,46% atau naik sebesar 0,89% dari tahun sebelumnya. Skor penilaian untuk *cash ratio* selama tahun 2009-2012 adalah 0.

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa *current ratio* tahun 2009 adalah sebesar 155,52% yang artinya setiap Rp 1 hutang lancar telah dijamin dengan Rp 1,55 aktiva lancar. Pada tahun 2009 nilai *current ratio* adalah 155,52%. Pada tahun 2010 nilai *current ratio* adalah 141,72% atau turun sebesar 13,8% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai *current ratio* adalah 142,91% atau naik sebesar 1,19% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai *current ratio* adalah 152,50% atau naik sebesar 9,59% dari tahun sebelumnya. Skor penilaian untuk *current ratio* selama tahun 2009-2012 adalah 5.

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan bahwa *collection period* tahun 2009 adalah 63,19 hari yang artinya penagihan piutang dilakukan setiap 63,19 hari dalam 365 hari (1 tahun). Pada tahun 2009 nilai *collection period* adalah 63,19

hari. Pada tahun 2010 nilai *collection period* adalah 62,20 hari atau naik sebesar 0,99 hari dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai *collection period* adalah 66,23 hari atau turun sebesar 4,03 hari dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai *collection period* adalah 60,32 hari atau naik sebesar 5,91 hari dari tahun sebelumnya. Skor penilaian untuk *collection period* selama tahun 2009-2012 adalah 4,5.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa perputaran persediaan pada tahun 2009 adalah 4,67 hari yang artinya dana yang tertanam dalam persediaan berputar setiap 4,67 hari dalam 365 hari (1 tahun). Pada tahun 2009 nilai perputaran persediaan adalah 4,67 hari. Pada tahun 2010 nilai perputaran persediaan adalah 3,32 hari atau naik sebesar 1,35 hari dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai perputaran persediaan adalah 1,69 hari atau naik sebesar 1,63 hari dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai perputaran persediaan adalah 1,46 hari atau naik sebesar 0,23 hari dari tahun sebelumnya. Skor penilaian untuk perputaran persediaan selama tahun 2009-2012 adalah 5.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa *TATO* pada tahun 2009 adalah 25,63% yang artinya setiap Rp 1 aktiva perusahaan mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp 0,2563. Pada tahun 2009 nilai *TATO* adalah 25,63%. Pada tahun 2010 nilai *TATO* adalah 26,84% atau naik sebesar 1,21% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai *TATO* adalah 23,66% atau turun sebesar 3,18% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai *TATO* adalah 26,76% atau

naik sebesar 3,40% dari tahun sebelumnya. Skor penilaian untuk *TATO* selama tahun 2009-2012 adalah 2.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 16,01% yang artinya modal yang dikelurakan untuk Rp 1 aktiva perusahaan adalah sebesar Rp 0,16. Pada tahun 2009 nilai rasio total modal sendiri terhadap total aset adalah 16,01%. Pada tahun 2010 nilai rasio total modal sendiri terhadap total aset adalah 16,25% atau naik sebesar 0,24% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai rasio total modal sendiri terhadap total aset adalah 14,40% atau turun sebesar 1,85% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 nilai rasio total modal sendiri terhadap total aset adalah 18,33% atau naik sebesar 3,93% dari tahun sebelumnya. Skor penilaian untuk rasio total modal sendiri terhadap total aset adalah 6.

4.7 Pembahasan

Pembahasan dari hasil analisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan masing-masing rasio adalah:

4.7.1 Rasio Likuiditas

Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata nilai rasio lancar perusahaan periode tahun 2009-2012 adalah sebesar 148,16. Bila diubah dalam skor penilaian maka skor penilaian rata-rata rasio lancar perusahaan periode 2009-2012 adalah 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah sangat sehat karena bobot nilai rasio lancar suatu perusahaan untuk dapat dikatakan sangat sehat adalah sebesar 5. Skor nilai rasio lancar perusahaan tersebut

menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk membiayai hutang jangka pendek atau hutang lancarnya dengan menggunakan aktiva lancar. Selama periode tersebut, jumlah aktiva lancar lebih besar bila dibandingkan hutang lancar. Ini berarti perusahaan memiliki aset lancar yang dapat segera diuangkan untuk membayar kewajiban/hutang lancar perusahaan. Namun nilai rasio lancar yang fluktuatif sebaiknya menjadi perhatian manajemen perusahaan agar dapat lebih konsisten untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata nilai rasio kas perusahaan periode tahun 2009-2012 adalah sebesar 2.83. Bila diubah dalam skor penilaian maka skor penilaian rata-rata rasio kas perusahaan periode 2009-2012 adalah 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah tidak sehat karena bobot nilai rasio kas suatu perusahaan untuk dapat dikatakan sangat sehat adalah sebesar 5. Skor nilai rasio kas perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki banyak kas atau setara kas untuk melunasi kewajiban lancar perusahaan. Salah satu alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena *core* bisnis PT Pegadaian (Persero) adalah gadai yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat sehingga kas yang dimiliki banyak digunakan untuk pemberian gadai. Tidak memiliki modal yang banyak juga menjadi salah satu penyebab sedikit nya kas yang dimiliki perusahaan. Manajemen harus mencari cara agar jumlah kas atau setara kas yang dimiliki perusahaan tidak terlalu kecil untuk berjaga-jaga apabila ada kewajiban yang harus segera

dibayar oleh perusahaan. Salah satu cara untuk menaikkan rasio kas adalah menaikkan jumlah kas yang dimiliki. Untuk menaikkan jumlah kas ini bisa dilakukan dengan cara mengatur ulang jangka waktu gadai menjadi lebih singkat agar pengembalian pinjaman dari nasabah bisa cepat menjadi kas kembali. Selain itu juga barang jaminan gadai yang telah jatuh tempo agar segera dilelang sehingga hasil penjualan lelang tersebut dapat menambah jumlah kas yang dimiliki.

Jadi, kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur menggunakan rasio lancar menunjukkan kinerja keuangan yang sangat sehat. Bila diukur menggunakan rasio kas, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang tidak sehat.

4.7.2 Rasio Profitabilitas

Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata nilai *ROE* perusahaan periode tahun 2009-2012 adalah sebesar 34.72. Bila diubah dalam skor penilaian maka skor penilaian rata-rata *ROE* perusahaan periode 2009-2012 adalah 20. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah sangat sehat karena bobot nilai *ROE* suatu perusahaan untuk dapat dikatakan sangat baik adalah sebesar 20. Skor nilai *ROE* perusahaan tersebut menunjukkan bahwa manajemen perusahaan mampu mengelola modal sendiri yang dimiliki secara efisien sehingga dapat memberikan laba yang besar. Jumlah penyertaan modal dari pemerintah yang sedikit tidak terlalu berpengaruh karena perusahaan

menempatkan banyak saldo laba sebagai salah satu pos penyusun modal sendiri.

Berdasarkan Tabel 4.2, rata-rata nilai *ROI* perusahaan periode tahun 2009-2012 adalah sebesar 15.79. Bila diubah dalam skor penilaian maka skor penilaian rata-rata *ROI* perusahaan periode 2009-2012 adalah 13.5. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah sehat karena bobot nilai *ROI* suatu perusahaan untuk dapat dikatakan sangat sehat adalah sebesar 15. Skor nilai *ROI* perusahaan tersebut menunjukkan bahwa manajemen perusahaan cukup efisien dan produktif dalam mengelola aktiva yang dimiliki untuk dapat menghasilkan laba bagi perusahaan. Walaupun begitu, manajemen perusahaan diharapkan agar terus mengelola aktiva agar lebih efektif dan efisien agar pencapaian laba perusahaan semakin meningkat.

Jadi, kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur dengan menggunakan *ROE* menunjukkan kinerja yang sangat sehat. Begitu juga bila diukur dengan *ROI*, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang sehat.

4.7.3 Rasio Aktivitas

Berdasarkan Tabel 4.2, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio *total asset turn over (TATO)*. Rata-rata nilai *total asset turn over* perusahaan periode tahun 2009-2012 adalah sebesar 25.72. Bila diubah dalam skor penilaian maka skor penilaian rata-rata *total asset turn over* perusahaan periode 2009-2012 adalah 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah

kurang sehat karena bobot nilai *total asset turn over* suatu perusahaan untuk dapat dikatakan sangat sehat adalah sebesar 5. Lebih dari 80% dari sebagian besar aktiva perusahaan adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu 4 bulan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa nilai perputaran rendah. Membuat produk gadai dengan jangka waktu yang lebih singkat dapat menjadi salah satu solusi meningkatkan nilai perputaran aktiva. Selain itu, membuat produk baru diluar *core* bisnis pegadaian yaitu dengan mengoptimalkan aktiva lainnya seperti tanah, bangunan, kendaraan guna menghasilkan laba bagi perusahaan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai perputaran aktiva. Jadi, kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur dengan menggunakan *total asset turnover* menunjukkan kinerja yang kurang sehat.

Perputaran piutang menunjukkan berapa kali waktu yang diperlukan perusahaan untuk melakukan penagihan terhadap piutangnya dalam suatu periode atau juga waktu atau hari yang diperlukan untuk mengubah piutang menjadi uang kas. Berdasarkan Tabel 4.2, secara keseluruhan rata-rata perputaran piutang periode 2009-2012 adalah 62.99. Bila diubah dalam skor penilaian maka skor penilaian rata-rata *collection periods* perusahaan periode 2009-2012 adalah 4,5. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan sehat karena hampir mencapai nilai maksimal yaitu 5. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya jumlah piutang yang diterima

perusahaan karena beberapa produk perusahaan penjualannya dilakukan secara kredit.

Tingkat perputaran persediaan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memutar produknya. Selain itu indikator ini juga digunakan untuk menunjukkan efisiensi pengelolaan persediaan produk yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.2, secara keseluruhan rata-rata perputaran persediaan periode 2009-2012 adalah 2,79. Bila diubah dalam skor penilaian rata-rata perputaran persediaan perusahaan periode 2009-2012 adalah 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah sangat sehat karena bobot nilai rasio lancar suatu perusahaan untuk dapat dikatakan sangat sehat adalah sebesar 5. Tingkat perputaran yang semakin tinggi atau lama hari penyimpanan persediaan yang semakin rendah menunjukkan semakin efisiennya kegiatan operasi perusahaan karena modal kerja yang tertanam (*idle money*) dalam persediaan semakin sedikit.

Jadi, kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur menggunakan rasio *total asset turn over* menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat. Bila diukur menggunakan *collection periods* menunjukkan kinerja keuangan yang sehat. Bila diukur menggunakan perputaran persediaan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang sangat sehat.

4.7.4 Rasio Solvabilitas

Berdasarkan Tabel 4.2, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio total modal sendiri terhadap total aktiva. Rata-rata nilai rasio total modal sendiri terhadap total aktiva perusahaan periode tahun 2009-2012 adalah sebesar 16.26. Bila diubah dalam skor penilaian maka skor penilaian rata-rata rasio kas perusahaan periode 2009-2012 adalah 6. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan adalah kurang sehat karena bobot nilai rasio total modal sendiri terhadap total aktiva suatu perusahaan untuk dapat dikatakan sangat sehat adalah sebesar 10. Skor nilai rasio total modal sendiri terhadap total aktiva perusahaan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan modal dari pihak luar yaitu berupa pinjaman dari debitur. Banyak memiliki pinjaman tidaklah buruk asal tingkat perolehannya lebih besar dari beban bunga pinjaman. PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu BUMN. Modal yang dimiliki berasal dari pemerintah. Jumlah modal yang diberikan pemerintah setiap tahunnya kecil, ini menjadi salah satu alasan mengapa nilai rasio modal sendiri terhadap total aktiva kecil. Meningkatkan laba perusahaan bisa menjadi salah satu cara meningkatkan modal perusahaan. Selain itu juga penghematan pada pos aktiva juga dapat menjadi salah satu solusi meningkatkan rasio total modal sendiri terhadap total aktiva. Jadi, kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur dengan menggunakan rasio modal sendiri terhadap total aktiva menunjukkan kinerja yang kurang sehat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Kinerja keuangan rasio likuiditas berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur menggunakan rasio lancar menunjukkan kinerja keuangan yang sangat sehat. Bila diukur menggunakan rasio kas, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang tidak sehat.
2. Kinerja keuangan profitabilitas berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur dengan menggunakan *return on equity ratio* menunjukkan kinerja yang sangat sehat. Begitu juga bila diukur dengan *return on investment ratio*, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan kinerja yang sehat.
3. Kinerja keuangan rasio aktivitas berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur dengan menggunakan *total asset turnover* menunjukkan kinerja yang kurang sehat. Bila diukur dengan menggunakan perputaran persediaan menunjukkan kinerja yang sangat sehat dan bila diukur dengan menggunakan *collection periods* menunjukkan kinerja yang sehat.
4. Kinerja keuangan rasio solvabilitas berdasarkan laporan keuangan periode tahun 2009-2012 bila diukur dengan menggunakan rasio modal sendiri terhadap total aktiva menunjukkan kinerja yang kurang sehat.

5.2 Saran

1. Untuk meningkatkan jumlah kas serta meningkatkan jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan, disarankan agar manajemen mengatur ulang jangka waktu gadai yang selama ini 4 bulan (120 hari) menjadi lebih singkat agar pengembalian pinjaman dari nasabah cepat menjadi kas kembali. Selain itu juga untuk barang jaminan gadai yang telah masuk periode lelang agar segera dilakukan penjualan lelang agar hasil penjualan lelang tersebut bisa menjadi kas.
2. Perusahaan diharapkan dapat mengelola seluruh sumber daya yang ada agar keuntungan yang didapat besar sehingga jumlah laba ditahan juga akan besar. Dengan besarnya laba ditahan maka akan meningkatkan jumlah modal sendiri yang nantinya akan meningkatkan nilai rasio modal sendiri terhadap total aktiva.
3. Membuat produk gadai dengan jangka waktu yang lebih singkat menjadi salah satu solusi meningkatkan nilai perputaran aktiva. Selain itu, membuat produk baru diluar *core* bisnis Pegadaian (Gadai dan Pembiayaan) yaitu dengan mengoptimalkan aktiva lainnya seperti tanah, bangunan, kendaraan guna menghasilkan laba bagi perusahaan juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan nilai perputaran aktiva.
4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah tahun serta menambahkan penggunaan rasio-rasio keuangan yang lain untuk

mengukur kinerja keuangan perusahaan agar hasil analisa yang diperoleh dapat lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Sarwoko, 2008. *Manajemen Keuangan (Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan)*. Cetakan Ketiga. Yogyakarta BPF. Yogyakarta.
- Astuti, Dewi, 2004. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Cetakan Pertama. Penerbit : Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Darsono, 2005. *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Syafrie. 2008. *Analisa Kasus Atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit : Salemba 4. Jakarta.
- Jumingan, 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Cetakan Pertama. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Kasmir, 2008. *Analisis Laporan Keuangan, edisi pertama, cetakan pertama*, Penerbit : Rajawali Pers. Jakarta.
- Kementrian BUMN. Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-100/M-BUMN/2002
- Munawir, 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. 1 Ed, cetakan keempat belas, BPFE. Yogyakarta.
- Muslich, Muhammad. 2003. *Manajemen Keuangan Modern*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Natalia, Desy. 2003. *Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. KUD Kopta Unit Tambang di Samarinda (2009-2011)*. Skripsi Universitas Mulawarman
- Nawan, Ilham Nugroho Hanung. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Solo 57100 (2009-2010)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret.

- Pribadi, Toto. 2008. *Deteksi Cepat Kondisi Keuangan : 7 Analisis Rasio Keuangan. Caetakan I. PPM*. Jakarta
- Riyanto, Bambang. 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. BPFE. Yogyakarta.
- Rosidin, Ogi Widana. 2011. *Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Samarinda*. Skripsi Universitas Mulawarman.
- Sawir, 2005. *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. PT Gramedia. Jakarta.
- Senhati, 2008. *Analisis Rasio Likuiditas dan Profitabilitas pada PT. Graha Sarana Duta di Makassar (2005-2007)*. Skripsi STIE LPI Makassar.
- Sutrisno, 2008, *Manajemen Keuangan, Teori, Konsep dan Aplikasi*, edisi pertama, cetakan ketiga. Ekonesia. Yogyakarta.
- Sutrisno, 2009. *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi. Catatan Ketujuh. Ekonisia*. Yogyakarta.
- Syamsudin, Lukman. 2007. *Manajemen Keuangan Perusahaan : Konsep Aplikasi Dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. PT : Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Theresia, Christie. *Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada PT Kalbe Farma*.
- Warsono, 2003. *Manajemen Keuangan Buku I. Edisi Ketiga*. Bayumedia. Malang.
- Wijaya Tunggal, Amin. 1996. *Kamus Akuntansi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- www.pegadaian.co.id

Lampiran I. Perhitungan Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2009

No	Keterangan	Komponen	Tahun 2009		
			Jumlah	Nilai Rasio	Skor Kinerja
1	<i>ROE</i>	Laba Setelah Pajak			
		Laba Bersih	798,195,518,921		
		Laba Penjualan Aset Tetap	583,803,400		
		Laba Setelah Pajak	797,611,715,521		
		Modal Sendiri	2,539,458,128,255		
		ROE = (LSP : MS) x 100%		31.41%	20
2	<i>ROI</i>	EBIT			
		Laba Sebelum Pajak	1,116,247,071,559		
		Bunga dan Provisi	1,347,960,331,708		
		Laba Penjualan Aset Tetap	583,803,400		
		EBIT	2,463,623,599,867		
		Penyusutan Aset Tetap	52,130,492,608		
		EBIT + Penyusutan Aset Tetap	2,515,754,092,475		
		Total Aktiva	15,859,464,128,255		
		ROI = ((EBIT+PAT) : TA) x 100%		15.86%	13.5
3	<i>Cash Ratio</i>	Kas dan Bank	267,988,501,964		
		Hutang Lancar	9,842,086,469,647		
		Cash Ratio = (K+B) : HL x 100%		2.72%	0
4	<i>Current Ratio</i>	Aktiva Lancar	15,306,560,584,034		
		Hutang Lancar	9,842,086,469,647		
		Current Ratio = (AL : HL) x 100%		155.52%	5
5	<i>Collection Period</i>	Piutang Usaha	698,818,195,023		
		Pendapatan Usaha	4,036,386,891,017		
		Collection Periods = (PiU : PU) x 365 hari		63.19	4.5
6	Perputaran Persediaan	Persediaan	51,649,546,698		
		Pendapatan Usaha	4,036,386,891,017		
		Perputaran Persediaan = (P : PU) x 365		4.67	5
7	<i>Total Asset Turn Over (TATO)</i>	Total Pendapatan			
		Pendapatan Usaha	4,036,386,891,017		
		Pendapatan Lain-Lain	29,208,429,706		
		Laba Penjualan Aset Tetap	583,803,400		
		Total Pendapatan	4,065,011,517,323		
		Total Aktiva	15,859,464,128,255		
		Total Asset Turn Over = (TP : TA) x 100%		25.63%	2
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	Total Modal Sendiri	2,539,458,187,133		
		Total Aktiva	15,859,464,128,255		
		TMS terhadap TA = (TMS : TA) x 100%		16.01%	6

Lampiran I. Perhitungan Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2009

No	Keterangan	2009		Skor Maksimal KepMen	Kategori
		Nilai Rasio	Skor Kinerja		
1	<i>ROE</i>	31,41%	20	20	Sangat Baik
2	<i>ROI</i>	15,86%	13,5	15	Baik
3	<i>Cash Ratio</i>	2,72%	0	5	Tidak Baik
4	<i>Current Ratio</i>	155,52%	5	5	Sangat Baik
5	<i>Collection Periods</i>	63.19 hari	4,5	5	Baik
6	Perputaran Persediaan	4.67 hari	5	5	Sangat Baik
7	Total Asset Turn Over (TATO)	25,63%	2	5	Kurang Baik
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	16,01%	6	10	Kurang Baik
Total Nilai PT Pegadaian (Persero) Tahun 2009			56		
Rasio Tingkat Kesehatan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2009 = Total Nilai : 70%			80		
Kategori Tingkat Kesehatan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2009			A		

Sumber : Penelitian 2014

Lampiran II. Perhitungan Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2010

No	Keterangan	Komponen	Tahun 2010		
			Jumlah	Nilai Rasio	Skor Kinerja
1	<i>ROE</i>	Laba Setelah Pajak			
		Laba Bersih	1,179,788,385,692		
		Laba Penjualan Aset Tetap	134,523,087		
		Laba Setelah Pajak	1,179,922,908,779		
		Modal Sendiri	3,296,202,947,825		
		ROE = (LSP : MS) x 100%		35.80%	20
2	<i>ROI</i>	EBIT			
		Laba Sebelum Pajak	1,616,726,799,654		
		Bunga dan Provisi	1,573,453,742,911		
		Laba Penjualan Aset Tetap	134,523,087		
		EBIT	3,190,315,065,652		
		Penyusutan Aset Tetap	79,859,739,674		
		EBIT + Penyusutan Aset Tetap	3,270,174,805,326		
		Total Aktiva	20,283,042,842,726		
		ROI = ((EBIT+PAT) : TA) x 100%		16.12%	13.5
3	<i>Cash Ratio</i>	Kas dan Bank	357,072,324,281		
		Hutang Lancar	13,845,159,783,249		
		Cash Ratio = (K+B) : HL) x 100%		2.58%	0
4	<i>Current Ratio</i>	Aktiva Lancar	19,621,785,026,807		
		Hutang Lancar	13,845,159,783,249		
		Current Ratio = (AL : HL) x 100%		141.72%	5
5	<i>Collection Period</i>	Piutang Usaha	916,447,432,973		
		Pendapatan Usaha	5,378,292,906,586		
		Collection Periods = (PiU : PU) x 365		62.20	4.5
6	Perputaran Persediaan	Persediaan	48,904,163,073		
		Pendapatan Usaha	5,378,292,906,586		
		Perputaran Persediaan = (P : PU) x 365		3.32	5
7	<i>Total Asset Turn Over (TATO)</i>	Total Pendapatan			
		Pendapatan Usaha	5,378,292,906,586		
		Pendapatan Lain-Lain	66,218,947,447		
		Laba Penjualan Aset Tetap	134,523,087		
		Total Pendapatan	5,444,646,377,120		
		Total Aktiva	20,283,042,842,726		
		Total Asset Turn Over = (TP : TA) x 100%		26.84%	2.5
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	Total Modal Sendiri	3,296,202,947,825		
		Total Aktiva	20,283,042,842,726		
		TMS terhadap TA = (TMS : TA) x 100%		16.25%	6

Lampiran II. Perhitungan Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2010

No	Keterangan	2010		Skor Maksimal KepMen	Kategori
		Nilai Rasio	Skor Kinerja		
1	<i>ROE</i>	35,80%	20	20	Sangat Baik
2	<i>ROI</i>	16,12%	13,5	15	Baik
3	<i>Cash Ratio</i>	2,58%	0	5	Tidak Baik
4	<i>Current Ratio</i>	141,72%	5	5	Sangat Baik
5	<i>Collection Periods</i>	62.2 hari	4,5	5	Baik
6	Perputaran Persediaan	3.32 hari	5	5	Sangat Baik
7	Total Asset Turn Over (TATO)	26,84%	2,5	5	Kurang Baik
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	16,25%	6	10	Kurang Baik
Total Nilai PT Pegadaian (Persero) Tahun 2010			56,5		
Rasio Tingkat Kesehatan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2010 = Total Nilai : 70%			81		
Kategori Tingkat Kesehatan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2010			AA		

Sumber : Penelitian 2014

Lampiran III. Perhitungan Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2011

No	Keterangan	Komponen	Tahun 2011		
			Jumlah	Nilai Rasio	Skor Kinerja
1	<i>ROE</i>	Laba Setelah Pajak			
		Laba Bersih	1,476,235,286,928		
		Laba Penjualan Aset Tetap	179,520,506		
		Laba Setelah Pajak	1,476,055,766,422		
		Modal Sendiri	4,076,363,090,622		
		ROE = (LSP : MS) x 100%		36.21%	20
2	<i>ROI</i>	EBIT			
		Laba Sebelum Pajak	2,002,251,590,714		
		Bunga dan Provisi	1,842,906,719,748		
		Laba Penjualan Aset Tetap	179,520,506		
		EBIT	3,844,978,789,956		
		Penyusutan Aset Tetap	89,569,819,086		
		EBIT + Penyusutan Aset Tetap	3,934,548,609,042		
		Total Aktiva	26,219,352,956,584		
		ROI = ((EBIT+PAT) : TA) x 100%		15.01%	13.5
3	<i>Cash Ratio</i>	Kas dan Bank	459,112,641,756		
		Hutang Lancar	17,869,388,246,994		
		Cash Ratio = (K+B) : HL) x 100%		2.57%	0
4	<i>Current Ratio</i>	Aktiva Lancar	25,537,221,194,712		
		Hutang Lancar	17,869,388,246,994		
		Current Ratio = (AL : HL) x 100%		142.91%	5
5	<i>Collection Period</i>	Piutang Usaha	1,197,665,961,512		
		Pendapatan Usaha	6,600,927,966,486		
		Collection Periods = (PiU : PU) x 365		66.23	4.5
6	Perputaran Persediaan	Persediaan	30,602,405,764		
		Pendapatan Usaha	6,600,927,966,486		
		Perputaran Persediaan = (P : PU) x 365		1.69	5
7	<i>Total Asset Turn Over (TATO)</i>	Total Pendapatan			
		Pendapatan Usaha	6,600,927,966,486		
		Pendapatan Lain-Lain	75,592,358,839		
		Laba Penjualan Aset Tetap	134,523,087		
		Total Pendapatan	6,676,654,848,412		
		Total Aktiva	28,219,352,956,584		
		Total Asset Turn Over = (TP : TA) x 100%		23.66%	2
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	Total Modal Sendiri	4,076,363,090,622		
		Total Aktiva	28,219,352,958,584		
		TMS terhadap TA = (TMS : TA) x 100%		14.45%	6

Lampiran III. Perhitungan Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2011

No	Keterangan	2011		Skor Maksimal KepMen	Kategori
		Nilai Rasio	Skor Kinerja		
1	<i>ROE</i>	36,21%	20	20	Sangat Baik
2	<i>ROI</i>	15,01%	13,5	15	Baik
3	<i>Cash Ratio</i>	2,57%	0	5	Tidak Baik
4	<i>Current Ratio</i>	142,91%	5	5	Sangat Baik
5	<i>Collection Periods</i>	66.23 hari	4,5	5	Baik
6	Perputaran Persediaan	1.69 hari	5	5	Sangat Baik
7	Total Asset Turn Over (TATO)	23,66%	2	5	Kurang Baik
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	14,45%	6	10	Kurang Baik
Total Nilai PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011			56		
Rasio Tingkat Kesehatan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011 = Total Nilai : 70%			80		
Kategori Tingkat Kesehatan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2011			A		

Sumber : Penelitian 2014

Lampiran IV. Perhitungan Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2012

No	Keterangan	Komponen	Tahun 2012		
			Jumlah	Nilai Rasio	Skor Kinerja
1	<i>ROE</i>	Laba Setelah Pajak			
		Laba Bersih	1,904,822,565,902		
		Laba Penjualan Aset Tetap	13,276,627		
		Laba Setelah Pajak	1,904,809,289,275		
		Modal Sendiri	5,371,884,488,525		
		ROE = (LSP : MS) x 100%		35.46%	20
2	<i>ROI</i>	EBIT			
		Laba Sebelum Pajak	2,577,445,346,104		
		Bunga dan Provisi	2,072,564,502,083		
		Laba Penjualan Aset Tetap	13,276,627		
		EBIT	4,649,996,571,560		
		Penyusutan Aset Tetap	84,753,627,576		
		EBIT + Penyusutan Aset Tetap	4,734,750,199,136		
		Total Aktiva	29,311,898,012,567		
		ROI = ((EBIT+PAT) : TA) x 100%		16.15%	13.5
3	<i>Cash Ratio</i>	Kas dan Bank	647,155,058,012		
		Hutang Lancar	18,720,492,208,323		
		Cash Ratio = (K+B) : HL) x 100%		3.46%	0
4	<i>Current Ratio</i>	Aktiva Lancar	28,548,901,879,167		
		Hutang Lancar	18,720,492,208,323		
		Current Ratio = (AL : HL) x 100%		152.50%	5
5	<i>Collection Period</i>	Piutang Usaha	1,276,604,131,910		
		Pendapatan Usaha	7,724,569,543,708		
		Collection Periods = (PiU : PU) x 365		60.32	4.5
6	Perputaran Persediaan	Persediaan	30,794,362,329		
		Pendapatan Usaha	7,724,569,543,708		
		Perputaran Persediaan = (P : PU) x 365		1.46	5
7	<i>Total Asset Turn Over (TATO)</i>	Total Pendapatan			
		Pendapatan Usaha	7,724,569,543,708		
		Pendapatan Lain-Lain	119,745,432,260		
		Laba Penjualan Aset Tetap	13,276,627		
		Total Pendapatan	7,844,301,699,341		
		Total Aktiva	29,311,898,012,567		
		Total Asset Turn Over = (TP : TA) x 100%		26.76%	2.5
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	Total Modal Sendiri	5,371,884,488,525		
		Total Aktiva	29,311,898,012,567		
		TMS terhadap TA = (TMS : TA) x 100%		18.33%	6

Lampiran IV. Perhitungan Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Tahun 2012

No	Keterangan	2012		Skor Maksimal KepMen	Kategori
		Nilai Rasio	Skor Kinerja		
1	<i>ROE</i>	35,46%	20	20	Sangat Baik
2	<i>ROI</i>	16,15%	13,5	15	Baik
3	<i>Cash Ratio</i>	3,46%	0	5	Tidak Baik
4	<i>Current Ratio</i>	152,50%	5	5	Sangat Baik
5	<i>Collection Periods</i>	60.32 hari	4,5	5	Baik
6	Perputaran Persediaan	1.46 hari	5	5	Sangat Baik
7	Total Asset Turn Over (TATO)	26,76%	2,5	5	Kurang Baik
8	Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aktiva	18,33%	6	10	Kurang Baik
Total Nilai PT Pegadaian (Persero) Tahun 2012			56,5		
Rasio Tingkat Kesehatan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2012 = Total Nilai : 70%			81		
Kategori Tingkat Kesehatan PT Pegadaian (Persero) Tahun 2012			AA		

Sumber : Penelitian 2014

**KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : KEP-100/MBU/2002**

TENTANG

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

BADAN USAHA MILIK NEGARA

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
 - a. SEHAT, yang terdiri dari :
 - AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95
 - AA apabila $80 < TS \leq 95$
 - A apabila $65 < TS \leq 80$
 - b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari :
 - BBB apabila $50 < TS \leq 65$
 - BB apabila $40 < TS \leq 50$
 - B apabila $30 < TS \leq 40$
 - c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :
 - CCC apabila $20 < TS \leq 30$
 - CC apabila $10 < TS \leq 20$
 - C apabila $TS \leq 10$
- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
 - a. Aspek Keuangan.
 - b. Aspek Operasional.
 - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi “Wajar Tanpa Pengecualian” atau kualifikasi “Wajar Dengan Pengecualian” dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

BAB III

BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.
- (2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi :
- a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
 - b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
 - c. Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
 - d. Bendungan dan irigasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

BAB IV

BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara ;
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara,

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 04 Juni 2002

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Hukum

ttd dan cap

Victor Hutapea
NIP 060051008

Lampiran I : 1/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

**SALINAN
TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		Bidang Industri Pupuk dan Semen
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		Bidang Niaga
		5. PT Dharma Niaga
		6. PT Pantja Niaga
		7. PT Cipta Niaga
		8. PT Sarinah
		Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri
		1. PT Bhanda Ghara Reksa
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantara
		11. PT Cambrics Primisima
		Bidang Pertambangan dan Energi
		1. PT Sarana Karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
		1. PT Kertas Leces
		2. PT Kertas Kraft Aceh

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		Bidang Industri Strategis
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
		Bidang Kawasan Industri
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT Kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		Bidang Konstruksi Bangunan
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		Bidang Konsultan Konstruksi
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA	
	Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	Bidang Sarana Perhubungan	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		Bidang Pos
		1. PT Pos Indonesia
		Bidang Pariwisata
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		Bidang Penyiaran
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN	
		Bidang Perkebunan
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII
		8. PT Perkebunan Nusantara VIII

Lampiran I : 4/4
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

**TABEL KELOMPOK BUMN
INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR**

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		Bidang Pertanian
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT Inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		3. Perum Peruri
		4. Perum Pegadaian
		5. Perum PFN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum

ttd

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

SALINAN
TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN
BUMN NON JASA KEUANGAN

I. ASPEK KEUANGAN

1. Total bobot
 - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra) 50
 - BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra) 70
2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.
Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1 : Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

3. Metode Penilaian
 - a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

Rumus:

$$\text{ROE} : \frac{\text{Laba setelah Pajak} \times 100\%}{\text{Modal Sendiri}}$$

Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
 - Aktiva tetap
 - Aktiva Non Produktif

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

Tabel 2 : Daftar skor penilaian ROE

ROE (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE ≤ 15	13,5	18
11 < ROE ≤ 13	12	16
9 < ROE ≤ 11	10,5	14
7,9 < ROE ≤ 9	9	12
6,6 < ROE ≤ 7,9	7,5	10
5,3 < ROE ≤ 6,6	6	8,5
4 < ROE ≤ 5,3	5	7
2,5 < ROE ≤ 4	4	5,5
1 < ROE ≤ 2,5	3	4
0 < ROE ≤ 1	1,5	2
ROE < 0	1	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10%, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

- b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

Rumus

$$ROI = \frac{EBIT + \text{Penyusutan}}{\text{Capital Employed}} \times 100\%$$

Definisi :

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
 - Aktiva Tetap
 - Aktiva lain-lain
 - Aktiva Non Produktif
 - Saham penyertaan langsung

Tabel 3 : Daftar Skor penilaian ROI

ROI (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
18 < ROI	10	15
15 < ROI ≤ 18	9	13,5
13 < ROI ≤ 15	8	12
12 < ROI ≤ 13	7	10,5
10,5 < ROI ≤ 12	6	9
9 < ROI ≤ 10,5	5	7,5
7 < ROI ≤ 9	4	6
5 < ROI ≤ 7	3,5	5
3 < ROI ≤ 5	3	4
1 < ROI ≤ 3	2,5	3
0 < ROI ≤ 1	2	2
ROI < 0	0	1

Cash Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
x ≥ 35	3	5
25 ≤ x < 35	2,5	4
15 ≤ x < 25	2	3
10 ≤ x < 15	1,5	2
5 ≤ x < 10	1	1
0 ≤ x < 5	0	0

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus :

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}} \times 100\%$$

Definisi :

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

Tabel 5 : Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = x (%)	Skor	
	Infra	Non Infra
125 <= x	3	5
110 <= x < 125	2,5	4
100 <= x < 110	2	3
95 <= x < 100	1,5	2
90 <= x < 95	1	1
x < 90	0	0

Contoh perhitungan :

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115%, maka sesuai tabel 5 skor untuk indikator Current Ratio adalah 4

e. Collection Periods (CP)

Rumus

$$CP = \frac{\text{Total Piutang Usaha} \times 365 \text{ hari}}{\text{Total Pendapatan Usaha}}$$

Definisi

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

Tabel 6 : Daftar skor penilaian collection periods

CP = X (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x <= 60	x > 35	4	5
60 < x <= 90	30 < x <= 35	3,5	4,5
90 < x <= 120	25 < x <= 30	3	4
120 < x <= 150	20 < x <= 25	2,5	3,5
150 < x <= 180	15 < x <= 20	2	3
180 < x <= 210	10 < x <= 15	1,6	2,4
210 < x <= 240	6 < x <= 10	1,2	1,8
240 < x <= 270	3 < x <= 6	0,8	1,2

Contoh perhitungan :

Contoh 1 :

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection Periods : 4
- Perbaikan Collection periods (7 hari) : 1,8
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 4

Contoh 2 :

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Collection periods : 1,2
- Perbaikan Collection periods (32 hari) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

f. Perputaran Persediaan (PP)

Rumus:

$$PP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Pendapatan Usaha}} \times 365$$

Definisi :

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7 : Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x (hari)	Perbaikan = x (hari)	Skor	
		Infra	Non Infra
x ≤ 60	35 < x	4	5
60 < x ≤ 90	30 < x ≤ 35	3,5	4,5
90 < x ≤ 120	25 < x ≤ 30	3	4
120 < x ≤ 150	20 < x ≤ 25	2,5	3,5
150 < x ≤ 180	15 < x ≤ 20	2	3
180 < x ≤ 210	10 < x ≤ 15	1,6	2,4
210 < x ≤ 240	6 < x ≤ 10	1,2	1,8
240 < x ≤ 270	3 < x ≤ 6	0,8	1,2
270 < x ≤ 300	1 < x ≤ 3	0,4	0,6

Contoh Perhitungan :

Contoh 1 :

PT “A” (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3
- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

Contoh 2 :

PT “B” (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2
- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

Rumus :

$$T A T O = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Capital Employed}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan.

Tabel 8 : Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x (%)	Perbaikan = x (%)	Skor	
		Infra	Non Infra
120 < x	20 < x	4	5
105 < x <= 120	15 < x <= 20	3,5	4,5
90 < x <= 105	10 < x <= 15	3	4
75 < x <= 90	5 < x <= 10	2,5	3,5
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3
40 < x <= 6	x <= 0	1,5	2,5
20 < x <= 40	x < 0	1	2
x <= 20	x < 0	0,5	1,5

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3
 - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 3,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

Contoh 2 :

PT “B” (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108% dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Total Asset : 3,5
 - Perbaikan Perputaran Total Asset (10%) : 2,5
- Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

- h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

Rumus:

$$\text{TMS terhadap TA} = \frac{\text{Total Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$$

Definisi :

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9 : Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS thd TA (%) = X	Skor	
	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30 <= x < 40	6	10
40 <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60 <= x < 70	4,5	8
70 <= x < 80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

Contoh Perhitungan :

II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

- BUMN INFRASTRUKTUR 35
- BUMN NON INFRASTRUKTUR 15

2. Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "*Contoh Indikator Aspek Operasional*"

3. Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan
- Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).
- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).
- Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.
- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal

5. Mekanisme Penilaian

a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot

- Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
- Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
- Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
- Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
- Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.

6. Contoh Perhitungan

BUMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
1. Pelayanan kepada pelanggan / masyarakat	15	B	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
2. Peningkatan kualitas SDM	10	C	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
Total	25		35	

III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15
- BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non Infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 : Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Laporan Perhitungan Tahunan	3	3
2. Rancangan RKAP	3	3
3. Laporan Periodik	3	3
4. Kinerja PUKK	6	6
TOTAL	15	15

3. Metode Penilaian

a. Laporan Perhitungan Tahunan

- Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.

Lampiran II : 11/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

- Penentuan nilai

Tabel II : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima	Skor
- sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	3
- sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	2
- lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan tahunan ditutup	0

- Contoh Perhitungan :
Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.

- Penentuan Nilai

Tabel 12 : Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	Skor
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

- Contoh 1:
Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.
Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.
- Contoh 2 :
Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu

c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.

Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- Penentuan Nilai

Tabel 13 : Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
$0 < x \leq 30$ hari	2
$0 < x \leq 60$ hari	1
< 60 hari	0

- Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

- Perhitungan jumlah hari keterlambatan
 - Triwulan I 4
 - Triwulan II 0
 - Triwulan III 0
 - Triwulan IV 9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan : Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan

d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)

- Indikator yang dinilai

Indikator	Bobot	
	Infra	Non Infra
1. Efektivitas penyaluran	3	3
2. Tingkat kolektibilitas pengembalian Pinjaman	3	3
TOTAL	6	6

- Metode penilaian masing-masing indikator.

d.1. Efektivitas penyaluran dana.

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{Jumlah dana yang tersedia}} \times 100\%$$

Definisi

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
 - Saldo awal
 - Pengembalian Pinjaman
 - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
 - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14 : Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	< 80
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan :

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp. 10.000 terdiri dari:

- Saldo awal tahun 1999 Rp. 500

Lampiran II : 14/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 RP. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500
- Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana = $9.500/10.000 \times 100\%$

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

Rumus : $\frac{\text{Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK}}{\text{Jumlah pinjaman yang disalurkan}} \times 100\%$

Definisi :

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:
- Lancar 100%
- Kurang Lancar 75%
- Ragu-ragu 25%
- Macet 0%
- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 15 : Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d 70	10 s.d 40	< 10
Skor	3	2	1	0

Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

- Lancar = 1.500
- Kurang Lancar = 500
- Ragu-ragu = 900
- Macet = 100
- Jumlah 3000**

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

- Lancar	1.500	x	100 %	=	1.500
- Kurang lancar	500	x	75 %	=	375
- Ragu-ragu	800	x	25 %	=	225
- Macet	100	x	0 %	=	0

Jumlah rata-rata tertimbang **2.100**

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah $\frac{2.100}{3000} \times 100\% = 70\%$

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

IV. LAIN-LAIN

1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
 - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
 - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.

CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

INDIKATOR	UNSUR-UNSUR YANG DIJADIKAN PERTIMBANGAN	CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR-UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN	
		BUMN/SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pelayanan kepada Pelanggan/ Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan kualitas sarana & prasarana untuk kepentingan/ kepuasan pelanggan • Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service) • Perbaikan mutu produk • Pengembangan jalur distribusi • Pelayanan gangguan/troubles. • Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan • Kecepatan pelayanan • Guidance yang jelas bagi pelanggan • Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan/pemakai jasa. 	Pelabuhan Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta) PLN Jalan Tol Garuda/MNA Bandara	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian daerah serapan sungai. Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan. Kualitas jalan, indikator traffic sign. On time performance. Kebersihan terminal Bandara.
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan utilisasi faktor-faktor produksi/assets idle. • Peningkatan rendemen • Peningkatan produktivitas persatuan faktor produksi. • Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya. • Peningkatan nilai men-hour. 	Perkebunan Kereta Api/pelayaran/ penerbangan PLN pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta) Konsultan	Rendemen, produksi perhektar, dsb. Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb. Susut teknis, susut distribusi, dsb. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan (O & P) Men-hour terjual, dsb.

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar • Ekplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang. • Pelaksanaan checking rutin terhadap fasilitas-fasilitas umum • Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan. • Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif. 	<p>Perkebunan</p> <p>Pelabuhan</p> <p>Transportasi</p>	<p>Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif.</p> <p>Pemeliharaan fasilitas dermaga, pengerukan alur/kolam, dsb.</p> <p>Pemeliharaan sarana transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.</p>
4. Inovasi produk baru	<ul style="list-style-type: none"> • Kreatifitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. • Penciptaan produk-produk baru • Peningkatan pengusaha teknologi. 	<p>Kontraktor</p> <p>Industri kimia dasar</p>	<p>Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.</p> <p>Konservasi energi, produk-produk baru yang prospektif, dsb.</p>
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Mutu diklat. • Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri) 	Berlaku umum untuk semua sektor	<p>Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan.</p> <p>Kaderisasi pimpinan.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan</p> <p>Kepedulian manajemen terhadap R & D.</p>
6. Research Development (R & D).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan metode baru yang prospektif • Hasil riset yang bermanfaat. • Perhatian perusahaan terhadap R & D. 	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
7. Hasil Pelaksanaan penugasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian sasaran. 	Berlaku untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.

Lampiran II : 18/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 04 Juni 2002

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none">• Kebersihan lingkungan.• Pelaksanaan AMDAL• Reklamasi• Estate regulation	Berlaku untuk semua sektor Kehutanan Pertambangan Industri manufaktur Kawasan Industri	Kebersihan lingkungan kerja. Reboisasi, AMDAL, Reklamasi daerah eks tambang, AMDAL. AMDAL. Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

ttd dan cap

Victor Hutapea
NIP. 060051008

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd

LAKSAMANA SUKARDI

PERUM PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
DISERTAI
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

DAFTAR ISI

	Hal.
Surat Pernyataan Direksi	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan Pokok	
1. Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008	1
2. Laporan Laba Rugi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008	2
3. Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008	3
4. Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2009 dan 2008	4
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERUM PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2009 dan 2008**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Chandra Purnama |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) | : | Jl. Larinda Raya Timur M2/11 Larangan Indah, Tangerang |
| Nomor Telepon | : | (021) 3901461 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Budiyanto |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) | : | Jl. Cipinang Jaya II No.48 RT.005 RW.007 Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta |
| Nomor Telepon | : | (021) 31924711 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

menyatakan bahwa :

1. Bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ;
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Maret 2010

Direktur Utama,



Chandra Purnama



Direktur Keuangan,



Budiyanto

PERUM Pegadaian – Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162, Jakarta – 10430, Kotak Pos 1090, Tel.315-5550 (Hunting) Fax.391-4221; 324-067
Telex : 61162, e-mail : sp@pegadaian.co.id, web site : www.pegadaian.co.id



Nomor: LAI/GA/10011

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi
Perusahaan Umum Pegadaian

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian Perusahaan Umum Pegadaian dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Umum Pegadaian dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Penanggung Jawab Audit,

Drs. Husni Arvan, CPA

Izin Praktik : 98.1.0243

Izin KAP : KEP-662/KM.17/1998

10 Maret 2010

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
PER 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2009	2008
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	3	267.988.501.964	212.810.657.232
Uang Muka	4	11.940.719.316	4.225.790.379
Pajak Dibayar Dimuka	5,38	39.396.710.924	-
Pinjaman Yang Diberikan	2e,2f, 6	14.194.632.042.323	9.494.277.444.827
Piutang Lainnya	7	4.882.284.402	3.733.797.825
Persediaan	2g,8	51.649.546.698	22.176.663.893
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2p,9	684.602.533.286	517.122.791.606
Beban Dibayar Dimuka	2p,10	51.468.245.121	39.426.554.357
Jumlah Aset Lancar		15.306.560.584.034	10.293.773.700.119
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Kepada Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	2c,2f,11	333.377.335	1.707.656.168
Aset Pajak Tangguhan	2q,38b,43	42.883.553.422	42.725.721.980
Aset Tetap - (bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 350.904.154.420 dan Rp 302.044.540.788)	2h,12	442.557.079.566	387.186.161.072
Aset Lain-lain	2h,2i,2j,2k,13	67.129.533.897	46.693.229.758
Jumlah Aset Tidak Lancar		552.903.544.221	478.312.768.978
JUMLAH ASET		15.859.464.128.255	10.772.086.469.097
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN LANCAR			
Pinjaman Bank	14	9.252.231.284.097	6.205.667.602.715
Pinjaman Obligasi Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	2m,1,15,21	269.143.928.562	8.685.096.559
Pinjaman Lainnya	16	15.000.000.000	15.000.000.000
Hutang Kepada Rekanan	17	19.364.716.773	16.938.772.286
Hutang Kepada Nasabah	18	60.005.937.156	35.748.693.274
Hutang Pajak	2q,19,38a	40.745.496.192	107.892.454.771
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	2p,20,43	63.806.060.822	82.901.547.581
Pendapatan Diterima Dimuka	2p,23a	3.620.163.016	2.798.459.320
Hutang Lancar Lainnya	24	118.168.883.029	89.652.336.686
Jumlah Kewajiban Lancar		9.842.086.469.647	6.565.284.963.192
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR			
Pinjaman Obligasi - Setelah Dikurangi Bagian Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	2m,1,15,21	2.991.560.651.602	1.762.064.896.519
Pinjaman dari Pemerintah			
Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	22	410.000.000.000	410.000.000.000
Pinjaman Dari Pemerintah Daerah	22	1.350.000.000	1.250.000.000
Pendapatan Ditangguhkan	2p,23b	24.425.872.162	26.063.360.798
Kewajiban Estimasi Untuk Imbalan Kerja	2o,25	50.582.947.711	63.423.580.376
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar		3.477.919.471.475	2.262.801.837.693
EKUITAS			
Modal Awal	26	205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah		46.252.000.000	46.252.000.000
Saldo Laba:			
- Ditentukan Penggunaannya	26a	1.490.010.668.212	1.059.199.340.092
- Belum Ditentukan Penggunaannya	26b	798.195.518.921	633.548.328.120
Jumlah Ekuitas		2.539.458.187.133	1.943.999.668.212
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		15.859.464.128.255	10.772.086.469.097

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2009	2008
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Sewa Modal	2e,2p,27	3.609.785.546.341	2.612.987.897.393
Pendapatan Administrasi	2e,2p,28	405.281.061.094	294.980.476.882
		<u>4.015.066.607.435</u>	<u>2.907.968.374.275</u>
Pendapatan Usaha Lainnya	2p,29		
Uang Kelebihan Lewat Waktu		19.283.738.489	21.773.171.610
Pendapatan Lainnya		<u>2.036.545.093</u>	<u>852.749.496</u>
		<u>21.320.283.582</u>	<u>22.625.921.106</u>
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>4.036.386.891.017</u>	<u>2.930.594.295.381</u>
BEBAN USAHA			
Bunga dan Provisi	2p,30	(1.347.960.331.708)	(853.649.486.555)
Penyusutan Aset Tetap	2h,2p,31	(52.130.492.608)	(39.600.456.008)
Pegawai	2p,32,43,44	(990.683.408.794)	(808.443.478.685)
Umum	2p,33	(558.574.016.053)	(344.283.334.319)
Jumlah Beban Usaha		<u>(2.949.348.249.163)</u>	<u>(2.045.976.755.567)</u>
LABA USAHA		<u>1.087.038.641.854</u>	<u>884.617.539.814</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan Sewa Gedung	2p,34	3.596.936.674	3.532.176.189
Pendapatan Jasa Giro	35	1.199.186.839	978.858.623
Laba Penjualan Aset Tetap	2h,36,12	583.803.400	3.454.952.983
Pendapatan Lainnya	2p,37a	28.860.477.721	8.852.281.463
Beban Lain-lain	2p,37b	(5.031.974.928)	(194.430.161)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain		<u>29.208.429.706</u>	<u>16.623.839.097</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		<u>1.116.247.071.559</u>	<u>901.241.378.911</u>
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	2q,38,19		
Tahun Berjalan		(318.209.384.080)	(294.752.092.100)
Tangguhan	38	<u>157.831.442</u>	<u>21.884.491.309</u>
		<u>(318.051.552.638)</u>	<u>(272.867.600.791)</u>
LABA BERSIH		<u><u>798.195.518.921</u></u>	<u><u>628.373.778.120</u></u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal Awal	Penyertaan Modal Pemerintah	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
Saldo per 31 Desember 2007 disajikan kembali		205.000.000.000	46.252.000.000	751.821.075.454	476.656.814.638	1.479.729.890.092
Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan						
- Dana Pembangunan Semesta		-	-	-	(147.000.000.000)	(147.000.000.000)
- Dana Program Kemitraan		-	-	-	(8.552.000.000)	(8.552.000.000)
- Dana Bina Lingkungan		-	-	-	(8.552.000.000)	(8.552.000.000)
- Cadangan Umum		-	-	135.532.264.638	(135.532.264.638)	-
- Cadangan Tujuan		-	-	171.846.000.000	(171.846.000.000)	-
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	26b	-	-	307.378.264.638	(471.482.264.638)	(164.104.000.000)
Laba Bersih Tahun 2008		-	-	-	628.373.778.120	628.373.778.120
Saldo per 31 Desember 2008		205.000.000.000	46.252.000.000	1.059.199.340.092	633.548.328.120	1.943.999.668.212
Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan						
- Dana Pembangunan Semesta		-	-	-	(190.065.000.000)	(190.065.000.000)
- Dana Program Kemitraan		-	-	-	(6.336.000.000)	(6.336.000.000)
- Dana Bina Lingkungan		-	-	-	(6.336.000.000)	(6.336.000.000)
- Cadangan Umum		-	-	338.186.328.120	(338.186.328.120)	-
- Cadangan Tujuan		-	-	92.625.000.000	(92.625.000.000)	-
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	26b	-	-	430.811.328.120	(633.548.328.120)	(202.737.000.000)
Laba Bersih Tahun 2009	26b	-	-	-	798.195.518.921	798.195.518.921
Saldo per 31 Desember 2009		205.000.000.000	46.252.000.000	1.490.010.668.212	798.195.518.921	2.539.458.187.133

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2009 DAN 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2009	2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari:			
- Penerimaan Sewa Modal		3.442.305.804.660	2.446.305.241.417
- Pendapatan Administrasi	2e,2p,28	405.281.061.094	294.980.476.882
- Pendapatan Lainnya		33.021.284.471	25.194.505.739
- Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan		43.039.053.559.424	30.465.479.304.951
- Pelunasan dari Piutang Lainnya		130.208.660.967	91.757.583.736
- Penjualan BSL/BLP & Aset yang Disisihkan		585.402.591.554	252.733.129.454
- Penerimaan Hutang Nasabah		102.602.548.025	60.943.621.067
- Penerimaan Hutang Pajak		86.682.537.194	69.902.673.213
- Penerimaan Hutang Lainnya		288.249.207.801	147.314.079.624
Jumlah Penerimaan Kas Dari Kegiatan Operasi		48.112.807.255.190	33.854.610.616.083
Pengeluaran Kas untuk:			
- Pembayaran Bunga Bank/Obligasi		(1.368.011.167.993)	(812.745.219.904)
- Beban Pegawai		(1.006.706.968.039)	(826.475.671.033)
- Beban Umum		(515.152.143.074)	(324.003.044.988)
- Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan		(48.361.531.976.156)	(33.766.735.921.354)
- Pembayaran Hutang Kepada Rekanan		(4.700.967.950)	(6.302.078.583)
- Pembayaran Hutang Kepada Nasabah		(66.570.159.238)	(49.040.017.899)
- Pembayaran Hutang Pajak		(512.137.682.015)	(326.688.195.505)
- Pembayaran Hutang Lainnya		(243.605.682.240)	(190.786.561.355)
- Pemberian Piutang		(180.336.639.786)	(88.314.500.091)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Kegiatan Operasi		(52.258.753.386.491)	(36.391.091.210.712)
Kas Bersih Digunakan untuk Kegiatan Operasi		(4.145.946.131.301)	(2.536.480.594.630)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Kas dari:			
- Penjualan Aset Tetap	2h,36,12	584.803.400	3.703.315.872
Jumlah Penerimaan Kas Dari Kegiatan Investasi		584.803.400	3.703.315.872
Pengeluaran Kas untuk:			
- Pembelian Aset Tetap		(130.886.057.368)	(70.530.197.597)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Kegiatan Investasi		(130.886.057.368)	(70.530.197.597)
Kas Bersih Digunakan untuk Kegiatan Investasi		(130.301.253.968)	(66.826.881.725)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Kas dari:			
- Hutang Bank		12.223.523.160.244	14.505.945.118.475
- Hutang Ruf		371.915.000.000	197.863.494.000
- Hutang Promes		-	564.000.000.000
- Hutang Obligasi		1.500.000.000.000	-
- Hutang Jangka Panjang Lainnya		100.000.000	850.000.000
Jumlah Penerimaan Kas dari Kegiatan Pendanaan		14.095.538.160.244	15.268.658.612.475
Pengeluaran Kas untuk:			
- Angsuran Hutang Bank		(9.176.959.478.862)	(11.455.301.487.628)
- Pembayaran Biaya Emisi Obligasi		(3.801.451.381)	-
- Pelunasan Obligasi			
Obligasi VII		-	(150.000.000.000)
Obligasi IX seri B		(8.700.000.000)	(8.700.000.000)
- Pelunasan Hutang Ruf		(371.915.000.000)	(297.863.494.000)
- Pelunasan Hutang Promes		-	(564.000.000.000)
- Pembayaran Dana Pembangunan Semesta		(190.065.000.000)	(147.000.000.000)
- Pembayaran Program Kemitraan		(6.336.000.000)	(8.552.000.000)
- Pembayaran Program Bina Lingkungan		(6.336.000.000)	(8.552.000.000)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Kegiatan Pendanaan		(9.764.112.930.243)	(12.639.968.981.628)
Kas Bersih Diperoleh dari Kegiatan Pendanaan		4.331.425.230.001	2.628.689.630.847
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		55.177.844.733	25.382.154.493
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		212.810.657.232	187.428.502.740
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		267.988.501.964	212.810.657.232

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

1. UMUM

Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan tertua bercorak khusus, berdiri sejak zaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.178 tanggal 3 Mei 1961 Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, sebagai badan usaha negara di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan terbitnya Inpres No.17 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969, PN Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan PP No.103 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan bertujuan untuk:

- Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai
- Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia (kepercayaan), pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Selain penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, Perusahaan menjalankan usaha jasa gadai syariah (rahn), sejak tanggal 10 Januari 2003.

Perum Pegadaian berkantor pusat di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta, dengan 13 Kantor Wilayah serta 3.297 Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) di seluruh Indonesia (pada tanggal 31 Desember 2009).

Berdasarkan neraca pembukaan Perusahaan Umum Pegadaian dan Surat Menteri Keuangan RI No.1015/KMK.013/1991 tanggal 26 September 1991, modal awal Perusahaan Umum Pegadaian ditetapkan sebesar Rp205.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam Neraca Pembukaan. Modal awal yang disetor Pemerintah tersebut adalah kumulatif laba bersih yang diperoleh Perjan Pegadaian. Secara bertahap mulai tahun 1991, Pemerintah Republik Indonesia memberikan tambahan modal sebagai Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp46.252.000.000 melalui SK Menteri Keuangan RI masing-masing sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM (lanjutan)

Nomor	Tanggal	Rp
- 0360/KM.3-42/SKOP/0391	30 Maret 1991	20.000.000.000
- 0136/KM.3-42/SKOP/0891	5 Agustus 1991	16.252.000.000
- 0151/MK.013/1992	29 Juni 1992	10.000.000.000

	Jumlah	46.252.000.000

Dari Tahun 1993 sampai dengan Tahun 2009, Perum Pegadaian telah menerbitkan emisi obligasi sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun untuk obligasi tahun 1993, 1998, 2001, dan 2009 (Seri A), jangka waktu 8 tahun untuk obligasi tahun 1999, 2000, 2002, 2003 (Seri A), dan 2009 (Seri B), dan jangka waktu 15 tahun untuk obligasi tahun 2003 Seri B serta jangka waktu 10 tahun untuk obligasi tahun 2006, 2007 dan 2009 (Seri C).

Seluruh obligasi dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
1993	Obligasi I	11 Juni 1993 & 9 Juli 1998	50 milyar	Bunga 17,5% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang.
1994	Obligasi II	30 Juni 1994 & 18 Juli 1999	25 milyar	Bunga 13% tetap untuk 6 bulan pertama, selanjutnya mengambang yaitu 1% di atas tingkat bunga deposito 6 bulan bank pemerintah.
1996	Obligasi III	25 Juni 1996 & 12 Juli 2001	100 milyar	Bunga 17,75% tetap untuk tahun pertama 4 tahun berikutnya mengambang 1,5% di atas tingkat bunga deposito bank pemerintah & swasta.
1997	Obligasi IV	16 Juni 1997 & 3 Juli 2002	100 milyar	Bunga 14,75% tetap untuk tahun pertama 4 tahun berikutnya mengambang 1% di atas tingkat bunga deposito bank pemerintah & swasta.
1998	Obligasi V	23 Juni 1998 & 8 Juli 2003	64,6 milyar	Bunga Seri A1 49% tetap untuk tahun pertama, seterusnya mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM (lanjutan)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
				Bunga Seri B2 mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium.
1999	Obligasi VI	24 Agustus 1999 & 8 September 2007	135 milyar	Bunga 15,5% tetap untuk tahun pertama 7 tahun berikutnya mengambang sebesar 1,75% di atas tingkat bunga rata-rata JIBOR 6 bulan.
2000	Obligasi VII	27 Juni 2000 &	150 milyar	Bunga 15,625% tetap untuk tahun pertama, berikutnya mengambang 1,725% di atas tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah.
2001	Obligasi VIII	31 Mei 2001 & 12 Juni 2006	300 milyar	Bunga Seri A 19,25% tetap, cicilan 20% pokok per tahun Seri B 19,25% tetap, Seri C 0,50% tetap menurun per tahun 20,25% untuk tahun pertama, Seri D 19,25% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang sesuai dengan tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, max. 24,25% min. 16,25%, Seri E 19,25% tetap untuk tahun pertama sampai tahun ketiga, selanjutnya mengambang sesuai tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, max. 24,25% min. 16,25%
2002	Obligasi IX	24 Mei 2002 & 6 Juni 2010	300 milyar	Bunga Seri A 18,25% tetap per tahun, Seri B 18,25% per tahun, amortisasi 10 % sampai dengan tahun keempat emisi, 20% tahun kelima sampai dengan ketujuh 30% tahun kedelapan emisi, Seri C 18,25% tetap tahun Pertama, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM (lanjutan)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
				<p>premi tetap 2,50% per tahun, maks. 20,00% min. 16,50%. Seri D dengan opsi jual pada tahun kelima, 18,25 % tetap tahun pertama sampai dengan tahun kelima, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maks. 20,00%, min. 16,50%.</p>
2003	Obligasi X	27 Juni 2003 & 11 Juli 2011 & 11 Juli 2018	400 milyar	<p>Bunga Seri A 12,9375% per tahun tetap jangka waktu 8 tahun; Seri B jangka waktu 15 tahun tingkat bunga 13,125% per tahun tetap untuk tahun pertama sampai dengan tahun ketiga, selanjutnya tahun keempat s/d tahun kelima belas mengambang berdasarkan bunga SBI berjangka 3 bulan ditambah premi 1,00% per tahun, maksimum 15,50%, minimum 10,50%.</p>
2006	Obligasi XI	23 Mei 2006 & 23 Mei 2016	500 milyar	<p>Bunga Seri A 13,10% per tahun tetap jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 13,10% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1,25% per tahun, maksimum 16,00%, minimum 10,00%.</p>
2007	Obligasi XII	4 September 2007 & 4 September 2017	600 milyar	<p>Bunga Seri A 10,025% per tahun tetap jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 10,025% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1% per tahun, maksimum 12,00%, minimum 8,00%.</p>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM (lanjutan)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2009	Obligasi XIII	1 Juli 2009 & 1 Juli 2014 & 1 Juli 2017 & 1 Juli 2019	1.500 milyar	Seri A1, tingkat bunga tetap 11,675% pertahun untuk tahun pertama sampai tahun ke-5. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp350 miliar. Seri A2, tingkat bunga tetap 11,675% pertahun untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun ke-2 sampai tahun ke-5 yang besarnya berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi 3% per tahun dengan batas atas 13% dan batas bawah 10%. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp100 miliar. Seri B, tingkat bunga tetap 12,650% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun ke-8. Jangka waktu 8 tahun dengan jumlah Rp.650 miliar. Seri C, tingkat bunga tetap 12,875% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun ke-10. Jangka waktu 10 tahun dengan jumlah Rp.400 miliar.

Wali amanat atas seluruh obligasi yang diterbitkan oleh Perum Pegadaian tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Manajemen Perusahaan terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas :

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.Kep-79/MBU/2008 tanggal 5 Mei 2008 susunan Dewan Pengawas terdiri dari :

Ketua	:	Suhadi Hadiwijoyo
Anggota	:	Siswo Suyanto
Anggota	:	Bambang Prayitno
Anggota	:	Raksaka Mahi
Anggota	:	Ketut Sethyon

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-185/MBU/2008 tanggal 11 September 2009 susunan Dewan Pengawas terdiri dari :

Ketua	:	Bambang Prayitno
Anggota	:	Raksaka Mahi
Anggota	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Wiranto

Direksi :

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-74/MBU/2008 tanggal 28 April 2008, susunan Direksi terdiri dari :

Direktur Utama	:	Chandra Purnama
Direktur Pengembangan Usaha	:	Wasis Djuhar
Direktur Operasi	:	Moch. Edy Prayitno
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Sumanto Hadi
Direktur Keuangan	:	Budiyanto

Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengawas, dibentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian:

- No.Kep-01/KP/DP/GD/2004 tanggal 01 Nopember 2004,
- No.Kep-01/KP/DP/GD/2005 tanggal 31 Oktober 2005,
- No.01/KP/DP/GD/2006 tanggal 31 Oktober 2006 dan
- No.05/KP/DP/GD/2007 tanggal 31 Oktober 2007.

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No. Kep-05/KP/DP/GD/2007 Susunan Komite Audit per 31 Desember 2008 sebagai berikut:

Ketua	:	Drs. Siswo Suyanto
Anggota	:	Muhamad Nur Sodiq
Anggota	:	Mulyana Mastam

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No. Kep-05/KP/DP/GD/2007, jo Kep-01/KP/DP/GD/2009 tanggal 1 April 2009 dan jo Kep-07/KP/DP/GD/2009 tanggal 6 Oktober 2009 Susunan Komite Audit Perum Pegadaian Per 31 Desember 2009 sebagai berikut:

Ketua	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Muhamad Nur Sodiq, Ak.
Anggota	:	M. Iskandar

Dalam rangka mengefektifkan pengawasan kegiatan usaha gadai syariah yang telah beroperasi dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, maka sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.227/US.1.00/2004 tanggal 30 Nopember 2004, telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH.
Anggota	:	H. Rahmat Hidayat, SE, MT.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.183/US1.00/2006 tanggal 05 Oktober 2006 tentang Perpanjangan Masa Tugas Dewan Pengawas Syariah Perum Pegadaian, tugas Dewan Pengawas Syariah Perum Pegadaian telah diperpanjang selama 3 tahun.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Surat Direksi No. 77/US1.00/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah Perum Pegadaian, tugas Dewan Pengawas Syariah Perum Pegadaian yang berakhir pada 5 Oktober 2009 tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dikeluarkannya keputusan mengenai pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang baru secara definitive untuk masa jabatan berikutnya.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Direksi	4.221.690.067	2.694.511.400
Dewan Pengawas	1.681.600.000	1.151.800.000
Komite Audit	202.500.000	184.600.000
Jumlah	6.105.790.067	4.030.911.400

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000 dan Akta Notaris Zacharias Omawele, SH No.13 tanggal 26 Juli 2000, Perusahaan telah mendirikan satu unit usaha di bidang jasa lelang dengan nama PT Balai Lelang Artha Gasia (BLAG) yang berlokasi di Jalan Kramat Raya No.160 Jakarta dan mulai beroperasi sejak bulan September tahun 2000.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Balai Lelang Artha Gasia, tanggal 18 April 2007 dan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.1427/SDM.200322/2007 dan No.1428/SDM.200322/2007 keduanya tertanggal 6 Juni 2007 susunan pengurus PT Balai Lelang Artha Gasia, ditetapkan sebagai berikut:

Komisaris : Ir. Wasis Djuhar, MM
Direktur : Heriyanto, SE, MM.

Dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 April 2008 diputuskan susunan organisasi sebagai berikut :

Komisaris : Agus Supriyono, SE, MM.
Direktur : Heriyanto, SE, MM.

Jumlah karyawan tetap Perum Pegadaian per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebanyak 6.630 orang dan 5.884 orang.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pokok-pokok kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dan Anak Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sebagai berikut:

a. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan No. VIII.G.7 yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) serta ketentuan internal perusahaan, terakhir sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 01A/AK.0.0012.0/2008 tanggal 2 Januari 2008 tentang Kebijakan Kode Perkiraan Perum Pegadaian yang diberlakukan mulai 1 Januari 2008.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasi disajikan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan hanya memiliki satu Anak Perusahaan yaitu PT Balai Lelang Artha Gasia (BLAG). Persentase kepemilikan Perusahaan pada Anak Perusahaan sebesar 99,99%. Total aset Anak Perusahaan per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp193.755.959 dan Rp473.241.019.

Porsi kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih Anak Perusahaan jumlahnya tidak signifikan (0,01%), oleh karena itu untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak menyajikan porsi kepemilikan minoritas.

Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi dan saldo antara Induk Perusahaan dan Anak Perusahaan telah dieliminasi. Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha.

b. Kas dan Bank

Kas dan bank seluruhnya dalam mata uang rupiah, meliputi saldo kas tunai serta simpanan giro yang terdapat di Bank. Tidak ada dana kas yang ditempatkan dalam bentuk simpanan berjangka di Bank.

c. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 adalah:

- a) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan pelapor (*holding companies, subsidiaries, fellow subsidiaries*).
- b) Perusahaan asosiasi (*associated company*)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

- c) Perorangan yang memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut (yang dimaksudkan dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor).
- d) Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi Dewan Komisaris, Direksi dan manajer dari perusahaan dan keluarga dekat orang-orang tersebut.
- e) Perusahaan di mana suatu kepentingan substansial dalam hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam alinea c) dan d) di atas atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut. Ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor adalah manajemen kunci yang sama dengan manajemen perusahaan pelapor.

Piutang Kepada Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa pada Laporan Keuangan konsolidasian, berasal dari Piutang TGR (Tuntutan Ganti Rugi) karyawan kunci di Perusahaan yang telah ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan piutang selisih kurang kas, karena terjadinya kesalahan prosedur, bukan dari transaksi penjualan atau pembelian.

d. Surat Berharga

Merupakan saham yang terdaftar di bursa efek, yang diklasifikasikan dalam kategori efek "Tersedia Untuk Dijual" dinyatakan sebesar nilai wajar (harga pasar) sesuai dengan PSAK No.50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

Laba atau rugi saham yang belum terealisasi atas kenaikan atau penurunan nilai wajar saham, diperhitungkan dan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas. Apabila terjadi penjualan atau pelepasan saham (terrealisasi), maka keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tersebut diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan.

e. Pinjaman Yang Diberikan

Mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah, maka untuk mempermudah administrasi dilakukan penggolongan Uang Pinjaman (UP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu:

Pinjaman Usaha Gadai

Pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besarnya pinjaman (pagu kredit), masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan. Berdasarkan Surat keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Sewa Modal, yang mulai berlaku tanggal 01 Oktober 2004, selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 1024/UI.1.00211/2006 tanggal 29 Desember 2006 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali dengan surat keputusan Direksi No. 56/UI.1.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Pebruari 2008 tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal				Jangka Waktu Kredit
		2008		2009		
		Per 15 hari	Maks.	Per 15 hari	Maks.	
A	20.000-150.000	0,75%	6%	0,75%	6%	120 hari
B	151.000-500.000	1,20%	9,60%	1,20%	9,60%	120 hari
C1	505.000-1.000.000	1,30%	10,40%	1,30%	10,40%	120 hari
C2	1.010.000-20.000.000	1,30%	10,40%	1,30%	10,40%	120 hari
D1	20.050.000-50.000.000	1%	8%	1%	8%	120 hari
D2	50.100.000-200.000.000	1%	8%	1%	8%	120 hari

Selama tahun 2009 Perusahaan tidak melakukan penyesuaian tarif sewa modal.

Selain pengenaan sewa modal, kepada nasabah dikenakan biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.348/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, setiap pemberian kredit dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

No	Golongan Pinjaman	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	AKN	1 % dari UP
2	AK	1 % dari UP
3	AG	1 % dari UP
4	BK	1 % dari UP
5	BG	1 % dari UP
6	CK1	1 % dari UP
7	CG1	1 % dari UP
8	C2	1 % dari UP
9	D1 & D2	1 % dari UP
10	D1 & D2 Mobil	1 % dari UP, Minimum Rp 50.000

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.312/UI.3.00213/2007 tanggal 09 Mei 2007 dan Surat Edaran Direksi No.32/UI.3.00213/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2007, pengenaan biaya administrasi dibedakan antara gadai baru dan ulang gadai sebagai berikut:

Gadai Baru

No	Kredit Lama Berlanjut	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	Semua Golongan (A, B, C dan D)	1 % dari UP
2	Khusus Barang Jaminan Mobil	1% dari UP Minimal Rp 50.000

Ulang Gadai

No	Kredit Lama Berlanjut	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	1- 30 hari	0,2 % dari UP
2	31 - 60 hari	0,4 % dari UP
3	61 - 90 hari	0,6 % dari UP
4	91 - 120 hari	0,8 % dari UP

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Berdasarkan SE No.49/OP.1.00211/2004 tanggal 11 Oktober 2004, besarnya prosentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, terakhir berdasarkan SE No. 06/UI.1.00211/2008, tanggal 30 Januari 2008 sebagai berikut:

- Golongan A 95 % dari nilai taksiran
- Golongan B 92 % dari nilai taksiran
- Golongan C 91 % dari nilai taksiran
- Golongan D 93 % dari nilai taksiran

Usaha Syariah

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No.27/US1.00/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Perubahan Biaya Administrasi Gadai Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Juli 2005, dan Surat Edaran Direksi No.22/US.1.00/2005 tanggal 26 Mei 2005 tentang Perubahan Tarif Ijarah dan Diskon yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2005, plafon marhun bih dan biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut:

Golongan	Plafon Marhun Bih (Rp)	Tarif Biaya Administrasi (Rp)	Jangka Waktu
A	20.000 - 150.000	500	120 hari
B	151.000 - 500.000	3.000	120 hari
C	501.000 - 1.000.000	5.000	120 hari
D	1.005.000 - 5.000.000	10.000	120 hari
E	5.010.000 - 10.000.000	15.000	120 hari
F	10.050.000 - 20.000.000	25.000	120 hari
G	20.100.000 - 50.000.000	30.000	120 hari
H	50.100.000 - 200.000.000	30.000	120 hari

dan besaran tarif ijarah dan diskon sebagai berikut:

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Diskon X Tarif	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & Alat RT	Kendaraan Bermotor
≥ 85% X Taks	-	85	90	95
80% - 84% X Taks	5 %	81	86	90
75% - 79% X Taks	10 %	77	81	86
70% - 74% X Taks	15 %	72	77	81
65% - 69% X Taks	20 %	68	72	76
60% - 64% X Taks	25 %	64	68	71
55% - 59% X Taks	30 %	60	63	67
50% - 54% X Taks	35 %	55	59	62
45% - 49% X Taks	40 %	51	54	57
40% - 44% X Taks	45 %	47	50	52
35% - 39% X Taks	50 %	43	45	48
30% - 34% X Taks	55 %	38	41	43

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Diskon X Tarif	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & Alat RT	Kendaraan Bermotor
25% - 29% X Taks	60 %	34	36	38
20% - 24% X Taks	65 %	30	32	33
15% - 19% X Taks	70 %	26	27	29
10% - 14% X Taks	75 %	21	23	24
< 10% X Taks	80 %	17	18	19

Perhitungan Ijarah (jasa simpan) adalah:

$$\frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp 10.000}} \times \text{Tarif Ijarah Setelah Diskon} \times \frac{\text{Jangka Waktu}}{10 \text{ hari}}$$

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No.64/US.1.00/2006 tanggal 15 Desember 2006 tentang Perubahan Biaya Administrasi yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007, biaya administrasi ditetapkan sebagai berikut:

Golongan	Plafon Marhun Bih (Rp)	Tarif Biaya Administrasi (Rp)	Jangka Waktu
A	20.000 - 150.000	1.000	120 hari
B	151.000 - 500.000	5.000	120 hari
C	501.000 - 1.000.000	8.000	120 hari
D	1.005.000 - 5.000.000	16.000	120 hari
E	5.010.000 - 10.000.000	25.000	120 hari
F	10.050.000 - 20.000.000	40.000	120 hari
G	20.100.000 - 50.000.000	50.000	120 hari
H	50.100.000 - 200.000.000	60.000	120 hari

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.141/US.1.00/2007 tanggal 1 Agustus 2007 dan Surat Edaran Direksi No.44/US.1.00/2007 tanggal 24 Agustus 2007 tentang Diskon Biaya Administrasi Ulang Rahn (Ulang Gadai), sehingga biaya administrasi setelah diskon untuk Ulang Rahn menjadi sebagai berikut:

Golongan	Plafon Marhun Bih (Rp)	Tarif Biaya Administrasi Rahn Baru (Rp)	Tarif Biaya Administrasi Setelah Diskon Untuk Ulang Rahn			
			1-30 hari (Rp)	31-60 hari (Rp)	61-90 hari (Rp)	91-120 hari (Rp)
A	20.000- 150.000	1.000	500	600	700	800
B	151.000- 500.000	5.000	2.500	3.000	3.500	4.000
C	501.000-1.000.000	8.000	4.000	4.800	5.600	6.400
D	1.005.000-5.000.000	16.000	8.000	9.600	11.200	12.800
E	5.010.000-10.000.000	25.000	12.500	15.000	17.500	20.000
F	10.050.000-20.000.000	40.000	20.000	24.000	28.000	32.000
G	20.100.000-50.000.000	50.000	25.000	30.000	35.000	40.000
H	50.100.000-200.000.000	60.000	30.000	36.000	42.000	48.000

Berdasarkan Surat Edaran No.19/US.1.00/2008 terdapat penambahan golongan Marhun Bih dengan plafon ≤ 14% dari taksiran dan ditetapkan sebagai Golongan I.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Usaha Lain

Kredit Kreasi dan Krasida serta Krista (PYD Golongan F)

Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadaai), merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadaai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Besaran uang pinjaman Kredit Kreasi berdasarkan Surat Edaran Direksi No.61/US.2.00/2006 tanggal 13 Desember 2006 maksimum kredit kreasi sebesar Rp100.000.000 per nasabah, sedangkan Krasida terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.190/US.2.00/2006 tanggal 28 September 2006, batas minimum uang pinjaman kredit krasida sebesar Rp20.000.000 per nasabah.

Secara umum Kreasi dan Krasida mempunyai kemiripan dalam hal pelaksanaan operasionalnya yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Kreasi	Krasida
1	Tujuan kredit	Produktif	Produktif
2	Waktu pelayanan	3 hari	1-2 jam
3	Tarif sewa modal	10,80% / tahun flat	10,80% / tahun flat
4	Biaya administrasi	1% dari Uang Pinjaman	1% dari Uang Pinjaman
5	Biaya lainnya	Notaris, akta fidusia, cek fisik, asuransi, meterai	Meterai dan cek fisik untuk kendaraan bermotor
6	Jenis barang jaminan	BPKB kendaraan bermotor	Perhiasan emas dan kendaraan bermotor
7	Penyimpanan BJ	Dipakai nasabah untuk alat produksi	Disimpan di Pegadaian
8	Besarnya pinjaman	70% dari nilai agunan	95% dari nilai agunan
9	Jangka waktu kredit	12 - 36 bulan	12 - 36 bulan
10	Cara pelunasan	Angsuran tetap	Angsuran tetap

Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga), merupakan pinjaman (Kredit) dalam jangka waktu 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada usaha rumah tangga sangat mikro (gurem) yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja.

Besaran uang pinjaman Kredit Krista berdasarkan Surat Edaran Direksi No.91/UL.2.00.22 2/2008 tanggal 24 desember 2008 maksimum kredit Krista Rp5.000.000, terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.65/UL.2.00.22.2/2009 tanggal 24 Agustus 2009, batas maksimum uang pinjaman kredit Krista sebesar Rp8.000.000 per nasabah. Secara umum pelaksanaan operasional Krista sebagai berikut :

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

No.	Uraian	Kriteria
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 3 Hari
3	Tarif Sewa Modal	12% per tahun flat
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman
5	Biaya Lainnya	Asuransi, materai
6	Jenis Barang Jaminan	Tanpa Barang Jaminan
7	Besarnya Pinjaman	Berdasarkan kelayakan usaha dan disyaratkan mempunyai agunan minimal sebesar 20% dari pinjaman.
8	Jangka Waktu Kredit	12, 24 dan 36 bulan
9	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap

Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)

Kremada adalah kredit yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang hanya dimanfaatkan untuk perumahan yang mencakup perbaikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan lingkungan perumahan. Dana berasal dari Pemerintah (Kementerian Negara Perumahan Rakyat). Penyaluran Kredit ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 062/UL.2.00.22.2/2006, tanggal 7 Desember 2006, tentang Penyaluran Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA).

Kredit Kresna (Kredit Serba Guna)

Kresna atau Kredit Serba Guna, merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing pegawai (kemampuan mengangsur) sehingga tidak terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai, sedangkan jangka waktu kredit maksimum 36 bulan. Batas maksimum Uang Pinjaman dan jangka waktu kredit diatur SK Direksi No.213/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

Adapun tingkat bunga pinjaman adalah 12 % per tahun flat. Tarif sewa modal Kresna ditetapkan melalui SK Direksi No. 212/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

SK Direksi No. 13/UL.3.00.22.3/03. tgl. 26 Januari 2004 ditetapkan Biaya Administrasi Kresna sebesar 0,5% dari Pinjaman, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2004.

Kredit Tunda Jual Gabah (PYD Golongan G)

Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG) merupakan kredit yang diberikan kepada petani atas dasar hukum gadai melalui agen-agen yang ditunjuk Perum Pegadaian dengan barang jaminan berupa gabah kering giling. Tujuan pemberian KTJG adalah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melakukan pengolahan sawahnya mengingat belum diperolehnya dana dari hasil penjualan produk gabah yang sengaja ditunda penjualannya sambil menunggu kenaikan harga gabah yang cenderung menurun setelah panen.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Unit Gadai Efek

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.23/UL.3.0022.3/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Unit Gadai Efek, telah dibentuk unit usaha baru yang bergerak dibidang pelayanan gadai dengan Barang Jaminan Saham/Efek. Unit usaha baru ini berkedudukan di Kantor Pusat Perum Pegadaian, Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta.

SK Direksi No. 44E/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Kewenangan Dalam Penetapan dan Pemutusan Uang Pinjaman, ditetapkan anggota-anggota Komite Pemutus Kredit serta ditetapkan batas-batas wewenang masing-masing atas besaran UP yang dapat diputuskan. Secara umum pelaksanaan Gadai Efek sebagai berikut:

No.	Uraian	Gadai Efek
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 2 Hari
3	Tarif Sewa Modal	Harian, minimal 15 hari
4	Biaya Administrasi	0,125% per jangka waktu 90 hari
5	Biaya Lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Saham dalam LQ 45, per transaksi untuk 1 jenis saham.
7	Plafon pinjaman	Per Transaksi Minimum Rp50.000.000 & Maksimum Rp50.000.000.000 dihitung paling banyak 50% dari harga pasar saham (closing price 1 hari sebelumnya).
8	Nasabah	Institusi atau perorangan
9	Jangka Waktu Kredit	90 hari
10	Top Up Call	65%
11	Eksekusi	80%

Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Usaha No. 91/LB.1.00/2008 tanggal 2 Desember 2008 penyaluran kredit gadai efek dihentikan sampai dengan adanya keputusan Direksi lebih lanjut.

KUCICA

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA) adalah jasa pengiriman uang, bekerja sama dengan Western Union, perusahaan yang mempunyai jaringan luas, yang berkedudukan di Kanada. SE.54/UL.2.00.22.2/2007, tanggal 11 Oktober 2007, tentang Pelaksanaan Jasa Pengiriman Uang di Kantor Cabang Perum Pegadaian, menetapkan dimulainya operasi Jasa Kucica serta berlakunya Pedoman Operasional Kucica.

ARRUM

SK. Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO Arrum dan No. 03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan Maksimum nilai pembiayaan ARRUM, menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit Arrum dengan jaminan fidusia, maksimum Uang Pinjaman Rp.50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan. Pasarnya adalah para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah. Biaya Administrasi Arrum adalah sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

No	Jenis Barang Jaminan	Biaya Administrasi
1	Sepeda Motor/ Scooter	70.000
2	Mobil	200.000

Sedangkan tarif Ijarah dihitung dengan rumus sbb. :

$$\text{Ijarah} = \frac{\text{Taksiran}}{100.000} \times \text{Rp.700} \times \text{Jangka waktu (bulan)}$$

MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 54/LB.1.00/2008 tentang Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi tanggal 25 September 2008, produk yang disebut MULIA ini diluncurkan dan mulai dioperasikan pada tanggal 28 Oktober 2008. Pembiayaan MULIA adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan MULIA adalah emas batangan bersertifikat interasional (LBMA-London Bullion Market Asosiation) dengan jenis/varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram.

Pembiayaan murabahah ini mengenakan margin atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Margin atas transaksi pembiayaan murabahah tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009 perihal jangka waktu, uang muka dan margin pembiayaan MULIA. Berikut penetapan Margin Pembiayaan MULIA :

Jangka Waktu	Uang Muka	Margin
1 bulan	≥ 20% - 100%	3.00 %
3 bulan	≥ 25% - 30%	3.50 %
	> 30% - 40%	3.25 %
	> 40% - 50%	3.25 %
	> 50% - 60%	3.00 %
	> 60% - 70%	3.00 %
	> 70% - 80%	2.90 %
	> 80% - 90%	2.80 %
	> 90% - 100%	2.50 %
6 bulan	≥ 25% - 30%	6.00 %
	> 30% - 40%	5.90 %
	> 40% - 50%	5.80 %
	> 50% - 60%	5.70 %
	> 60% - 70%	5.60 %
	> 70% - 80%	5.50 %
	> 80% - 90%	5.00 %
	> 90% - 100%	4.00 %
12 bulan	≥ 30% - 40%	12.00 %
	> 40% - 50%	11.50 %
	> 50% - 60%	11.00 %
	> 60% - 70%	10,50 %
	> 70% - 80%	10.00 %
	> 80% - 90%	8.50 %

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Jangka Waktu	Uang Muka	Margin
	> 90% - 100%	7.00 %
18 bulan	≥ 35% - 40%	18.00 %
	> 40% - 50%	17.00 %
	> 50% - 60%	16.00 %
	> 60% - 70%	15.00 %
	> 70% - 80%	13.50 %
	> 80% - 90%	11.00 %
	> 90% - 100%	7.00 %
24 bulan	≥ 40% - 50%	22.00 %
	> 50% - 60%	20.50 %
	> 60% - 70%	18.50 %
	> 70% - 80%	16.00 %
	> 80% - 90%	12.50 %
	> 90% - 100%	7.80 %
36 bulan	≥ 45% - 50%	29.00 %
	> 50% - 60%	28.50 %
	> 60% - 70%	24.00 %
	> 70% - 80%	20.00 %
	> 80% - 90%	15.00 %
	> 90% - 100%	8.60 %

Atas transaksi pelunasan pembiayaan MULIA dipercepat maka Direksi Pegadaian menetapkan Prosentase Potongan Margin MULIA yang diatur dalam Surat Edaran No. 73/Lb.1.00/2008 perihal Potongan Marjin MULIA. Berikut Tabel Potongan Marjin MULIA :

Prosentase Potongan Marjin MULIA (dalam %)

Bulan Ke-	Jangka Waktu Pembiayaan				
	6	12	18	24	36
1	50.00	75.00	83.00	87.50	91.66
2	40.00	68.19	78.12	83.70	89.04
3	30.00	61.38	73.24	79.90	86.42
4	20.00	54.57	68.36	76.10	83.80
5	10.00	47.76	63.48	72.30	81.18
6	0.00	40.95	58.60	68.50	78.56
7		34.14	53.72	64.70	75.94
8		27.33	48.84	60.90	73.32
9		20.52	43.96	57.10	70.70
10		13.71	39.08	53.30	68.08
11		6.90	34.20	49.50	65.46
12		0.00	29.32	45.70	62.84
13			24.44	41.90	60.22
14			19.56	38.10	57.60
15			14.68	34.30	54.98
16			9.80	30.50	52.36
17			4.92	26.70	49.74
18			0.00	22.90	47.12
19				19.10	44.50
20				15.30	41.88
21				11.50	39.26
22				7.70	36.64

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Tahun ke-	Jangka Waktu Pembiayaan				
	6	12	18	24	36
23				3.90	34.02
24				0.00	31.40
25					28.78
26					26.16
27					23.54
28					20.92
29					18.30
30					15.68
31					13.06
32					10.44
33					7.82
34					5.20
35					2.58
36					0.00

f. Cadangan Penyisihan Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai

Pinjaman Gadaai yang bermasalah adalah PYD yang barang jaminannya dijadikan sebagai barang bukti perkara oleh pihak berwajib sampai ada keputusan dari Pengadilan. Nilai yang diakui sebagai cadangan adalah sebesar uang pinjaman yang tercatat dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan dibukukan pada saat Barang Jaminan diambil oleh Pihak berwajib untuk dijadikan sebagai barang bukti perkara di Pengadilan.

Pinjaman fidusia bermasalah adalah pinjaman yang mengalami tunggakan lebih dari 3 bulan tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat diklaim ke pihak asuradur. Dalam hal ini penyisihan kerugian dibentuk dan akan dipulihkan kemudian setelah perusahaan berhasil mengeksekusi jaminan fidusia terkait.

Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai merupakan penyisihan atas piutang TGR kepada karyawan yang sudah mendapatkan SK pembebanan Direksi (tidak termasuk didalamnya KPYD/K4TGR).

g. Persediaan

Persediaan inventaris yang merupakan meubelair kantor, meubelair rumah, mesin kantor, komputer, jarum uji emas yang siap digunakan namun belum didistribusikan ke kantor cabang.

Persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan dan dicatat sebagai beban pada saat digunakan.

Persediaan emas dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan harga pasar.

h. Aset Tetap

Mengacu ketentuan terbaru standar akuntansi atas aset tetap yang terdapat dalam PSAK 16 Revisi 2007, Perusahaan menetapkan kebijakan untuk mencatat dan melaporkan aset tetap dengan menggunakan Model Biaya.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Atas dasar model biaya, aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan (*historical cost*) dikurangi akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan, kecuali tanah. Aset tetap selain bangunan disusutkan berdasarkan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), sedangkan bangunan disusutkan berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) sebagai berikut:

- Bangunan berupa gedung, rumah dinas, gudang, pagar dan prasarana bangunan lainnya yang permanen disusutkan 5% per tahun dari nilai perolehan.
- Bangunan yang tidak permanen disusutkan 10% per tahun dari nilai perolehan.
- Inventaris dengan masa manfaat 4 tahun disusutkan 50% per tahun dari nilai buku.
- Kendaraan bermotor roda dua dengan masa manfaat 4 tahun disusutkan 50% per tahun dari nilai buku.
- Kendaraan bermotor roda empat dengan masa manfaat 8 tahun disusutkan 25% per tahun dari nilai buku.

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Laba atau rugi akibat penjualan aset tetap dicatat dalam laporan laba-rugi tahun berjalan.

Pembelian/pengadaan barang inventaris dengan harga satuan senilai Rp1.000.000 atau lebih dikapitalisasi, sedangkan bila kurang dari Rp1.000.000 dibebankan pada periode berjalan.

- Perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya mengubah bentuk/bestek dan memperpanjang umur ekonomis yang nilainya Rp20.000.000 atau lebih dikapitalisasi, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya tidak mengubah bentuk/bestek dan tidak memperpanjang umur ekonomis serta hanya bersifat pemeliharaan walaupun nilainya lebih besar dari Rp20.000.000 dibebankan pada periode berjalan.

Untuk rehabilitasi ringan yang tidak menambah atau memperpanjang umur ekonomis/ masa manfaat dari bangunan yang bersangkutan, diakui sebagai beban umum.

Aset Dalam Penyelesaian

Akumulasi biaya sehubungan dengan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi berat bangunan gedung kantor dan rumah jabatan dikapitalisasi. Sebelum adanya berita acara penyelesaian pekerjaan, pengeluaran-pengeluaran yang terjadi dibukukan sebagai Aset Dalam Penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset Tetap setelah adanya berita acara penyelesaian pekerjaan. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

Aset Tetap Yang Dikelola Pihak Lain Dalam Rangka Kerja Sama Operasi (KSO)

Tanah yang diserahkan oleh Perusahaan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dicatat sebagai Aset KSO dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar biaya perolehannya. Aset yang dibangun oleh Mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan Mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

Perusahaan mencatat pengalihan aset yang dibangun oleh mitra KSO sebagai aset tetap dengan mengkredit pendapatan pengalihan aset KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Beban Ditangguhkan

Beban ditangguhkan adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu:

- Beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.
- Beban pengurusan legal hak atas tanah, diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah tersebut. Jenis atas tanah ini adalah hak guna bangunan yang mempunyai masa manfaat selama 20 tahun.
- Biaya RUF (*Revolving Underwriter Facility*) adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman sindikasi seperti biaya arranger, komitmen bank dan konsultan hukum/notaris, diamortisasi sepanjang jangka waktu fasilitas pinjaman RUF yaitu lima tahun.

j. Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP)

Peraturan mengenai lelang barang jaminan dan pengelolaan Barang Sisa Lelang (BSL) berlaku ketentuan Surat Edaran Direksi No.48/OP.1.00211/2003 dan No.49/OP.1.00211/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi No.44/UI.1.00211/2006 tanggal 03 Oktober 2006.

Barang jaminan yang tidak laku dijual/lelang dibukukan sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP). BLP adalah barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo (barang kasep) dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perusahaan sebesar Harga Limit Lelang (HLL).

BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang Penjual/Pembeli 2% + Uang Miskin 0,7%. Bea Lelang dan Uang Miskin dihitung dari harga yang terbentuk pada saat lelang, yang kemudian disetor ke Kas Negara. Selanjutnya sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah ditetapkan/diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2006 dan Surat Edaran Direksi No.44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006 setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin 0% atau dengan kata lain lelang tidak dikenakan uang miskin, dengan demikian untuk selanjutnya BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%.

BLP harus terjual dan penjualan dilakukan oleh Panitia Penjualan BLP. Pelaksanaan Penjualan dapat dilakukan oleh Kantor Cabang yang mempunyai harga pasar tertinggi dengan cara di bawah tangan atau dimutasi ke Cabang lain dan dapat dijual dengan cepat.

Harga penjualan ditetapkan sebagai berikut:

- BLP perhiasan emas, harga penjualannya tergantung pada harga yang tertinggi antara Harga Pasar Pusat untuk Lelang (HPPL) dan Harga Pasar Daerah untuk Lelang (HPPDL).
- BLP non emas, penjualannya ditetapkan minimal sebesar harga pembelian (H.Pb.BLP). Penjualan di bawah Harga Hembelian (H.Pb) harus mendapat persetujuan dari Pemimpin Wilayah.

Penjualan BLP di bawah tangan adalah penjualan BLP yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses lelang, apabila di cabang bersangkutan tidak ada calon pembeli, BLP akan dikirim ke cabang lain dengan prosedur yang sama dengan maksud agar memperoleh harga yang paling menguntungkan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Penjualan BLP diakui pada saat terjadinya pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, jika hasil penjualan BLP lebih tinggi/(rendah) dari harga perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai laba/(rugi) untuk periode berjalan dan dibukukan pada pendapatan/beban lainnya.

k. Penyelesaian PYD Bermasalah

PYD bermasalah adalah pinjaman yang diketahui barang jaminannya ternyata ditaksir terlalu tinggi atau barang jaminannya berupa barang palsu. Setelah diketahui terjadinya kasus ini, maka Pimpinan Wilayah yang bersangkutan membentuk tim yang bertugas melakukan taksasi ulang agar dapat ditentukan nilai pasar wajar yang sebenarnya dari barang jaminan tersebut.

Berdasarkan nilai barang jaminan yang telah ditaksasi ulang, dilakukan pemindahan saldo dari akun PYD ke akun Barang Jaminan Yang Disisihkan (BJYD). Adapun potensi kerugian yang terjadi yaitu sebesar selisih antara nilai Uang Pinjaman (UP) yang Diberikan beserta Sewa Modal (SM) terhadap nilai hasil taksasi akan diproses sebagai beban kepada pegawai yang bertindak sebagai pelaku dalam kasus ini. Sementara menunggu selesainya proses penetapan tuntutan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan jumlah potensi kerugian direklasifikasi dari PYD ke pos Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR).

Sesuai ketentuan yang berlaku, BJYD harus segera dijual dan apabila hasil penjualannya ternyata melebihi nilai taksasi, maka laba atas penjualan BJYD tersebut akan mengurangi angka KPYD/K4TGR.

Terhadap BJYD, manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian, karena BJYD sudah dinyatakan dengan nilai pasar wajarnya.

Setelah dilakukan penetapan ganti rugi, maka selanjutnya saldo Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR) akan dipindahkan ke akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Penyelesaian atas piutang TGR selanjutnya dilakukan melalui pemotongan gaji tiap bulan.

l. Pinjaman Sindikasi (RUF)

Pinjaman *Revolving Underwriting Facility* (RUF) merupakan fasilitas pinjaman secara revolving yang diberikan oleh para Bank Fasilitas RUF kepada debitur berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Hutang RUF dicatat sebesar pokok pinjaman, sedangkan beban bunga yang terhutang pada tanggal neraca, dicatat sebagai Beban Yang Masih Harus Dibayar.

m. Pinjaman Obligasi

Pinjaman Obligasi adalah hutang Perusahaan yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Hutang obligasi disajikan sebesar nilai nominal setelah memperhitungkan amortisasi premium atau diskonto.

Pinjaman Obligasi yang akan jatuh tempo pembayarannya dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, direklasifikasi menjadi kelompok kewajiban lancar.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

n. Biaya Emisi Obligasi

Biaya emisi obligasi merupakan biaya transaksi yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi bersih obligasi tersebut. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang harus diamortisasi selama jangka waktu obligasi dengan menggunakan metode garis lurus. Amortisasi atas diskonto atau premium dicatat pada akun Beban Bunga dan Provisi.

o. Estimasi Kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan jangka panjang yang diberikan Perusahaan meliputi:

1. Pensiun
2. Pesangon
3. Cuti Besar

Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pegadaian. Pendanaan atas program ini diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai sebesar 4,75% per bulan dan kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 11,75% dari gaji pokok pegawai. Peraturan Dana Pensiun Pegadaian diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. Kp 2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 dan No. Kp.2/8/50 tanggal 5 April 1999 dan peraturan ini telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan No. 336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Pesangon

Perusahaan juga memberikan imbalan berupa jumlah *lumpsum* yang diberikan kepada pegawai tetap yang memasuki usia pensiun. Jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan. Peraturan tentang Uang Pesangon Persiapan Pensiun Pegawai (UP4) diatur dalam Peraturan Direksi Perum Pegadaian No. 1817/Kp300325/2000 tanggal 6 Juni 2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK).

Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tetap. Ketentuan hak dan besarnya Uang Cuti Besar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 12/SDM.300323/2009 tanggal 2 Januari 2009.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Perusahaan menerapkan PSAK 24 Revisi 2004 untuk mengestimasi beban dan kewajiban yang timbul dari penyelenggaraan kedua program tersebut. Perhitungan estimasi beban dan kewajiban tersebut menggunakan jasa aktuaris independen. Adapun kebijakan akuntansi yang dianut adalah sebagai berikut:

- (1) metode aktuarial yang dipergunakan : *Projected Unit Credit*
- (2) kewajiban imbalan kerja adalah nilai tunai kewajiban manfaat pensiun dan pesangon dikurangi nilai wajar aktiva program, serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.
- (3) pengakuan biaya imbalan kerja meliputi biaya jasa kini, biaya bunga, imbalan hasil aset program, keuntungan/kerugian aktuarial, biaya jasa lalu.
- (4) keuntungan dan kerugian aktuarial yang dibebankan adalah jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program.
- (5) tarif diskonto : mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berjangka panjang,
- (6) tarif kenaikan gaji : mengacu pada rata-rata kenaikan berkala gaji pokok terkini,
- (7) usia pensiun : 56 tahun.

Dengan menggunakan acuan kebijakan akuntansi yang sama, Perusahaan juga mengevaluasi kecukupan imbalan jangka panjang yang diberikannya dengan ketentuan imbalan minimum yang wajib diberikan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 "Ketenagakerjaan" pasal 156 dan pasal 167. Apabila nilai imbalan dari kedua program tersebut, kurang dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka selisihnya akan dicatat dan dilaporkan sebagai tambahan beban dan kewajiban imbalan jangka panjang menurut undang-undang.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

- Pendapatan sewa modal usaha gadai dan jasa simpan syariah diakui dengan menggunakan metode akrual.
- Pendapatan sewa modal atas pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.
- Pendapatan administrasi pinjaman dan marhun bih diakui pada saat transaksi terjadi yang dibebankan langsung kepada nasabah pada saat penyaluran pinjaman atau marhun bih.
- Pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan periode sewa dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

q. Pajak Penghasilan Badan

Taksiran pajak penghasilan badan pada perhitungan laba-rugi, ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Perusahaan menerapkan metode penangguhan pajak dalam menghitung taksiran pajak penghasilan sesuai dengan PSAK No.46 mengenai "Akuntansi Pajak Penghasilan". yang mensyaratkan pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan atas pengaruh pajak dimasa mendatang yang berasal dari perbedaan temporer antara dasar pajak dan dasar pelaporan komersial dari aset dan kewajiban serta akumulasi rugi fiskal yang dapat dikompensasi.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Pada tahun 2008 dikeluarkan Undang-Undang pajak penghasilan terbaru No. 36 tahun 2008, menyatakan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen) di tahun 2008 dan 25% (dua puluh delapan persen) di tahun 2010. Undang-undang tersebut menggantikan aturan Undang-undang pajak penghasilan sebelumnya yang menetapkan tarifnya sebesar 30%. Untuk itu pada tahun 2008 dan 2009 aset dan kewajiban pajak tangguhan dinyatakan dengan tarif 28% dan 25%. Adapun penyesuaian penurunan tarif tersebut dibebankan atau dikreditkan dalam tahun buku 2008 dan 2009.

r. Penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 42 dan 43, penggunaan laba Perusahaan Umum (Perum) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 Bab III Pasal 59 dan 60, penggunaan laba Perum Pegadaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai berikut:

Pasal 59

- Setiap tahun buku, Perum Pegadaian wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan wajar lainnya.
- 45% dari sisa penyisihan laba bersih dipakai untuk cadangan umum sampai mencapai sekurang-kurangnya dua kali lipat dari modal yang ditempatkan, dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan/sumbangan ganti rugi.
- Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 60

- Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana tersebut dalam pasal 59, disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
- Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara, wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara BUMN dan Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-383/MBU/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2009,
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-487/MBU/2008 tanggal 9 Juni 2008 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2008.

pembagian laba ditetapkan sebagai berikut:

	No.S-383/ MBU/2009	No.S-487/ MBU/2008
a. Dana Pembangunan Semesta	30,00 %	30,08 %
b. Cadangan Tujuan	14,62 %	35,16 %
c. Cadangan Umum	53,38 %	26,58 %
d. Program Kemitraan	1 %	1,75 %
e. Program Bina Lingkungan	1 %	1,75 %
f. Tantiem	-	0,61 %
g. Jasa Produksi	-	4,08 %
	<u>100,00%</u>	<u>100,00 %</u>

Mengacu pada PSAK 24 revisi 2004, Manajemen mencatat pembagian jasa produksi dan tantiem sebagai beban pada tahun yang bersangkutan, dan bukan sebagai distribusi laba.

s. Informasi Segmen

Informasi segmen disajikan berdasarkan pengelompokkan geografis, yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) lain.

t. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Oleh karena adanya ketidakpastian dalam membuat estimasi tersebut, hasil aktual yang akan dilaporkan dimasa mendatang mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

3. KAS DAN BANK

Saldo kas dan bank terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Kas	168.498.282.683	108.717.730.370
- Bank	99.490.219.281	104.092.926.862
Jumlah	267.988.501.964	212.810.657.232

Saldo kas tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Kas Kantor Pusat	129.871.000	646.522.300
- Kas Kantor Wilayah/Cabang	168.362.569.483	108.061.807.770
- PT Balai Lelang Artha Gasia (BLAG)	5.842.200	9.400.300
Jumlah Kas	168.498.282.683	108.717.730.370

Saldo bank seluruhnya dalam mata uang rupiah dapat dirinci sebagai berikut:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- PT BRI (Persero) Tbk	66.044.290.696	74.943.993.451
- PT Bank Central Asia Tbk	7.454.436.789	10.112.671.032
- PT Bank Niaga Tbk	3.608.106.603	517.200.458
- PT BNI 46 (Persero) Tbk	4.175.515.093	5.138.034.866
- PT Bank Bukopin Tbk	428.821.433	314.251.848
- PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	1.477.956.033	1.563.422.810
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.649.708.996	3.526.718.668
- PT Bank Syariah Mandiri	4.121.632.063	2.835.917.421
- PT Bank Danamon	68.397.975	68.608.139
- Bank Lainnya di Daerah	461.353.600	5.072.108.169
Jumlah Bank	99.490.219.281	104.092.926.862

Tingkat bunga jasa giro masing-masing bank tersebut diatas berkisar sebagai berikut:

	31-12-2009	31-12-2008
Bunga Jasa Giro (p.a)	0,50% - 8,00%	0,75% - 3,00%

Seluruh kas dan bank tersebut di atas, tidak dibatasi penggunaannya, dan tidak ada simpanan yang ditempatkan pada Bank yang memiliki hubungan istimewa dengan Perusahaan.

Seluruh kas tunai (*cash in safe*) dan kas dalam perjalanan (*cash in transit*) telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat perampokan, penodongan dan kehilangan dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

- Kas Tunai (*Cash In Safe*)
 Nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000 per lokasi pertahun dan Rp52.675.629.715 total *agregat* per tahun.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

3. KAS DAN BANK (lanjutan)

- Kas Dalam Perjalanan (*Cash In Transit*)
Nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000 per lokasi pertahun dan Rp52.675.629.715 total *agregat* per tahun.

Selain itu Perusahaan telah mengasuransikan seluruh dana kas termasuk, barang jaminan, aset dan barang inventaris Perusahaan yang berada di seluruh kantor Perum Pegadaian dan tempat lain kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat penggelapan/kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawan Perum Pegadaian (*fidelity guarantee/standard Jasindo*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp200.000.000 setiap kejadian/karyawan/lokasi maksimum Rp1.000.000.000 per tahun.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

Perusahaan terus menambah jaringan usahanya, sehingga sampai dengan akhir 2009 telah terdapat 789 kantor cabang dan 2.508 kantor cabang pembantu di seluruh wilayah operasi Perusahaan sehingga kebijakan ini menyebabkan kenaikan kas tunai untuk pelayanan penyediaan dana kepada nasabah.

4. UANG MUKA

Merupakan saldo uang muka per 31 Desember 2009 dan 2008 yang terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Uang Muka Dinas	4.126.096.410	4.067.413.479
- Uang Muka Pembelian MULIA	7.510.570.751	-
- Uang Muka Lainnya	304.052.155	158.376.900
Jumlah	11.940.719.316	4.225.790.379

Uang muka dinas merupakan uang muka kerja yang dikeluarkan di bulan Desember tahun berjalan dan dipertanggungjawabkan di bulan Januari tahun berikutnya sesuai dengan Surat Edaran Direksi No.06/TR.4.00.100/2005 tanggal 21 Maret 2005.

Uang muka pembelian MULIA merupakan Uang Muka Pembelian Logam Mulia ke PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.

5. PAJAK DIBAYAR DIMUKA

Saldo pajak dibayar dimuka per 31 Desember 2009 sebesar Rp 39.396.710.924 dan 31 Desember 2008 bersaldo nihil. Saldo pada tahun 2009 merupakan saldo kelebihan pembayaran angsuran PPh 29 Badan tahun 2009, dimana jumlah angsuran PPh masa/Pasal 25 badan selama 12 (dua belas bulan) yaitu Rp357.606.095.004 dan nilai PPh 29 Badan tahun 2009 sebesar Rp318.209.384.080 (lihat catatan 38).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (PYD)

Merupakan saldo pinjaman yang diberikan kepada nasabah (semuanya dalam mata uang Rupiah) per 31 Desember 2009 dan 2008 yang belum jatuh tempo dan diklasifikasikan berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Usaha Gadai		
- Golongan A	34.056.455.787	54.405.628.400
- Golongan B	609.044.976.641	584.441.949.400
- Golongan C	9.961.149.220.425	6.806.339.680.800
- Golongan D	1.248.804.996.900	751.429.549.000
	<u>11.853.055.649.753</u>	<u>8.196.616.807.600</u>
Usaha Gadai Syariah		
- Marhun Bih Gol. A	628.494.500	615.848.800
- Marhun Bih Gol. B	19.679.613.577	14.823.494.450
- Marhun Bih Gol. C	77.152.706.739	40.314.860.650
- Marhun Bih Gol. D	306.959.723.750	183.983.900.850
- Marhun Bih Gol. E	135.255.386.250	80.107.941.850
- Marhun Bih Gol. F	89.929.421.550	47.576.444.450
- Marhun Bih Gol. G	53.323.703.450	28.392.253.450
- Marhun Bih Gol. H	23.793.600.000	7.836.400.000
- Marhun Bih Gol. I	99.265.000	38.720.000
	<u>706.821.914.816</u>	<u>403.689.864.500</u>
Usaha Lain		
- Golongan E (Kresna)	142.389.462.248	75.685.771.327
- Golongan F (Kreasi /Krasida/krista)	1.330.660.791.102	595.128.780.357
- Golongan F (Krasida)	86.579.118.450	51.401.987.900
- Golongan G (kredit tunda jual gabah)	452.930.000	644.425.000
- Gadai Efek	65.386.166.552	155.567.800.000
- KUCICA	1.630.133.549	15.478.715.587
- Mulia	7.655.875.853	174.115.233
- Penyisihan Pinjaman Kreasi	-	(110.822.677)
	<u>1.634.754.477.754</u>	<u>893.970.772.727</u>
Jumlah	<u><u>14.194.632.042.323</u></u>	<u><u>9.494.277.444.827</u></u>

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (PYD) (lanjutan)

Kolektibilitas PYD dan Marhun Bih per 31 Desember 2009 dan 2008 sebagai berikut:

	Tunggakan Angsuran	Umur (Hari)	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
<u>Lancar</u>				
PYD				
- Gol A,B,C, D dan G		<120	11.853.508.579.753	8.197.261.232.600
- Gol E (Kresna)	Tidak ada	-	142.389.462.248	75.685.771.327
- Gol F (Kreasi/Krasida/krista)	Tidak ada	-	1.289.181.964.552	630.634.827.257
- Gadai Efek		<90	65.386.166.552	155.567.800.000
- Mulia			7.655.875.853	174.115.233
- KUCICA			1.630.133.549	15.478.715.587
Marhun Bih				
Gol A,B,C, D, E, F G dan H	-	<120	706.821.914.816	403.689.864.500
			14.066.574.097.323	9.478.492.326.504
<u>Kurang Lancar</u>				
- Gol E (Kresna)	-	-	-	-
- Gol F (Kreasi/Krasida/krista)	Satu kali	-	75.905.403.000	1.713.592.018
			75.905.403.000	1.713.592.018
<u>Diragukan</u>				
- Gol E (Kresna)	-	-	-	-
- Gol F (Kreasi /Krasida/krista)	2-3 kali	-	29.970.090.000	4.162.843.320
			29.970.090.000	4.162.843.320
<u>Macet</u>				
PYD				
- Gol A,B,C, D dan G		>120	-	-
- Gol E (Kresna)	-	-	-	-
- Gol F (Kreasi/Krasida/krista)	>3 kali	-	22.182.452.000	10.019.505.662
			22.182.452.000	10.019.505.662
Marhun Bih				
Gol A,B,C, D dan G	-	>120	-	-
Penyisihan Pinjaman Kreasi				(110.822.677)
			14.194.632.042.323	9.494.277.444.827

Seluruh PYD dijamin oleh barang jaminan bergerak (lebih dari 90% adalah barang jaminan emas/likuid) yang ditaksir berdasarkan nilai wajar, apabila nasabah tidak melunasi pinjaman pada tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang.

Manajemen berpendapat bahwa Barang Jaminan yang diterima atas PYD yang diberikan cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya PYD tersebut.

Untuk pemberian PYD Kreasi dan PYD Krista telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) terhadap risiko kerugian akibat tidak tertagihnya PYD tersebut. Terhadap rekening pinjaman yang sudah diupayakan penagihannya namun sulit diselesaikan, Perusahaan dapat mengajukan klaim kepada asuradur dengan jumlah maksimum 90% dari sisa nilai pinjaman beserta bunga yang belum dibayar nasabah.

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (PYD) (lanjutan)

Terhadap pemberian PYD Golongan F akan dikenakan biaya notaris, akta fidusia, cek fisik kendaraan bermotor, premi asuransi dan bea materai.

Barang jaminan atas PYD/Marhun Bih, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian/kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului/tidak didahului oleh tindakan peng3rusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan/penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp13.000.000.000 di tahun 2009 dan sebesar Rp9.600.000.000.000 di tahun 2008 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp40.000.000.000 maksimum Rp700.000.000.000 per tahun.

Selain itu, barang jaminan atas PYD/Marhun Bih, seluruhnya telah diasuransikan terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap dan bencana alam. dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp12.000.000.000 di tahun 2009 dan sebesar Rp9.600.000.000.000 di tahun 2008 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp40.000.000.000 maksimum Rp700.000.000.000 per tahun.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode, serta penyisihan yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Marhun Bih dijadikan sebagai jaminan atas Pinjaman Bank dan Pinjaman Sindikasi yang diikat secara fidusia.

7. PIUTANG LAINNYA

Saldo piutang lainnya terdiri dari

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Klaim Asuransi	1.411.040.482	2.325.361.975
- Piutang Pegawai	3.266.404.038	1.131.511.037
- Lain-lain	204.839.882	276.924.813
Jumlah	4.882.284.402	3.733.797.825

Piutang Klaim Asuransi merupakan piutang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (persero) berkenaan dengan pengajuan klaim atas penggantian kerugian terhadap barang jaminan dan klaim atas kerugian kredit kreasi dan krita yang masih dalam proses terhadap barang jaminan.

Piutang Pegawai merupakan pinjaman beberapa karyawan untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang tidak mendapat penggantian asuransi kesehatan yang akan diperhitungkan pada periode berikutnya bersamaan dengan pembayaran gaji karyawan.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

8. PERSEDIAAN

Saldo persediaan terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Persediaan Inventaris	39.952.291.949	16.568.645.684
- Persediaan Barang	10.449.507.961	5.204.848.130
- Persediaan Emas	1.247.746.788	403.170.079
Jumlah	51.649.546.698	22.176.663.893

Persediaan inventaris yang merupakan meubelair kantor, meubelair rumah, mesin kantor, komputer, jarum uji emas yang belum didistribusikan ke kantor cabang. Kenaikan persediaan inventaris dari tahun 2008 ke tahun 2009 dikarenakan adanya pembelian komputer sebanyak 2800 unit yang akan digunakan pada tahun 2010 untuk penerapan *on-line system* dalam sistem aplikasi inti pegadaian.

Persediaan barang meliputi blanko Surat Bukti Kredit (SBK), barang cetak, alat tulis kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan komputer, prangko dan meterai.

Persediaan emas merupakan Persediaan Logam Emas untuk produk MULIA dan sisa persediaan eks Unit usaha Toko Emas "Galeri 24" yang telah ditutup pada tahun 2005 namun pada tanggal neraca belum terjual.

9. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Merupakan saldo pendapatan sewa modal dan jasa simpan (ijaroh) yang masih harus diterima per 31 Desember 2009 dan 2008 terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Sewa Modal		
- Golongan A	1.192.254.405	2.222.737.279
- Golongan B	31.336.230.449	34.023.004.923
- Golongan C	543.535.702.819	400.775.380.501
- Golongan D	51.722.026.806	33.345.672.635
Sub Jumlah	627.786.214.479	470.366.795.338
Jasa Simpan Gadai Syariah		
- Golongan A	30.847.937	35.347.152
- Golongan B	981.901.804	928.698.685
- Golongan C	3.081.184.366	2.380.393.957
- Golongan D	15.384.456.253	10.503.537.912
- Golongan E	6.858.779.772	4.465.245.142
- Golongan F	4.604.006.701	2.802.109.767
- Golongan G	2.653.139.865	1.631.304.895
- Golongan H	947.831.982	318.475.685
- Golongan I	12.767.458	555.900
Sub Jumlah	34.554.916.138	23.065.669.095
Bunga Yang Masih Harus Diterima		
- Gadai Efek	4.470.326	3.714.523.050
- Kreasi/Kresna/Arrum dan Lainnya	22.256.932.343	19.975.804.123
Sub Jumlah	22.261.402.669	23.690.327.173
Jumlah	684.602.533.286	517.122.791.606

Manajemen berpendapat bahwa pendapatan yang masih harus diterima dapat terealisasi.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

10. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Sewa Gedung Kantor	43.107.138.994	34.241.765.076
- Asuransi Dibayar Dimuka	8.290.641.866	5.008.260.441
- Lain-lain	70.464.261	176.528.840
Jumlah	51.468.245.121	39.426.554.357

Sewa gedung kantor dibayar di muka merupakan pembayaran biaya sewa gedung kantor lama yang diperpanjang dan diamortisasi selama umur sewa.

Perusahaan terus menambah jaringan usahanya, sehingga sampai dengan akhir 2009 telah terdapat 789 kantor cabang dan 2.508 kantor unit pelayanan cabang di seluruh wilayah operasi Perusahaan, sehingga terdapat peningkatan biaya sewa gedung kantor sedangkan pada akhir tahun 2008 terdapat 758 kantor cabang dan 1.331 kantor unit pelayanan cabang.

Asuransi dibayar dimuka meliputi biaya asuransi barang jaminan dan aset tetap.

11. PIUTANG KEPADA PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Terdiri dari :

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Piutang TGR	12.540.579.150	13.066.259.014
- Piutang lainnya	127.736.371	76.857.271
	12.668.315.521	13.143.116.285
- Cad. Penyisihan Piutang Pegawai	(12.334.938.186)	(11.435.460.117)
Jumlah	333.377.335	1.707.656.168

Piutang TGR merupakan piutang kepada karyawan perusahaan yang berdasarkan penetapan Direksi dikenakan sanksi tuntutan ganti rugi akibat tindak kelalaian atau kesalahan yang dilakukan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Piutang lainnya merupakan kekurangan kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh manajer cabang dan pengelola kantor cabang pembantu.

Selama tahun 2009 dan tahun 2008 manajemen membentuk tambahan penyisihan masing-masing sebesar Rp899.478.069 dan Rp8.463.443.599 berkenaan dengan piutang TGR yang sudah sulit untuk ditagih kembali karena para pegawai yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penyisihan piutang pegawai cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. Selain mengajukan Tuntutan Ganti Rugi kepada manajer cabang/karyawan kunci, juga melakukan upaya hukum berupa tuntutan pidana/perdata atau sanksi pemecatan atau skorsing akibat kelalaian atau kesalahan dalam operasional.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

12. ASET TETAP

Merupakan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2009 dan 2008 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2009

	Saldo 1 Jan. 2009 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan* Rp	Saldo 31 Des. 2009 Rp
Harga Perolehan				
Hak atas Tanah	114.557.148.921	10.675.416.644	-	125.232.565.565
<u>Kepemilikan Langsung</u>				-
- Bangunan	359.880.776.608	23.079.876.982	-	382.960.653.590
- Inventaris	159.029.454.999	79.214.328.672	1.933.599.472	236.310.184.199
- Kendaraan	44.527.199.018		1.338.279.505	43.188.919.513
	<u>677.994.579.546</u>	<u>112.969.622.298</u>	<u>3.271.878.977</u>	<u>787.692.322.867</u>
<u>Aset Dalam Penyelesaian</u>				
- Bangunan	11.236.122.314	14.053.265.787	19.520.476.982	5.768.911.119
 -/- Akumulasi Penyusutan				
- Bangunan	138.857.943.386	17.533.569.827	-	156.391.513.213
- Inventaris	129.334.682.128	31.648.462.208	1.932.599.577	159.050.544.863
- Kendaraan	33.851.915.274	2.948.460.574	1.338.279.400	35.462.096.344
	<u>302.044.540.788</u>	<u>52.130.492.608</u>	<u>3.270.878.977</u>	<u>350.904.154.420</u>
 Nilai Buku	<u>387.186.161.072</u>			<u>442.557.079.566</u>

*Angka mutasi pengurangan aset dalam penyelesaian merupakan reklasifikasi ke akun aset Bangunan

Tahun 2008

	Saldo 1 Jan. 2008 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan* Rp	Saldo 31 Des. 2008 Rp
Harga Perolehan				
Hak atas Tanah	111.994.630.284	2.680.862.226	118.343.589	114.557.148.921
<u>Kepemilikan Langsung</u>				
- Bangunan	319.077.469.521	40.803.307.087	-	359.880.776.608
- Inventaris	137.805.273.928	21.224.181.071	-	159.029.454.999
- Kendaraan	49.593.453.528	-	5.066.254.510	44.527.199.018
	<u>618.470.827.261</u>	<u>64.708.350.384</u>	<u>5.184.598.099</u>	<u>677.994.579.546</u>
<u>Aset Dalam Penyelesaian</u>				
- Bangunan	18.855.256.811	33.184.172.590	40.803.307.087	11.236.122.314
 -/- Akumulasi Penyusutan				
- Bangunan	122.351.324.441	16.506.618.945	-	138.857.943.386
- Inventaris	111.134.733.008	18.199.949.120	-	129.334.682.128
- Kendaraan	33.889.542.541	4.898.607.943	4.936.235.210	33.851.915.274
	<u>267.375.599.990</u>	<u>39.605.176.008</u>	<u>4.936.235.210</u>	<u>302.044.540.788</u>
 Nilai Buku	<u>369.950.484.082</u>			<u>387.186.161.072</u>

*Angka mutasi pengurangan aset dalam penyelesaian merupakan reklasifikasi ke akun aset Bangunan

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Jenis aset tetap yang dijual termasuk nilai buku dan laba rugi yang diperoleh untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
Nilai Buku		
1. Tanah	-	118.343.589
2. Inventaris	999.895	130.019.300
3. Kendaraan	105	-
Jumlah	1.000.000	248.362.889
Hasil Penjualan		
1. Tanah	-	1.987.290.000
2. Inventaris	344.974.463	1.716.025.872
3. Kendaraan	239.828.937	-
Jumlah	584.803.400	3.703.315.872
Laba Penjualan		
1. Tanah	-	1.868.946.411
2. Inventaris	342.974.568	1.586.006.572
3. Kendaraan	239.828.832	-
Jumlah	583.803.400	3.454.952.983

Aset Dalam Penyelesaian Bangunan yang sudah selesai dan siap untuk digunakan telah direklasifikasi menjadi Aset Tetap Kepemilikan Langsung.

Penambahan tanah selama tahun 2009, antara lain meliputi tanah di Wadung Sari/Surabaya Rp135.000.000, Bajul Mati/Surabaya Rp270.000.000, Mandonga/Makassar Rp757.800.000, Klayan/Bandung Rp460.500.000, Mesbagik/Denpasar Rp518.947.400, Padang Bulan/Medan Rp416.000.000, Martapura/Balikpapan Rp1.043.422.000, Martadinata/Balikpapan Rp1.289.053.000, Karang Timur/Palembang Rp405.000.000, Pekanbaru Rp508.000.000, Sudirman/Jakarta Rp3.792.000.000 dan Cibubur/Jakarta Rp236.000.000.

Penambahan tanah selama tahun 2008, antara lain meliputi perolehan tanah di Palu Plaza/Manado Rp325.000.000, Kerobokan/Denpasar Rp398.700.000, dan Suci/Bandung Rp1.751.800.000.

Penambahan Bangunan selama tahun 2009 meliputi Pembelian sebesar Rp4.117.400.000 dan Reklasifikasi sebesar Rp18.962.476.982.

Pembelian bangunan selama tahun 2009 antara lain meliputi bangunan kantor Sudirman/Jakarta Rp508.000.000, Cibubur/Jakarta Rp294.000.000, Padang Bulan/Medan Rp204.000.000, Bajul mati/Surabaya Rp205.600.000, Mertapura/Balikpapan Rp925.000.000, Martadinata/Balikpapan Rp582.000.000, Tanjung Karang Timur Rp375.000.000, Wadungasri/Surabaya Rp305.000.000, Klayan/Bandung Rp160.800.000 dan Mandonga/Makassar Rp558.000.000.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

12. ASET TETAP (Lanjutan)

Adapun penambahan bangunan selama tahun 2009 berasal dari reklasifikasi aset dalam penyelesaian.

Saldo Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2009 dan 2008 terdiri dari:

2009

No	Keterangan	Jumlah	% Thd Kontrak	Jadwal Selesai
1	Pembangunan Kanwilut Padang	281.134.296	71%	Mei 2010
2	Kanwil Jakarta IX	308.828.296	80%	April 2010
3	Pembangunan Kanwil Makassar	359.407.700	92%	Maret 2010
4	Pembangunan Diklat Surabaya	915.100.200	65%	September 2010
5	Pembangunan CPP Tanjung Lobar	606.179.000	87%	Maret 2010
6	Pembangunan CPP Gorontalo Selatan	448.600.000	78%	Maret 2010
7	Pembangunan Kanwil Palembang	440.009.500	60%	Agustus 2010
8	Pembangunan Rumah Dinas Kanwil Pekanbaru	214.987.746	72%	Maret 2010
9	Lain-lain (Masing-masing dibawah 200 juta)	<u>2.194.664.381</u>		
	Total	<u>5.768.911.119</u>		

2008

No.	Keterangan	Jumlah	% Thd Kontrak	Jadwal Selesai
1	Pembangunan Kanwilut Denpasar/Denpasar	2.789.403.500	50%	Februari 2009
2	Proyek CPP Tanah Grogot/Balikpapan	977.977.500	92%	Januari 2009
3	Proyek CPP Ujung Berung/Bandung	949.081.500	95%	Januari 2009
4	Proyek CPP Gunung Sitoli/Medan	906.870.200	91%	Januari 2009
5	Pembangunan Kantor Cabang/Medan	869.114.900	91%	Januari 2009
6	Proyek CPP Keruak/Denpasar	769.222.200	93%	Januari 2009
7	Renovasi Gedung Kantor CPP/Bandung	711.919.500	75%	Maret 2009
8	Proyek CPP Sibolga/Medan	498.143.750	77%	Februari 2009
9	Proyek CPP Wera/Denpasar	499.741.000	64%	Maret 2009
10	Pembangunan Kantor CP. Keruak/Denpasar	324.781.500	50%	April 2009
11	Pembangunan Gedung Kantor Cabang/Medan	400.814.250	75%	Maret 2009
12	Lain-Lain (masing-masing dibawah Rp. 200 Juta)	<u>1.539.052.514</u>		
	Total	<u>11.236.122.314</u>		

Seluruh kantor/gedung/bangunan milik atau disewa Perusahaan dan Anak Perusahaan serta kantor afiliasinya yang berada di seluruh wilayah Indonesia beserta inventaris kantor yang berada didalamnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru-hara dan bencana alam dengan nilai pertanggungan sebesar Rp266.000.000.000 pada tahun 2009.

Kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat kecelakaan, dan pencurian/kejahatan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp27.815.000.000 di tahun 2009 dan sebesar Rp25.646.000.000 di tahun 2008.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

Tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi kedalam harga perolehan aset dalam penyelesaian.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

13. ASET LAIN-LAIN

Terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Beban Ditangguhkan By pembukaan cabang baru	29.760.947.507	23.607.006.740
- Beban Hak Atas Tanah Yang Ditangguhkan	4.381.990.058	4.283.001.777
- Barang Lelang Milik Perusahaan (catatan 2j)	11.952.437.527	7.117.265.264
- Barang Jaminan Yang Disisihkan (catatan 2k)	13.743.580.363	6.925.355.336
- Kerugian Perusahaan YMH Diperhitungkan (KPYD) (catatan 2k)	5.497.834.261	2.168.483.130
- Tanah Kerjasama Operasi	1.406.071.181	1.406.071.180
- Beban RUF Yang Ditangguhkan	-	799.373.331
- Aset Lainnya	386.673.000	386.673.000
Jumlah	67.129.533.897	46.693.229.758

Beban ditangguhkan biaya pembukaan cabang baru adalah biaya atas sewa gedung kantor dan renovasinya, dan akan diamortisasi sebagai beban amortisasi pembukaan cabang baru selama masa sewa. Selama tahun 2009 perusahaan terus menambah jaringan usaha dengan membuka sejumlah kantor cabang dan unit pelayanan cabang diseluruh wilayah operasi perusahaan sehingga hal ini menyebabkan pada kebutuhan Biaya pembukaan cabang baru.

Beban hak tanah atas yang ditangguhkan adalah biaya perolehan hak atas tanah yang diamortisasi setiap tahun selama masa manfaatnya.

Saldo Tanah Kerja Sama Operasi merupakan harga perolehan tanah yang diserahkan oleh Perusahaan Kepada Mitra KSO untuk dibangun dan dikelola sesuai dengan perjanjian yaitu KSO tanah Cimahi dan KSO Salemba.

Beban RUF (*Revolving Underwriter Facility*) ditangguhkan merupakan biaya-biaya berkaitan dengan fasilitas pinjaman sindikasi dengan jangka waktu lima tahun, yang terdiri dari Biaya Arranger, Komitmen Bank dan Konsultan Hukum/Notaris dengan kontrak No.11 tahun 2004 yang telah berakhir tanggal 8 September 2009.

Aset Lainnya per 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp386.673.000 merupakan tanah milik perusahaan yang berada di Timor Leste (d/h Timor Timur).

14. PINJAMAN BANK

Merupakan saldo pinjaman bank jangka pendek untuk modal kerja dengan rincian:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.084.713.529.077	3.174.713.529.076
- PT Bank Central Asia, Tbk	1.715.028.104.948	800.598.449.225
- PT BRI (Persero) Tbk	3.370.815.935.681	2.184.312.766.713
- PT Bank Bukopin Tbk	-	2.000.000.000
- PT Bank Syariah Mandiri Tbk	81.673.714.391	44.042.857.701
Jumlah	9.252.231.284.097	6.205.667.602.715

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pinjaman modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pertama kali diberikan dengan plafond Rp300.000.000.000 didasarkan Akta No:29 tanggal 21 Februari 2003, yang dibuat dihadapan notaris Raharti Sudjardjati SH. Fasilitas pinjaman berjumlah Rp300.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan sebesar 100% dari limit kredit.

Pada tahun 2008, berdasarkan Akta No: 282 yang dibuat dihadapan Notaris Tuasikal Abua, SH, nilai fasilitas pinjaman dinaikan menjadi Rp2.500.000.000.000, terdiri dari:

- ❖ Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) I dengan limit sebesar Rp200.000.000.000, diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009, dengan tingkat bunga 12,50% p.a. (*reviewable*).
Pada tanggal 31 Desember 2007 tingkat bunga sebesar 10% p.a. (*reviewable*).
- ❖ Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) II Rp 1.300.000.000.000 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2009, dengan tingkat bunga 12,00% p.a. (*reviewable*).
- ❖ Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) III dengan limit sebesar Rp1.000.000.000.000 bersifat *revolving*, dengan tingkat bunga akan ditentukan pada setiap penarikan kredit, jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2009.

Berdasarkan addendum perjanjian kredit I Nomor: KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 21 April 2008 akta no.281 fasilitas kredit jangka pendek digabungkan dengan fasilitas KMK I dan II, selanjutnya berdasarkan addendum perjanjian kredit II Nomor: KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 22 Agustus 2008 nilai plafondnya menjadi sebesar Rp3.500.000.000.000, Jangka waktu kredit adalah 12 bulan sampai dengan 20 Februari 2009 dan tingkat bunga 11,00% per tahun (*reviewable*).

Pada tahun 2009 terdapat perubahan addendum perjanjian kredit I Nomor: KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 21 April 2008 akta no.281 dan diganti dengan perjanjian kredit Nomor: CBG.CBI/SPPK.009/2009 tanggal 13 Maret 2009 nilai plafondnya menjadi sebesar Rp4.500.000.000, jangka waktu kredit adalah 12 bulan sampai dengan 23 Februari 2010 dan tingkat bunga 13,00% per tahun (*reviewable*).

Suku bunga rata-rata selama tahun 2009 dan 2008 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2009	2008
KMK I	12,45%	10,92%
KMK II	-	10,00%
KMK III	-	8,88%
KJP	-	8,75%

Mengacu perjanjian kredit pasal 17 ayat 16, Perusahaan wajib:

- Memelihara current ratio di atas 110%.
- Memelihara total pinjaman maksimal tujuh kali modal sendiri.
- Melapor kepada bank apabila:
 - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
 - Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dijaminkan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.
 - Memindahtangankan barang jaminan.

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

b. *PT Bank Central Asia Tbk*

Fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta perjanjian kredit No:12 tanggal 26 Juni 2000, yang dibuat dihadapan notaris Irawati Marzuki Arifin SH. Fasilitas dengan plafond Rp50.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga 16% p.a (*reviewable*), jatuh tempo tanggal 26 Juni 2001.

Sejak tahun 2006 nilai fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000.

Pada tahun 2008, fasilitas pinjaman diperpanjang kembali sampai dengan 26 Juni 2009 dengan plafon sebesar Rp1.200.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Berdasarkan akta No. 27 tanggal 18 desember 2008 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas kredit lokal dan time loan revolving diubah menjadi sebagai berikut:

<u>Fasilitas</u>	<u>Plafond</u>	<u>Jatuh Tempo</u>
Kredit Lokal	Rp 100.000.000.000	26 Juni 2009
Time Loan Revolving	Rp 700.000.000.000	26 Juni 2009

- ❖ Berdasarkan akta 28 tanggal 18 desember 2008 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas *money market loan* diubah plafondnya menjadi Rp400.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 26 Juni 2009.

Pada tahun 2009, fasilitas pinjaman diperpanjang kembali sampai dengan 24 Juni 2009 dengan plafon sebesar Rp1.800.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Berdasarkan akta No. 32 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas kredit lokal dan time loan revolving diubah menjadi sebagai berikut:

<u>Fasilitas</u>	<u>Plafond</u>	<u>Jatuh Tempo</u>
Kredit Lokal	Rp 100.000.000.000	24 Juni 2010
Time Loan Revolving	Rp1.200.000.000.000	24 Juni 2010

- ❖ Berdasarkan akta 33 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas *money market loan* diubah plafondnya menjadi Rp500.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 24 Juni 2010.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2009 dan 2008 atas ketiga fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2009	2008
Kredit Lokal	12,33%	11,13%
Time Loan	12,20%	10,49%
Money Market Loan	11,05%	9,60%

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

Mengacu perjanjian kredit pasal 11 huruf k, Perusahaan wajib:

- Perusahaan memiliki kewajiban memelihara Debt to equity ratio maksimum 7 kali dan current ratio minimum 1 kali.

Risiko barang jaminan ditanggung oleh Perum Pegadaian karena barang jaminan milik nasabah berada/disimpan oleh Perum Pegadaian. Apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah, penanggungjawabnya adalah Perum Pegadaian dan barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian, sebagaimana diperlakukan terhadap barang jaminan nasabah usaha gadai lainnya.

c. *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/K) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat dihadapan notaris Raharti Sudjardjati SH fasilitas pinjaman dengan plafond sebesar Rp300.000.000.000 tersebut berbunga 13% p.a (*reviewable*) dan jatuh tempo tanggal 01 Januari 2006. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai sebesar Rp300.000.000.000.

Pada tahun 2008 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.10 tanggal 23 Mei 2008 yang dibuat dihadapan notaris Esther Daniar Iskandar SH, plafondnya dinaikan kembali menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000, dan diperpanjang hingga 28 Februari 2009. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.000.000.000.000.

Pada tanggal 25 September 2008 terdapat penambahan plafond dinaikan menjadi sebesar Rp2.500.000.000.000 berdasarkan akta No.24 tanggal 25 September 2008, jatuh tempo 28 Februari 2009 yang dibuat dihadapan notaris Esther Daniar Iskandar SH. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp2.500.000.000.000, dengan tingkat bunga sebagai berikut:

- Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 1,50% p.a jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar atau lebih dari Rp1.500.000.000.000.
- Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 1,75% p.a jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar Rp1.000.000.000.000 sampai dengan Rp1.500.000.000.000.
- Sebesar SBI 1 (satu) bulan ditambah 2% p.a. jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan kurang dari Rp1.000.000.000.000.

Pada tahun 2009 terdapat penambahan plafond dinaikan menjadi sebesar Rp3.500.000.000.000 berdasarkan akta No.01 tanggal 08 April 2009, jatuh tempo 28 Februari 2010, yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan, SH. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp3.500.000.000.000, dengan tingkat bunga sebagai berikut:

- Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 3,25% p.a jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar atau lebih dari Rp2.800.000.000.000.
- Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 3,50% p.a jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar Rp2.300.000.000.000 sampai dengan Rp2.800.000.000.000.
- Sebesar SBI 1 (satu) bulan ditambah 3,75% p.a. jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan kurang dari Rp2.300.000.000.000.

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

Mengacu perjanjian kredit pasal 6, Perusahaan wajib:

- Menyalurkan transaksi keuangannya melalui rekening PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Menggunakan jasa-jasa perbankan.
- Menyimpan surat bukti kepemilikan jaminan kreditnya lunas.
- Menjaga dan memelihara Gearing Ratio 7:1, apabila lebih maka harus meminta persetujuan pihak bank dan apabila sama dengan 7:1 maka harus melaporkan secara tertulis.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2009 dan 2008 atas fasilitas diatas adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2009	2008
Fasilitas KMK Lama	-	10,78%
Fasilitas Suplesi KMK	10,69%	10,00%

d. PT Bank Bukopin Tbk

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank Bukopin Tbk Pertama kali diperoleh tahun 2002 dengan Akta Perjanjian yang terpisah yaitu:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja I (KMK) berdasarkan akta No.25 tanggal 21 Februari 2002, plafond kreditnya sebesar Rp40.000.000.000, jatuh tempo tanggal 21 Februari 2003 dan tingkat bunganya 19% p.a.
- Fasilitas Kredit Modal Kerja II (KMK) berdasarkan akta No.2 tanggal 3 April 2002 dengan plafond kredit sebesar Rp60.000.000.000, jatuh tempo tanggal 3 April 2003 dan tingkat bunganya 19,50% p.a.
- Fasilitas Kredit Modal Kerja III (KMK) berdasarkan akta No.25 tanggal 12 Agustus 2002, plafond kredit sebesar Rp30.000.000.000, jatuh tempo tanggal 12 Agustus 2003 dan tingkat bunganya 19% pa.a.

Fasilitas tersebut dengan nilai keseluruhan Rp130.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan piutang senilai 100% dari nilai fasilitas.

Pada tahun 2008, KMK I dengan plafond sebesar Rp40.000.000.000 diperpanjang berdasarkan surat Addendum Perjanjian Kredit No.XXXVIII/023/BUKI/ADD-PK/III/2008 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2009. Adapun KMK dengan plafon Rp30.000.000.000 sedang dalam proses perpanjangan.

Tingkat suku bunga rata-rata selama tahun 2008 adalah 11,47%.

Mengacu perjanjian kredit pasal 6, Perusahaan wajib menyalurkan dan meningkatkan transaksi/mutasi keuangan melalui rekening di PT Bank Bukopin Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2009 saldo hutang kepada PT Bank Bukopin Tbk adalah nihil, karena seluruhnya (hutang pokok dan bunga) telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal jatuh tempo dan fasilitas pinjaman tersebut tidak diperpanjang lagi.

14. PINJAMAN BANK (Lanjutan)

e. *PT Bank Syariah Mandiri*

Fasilitas pembiayaan musyarokah dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk pertama kali diterima tahun 2007 berdasarkan akta No.20 tanggal 22 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH. Nilai fasilitas Rp 50.000.000.000 jatuh tempo tanggal 22 Februari 2008, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

- Sebesar 56% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
- Sebesar 44% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Pada tahun 2008, berdasarkan surat dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk No.10/134-3/060 tanggal 29 Februari 2008, fasilitas pembiayaan tersebut diperpanjang 12 bulan sampai dengan 22 Februari 2009, tanpa perubahan dalam nisbah bagi hasil.

Ditahun 2009 berdasarkan akta No.15 tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH nilai fasilitas dinaikan menjadi Rp100.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Maret 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

- Sebesar 60% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
- Sebesar 40% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Syariah Mandiri, Perusahaan tidak diperbolehkan antara lain:

- Mengubah nama, maksud dan tujuan kegiatan usaha serta status Perusahaan.
- Memperoleh fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari pihak ketiga, kecuali dalam rangka transaksi yang wajar.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan berupa fixed asset kepada pihak lain.
- Menyatakan diri pailit.

15. PINJAMAN OBLIGASI YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

Terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Obligasi IX Seri A (Catatan 22)	211.000.000.000	-
- Obligasi IX Seri B (Catatan 22)	13.050.000.000	8.700.000.000
- Obligasi IX Seri C (Catatan 22)	2.000.000.000	-
- Obligasi IX Seri D (Catatan 22)	43.500.000.000	-
- Diskonto Obligasi	(406.071.438)	(14.903.441)
Jumlah	269.143.928.562	8.685.096.559

- a. Obligasi IX tahun 2002 seri A dengan suku bunga tetap sebesar 18,25 % per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi seri B yang akan jatuh tempo pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 6 Juni 2010, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 211.000.000.000.

15. PINJAMAN OBLIGASI YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

- b. Obligasi IX tahun 2002 seri B dengan suku bunga tetap sebesar 18,25 % per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi seri B yang akan jatuh tempo sebagai berikut:
 - Pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 6 Juni 2010, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 13.050.000.000.
 - Pada ulang tahun emisi ke-7 tanggal 6 Juni 2009, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp8.700.000.000.
- c. Obligasi IX tahun 2002 seri C dengan suku bunga tetap sebesar 16,50 % per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi seri B yang akan jatuh tempo pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 6 Juni 2010, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 2.000.000.000.
- d. Obligasi IX tahun 2002 seri D dengan suku bunga tetap sebesar 16,50 % per tahun. Tingkat persentase cicilan pokok dari jumlah pokok obligasi seri B yang akan jatuh tempo pada ulang tahun emisi ke-8 tanggal 6 Juni 2010, sebesar 20% atau dengan nilai nominal sebesar Rp 43.500.000.000.

16. PINJAMAN LAINNYA

Pinjaman lainnya merupakan pinjaman yang diperoleh dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan plafon sebesar Rp15.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 036/PKS/YDSM/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008.

Pinjaman tersebut disediakan untuk membiayai pengembangan usaha mikro skala rumah tangga melalui penyaluran kredit KRISTA. Jangka waktu pembiayaan 5 tahun dan akan jatuh tempo bulan September 2013. Pinjaman ini dibebani bunga dengan mengacu tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 bulan.

Rata-rata tingkat bunga selama tahun 2009 dan 2008 adalah 7,15% dan 8,74%.

17. HUTANG KEPADA REKANAN

Akun ini seluruhnya dalam mata uang Rupiah terdiri dari

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- PT Askrindo		
a. Titipan Premi Asuransi	7.807.552.908	6.267.245.408
b. Hutang Angsuran Recovery Kredit UKM	654.242.432	2.969.522.678
- Hutang kepada notaris dan institusi hukum	7.225.519.774	3.069.767.602
- Hutang pengadaan barang dan Jasa	3.677.401.659	4.632.236.598
Jumlah	19.364.716.773	16.938.772.286

Titipan premi asuransi kepada PT Askrindo merupakan nilai premi asuransi yang telah dibayarkan oleh nasabah kreasi dan krista yang belum disetorkan ke PT Askrindo.

Hutang Angsuran Recovery Kredit UKM kepada PT Askrindo merupakan nilai setoran nasabah yang pinjamannya telah diklaim ke asuradur.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

17. HUTANG KEPADA REKANAN (Lanjutan)

Hutang kepada notaris dan institusi hukum adalah merupakan dana titipan dari nasabah kreasi yang akan digunakan untuk pembayaran biaya pengesahan perjanjian kredit dan akte jaminan.

Hutang pengadaan barang dan jasa merupakan hutang kepada pihak ketiga terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pengadaan inventaris serta pemeliharaan dan perbaikan aset tetap ditahun 2009 terkait pembukaan UPC baru.

Tidak ada hutang kepada rekanan yang memiliki hubungan istimewa dengan Perusahaan.

18. HUTANG KEPADA NASABAH

Saldo hutang nasabah per 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp.60.005.937.156 dan Rp35.748.693.274 berupa uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan, maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan. *(lihat Catatan 29)*

Prosedur yang dilakukan Perusahaan untuk memberitahu nasabah mengenai uang kelebihan lelang mengacu Surat Edaran Direksi Nomor 12/UI.1.00211/2006 adalah:

- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah tentang jadwal lelang pada saat kredit telah jatuh tempo.
- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang tidak menghadiri lelang tentang uang kelebihan lelang yang melebihi Rp20.000 yang merupakan hak nasabah terkait.

Pengambilan uang kelebihan tersebut dengan cara menunjukkan Surat Bukti Kredit (SBK) atau bukti lain yang sah.

19. HUTANG PAJAK

Terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- PPh pasal 29 Badan (Catatan 38)	-	79.121.466.149
- PPh pasal 25 Masa Desember	29.800.507.917	17.804.108.798
- PPh pasal 23	243.222.993	479.784.087
- PPh pasal 21	10.208.274.461	9.968.074.990
- PPh Pasal 4 ayat 2	304.171.985	331.920.200
- PPN	146.591.772	140.010.693
- BPHTB	5.117.000	29.625.000
- Pajak Bumi dan Bangunan	37.610.064	17.464.854
Jumlah	40.745.496.192	107.892.454.771

PPh pasal 25 untuk masa Desember 2009 telah disetorkan pada tanggal 6 Januari 2010, sedangkan PPH Pasal 25 untuk masa Desember 2008 telah disetorkan pada tanggal 6 Januari 2009.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

20. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Beban Bunga Bank	15.815.409.035	35.326.204.347
- Beban Bunga Obligasi	25.404.973.090	25.945.014.063
- Beban Umum	16.762.534.486	11.901.659.792
- Beban Pegawai	5.823.144.211	9.728.669.379
Jumlah	63.806.060.822	82.901.547.581

21. PINJAMAN OBLIGASI - SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

Pinjaman obligasi seluruhnya dalam mata uang Rupiah terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Nilai nominal		
a. Obligasi IX	-	269.550.000.000
b. Obligasi X	400.000.000.000	400.000.000.000
c. Obligasi XI	500.000.000.000	500.000.000.000
d. Obligasi XII	600.000.000.000	600.000.000.000
e. Obligasi XIII	1.500.000.000.000	-
Subjumlah nilai nominal	3.000.000.000.000	1.769.550.000.000
Diskonto yang belum diamortisasi		
a. Obligasi IX	-	(1.344.465.989)
b. Obligasi X	(1.567.810.448)	(2.318.730.251)
c. Obligasi XI	(1.792.058.245)	(2.072.310.622)
d. Obligasi XII	(1.547.914.013)	(1.749.596.619)
e. Obligasi XIII	(3.531.565.692)	-
Subjumlah diskonto	(8.439.348.398)	(7.485.103.481)
Nilai Bersih		
a. Obligasi IX	-	268.205.534.011
b. Obligasi X	398.432.189.552	397.681.269.749
c. Obligasi XI	498.207.941.755	497.927.689.378
d. Obligasi XII	598.452.085.987	598.250.403.381
e. Obligasi XIII	1.496.468.434.308	-
Nilai Bersih	2.991.560.651.602	1.762.064.896.519

Rating masing-masing obligasi berdasarkan penilaian PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) terhadap Obligasi VI, IX, X, XI dan XII adalah AA (*Double A; Stable Outlook*).

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan oleh perjanjian perwaliamanatan.

Amortisasi diskonto tahun 2009 dan 2008 adalah masing-masing sebesar Rp8.439.348.398 dan Rp7.485.103.481. (*lihat Catatan 30*)

Penjelasan mengenai tiap-tiap seri obligasi dapat dilihat pada paragraf berikut

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

21. PINJAMAN OBLIGASI - SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

a. Obligasi IX Tahun 2002

Obligasi IX Tahun 2002 diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*) dengan jangka waktu pelunasan obligasi adalah 8 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2010. Rincian Obligasi IX Tahun 2002 terdiri dari :

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Nilai nominal		
- Obligasi seri A	211.000.000.000	211.000.000.000
- Obligasi seri B	13.050.000.000	21.750.000.000
- Obligasi seri C	2.000.000.000	2.000.000.000
- Obligasi seri D	43.500.000.000	43.500.000.000
Jumlah	269.550.000.000	278.250.000.000
Dikurangi Obligasi seri B jatuh tempo dalam satu tahun (catatan 15)	(269.550.000.000)	(8.700.000.000)
	-	269.550.000.000

Obligasi IX Seri A dan Seri B merupakan obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 18.25% per tahun.

Obligasi IX Seri C sebesar Rp2.000.000.000 merupakan obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 18.25% per tahun untuk tahun pertama. Untuk tahun selanjutnya suku bunga mengambang yang besarnya ditentukan berdasarkan rata-rata bunga deposito rupiah berjangka 3 bulan di tambah premi tetap 2.5% dengan maksimal sebesar 20% dan minimal sebesar 16.50%.

Obligasi IX Seri D sebesar Rp43.500.000.000 merupakan obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 18,25% per tahun untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dan bunga mengambang untuk tahun keenam sampai dengan tahun kedelapan yang besarnya ditentukan berdasarkan rata-rata bunga deposito rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% maksimal sebesar 20% dan minimal sebesar 16,50%.

Penerbitan obligasi IX berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.2 tanggal 15 Mei 2002 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 5:1 sampai dengan 21 Juli 2008 selanjutnya maksimal 7 : 1

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi IX selama tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2009	2008
Obligasi IX Seri A	18,25%	18,25%
Obligasi IX Seri B	18,25%	18,25%
Obligasi IX Seri C	16,50%	16,50%
Obligasi IX Seri D	16,50%	16,50%

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

21. PINJAMAN OBLIGASI - SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

b. Obligasi X Tahun 2003

Obligasi X Tahun 2003 diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*) dengan rincian sebagai berikut:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Nilai nominal		
- Obligasi seri A	336.500.000.000	336.500.000.000
- Obligasi seri B	63.500.000.000	63.500.000.000
Subjumlah	400.000.000.000	400.000.000.000

Obligasi X Seri A sebesar Rp336.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 11 Juli 2011 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,975% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi X Seri B Tahun 2004 sebesar Rp63.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 15 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun untuk tahun pertama sampai ketiga dan bunga mengambang untuk tahun keempat sampai dengan tahun kelimabelas yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan ditambah premi tetap sebesar 1,00%, maksimal 15,50% dan minimal 10,50%.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi IX selama tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2009	2008
Obligasi X Seri A	12,94%	12,94%
Obligasi X Seri B	10,50%	10,60%

Penerbitan obligasi X berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.39 tanggal 12 Mei 2003 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 5:1 sampai dengan 21 Juli 2008 selanjutnya maksimal 7 : 1

c. Obligasi XI Tahun 2006

Obligasi XI Tahun 2006 memiliki jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Nominal:		
- Obligasi seri A	400.000.000.000	400.000.000.000
- Obligasi seri B	100.000.000.000	100.000.000.000
	500.000.000.000	500.000.000.000

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

21. PINJAMAN OBLIGASI - SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

Emisi Obligasi XI Seri A Tahun 2006 sebesar Rp400.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat, dengan jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Emisi Obligasi XI Seri B Tahun 2006 sebesar Rp100.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,25 % pertahun, dengan batas atas sebesar 16,00% dan batas bawah 10,00 %.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XI selama tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2009	2008
Obligasi XI Seri A	13,10%	13,10%
Obligasi XI Seri B	10,00%	10,49%

Penerbitan obligasi XI berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.5 tanggal 10 April 2006 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 10:1

- d. Obligasi XII Tahun 2007 Seri A dan Seri B dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 4 September 2017 terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Nominal:		
- Obligasi seri A	370.000.000.000	370.000.000.000
- Obligasi seri B	230.000.000.000	230.000.000.000
	<u>600.000.000.000</u>	<u>600.000.000.000</u>

Obligasi XII Seri A Tahun 2007 sebesar Rp370.000.000.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Obligasi XII Seri B Tahun 2007 sebesar Rp230.000.000.000 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,00% per tahun, dengan batas atas sebesar 12,00% dan batas bawah 8,00%.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XII selama tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2009	2008
Obligasi XII Seri A	10,03%	10,03%
Obligasi XII Seri B	8,00%	10,22%

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

21. PINJAMAN OBLIGASI - SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

Penerbitan obligasi XII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.2 tanggal 4 Juli 2007 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 10:1

- e. Obligasi XIII Tahun 2009 Seri A dengan jangka waktu 5 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2014, Seri B dengan jangka waktu 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2017, dan Seri C dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019 terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Nominal:		
- Obligasi seri A-1	350.000.000.000	-
- Obligasi seri A-2	100.000.000.000	-
- Obligasi seri B	650.000.000.000	-
- Obligasi seri C	400.000.000.000	-
	<u>1.500.000.000.000</u>	<u>-</u>

Obligasi XIII Seri A-1 tahun 2009 sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama sampai tahun kelima.

Obligasi XIII Seri A-2 tahun 2009 sebesar Rp100.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 3% per tahun, dengan batas atas sebesar 13% dan batas bawah 10%.

Obligasi XIII Seri B tahun 2009 sebesar Rp650.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,650% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi XIII Seri C tahun 2009 sebesar Rp350.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XIII selama tahun 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2009	2008
Obligasi XIII Seri A-1	11,675%	-
Obligasi XIII Seri A-2	11,675%	-
Obligasi XIII Seri B	12,650%	-
Obligasi XIII Seri C	12,875%	-

Penerbitan obligasi XIII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.24 tanggal 12 Juni 2009 dengan PT Bank Mega Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio kewajiban terhadap ekuitas maksimal 10:1

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

21. PINJAMAN OBLIGASI - SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN (Lanjutan)

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing obligasi adalah sebagai berikut:

- Obligasi IX setiap tanggal 6 Maret, 6 Juni, 6 September dan 6 Desember
- Obligasi X Seri A dan Seri B setiap tanggal 12 Maret, 12 Juni, 12 September, dan 12 Desember.
- Obligasi XI setiap tanggal 23 Pebruari, 23 Mei, 23 Agustus dan 23 Nopember.
- Obligasi XII setiap tanggal 4 Maret, 4 Juni, 4 September, dan 4 Desember.
- Obligasi XIII setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.

Rincian obligasi berdasarkan jumlah bagian yang jatuh tempo yang dibagi berdasarkan tahun jatuh tempo:

Uraian	Nilai Nominal	Tahun Jatuh Tempo
Hutang Obligasi yang akan jatuh tempo	(Rp)	
Obligasi IX seri A (jatuh tempo ultah ke-8)	211.000.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri B (jatuh tempo ultah ke-8)	13.050.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri C (jatuh tempo ultah ke-8)	2.000.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri D (jatuh tempo ultah ke-8)	43.500.000.000	Tahun 2010
Jumlah Hutang Obligasi yang akan Jatuh Tempo	269.550.000.000	
Hutang Obligasi Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun:		
Obligasi X seri A	336.500.000.000	Tahun 2011
Obligasi XIII seri A-1	350.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XIII seri A-2	100.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XI seri A	400.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XI seri B	100.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XII seri A	370.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XII seri B	230.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII seri B	650.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi X seri B	63.500.000.000	Tahun 2018
Obligasi XIII seri C	400.000.000.000	Tahun 2019
Jumlah Hutang Obligasi Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	3.000.000.000.000	
Jumlah Hutang Obligasi	3.269.550.000.000	

Obligasi X sebanyak 60% dari sisa pokok yang terhutang, dijamin dengan tagihan Perusahaan yang diberikan kepada nasabah (PYD), sedangkan obligasi XI, XII dan XIII tidak dijamin dengan aset PYD.

PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Mega, Tbk selaku wali amanat dalam rangka penerbitan obligasi diatas, tidak memiliki tagihan terhadap Perusahaan selaku kreditor.

Dalam perjanjian Perwaliamanatan dari tiap-tiap obligasi di atas tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan Perusahaan untuk membentuk dana pelunasan obligasi (*sinking fund*).

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

22. PINJAMAN DARI PEMERINTAH

Pinjaman ini seluruhnya dalam mata uang Rupiah terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Pinjaman Pemerintah Pusat	410.000.000.000	410.000.000.000
- Pinjaman dari Pemda Indramayu	600.000.000	500.000.000
- Pinjaman dari Pemda Purbalingga	750.000.000	750.000.000
Jumlah	411.350.000.000	411.250.000.000

Pinjaman Pemerintah Pusat

Pinjaman Pemerintah Pusat merupakan Surat Utang Pemerintah (SUP) sebesar Rp410.000.000.000 adalah pinjaman untuk Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S-121/MK.06/2004 tanggal 21 April 2004 dan Perjanjian Pinjaman No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, dan dirubah terakhir dengan Persetujuan Perubahan No.AMA-33/KP-019/DP3/2007 tanggal 8 Maret 2007. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2009 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Rata-rata tingkat bunga selama tahun 2009 dan 2008 adalah 7,15% p.a dan 9,05% p.a. Bunga dibayar setiap tanggal 6 Maret, 9 Juni, 9 September dan 9 Desember tiap tahunnya.

Pada tahun 2008 berdasarkan surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia No.S-3207/PB/2008 tanggal 21 April 2008, Pemerintah menyetujui perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 10 Desember 2019.

Pinjaman dari Pemda Indramayu

Berdasarkan surat perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan Pemda Kabupaten Indramayu tentang Pendanaan Kredit Tunda Jual Gabah Melalui Sistem Gada di Wilayah Kabupaten Indramayu No.27/TR.2.0010/VIII/2003-No.581/1062/Distan tanggal 05 Agustus 2003, Perusahaan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang (jangka waktu 10 tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian ini) sebesar Rp600.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12% per tahun.

Selanjutnya berdasarkan Addendum No.1275/TR.200.112/XII/2004 - No.581/1459/Distan tanggal 24 Desember 2004 disebutkan bahwa selama jangka waktu perjanjian, Pihak Perusahaan dapat melunasi sebagian atau seluruh pinjaman modal kerja dan Pihak Pemda Indramayu dapat menambah atau menarik dan menempatkan kembali pinjaman modal kerja dengan persetujuan kedua belah pihak.

Saldo pinjaman dari Pemda Indramayu per 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp600.000.000 dan Rp500.000.000.

Pinjaman dari Pemda Purbalingga

Pinjaman dari Pemerintah Daerah Purbalingga sebesar Rp750.000.000,- yang digunakan untuk Pendanaan modal kerja Kredit KRISTA, sesuai surat perjanjian kerjasama antara Perusahaan dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Skala Rumah Tangga Melalui Upaya Peningkatan Penguatan Pembiayaan No.1039/SP.300.233/XI/07 - No.538/22 Tahun 2007 tanggal 29 Nopember 2007, Perusahaan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang (jangka waktu 3 tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian ini) sebesar Rp1.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5% per tahun.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

22. PINJAMAN DARI PEMERINTAH (lanjutan)

Tidak ada Aset Perusahaan yang dijadikan sebagai agunan atas fasilitas pinjaman diatas.

Tidak ada pembatasan keuangan dan pembatasan lainnya yang dipersyaratkan oleh pihak-pihak kreditor diatas.

Perusahaan senantiasa melunasi pembayaran bunga yang telah jatuh tempo.

23. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA DAN PENDAPATAN DITANGGUHKAN

Merupakan pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan pendapatan sewa gedung yang ditangguhkan sesuai dengan umur sewa, terdiri dari:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
a. Pendapatan Diterima Dimuka		
1. Sewa Gedung Ditangguhkan Yang Akan diamortisasi dalam satu tahun	1.637.488.636	1.637.488.636
2. Sewa Gedung Diterima Dimuka	1.982.674.380	1.160.970.684
Jumlah	3.620.163.016	2.798.459.320
b. Pendapatan Ditangguhkan		
Sewa Gedung Harco (Catatan 39)		
- Pendapatan Sewa Ditangguhkan	26.063.360.798	27.700.849.434
- Sewa Gedung Ditangguhkan Yang Akan Diamortisasi Dalam Satu Tahun	(1.637.488.636)	(1.637.488.636)
	24.425.872.162	26.063.360.798

24. HUTANG LANCAR LAINNYA

Terdiri dari:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Jasa Produksi,	94.490.795.439	65.388.264.921
- Dana Sosial dan Dana Pendidikan	2.589.219.695	3.059.494.015
- Iuran Taspen/THT, Askes	9.561.620.536	7.856.487.871
- Hutang Pegawai	4.001.965.358	2.903.739.030
- Bea Lelang	733.847.876	573.657.085
- Program Kemitraan dan Bina Lingkungan	227.036.601	131.201.200
- Hutang Lainnya	6.564.397.524	9.739.492.564
Jumlah	118.168.883.029	89.652.336.686

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

25. KEWAJIBAN ESTIMASI UNTUK IMBALAN KERJA

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Kewajiban Program Pensiun	31.891.137.289	58.356.612.641
- Kewajiban Program Pesangon	15.112.523.038	5.066.967.735
- Kewajiban Program Cuti Besar	3.579.287.384	-
Jumlah	50.582.947.711	63.423.580.376

a. Program Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 4,75% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 11,75% dari gaji pokok karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun Perum Pegadaian. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi No.KP.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan No. Kep-336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2009:

	31 Desember	
	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Aset Program	316.263.400.288	261.882.369.481
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat Pensiun	455.862.451.749	309.793.674.006
Defisit Pendanaan	139.599.051.461	47.911.304.525
Kewajiban Transisi yang belum diakui	-	-
Laba/Rugi Aktuarial belum diakui	(107.707.914.172)	10.445.308.116
Beban Pensiun Masih Harus Dibayar	31.891.137.289	58.356.612.641

Rekonsiliasi perubahan saldo Beban Pensiun Yang Masih Harus Dibayar selama tahun 2009 dan 2008:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Saldo awal tahun	58.356.612.641	42.939.249.290
Beban pensiun tahun berjalan	9.699.619.075	55.552.435.264
Kontribusi iuran ke Dana Pensiun	(36.165.094.427)	(40.135.071.913)
Saldo akhir tahun	31.891.137.289	58.356.612.641

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

25. KEWAJIBAN ESTIMASI UNTUK IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Adapun beban yang diakui pada tahun 2009 dan 2008 terdiri dari komponen sebagai berikut:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Beban jasa kini	6.535.615.408	1.987.248.281
Beban bunga	32.528.335.771	35.090.956.283
-/- Imbal Hasil Investasi	29.364.332.104	(2.551.807.454)
Beban Amortisasi Kewajiban Transisi	-	15.922.423.245
Amortisasi Laba/Rugi Aktuaria	-	-
Beban Yang Diakui	9.699.619.075	55.552.435.263

b. Program Pesangon

Penyelenggaraan Program Pesangon (UP4) didasarkan pada Peraturan Direksi No. 1817/Kp300323/2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK). Manfaat Pesangon berupa pembayaran jumlah *lumpsum* diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan. Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2009:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat Pesangon	268.440.550.756	89.043.747.511
Defisit Pendanaan	268.440.550.756	89.043.747.511
Kewajiban Transisi yang belum diakui	(74.273.920.142)	(79.509.348.469)
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	179.054.107.576	4.467.431.307
Beban Pesangon yang Masih Harus Dibayar	15.112.523.038	5.066.967.735

Rekonsiliasi perubahan saldo Beban Pesangon Yang Masih harus Dibayar selama tahun 2009:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Saldo awal tahun	5.066.967.735	-
Beban yang dibentuk	47.994.089.361	22.596.949.572
Pesangon yang dibayarkan	(37.948.534.058)	(17.529.981.837)
Saldo akhir tahun	15.112.523.038	5.066.967.735

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2009 terdiri dari:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Beban Jasa Kini	15.664.864.970	7.192.148.029
Beban Bunga	9.439.593.489	10.169.373.216
Beban Amortisasi Kewajiban Transisi	5.235.428.327	5.235.428.327
a. Peserta 50th keatas (<i>vested</i>) dibebankan sekaligus	12.167.558.527	-
b. Peserta dibawah 50th (diamortisasi sisa masa kerja masing masing)	5.576.664.048	-
Amortisasi Laba/Rugi Aktuaria	-	-
Beban Yang Diakui	47.994.089.361	22.596.949.572

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

25. KEWAJIBAN ESTIMASI UNTUK IMBALAN KERJA (Lanjutan)

c. Program Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tetap.

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Aset Program	-	-
Nilai Tunai Kewajiban Manfaat Cuti Besar	32.478.042.882	-
Defisit Pendanaan	32.478.042.882	-
Kewajiban Transisi yang belum diakui	(25.708.197.052)	-
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(3.190.558.446)	-
Beban Cuti Besar yang Masih Harus Dibayar	3.579.287.384	-

Rekonsiliasi kewajiban manfaat karyawan diestimasi yang diakui di neraca dan beban manfaat yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Saldo Awal Tahun	-	-
Beban Cuti Besar Tahun Berjalan	7.673.165.694	-
Pembayaran Cuti Besar	(4.093.878.310)	-
Saldo Akhir Tahun	3.579.287.384	-

Adapun beban yang dibentuk selama tahun 2009 terdiri dari:

	2009 (Rp)	2008 (Rp)
Beban jasa kini	3.297.197.635	-
Beban bunga	2.858.676.323	-
-/- Imbal Hasil Investasi	-	-
Beban amortisasi kewajiban transisi	1.517.291.736	-
Beban Yang Diakui	7.673.165.694	-

Asumsi Aktuarial

Perhitungan beban dan kewajiban aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial sebagaimana tertuang dalam laporannya No.1688/KIS/LA/03/2010, No.1689/KIS/LA/03/2010 dan No.1690/KIS/LA/03/2010 tanggal 10 Maret 2010. Perhitungan aktuaris dilakukan dengan frekuensi setahun sekali, adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

- (1) metode perhitungan yang dipergunakan: *Projected Unit Credit*,
- (2) tingkat bunga diskonto yang dipergunakan per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah 11,75% p.a. dan 12% p.a.,
- (3) tingkat bunga imbal hasil investasi aset program per 31 Desember 2009 dan 2008: 10,5% dan 12% p.a.,
- (4) tingkat kenaikan gaji berkala untuk 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2008 7,0% per tahun dan 3,5% per tahun.,
- (5) tabel mortalita yang dipergunakan: Tabel Mortalita Indonesia II.,
- (6) usia pensiun 56 tahun.,
- (7) jumlah pegawai per 31 Desember 2009 dan 2008: 6.630 dan 5.884.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

26. EKUITAS

Merupakan Penyertaan Pemerintah yang berasal dari kekayaan bersih pada saat pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum, Penyertaan Modal Pemerintah, Laba (Rugi) Surat Berharga Yang Belum Direalisasikan dan Saldo Laba dengan rincian sebagai berikut:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Modal Awal	205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah	46.252.000.000	46.252.000.000
	<u>251.252.000.000</u>	<u>251.252.000.000</u>
Laba (Rugi) Surat Berharga Yang Belum Direalisasi	-	-
Saldo Laba :		
- Ditentukan Penggunaanya	1.490.010.668.212	1.059.199.340.092
- Belum Ditentukan Penggunaanya	798.195.518.921	633.548.328.120
Jumlah Ekuitas	<u>2.539.458.187.133</u>	<u>1.943.999.668.212</u>

a. Saldo Laba Ditentukan Penggunaanya

Merupakan saldo laba yang telah ditentukan penggunaanya berdasarkan ketentuan yang berlaku (lihat catatan 2r) dengan rincian sebagai berikut:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Saldo awal	1.059.199.340.092	751.821.075.454
Penambahan:		
- Cadangan Umum	338.186.328.120	135.532.264.638
- Cadangan Tujuan	92.625.000.000	171.846.000.000
Jumlah penambahan	<u>430.811.328.120</u>	<u>307.378.264.638</u>
Saldo Akhir	<u>1.490.010.668.212</u>	<u>1.059.199.340.092</u>

b. Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaanya

Merupakan saldo laba yang pada tanggal neraca belum ditentukan penggunaanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi laba belum ditentukan penggunaanya berdasarkan surat dari Kementrian BUMN (lihat Catatan 2r) adalah sebagai berikut:

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
Dana Pembangunan Semesta	190.065.000.000	147.000.000.000
Cadangan Umum	338.186.328.120	135.532.264.638
Cadangan Tujuan	92.625.000.000	171.846.000.000
Cadangan Pelunasan Obligasi	-	-
Dana Program Kemitraan	6.336.000.000	8.552.000.000
Dana Bina Lingkungan	6.336.000.000	8.552.000.000
Sub Jumlah	<u>633.548.328.120</u>	<u>471.482.264.638</u>
Tantiem dan Jasa Produksi	-	17.248.500.000
Sub Jumlah	<u>633.548.328.120</u>	<u>488.730.764.638</u>

**Tantiem dan jasa produksi telah disajikan kembali sebagai biaya pada tahun yang bersangkutan (lihat Catatan 43)*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

27. PENDAPATAN SEWA MODAL

Terdiri dari:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
Usaha Gadai		
- Golongan A	7.366.591.346	13.476.864.885
- Golongan B	173.877.650.711	186.581.291.439
- Golongan C	2.764.540.717.744	1.983.282.280.764
- Golongan D	267.667.925.930	158.831.402.841
	<u>3.213.452.885.731</u>	<u>2.342.171.839.929</u>
Usaha Syariah		
- Golongan A	208.663.809	219.194.281
- Golongan B	5.411.772.698	5.107.330.695
- Golongan C	15.796.451.294	12.684.924.498
- Golongan D	81.189.936.038	55.660.748.124
- Golongan E	37.301.647.968	23.619.251.692
- Golongan F	23.540.270.775	13.836.692.567
- Golongan G	14.567.432.598	8.037.575.595
- Golongan H	5.360.494.672	2.034.099.585
- Golongan I	70.004.108	12.387.200
	<u>183.446.673.960</u>	<u>121.212.204.237</u>
Usaha Lainnya		
- Golongan E	20.035.343.551	17.143.722.062
- Golongan F	170.355.073.473	111.760.816.114
- Golongan G	97.032.850	65.744.925
- Gadai Efek	20.077.343.029	20.633.570.126
- Mulia	2.321.193.747	-
	<u>212.885.986.650</u>	<u>149.603.853.227</u>
Jumlah	<u>3.609.785.546.341</u>	<u>2.612.987.897.393</u>

Tidak ada pendapatan sewa modal yang memiliki hubungan istimewa dengan Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

28. PENDAPATAN ADMINISTRASI

Merupakan pendapatan administrasi atas barang jaminan milik nasabah yang ditentukan berdasarkan golongan kredit, terdiri dari:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
Usaha Gadai		
- Golongan A	1.695.510.700	2.781.666.700
- Golongan B	22.310.366.053	22.037.977.797
- Golongan C	307.529.401.900	216.820.102.700
- Golongan D	39.042.490.159	24.202.556.150
	<u>370.577.768.812</u>	<u>265.842.303.347</u>
Usaha Syariah		
- Golongan A	22.572.100	21.355.700
- Golongan B	992.624.950	786.077.450
- Golongan C	2.060.707.000	1.427.715.500
- Golongan D	7.024.953.300	4.419.702.000
- Golongan E	1.694.822.600	1.032.944.230
- Golongan F	915.900.000	515.741.150
- Golongan G	370.829.000	204.620.000
- Golongan H	71.906.000	30.398.000
- Golongan I	15.144.000	7.050.000
	<u>13.169.458.950</u>	<u>8.445.604.030</u>
Usaha Lainnya		
- Golongan E	771.350.301	374.866.785
- Golongan F	20.248.341.235	19.692.974.445
- Golongan G	5.539.000	2.593.000
- Gadai Efek	508.602.796	622.135.275
	<u>21.533.833.332</u>	<u>20.692.569.505</u>
Jumlah	<u>405.281.061.094</u>	<u>294.980.476.882</u>

Pendapatan Administrasi Usaha Lain merupakan pendapatan administrasi atas Kredit Angsuran Serbaguna, Kredit Angsuran Fidusia, Kredit Tunda Jual Gabah dan Kredit Gadai Efek.

29. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Terdiri dari:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Uang Kelebihan Lewat Waktu*	19.283.738.489	21.773.171.610
- Pendapatan Usaha PT BLAG	127.240.000	558.499.895
- Pendapatan Jasa Pengiriman Uang (WU)	1.909.305.093	294.249.601
Jumlah	<u>21.320.283.582</u>	<u>22.625.921.106</u>

* *lihat Catatan 18*

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

30. BEBAN BUNGA DAN PROVISI

Rincian Beban Bunga dan Provisi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 sebagai berikut:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Bunga Obligasi	307.125.945.719	236.102.758.607
- Bunga Bank BCA	147.121.976.221	82.422.323.973
- Bunga BRI	306.250.224.036	175.341.163.259
- Bunga RUF	11.622.261.336	14.890.405.819
- Bunga Bank Mandiri	491.074.950.486	263.277.125.585
- Bunga Promes	-	3.698.496.971
- Bunga Bank Bukopin	81.367.931	5.683.389.170
- Bunga Bank Niaga	-	7.851.972.222
- Bunga Provisi, Administrasi dan Pengelolaan Pinjaman	39.874.747.362	35.176.120.801
- Bunga Pinjaman SUP dan Pemda	36.369.510.219	21.720.626.667
- Amortisasi Biaya Emisi Obligasi	8.439.348.398	7.485.103.481
Jumlah	1.347.960.331.708	853.649.486.555

Tidak ada biaya bunga yang dikapitalisasi ke dalam nilai aset.

31. BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP

Merupakan beban penyusutan bangunan, inventaris dan kendaraan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp52.130.492.608 dan Rp39.600.456.008. (*Lihat catatan 12*)

32. BEBAN PEGAWAI

Merupakan kompensasi pegawai tetap seperti gaji, upah, tunjangan dan jasa produksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp990.683.408.794 dan Rp808.443.478.685.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

33. BEBAN UMUM

Rincian Beban Umum untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 sebagai berikut:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Beban Perjalanan Dinas	94.496.898.783	53.411.070.128
- Beban Listrik, Telpon, Air dan Gas	37.845.813.782	27.690.440.403
- Beban Keamanan	90.313.680.857	22.926.640.662
- Beban Jasa <i>Outsourcing</i> Pegawai	65.349.162.350	69.869.034.538
- Beban Operasional Perusahaan	42.826.607.329	25.550.364.181
- Beban Cetak /ATK	26.643.372.990	19.965.489.285
- Beban Asuransi	6.899.481.225	8.437.338.728
- Beban Pemeliharaan	19.388.609.533	15.340.854.994
- Beban Sewa	45.561.906.015	23.883.714.329
- Beban Diklat	23.836.519.918	12.133.959.857
- Beban Kendaraan	27.718.295.891	20.513.019.763
- Beban Konsultan	3.453.501.177	1.214.976.292
- Beban Penyisihan Piutang	899.478.069	14.333.758.196
- Beban Promosi	17.776.924.060	9.081.827.569
- Beban Papan Nama	16.554.220.852	10.586.371.582
- Beban Iklan	10.961.261.420	3.290.729.398
- Beban Direksi	17.244.363.973	-
- Beban Lainnya	10.803.917.829	6.053.744.414
Jumlah	558.574.016.053	344.283.334.319

Beban Lainnya merupakan Beban Pemasaran, Beban Pengembangan, Beban Teknologi Informasi (TI), Beban Penelitian & Pengembangan dan Beban Izin Usaha.

34. PENDAPATAN SEWA GEDUNG

Merupakan pendapatan sewa atas bangunan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp3.596.936.674 dan Rp3.532.176.189.

Pihak-pihak yang menyewa gedung Perusahaan adalah PT Harco Indah dan perorangan atau masyarakat yang menggunakan gedung serbaguna "Langen Palikrama" serta yang menggunakan/menempati beberapa aset milik Perusahaan yang tersebar di beberapa daerah.

35. PENDAPATAN JASA GIRO

Merupakan pendapatan bunga atas rekening giro bersih setelah dikurangi pajak untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp1.199.186.839 dan Rp978.858.623.

36. LABA PENJUALAN ASET TETAP

Merupakan laba atas penjualan tanah kosong, inventaris dan kendaraan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp583.803.400 dan Rp3.454.952.983 (Lihat Catatan No.2h dan 12)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

37. PENDAPATAN (BEBAN) LAINNYA

a. Pendapatan lainnya terdiri dari:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Pendapatan Diskon dan Selisih Pembulatan Kas	151.429.695	59.686.811
- Laba Penjualan BLP, BJYD dan Marhun yang disisihkan	6.266.691.595	3.845.210.794
- Kartu Nasabah Hilang	450.225.727	364.468.718
- Pendapatan Denda Angsuran/Keterlambatan Kredit	17.364.928.902	1.510.003.006
- Pendapatan dari Kredit UKM yang recovery	865.608.133	541.050.369
- Lain-lain	3.761.593.669	2.531.861.765
Jumlah	28.860.477.721	8.852.281.463

b. Beban Lain-Lain terdiri dari:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Rugi Penjualan BLP, BJYD, dan Marhun yang disisihkan	5.015.760.732	-
- Rugi Pertukaran/Pengalihan Aset Tetap	16.214.196	194.430.161
Jumlah	5.031.974.928	194.430.161

Pendapatan denda angsuran keterlambatan kredit merupakan pendapatan yang diterima per kas dan perusahaan tidak menetapkan kebijakan pengakuan pendapatan denda secara akrual.

38. PAJAK PENGHASILAN

Terdiri dari:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Beban Pajak Kini	(318.209.384.080)	(294.752.092.100)
- Manfaat Pajak Tangguhan	157.831.442	21.884.491.309
Jumlah	(318.051.552.638)	(272.867.600.791)

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

38. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

a. Beban Pajak Kini

Taksiran laba kena pajak Perusahaan, dan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 sebagai berikut:

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
Laba Konsolidasi sebelum pajak (Laba)/Rugi Anak Perusahaan	1.116.247.275.178 260.925.932	901.241.378.911 (27.756.139)
Laba Komersial	1.116.508.201.110	901.213.622.772
Beda Temporer:		
- Penyusutan Aset Tetap	3.651.288.154	163.241.108
- Penyisihan Piutang	899.478.069	14.333.758.196
- Estimasi Beban Jasa Produksi yang Masih Harus Dibayar	29.102.530.518	48.139.764.921
- Beban Manfaat Karyawan	(12.840.632.665)	20.484.331.086
	20.812.664.076	83.121.095.311
Beda Tetap :		
- Biaya Perawatan Inventaris Rumah Jabatan	13.293.904	-
- Biaya Listrik, Telpon, Rehab Rumah Dinas	1.402.702.065	273.511.277
- Biaya Pemeliharaan Perbaikan dan ekspliotasi mobil Dinas	708.000.000	240.000.000
- Biaya Denda Pajak	9.324.728	2.479.765
- Biaya Lainnya/ Sumbangan	357.936.970	398.313.179
- Biaya Ulang Tahun RI/Pegadaian	1.247.456.630	657.169.728
- Biaya Jamuan dan Representasi	567.970.268	794.455.220
- Biaya Penyewaan Gedung Bangunan	214.462.384	341.845.563
- Pendapatan Jasa Giro	(1.199.186.839)	(945.008.950)
- Pendapatan Sewa Gedung	(3.596.936.674)	(3.532.176.189)
- Laba Penjualan Aktiva Tetap	(583.803.400)	
	(858.779.965)	(1.769.410.407)
Laba Fiskal	1.136.462.085.221	982.565.307.676
Laba Fiskal (Dibulatkan)	1.136.462.085.000	982.565.307.000
	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
Pajak Penghasilan Badan		
- Tarif 10%	-	5.000.000
- Tarif 15%	-	7.500.000
- Tarif 30%	-	294.739.592.100
- Tarif 28%	318.209.384.080	-
	318.209.384.080	294.752.092.100
Kredit Pajak:		
- Angsuran PPh Pasal 25	(357.606.095.004)	(215.630.625.951)
Kurang (Lebih) bayar PPh Pasal 29	(39.396.710.924)	79.121.466.149

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun 2009 dan 2008 sesuai dengan SPT PPh Badan yang disampaikan ke kantor pajak. Selama ketiga tahun fiskal tersebut Perusahaan tidak pernah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktorat Jenderal Pajak.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

38. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

b. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Rincian aset pajak tangguhan Perusahaan adalah sebagai berikut:

	Dibebankan ke Laporan laba/rugi		
	31 Desember 2008	Penyesuaian Tarif (25%)*	Beban Tahun Berjalan **
			31 Desember 2009
Perbedaan temporer			
-Penyisihan piutang ragu-ragu	4.845.616.920	(1.031.725.793)	224.869.517
-Estimasi Beban Jasa Produksi YMHD	18.308.714.178	(1.961.647.948)	7.275.632.630
-Penyusutan aset tetap	1.812.788.376	(194.227.326)	912.822.038
-Beban Manfaat Karyawan	17.758.602.506	(1.902.707.411)	(3.210.158.166)
	42.725.721.980	(5.090.308.478)	5.203.166.019
			42.883.553.422

	Dibebankan ke Laporan laba/rugi		
	31 Desember 2007	Penyesuaian Tarif (28%)*	Beban Tahun Berjalan **
			31 Desember 2008
Perbedaan temporer			
-Penyisihan piutang ragu-ragu	891.604.955	(59.440.330)	4.013.452.295
-Estimasi Beban Jasa Produksi YMHD	5.174.550.000	(344.970.000)	13.479.134.178
-Penyusutan aset tetap	1.893.300.928	(126.220.062)	45.707.510
-Beban Manfaat Karyawan	12.881.774.788	(858.784.986)	5.735.612.704
	20.841.230.671	(1.389.415.378)	23.273.906.687
			42.725.721.980

*Penyesuaian tarif dari semula 28% menjadi 25% (penyesuaian penurunan 3%)

**Manfaat/beban pajak tangguhan ditahun 2009 menggunakan tarif 25%

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aset pajak tangguhan dapat terpulihkan dalam tahun-tahun mendatang.

39. PERIKATAN (KOMITMEN) JANGKA PANJANG

a. Perikatan Dengan PT HARCO Indah

Pada tahun 1968 Perusahaan dengan PT Harco Indah, secara bersama-sama telah menandatangani Akta Persetujuan No.224 tanggal 30 Mei 1968 dengan notaris Mohamad Said Tadjoedin, SH, akta ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perjanjian Tambahan No.178, tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, SH selanjutnya dibuat "Perjanjian BOT".

Berdasarkan Perjanjian BOT tersebut, PT Harco Indah berkewajiban membangun, mengelola dan menyerahkan kepada perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2000, gedung yang berlokasi di Jl. Samanhudi Raya No.133, Jakarta Pusat dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan. Pada tanggal 27 Januari 1997 gedung tersebut terbakar, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diserahkan sebagaimana diatur dalam perjanjian BOT karena tidak dapat dioperasikan.

39. PERIKATAN (KOMITMEN) JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Berdasarkan pasal 2 Akta Perjanjian Tambahan No.178 tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, SH, apabila terjadi kebakaran/huru-hara, maka PT Harco Indah wajib membangun kembali gedung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan PT Harco Indah mempunyai hak perpanjangan waktu hak guna penuh untuk jangka waktu selama gedung dilaksanakan perbaikan. PT Harco Indah wajib menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut pada Perusahaan pada tanggal 30 Nopember 2005 tanpa syarat dengan kondisi baik dan layak pakai serta sebelumnya telah diadakan pengecatan secara menyeluruh dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Pada tanggal 30 Nopember 2005 PT Harco Indah telah menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut kepada Perusahaan dengan kondisi baik, layak pakai dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Selanjutnya gedung HARCO Pasar Baru tersebut disewakan senilai Rp32.749.772.728 (bersih setelah pajak) kepada PT Harco Indah untuk jangka waktu 20 tahun (terhitung sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 30 Nopember 2025) sesuai dengan Surat Perjanjian yang dikukuhkan dengan Akta No.6 tanggal 17 Nopember 2005, Notaris Buniarti Tjandra, SH.

b. Perikatan Dengan PT Graha Asadhana

Pada tahun 1993, Perusahaan dengan PT Graha Asadhana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No.62/UTE/IX/93 dan No.015/GA/DIR.UM/0993 tanggal 1 September 1993 tentang Pemanfaatan Tanah Perum Pegadaian di Jl. Salemba Raya No.2, Jakarta Pusat untuk Perkantoran dan Pertokoan dengan sistem *Build Operate and Transfer (BOT)*.

PT Graha Asadhana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Graha Asadhana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersil. Tanggal pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal 28 Februari 1995.

PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai kepada Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000 yang dibayar 50% pada saat ditandatangani perjanjian ini dan 50% lagi pada saat pembangunan dinyatakan selesai. Selama jangka waktu pengelolaan PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai sebesar Rp140.000.000 pertahun kepada Perusahaan. Pembayaran tahun pertama paling lambat tiga bulan sebelum ulang tahun pertama pengoperasian komersial, sedangkan pembayaran tahunan berikutnya wajib dilunasi paling lambat setiap tiga bulan setelah ulang tahun berikutnya tanggal pengoperasian komersial. Akun yang mencatat penerimaan dari PT Graha Asadhana adalah Pendapatan Lain-lain.

PT Graha Asadhana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada perusahaan dalam keadaan terawat baik lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung perkantoran dan pertokoan komersial.

39. PERIKATAN (KOMITMEN) JANGKA PANJANG (Lanjutan)

c. KSO Pertokoan Komersial (Cimahi)

Pada tahun 2005, Perusahaan dengan PT Tapak Sarana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No.397/SP.100231/2005 dan No.001/TS/PGDN/BOT/07/05 tanggal 07 Juli 2005 tentang Pemanfaatan Tanah Perum Pegadaian di Jl. Pasar Atas No.68, Cimahi, Jawa Barat untuk Pertokoan Komersial dengan sistem *Build Operate and Transfer (BOT)*.

PT Tapak Sarana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Tapak Sarana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian. Selama masa pembangunan PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung dalam masa pembangunan (*construction all risk*) tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara dan bencana alam lainnya.

PT Tapak Sarana wajib membayar uang kompensasi sejumlah Rp1.558.884.000 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

- Tahap pertama : 10% (sepuluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp155.888.400 dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian.
- Tahap kedua : 40% (empat puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp623.553.600 dibayarkan enam bulan setelah penandatanganan Perjanjian.
- Tahap ketiga : 50% (lima puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp779.442.000 dibayarkan lima belas bulan setelah penandatanganan Perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama Jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersial. Tanggal dimulainya pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal pertama setelah masa persiapan pengoperasian komersial gedung berakhir. Selama masa pengelolaan, PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung atas nama Perum Pegadaian tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan bencana alam lainnya dengan klausul *all risk and full covered*.

PT Tapak Sarana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada perusahaan dalam keadaan terawat baik lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung pertokoan komersial.

Perusahaan baru menerima pembayaran uang kompensasi tahap pertama (10% atau sebesar Rp155.888.400) dan pembangunan tersebut berdasarkan Memorandum Perusahaan No.17/UL/I/2007, tanggal 29 Januari 2007 baru mencapai sekitar 33,60%. Berdasarkan hasil pembahasan antara kedua belah pihak (Perum Pegadaian dengan PT Tapak Sarana) tanggal 22 Januari 2007 dan Surat Pernyataan PT Tapak Sarana No. 0021/Dir-Bks/01/07 tanggal 23 Januari 2007, apabila sampai dengan tanggal 14 Maret 2007 PT Tapak Sarana tidak bisa membayar kekurangan uang kompensasi, maka kontrak/PKS bersedia diputus sampai dengan waktu yang ditentukan. PT Tapak Sarana tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berkenaan dengan kegagalan PT Tapak Sarana memenuhi kewajibannya membayar kompensasi Tahap II dan III sebagaimana diuraikan di atas, Perusahaan telah mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor gugatan 52/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 27 April 2009.

39. PERIKATAN (KOMITMEN) JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat No. 52/PDT.G/2009/PN.BB tanggal 31 Agustus 2009 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa PT Tapak Sarana (Tergugat) telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian kerjasama (PKS) yang telah dibuat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp.2.805.991.200 (dua milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Proyek Pembangunan Pertokoan komersial dengan sistem BOT dan menyerahkan kepemilikan Bangunan Pertokoan Komersial dengan sistem BOT tersebut yang telah berdiri di Cabang Perum Pegadaian Cimahi dari Tergugat kepada Penggugat.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.45/Pdt.BD/2009/PN.BB tanggal 11 September 2009.

40. INFORMASI LAIN-LAIN (KONTINJENSI)

- a. Pada tanggal 16 Januari 2003 nasabah yang bernama Ny. Sena Wiradjaja, melalui Kantor Pengacara Amir Indah & Partners menggugat Perum Pegadaian. Gugatan perdata tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2003 dengan No. Perkara. 14/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tentang Gugatan Perdata Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp20.962.500.000 ditambah bunga 2% per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan Perdata tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi terhadap 32 potong barang jaminan atas nama nasabah Ny. Sena Wiradjaja yang hilang saat terjadinya pencurian di Kantor Cabang Kebayoran Baru, pada tanggal 12-13 September 1999. Nilai taksiran barang jaminan tersebut sebesar Rp612.789.958. Pinjaman Yang Diberikan (PYD) yang dijamin oleh Barang Jaminan tersebut sudah jatuh tempo, tetapi belum ditebus oleh nasabah bersangkutan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat No. 14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 2 Juli 2003 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Perum Pegadaian (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Mahful Umar (Tergugat I) secara renteng bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 765.897.450 (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
- Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

40. INFORMASI LAIN-LAIN (KONTINJENSI)

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.139/SRT.PDT.BDG2003/ PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2003 dan menyerahkan memori banding tanggal 17 Februari 2004 dan telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2004 No. 14/PDT.G/2003/PN/JKT.PST.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.132/PDT/2004/PT.DKI tanggal 7 Maret 2005 dengan Amar Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 2 Juli 2003. Dengan dibatalkannya putusan PN Jakarta Pusat tersebut maka Perum Pegadaian pada pihak yang menang dalam perkara tersebut.

Berdasarkan putusan banding tersebut, Pihak Ny. Sena Wiradjaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perum Pegadaian selaku termohon kasasi mengajukan Kontra Memori kasasi pada tanggal 6 Oktober 2005 dan berkas permohonan tersebut telah dikirim ke Mahkamah Agung RI oleh PN Jakarta Pusat dan telah diterima dengan Nomor Register 2407 K/PDT/2005 tanggal 22 Desember 2005.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2407/K/PDT/2005 j.o. No. 14/PDT.G/2003/PN.Jkt.Pst yang pemberitahuannya kepada Perusahaan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2009, permohonan kasasi yang diajukan Ny. Sena Wiradjaya telah ditolak.

- b. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2008 Perusahaan akan melakukan perubahan status badan hukum dari Perum menjadi Persero. Sehubungan dengan hal tersebut telah dibentuk Tim Persiapan Pemerseroan Perum Pegadaian sesuai dengan Surat Direksi No.26/SP.200.232/2008 tanggal 7 Januari 2008 dan sampai dengan tanggal laporan perubahan ini masih dalam proses di Kementerian BUMN.

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

41. INFORMASI SEGMENT

Informasi segmen Perusahaan per 31 Desember 2009 disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:

Wilayah	Daerah Operasi	Jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Sumatera	Pulau Sumatera	4 (empat) Kantor Wilayah dengan 638 Kantor Operasional
Jawa	Pulau Jawa	5 (lima) Kantor Wilayah dengan 1.665 Kantor Operasional
Kalimantan	Pulau Kalimantan	1 (satu) Kantor Wilayah dengan 197 Kantor Operasional
Bali & Nusa Tenggara	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	1 (satu) Kantor Wilayah dengan 281 Kantor Operasional
Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa)	Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua	2 (dua) Kantor Wilayah dengan 516 Kantor Operasional

Catatan : Per 1 Juli 2008 dilakukan perubahan Kanwil di pulau Sumatera dan Jawa, dimana pulau Sumatera dari 2 Kanwil menjadi 4 Kanwil sedangkan pulau Jawa dari 7 Kanwil menjadi 5 Kanwil. Rincian jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu per 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	Tahun 2009	Tahun 2008
Jumlah Kantor Cabang	789	758
Jumlah Kantor Cabang Pembantu	2508	1.331

Informasi segmen Perusahaan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Usaha Menurut Wilayah

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Sumatera	519.514.777.020	322.332.131.175
- Jawa	1.986.481.151.610	1.559.527.340.905
- Kalimantan	297.841.161.095	194.682.151.998
- Bali & Nusa Tenggara	451.475.647.029	325.661.781.505
- Sulmapa	781.074.154.263	528.390.889.798
Jumlah Pendapatan Usaha	4.036.386.891.017	2.930.594.295.381

b. Hasil Usaha Menurut Wilayah

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Sumatera	130.083.490.449	117.638.272.911
- Jawa	324.828.488.879	259.794.922.606
- Kalimantan	115.470.294.758	82.970.005.928
- Bali & Nusa Tenggara	179.533.238.637	156.378.858.088
- Sulmapa	337.123.129.131	267.835.480.281
Jumlah Laba Usaha	1.087.038.641.854	884.617.539.814
Pendapatan (Beban) Lain-lain	29.208.429.706	16.623.839.097
Laba Sebelum PPh Badan	1.116.247.071.559	901.241.378.911

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2009 dan 2008
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

41. INFORMASI SEGMENT (Lanjutan)

c. Aset Menurut Wilayah

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Sumatera	1.991.892.847.238	1.303.132.484.814
- Jawa	8.057.810.687.899	5.649.760.471.145
- Kalimantan	1.100.776.513.822	717.872.812.838
- Bali & Nusa Tenggara	1.709.297.858.887	1.142.329.105.261
- Sulmapa	2.999.686.220.409	1.958.991.595.040
Jumlah Aset	15.859.464.128.255	10.772.086.469.098

d. Aset Tetap Menurut Wilayah

	31-12-2009 (Rp)	31-12-2008 (Rp)
- Sumatera	54.068.227.567	50.633.067.806
- Jawa	255.935.121.787	206.404.867.803
- Kalimantan	40.696.206.352	39.902.834.704
- Bali & Nusa Tenggara	38.320.802.982	38.523.723.538
- Sulmapa	53.536.720.878	51.721.667.221
Jumlah Aset Tetap	442.557.079.566	387.186.161.072

e. Beban Penyusutan Aset Tetap Menurut Wilayah

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Sumatera	9.922.369.744	4.406.845.485
- Jawa	26.436.420.688	21.513.245.112
- Kalimantan	4.144.483.246	3.123.749.163
- Bali & Nusa Tenggara	5.405.946.584	3.726.559.113
- Sulmapa	6.221.272.346	6.830.057.135
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	52.130.492.608	39.600.456.008

f. Kewajiban Menurut Wilayah

	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)
- Sumatera	14.027.567.100	17.516.965.457
- Jawa	13.269.023.985.316	8.765.054.154.857
- Kalimantan	7.403.323.446	12.505.215.542
- Bali & Nusa Tenggara	8.863.964.037	13.896.370.512
- Sulmapa	20.687.101.223	19.114.094.517
Jumlah Kewajiban	13.320.005.941.122	8.828.086.800.885

42. STANDAR AKUNTANSI BARU/REVISI

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan beberapa Standar Akuntansi baru/revisi, antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.55 (revisi 2006) tentang Instrumen Keuangan dan (PSAK) 50 (Revisi 2006) tentang Penyajian Instrumen Keuangan. Pernyataan revisi ini menggantikan PSAK No. 55 tentang Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai dan PSAK 50 tentang Akuntansi Investasi Efek tertentu dan berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari PSAK revisi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangannya.

43. PENYAJIAN KEMBALI

Sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan 2r dan Catatan 26, Menteri Negara BUMN dengan surat No.S-487/MBU/2008 tanggal 9 Juni 2008 telah menetapkan pembagian laba tahun buku 2007 yaitu antara lain untuk jasa produksi dan tantiem dengan jumlah Rp17.248.500.000. Guna menyesuaikan pencatatan pembagian laba tersebut sejalan dengan PSAK 24 Revisi 2004 paragraf 22, Perusahaan telah memutuskan untuk mencatat pembayaran tambahan jasa produksi dan tantiem tersebut sebagai beban tahun buku 2007.

44. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

a. Penambahan Pinjaman dari PT Bank Mandiri, Tbk.

Pada tahun 2010 berdasarkan surat No.TOP.CRO/CLA.039/add/2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang addendum perjanjian kredit IV No.:KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 16 Maret 2009 akta No.17, perusahaan memperoleh tambahan fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri Tbk, sebesar Rp1.000.000.000.000,- sehingga nilai fasilitas kredit dari Bank Mandiri Tbk, seluruhnya berjumlah Rp4.500.000.000.000,- Fasilitas kredit ini diperpanjang selama satu tahun sampai dengan tanggal 20 February 2011 dengan tingkat bunga 10,50% pertahun (*Floating*)

b. Penambahan Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan akta perjanjian kredit No.08 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaries R.Ay.Poppy Darmawan,SH. perusahaan memperoleh Pinjaman Kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sebesar Rp400.000.000.000. Dan berdasarkan Surat No.KPS/2.4/051/R. tentang persetujuan Pemberian Penambahan Fasilitas Kredit sebesar Rp2.600.000.000.000,- sehingga menjadi Rp3.000.000.000.000. Fasilitas Kredit ini berjangka waktu 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjiann Kredit dengan tingkat suku bunga ditetapkan berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan di 4 bank (BNI,Mandiri,BRI,& BCA) yang diumumkan di harian Kompas ditambah *spread* 3,5%. Bunga dikenakan efektif setiap bulan dan akan direview setiap saat (ditetapkan sesuai dengan tarif yang berlaku pada setiap awal bulan).

45. INFORMASI PENTING LAINNYA

Tidak ada informasi penting lainnya yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2012**



Pegadaian

Mengatasi Masalah Tanpa Masalah

**PT PEGADAIAN (Persero)
DAN ENTITAS ANAK**

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Periode Sembilan Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2012**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7
Lampiran I – Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	
Lampiran II – Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	
Lampiran III – Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	
Lampiran IV – Laporan Arus Kas Konsolidasian	

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
UNTUK PERIODE 9 (SEMBILAN) BULAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Suwhono |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) | : | Jl. Masjid V No. 6 Rt 005 Rw 005 Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat |
| Nomor Telepon | : | (021) 3901461 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Dwi Agus Pramudya |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) | : | Jl. Demuna No. 3 RT.007 RW.006 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon | : | (021) 3155550 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum ;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Pebruari 2013

Direktur Utama,

Suwhono



Direktur Keuangan,

Dwi Agus Pramudya



Nomor : R/078.AGA/sat.3/2013

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pegadaian (Persero)**

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) ("Perusahaan") dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tanggal 1 April 2012 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian intern. Laporan keuangan konsolidasian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu dan pengendalian intern berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Selain itu, audit mencakup pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap kontrak, persyaratan bantuan, dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan entitas anak tanggal 31 Desember 2012, dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas konsolidasian untuk periode tanggal 1 April 2012 (tanggal pendirian) sampai dengan 31 Desember 2012 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2012 dan relevan bagi Perusahaan dan entitas anak.

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan entitas anak secara keseluruhan. Informasi tambahan yang terdapat pada Lampiran I - IV mengenai informasi keuangan konsolidasian PT Pegadaian (Persero) dan entitas anak untuk tanggal 31 Desember 2012 dan periode tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 (periode sembilan bulan) dengan perbandingan informasi keuangan konsolidasian Perum Pegadaian dan entitas anak untuk tanggal 31 Maret 2012 dan periode tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Maret 2012 (periode tiga bulan), serta informasi keuangan konsolidasian untuk tanggal 31 Desember 2011 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian laporan keuangan konsolidasian yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Manajemen PT Pegadaian (Persero) memutuskan untuk menyajikan informasi keuangan konsolidasian Perum Pegadaian dan entitas anak dengan pertimbangan bahwa PT Pegadaian (Persero) yang didirikan pada tanggal 1 April 2012 merupakan perubahan bentuk hukum dari Perum Pegadaian yang ditutup pada tanggal 31 Maret 2012 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, sehingga informasi keuangan konsolidasian tersebut dapat memberikan perbandingan posisi keuangan konsolidasian dan kinerja keuangan konsolidasian. Informasi tambahan tersebut adalah tanggung jawab manajemen PT Pegadaian (Persero). Informasi keuangan tambahan tersebut telah tercakup dalam prosedur audit yang kami terapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian, dan menurut pendapat kami, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, disampaikan secara terpisah kepada manajemen masing-masing dalam laporan kami No. R/011.AAT/sat/2013 dan R/012.AAT/sat/2013 tanggal 27 Februari 2013.



Saptoto Agustomo

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 27 Februari 2013

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 Rp
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Bank	3.b, 3.e, 4	647.155.058.012
Pinjaman Yang Diberikan <i>(Setelah Dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per 31 Desember 2012 sebesar Rp 166.509.942.957)</i>	3.f, 3.n, 5	26.387.345.711.299
Piutang Lainnya	6	34.665.556.643
Persediaan	3.h, 7	30.794.362.329
Uang Muka	8	70.604.560.739
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	9	1.236.656.434.238
Beban Dibayar di Muka	10	141.680.195.907
Jumlah Aset Lancar		<u>28.548.901.879.167</u>
ASET TIDAK LANCAR		
Piutang Kepada Pihak-pihak Berelasi <i>(Setelah Dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai per 31 Desember 2012 sebesar Rp 16.664.464.783)</i>	3.d, 11	5.282.141.029
Aset Pajak Tangguhan	3.o, 20.c	111.226.155.475
Aset Tetap <i>(Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 594.217.623.838)</i>	3.i, 12	548.661.263.875
Aset Lain-lain	3.j, 3.k, 3.l, 13	97.826.573.021
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>762.996.133.400</u>
JUMLAH ASET		<u>29.311.898.012.567</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan
Bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman Bank	14	17.378.982.918.261
Pinjaman <i>Medium Term Notes</i> yang Akan Jatuh Tempo		
Dalam Waktu Satu Tahun	15	240.000.000.000
Pinjaman Obligasi yang Akan Jatuh Tempo		
Dalam Waktu Satu Tahun	16	149.962.626.747
Pinjaman Lainnya	17	15.000.000.000
Utang Kepada Rekanan	18	41.826.400.843
Utang Kepada Nasabah	19	86.998.465.975
Utang Pajak	3.o, 20.b	261.171.493.540
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	21	223.730.724.952
Pendapatan Diterima di Muka	22.a	13.229.510.125
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	23	309.590.067.880
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		<u>18.720.492.208.323</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Pinjaman Obligasi - Setelah Dikurangi Bagian		
yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	24	4.506.584.758.802
Pinjaman Dari Pemerintah:		
Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	25	410.000.000.000
Pendapatan Ditangguhkan	22.b	19.513.406.254
Liabilitas Imbalan Kerja	3.m, 3.r, 6	283.423.150.663
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		<u>5.219.521.315.719</u>
Jumlah Liabilitas		<u>23.940.013.524.042</u>
EKUITAS		
Modal Saham		
Modal Dasar sebesar 1.000.000 saham masing-masing Rp 1.000.000 per saham		
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar 251.252 saham masing-masing Rp 1.000.000 per saham	27.a	251.252.000.000
Saldo Laba:	27.b	
- Ditentukan Penggunaannya		3.215.809.922.622
- Belum Ditentukan Penggunaannya		1.904.822.565.903
Jumlah Ekuitas		<u>5.371.884.488.525</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>29.311.898.012.567</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 (9 Bulan) Rp
PENDAPATAN USAHA		
Pendapatan Sewa Modal	3.p, 28	5.324.946.956.207
Pendapatan Administrasi	3.p, 29	488.206.255.936
		<u>5.813.153.212.143</u>
Pendapatan Usaha Lainnya:		
Pendapatan Lainnya	3.p, 30	19.921.467.534
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>5.833.074.679.677</u>
BEBAN USAHA		
Bunga dan Provisi	3.p, 31	1.548.962.238.763
Pegawai	3.p, 32	1.463.491.039.548
Umum	3.p, 33	679.473.123.591
Administrasi Pemasaran	34	123.930.125.196
Penyusutan Aset Tetap	3.i, 3.p, 35	62.966.186.917
Direksi dan Komisaris		33.529.998.985
Amortisasi dan Penyisihan Piutang		31.538.000.925
Pendidikan dan Pelatihan		23.220.847.474
Jumlah Beban Usaha		<u>3.967.111.561.399</u>
LABA USAHA		<u>1.865.963.118.278</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Uang Kelebihan Lewat Waktu	3.p, 36	35.887.144.527
Pendapatan Sewa Gedung	3.p, 37	2.003.596.963
Pendapatan Jasa Giro	38	1.127.898.034
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap		13.276.627
Pendapatan Lainnya	3.p, 39.a	61.512.549.762
Beban Lain-lain	3.p, 39.b	(2.688.123.760)
Jumlah Pendapatan Lain-lain		<u>97.856.342.153</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		<u>1.963.819.460.431</u>
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	3.o, 20.b	553.539.105.250
Tangguhan	20.c	(34.424.551.257)
Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		<u>519.114.553.993</u>
LABA PERIODE BERJALAN		<u>1.444.704.906.438</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK		<u>--</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		<u>1.444.704.906.438</u>
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk		<u>1.444.704.906.438</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal Saham	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
			Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
		Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 1 April 2012	27.a	251.252.000.000	2.348.875.803.694	1.936.352.946.393	4.536.480.750.087
Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan	27.b				
- Pembagian Dividen		--	--	(579.776.468.000)	(579.776.468.000)
- Dana Program Kemitraan		--	--	(14.762.350.000)	(14.762.350.000)
- Dana Bina Lingkungan		--	--	(14.762.350.000)	(14.762.350.000)
- Cadangan Umum		--	758.266.118.928	(758.266.118.928)	--
- Cadangan Tujuan		--	108.668.000.000	(108.668.000.000)	--
Jumlah Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan		--	866.934.118.928	(1.476.235.286.928)	(609.301.168.000)
Laba Bersih Periode Berjalan (9 Bulan)		--	--	1.444.704.906.438	1.444.704.906.438
Saldo Per 31 Desember 2012		251.252.000.000	3.215.809.922.622	1.904.822.565.903	5.371.884.488.525

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan
Bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 (9 Bulan) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Kas dari:		
Penerimaan Sewa Modal		5.142.234.662.791
Pendapatan Administrasi	2.e, 2.o, 27	488.557.854.665
Pendapatan Usaha Lain		30.634.415.298
Pendapatan Lainnya		183.214.874.859
Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan		74.729.144.455.807
Pelunasan dari Piutang Lainnya		685.105.337.757
Penjualan Barang Lelang Perusahaan dan Aset Yang Disisihkan		1.985.938.724.452
Penerimaan Utang Nasabah		386.053.774.723
Penerimaan Utang Pajak		182.211.958.756
Penerimaan Utang Lainnya		241.749.000.122
Penjualan Mulia		33.303.924.819
Penerimaan Kembali Uang Muka		60.297.736.609
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi		<u>84.148.446.720.658</u>
Pengeluaran Kas untuk:		
Pembayaran Bunga Bank dan Obligasi		(1.542.161.389.422)
Beban Pegawai		(1.256.304.663.001)
Beban Umum		(686.914.016.776)
Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan		(77.249.227.835.976)
Pembayaran Utang Kepada Rekanan		(41.336.640.371)
Pembayaran Utang Kepada Nasabah		(51.313.243.545)
Pembayaran Utang Pajak		(679.525.438.293)
Pembayaran Utang Lainnya		(351.076.762.034)
Pemberian Piutang		(715.041.956.654)
Pembayaran Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka		(157.722.834.350)
Pembelian Persediaan		(620.422.143.018)
Pembelian Mulia		(22.472.020.085)
Jumlah Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Operasi		<u>(83.373.518.943.525)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		<u>774.927.777.133</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penerimaan Kas dari:		
Penjualan Aset Tetap	3.i	<u>22.482.698</u>
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi		<u>22.482.698</u>
Pengeluaran Kas untuk:		
Pembelian Aset Tetap	12	<u>(90.183.747.657)</u>
Jumlah Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Investasi		<u>(90.183.747.657)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(90.161.264.959)</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 (9 Bulan) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Kas dari:		
Pinjaman Bank	14	8.376.329.868.096
Pengembalian Uang Muka Dividen		150.000.000.000
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan		<u>8.526.329.868.096</u>
Pengeluaran Kas untuk:		
Angsuran Pinjaman Bank	14	(7.910.520.140.586)
Pelunasan Pinjaman MTN	15	(425.000.000.000)
Pembayaran Dana Pembangunan Semesta		(579.776.468.000)
Pembayaran Dana Program Kemitraan		(14.762.350.000)
Pembayaran Dana Bina Lingkungan		(14.762.350.000)
Jumlah Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Pendanaan		<u>(8.944.821.308.586)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		<u>(418.491.440.490)</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK		266.275.071.684
KAS DAN BANK AWAL PERIODE		380.879.986.328
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	3.b, 3.e, 4	<u>647.155.058.012</u>
Kas dan Bank Akhir Periode terdiri dari:		
Kas		442.842.076.389
Bank		204.312.981.623
Jumlah Kas dan Bank	3.b, 3.e, 4	<u>647.155.058.012</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a. Pendirian

PT Pegadaian (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT Pegadaian (Persero) atau disingkat PT Pegadaian (Persero) No.1 tanggal 1 April 2012 dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jakarta, yang kemudian disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Perseroan PT Pegadaian (Persero).

Tujuan dan kegiatan usaha PT Pegadaian (Persero) seperti yang tercantum dalam Akta Pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., No.1 tanggal 1 April 2012 pasal 3, yaitu :

a. Tujuan perusahaan :

Melakukan usaha di bidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas.

b. Kegiatan usaha :

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan menyelenggarakan usaha utama sebagai berikut :

- 1) Penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai termasuk gadai efek;
- 2) Penyaluran pinjaman berdasarkan jaminan fidusia; dan
- 3) Pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi dan perdagangan logam mulia serta batu adi.

Selain melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha:

- 1) Jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, dan jasa administrasi pinjaman; dan
- 2) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.

Berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan dan Surat Menteri Keuangan RI No.1015/KMK.013/1991 tanggal 26 September 1991, modal awal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 205.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam Laporan Posisi Keuangan Pembukaan. Modal awal yang disetor Pemerintah tersebut adalah kumulatif laba bersih yang diperoleh Perjan Pegadaian. Secara bertahap mulai tahun 1991, Pemerintah Republik Indonesia memberikan tambahan modal sebagai Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp 46.252.000.000 melalui SK Menteri Keuangan RI masing-masing sebagai berikut:

<u>Nomor</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Rp</u>
0360/KM.3-42/SKOP/0391	30 Maret 1991	20.000.000.000
0136/KM.3-42/SKOP/0891	5 Agustus 1991	16.252.000.000
0151/MK.013/1992	29 Juni 1992	10.000.000.000
Jumlah		46.252.000.000

Berdasarkan Penetapan Menteri Negara BUMN dengan surat Nomor S-161/MBU/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang disahkan berdasarkan PP 51/2011 jo Surat Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) Nomor 3570312/sat tanggal 26 Maret 2012, telah disetorkan modal dasar untuk Perseroan sebesar Rp 251.252.000.000 yang berasal dari Negara Republik Indonesia. Modal tersebut terdiri dari modal saham sebanyak 251.252 yang masing-masing saham memiliki nilai nominal Rp 1.000.000.

1.b. Penawaran Umum Efek Perusahaan

Perusahaan telah menerbitkan emisi obligasi sebanyak 15 (lima belas) kali, dengan jangka waktu masing-masing 370 hari untuk obligasi tahun 2012 (seri A); jangka waktu 3 tahun untuk obligasi tahun 2011 (seri A), 2012 (seri B); jangka waktu 5 tahun untuk obligasi tahun 1993, 1998, 2001, 2009 (Seri A), 2011 (seri B) dan 2012 (seri C); jangka waktu 7 tahun untuk obligasi tahun 2011 (seri D); jangka waktu 8 tahun untuk obligasi tahun 1999, 2000, 2002, 2003 (Seri A) dan 2009 (Seri B); jangka waktu 10 tahun untuk obligasi tahun 2011 (seri C) dan jangka waktu 15 tahun untuk obligasi tahun 2003 Seri B serta jangka waktu 10 tahun untuk obligasi tahun 2006, 2007 dan 2009 (Seri C).

Seluruh obligasi dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
1993	Obligasi I	11 Juni 1993 & 9 Juli 1998	50 milyar	Bunga 17,5% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang.
1994	Obligasi II	30 Juni 1994 & 18 Juli 1999	25 milyar	Bunga 13% tetap untuk 6 bulan pertama, selanjutnya mengambang yaitu 1% di atas tingkat bunga deposito 6 bulan bank pemerintah.
1996	Obligasi III	25 Juni 1996 & 12 Juli 2001	100 milyar	Bunga 17,75% tetap untuk tahun pertama, 4 tahun berikutnya mengambang 1,5 % di atas tingkat bunga deposito bank pemerintah & swasta.
1997	Obligasi IV	16 Juni 1997 & 3 Juli 2002	100 milyar	Bunga 14,75% tetap untuk tahun pertama, 4 tahun berikutnya mengambang 1% diatas tingkat bunga deposito bank pemerintah dan swasta.
1998	Obligasi V	23 Juni 1998 & 8 Juli 2003	64,6 milyar	Bunga Seri A1 49% tetap untuk tahun pertama, seterusnya mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium. Bunga Seri B2 mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium.
1999	Obligasi VI	24 Agt 1999 & 8 Sept 2007	135 milyar	Bunga 15,5% tetap untuk tahun pertama, 7 tahun berikutnya mengambang sebesar 1,75% di atas tingkat bunga rata-rata JIBOR 6 bulan.
2000	Obligasi VII	27 Juni 2000 & 21 Juli 2008	150 milyar	Bunga 15,625% tetap untuk tahun pertama, berikutnya mengambang 1,725% di atas tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2001	Obligasi VIII	31 Mei 2001 & 12 Juni 2006	300 milyar	<p>Bunga Seri A 19,25% tetap, cicilan 20% pokok per tahun Seri B 19,25% tetap, Seri C 0,50% tetap menurun per tahun 20,25% untuk tahun pertama, Seri D 19,25% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang sesuai dengan tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, maksimal 24,25% minimal 16,25%.</p> <p>Seri E 19,25% tetap untuk tahun pertama sampai tahun ketiga, selanjutnya mengambang sesuai tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, maksimal 24,25% minimal 16,25%.</p>
2002	Obligasi IX	24 Mei 2002 & 6 Juni 2010	300 milyar	<p>Bunga Seri A 18,25% tetap per tahun, Seri B 18,25% per tahun, amortisasi 10% tahun keempat emisi, 20% tahun kelima sampai dengan ketujuh 30% tahun kedelapan emisi, Seri C 18,25% tetap tahun Pertama, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maksimal 20,00% minimal 16,50%. Seri D dengan opsi jual pada tahun kelima, 18,25% tetap tahun pertama sampai dengan tahun kelima, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maksimal 20,00%, minimal 16,50%.</p>
2003	Obligasi X	27 Juni 2003, 11 Juli 2011 & 2018	400 milyar	<p>Bunga Seri A 12,9375% tetap per tahun dengan jangka waktu 8 tahun, Seri B dengan jangka waktu 15 tahun dengan tingkat bunga 13,125% per tahun tetap untuk tahun pertama sampai dengan ke tiga, selanjutnya tahun ke empat dan sampai dengan ke tahun kelima belas mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 3 bulan ditambah premi 1,0% per tahun maksimum 15,50%, minimum 10,50%.</p>
2006	Obligasi XI	23 Mei 2006 & 23 Mei 2016	500 milyar	<p>Bunga Seri A 13,10% per tahun tetap, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 13,10% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1,25% per tahun, maksimum 16,00%, minimum 10,00%.</p>
2007	Obligasi XII	4 September 2007 & 2017	600 milyar	<p>Bunga Seri A 10,025% per tahun tetap, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 10,025% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1% per tahun, maksimum 12,00%, minimum 8,00%.</p>

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2009	Obligasi XIII	1 Juli 2009, 2014, 2017 & 2019	1.500 milyar	Seri A1, tingkat bunga tetap 11,675% pertahun untuk tahun pertama sampai tahun ke-5. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp 350 miliar. Seri A2, tingkat bunga tetap 11,675% per tahun untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun ke-2 sampai tahun ke-5 yang besarnya berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi 3% per tahun dengan batas atas 13% dan batas bawah 10%. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp 100 miliar. Seri B, tingkat bunga tetap 12,650% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun ke 8. Jangka waktu 8 tahun dengan jumlah Rp 650 miliar. Seri C, tingkat bunga tetap 12,875% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh. Jangka waktu 10 tahun dengan jumlah Rp 400 miliar.
2011	Obligasi Berkelanjutan I	11 Oktober 2011 dan 11 Oktober 2014, 2016, 2021	2.000 milyar	<p>Obligasi Berkelanjutan I, dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 2 triliun yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.</p> <p>Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun terdiri dari Seri A, B dan C.</p> <p>Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 250 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2014.</p> <p>Seri B, jumlah pokok sebesar Rp 250 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2016.</p> <p>Seri C, jumlah pokok sebesar Rp 500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun, jangka waktu 10 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2021.</p>
2012	Obligasi Berkelanjutan I (Tahap II)	14 Februari dan 18 Februari 2013, Februari 2015, 2017, 2019	1.000 milyar	Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
				Obligasi Berkelanjutan Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun terdiri dari Seri A, B, C dan D.
				Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 150 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 370 terhitung terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 18 Pebruari 2013.
				Seri B, jumlah pokok sebesar Rp 150 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2015.
				Seri C, jumlah pokok sebesar Rp 200 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2017.
				Seri D, jumlah pokok sebesar Rp 500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Pebruari 2019.

1.c. Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Manajemen Perusahaan terdiri atas Dewan Komisaris dan Direksi, masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT Pegadaian (Persero) No. 01 tanggal 1 April 2012, susunan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:

Ketua	:	Cecep Sutiawan
Anggota	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Wiranto
Anggota	:	Yopie Hidayat*

* Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No.173/MBU/2012 tanggal 23 April 2012 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, maka diangkat Sdr. Yopie Hidayat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero).

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Dewan Direksi:

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT Pegadaian (Persero) No. 01 tanggal 1 April 2012, susunan Dewan Direksi ditetapkan sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Suwhono
Direktur Bisnis I	:	Moch. Edy Prayitno
Direktur Bisnis II	:	Wasis Djuhar
Direktur Bisnis III	:	Sumanto Hadi
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Sri Mulyanto
Direktur Keuangan	:	Dwi Agus Pramudya

Komite Audit:

Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor: KEP-01/KP/DP/GD/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, susunan Komite Audit per 31 Desember 2012 terdiri dari:

Ketua	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Syahrir Ika
Anggota	:	Dr. Andi Wahyu Wibisana

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 979/PSDM-BK.200322/2012 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT Pegadaian (Persero), maka fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan sesuai dengan pasal 201 dan 202 dijelaskan sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan berfungsi melakukan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi atas seluruh kegiatan hubungan masyarakat, protokoler, serta hubungan investor dan pemegang saham sesuai dengan kebijakan/ketentuan yang telah ditetapkan.

Tugas Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Meyakini/memastikan bahwa bidang yang menjadi tanggung jawabnya telah memiliki rencana kerja tahunan yang berpedoman pada RJP Perusahaan atau ketentuan lain yang telah ditetapkan direksi;
2. Meyakini/memastikan tersusunnya kebijakan di bidang Sekretariat Perusahaan;
3. Meyakini/memastikan bahwa pengelolaan bidang yang menjadi tanggung jawabnya telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan perusahaan;
4. Meyakini/memastikan terselenggara dan terlaksananya program di bidang Humas, Hubungan Investor, dan bidang protokoler Kantor Pusat;
5. Meyakini/memastikan bahwa target kerja Sekretariat Perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan oleh seluruh unit kerja operasional baik;
6. Meyakini/memastikan terselenggaranya Rapat Direksi, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Melakukan koordinasi dan membina hubungan kerja yang baik antar organ perusahaan (RUPS, Komisaris, dan Direksi);
8. Menjadi juru bicara perusahaan baik internal dan eksternal;
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan;
10. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan karyawan;
11. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/pekerjaan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Kepala	:	Harianto Widodo *)
Inspektur Pusat	:	Agus Budiono
Investigator Utama	:	Marshall Aritonang*)
Sekretaris	:	Ardianingtyas
Pemeriksa Madya	:	Wien Sumaryanto
		Jermia Tanga
		Dwi Wuryantadi**)
Pemeriksa Muda	:	Suparlan
		Akhmad Ramdoni
		Dyah Cahyaningsih

*) Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 1700/PSDM-BK.100321/2012, maka jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang semula dijabat oleh Slamet Mulyatno digantikan oleh Harianto Widodo, dan Arie Putra Benjamin yang semula menjabat sebagai Inspektur Pusat SPI dimutasi menjadi Jeneral Manajer Divisi Bisnis Gadai Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero).

*) Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 1347/PSDM-BK.100321/2012.

***) Sesuai dengan Keputusan Direksi PT Pegadaian (Persero) Nomor 1381/PSDM-BK.100321/2012.

Berdasarkan sertifikat No. QSC 01118 yang diterbitkan oleh Sucofindo International Certification Services, menyatakan bahwa Satuan Pengawasan Intern (SPI) PT Pegadaian (Persero) telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi SNI ISO 9001 : 2008 untuk scope audit Kantor Pusat, Kantor Wilayah VIII dan Kantor Wilayah IX. Sertifikat tersebut berlaku sejak 19 Nopember 2012 sampai dengan 18 Nopember 2015

Karyawan:

Jumlah karyawan PT Pegadaian (Persero) dan karyawan entitas anak (tidak diaudit) masing-masing sebagai berikut:

	31 Des 2012
PT Pegadaian (Persero)	7.881
Entitas Anak (PT Balai Lelang Artha Gasia)	3

1.d Entitas Anak

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000 dan Akta Notaris Zacharias Omaweke, S.H. No.13 tanggal 26 Juli 2000, Perusahaan memiliki secara langsung penyertaan saham pada Entitas Anak yaitu PT Balai Lelang Artha Gasia sebesar 99,99% yang bergerak di bidang jasa lelang dan berlokasi di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta. PT Balai Lelang Artha Gasia (PT BLAG) mulai beroperasi secara komersial sejak bulan September tahun 2000 dan memiliki total aset sebagai berikut :

	31 Des 2012
	Rp
Total Aset	191.655.400

Pada tahun 2010, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010, para pemegang saham memutuskan membekukan kegiatan operasional Perseroan terkait dengan penurunan omzet yang relatif permanen dan ruang gerak usaha yang semakin sempit, melakukan restrukturisasi kepengurusan dan menyelesaikan hak dan kewajiban perseroan termasuk masalah sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Saldo Kepentingan Non Pengendali atas entitas anak adalah nihil per 31 Desember 2012.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 124 Tanggal 29 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sindian Osaputra, S.H., M.Kn., diputuskan untuk mengaktifkan kembali kegiatan usaha serta restrukturisasi pengurus PT BLAG.

Dalam akta tersebut ditetapkan pengangkatan Hening Cahyani sebagai Direktur dan Endah Susiani sebagai Komisaris PT Balai Lelang Artha Gasia untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

2. Penerapan Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK dan ISAK)

Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Perubahan atas standar berikut relevan atau berdampak material bagi Perusahaan dan entitas anak, wajib diterapkan pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012.

- PSAK No. 16 "Aset Tetap".
Tujuan pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap sehingga informasi mengenai investasi entitas dalam aset tetap dan perubahan dalam investasi mudah dipahami.
- PSAK No. 26 "Biaya Pinjaman".
Pernyataan ini mengatur tentang biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut.
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) "Pajak Penghasilan".
Tujuan pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan yaitu bagaimana menghitung konsekuensi pajak kini dan mendatang.
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian".
Tujuan pernyataan ini adalah menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Prinsip dalam pernyataan ini melengkapi prinsip pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam PSAK 55 (revisi 2006) dan pengungkapan informasi dalam PSAK 60.
- PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
Tujuan pernyataan ini adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan entitas serta sifat dan luas risiko yang timbul.

Berikut adalah standar baru, perubahan standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak relevan atau berdampak material terhadap Perusahaan dan Entitas Anak:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".
- PSAK No. 13 "Property Investasi".
- PSAK No. 18 (Revisi 2010) "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya".
- PSAK No. 24 (Revisi 2010) "Imbalan Kerja".
- PSAK No. 28 (Revisi 2011) "Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian". PSAK No. 30 "Sewa".
- PSAK No. 33 (Revisi 2011) "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum".
- PSAK No. 36 (Revisi 2011) "Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa".

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

- PSAK No. 45 (Revisi 2011) "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba".
- PSAK No. 53 (Revisi 2010) "Pembayaran Berbasis Saham".
- PSAK No. 56 (Revisi 2011) "Laba Per Saham".
- PSAK No. 61 "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah".
- PSAK No. 62 "Kontrak Asuransi".
- PSAK No. 63 "Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi".
- PSAK No. 64 "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi Pada Pertambangan Sumber Daya Mineral".

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

- ISAK No. 13 "Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri".
- ISAK No. 15 "PSAK 24-Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum, dan Interaksinya".
- ISAK No. 16 "Perjanjian Konsesi Jasa".
- ISAK No. 18 "Bantuan Pemerintah-Tidak Berelasi Spesifik Dengan Aktivitas Operasi".
- ISAK No. 19 "Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali PSAK 63: Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi".
- ISAK No. 22 "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan".
- ISAK No. 23 "Sewa Operasi-Insentif".
- ISAK No. 24 "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi Yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa".
- ISAK No. 25 "Hak Atas Tanah".
- ISAK No. 26 "Penilaian Ulang Derivatif Melekat".

Pencabutan Standar Akuntansi

Pencabutan atas standar akuntansi dan interpretasinya berikut ini yang penerapannya disyaratkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak relevan atau tidak berdampak material terhadap Perusahaan:

- PSAK No. 27 "Akuntansi Koperasi".
- PSAK No. 39 "Akuntansi Kerja Sama Operasi".
- PSAK No. 44 "Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate" paragraf 47-48, dan 56-61.

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

3.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan Keuangan Konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

3.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

3.c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan dapat mengendalikan investasi tersebut, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

1. Kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai dengan perjanjian investor lain;
2. Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
3. Kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
4. Kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut.

Kepentingan non pengendali adalah bagian hasil usaha dan bagian aset bersih dari entitas anak yang tidak dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Porsi kepemilikan pemegang saham atas aset bersih entitas anak, jumlahnya tidak signifikan (0,01%), oleh karena itu untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak menyajikan kepentingan non pengendali.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi dan saldo antara Perusahaan dan entitas anak telah dieliminasi. Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha.

3.d. Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut adalah sama dengan transaksi lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Perusahaan.

3.e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

3.f. Pinjaman Yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan (lihat catatan 3.n). Mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah, maka untuk mempermudah administrasi dilakukan penggolongan Uang Pinjaman (UP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 35/UG.2.00212/2012 tentang Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, Tarif Biaya Administrasi dan Penetapan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 Maret 2012, ditetapkan sebagai berikut :

Pinjaman Usaha Gadai

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 21/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 84/UG.2.00212/2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA per 15 hari maupun tarif maksimalnya yang berlaku mulai tanggal 1 April 2012, ditetapkan sebagai berikut:

Perubahan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA :

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal Per 15 hari		Tarif Sewa Modal Maksimum		Prosentase terhadap Taksiran
		Lama	Baru	Lama	Baru	
A	50.000 - 500.000	0,75%	0,75%	6,00%	6,00%	95,00%
B1	550.000 - 1.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
B2	1.050.000 - 2.500.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
B3	2.550.000 - 5.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
C1	5.100.000 - 10.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
C2	10.100.000 - 15.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
C3	15.100.000 - 20.000.000	1,20%	1,15%	9,60%	9,20%	92,00%
D	20.100.000 ke atas	1,00%	1,00%	8,00%	8,00%	93,00%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Pebruari 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 35/UG.2.00212/2012 tentang Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, Tarif Biaya Administrasi dan Penetapan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 Maret 2012, ditetapkan sebagai berikut:

1. Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, dan Tarif Biaya Administrasi:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Pembulatan Pinjaman (Rp)	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
A	50.000 - 500.000	10.000	2.000
B1	550.000 - 1.000.000	50.000	8.000
B2	1.050.000 - 2.500.000	50.000	15.000
B3	2.550.000 - 5.000.000	50.000	25.000
C1	5.100.000 - 10.000.000	100.000	40.000
C2	10.100.000 - 15.000.000	100.000	50.000
C3	15.100.000 - 20.000.000	100.000	80.000
D	20.100.000 ke atas	100.000	100.000

2. Perubahan Persentase Uang Pinjaman terhadap Taksiran dan Tarif Sewa Modal

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal (per 15 hari)	Tarif Sewa Modal Maksimal	% Uang Pinjaman terhadap Taksiran
A	50.000 - 500.000	0,75%	6,0%	95%
B1	550.000 - 1.000.000	1,20%	9,6%	92%
B2	1.050.000 - 2.500.000	1,20%	9,6%	92%
B3	2.550.000 - 5.000.000	1,20%	9,6%	92%
C1	5.100.000 - 10.000.000	1,20%	9,6%	92%
C2	10.100.000 - 15.000.000	1,20%	9,6%	92%
C3	15.100.000 - 20.000.000	1,20%	9,6%	92%
D	20.100.000 ke atas	1,00%	8,0%	93%

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat Edaran Nomor: 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 April 2011 ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran
A	20.000 - 150.000	95%
B	155.000 - 1.000.000	92%
C	1.010.000 - 20.000.000	92%
D	20.050.000 - 200.000.000	93%

Selama tahun 2011, Perusahaan melakukan penyesuaian tarif sewa modal dan perubahan penggolongan uang pinjaman. Penyesuaian tarif sewa modal ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat Edaran Nomor:

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, yang berlaku mulai tanggal 1 April 2011. Penggolongan tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal Per 1 April 2011		Jangka Waktu Kredit
		Per 15 hari	Maksimum	
A	20,000 - 150,000	0.75%	6.00%	120 hari
B	155,000 - 1000,000	1.20%	9.60%	120 hari
C	1,010,000 - 20,000,000	1,20%	9.60%	120 hari
D	20,050,000 - 200,000,000	1,00%	8,00%	120 hari

Berdasarkan Surat keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Sewa Modal, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.1024/UI.I.00211/2006 tanggal 29 Desember 2006 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali dengan surat keputusan Direksi No. 56/UI.I.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Pebruari 2008 tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal 2008 s.d. 2011		Jangka Waktu Kredit
		Per 15 hari	Maksimum	
A	20.000 - 150.000	0,75%	6,00%	120 hari
B	151.000 - 500.000	1,20%	9,60%	120 hari
C1	505.000 - 1.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
C2	1.010.000 - 20.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
D1	20.050.000 - 50.000.000	1,00%	8,00%	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	1,00%	8,00%	120 hari

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.312/UL.3.00213/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan Surat Edaran Direksi No. 32/UL.3.00212/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2007, pengenaan biaya administrasi dibedakan antara gadai baru dan ulang gadai sebagai berikut :

Gadai Baru

No.	Kredit Baru	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	Semua Golongan (A,B,C dan D)	1 % dari UP
2	Khusus Barang Jaminan Mobil	1 % dari Rp 50.000

Ulang Gadai

No.	Kredit Lama Berlanjut	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	1 - 30 hari	0,2 % dari UP
2	31 - 60 hari	0,4 % dari UP
3	61 - 90 hari	0,6 % dari UP
4	91 - 120 hari	0,8 % dari UP

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan SE No.49/OP.1.00211/2004 tanggal 11 Oktober 2004, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, terakhir berdasarkan SE No. 06/UL.1.00211/2008, tanggal 30 Januari 2008 sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran
A	20.000 - 150.000	95%
B	151.000 - 500.000	92%
C1	505.000 - 1.000.000	91%
C2	1.010.000 - 20.000.000	91%
D1	20.050.000 - 50.000.000	93%
D2	50.100.000 - 200.000.000	93%

Selain pengenaan sewa modal, kepada nasabah dikenakan biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.348/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, setiap pemberian kredit dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Golongan Pinjaman	Tarif Biaya Administrasi Rp
1	AKN	1 % dari UP
2	AKN	1 % dari UP
3	AG	1 % dari UP
4	BK	1 % dari UP
5	BG	1 % dari UP
6	CK1	1 % dari UP
7	CG1	1 % dari UP
8	C2	1 % dari UP
9	DI & D2	1 % dari UP
10	DI & D2 Mobil/car	1 % dari UP Minilam Rp 50.000

Usaha Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.84/UG.2.00212/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal (SM) Pegadaian KCA dan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Persentase Penetapan Marhun Bih dan Nilai Taksiran, Diskon Ijarah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah, terdapat beberapa kebijakan yang perlu disesuaikan kembali, yaitu:

1. Penggolongan Marhun Bih

Terdapat perubahan besaran Plafond dan Pembulatan Marhun Bih semua golongan, yang ditetapkan sebagai berikut:

Golongan	Penggolongan Lama Marhun Bih Rp	Golongan	Penggolongan Baru Marhun Bih Rp	Pembulatan Marhun Bih Rp
A	20.000 - 150.000	A	20.000 s.d 150.000	10.000
B	151.000 - 500.000	B	151.000 s.d 500.000	50.000
C1	501.000 - 1.000.000	C1	501.000 s.d 1.000.000	50.000
C2	1.005.000 - 5.000.000	C2	1.005.000 s.d 5.000.000	50.000
C3	5.010.000 - 10.000.000	C3	5.010.000 s.d 10.000.000	100.000
C4	10.050.000 - 20.000.000	C4	10.050.000 s.d 20.000.000	100.000
D1	20.100.000 - 50.000.000	D1	20.100.000 s.d 50.000.000	100.000
D	50.100.000 - 200.000.000	D	50.100.000 s.d 200.000.000	100.000

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

2. Tarif Ijarah

Gol.	Marhum Bih	Tarif Lama			Tarif Baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 s.d 500.000	45	45	45	45	45	45
B1	550.000 s.d 1.000.000	73	75	78	71	72	73
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	79	80	82	71	72	73
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	79	80	82	71	72	73
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	79	80	82	71	72	73
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	79	80	82	71	72	73
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	62	65	70	71	72	73
D	20.100.000 ke atas	62	65	70	62	65	70

3. Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai Taksiran

Gol	Marhum Bih	Tarif Lama			Tarif Baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan	Emas	Elektronik	Kendaraan
A	50.000 s.d 500.000	95%	95%	95%	95%	95%	95%
B1	550.000 s.d 1.000.000	92%	92%	92%	92%	92%	92%
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	91%	91%	91%	92%	92%	92%
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	93%	93%	93%	92%	92%	92%
D	20.100.000 ke atas	93%	93%	93%	93%	93%	93%

4. Diskon Ijarah

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Muqasah (Diskon) X Tarif
$\geq 85\%$ x Taksiran / Estimasi	0%
80% - 84% x Taksiran / Estimasi	7%
75% - 79% x Taksiran / Estimasi	14%
70% - 74% x Taksiran / Estimasi	20%
65% - 69% x Taksiran / Estimasi	26%
60% - 64% x Taksiran / Estimasi	32%
55% - 59% x Taksiran / Estimasi	38%
50% - 54% x Taksiran / Estimasi	44%
45% - 49% x Taksiran / Estimasi	50%
40% - 44% x Taksiran / Estimasi	56%
35% - 39% x Taksiran / Estimasi	61%
30% - 34% x Taksiran / Estimasi	66%
25% - 29% x Taksiran / Estimasi	71%
20% - 24% x Taksiran / Estimasi	76%
15% - 19% x Taksiran / Estimasi	81%
$\leq 14\%$ x Taksiran / Estimasi	85%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

5. Biaya Administrasi

Golongan	Marhun Bih	Tarif Administrasi
A	50.000 s.d 500.000	2.000
B1	550.000 s.d 1.000.000	8.000
B2	1.050.000 s.d 2.500.000	15.000
B3	2.550.000 s.d 5.000.000	25.000
C1	5.100.000 s.d 10.000.000	40.000
C2	10.100.000 s.d 15.000.000	60.000
C3	15.100.000 s.d 20.000.000	80.000
D	20.100.000 ke atas	100.000

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang Perubahan Prosentase Marhun Bih terhadap taksiran ditetapkan sebagai berikut:

Golongan	Plafon Marhun Bih Rp	Tarif Biaya Administrasi Rp	Jangka Waktu Kredit
A	20.000 - 150.000	1.000	120 hari
B	151.000 - 500.000	5.000	120 hari
C1	501.000 - 1.000.000	8.000	120 hari
C2	1.005.000 - 5.000.000	16.000	120 hari
C3	5.010.000 - 10.000.000	25.000	120 hari
C4	10.050.000 - 20.000.000	40.000	120 hari
D1	20.100.000 - 50.000.000	50.000	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	60.000	120 hari

Besar Prosentase Marhun Bih terhadap nilai taksiran adalah sebagai berikut:

Golongan	Marhun Bih	% Marhun Bih		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	20.000 -150.000	95%	95%	95%
B	151.000 - 500.000	92%	92%	92%
C1	501.000 - 1.000.000	91%	91%	91%
C2	1.005.000 - 5.000.000	91%	91%	91%
C3	5.010.000 - 10.000.000	91%	91%	91%
C4	10.050.000 - 20.000.000	91%	91%	91%
D1	20.100.000 - 50.000.000	93%	93%	93%
D2	50.100.000 - 200.000.000	93%	93%	93%

Diskon Ijarah

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Muqasah (Diskon) X Tarif	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & Alat RT	Kendaraan Bermotor
≥ 85% x Taksiran / Estimasi	0%	80	85	90
80% - 84% x Taksiran / Estimasi	7%	74	79	84
75% - 79% x Taksiran / Estimasi	14%	69	73	77
70% - 74% x Taksiran / Estimasi	20%	64	68	72
65% - 69% x Taksiran / Estimasi	26%	59	63	67

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Muqasah (Diskon) X Tarif	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & Alat RT	Kendaraan Bermotor
60% - 64% x Taksiran / Estimasi	32%	54	58	61
55% - 59% x Taksiran / Estimasi	38%	50	53	56
50% - 54% x Taksiran / Estimasi	44%	45	48	50
45% - 49% x Taksiran / Estimasi	50%	40	43	45
40% - 44% x Taksiran / Estimasi	56%	35	37	40
35% - 39% x Taksiran / Estimasi	61%	31	33	35
30% - 34% x Taksiran / Estimasi	66%	27	28	31
25% - 29% x Taksiran / Estimasi	71%	23	25	26
20% - 24% x Taksiran / Estimasi	76%	19	20	22
15% - 19% x Taksiran / Estimasi	81%	15	16	17
10 - 14% x Taksiran / Estimasi	85%	Tarif khusus = (1% x Taksiran)/120 hari		
< 10% x Taksiran / Estimasi	80%	Tarif khusus = (1% x Taksiran)/120 hari		

Berdasarkan SK Direksi Np. 01/US.1.00/2009 tentang perubahan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Diskon Ijarah dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Syariah sebagai berikut:

Penggolongan Marhun Bih:

Gol	Marhum Bih	Tarif Baru		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	20.000 sd 150.000	45	45	45
B	151.000 sd 500.000	73	75	78
C1	501.000 sd 1.000.000	79	80	82
C2	1.005.000 sd 5.000.000	79	80	82
C3	5.010.000 sd 10.000.000	79	80	82
C4	10.050.000 sd 20.000.000	79	80	82
D1	20.100.000 sd 50.000.000	62	65	70
D2	50.100.000 sd 200.000.000	62	65	70

Diskon Ijarah:

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Muqasah (Diskon) X Tarif
≥ 85% x Taksiran / Estimasi	0%
80% - 84% x Taksiran / Estimasi	7%
75% - 79% x Taksiran / Estimasi	14%
70% - 74% x Taksiran / Estimasi	20%
65% - 69% x Taksiran / Estimasi	26%
60% - 64% x Taksiran / Estimasi	32%
55% - 59% x Taksiran / Estimasi	38%
50% - 54% x Taksiran / Estimasi	44%
45% - 49% x Taksiran / Estimasi	50%
40% - 44% x Taksiran / Estimasi	56%
35% - 39% x Taksiran / Estimasi	61%
30% - 34% x Taksiran / Estimasi	66%
25% - 29% x Taksiran / Estimasi	71%
20% - 24% x Taksiran / Estimasi	76%
15% - 19% x Taksiran / Estimasi	81%
≤ 14% x Taksiran / Estimasi	85%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Biaya Administrasi :

Gol	Marhun Bih	Tarif Baru
A	20.000 sd 150.000	1.000
B	151.000 sd 500.000	3.000
C1	501.000 sd 1.000.000	8.000
C2	1.005.000 sd 5.000.000	15.000
C3	5.010.000 sd 10.000.000	25.000
C4	10.050.000 sd 20.000.000	40.000
D1	20.100.000 sd 50.000.000	60.000
D2	50.100.000 sd 200.000.000	100.000

Tarif Ijarah

Berdasarkan SK Direksi No.08/US.1.00/2008 tanggal 12 Maret 2008, rumusan tarif Ijarah untuk produk Rahn adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10

Usaha Lain

Kredit Kreasi

Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 23/PJC.I.00/2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Penunjukkan Kantor Cabang Pengelola KUMK, telah ditunjuk 200 Kantor Cabang Pengelola KUMK yaitu outlet pelayanan yang langsung berhubungan atau melayani nasabah/konsumen baik yang berasal dari kantor cabang itu sendiri dan unit di bawahnya serta kantor cabang lain (*office channneling*) dan unit/outlet lainnya yang berfungsi sebagai pemasar.

Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai)

Krasida adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Besaran uang pinjaman Kredit Kreasi berdasarkan Surat Edaran Direksi No.61/US.2.00/2006 tanggal 13 Desember 2006 maksimum kredit Kreasi sebesar Rp100.000.000 per nasabah, sedangkan Krasida terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.190/US.2.00/2006 tanggal 28 September 2006, batas minimum uang pinjaman kredit krasida sebesar Rp 20.000.000 per nasabah.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 113/UG.2.00212/2012 tentang Pengalihan Pembinaan Pegadaian Krasida dari Divisi Bisnis Fidusia dan Jasa Lain ke Divisi Bisnis Gadai, maka Krasida yang sebelumnya masuk dalam kelompok binaan Divisi Bisnis Fidusia dan Jasa Lain dialihkan ke Divisi Bisnis Gadai.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2012. Dengan berlakunya keputusan ini, maka persyaratan usaha dan penetapan perkiraan yang terdapat pada Buku Pedoman Operasional Pegadaian Krasida (Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 105 /US.2.00/2004 tanggal 1 Juni 2004) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Secara umum Kreasi dan Krasida mempunyai kemiripan dalam hal pelaksanaan operasionalnya yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Kreasi	Krasida
1	Tujuan Kredit	Produktif	Produktif
2	Waktu Pelayanan	3 Hari	1-2 Jam
3	Tarif Sewa Modal	12% / tahun Flat	12% / tahun Flat
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman	1% dari Uang Pinjaman
5	Biaya Lainnya	Notaris, Akta Fidusia, Cek Fisik,	Materai dan Cek Fisik
		Asuransi, Materai	Kendaraan Bermotor
6	Jenis Barang Jaminan (BJ)	BPKB Kendaraan Bermotor	Perhiasan Emas dan Kendaraan
7	Penyimpanan BJ	Dipakai Nasabah untuk Alat Produksi	Disimpan di Pegadaian
8	Besarnya Pinjaman	70% dari Nilai Agunan	95% dari Nilai Agunan
9	Jangka Waktu Kredit	12 - 36 bulan	12 - 36 bulan
10	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap	Angsuran Tetap

Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga)

Krista adalah pinjaman (Kredit) dalam jangka waktu maksimum 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan yang diberikan oleh PT Pegadaian (Persero) kepada usaha rumah tangga sangat mikro (gurem) yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja.

Besaran uang pinjaman Kredit Krista berdasarkan Surat Edaran Direksi No.91/UL.2.00.22 2/2008 tanggal 24 Desember 2008 maksimum kredit Krista Rp 5.000.000, terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.65/UL.2.00.22.2/2009 tanggal 24 Agustus 2009, batas maksimum uang pinjaman kredit Krista sebesar Rp 8.000.000 per nasabah. Secara umum pelaksanaan operasional Krista sebagai berikut:

No	Uraian	Krista
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 3 hari
3	Tarif Sewa Modal	12% / Tahun Flat
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman
5	Biaya Lainnya	Asuransi, Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Tanpa Barang Jaminan
7	Besarnya Pinjaman	Berdasarkan kelayakan usaha dan disyaratkan mempunyai agunan minimal sebesar 20 % dari pinjaman
8	Jangka Waktu Kredit	12 , 24 dan 36 Bulan
9	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap

Berdasarkan Surat Edaran No.36/UL.2.00.22.2/2011 tanggal 29 April 2011 tentang penghentian sementara penyaluran Krista, disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian dan pengelolaan produk

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Krista yang baik maka dengan ini disampaikan bahwa sementara waktu terhitung mulai tanggal 11 Mei 2011 penyaluran Pegadaian Krista dihentikan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA)

Kremada adalah kredit yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang hanya dimanfaatkan untuk perumahan yang mencakup perbaikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan lingkungan perumahan. Dana berasal dari Pemerintah (Kementerian Negara Perumahan Rakyat). Penyaluran Kredit ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 062/UL.2.00.22.2/2006, tanggal 7 Desember 2006, tentang Penyaluran Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA). Berikut adalah skema Kremada:

No	Uraian	Kremada
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1-2 Minggu
3	Tarif Sewa Modal	0%
4	Biaya Administrasi	9% per tahun dari Uang Pinjaman
5	Biaya Lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Tanpa Barang Jaminan
7	Plafon Pinjaman	Perbaikan Rp 5.000.000
		Pembangunan Rp 10.000.000
8	Nasabah	MBR yang Berkelompok
9	Jangka Waktu Kredit	Perbaikan: 12 Bulan
		Pembangunan: 24 bulan

Kredit Kresna (Kredit Serba Guna)

Kresna atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/ karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing pegawai (kemampuan mengangsur) sehingga tidak terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai, dengan batas maksimum uang pinjaman sesuai dengan SE No. 166/UL.1.00.22/2009 tanggal 29 Juni 2009, tarif sewa modal sebesar 9 % per tahun atau 0,75% per bulan flat, sebagaimana diatur oleh SK Direksi No.167//UL.1.00.22.2 /2009, tanggal 29 Juni 2009, sedangkan jangka waktu kredit maksimum 60 bulan tetap mengacu pada SE No. 30 US.2.00/2007 tanggal 31 Mei 2007.

Adapun tingkat bunga pinjaman adalah 12% per tahun flat. Tarif sewa modal Kresna ditetapkan melalui SK Direksi No. 212/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

SK Direksi No. 13/UL.3.00.22.3/03 tanggal 26 Januari 2004 ditetapkan Biaya Administrasi Kresna sebesar 0,5% dari Pinjaman, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2004.

Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG)

Kredit Tunda Jual Gabah (KTJG) merupakan kredit yang diberikan kepada petani atas dasar hukum gadai melalui agen-agen yang ditunjuk PT Pegadaian (Persero) dengan barang jaminan berupa gabah kering giling. Tujuan pemberian KTJG adalah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melakukan pengolahan sawahnya mengingat belum diperolehnya dana dari hasil penjualan produk gabah yang sengaja ditunda penjualannya sambil menunggu kenaikan harga gabah yang cenderung menurun setelah panen.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

KUCICA

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA) adalah jasa pengiriman uang, bekerjasama dengan Western Union, perusahaan yang mempunyai jaringan luas, yang berkedudukan di Kanada. Berdasarkan SE.54/UL.2.00.22.2/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Pelaksanaan Jasa Pengiriman Uang di Kantor Cabang PT Pegadaian (Persero), maka ditetapkan dimulainya operasi Jasa Kucica serta berlakunya Pedoman Operasional Kucica.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 426/BFJL.2.00.222/2012 mengenai Penghentian Sementara Transaksi KUCICA – Western Union, maka terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2012 transaksi KUCICA – Western Union pada Kantor Cabang dan UPC di seluruh Indonesia, baik *on-line* maupun *off-line* untuk sementara waktu dihentikan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

ARRUM

Berdasarkan SK Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO Arrum dan No. 03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan Maksimum Nilai Pembiayaan ARRUM, menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit Arrum dengan jaminan fidusia, maksimum Uang Pinjaman Rp 50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan. Pasarnya adalah para pengusaha mikro yang menginginkan pinjaman berdasarkan prinsip syariah. Biaya administrasi Arrum adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang Jaminan	Biaya Administrasi Rp
1	Sepeda Motor	70.000
2	Mobil	200.000

Sedangkan tarif ljarah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ljarah} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp. 10.000}} \times \text{Rp. 700} \times \text{Jangka Waktu (Bulan)}$$

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 15/LB.1.00.01/2010 tentang Pembiayaan Arrum dengan Jaminan Emas dengan plafon pembiayaan minimum dengan jaminan emas ditetapkan sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Batas maksimum nilai pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pembulatan plafon pembiayaan arrum dengan jaminan emas dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).

Tarif Biaya Administrasi:

Tarif Biaya Administrasi pembiayaan Arrum dengan jaminan emas ditetapkan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).

Nilai Taksiran Terhadap Marhun bih:

Nilai Pembiayaan Arrum dengan jaminan emas ditetapkan sebesar 95% dari taksiran Barang Jaminan yang didasarkan pada standar Taksiran Logam (STL) yang berlaku.

Tarif ljarah:

Tarif ljarah atas pembiayaan Arrum dihitung dari nilai taksiran barang jaminan dengan tarif untuk per seratus ribu nilai taksiran adalah sebesar Rp 950 (sembilan ratus lima puluh rupiah).

Jangka Waktu Pembiayaan:

Jangka waktu pembiayaan Arrum dengan jaminan emas ditetapkan selama 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 54/LB.1.00/2008 tentang Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi tanggal 25 September 2008, produk yang disebut Mulia ini mulai dioperasikan pada tanggal 28 Oktober 2008. Pembiayaan Mulia adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan Mulia adalah emas batangan bersertifikat internasional (LBMA-London Bullion Market Association) dengan jenis/varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram.

Pembiayaan murabahah ini mengenakan margin atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Margin atas transaksi pembiayaan murabahah tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009 perihal jangka waktu, uang muka dan margin pembiayaan Mulia.

Berikut penetapan Margin Pembiayaan Mulia:

Jangka Waktu	Uang Muka	Margin
1 bulan	> 20% - 100%	3,00%
3 bulan	> 25% - 30%	3,50%
	> 30% - 40%	3,25%
	> 40% - 50%	3,25%
	> 50% - 60%	3,00%
	> 60% - 70%	3,00%
	> 70% - 80%	2,90%
	> 80% - 90%	2,80%
	> 90% - 100%	2,50%
6 bulan	> 25% - 30%	6,00%
	> 30% - 40%	5,90%
	> 40% - 50%	5,80%
	> 50% - 60%	5,70%
	> 60% - 70%	5,60%
	> 70% - 80%	5,50%
	> 80% - 90%	5,00%
	> 90% - 100%	4,00%
12 bulan	> 30% - 40%	12,00%
	> 40% - 50%	11,50%
	> 50% - 60%	11,00%
	> 60% - 70%	10,50%
	> 70% - 80%	10,00%
	> 80% - 90%	11,00%
	> 90% - 100%	7,00%
18 bulan	> 35% - 40%	18,00%
	> 40% - 50%	17,00%
	> 50% - 60%	16,00%
	> 60% - 70%	15,00%
	> 70% - 80%	13,50%
	> 80% - 90%	11,00%
	> 90% - 100%	7,00%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

Jangka Waktu	Uang Muka	Margin
24 bulan	> 40% - 50%	22,00%
	> 50% - 60%	20,50%
	> 60% - 70%	18,50%
	> 70% - 80%	16,00%
	> 80% - 90%	12,50%
	> 90% - 100%	7,80%
36 bulan	> 45% - 50%	29,00%
	> 50% - 60%	28,50%
	> 60% - 70%	24,00%
	> 70% - 80%	20,00%
	> 80% - 90%	15,00%
	> 90% - 100%	8,60%

Atas transaksi pelunasan pembiayaan Mulia dipercepat maka Direksi Pegadaian menetapkan Prosentase Potongan Margin Mulia yang diatur dalam Surat Edaran No. 73/Lb.1.00/2008 perihal Potongan Margin Mulia. Berikut Tabel Potongan Margin Mulia:

Bulan Ke	Jangka Waktu Pembiayaan				
	6	12	18	24	36
1	050	075	083	088	91,66
2	040	68,19	78,12	084	89,04
3	030	61,38	73,24	080	86,42
4	020	54,57	68,36	076	084
5	010	47,76	63,48	072	81,18
6	000	40,95	059	069	78,56
7		34,14	53,72	065	75,94
8		27,33	48,84	061	73,32
9		20,52	43,96	057	071
10		13,71	39,08	053	68,08
11		007	034	050	65,46
12		000	29,32	046	62,84
13			24,44	042	60,22
14			19,56	038	058
15			14,68	034	54,98
16			010	031	52,36
17			4,92	027	49,74
18			000	023	47,12
19				019	045
20				015	41,88
21				012	39,26
22				008	36,64
23				004	34,02
24				000	031
25					28,78
26					26,16
27					23,54
28					20,92
29					018
30					15,68

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Bulan Ke	Jangka Waktu Pembiayaan				
	6	12	18	24	36
31					13,06
32					10,44
33					7,82
34					005
35					2,58
36					000

Unit Gadai Efek

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/UL.3.0022.3/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Unit Gadai Efek, telah dibentuk unit usaha baru yang bergerak di bidang pelayanan gadai dengan barang jaminan saham/efek. Unit usaha baru ini berkedudukan di Kantor Pusat PT Pegadaian (Persero), Jl. Kramat Raya No. 162 Jakarta.

SK Direksi No. 44A/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Penyaluran Kredit Gadai Saham, ditetapkan jenis saham yang dapat dijamin, yaitu saham dalam kelompok LQ45 yang telah melalui proses *Know Your Customer* (KYC).

SK Direksi No. 44B/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Prosedur Operasional Kredit Gadai Saham, ditetapkan berlakunya Pedoman Operasional Kredit Gadai Saham.

SK Direksi No. 44C/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Tarif Sewa Modal dan Biaya Administrasi, ditetapkan tarif sewa modal secara *fixed rate*. Tarif sewa modal ditetapkan melalui surat edaran, sedangkan biaya administrasi ditetapkan sebesar 0,125% per jangka waktu 90 hari.

SK Direksi No. 44D/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Maksimum dan Minimum Uang Pinjaman, ditetapkan bahwa minimum uang pinjaman (UP) adalah 50 juta rupiah dan maksimum sebesar 50 milyar rupiah.

SK Direksi No. 44E/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Kewenangan Dalam Penetapan dan Pemutusan Uang Pinjaman, ditetapkan anggota-anggota Komite Pemutus Kredit serta ditetapkan batas-batas wewenang masing-masing atas besaran uang pinjaman yang dapat diputuskan.

Secara umum pelaksanaan usaha Gadai Efek sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1-2 Minggu
3	Tarif Sewa Modal	Harian, Minimal 15 hari
4	Biaya Administrasi	0,125% per jangka waktu 90 hari
5	Biaya lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Saham dalam LQ 45, per transaksi untuk 1 jenis saham
7	Plafon pinjaman	Per Transaksi minimum Rp 10.000.000 dan maksimum Rp 150.000.000.000 dihitung paling banyak 57% dari harga pasar saham (<i>Closing Price</i> 1 hari sebelumnya).

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

No	Uraian	Keterangan
8	Nasabah	Institusi atau perorangan
9	Jangka waktu kredit	90 hari
10	<i>Top Up Call</i>	70%
11	Eksekusi	80%

Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Usaha No.91/Lb.1.00/2008 tanggal 2 Desember 2008 penyaluran kredit gadai efek dihentikan sampai dengan adanya keputusan Direksi lebih lanjut.

Unit Laboratorium Gemologi (G-Lab)

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 29/LB.1.00.2010 tentang pembentukan Laboratorium Gemologi tertanggal 31 Maret 2011 ditandatangani oleh Direktur Utama Chandra Purnama dibuatlah sebuah Buku Pedoman Operasional Pegadaian G-Lab yang dikelola, dikoordinir dan diorganisir oleh Divisi Bisnis Fidusia dan Jasa Lain (BFJL).

Pelayanan G-Lab adalah singkatan dari Laboratorium Gemologi milik Perusahaan yang merupakan unit pelayanan di bidang pengujian dan atau penilaian batu berharga, logam mulia dan sertifikat khusus. Jasa yang terdapat dalam unit pelayanan G-Lab yaitu :

1. Jasa Pengujian atau jasa taksiran
2. Jasa Konsultasi
3. Jasa kursus

Organisasi pengelolaan dipimpin oleh Jeneral Manajer Bisnis Fidusia dan Jasa Lain (BFJL) dan langsung bertanggung jawab ke Direksi Perusahaan.

Berikut adalah rincian masing-masing tarif atas jasa layanan yang diberikan :

- a. Tarif Pengujian Logam adalah sebagai berikut :

No.	Jenis yang Diuji	Tarif Jasa Pengujian
1.	Emas	$1.25\% \times \text{Berat Barang (gr)} \times \text{Karatase}/24 \times \text{Harga Pasar Setempat}$
2.	Selain Emas	$\text{Rp } 500 \times \text{Berat Barang (Gram)}$

- b. Tarif Gemstone Memo (*Gemstone Identification*):

No.	Jenis yang Duji	Biaya per Batu (Rp)
1.	<i>Natural</i>	80.000
2.	<i>Synthetic, Assembled</i>	50.000

- c. Tarif Diamond Grading:

No.	Total Berat Berlian	Rp
1.	0.01-0.25 ct	80.000
2.	0.26-0.50 ct	100.000
3.	0.51-0.75 ct	150.000
4.	0.76-1.00 ct	200.000
5.	Penambahan karat berikutnya, setiap Kelipatan 1 karat	100.000

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

d. Tarif Gem Certificate:

No.	Kualitas Batuan	Rp
1.	Stone A	Minimal 150.000, Maksimal 650.000
2.	Stone B	Minimal 125.000, Maksimal 400.000
3.	Stone C	Minimal 100.000, Maksimal 250.000
4.	Stone D	Minimal 80.000, Maksimal 100.000

e. Tarif Re- Checking:

No.	Re- Checking	Rp
1.	Memo	50.000
2.	Certificate	100.000

f. Jasa Lainnya:

- Konsultasi dengan tarif Rp 250.000 per konsultasi
- Kursus dengan skema tarif sebagai berikut:

No.	Jenis Kursus	Lamanya Kursus	Rp
1.	Dasar Gemologi	4 x 1.5 jam	500.000
2.	Gem Identification Basic	10 x 1.5 jam	4.000.000
3.	Gem Identification Advanced	110 x 1.5 jam	7.000.000
4.	Special Course	6 x 1.5 jam	3.000.000

3.g. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Pegawai

Pinjaman Gadai yang bermasalah adalah PYD yang barang jaminannya dijadikan sebagai barang bukti perkara oleh pihak berwajib sampai ada keputusan dari Pengadilan. Nilai yang diakui sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebesar uang pinjaman yang tercatat dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan dibukukan pada saat barang jaminan diambil oleh pihak berwajib untuk dijadikan sebagai barang bukti perkara di Pengadilan.

Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai, Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Perhitungan secara kolektif dilakukan berdasarkan rata-rata biaya penyisihan aset keuangan selama lima tahun terakhir.

Pinjaman fidusia bermasalah adalah pinjaman yang mengalami tunggakan lebih dari 3 bulan tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat diklaim ke pihak asuradur. Dalam hal ini penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk dan akan dipulihkan kemudian setelah Perusahaan berhasil mengeksekusi jaminan fidusia terkait.

Khusus untuk kredit Krista, nilai pinjaman yang macet dicadangkan 100% (seluruhnya) sebagai cadangan kerugian karena penurunan nilai, dengan asumsi tingkat pengembalian dari nasabah ataupun dari asuradur adalah nihil.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pegawai merupakan penyisihan atas piutang TGR kepada karyawan yang sudah mendapatkan SK pembebanan Direksi (tidak termasuk didalamnya Kerugian Perusahaan yang Diperhitungkan (KPYD/K4TGR)).

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Untuk pegawai yang masih tercatat sebagai pegawai aktif, ditetapkan penyisihan sebesar 10% per tahun dari saldo piutang tercatat, sedangkan untuk pegawai yang sudah diberhentikan atau meninggal ditetapkan sebesar 100% dari piutang tercatat.

3.h. Persediaan

Persediaan emas dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan dan harga pasar. Persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan dan dicatat sebagai beban pada saat digunakan.

3.i. Aset Tetap

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2010), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", dan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah". Perusahaan menetapkan kebijakan untuk mencatat dan melaporkan aset tetap dengan menggunakan Model Biaya. Atas dasar model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan, kecuali tanah. Aset tetap selain bangunan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), sedangkan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan Permanen	20
Bangunan Tidak Permanen	10
Inventaris	4
Kendaraan Bermotor Roda Dua	4
Kendaraan Bermotor Roda Empat	8

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Laba atau rugi akibat penjualan aset tetap dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Pembelian/pengadaan barang inventaris dengan harga satuan senilai Rp 1.000.000 atau lebih akan dikapitalisasi, sedangkan bila kurang dari Rp 1.000.000 dibebankan pada periode berjalan.

Perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya mengubah bentuk/bestek dan memperpanjang umur ekonomis yang nilainya Rp 20.000.000 atau lebih dikapitalisasi, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya tidak mengubah bentuk/bestek dan tidak memperpanjang umur ekonomis serta hanya bersifat pemeliharaan walaupun nilainya lebih besar dari Rp 20.000.000 dibebankan pada periode berjalan.

Untuk rehabilitasi ringan yang tidak menambah atau memperpanjang umur ekonomis/masa manfaat dari bangunan yang bersangkutan diakui sebagai beban umum.

Aset dalam penyelesaian (ADP) merupakan akumulasi biaya material dan biaya lainnya yang terkait dengan aset dalam penyelesaian tersebut. Pada saat aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap untuk digunakan, maka aset dalam penyelesaian dialihkan ke akun aset tetap yang sesuai.

Aset Tetap Yang Dikelola Pihak Lain Dalam Rangka Kerja Sama Operasi (KSO)

Tanah yang diserahkan oleh Perusahaan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dicatat sebagai Aset KSO dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar biaya perolehannya. Aset yang dibangun oleh mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Perusahaan mencatat pengalihan Aset yang dibangun oleh mitra KSO sebagai Aset tetap dengan mengkredit pendapatan Aset KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut.

3.j. Beban Ditangguhkan

Beban ditangguhkan adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu:

- Beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.
- Beban pengurusan legal hak atas tanah, diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah tersebut. Jenis atas tanah ini adalah hak guna bangunan yang mempunyai masa manfaat selama 20 tahun.
- Biaya RUF (*Revolving Underwriter Facility*) adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman sindikasi seperti biaya *arranger*, komitmen bank dan konsultan hukum/notaris, diamortisasi sepanjang jangka waktu fasilitas pinjaman RUF yaitu lima tahun.

3.k. Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP)

Kebijakan ini merupakan kebijakan Perusahaan sampai dengan 31 Desember 2012 yang dilanjutkan oleh PT Pegadaian (Persero). Peraturan mengenai Lelang Barang Jaminan dan Pengelolaan Barang Lelang Perusahaan (BLP) berlaku ketentuan Surat Edaran Direksi No.48/OP.1.00211/2003 dan No.49/OP.1.00211/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi No.44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Barang jaminan yang tidak laku dijual/lelang dibukukan sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP). BLP adalah barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo (barang kasep) dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perusahaan sebesar Harga Limit Lelang (HLL).

BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%. Bea Lelang dihitung dari harga yang terbentuk pada saat lelang, yang kemudian disetor ke Kas Negara. Selanjutnya sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah ditetapkan/ diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2006 dan sesuai dengan Surat Edaran Direksi No. 44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006 setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin 0% atau dengan kata lain lelang tidak dikenakan uang miskin, dengan demikian untuk selanjutnya BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman, Sewa Modal dan Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%.

BLP harus terjual dan penjualan dilakukan oleh Panitia Penjualan BLP. Pelaksanaan Penjualan dapat dilakukan oleh Kantor Cabang yang mempunyai harga pasar tertinggi dengan cara di bawah tangan atau dimutasi ke Cabang lain dan dapat dijual dengan cepat.

Harga penjualan ditetapkan sebagai berikut:

- BLP perhiasan emas, harga penjualannya tergantung pada harga yang tertinggi antara harga pasar pusat untuk lelang (HPPL) dan harga pasar daerah untuk lelang (HPPDL)
- BLP non emas, penjualannya ditetapkan minimal sebesar harga pembelian (H.Pb.BLP). Penjualan di bawah harga pembelian (H.Pb) harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Wilayah.

Penjualan BLP di bawah tangan adalah penjualan BLP yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses lelang, apabila di cabang bersangkutan tidak ada calon pembeli, BLP akan dikirim ke cabang lain dengan prosedur yang sama dengan maksud agar memperoleh harga yang paling menguntungkan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Penjualan BLP diakui pada saat terjadinya pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, jika hasil penjualan BLP lebih tinggi/(rendah) dari harga perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai laba/(rugi) untuk periode berjalan dan dibukukan pada pendapatan/beban lainnya.

3.l. Penyelesaian PYD Bermasalah

PYD bermasalah adalah pinjaman yang diketahui barang jaminannya ternyata ditaksir terlalu tinggi atau barang jaminannya berupa barang palsu. Setelah diketahui terjadinya kasus ini, maka Pimpinan Wilayah yang bersangkutan membentuk tim yang bertugas melakukan taksasi ulang agar dapat ditentukan nilai pasar wajar yang sebenarnya dari barang jaminan tersebut.

Berdasarkan nilai barang jaminan yang telah ditaksasi ulang, dilakukan pemindahan saldo dari akun PYD ke akun Barang Bermasalah. Adapun potensi kerugian yang terjadi yaitu sebesar selisih antara nilai Uang Pinjaman (UP) yang Diberikan beserta Sewa Modal (SM) terhadap nilai hasil taksasi akan diproses sebagai beban kepada pegawai yang bertindak sebagai pelaku dalam kasus ini. Sementara menunggu selesainya proses penetapan tuntutan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan jumlah potensi kerugian direklasifikasi dari PYD ke pos Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR).

KPYD adalah kerugian yang ditetapkan sementara akibat taksiran tinggi yang dilakukan oleh pegawai/pelaku tindak kecurangan. Nilai KPYD ditetapkan sebesar Uang Pinjaman, Sewa Modal dan AYD. Atas Kerugian Pinjaman YMH Diperhitungkan tidak dilakukan pencadangan karena nilai KPYD akan direklasifikasi ke Piutang atas nama pegawai terkait sesuai dengan SK Direksi sehingga risiko kerugian relatif kecil.

Sesuai ketentuan yang berlaku, AYD harus segera dijual dan apabila hasil penjualannya ternyata melebihi nilai taksasi, maka laba atas penjualan AYD tersebut akan mengurangi angka KPYD/K4TGR. Terhadap AYD, Manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian, karena AYD sudah dinyatakan dengan nilai pasar wajarnya.

Setelah dilakukan penetapan ganti rugi, maka selanjutnya saldo Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR) akan dipindahkan ke akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Penyelesaian atas piutang TGR selanjutnya dilakukan melalui pemotongan gaji tiap bulan.

3.m. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja yang diberikan Perusahaan meliputi:

- (1) Pensiun
- (2) Pesangon
- (3) Cuti Besar

Pensiun

Sesuai dengan SE 11/SDM.300323/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Perubahan Iuran JPK untuk masa pensiun, iuran dana Pensiun dan iuran Taspen serta tata cara pembayarannya yaitu Perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pegadaian. Pendanaan atas program ini diperoleh dari potongan gaji pokok+tunjangan istri+tunjangan anak pegawai sebesar 4,75% per bulan dan kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 11,75% dari gaji pokok+tunjangan istri+tunjangan anak pegawai.

Sebelumnya Perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pegadaian. Pendanaan atas program ini diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai sebesar 4,75% per bulan dan kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 11,75% dari gaji pokok pegawai.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Peraturan Dana Pensiun Pegadaian diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. Kp.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 dan No. Kp.2/8/50 tanggal 5 April 1999 dan peraturan ini telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan No. 336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Untuk karyawan yang terhitung mulai bekerja sejak tahun 2007, maka pengelolaan dana pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank BNI (Persero) Tbk.

Pesangon

Perusahaan juga memberikan imbalan berupa jumlah *lumpsum* yang diberikan kepada pegawai tetap yang memasuki usia pensiun. Jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan. Peraturan tentang Uang Pesangon Persiapan Pensiun Pegawai (UP4) diatur dalam Peraturan Direksi Perum Pegadaian No.1817/Kp300325/2000 tanggal 6 Juni 2000, dan Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) dan Surat Direksi No. 6393/SDM.300323/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penjelasan atas SK Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009.

Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tidak tetap. Ketentuan hak dan besarnya Uang Cuti Besar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 12/SDM.300323/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan pada tahun 2010 diubah melalui Surat Keputusan Direksi No. 3871/SDM.300323/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang cuti pegawai, dan melalui Surat Edaran No. 87/SDM.300323/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Amandemen/Perubahan terhadap Peraturan Cuti Pegawai. Dan berdasarkan SE No. 51/SDM300323/2011 tanggal 23 Juni 2011 dilakukan penyesuaian perhitungan atas tunjangan cuti besar bagi pegawai.

Perusahaan menerapkan PSAK 24 Revisi 2004 untuk mengestimasi beban dan liabilitas yang timbul dari penyelenggaraan kedua program tersebut. Perhitungan estimasi beban dan liabilitas tersebut menggunakan jasa aktuaris independen. Adapun kebijakan akuntansi yang dianut adalah sebagai berikut:

- (1) Metode aktuarial yang dipergunakan : *Projected Unit Credit*
- (2) Provisi imbalan kerja adalah nilai tunai liabilitas manfaat pensiun dan pesangon dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.
- (3) Pengakuan biaya imbalan kerja meliputi biaya jasa kini, biaya bunga, imbalan hasil aset program, keuntungan/kerugian aktuarial, biaya jasa lalu.
- (4) Keuntungan dan kerugian aktuarial yang dibebankan adalah jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program.
- (5) Tarif diskonto : mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berjangka panjang.
- (6) Tarif kenaikan gaji : mengacu pada rata-rata kenaikan berkala gaji pokok terkini.
- (7) Usia pensiun : 56 tahun.

Dengan menggunakan acuan kebijakan akuntansi yang sama, Perusahaan juga mengevaluasi kecukupan imbalan jangka panjang yang diberikannya dengan ketentuan imbalan minimum yang wajib diberikan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 "Ketenagakerjaan" pasal 156 dan pasal 167. Apabila nilai imbalan dari kedua program tersebut, kurang dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka selisihnya akan dicatat dan dilaporkan sebagai tambahan beban dan liabilitas imbalan jangka panjang menurut undang-undang.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

3.n. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- (1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan aset keuangan yang ditetapkan, diakui dalam "keuntungan/kerugian dalam Laporan Laba/Rugi Komprehensif".

Pada 31 Desember 2012 Perusahaan tidak mempunyai aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melebihi laba rugi komprehensif.

- (2) Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki kas dan setara kas, pinjaman yang diberikan, piutang lainnya dan piutang pihak berelasi.

- (3) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo
Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:
- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
 - investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
 - investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pada 31 Desember 2012, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

- (4) Aset keuangan tersedia untuk dijual
Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di saldo laba diakui pada laporan laba rugi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Pada 31 Desember 2012 Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :

- (1) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan rugi laba komprehensif.
Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan diakui dalam "keuntungan/kerugian" dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada 31 Desember 2012, Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

- (2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya yang bisa diatribusikan untuk pinjaman bank dan pinjaman lainnya adalah biaya provisi, sedangkan untuk pinjaman obligasi adalah biaya emisi.

Pada 31 Desember 2012 liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi terdiri dari pinjaman bank, pinjaman obligasi, pinjaman lainnya, pinjaman pemerintah pusat dan daerah, dan utang kepada nasabah.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Perusahaan menentukan secara individual jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan berupa pelanggaran kontrak pinjaman yaitu tunggakan pokok dan bunga di atas tiga kali tunggakan atau direfleksikan dengan tingkat kolektibilitas kredit macet. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual, maka perhitungan penurunan nilai menggunakan metode *discounted cash flow* dan/atau nilai wajar jaminan. Untuk pinjaman yang diberikan, dalam hal jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali sebesar nilai wajar agunan.

Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai, maka Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Perhitungan secara kolektif dilakukan berdasarkan rata-rata biaya penyisihan aset keuangan selama lima tahun terakhir.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*). Sedangkan untuk liabilitas kewajiban keuangan menggunakan harga jual (*offer price*).

Untuk pinjaman yang diberikan dalam hal jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali sebesar nilai wajar agunan.

3.o. Pajak Penghasilan

Seluruh perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode kewajiban (*liability method*). Besarnya Pajak tangguhan ditentukan dengan tarif pajak yang berlaku.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan

Berdasarkan Perubahan yang terdapat dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian pasal 26 tanggal 15 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., maka Penggunaan Laba diatur sebagai berikut :

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan oleh RUPS.
2. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada poin 1, dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain oleh RUPS.
3. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada poin 2, RUPS dapat menetapkan laba bersih untuk pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan Perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha Perseroan yang persentasenya masing-masing ditetapkan tiap tahun oleh RUPS.
4. Dividen sebagaimana dimaksud pada poin 2, hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
5. Dalam hal tantiem dan bonus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun berjalan dan RUPS menetapkan tantiem dan bonus lebih besar dari yang dianggarkan sehubungan dengan pelampauan target yang ditetapkan, maka selisih tantiem dan bonus tersebut diambil dari laba bersih tahun yang bersangkutan.
6. Dalam hal Perseroan tidak mempunyai laba bersih namun menunjukkan peningkatan kinerja yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang harus dicapai, maka Perseroan dapat memberikan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta bonus untuk karyawan sepanjang telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.
7. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun yang akan datang Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali ditutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

8. Kecuali bagian dividen yang menjadi hak Negara Republik Indonesia dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.
10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada poin 8 dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan.
12. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada poin 11, ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada perseroan.
14. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada poin 13.
15. Pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan dapat meminta pembagian dividen interim.

3.p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pendapatan sewa modal untuk instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk Kreasi, Krasida, Krista dan Kresna) diakui pada Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh pendapatan administrasi yang diterima oleh perusahaan sebagai persyaratan kredit.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan sewa modal yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan administrasi

Pendapatan administrasi seluruh instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk Kreasi, Krasida, Krista dan Kresna) yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan periode sewa dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

3.q. Informasi Segmen

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan yang mana entitas beroperasi.

Informasi segmen disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Informasi segmen primer Perusahaan didasarkan pada lokasi geografis aset.

3.r. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Oleh karena adanya ketidakpastian dalam membuat estimasi tersebut, hasil aktual yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Imbalan Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya (penghasilan) pensiun neto mencakup tingkat diskonto. Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat imbalan kerja.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Nilai wajar piutang ditentukan dengan memperhitungkan penurunan nilai yang bersifat permanen dan nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut. Asumsi yang digunakan untuk menentukan penyisihan penurunan nilai piutang didasarkan perhitungan *loss rate* menggunakan metode *average charge off model*.

Pajak Penghasilan

Penentuan provisi atas pajak penghasilan badan mewajibkan pertimbangan signifikan oleh manajemen. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Provisi dan Kontinjensi

Perusahaan saat ini sedang terlibat dalam proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi terutama melalui konsultasi dengan penasihat hukum Perusahaan yang menangani proses hukum dan pajak tersebut dan kemudian mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau liabilitas konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya. Dalam pengakuan dan pengukuran provisi, manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

4. Kas Dan Bank

	31 Desember 2012
	Rp
Kas	442.842.076.389
Bank	
Pihak Berelasi	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	121.920.485.630
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.762.051.895
PT Bank Negara Indonesia 46 (Persero) Tbk	20.707.798.998
PT Bank Syariah Mandiri	10.751.036.262
Jumlah Pihak Berelasi	190.141.372.785
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	12.041.256.385
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	1.193.004.685
PT Bank CIMB Niaga Tbk	135.952.379
PT Bank Permata Tbk	54.905.927
PT Bank DKI Syariah	6.459.383
Bank Lainnya di Daerah	740.030.079
Jumlah Pihak Ketiga	14.171.608.838
Jumlah Kas dan Bank	647.155.058.012

Seluruh kas tunai (*cash in safe*) dan kas dalam perjalanan (*cash in transit*) telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat perampokan, penodongan dan kehilangan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

5. Pinjaman Yang Diberikan (PYD)

Merupakan saldo pinjaman yang diberikan kepada nasabah (semuanya dalam mata uang Rupiah) per 31 Desember 2012, yang belum jatuh tempo dan diklasifikasikan berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Usaha Gadaai	
- PYD Golongan A	540.863.538.500
- PYD Golongan B	11.717.853.898.600
- PYD Golongan C	6.797.979.953.219
- PYD Golongan D	3.797.627.884.000
Sub Jumlah	22.854.325.274.319
- Krasida	126.320.652.392
Sub Jumlah	22.980.645.926.711

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Desember 2012
	Rp
Usaha Gadai Syariah	
- Marhun Bih Golongan A	35.625.749.500
- Marhun Bih Golongan B	1.084.364.039.500
- Marhun Bih Golongan C	848.226.865.550
- Marhun Bih Golongan D	601.231.196.000
Sub Jumlah	2.569.447.850.550
Usaha Lain	
- Kreasi, Kremada dan Krista	558.635.176.653
- Kresna	215.759.508.567
- Mulia	113.490.663.876
- Kredit Ar-Rum	63.462.937.026
- Kucica	5.709.242.680
- Kredit Tunda Jual Gabah	416.626.000
- Gadai Efek	38.400.000
- Lainnya	376.614.801
Sub Jumlah	957.889.169.603
Jumlah Nilai Nominal	26.507.982.946.864
Pendapatan yang Belum Diamortisasi	
- PYD Kreasi	26.925.205.173
- PYD Krasida	5.367.762.966
- PYD Kresna	13.351.409.283
- PYD Krista	228.329.970
Sub Jumlah	45.872.707.392
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan Bruto	26.553.855.654.256
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pinjaman Yang Diberikan	
- Kreasi	(22.496.121.309)
- Usaha Gadai	(68.562.976)
- Krasida	(5.842.253)
- Kresna	(3.312.558.771)
- Krista	(134.917.614.968)
- Kucica	(5.709.242.680)
Sub Jumlah	(166.509.942.957)
Jumlah Pinjaman Yang Diberikan Bersih	26.387.345.711.299

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai PYD tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan Manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

Kolektibilitas Pinjaman yang Diberikan per 31 Desember 2012, sebagai berikut:

	Tunggakan Angsuran	31 Desember 2012 Rp
Lancar		
- PYD Gadai (KCA)	<120	22.854.325.274.319
- PYD Gadai Syariah	<120	2.569.447.850.550
- PYD Krasida	-	126.320.652.392

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	Tunggakan Angsuran	31 Desember 2012 Rp
- PYD Kreasi	-	329.350.133.983
- PYD Krista	-	527.010.583
- PYD Kremada	-	25.370.100
- PYD Arrum (Kreasi Sistem Syariah)	-	63.462.937.026
- PYD KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah)	<120	416.626.000
- PYD Gadai Efek	-	38.400.000
- PYD Kresna	-	212.575.180.392
- PYD Mulia	-	113.490.663.876
- PYD Kucica	-	5.709.242.680
- PYD Kagum, Kakap, Amanah	-	376.614.801
Sub Jumlah		26.276.065.956.702
Di Bawah Pengawasan Khusus (DPK)		
- PYD Kreasi	1x	31.372.884.096
- PYD Krista	1x	128.673.520
- PYD Kresna	1x	575.865.075
Sub Jumlah		32.077.422.691
Kurang Lancar (KL)		
- PYD Kreasi	2x	24.611.495.462
- PYD Krista	2x	119.606.065
- PYD Kresna	2x	168.497.200
Sub Jumlah		24.899.598.727
Diragukan (DR)		
- PYD Kreasi	3x	5.876.286.345
- PYD Krista	3x	224.449.880
- PYD Kresna	3x	52.666.070
Sub Jumlah		6.153.402.295
Macet (M)		
- PYD Kreasi	>3x	31.592.815.000
- PYD Krista	>3x	134.806.451.619
- PYD Kresna	>3x	2.387.299.830
Sub Jumlah		168.786.566.449
Jumlah		26.507.982.946.864

Pinjaman yang diberikan yang memiliki jangka waktu kredit 12 – 36 bulan adalah kredit Kreasi, Krasida dan Krista. Untuk Kresna, jangka waktu kredit maksimum 36 bulan, Kremada 12 – 24 bulan, dan Investa 90 hari.

Seluruh PYD dijamin oleh barang jaminan bergerak (lebih dari 90% adalah barang jaminan emas/likuid) yang ditaksir berdasarkan nilai wajar. Apabila nasabah tidak melunasi pinjaman pada tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang.

Manajemen berpendapat bahwa barang jaminan yang diterima atas PYD yang diberikan cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya PYD tersebut.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, Kreasi dan Krasida, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian/kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului/tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan/penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 18.900.000.000.000 batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun.

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, Kreasi, dan Krasida, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana alam dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 18.900.000.000.000 batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah Mulia dan Arrum, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana alam dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 1.750.000.000.000 batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah, Mulia dan Arrum, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian/kerusakan/kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului / tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan/penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 1.750.000.000.000 batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode, serta penyisihan yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Marhun Bih dijadikan sebagai jaminan atas Pinjaman Bank dan Pinjaman Sindikasi yang diikat secara fidusia.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dengan tingkat kolektibilitas lancar, di bawah pengawasan khusus, dan kurang lancar masih dihitung pendapatan sewa modalnya, sedangkan untuk kolektibilitas diragukan dan macet tidak dikenakan lagi pendapatan sewa modalnya.

6. Piutang Lainnya

	31 Desember 2012
	Rp
Klaim Asuransi	30.579.898.562
Piutang Pegawai	1.965.415.013
Lain-lain	2.120.243.068
Jumlah	34.665.556.643

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Piutang Klaim Asuransi merupakan piutang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berkenaan dengan pengajuan klaim atas penggantian kerugian terhadap barang jaminan dan klaim atas kerugian kredit dan Syariah yang masih dalam proses terhadap barang jaminan.

Piutang Pegawai merupakan pinjaman beberapa karyawan untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang tidak mendapat penggantian asuransi kesehatan yang akan diperhitungkan pada periode berikutnya bersamaan dengan pembayaran gaji karyawan.

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain seluruhnya lancar sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai piutang, beban penyisihan dan penghapusan piutang.

7. Persediaan

	31 Desember 2012
	Rp
Persediaan Emas	23.230.120.729
Persediaan Barang	7.564.241.600
Jumlah	30.794.362.329

Saldo persediaan emas per 31 Desember 2012 merupakan persediaan emas Mulia pada unit Pegadaian Galeri 24.

Persediaan barang meliputi blanko Surat Bukti Kredit (SBK), jarum uji emas, kantong, barang cetak, alat tulis kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan komputer, perangkat dan materi.

Manajemen berpendapat bahwa untuk persediaan non emas tidak perlu diasuransikan, sedangkan untuk persediaan emas sudah diasuransikan dengan menggunakan asuransi *Gold In Safe* dan asuransi *Gold In Transit*.

Asuransi *Gold In Safe* adalah asuransi yang objek pertanggungannya adalah seluruh persediaan Logam Mulia (LM) atau Non Perhiasan milik PT Pegadaian yang berada di tempat lain. Nilai pertanggungan agregat untuk asuransi jenis ini sebesar Rp 110.000.000.000 dengan rincian batas pertanggungjawaban sebagai berikut:

- Batas Pertanggungan untuk KPPP sebesar Rp 7.500.000.000 per kejadian.
- Batas Pertanggungan untuk Kanwil sebesar Rp 4.000.000.000 per kejadian.

Asuransi *Gold In Transit* adalah asuransi yang menjamin kehilangan emas tertanggung selama dalam pengiriman dari satu tempat ke tempat lain. Nilai pertanggungan agregat untuk asuransi jenis ini adalah sebesar Rp 600.000.000.000 dengan rincian batas pertanggungjawaban sebagai berikut:

- Dari vendor penyedia LM ke Galeri 24 KPPP adalah sebesar Rp 5.000.000.000 per kejadian.
- Dari Galeri 24 KPPP ke bandara, dari bandara ke Kanwil sebesar Rp 5.000.000.000 per kejadian.
- Dari Kanwil ke Kantor Cabang, UPC/UPS sebesar Rp 1.000.000.000 per kejadian.

Perusahaan tidak memperhitungkan penyisihan atau penghapusan persediaan rusak atau usang dan tidak ada persediaan yang dijaminan serta tidak ada kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa selama periode pelaporan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

8. Uang Muka

	31 Desember 2012
	Rp
Uang Muka Pembelian Mulia	62.908.942.500
Uang Muka Dinas	7.687.676.139
Uang Muka Lainnya	7.942.100
Jumlah	70.604.560.739

Uang muka pembelian mulia merupakan pembelian mulia kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Uang muka dinas merupakan uang muka pembayaran atas transaksi pengeluaran yang sudah ada otorisasinya namun belum dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap, yang akan dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya, sesuai dengan Surat Edaran Direksi No.06/TR.4.00.100/2005 tanggal 21 Maret 2005.

9. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Merupakan saldo pendapatan sewa modal dan jasa simpan (ijarah) yang masih harus diterima per 31 Desember 2012, terdiri dari:

	31 Desember 2012
	Rp
Usaha Gadai	
Sewa Modal Golongan A	17.804.601.487
Sewa Modal Golongan B	589.161.739.099
Sewa Modal Golongan C	338.212.127.849
Sewa Modal Golongan D	165.376.676.143
Sewa Modal Golongan E	1.128.528.639
Sub Jumlah	1.111.683.673.217
Usaha Syariah	
Ijarah Golongan A	1.109.177.000
Ijarah Golongan B	53.258.513.900
Ijarah Golongan C	41.456.728.600
Ijarah Golongan D	25.445.146.600
Sub Jumlah	121.269.566.100
Usaha Lain	
Ijarah Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	265.626.736
Sewa Modal Kresna	86.211.000
Sewa Modal Kreasi, Krasida, dan Kremada	2.599.008.086
Sewa Modal Krista	666.816.800
Sewa Modal Lainnya	85.532.299
Sub Jumlah	3.703.194.921
Jumlah	1.236.656.434.238

Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa modal yang masih harus diterima dapat terealisasi.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

10. Beban Dibayar di Muka

	31 Desember 2012
	Rp
Sewa Gedung Kantor	119.370.873.200
Pembukaan Cabang Baru	18.219.990.871
Asuransi Dibayar di Muka	3.712.341.230
Lain-lain	376.990.606
Jumlah	141.680.195.907

Sewa gedung kantor dibayar di muka merupakan pembayaran biaya sewa gedung kantor lama yang diperpanjang dan diamortisasi selama umur sewa.

Biaya pembukaan cabang baru adalah biaya atas sewa gedung kantor dan renovasinya, dan akan diamortisasi sebagai beban amortisasi pembukaan cabang baru selama masa sewa.

Asuransi dibayar dimuka meliputi biaya asuransi barang jaminan, aset tetap dan asuransi direksi.

11. Piutang kepada Pihak-pihak Berelasi

	31 Desember 2012
	Rp
Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21.945.347.112
Piutang Lainnya	1.258.700
Sub Jumlah	21.946.605.812
Cadangan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pegawai	(16.664.464.783)
Jumlah	5.282.141.029

Piutang TGR merupakan piutang kepada karyawan Perusahaan berdasarkan penetapan Direksi atas sanksi tuntutan ganti rugi akibat tindak kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Piutang lainnya merupakan kekurangan kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh manajer cabang dan pengelola kantor cabang pembantu.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pegawai sebagai berikut:

Uraian	1 April - 31 Des 2012
	Rp
Saldo Awal 1 April 2012	13.680.096.705
Penambahan	2.984.368.078
Pemulihan	--
Saldo Akhir 31 Desember 2012	16.664.464.783

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pegawai cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. Selain mengajukan Tuntutan Ganti Rugi kepada manajer cabang/karyawan kunci, Perusahaan juga melakukan upaya hukum berupa tuntutan pidana/perdata atau sanksi pemecatan atau skorsing akibat kelalaian atau kesalahan dalam operasional.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

12. Aset Tetap

	01 April 2012 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	31 Desember 2012 Rp
Harga Perolehan:					
Hak atas Tanah	151.563.141.060	9.210.917.018	--	--	160.774.058.078
Kepemilikan Langsung:					
Bangunan	456.989.103.432	2.205.047.728	--	43.425.463.341	502.619.614.501
Inventaris	378.517.803.600	32.604.291.942	940.076.535	17.833.262.470	428.015.281.477
Kendaraan	42.314.141.101	--	--	(649.989.202)	41.664.151.899
Aset Dalam Penyelesaian:					
Bangunan	14.213.491.243	31.732.539.998	--	(43.425.463.341)	2.520.567.900
Aset yang Belum Digunakan	6.725.436.582	17.452.963.211	--	(16.893.185.935)	7.285.213.858
Jumlah Harga Perolehan	1.050.323.117.018	93.205.759.897	940.076.535	290.087.333	1.142.878.887.713
Akumulasi Penyusutan:					
Kepemilikan Langsung:					
Bangunan	200.389.459.342	16.992.158.620	--	--	217.381.617.962
Inventaris	292.815.228.779	45.107.134.859	930.870.464	--	336.991.493.174
Kendaraan	39.262.364.571	866.893.438	--	(284.745.307)	39.844.512.702
Jumlah Akumulasi Penyusutan	532.467.052.692	62.966.186.917	930.870.464	(284.745.307)	594.217.623.838
Nilai Buku	517.856.064.326				548.661.263.875

Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2012 terdiri dari:

Keterangan	Jumlah (Rp)	% Terhadap Kontrak	Jadual Penyelesaian
Kanwil Balikpapan			
Pembangunan Gedung Sungai Pinang	94.904.050	95%	27 Desember 2012
Kanwil Makassar			
Pembangunan Gedung Jeneponto	419.490.000	25%	19 Januari 2013
Kanwil Surabaya			
Pembangunan Gedung Pasongsongan	194.405.000	98%	14 Agustus 2012
Pembangunan Halaman Diklat Surabaya	328.032.000	99%	16 Agustus 2012
Pembangunan Gedung Pamekasan	235.599.000	98%	13 Agustus 2012
Pembangunan Gedung Sedayu	125.560.000	98%	16 Agustus 2012
Pembangunan Gedung Pandaan	223.709.800	94%	30 Nopember 2012
Pengawasan Pembangunan Gedung Situbondo	1.350.000	1%	04 Januari 2013
Pembangunan Gedung UPC Balong	103.474.950	96%	02 Nopember 2012
Pembangunan Asrama Diklat	60.813.600	80%	20 April 2011
Pembangunan Gedung Benteng	99.290.500	50%	31 Januari 2013
Pembangunan Rumah Dinas Sumenep	185.924.000	50%	31 Januari 2013
Pembangunan Gedung Man.Area + SPI Jember	249.876.000	100%	01 Mei 2012
Kanwil Denpasar			
Pembangunan Gedung Bangli	113.312.000	100%	26 Desember 2012
Kantor Pusat			
Pembuatan Grondtank	70.892.000	100%	16 Oktober 2012
Pohon	13.935.000	100%	06 Nopember 2012
Jumlah	2.520.567.900		

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Seluruh kantor/gedung/bangunan milik sendiri atau yang disewa oleh Perusahaan dan entitas anak serta kantor afiliasinya yang berada di seluruh wilayah Indonesia beserta inventaris kantor yang berada didalamnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru-hara dan bencana alam dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 370.130.266.000.

Kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat kecelakaan, dan pencurian/kejahatan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 22.897.976.460 di tahun 2012.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset dalam penyelesaian.

13. Aset Lain-lain

	31 Desember 2012
	Rp
Barang Jaminan yang Disisihkan	35.665.463.039
Kerugian Perusahaan YMH Diperhitungkan (KPYD)	34.355.315.016
Barang Lelang Milik Perusahaan	19.856.027.930
Beban Hak Atas Tanah yang Ditangguhkan	6.543.695.855
Tanah Kerja Sama Operasi	1.406.071.181
Jumlah	97.826.573.021

Tanah KSO merupakan harga perolehan tanah yang diserahkan oleh Perusahaan kepada mitra KSO untuk dibangun dan dikelola sesuai dengan perjanjian yaitu KSO tanah Cimahi dan KSO Salemba.

14. Pinjaman Bank

	31 Desember 2012
	Rp
Pihak Berelasi	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.938.158.734.312
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.769.429.431.155
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.999.286.714.945
PT Bank Syariah Mandiri	346.553.611.741
Jumlah Pihak Berelasi	14.053.428.492.153
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	2.525.562.210.691
PT Bank Permata Syariah	249.992.215.417
PT Bank Permata Tbk	200.000.000.000
PT Bank DKI Syariah (Sindikasi)	200.000.000.000
PT Bank DKI Syariah	150.000.000.000
Jumlah Pihak Ketiga	3.325.554.426.108
Jumlah Pinjaman Bank	17.378.982.918.261

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pinjaman modal kerja pertama kali diberikan dengan plafon Rp 300.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 21 Pebruari 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Raharti Sudjardjati, S.H. Fasilitas pinjaman dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari plafon kredit.

Pada tahun 2009, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.17 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., M.Kn., nilai fasilitas pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000.

Pada tahun 2009 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit I Nomor: KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 21 April 2008 Akta Perjanjian Kredit No. 281 dan diganti dengan Perjanjian Kredit No.CBG.CBI.SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 nilai plafonnya menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit adalah 12 bulan sampai dengan 20 Pebruari 2010 dan tingkat bunga 13% per tahun (*reviewable*).

Pada tahun 2010 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit No.CBG.CBI/SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang telah di aktakan dengan Akta No.17 diganti dengan Perjanjian Kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 19 Pebruari 2010 dan selanjutnya diganti dengan perjanjian kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 9 April 2010 yang diaktakan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 6 nilai plafon ditingkatkan menjadi Rp 5.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit 12 bulan sampai dengan 20 Pebruari 2011 dan tingkat bunga 10,25% per tahun (*reviewable*).

Berdasarkan surat Bank Mandiri No.CBG.CB1/343/2010 tanggal 8 Desember 2010, tingkat bunga pinjaman menjadi sebagai berikut:

1. Sampai dengan baki debit sebesar Rp 4.590.940.000.000 dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun
2. Atas baki debit sebesar Rp 100.000.000.000 yang ditarik pada tanggal 12 Nopember 2010 dikenakan suku bunga 8,5% per tahun
3. Untuk penarikan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 200.000.000.000 akan dikenakan suku bunga 8,25% per tahun

Terdapat Addendum V atas perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No: KC-CRO/016/PK-KMK/2008, No. 281 tanggal 21 April 2008 dan terakhir Addendum VI dengan Akta No: TOP.CRO/CLA.51/ADD/2011 tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja. Limit Fasilitas : Rp 5.500.000.000.000, Jenis kredit : Kredit Modal Kerja, Sifat : Revolving, Jangka Waktu : 21 Pebruari 2011 sampai dengan 20 Pebruari 2012, Provisi : 0,25% p.a. dari limit. Suku Bunga terdiri dari:

- Untuk baki debit > Rp 300 M - Rp 5,5 T = 10,00% p.a.
- Untuk baki debit Rp 100 M yang ditarik tanggal 12 Nopember 2010 = 8,50% p.a.
- Atas penarikan KMK Rp 200 M yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2010 = 8,25% p.a.

Sesuai dengan surat PT Bank Mandiri No. TP.CRO/CLA.31/ADD/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 perihal Addendum VII atas perubahan PK Modal Kerja bahwa limit fasilitas Rp 5.500.000.000.000 diperpanjang terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2012 sampai dengan 20 Pebruari 2013.

Pada tahun 2012 terdapat akta perubahan pertama atas perjanjian kredit modal kerja Nomor : CRO-KP/2006/PK-KMK/2012 Nomor 39 tanggal 29 Maret 2012, tentang penambahan plafon sebesar Rp 700.000.000.000 dari semula sebesar Rp 500.000.000.000, sehingga total plafon menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Pebruari 2013, dengan tingkat suku bunga sebesar 8,50% p.a yang akan berlaku mulai tanggal 1 April 2012.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tahun 2012 terdapat Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO-KP/2006/PK-KMK/2012 Nomor 40 tanggal 29 Maret 2012, tentang Pegadaian mendapat fasilitas baru sebesar Rp 300.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Pebruari 2013, dengan tingkat suku bunga sebesar suku bunga BI rate ditambah 2% p.a.

Mengacu perjanjian kredit akta No. 17 tanggal 16 Maret 2009 pasal 17 ayat 7, Perusahaan wajib :

1. Memelihara *current ratio* di atas 110%
2. Memelihara total pinjaman maksimal tujuh kali modal sendiri
3. Melapor kepada bank apabila :
 - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
 - Mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan yang dijaminan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.
 - Melunasi utang kepada pemilik modal.
 - Memindahtangankan barang jaminan.
 - Membagikan dividen.
 - Mengubah susunan Direksi atau Dewan Komisaris dan melampirkan Surat Keputusan Menteri.
 - Membagikan laba sesuai penetapan Menteri.

Jaminan Piutang lancar Perusahaan terhadap debitemnya yang diikat fidusia sebesar Rp 7.000.000.000.000 *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan atas tambahan fasilitas KMK.

Suku bunga rata-rata selama periode 31 Desember 2012 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012
KMK I	8,50%
KMK II	8,50%
KMK Fixed Loan	7,75%

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/K) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Raharti Sudjardjati S.H., fasilitas pinjaman dengan plafon sebesar Rp 300.000.000.000 tersebut berbunga 13% per tahun (*reviewable*) dan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2006.

Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai sebesar Rp 300.000.000.000.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 8 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris R. Ay. Poppy Darmawan, S.H., plafon pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 3.500.000.000.000 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010. Pinjaman tersebut dijamin dengan secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai jaminan sebesar Rp 3.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebagai berikut:

1. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) ditambah 3,25% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar atau lebih dari Rp 2.800.000.000.000.
2. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 3,50% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar Rp 2.300.000.000.000 sampai dengan Rp 2.800.000.000.000.
3. Sebesar SBI 1 (satu) bulan ditambah 3,75% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan kurang dari Rp 2.300.000.000.000.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tahun 2010, plafon pinjaman dinaikkan kembali menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 30 Maret 2010, dan jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun.

Pada tahun 2011, berdasarkan Akta No.18 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. BRI memberikan tambahan (suplesi) kredit atas Fasilitas KMK sebesar Rp 500.000.000.000 menjadi Rp 5.000.000.000.000 (sebelumnya Rp 4.500.000.000.000) selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan 28 Pebruari 2012. Selain itu terdapat perubahan suku bunga atas perpanjangan tersebut yang semula 10% turun menjadi 9,5%.

Pada Tahun 2012, berdasarkan Akta No. 37 tanggal 26 Maret 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. BRI memberikan tambahan (*suplesi*) kredit atas Fasilitas KMK sebesar Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp 6.000.000.000.000 (sebelumnya Rp 5.000.000.000.000) selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2012 sampai dengan 28 Pebruari 2013. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 6.000.000.000.000 serta terdapat perubahan suku bunga atas perpanjangan tersebut yang semula 9,5% turun menjadi 8,5%.

Mengacu perjanjian kredit pasal 10, Perusahaan wajib :

- Mempergunakan kredit yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, fasilitas KMK hanya dipergunakan untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi lainnya.
- Membayar bunga dan denda bunga yang telah ditentukan apabila setelah perjanjian kredit ini berakhir debitur menunggak atau fasilitas kredit dihentikan secara sepihak oleh pihak kreditur.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan.
- Membayar pajak, biaya-biaya dan ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit.
- Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan administrasi pembukuan dan kondisi perusahaan oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk kreditur.
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit perusahaan.
- Menyimpan surat bukti kepemilikan jaminan sampai kreditnya lunas.

Suku bunga rata-rata selama periode 31 Desember 2012 atas fasilitas di atas adalah sebagai berikut :

Nama Fasilitas Pinjaman	2012
KMK	8,50%

c. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas pinjaman dari PT Bank BNI (Persero) Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010, berdasarkan Akta Perjanjian No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris R. Ay. Poppy Darmawan, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 400.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dan suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan dari Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5%, dan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat di hadapan Notaris R. Ay. Poppy Darmawan, S.H. disepakati penambahan plafon pinjaman menjadi sebesar Rp 2.600.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan di

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

4 Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5% sehingga menjadi 8,5% p.a, jatuh tempo tanggal 14 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris R. Ay. Poppy Darmawan, S.H., perusahaan memperoleh pinjaman kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 400.000.000.000 dan berdasarkan surat nomor KPS/2.4/266/R tentang persetujuan pemberian penambahan pemberian fasilitas kredit sebesar Rp 2.600.000.000.000 menjadi Rp 3.000.000.000.000. Jangka waktu kredit tersebut 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Fasilitas kredit berjalan atau sampai dengan tanggal 14 April 2011. Untuk maksimum fasilitas sampai dengan Rp 1.250.000.000.000, tingkat suku bunga ditetapkan berdasarkan rata-rata suku bunga deposito berjangka 12 bulan di empat bank (BRI, Mandiri, BNI, BCA) dan untuk fasilitas Rp 250.000.000.000 ditetapkan sebesar 8,5% p.a dan akan direview setiap saat.

Pada tanggal 31 Maret 2011 telah ditandatangani surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No (2) 13 dengan maksimum plafon Rp 2.600.000.000.000 dengan bunga 8,5% p.a yang diperpanjang selama 12 bulan sejak jatuh tempo terhitung sejak tanggal 15 Januari 2011 s.d. 14 Januari 2012.

Pada tanggal 31 Maret 2011 terdapat surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (2) 08 yang berisi bahwa para pihak yang berkaitan setuju untuk mengadakan perubahan atas Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris R. Ay. Poppy Darmawan, S.H. dengan maksimum plafon Rp 400.000.000.000 sebagaimana telah diubah dengan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (1) 08 tanggal 12 Januari 2011. Perubahan tersebut termasuk perpanjangan masa kredit selama 12 bulan terhitung sejak 15 Januari 2011 sampai dengan 14 Januari 2012, termasuk perpanjangan sementara selama 3 bulan sejak jatuh tempo atau sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan 14 April 2011.

Berdasarkan surat PT BNI No. BIN/1.4/100/R tanggal 26 Januari 2012 telah disetujui perpanjangan fasilitas kredit Rp 3.000.000.000.000 diperpanjang terhitung mulai tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan 14 Januari 2013. Berdasarkan Akta nomor (3) 13 tentang Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Maksimum Rp 2.600.000.000.000 tanggal 12 Desember 2012 dan Akta nomor (3) 08 tentang Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Maksimum Rp 400.000.000.000 tanggal 12 Desember 2012, telah ditandatangani dibawah tangan perpanjangan fasilitas KMK terhitung sejak tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013.

Berdasarkan surat Bank BNI No. KP5/2.4/1420/R tanggal 1 Oktober 2010 terdapat perubahan suku bunga sebagai berikut:

1. KMK sebesar Rp 1.250.000.000.000 suku bunga 9,5% per tahun
2. KMK sebesar Rp 1.750.000.000.000 suku bunga 8,5% per tahun

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 20, Perusahaan wajib :

- Memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimum 10 kali dan *current ratio* maksimum 1 kali.
- Membayar seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya lain yang dikenakan pemerintah.
- Menyerahkan Laporan Keuangan berupa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi setiap 3 bulan.
- Menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang telah disetujui Bank.
- Menyerahkan daftar tagihan kepada pihak ketiga secara periodik (triwulan).
- Melapor kepada bank apabila :
 - Adanya perkara yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan, yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain.
 - Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

- Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan perusahaan serta barang agunan yang mempengaruhi kelangsungan usaha.
- Adanya pengurus perusahaan yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan.
- Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya.

Suku bunga rata-rata selama periode 31 Desember 2012 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012
KMK I (Rp 1,250 M)	8.50%
KMK II (Rp 1,750 M)	8.50%

d. PT Bank Central Asia Tbk

Fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 26 Juni 2000, yang dibuat di hadapan Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 50.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga 16% per tahun (*reviewable*), jatuh tempo tanggal 26 Juni 2001.

Sejak tahun 2006 nilai fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo S.H. fasilitas kredit lokal dan *time loan revolving* diubah menjadi sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal/ <i>Local Credit</i>	100.000.000.000	24 Juni 2010
<i>Time Loan Revolving</i>	1.200.000.000.000	24 Juni 2010

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.21 tanggal 23 Juli 2010 tentang Perubahan Kesepuluh atas Perjanjian Kredit No.21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Ny Erly Soehandojo, S.H., menerangkan fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	100.000.000.000	26 Juni 2011
<i>Time Loan Revolving</i>	1.500.000.000.000	26 Juni 2011

Fasilitas *Money Market Loan* dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo, S.H., di Jakarta dan telah dilakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.33 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo, S.H. fasilitas *money market loan* diubah plafonnya menjadi Rp 500.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 24 Juni 2010.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 23 Juli 2010 tentang perubahan kedelapan atas Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo, S.H. di Jakarta menerangkan bahwa PT Pegadaian telah menerima fasilitas pinjaman berjangka *Money Market* dengan plafon Rp 500.000.000.000 dan mengubah batas waktu pemberian fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 26 Juni 2010 dan berakhir tanggal 26 Juni 2011.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang perubahan kesembilan atas perjanjian kredit No. 21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo, S.H. yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan perubahan ke delapan atas perjanjian kredit No. 179/Add-KCK/2009 tanggal 17 Juli 2009 menerangkan fasilitas PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	100.000.000.000	26 Juni 2012
<i>Time Loan Revolving</i>	1.700.000.000.000	26 Juni 2012

Perubahan ke duabelas atas PK Akta Nomor 01 tanggal 3 Januari 2012 pasal 1 mengubah plafon fasilitas *Time Loan Revolving* dari semula Rp 1.500.000.000.000 menjadi Rp 1.700.000.000.000. Perubahan kesepuluh atas PK Nomor 2, Akta tanggal 3 Januari 2012, pasal 1, mengubah plafon fasilitas *money market* dari semula Rp 500.000.000.000 menjadi Rp 800.000.000.000.

Untuk Kredit Lokal dan *Time Loan Revolving* telah diperpanjang sementara sampai dengan tanggal 26 September 2012, dan telah diperpanjang sementara untuk yang kedua sampai dengan 26 Desember 2012. Berdasarkan Akta No. 42 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan ketigabelas atas Perjanjian Kredit dan Akta No. 43 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan kesebelas atas Perjanjian Kredit yang dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. fasilitas Kredit Lokal, *Time Loan Revolving* dan *Money Market Line* diperpanjang terhitung sejak tanggal 26 Juni 2012 dan berakhir tanggal 26 Juni 2013. Mengacu pada perjanjian kredit pasal 11, Perusahaan wajib memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimum 7 kali dan *current ratio* maksimum 1 kali.

Suku bunga rata-rata selama periode 31 Desember 2012 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012
Kredit Lokal	9,00%
<i>Time loan</i>	8,00%
<i>Money Market Loan</i>	7,70%

Risiko barang jaminan ditanggung oleh Perusahaan karena barang jaminan milik nasabah berada/disimpan oleh Perusahaan. Apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah, penanggung jawabnya adalah Perusahaan dan barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perusahaan, sebagaimana diperlakukan terhadap barang jaminan nasabah usaha gadai lainnya.

e. PT Bank Syariah Mandiri

Fasilitas pembiayaan musyarakah dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk pertama kali diterima tahun 2007 berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 22 Pebruari 2007, yang dibuat di hadapan Notaris Ina Rosaina, S.H., nilai fasilitas Rp 50.000.000.000 jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2008, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman.

Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 56% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk PT Pegadaian
2. Sebesar 44% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Ina Rosaina, S.H., nilai fasilitas dinaikkan menjadi Rp 100.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Maret 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

1. Sebesar 60% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk PT Pegadaian
2. Sebesar 40% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.3 tanggal 10 Desember 2009, yang dibuat di hadapan Notaris Ina Rosaina, S.H., nilai fasilitas diganti menjadi Rp 200.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Desember 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 63,26% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk PT Pegadaian
2. Sebesar 36,74% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank

Pada tanggal 9 Desember 2010, berdasarkan Surat Penegasan No. 12/240/060/SPPA atas Addendum Akad Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar No. 12/411/060/AL-MUSYARAKAH, Bank menyetujui perpanjangan jangka waktu pembiayaan sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011.

Pada tanggal 25 Pebruari 2011, berdasarkan Perjanjian No.13/042060/SPPP menyatakan bahwa terdapat Perubahan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Perusahaan untuk cabang syariah mengenai perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan dari tanggal akad perjanjian dan penambahan pembiayaan modal kerja dari semula sebesar Rp 200.000.000 menjadi Rp 350.000.000.

Semua fasilitas yang jatuh tempo tahun 2011 tidak dilunasi, tetapi telah diperpanjang dengan beberapa fasilitas yang ditambah nilai plafonnya. Apabila terdapat penurunan saldo pinjaman bank, penurunan saldo tersebut bukan merupakan pelunasan utang, namun merupakan penempatan kelebihan likuiditas/penurunan sementara pinjaman perbankan, sebelum dipergunakan sebagai modal kerja pada bulan-bulan berikutnya secara bertahap.

Pada tanggal 29 Maret 2012, berdasarkan akta addendum Pembiayaan Dana Berputar dengan Akad Musyarakah Nomor 31 tanggal 29 Maret 2012, dimana Perusahaan mendapatkan tambahan plafond pembiayaan sebesar Rp 150.000.000.000 dari semula Rp 350.000.000.000, sehingga total pembiayaan menjadi Rp 500.000.000.000, yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2012. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 60,47% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk PT Pegadaian.
2. Sebesar 39,53% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk BSM.

Berdasarkan Addendum VI Pembiayaan Dana Berputar Dengan Akad Musyarakah No.14/192A/060/PDB Musyarakah tanggal 03 September 2012 Nisbah bagi hasil diubah menjadi :

1. Sebesar 64,63% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk PT Pegadaian
2. Sebesar 35,37% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk BSM.

Berdasarkan Addendum VII Pembiayaan Dana Berputar Dengan Akad Musyarakah No. 14/002/060-OPD/XII/2012/ADD-MSYR tanggal 10 Desember 2012 fasilitas tersebut telah diperpanjang sementara sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2013.

f. PT Bank Permata Syariah

Fasilitas pinjaman musyarakah dari PT Bank Permata Syariah pertama kali diperoleh pada tahun 2011. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No. 19 tanggal 14 Juli 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Sjarmeini S Chandra, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 300.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya akad tersebut dan akan berakhir 14 Juli 2012 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan. Berdasarkan Akta No.34 tanggal 13 September 2012 tentang Addendum Ketiga Akad Musyarakah, fasilitas tersebut telah diperpanjang terhitung sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2013. Selanjutnya berdasarkan Akta No.35 tanggal 13 September 2012 tentang Akad Fasilitas Musyarakah Pembiayaan II,

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Pegadaian mendapatkan tambahan fasilitas Musyarakah dengan plafon sebesar Rp 300.000.000.000 sehingga total fasilitas Musyarakah di Bank Permata Syariah menjadi sebesar Rp 600.000.000.000. Adapun periode Musyarakah II adalah dihitung sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2013.

g. PT Bank Permata Tbk

Fasilitas pinjaman (ketentuan khusus atau fasilitas *Overdraft*) dari PT Bank Permata Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 12 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., M.Kn. Fasilitas dengan plafon sebesar Rp 100.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit dengan suku bunga pinjaman sebesar 10,25% dan jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2011.

Fasilitas pinjaman *Money Market* dari PT Bank Permata Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., M.Kn dengan plafon sebesar Rp 200.000.000.000 dengan tingkat bunga ditetapkan pada saat terjadi kesepakatan antara PT Pegadaian dengan Bank saat penarikan, dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit dan suku bunga yang berlaku ditetapkan oleh Bank yang disepakati semua pihak, dan jatuh tempo tanggal 25 Februari 2011.

Pada tanggal 25 April 2011, dibuat Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. MM/11/521/AMD/NBFI yang berisi bahwa para pihak terkait telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Fasilitas *money market* tertanggal 25 Feb 2010 No. 13 yang dibuat di hadapan Notaris Imas Fatimah S.H., yang terakhir diubah dengan Perubahan perjanjian Kredit (Fasilitas *Money Market*) tertanggal 24 Februari 2011 No. MM/11/253/AMD/FI berupa pemberian Fasilitas *Money Market* dari Bank Permata kepada Pegadaian sebesar Rp 200.000.000.000 berupa pemberian Fasilitas *Money Market* untuk jumlah tidak melebihi Rp 75.000.000.000. Jangka waktu Fasilitas *Money Market* akan berakhir pada 24 April 2011.

Berdasarkan perubahan Perjanjian Kredit fasilitas *Money Market* No. MM/12/1243/AMD/FI tanggal 25 Juni 2012, maka atas fasilitas *money market* tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 senilai Rp 200.000.000.000.

Pada tanggal 14 Juli 2011 telah dilakukan penandatanganan akad musyarakah no 19 tanggal 14 Juli 2011 dengan Notaris Ny. Sjarmaeni S. Chandra, S.H. dengan fasilitas sebesar Rp 300.000.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya akad tersebut dan akan berakhir pada tanggal 14 Juli 2012. Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit (Fasilitas *Money Market*) Nomor 33 tanggal 13 September 2012, maka atas fasilitas *money market* tersebut telah diperpanjang sampai dengan tanggal 25 April 2013.

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 6, Perusahaan wajib :

- Menyerahkan Laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi kepada Bank dalam bentuk danisi yang dapat diterima oleh Bank.
- Menyerahkan Laporan Keuangan audit yang sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Melaporkan informasi keuangan dan informasi lainnya mengenai kondisi atau operasi perusahaan bila diperlukan atau diminta oleh Bank.
- Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum.
- Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank yang layak untuk memeriksa kekayaan dan usaha perusahaan dan memeriksa/mengaudit perusahaan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

- Melapor kepada bank apabila :
 - Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap perusahaan yang nilainya minimal 10% dari nilai ekuitas perusahaan.
 - Perusahaan melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan memperoleh sebagian besar aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk usaha lain.
 - Melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Perusahaan.
 - Melakukan perubahan sifat dan kegiatan usaha Perusahaan.

Suku bunga rata-rata selama periode 31 Desember 2012 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012
KMK I (Rp 1,250 M)	8.50%
KMK II (RP 1,750 M)	8.50%

h. PT Bank DKI Syariah (Sindikasi)

Fasilitas pinjaman Musyarakah Sindikasi dari PT Bank DKI pertama kali diperoleh pada tahun 2012. Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.26 tanggal 29 Oktober 2012, yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Pegadaian mendapatkan fasilitas Musyarakah Sindikasi dengan plafon Rp 1.000.000.000.000 dan dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan.

Porsi Pembiayaan masing-masing Bank Peserta Musyarakah Sindikasi sebagai berikut :

a. Bank DKI	Rp 75.000.000.000
b. Bank Kaltim	Rp 350.000.000.000
c. Bank Sumut	Rp 250.000.000.000
d. Bank Jateng	Rp 100.000.000.000
e. Bank Kalbar	Rp 100.000.000.000
f. Bank Nagari	Rp 75.000.000.000
g. Bank Jambi	Rp 50.000.000.000

Jenis pembiayaan adalah *executing*, jangka waktu fasilitas adalah satu tahun sejak penandatanganan akad dengan jangka waktu penggunaan dana selama 3 (tiga) bulanan. Adapun pembagian nisbah bagi hasil dengan presentasi Bank Peserta Musyarakah Sindikasi dengan Pegadaian adalah 5,47% : 94,53% dengan ekuivalen sebesar 8,50% p.a.

i. PT Bank DKI Syariah

Fasilitas pinjaman musyarakah dari PT Bank DKI Syariah pertama kali diperoleh pada tahun 2011. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No.43 tanggal 20 September 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Dinah, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 200.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan.

Fasilitas pinjaman yang diberikan bersifat *revolving* dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad dan akan berakhir pada tanggal 20 September 2012. Adapun nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

- Sebesar 68.52% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk PT Pegadaian.
- Sebesar 31.48% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Berdasarkan Akta No. 01/GSY/II/2012 tanggal 03 Pebruari 2012 tentang Addendum I Akad Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Nomor 43 tanggal 20 September 2011 mengubah nisbah bagi hasil dengan prosentase menjadi:

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

- Sebesar 98.90% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk PT Pegadaian (Persero).
 - Sebesar 1,10% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.
- Serta perubahan metode dari *revenue sharing* menjadi *profit sharing*.

Berdasarkan surat pemberitahuan persetujuan perubahan bagi hasil Bank DKI Syariah No. 1057/GSY/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Bagi Hasil, sepakat untuk mengubah prosentase dari semula 1,1% : 98,9% menjadi 1,13% : 98,87%.

Berdasarkan Akta Addendum II Akad Fasilitas Pembiayaan Musyarakah Nomor 52 tanggal 20 Nopember 2012, fasilitas tersebut telah diperpanjang sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2013.

Sesuai akad, hal-hal yang harus dipenuhi oleh Perusahaan selama fasilitas kredit adalah:

- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka Perusahaan akan dikenakan denda sebesar kerugian riil yang ditanggung oleh pihak bank dan denda sebesar 1,5% dari nisbah bagi hasil, dan akan disetorkan untuk dana kebajikan (infaq/shodaqoh/sosial).
- Menyalurkan transaksi keuangannya melalui rekeningnya di kreditur.
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit perusahaan.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.
- Apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usaha, kerugian akan ditanggung bersama oleh para pihak secara proporsional sebesar porsi modal yang digunakan, namun tidak termasuk kerugian yang timbul akibat dari kesalahan yang disengaja oleh Perusahaan.

Mengacu pada akad pasal 12 ayat 2, Perusahaan wajib:

- Jaminan yang diberikan oleh *end user/rahin* kepada Bank harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pinjaman yang diberikan kepada rahein tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- Jaminan tagihan/piutang yang diagunkan kepada Bank adalah piutang dengan kolektibilitas yang lancar.
- Menyalurkan dana yang berasal dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah.
- Menjaga kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada rahein.
- Menyampaikan laporan keuangan unaudited semesteran paling lambat 60 hari setelah akhir laporan, dan laporan keuangan audited tahunan paling lambat 180 hari setelah akhir periode laporan.
- Memberitahukan kepada Bank apabila memperoleh pinjaman/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya.
- Mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank apabila akan mengajukan pinjaman/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya, yang dapat mengakibatkan *Debt to Equity Ratio* melampaui 10 kali.
- Menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum 10 kali dan menjaga tingkat *Non Performing Loan Gross* maksimal 5%.
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan pengurus (Dewan Komisaris dan Dewan Direksi) ataupun Anggaran Dasar Perusahaan.
- Berkewajiban menjaga kualitas, reputasi, itikad baik, dan kualitas organisasi.
- Memberikan kuasa kepada Bank untuk memindahkan/mendebit dana dari rekening giro/pinjaman/deposito atas nama Perusahaan untuk pembayaran kewajiban-kewajiban kepada Bank.
- Melakukan pembaharuan/perpanjangan atas dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo dan melaporkan atau menyerahkan copy dokumen terkini kepada Bank.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

15. Pinjaman *Medium Term Notes* (MTN)

	31 Desember 2012
	Rp
Jangka Pendek:	
<i>Medium Term Notes</i> Syariah Ijarah II	240.000.000.000
Jumlah	240.000.000.000

Utang Syariah Ijarah

Fasilitas pinjaman dari PT Mandiri Sekuritas, yang kemudian diberi nama *Medium Term Notes* (MTN) Syariah Ijarah I pertama kali diterbitkan pada tahun 2011, berdasarkan Akta Perjanjian No. 42 tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H..

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada PT Pegadaian (Persero) akan diterbitkan dalam beberapa tahap, dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Penerbitan pada masing-masing tahap MTN Syariah Ijarah I, dengan jumlah sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah) berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai akad, maka Perusahaan akan dikenakan Cicilan Imbalan Ijarah, yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima Perusahaan yang pembayarannya dilakukan pada setiap tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing tahap.

Hingga tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp 425.000.000.000 yang dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

- a. MTN Syariah Ijarah I PT Pegadaian Tahap I Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap I dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 100.000.000.000.

MTN Syariah Ijarah I Tahap I berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 3 September 2012. Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap I adalah sebesar Rp 8.581.944.444 yaitu 8,35% dari pinjaman, yang pembayarannya diatur sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ijarah	Tanggal	Jumlah yang dibayarkan
Tahap I	23 Nopember 2011	Rp 2.087.500.000
Tahap II	23 Pebruari 2011	Rp 2.087.500.000
Tahap III	23 Mei 2012	Rp 2.087.500.000
Tahap IV	03 September 2012	Rp 2.319.444.444

Nominal dan Ijarah tahap IV sudah dilunasi per tanggal 31 Agustus 2012 masing-masing sebesar Rp 100.000.000.000 dan Rp 2.319.444.444.

- b. MTN Syariah Ijarah I PT Pegadaian Tahap II Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap II dilakukan pada tanggal 27 September 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 125.000.000.000.

MTN Syariah Ijarah I Tahap II berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 07 Oktober 2012.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap II adalah sebesar Rp 10.277.777.778 yaitu 8% dari pinjaman, yang pembayarannya diatur sebagai berikut:

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

<u>Cicilan Imbalan Ijarah</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah yang dibayarkan</u>
Tahap I	27 Desember 2011	Rp 2.500.000.000
Tahap II	27 Maret 2012	Rp 2.500.000.000
Tahap III	27 Juni 2012	Rp 2.500.000.000
Tahap IV	07 Oktober 2012	Rp 2.777.777.778

Nominal dan Ijarah tahap IV sudah dilunasi per tanggal 5 Oktober 2012 masing-masing sebesar Rp 125.000.000.000 dan Rp 10.277.777.778.

- c. MTN Syariah Ijarah I PT Pegadaian Tahap III Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap III dilakukan pada tanggal 09 Nopember 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 200.000.000.000.

MTN Syariah Ijarah I Tahap III berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Nopember 2012.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap III adalah sebesar Rp 16.444.444.444 (enam belas milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setara dengan 8% (delapan persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Cicilan Imbalan Ijarah</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah yang dibayarkan</u>
Tahap I	09 Pebruari 2012	Rp 4.000.000.000
Tahap II	09 Mei 2012	Rp 4.000.000.000
Tahap III	09 Agustus 2012	Rp 4.000.000.000
Tahap IV	19 Nopember 2012	Rp 4.444.444.444

Nominal dan Ijarah tahap IV sudah dilunasi per tanggal 14 Nopember 2012 masing-masing sebesar Rp 200.000.000.000 dan Rp 4.444.444.444.

Sesuai dengan akad, apabila Perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran, baik pembayaran pinjaman maupun Cicilan Imbalan Ijarah, maka Perusahaan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang besarnya telah diatur pada tiap tahap pinjaman.

Mengacu pada akad, Perusahaan wajib:

- Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum.
- Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank yang layak untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perusahaan dan memeriksa/mengaudit Perusahaan.
- Memberitahukan kepada wakil Bank yang ditunjuk keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempengaruhi usaha atau operasi Perusahaan.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan serta melakukan pembayaran pajak sebagaimana mestinya.
- Menyerahkan laporan keuangan in-house setiap tiga bulan.
- Menyerahkan laporan keuangan *audited* tahunan.
- Memelihara harta kekayaan dan semua aset agar dalam keadaan baik dan mengasuransikannya.
- Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memelihara rasio likuiditas 1 : 1 dan *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 10 kali.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Medium Term Notes II

Selain MTN Syariah Ijarah I, PT Pegadaian dan PT Mandiri Sekuritas juga mengadakan perjanjian kerjasama berupa fasilitas pinjaman lain. Fasilitas pinjaman dari PT Mandiri Sekuritas ini kemudian diberi nama *Medium Term Notes* (MTN II) PT Pegadaian Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN, diterbitkan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Perjanjian No. 69 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H.

MTN sebesar Rp 240.000.000.000 ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2013.

16. Pinjaman Obligasi yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

	31 Desember 2012 Rp
Nilai Nominal Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A	150.000.000.000
Dikurangi Diskonto yang Belum Diamortisasi:	(37.373.253)
Jumlah Nilai Bersih	149.962.626.747

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A, jumlah pokok sebesar Rp 150.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 6,6% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke-370 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 18 Pebruari 2013.

17. Pinjaman Lainnya

	31 Desember 2012 Rp
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.000.000.000
Jumlah	15.000.000.000

Pinjaman lainnya merupakan pinjaman yang diperoleh dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan plafon sebesar Rp 15.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 036/PKS/YDSM/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008.

Pinjaman tersebut disediakan untuk membiayai pengembangan usaha mikro skala rumah tangga melalui penyaluran kredit Krista. Jangka waktu pembiayaan 5 tahun dan akan jatuh tempo bulan September 2013.

Bunga pinjaman dikenakan dengan mengacu tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 bulan. Rata-rata tingkat bunga untuk periode 31 Desember 2012 sebesar 3,83%.

18. Utang kepada Rekanan

Saldo utang kepada rekanan per 31 Desember 2012 sebesar Rp 41.826.400.843 dengan rincian sebagai berikut:

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

	31 Desember 2012
	Rp
Utang Konsinyasi Persediaan Mulia	9.103.432.885
Utang Pengadaan Barang dan Jasa	6.976.853.300
Utang Klaim Asuransi	6.106.029.295
Utang Titipan Angsuran Nasabah KUMK	5.709.402.424
Utang Titipan Premi Asuransi	5.380.627.986
Utang kepada Notaris dan Institusi Hukum	5.161.636.455
Utang Angsuran Recovery	2.571.925.115
Utang Lainnya	816.493.383
Jumlah	41.826.400.843

Utang konsinyasi persediaan Mulia adalah kewajiban yang timbul kepada nasabah karena diterimanya emas Mulia milik nasabah tersebut yang dititipkan untuk dijual kembali.

Utang pengadaan barang dan jasa per 31 Desember 2012 merupakan utang pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan inventaris serta pemeliharaan dan perbaikan tetap sehubungan pembukaan Unit Pelayanan Cabang dan Unit Pelayanan Syariah baru.

Utang titipan angsuran nasabah KUMK adalah angsuran yang dibayarkan oleh nasabah KUMK kepada pegadaian tetapi belum sampai jatuh tempo waktu pembayaran angsuran kredit nasabah yang bersangkutan.

Titipan premi asuransi kepada PT Jasindo merupakan nilai premi asuransi yang telah dibayarkan oleh nasabah Kreasi dan Krista yang belum disetorkan ke PT Jasindo.

Utang kepada notaris dan institusi hukum adalah merupakan dana titipan dari nasabah Kreasi yang akan digunakan untuk pembayaran biaya pengesahan perjanjian kredit dan akta jaminan.

Utang angsuran *recovery* kredit UKM kepada PT Jasindo merupakan nilai setoran nasabah yang pinjamannya telah diklaim ke asuradur.

19. Utang kepada Nasabah

Saldo utang kepada nasabah per 31 Desember 2012 sebesar Rp 86.998.465.975 berupa uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan.

Prosedur yang dilakukan Perusahaan untuk memberitahu nasabah mengenai uang kelebihan lelang mengacu Surat Edaran Direksi Nomor 12/UI.1.00211/2006 tanggal 14 Maret 2006 adalah:

- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah tentang jadwal lelang pada saat kredit telah jatuh tempo.
- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang tidak menghadiri lelang tentang uang kelebihan lelang yang melebihi Rp 20.000 yang merupakan hak nasabah terkait.

Pengambilan uang kelebihan tersebut dengan cara menunjukkan Surat Bukti Kredit (SBK) atau bukti lain yang sah.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

20. Perpajakan

a. Utang Pajak

	31 Desember 2012
	Rp
PPh pasal 29 Badan	
Periode April s.d. Des 2012	112.375.134.250
Periode Jan s.d. Maret 2012	11.765.906.750
Pajak Penghasilan Pasal 25	49.018.219.000
Pajak Penghasilan Pasal 21	42.578.300.699
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	475.012.224
Pajak Penghasilan Pasal 23	218.910.648
PPN	44.723.063.471
Pajak Bumi dan Bangunan	16.946.498
Jumlah	261.171.493.540

b. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

	2012
	(9 Bulan)
	Rp
Beban Pajak Kini	553.539.105.250
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(34.424.551.257)
Jumlah	519.114.553.993

Taksiran laba kena pajak Perusahaan, dan pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2012 sebagai berikut:

	April - Des 2012
	Rp
Laba Konsolidasi	1.963.819.460.431
(Laba)/Rugi Entitas Anak	--
Laba Komersial	1.963.819.460.431

Beda Temporer:

- Biaya Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(9.127.784.762)
- Penyusutan Aset Tetap	550.840.042
- Beban Manfaat Karyawan	125.961.214.176
- Penyisihan Piutang Atas KPYD	2.984.368.078
- Pendapatan/Biaya yang Belum Diamortisasi - PYD	17.329.567.494
	137.698.205.028

Beda Tetap :

- Biaya Ulang Tahun RI/Pegadaian	2.011.777.950
- Estimasi Beban Jasa Produksi YMH Dibayar	40.539.200.500
- Estimasi Beban Tantiem YMH Dibayar	8.478.288.000
- Biaya Pemeliharaan Perbaikan dan Rumah Dinas	722.338.545
- Biaya Jamuan dan Representasi	1.124.093.030

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

	April - Des 2012 Rp
- Biaya Lainnya/Sumbangan	443.484.478
- Biaya Listrik, Telpon, Air Rumah	18.506.457
- Biaya Denda Pajak	61.832.889.027
- Biaya Perawatan Inventaris Rumah Jabatan	23.596.822
- Laba Penjualan Aset Tetap	(21.944.525)
- Pendapatan Jasa Giro	(1.125.724.139)
- Pendapatan Sewa Gedung	(1.407.750.443)
	<u>112.638.755.702</u>
Laba Fiskal	2.214.156.421.161
Laba Fiskal (Dibulatkan)	2.214.156.421.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan:	
- Tarif 25% x Laba Fiskal Dibulatkan	553.539.105.250
Kredit Pajak:	
- Angsuran PPh Pasal 25	(441.163.971.000)
Kurang (Lebih) Bayar PPh 29	112.375.134.250

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan laporan keuangan Perusahaan telah sesuai dengan SPT PPh Badan yang disampaikan ke kantor pajak.

c. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Mar 2012 Rp	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi (9 Bulan) Rp	31 Des 2012 Rp
Aset Pajak Tangguhan:			
Cadangan Penurunan Nilai			
Piutang Karyawan	3.420.024.176	746.092.020	4.166.116.196
Cadangan Penurunan Nilai PYD	43.909.431.930	(2.281.946.191)	41.627.485.739
Liabilitas Imbalan Kerja	39.365.484.122	31.490.303.544	70.855.787.666
Pendapatan/Biaya Unamortisasi PYD	(15.800.568.722)	4.332.391.874	(11.468.176.848)
Aset Tetap	5.907.232.711	137.710.011	6.044.942.722
	<u>76.801.604.217</u>	<u>34.424.551.257</u>	<u>111.226.155.475</u>
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	76.801.604.217	34.424.551.257	111.226.155.475

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aset pajak tangguhan dapat terpulihkan dalam tahun-tahun mendatang.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

21. Biaya yang Masih Harus Dibayar

Merupakan beban bunga, pegawai dan umum yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2012 Rp
Beban Bunga Bank dan Obligasi	80.273.798.405
Beban Pegawai	46.921.779.643
Beban Umum	56.157.430.594
Beban Administrasi	40.377.716.310
Jumlah	223.730.724.952

22. Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan pendapatan sewa gedung yang di terima di muka dan pendapatan sewa gedung yang ditangguhkan sesuai dengan umur sewa, terdiri dari:

	31 Desember 2012 Rp
a. Pendapatan Diterima di Muka	
Pendapatan Diterima di Muka	
Sewa Gedung Ditangguhkan yang Akan Diamortisasi	
Dalam Satu Tahun	1.637.488.636
Sewa Gedung Diterima di Muka	1.220.730.192
Pendapatan Marjin Mulia	9.967.175.092
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	404.116.205
Jumlah	13.229.510.125
b. Pendapatan Ditangguhkan	
Pendapatan Ditangguhkan Sewa Gedung Harco (Catatan 40)	
Pendapatan Sewa Ditangguhkan	21.150.894.890
Sewa Gedung Ditangguhkan	
yang Akan Diamortisasi Dalam Satu Tahun	(1.637.488.636)
Jumlah	19.513.406.254

23. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2012 Rp
Utang Jasa Produksi	233.117.204.917
Utang Iuran Taspen/THT, Askes	32.742.702.756
Utang Tantiem	17.796.037.000
Utang Dana Kebajikan Syariah	12.467.029.721
Utang kepada Pegawai	9.328.080.303
Utang Dana Sosial dan Dana Pendidikan	2.585.094.695
Utang Bea Lelang	1.178.904.492
Utang Dana PKBL & Titipan Angsuran Mitra Binaan PKBL	28.858.220
Utang Lainnya	346.155.776
Jumlah	309.590.067.880

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

24. Pinjaman Obligasi – Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun

	31 Desember 2012
	Rp
Nilai Nominal	
a. Obligasi X	63.500.000.000
b. Obligasi XI	500.000.000.000
c. Obligasi XII	600.000.000.000
d. Obligasi XIII	1.500.000.000.000
e. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	850.000.000.000
f. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	1.000.000.000.000
Sub Jumlah	4.513.500.000.000
Diskonto yang Belum Diamortisasi	
a. Obligasi X	(319.293.902)
b. Obligasi XI	(952.068.934)
c. Obligasi XII	(943.418.747)
d. Obligasi XIII	(1.675.169.256)
e. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	(2.091.647.539)
f. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	(933.642.820)
Sub Jumlah	(6.915.241.198)
Nilai Bersih	
a. Obligasi X	63.180.706.098
b. Obligasi XI	499.047.931.066
c. Obligasi XII	599.056.581.253
d. Obligasi XIII	1.498.324.830.744
e. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	847.908.352.461
f. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	999.066.357.180
Jumlah	4.506.584.758.802

Rating masing-masing obligasi berdasarkan penilaian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) terhadap Obligasi X, XI, XII, dan XIII adalah AA+ (*Double A; Stable Outlook*). Untuk rating Pemantauan Obligasi Tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan oleh perjanjian perwaliamanatan. Berikut adalah penjelasan rinci atas obligasi:

- a. Obligasi X Tahun 2003
 Obligasi X Tahun 2003 diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Obligasi Seri B	63.500.000.000
Jumlah	63.500.000.000

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi X Seri B Tahun 2004 sebesar Rp 63.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 15 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun untuk tahun pertama sampai ketiga dan bunga mengambang untuk tahun keempat sampai dengan tahun kelimabelas yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan ditambah premi tetap sebesar 1,00%, maksimal 15,50% dan minimal 10,50%.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi X untuk periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi IX Seri B	10,50%

Penerbitan obligasi X berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 39 tanggal 12 Mei 2003 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding liabilitas jangka pendek minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 5:1 sampai dengan 21 Juli 2008 selanjutnya maksimum 7 : 1

b. Obligasi XI Tahun 2006

Obligasi XI Tahun 2006 memiliki jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Seri A	400.000.000.000
Obligasi Seri B	100.000.000.000
Jumlah	500.000.000.000

Emisi Obligasi XI Seri A Tahun 2006 sebesar Rp 400.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat, dengan jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama sampai tahun ke sepuluh.

Emisi Obligasi XI Seri B Tahun 2006 sebesar Rp 100.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke sepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,25% per tahun, dengan batas atas sebesar 16,00% dan batas bawah 10,00%.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi XI untuk periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi XI Seri A	13,10%
Obligasi XI Seri B	10,00%

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Penerbitan obligasi XI berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 5 tanggal 10 April 2006 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding liabilitas jangka pendek minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimum 10:1

c. Obligasi XII Tahun 2007

Obligasi XII Tahun 2007 Seri A dan Seri B dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 4 September 2017 terdiri dari:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Seri A	370.000.000.000
Obligasi Seri B	230.000.000.000
Total	600.000.000.000

Obligasi XII Seri A Tahun 2007 sebesar Rp 370.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama sampai tahun ke sepuluh.

Obligasi XII Seri B Tahun 2007 sebesar Rp 230.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke sepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,00% per tahun, dengan batas atas sebesar 12,00% dan batas bawah 8,00%.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi XII untuk periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut::

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi XII Seri A	10,025%
Obligasi XII Seri B	8,00%

Penerbitan obligasi XII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 2 tanggal 4 Juli 2007 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding liabilitas jangka pendek minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

d. Obligasi XIII Tahun 2009 Seri A dengan jangka waktu 5 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2014, Seri B dengan jangka waktu 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2017 dan Seri C dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Seri A -1	350.000.000.000
Obligasi Seri A -2	100.000.000.000
Obligasi Seri B	650.000.000.000
Obligasi Seri C	400.000.000.000
Total	1.500.000.000.000

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi XIII Seri A-1 tahun 2009 sebesar Rp 350.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama sampai tahun ke lima.

Obligasi XIII Seri A-2 tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun ke lima yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 3% per tahun, dengan batas atas sebesar 13% dan batas bawah 10%.

Obligasi XIII Seri B tahun 2009 sebesar Rp 650.000.000.000 dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,650% untuk tahun pertama sampai tahun ke delapan.

Obligasi XIII Seri C tahun 2009 sebesar Rp 400.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% untuk tahun pertama sampai tahun ke sepuluh.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi XIII untuk periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Seri A -1	11,675%
Obligasi Seri A -2	10,00%
Obligasi Seri B	12,650%
Obligasi Seri C	12,875%

Penerbitan obligasi XIII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 24 tanggal 12 Juni 2009 dengan PT Bank Mega Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding liabilitas jangka pendek minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

- e. Obligasi Berkelanjutan I PT Pegadaian (Persero) tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 2.000.000.000.000 (dua triliun rupiah), dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan I PT Pegadaian (Persero) Tahap I tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), terdiri dari:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	250.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	250.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	500.000.000.000
Total	1.000.000.000.000

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri A akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2014.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri B akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2016.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000 (lima ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri C akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2021.

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	7,50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	8,00%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	9,00%

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.000.000.000.000 terdiri dari:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	150.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C	200.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D	500.000.000.000
Total	850.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B, jumlah pokok sebesar Rp 150.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2015.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C, jumlah pokok sebesar Rp 200.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2017.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D, jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2019.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Tingkat suku bunga rata-rata Obligasi Berkelanjutan I Tahap II untuk periode 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	7,25%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C	7,5%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D	7,75%

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing obligasi adalah sebagai berikut:

- Obligasi X Seri A setiap tanggal 11 Januari, 11 April, 11 Juni, dan 11 Oktober
- Obligasi X Seri B setiap tanggal 12 Maret, 12 Juni, 12 September, dan 12 Desember.
- Obligasi XI setiap tanggal 23 Pebruari, 23 Mei, 23 Agustus dan 23 Nopember.
- Obligasi XII setiap tanggal 4 Maret, 4 Juni, 4 September, dan 4 Desember.
- Obligasi XIII setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012

Rincian obligasi berdasarkan jumlah bagian yang jatuh tempo yang dibagi berdasarkan tahun jatuh tempo:

Uraian	Nilai Nominal	Tahun Jatuh Tempo
Pinjaman Obligasi yang Akan Jatuh Tempo	Rp	
Obligasi X Seri B	63.500.000.000	Tahun 2018
Obligasi XI Seri A	400.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XI Seri B	100.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XII Seri A	370.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XII Seri B	230.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII Seri A-1	350.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XIII Seri A-2	100.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XIII Seri B	650.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII Seri C	400.000.000.000	Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	250.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	250.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	500.000.000.000	Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A	150.000.000.000	Tahun 2013
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	150.000.000.000	Tahun 2015
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C	200.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D	500.000.000.000	Tahun 2019
Total	4.663.500.000.000	

Obligasi X sebanyak 60% dari sisa pokok yang terutang, dijamin dengan tagihan Perusahaan yang diberikan kepada nasabah (PYD), sedangkan obligasi XI, XII dan XIII tidak dijamin dengan aset PYD.

PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Mega, Tbk selaku wali amanat dalam rangka penerbitan obligasi di atas, tidak memiliki tagihan terhadap Perusahaan selaku kreditor.

Dalam perjanjian Perwaliamanatan dari tiap-tiap obligasi di atas tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan Perusahaan untuk membentuk dana pelunasan obligasi (*sinking fund*).

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

25. Pinjaman dari Pemerintah

	31 Desember 2012
	Rp
Pinjaman Pemerintah Pusat	410.000.000.000
Jumlah	410.000.000.000

Pinjaman Pemerintah Pusat

Pinjaman Pemerintah Pusat merupakan Surat Utang Pemerintah (SUP) sebesar Rp 410.000.000.000 untuk Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S-121/MK.06/2004 tanggal 14 April 2004 dan Perjanjian Pinjaman No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, dan diubah terakhir dengan Persetujuan Perubahan No.AMA-33/KP-019/DP3/2007 tanggal 8 Maret 2007. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2009 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pembatasan-pembatasan yang diwajibkan sehubungan dengan pinjaman yang diterima dari Pemerintah (SUP 005) sesuai Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-121/MK.06/2004 tanggal 21 April 2004 adalah:

1. Tujuan penyaluran pinjaman untuk pendanaan kredit usaha mikro dan kecil untuk usaha produktif.
2. Persyaratan tingkat bunga dan jangka waktu pinjaman kepada emiten :
 - a. Tingkat bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 3 bulan yang ditetapkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember atas dasar lelang SBI terakhir sebelum tanggal penetapan tersebut.
 - b. Bunga dihitung sejak penarikan pinjaman dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember setiap tahun.
3. Tingkat bunga KUMK dari PT Pegadaian (Persero) kepada usaha mikro dan usaha kecil setinggi-tingginya sebesar tingkat bunga pinjaman tersebut (SBI 3 bulan) ditambah 12%.
4. Risiko tunggakan penerusan pinjaman pendanaan KUMK dari BUMN pengelola kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dan risiko tunggakan penyaluran KUMK dari LKP kepada usaha mikro dan usaha kecil sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing BUMN pengelola dan LKP.
5. Persyaratan lainnya, termasuk persyaratan denda, mengikuti ketentuan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor : 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 yang telah diubah dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor: 74/KMK.06/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 serta ketentuan dalam perjanjian pinjaman pendanaan KUMK.

Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan di atas.

Rata-rata tingkat suku bunga selama tahun 2012 sebesar 5,75% per tahun. Bunga dibayar setiap tanggal 6 Maret, 9 Juni, 9 September dan 9 Desember setiap tahunnya.

26. Provisi Imbalan Kerja

	31 Desember 2012
	Rp
Liabilitas Program Pensiun	146.418.148.808
Liabilitas Program Pesangon	127.550.231.413
Liabilitas Program Cuti Besar	9.454.770.442
Jumlah	283.423.150.663

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

a. Program Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 4,75% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 11,75% dari gaji pokok karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun PT Pegadaian (Persero). Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi No. KP.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan No. Kep-336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Untuk karyawan yang terhitung mulai bekerja sejak tahun 2007 ke atas, maka pengelolaan dana pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank BNI (Persero) Tbk.

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Aset Program	547.362.385.506
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	1.027.723.801.141
Defisit Pendanaan	480.361.415.635
Liabilitas Transisi yang Belum Diakui	--
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(333.943.266.827)
Beban Pensiun yang Masih Harus Dibayar	146.418.148.808

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Saldo Awal Periode	61.495.418.954
Beban Pensiun Tahun Berjalan	105.214.137.750
Kontribusi Iuran ke Dana Pensiun	(20.291.407.896)
Saldo Akhir Periode	146.418.148.808

Beban pensiun untuk tahun 2012 (April sampai dengan Desember) adalah sebagai berikut:

	2012
	(9 Bulan)
	Rp
Beban Jasa Kini	19.167.813.038
Beban Bunga	37.758.066.155
Imbal Hasil Investasi	(39.098.163.114)
Dampak Perubahan Aktuarial yang Diakui	64.756.621.638
Dampak Perubahan Manfaat	10.930.261.034
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	11.699.538.999
Beban yang Diakui	105.214.137.750

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

b. Program Pesangon

Penyelenggaraan Program Pesangon (UP4) didasarkan pada Peraturan Direksi No.1817/Kp300323/2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK). Manfaat Pesangon berupa pembayaran jumlah *lumpsum* diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Aset Program	--
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	650.255.925.659
Defisit Pendanaan	650.255.925.659
Liabilitas Transisi yang Belum Diakui	(58.567.635.160)
Laba/Rugi Aktuarial yang Belum Diakui	(464.138.059.086)
Beban Pesangon yang Masih Harus Dibayar	127.550.231.413

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Saldo Awal Periode	86.134.479.441
Beban Pesangon Tahun Berjalan	73.980.269.052
Kontribusi Iuran ke Dana Pensiun	(32.564.517.080)
Saldo Akhir Periode	127.550.231.413

Beban pensiun untuk tahun 2012 (April sampai dengan Desember) adalah sebagai berikut:

	2012
	(9 Bulan)
	Rp
Beban Jasa Kini	40.034.931.307
Beban Bunga	19.534.803.383
Amortisasi Biaya Jasa Lalu	3.926.571.246
Peserta di bawah 50 Tahun	1.062.801.331
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	9.421.161.785
Beban yang Diakui	73.980.269.052

c. Program Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tetap.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

Liabilitas manfaat karyawan yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Aset Program	--
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	120.543.895.321
Defisit Pendanaan	120.543.895.321
Liabilitas Transisi yang Belum Diakui	(21.156.321.845)
Laba/Rugi Aktuarial yang Belum Diakui	(89.932.803.034)
Beban Cuti Besar yang Masih Harus Dibayar	9.454.770.442

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Saldo Awal Tahun	9.832.038.092
Beban Cuti Besar Tahun Berjalan	18.515.328.150
Pembayaran Cuti Besar	(18.892.595.800)
Saldo Akhir Tahun	9.454.770.442

Beban pensiun untuk tahun 2012 (April sampai dengan Desember) adalah sebagai berikut:

	2012
	(9 Bulan)
	Rp
Beban Jasa Kini	12.056.711.903
Beban Bunga	3.631.841.874
Dampak Perubahan Kuarlmen dan Penyelesaian	--
Amortisasi Akumulasi (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	1.688.805.571
Beban Amortisasi Liabilitas Transisi	1.137.968.802
Beban yang Diakui	18.515.328.150

Asumsi Aktuarial

Per 31 Desember 2012, perhitungan beban dan liabilitas aktuarial tersebut di atas merupakan pembebanan akrual dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial yang tertuang dalam laporannya masing-masing yaitu:

Keterangan	31 Desember 2012
Nomor Laporan	2256/KIS/LA/02/2013 2257/KIS/LA/02/2013 2258/KIS/LA/02/2013
Tanggal laporan	22 Pebruari 2013

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

Adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31-Des-12
Metode Perhitungan yang digunakan	Projected Unit Credit
Tingkat Bunga Diskonto	6% per tahun
Tingkat Bunga Imbal Hasil Investasi Aset Program	10% per tahun
Tingkat Kenaikan Gaji Berkala	7% per tahun
Tabel Mortalita	Tabel Mortalita Indonesia II
Usia Pensiun	56 Tahun
Jumlah Pegawai	7.881 orang

27. Ekuitas

a. Modal Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan PT Pegadaian (Persero) No.1 tanggal 1 April 2012 dengan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. bahwa penetapan Modal Disetor Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian sebesar Rp 251.252.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

	1 April 2012 Rp
Modal Saham	
Modal Dasar sebesar 1.000.000 saham masing-masing Rp 1.000.000 per saham	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar 251.252 saham	
masing-masing Rp 1.000.000 per saham	251.252.000.000
Jumlah Modal Saham	251.252.000.000

b. Saldo Laba

Saldo Laba PT Pegadaian (Persero) pada tanggal 1 April 2012 yang merupakan saldo laba eks Perum Pegadaian per tanggal 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

	1 April 2012 Rp
Saldo Laba	
Ditentukan Penggunaannya	2.348.875.803.694
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.936.352.946.393
Jumlah Saldo Laba	4.285.228.750.087

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Pertama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian tanggal 2 Mei 2012 ditetapkan bahwa penggunaan laba setelah Pajak sebagai berikut:

1. Dividen 32,50% atau sebesar Rp 479.776.468.000 merupakan dividen bagian Pemerintah Republik Indonesia.
2. Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan masing-masing 1% atau sebesar Rp 14.762.350.000.
3. Cadangan Tujuan 7,36% atau sebesar Rp 108.668.000.000.
4. Cadangan Umum sebesar Rp 858.266.118.928.

Melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor S-758/MBU/2012 perihal tambahan setoran dividen BUMN tahun buku 2011, Kementerian BUMN menetapkan dividen bagian Pemerintah menjadi sebesar Rp 579.776.468.000 atau senilai 39% dari laba tahun buku 2011.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Saldo Awal 1 April 2012	2.348.875.803.694
Penambahan:	
Cadangan Umum	758.266.118.928
Cadangan Tujuan	108.668.000.000
Jumlah Penambahan	866.934.118.928
Saldo Akhir 31 Desember 2012	3.215.809.922.622

Saldo laba yang ditentukan penggunaannya merupakan saldo laba yang berasal dari status badan hukum Perusahaan sebelumnya (Perum).

Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2012
	Rp
Saldo Awal 1 April 2012	1.936.352.946.393
Pembagian Laba Bersih:	
Dividen	(579.776.468.000)
Cadangan Umum	(758.266.118.928)
Cadangan Tujuan	(108.668.000.000)
Dana Program Kemitraan	(14.762.350.000)
Dana Bina Lingkungan	(14.762.350.000)
Sub Jumlah	(1.476.235.286.928)
Laba Periode Berjalan	1.444.704.906.438
Saldo Akhir 31 Desember 2012	1.904.822.565.903

28. Pendapatan Sewa Modal

	2012
	(9 Bulan)
	Rp
Sewa Modal Gadai KCA	
Sewa Modal Golongan A	71.722.870.842
Sewa Modal Golongan B	2.304.584.846.975
Sewa Modal Golongan C	1.589.455.595.925
Sewa Modal Golongan D	671.465.446.955
Sewa Modal Golongan E	23.045.299.611
Sub Jumlah	4.660.274.060.308
Jasa Simpan/Ijarah Gadai Syariah	
Ijarah Golongan A	3.962.921.450
Ijarah Golongan B	182.887.637.700
Ijarah Golongan C	223.212.549.324
Ijarah Golongan D	118.446.200.408
Sub Jumlah	528.509.308.882

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

	2012 (9 Bulan) Rp
Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya	
Sewa Modal Kreasi, Kremada, dan Krista	65.644.905.703
Marjin Mulia	33.859.518.580
Sewa Modal Kresna	25.406.314.595
Ijaroh Ar-Rum	11.234.501.539
Sewa Modal Gadai Efek	2.594.660
Amanah	15.751.940
Sub Jumlah	136.163.587.017
Jumlah	5.324.946.956.207

Pendapatan sewa modal yang berasal dari amortisasi biaya transaksi atas produk Kreasi, Kremada, dan Krista selama bulan April hingga Desember 2012 adalah sebesar Rp 32.521.298.109. Sedangkan untuk Kresna adalah sebesar Rp 13.351.409.286 untuk tahun 2012.

Tidak ada pendapatan sewa modal yang memiliki pihak-pihak berelasi dengan Perusahaan.

29. Pendapatan Administrasi

Merupakan pendapatan administrasi atas barang jaminan milik nasabah yang ditentukan berdasarkan golongan kredit, terdiri dari:

	2012 (9 Bulan) Rp
Usaha Gadai	
Golongan A	9.812.864.280
Golongan B	281.922.031.320
Golongan C	108.611.216.520
Golongan D	32.468.565.600
Golongan E (Krasida)	1.244.647.558
Sub Jumlah	434.059.325.278
Usaha Syariah	
Golongan A	665.802.300
Golongan B	26.156.034.000
Golongan C	14.511.938.200
Golongan D	5.625.332.600
Sub Jumlah	46.959.107.100
Pendapatan Administrasi Usaha Lain	3.863.324.713
Pendapatan Administrasi Mulia	3.324.498.845
Jumlah	488.206.255.936

Pendapatan Administrasi Usaha Lain merupakan pendapatan administrasi atas Kresna, Kreasi, Krasida, Kremada, Kredit Tunda Jual Gabah, dan Kredit Gadai Efek .

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

30. Pendapatan Usaha Lainnya

	2012 (9 Bulan) Rp
Pendapatan Jasa Pengiriman Uang (WU)	9.600.976.852
Pendapatan Unit Toko Emas	6.289.075.590
Pendapatan Langen Palikrama	2.268.900.780
Pendapatan Subrogasi dan Recovery	1.315.632.026
Pendapatan Jasa lainnya	446.882.286
Jumlah	19.921.467.534

31. Beban Bunga dan Provisi

	2012 (9 Bulan) Rp
Bunga Obligasi	351.481.406.703
Bunga Bank Mandiri	390.433.727.463
Bunga Bank Rakyat Indonesia	318.749.694.248
Bunga Bank BNI	189.390.196.305
Bunga Bank Central Asia	154.015.423.579
Bagi Hasil Syariah Mandiri	31.909.770.120
Provisi, Administrasi dan Pengelolaan Pinjaman	31.029.757.199
Bunga MTN	19.251.666.666
Bank Hasil Syariah Mandiri	17.870.654.414
Bunga SUP dan Pemerintah Daerah	17.848.101.578
Bunga Bank Permata	14.208.333.333
Bunga Pinjaman Damandiri	12.290.798.611
Bagi Hasil Bank Muamalat	482.708.544
Jumlah	1.548.962.238.763

32. Beban Pegawai

	2012 (9 Bulan) Rp
Tunjangan-Tunjangan	1.033.164.614.362
Gaji Pokok	155.469.333.296
Biaya Kesejahteraan	138.336.746.639
Biaya Dana Pensiun	131.618.428.580
Biaya Pegawai Tidak Tetap	2.977.526.995
Biaya Uang Sumbangan Perumahan	1.924.389.676
Jumlah	1.463.491.039.548

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

33. Beban Umum

	2012 (9 Bulan) Rp
Beban Pegawai Outsourcing	306.719.127.782
Beban Perjalanan Dinas	85.497.071.456
Beban Operasional Perusahaan	84.083.835.131
Beban Sewa	75.163.726.047
Beban Air, Listrik, Telepon, Internet dan Gas	32.713.429.570
Beban Pemeliharaan Bangunan	30.056.835.877
Beban Keamanan	29.328.925.350
Beban Asuransi	10.937.670.960
Beban Pemeliharaan Inventaris	7.017.440.046
Beban Sarana Menaksir	6.889.751.834
Beban Pemeliharaan Kendaraan Dinas	4.731.047.870
Beban PBB, PPh 23, PPN	2.804.530.215
Beban Umum Lainnya	3.529.731.453
Jumlah	679.473.123.591

34. Beban Administrasi Pemasaran

	(9 Bulan) Rp
Beban Promosi, Sponsor, Iklan	80.734.998.875
Beban Cetak, Alat Tulis Kantor	17.583.108.568
Beban Perlengkapan	10.947.192.429
Beban Penelitian dan Pengembangan	6.951.532.981
Beban Konsultan	5.421.359.543
Beban Muqosah Mulia	1.407.733.310
Biaya Administrasi Lain	884.199.490
Jumlah	123.930.125.196

35. Beban Penyusutan Aset Tetap

Merupakan beban penyusutan bangunan, inventaris dan kendaraan untuk periode April s.d. Desember 2012 sebesar Rp 62.966.186.917.

36. Uang Kelebihan Lewat Waktu

Merupakan uang kelebihan lewat waktu yang berasal dari kredit usaha gadai yang diperhitungkan sebagai pendapatan perusahaan untuk periode April s.d. Desember 2012 sebesar Rp 35.887.144.527.

37. Pendapatan Sewa Gedung

Merupakan pendapatan sewa atas bangunan untuk periode April s.d. Desember 2012 sebesar Rp 2.003.596.963.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Pihak-pihak yang menyewa gedung Perusahaan adalah PT Harco Indah dan perorangan atau masyarakat yang menggunakan gedung serbaguna "Langen Palikrama" serta menggunakan/menempati beberapa aset milik Perusahaan yang tersebar di beberapa daerah.

38. Pendapatan Jasa Giro

Merupakan pendapatan bunga atas rekening giro bersih setelah dikurangi pajak untuk periode April s.d. Desember 2012 sebesar Rp 1.127.898.034.

39. Pendapatan Lainnya

	2012 (9 Bulan) Rp
a. Pendapatan Lain-lain	
Pendapatan Denda Angsuran/Keterlambatan Kredit	17.988.818.619
Laba Penjualan Barang Lelang Perusahaan, Barang Jaminan yang Disisihkan dan Marhun yang Disisihkan	21.159.933.960
Kartu Nasabah Hilang	400.505.419
Pendapatan Selisih Perhitungan Kas	113.391.227
Pendapatan dari Pemulihan Kredit	11.554.920
Pendapatan Pemulihan Cadangan Kerugian Karena - Penurunan Nilai PYD	16.523.914.230
Lainnya	5.314.431.387
Sub Jumlah	61.512.549.762
b. Beban Lain-lain	
Rugi Penjualan Barang Lelang Perusahaan, Barang Jaminan yang Disisihkan dan Marhun yang Disisihkan	(2.688.123.760)
Rugi Pertukaran/Pengalihan Aset Tetap	--
Sub Jumlah	(2.688.123.760)
Jumlah	58.824.426.002

Pendapatan denda angsuran/keterlambatan kredit merupakan pendapatan yang diterima per kas dan Perusahaan tidak menetapkan kebijakan pengakuan pendapatan denda secara akrual.

Pendapatan lainnya adalah pendapatan dari bongkaran bangunan, pendapatan parkir, pendapatan sewa dan peralatan gedung pertemuan.

40. Perikatan Jangka Panjang

a. Perikatan dengan PT Harco Indah

Pada tahun 1968, Perusahaan dengan PT Harco Indah, secara bersama-sama telah menandatangani Akta Persetujuan No. 224 tanggal 30 Mei 1968 Notaris Mohamad Said Tadjoedin, S.H., akta ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perjanjian Tambahan No.178, tanggal 30 Juni 1988 dengan Notaris Buniarti Tjandra, S.H. selanjutnya dibuat "Perjanjian Build Operate and Transfer" (BOT).

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Perjanjian BOT tersebut, PT Harco Indah berkewajiban membangun, mengelola dan menyerahkan kepada Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2000, gedung yang berlokasi di Jl. Samanhudi Raya No.133, Jakarta Pusat dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan. Pada tanggal 27 Januari 1997 gedung tersebut terbakar, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diserahkan sebagaimana diatur dalam perjanjian BOT karena tidak dapat dioperasikan.

Berdasarkan pasal 2 Akta Perjanjian Tambahan No.178 tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, S.H., apabila terjadi kebakaran/huru-hara, maka PT Harco Indah wajib membangun kembali gedung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan PT Harco Indah mempunyai hak perpanjangan waktu hak guna penuh untuk jangka waktu selama gedung dilaksanakan perbaikan. PT Harco Indah wajib menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut pada Perusahaan pada tanggal 30 Nopember 2005 tanpa syarat dengan kondisi baik dan layak pakai serta sebelumnya telah diadakan pengecatan secara menyeluruh dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Pada tanggal 30 Nopember 2005 PT Harco Indah telah menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut kepada Perusahaan dengan kondisi baik, layak pakai dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Selanjutnya gedung HARCO Pasar Baru tersebut disewakan senilai Rp 32.749.772.728 (bersih setelah pajak) kepada PT Harco Indah untuk jangka waktu 20 tahun (terhitung sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 30 Nopember 2025) sesuai dengan Surat Perjanjian yang dikukuhkan dengan Akta No.6 tanggal 17 Nopember 2005, Notaris Buniarti Tjandra, S.H.

b. Perikatan dengan PT Graha Asadhana

Pada tahun 1993, Perusahaan dengan PT Graha Asadhana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No.62/UTE/IX/93 dan No.015/GA/DIR.UM/0993 tanggal 1 September 1993 tentang Pemanfaatan Tanah PT Pegadaian di Jl. Salemba Raya No.2, Jakarta Pusat untuk Perkantoran dan Pertokoan dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).

PT Graha Asadhana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Graha Asadhana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersil. Tanggal pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal 28 Pebruari 1995.

PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai kepada Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000 yang dibayar 50% pada saat ditandatangani perjanjian ini dan 50% lagi pada saat pembangunan dinyatakan selesai. Selama jangka waktu pengelolaan PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai sebesar Rp 140.000.000 pertahun kepada Perusahaan. Pembayaran tahun pertama paling lambat tiga bulan sebelum ulang tahun pertama pengoperasian komersial, sedangkan pembayaran tahunan berikutnya wajib dilunasi paling lambat setiap tiga bulan setelah ulang tahun berikutnya tanggal pengoperasian komersial. Akun yang mencatat penerimaan dari PT Graha Asadhana adalah Pendapatan Lain-lain.

PT Graha Asadhana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada perusahaan dalam keadaan terawat baik, lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung perkantoran dan pertokoan komersial.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

c. KSO Pertokoan Komersial (Cimahi)

Pada tahun 2005, Perusahaan dengan PT Tapak Sarana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No. 397/SP.100231/2005 dan No.001/TS/PGDN/BOT/ 07/05 tanggal 07 Juli 2005 tentang Pemanfaatan Tanah PT Pegadaian di Jl. Pasar Atas No.68, Cimahi, Jawa Barat untuk Pertokoan Komersial dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).

PT Tapak Sarana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Tapak Sarana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian. Selama masa pembangunan PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung dalam masa pembangunan (*construction all risk*) tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara dan bencana alam lainnya.

PT Tapak Sarana wajib membayar uang kompensasi sejumlah Rp 1.558.884.000 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Tahap pertama : 10% (sepuluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 155.888.400 dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian.
- Tahap kedua : 40% (empat puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 623.553.600 dibayarkan enam bulan setelah penandatanganan Perjanjian.
- Tahap ketiga : 50% (lima puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 779.442.000 dibayarkan lima belas bulan setelah penandatanganan Perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersial yaitu tanggal 1 April 2006 sampai dengan 31 Maret 2026. Tanggal dimulainya pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal pertama setelah masa persiapan pengoperasian komersial gedung berakhir. Selama masa pengelolaan, PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung atas nama Perusahaan tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan bencana alam lainnya dengan klausul *all risk and full covered*.

PT Tapak Sarana wajib mengelola dan memelihara gedung agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada perusahaan dalam keadaan terawat baik lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung pertokoan komersial.

Perusahaan baru menerima pembayaran uang kompensasi tahap pertama (10% atau sebesar Rp 155.888.400) dan pembangunan tersebut berdasarkan Memorandum Perusahaan No.17/UL/II/2007, tanggal 29 Januari 2007 baru mencapai sekitar 33,60%. Berdasarkan hasil pembahasan antara kedua belah pihak (PT Pegadaian (Persero) dengan PT Tapak Sarana) tanggal 22 Januari 2007 dan Surat Pernyataan PT Tapak Sarana No. 0021/Dir-Bks/01/07 tanggal 23 Januari 2007, apabila sampai dengan tanggal 14 Maret 2007 PT Tapak Sarana tidak bisa membayar kekurangan uang kompensasi, maka kontrak/PKS bersedia diputus sampai dengan waktu yang ditentukan. PT Tapak Sarana tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Berkenaan dengan kegagalan PT Tapak Sarana memenuhi kewajibannya untuk membayar kompensasi Tahap II dan III sebagaimana diuraikan di atas, Perusahaan telah mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor gugatan 52/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 27 April 2009.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat No. 52/PDT.G/2009/PN.BB tanggal 31 Agustus 2009 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

- Menyatakan bahwa PT Tapak Sarana (Tergugat) telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama (PKS) yang telah dibuat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 2.805.991.200 (dua milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Proyek Pembangunan Pertokoan komersial dengan sistem BOT dan menyerahkan kepemilikan Bangunan Pertokoan Komersial dengan sistem BOT tersebut yang telah berdiri di Cabang PT Pegadaian (Persero) Cimahi dari Tergugat kepada Penggugat.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.45/Pdt.BD/2009/PN.BB tanggal 11 September 2009.

41. Informasi Lain-Lain

- a. Pada tanggal 16 Januari 2003 nasabah yang bernama Ny. Sena Wiradjaja, melalui Kantor Pengacara Amir Indah & Partners menggugat PT Pegadaian. Gugatan perdata tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2003 dengan No. Perkara.14/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tentang Gugatan Perdata Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 20.962.500.000 ditambah bunga 2% per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan Perdata tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi terhadap 32 potong barang jaminan atas nama nasabah Ny. Sena Wiradjaja yang hilang saat terjadinya pencurian di Kantor Cabang Kebayoran Baru, pada tanggal 12-13 September 1999. Nilai taksiran barang jaminan tersebut sebesar Rp 612.789.958. Pinjaman yang Diberikan (PYD) yang dijamin oleh Barang Jaminan tersebut sudah jatuh tempo, tetapi belum ditebus oleh nasabah bersangkutan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Nomor: 14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 2 Juli 2003 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I secara renteng bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 765.897.450 (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
- Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.139/SRT.PDT.BDG2003/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2003 dan menyerahkan memori banding tanggal 17 Februari 2004 dan telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2004 No. 14/PDT.G/2003/PN/JKT.PST.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.132/PDT/2004/PT.DKI tanggal 07 Maret 2005 dengan Amar Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 02 Juli 2003. Dengan dibatalkannya putusan PN Jakarta Pusat tersebut maka PT Pegadaian pada pihak yang menang dalam perkara tersebut.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan putusan banding tersebut, Pihak Ny. Sena Widjaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT Pegadaian selaku termohon kasasi mengajukan Kontra Memori kasasi pada tanggal 6 Oktober 2005 dan berkas permohonan tersebut telah dikirim ke Mahkamah Agung RI oleh PN Jakarta Pusat dan telah diterima dengan Nomor Register 2407 K/PDT/2005 tanggal 22 Desember 2005.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2407/K/PDT/2005 j.o. No.14/PDT.G/2003/PN.Jkt.Pst yang pemberitahuannya kepada Perusahaan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2009, permohonan kasasi yang diajukan Ny. Sena Wiradjaya telah ditolak.

- b. Pada tanggal 6 Pebruari 2012 telah dilakukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Sri Giyanto, selaku Direktur CV Cipta Sarana Berlian (CSB) dan selaku kuasa dari PT Inspira Adhi Mitra atas pengadaan Diamond Selector Culti II type DSII-861 yang digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan sebanyak 2.507 unit dengan nilai pengadaan sebesar Rp 2.297.390.000. Setelah dilakukan perhitungan secara cermat dan seksama oleh Tim SPI, ditemukan dan disepakati, selisih nilai pengadaan sebesar Rp 1.670.640.000 dikurangi dengan yang sudah dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp 701.400.000 menjadi Rp 969.240.000, ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp 66.825.600, sehingga kerugian materiil sebesar Rp 1.036.065.000 dan kerugian immaterial berupa Diamond Selector yang disediakan tidak sesuai dengan kesepakatan di SPK dan PKS yang akan berdampak pada hasil pengujian barang jaminan berlian tidak akurat yang akan menurunkan rasa kepercayaan dari nasabah maupun masyarakat luas sebesar Rp 1.000.000.000, sehingga jumlah kerugian bagi Perusahaan sebesar Rp 2.036.065.000.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Tangerang No : 63/PDT.G/2012/PN.TNG tanggal 7 Juni 2012, menolak gugatan penggugat (Pegadaian) seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 541.000. Atas putusan itu penggugat (Pegadaian) mengajukan banding, pada tanggal 12 Juni 2012.

- c. Pada tanggal 8 Maret 2012 telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan (Perampokan) di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Lenteng Agung Kanwil VIII Jakarta yang mengakibatkan sejumlah Barang Jaminan Hilang dengan kerugian Perusahaan sebesar Rp 1.294.982.513 (374 potong), uang kas sebesar Rp 33.368.500, sehingga total kerugian sebesar Rp 1.328.351.013.
- d. Pada tanggal 16 Mei 2012 telah terjadi tindak pidana perampokan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Munjul Jaya yang mengakibatkan sejumlah Barang Jaminan Hilang dengan kerugian Perusahaan sebesar Rp 2.265.163.000 (1.220 potong) dan uang kas sebesar Rp 44.600.000.
- e. Pada tanggal 27 Juli 2012 telah terjadi tindak pidana perampokan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Batoh CPS Banda Aceh yang mengakibatkan sejumlah Barang Jaminan Hilang dengan kerugian Perusahaan sebesar Rp 1.993.003.500.
- f. Pada tanggal 28 Juli 2012 telah terjadi tindak pidana perampokan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Cabang Gang Suci CPP Kelapa Dua yang mengakibatkan sejumlah Barang Jaminan Hilang dengan kerugian Perusahaan sebesar Rp 499.298.212.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

42. Informasi Segmen

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:

Wilayah	Daerah Operasi	Jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Sumatera	Pulau Sumatera	3 (Tiga) Kantor Wilayah yang terdiri dari 829 Kantor Operasional
Jawa	Pulau Jawa	5 (Lima) Kantor Wilayah yang terdiri dari 2.153 Kantor Operasional
Kalimantan	Pulau Kalimantan	1 (Satu) Kantor Wilayah yang terdiri dari 368 Kantor Operasional
Bali & Nusa Tenggara	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	1 (Satu) Kantor Wilayah yang terdiri dari 445 Kantor Operasional
Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa)	Pulau Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya	2 (Dua) Kantor Wilayah yang terdiri dari 746 Kantor Operasional

Informasi segmen Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Usaha Menurut Wilayah

	2012 (9 Bulan) Rp
Sumatera	892.984.738.790
Jawa	2.691.471.184.088
Kalimantan	481.727.824.551
Bali dan Nusa Tenggara	664.058.295.490
Sulawesi, Maluku dan Papua	1.102.832.636.758
Jumlah Pendapatan Usaha	5.833.074.679.677

b. Hasil Usaha Menurut Wilayah

	2012 (9 Bulan) Rp
Sumatera	294.795.599.223
Jawa	604.607.613.169
Kalimantan	206.576.971.259
Bali dan Nusa Tenggara	300.942.600.482
Sulawesi, Maluku dan Papua	459.040.334.144
Jumlah Laba Usaha	1.865.963.118.278
Pendapatan (Beban) Lain-lain	97.856.342.153
Laba Sebelum PPh Badan	1.963.819.460.431

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

c. Aset Menurut Wilayah

	31 Desember 2012
	Rp
Sumatera	429.755.321.923
Jawa	26.842.514.843.341
Kalimantan	306.827.114.014
Bali dan Nusa Tenggara	422.264.024.326
Sulawesi, Maluku dan Papua	1.310.536.708.963
Jumlah Aset	29.311.898.012.567

d. Aset Tetap Menurut Wilayah

	31 Desember 2012
	Rp
Sumatera	95.575.875.846
Jawa	277.765.545.820
Kalimantan	54.714.053.136
Bali dan Nusa Tenggara	49.125.577.260
Sulawesi, Maluku dan Papua	71.480.211.813
Jumlah Aset Tetap	548.661.263.875

e. Beban Penyusutan Aset Tetap Menurut Wilayah

	2012
	(9 Bulan)
	Rp
Sumatera	11.666.560.115
Jawa	30.884.899.175
Kalimantan	4.966.428.655
Bali dan Nusa Tenggara	5.748.513.904
Sulawesi, Maluku dan Papua	9.699.785.068
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	62.966.186.917

f. Liabilitas Menurut Wilayah

	31 Desember 2012
	Rp
Sumatera	65.934.294.550
Jawa	23.761.471.515.822
Kalimantan	21.730.002.132
Bali & Nusa Tenggara	23.944.423.669
Sulmapa	66.933.287.869
Jumlah Liabilitas	23.940.013.524.042

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

43. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

a. Sifat Hubungan dengan Pihak - Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi	Sifat Hubungan dengan Pihak-pihak Berelasi	Sifat Transaksi
PT Balai Lelang Artha Gasia	Entitas Anak	Tidak Ada
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	Berelasi	Tidak Ada
Dana Pensiun Pegadaian	Berelasi	Setoran Dana Pensiun
PT Bank BRI (Persero) Tbk	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank BNI (Persero) Tbk	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Berelasi	Imbalan Jasa Pertanggungan
PT Askindo (Persero)	Berelasi	Imbalan Jasa Pertanggungan
Direksi dan Dewan Pengawas	Berelasi	Remunerasi
Pemerintah Pusat	Berelasi	Fasilitas Kredit Modal Kerja

b. Bank

	31 Desember 2012 Rp
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	121.920.485.630
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36.762.051.895
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.707.798.998
PT Bank Syariah Mandiri	10.751.036.262
Jumlah	190.141.372.785

c. Pinjaman Bank

	31 Desember 2012 Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.938.158.734.312
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.769.429.431.155
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.999.286.714.945
PT Bank Syariah Mandiri	346.553.611.741
Jumlah	14.053.428.492.153

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

44. Manajemen Risiko

PT Pegadaian (Persero) sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai menghadapi risiko sebagai berikut:

a. Risiko Operasional

Risiko Operasional, yaitu risiko yang disebabkan karena ketidak cukupan dan atau kurang berfungsinya proses internal, adanya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, kegagalan system,

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

bencana alam dan problem eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan, yang memiliki sub risiko sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit di Perusahaan merupakan risiko yang timbul atas pinjaman yang diberikan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, perusahaan menghadapi risiko kredit dalam hal terjadi salah taksir terhadap barang jaminan milik nasabah yang berakibat penetapan pinjaman melebihi nilai barang jaminan atau turunnya nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, apabila nasabah tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan. Jumlah maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai pinjaman yang diberikan dikarenakan kemungkinan adanya pemalsuan barang jaminan dan kecurangan yang dilakukan oleh penaksir.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kemampuan debitur/nasabah turun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.
- Turunnya nilai/kualitas barang jaminan yang diagunkan, sehingga pada saat dieksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Kredit gadai dijamin oleh *collateral* berupa barang yang dikuasai oleh Pegadaian.
- Komposisi barang yang dijaminkan sebesar 90% berupa emas, berlian sedangkan sisanya berupa jaminan non-emas (eletronik, kendaraan bermotor, kain, gerabah dan lain-lain)
- PT Pegadaian (Persero) mempunyai hak eksekusi atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya

Eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2012
	Rp
ASET	
Kas dan Bank	647.155.058.012
Pinjaman yang Diberikan	26.387.345.711.299
Piutang Lainnya	34.665.556.643
Piutang Pihak Berelasi	5.282.141.029
	27.074.448.466.983

Pada PT Pegadaian (Persero) tidak terdapat konsentrasi kredit yang signifikan.

2. Risiko Barang Jaminan

Perusahaan dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai barang jaminan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut Perusahaan berkewajiban untuk menyimpan dan memeliharanya sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan perusahaan menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

3. Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko yang dihadapi Perusahaan sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional Perusahaan sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan. Termasuk dalam risiko operasional ini adalah yang berdampak pada kehilangan peluang untuk menyalurkan kredit. Risiko Operasional juga mencakup kualitas sumber daya manusia terutama juru taksir sebagai ujung tombak dalam operasional Perusahaan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

b. Risiko Bisnis

Risiko Bisnis, yaitu risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek Perusahaan untuk berhasil dalam pasar yang terus berubah.

1. Risiko Persaingan

Persaingan bisnis kini semakin ketat. Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, saling berlomba mengucurkan kredit kepada masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan. Keunggulan tersebut menyangkut keunggulan dalam bidang produk, harga, saluran distribusi maupun pelayanan. Jenis produk yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan dengan berbagai kemudahan yang diberikan dalam memperoleh kreditnya, sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar perusahaan. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000 akan meningkatkan persaingan.

2. Risiko Teknologi

Merupakan resiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu yang sulit dideteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksir Pegadaian. Di sisi lain apabila perusahaan ingin terus mengikuti perkembangan teknologi diperlukan biaya investasi yang sangat besar.

c. Risiko Hukum

Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul sebagai akibat lemahnya aspek yuridis yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tiadanya undang undang yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti syarat sahnya suatu pengikatan jaminan yang diagunkan debitur, memiliki sub risiko sebagai berikut :

Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat kegiatan usaha Perusahaan berhubungan dengan kepentingan umum, maka biasanya Pemerintah senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi perusahaan apabila berpengaruh pada adanya perubahan atau penyesuaian dalam kegiatan operasional, salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000.

d. Risiko Pasar

Risiko Pasar, yaitu risiko yang disebabkan oleh terjadinya pergerakan variabel pasar, seperti pergerakan nilai agunan terutama pergerakan harga emas dan gejolak pasar yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga pinjaman, memiliki sub risiko sebagai berikut:

Risiko Pendanaan

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perusahaan menghadapi kemungkinan risiko yang terkait dengan pendanaan, yaitu kemungkinan Perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek. Hal itu dapat disebabkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat bunga di pasar, dan terkait dengan struktur permodalan, sehingga kemampuan Perusahaan untuk memberikan pinjaman menjadi berkurang. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Perusahaan.

Risiko Pendanaan terdiri dari :

a. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Adalah kemungkinan PT Pegadaian (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

- Kreditur secara bersama menarik atau tidak memperpanjang pinjaman jangka pendeknya.
- Belum adanya kreditur pengganti.
- Kinerja keuangan menurun sehingga kepercayaan investor juga menurun.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- *Current Ratio* Pegadaian 152,50%, dimana 2,20% dari total aset merupakan kas dan setara kas sedangkan 90,02% merupakan *outstanding* pinjaman dengan jangka waktu kredit (*cash collection*) 4 bulan, sedangkan sebagian besar utang berjangka waktu kurang dari 1 tahun.
- Kinerja keuangan Pegadaian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan, sekalipun dalam kondisi krisis seperti yang terjadi di tahun 1998-1999.
- Terkait dengan kinerja keuangan yang baik, kepercayaan investor semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penilaian Pefindo untuk Obligasi PT Pegadaian (Persero) mendapat rating AA+ (*double A plus; stable outlook*) klasifikasi *investment grade*.
- Telah dilakukannya portofolio sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari 6 (enam) kreditur perbankan.

b. Risiko Suku Bunga

Adalah risiko yang terjadi karena fluktuasi tingkat suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan *cost of fund* maupun penurunan laba. Di samping itu, naiknya tingkat suku bunga sumber pendanaan Perusahaan, tidak dapat langsung diberlakukan kepada nasabah yang masih memiliki pinjaman sehingga mengurangi kemampuan Perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- a. Kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.
- b. Kenaikkan *lending rate* tidak dapat segera diberlakukan dengan pertimbangan daya beli masyarakat menurun (inflasi sangat tinggi).

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Besarnya suku bunga efektif sebagai berikut :

	Tingkat Suku Bunga Efektif %
Aset	
Kas dan Bank	0.00 - 1.50
Pinjaman Yang Diberikan (Tenor 4 Bulan)	6.00 – 9.20
Piutang Lainnya	Non Bearing Interest
Liabilitas	
Pinjaman Bank	7.70 – 9.00
Pinjaman Obligasi	6.60 – 13.10
Pinjaman dari Pemerintah	4.67 – 5.75

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan:

1. Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan *lending rate* sepenuhnya berada di bawah kontrol Manajemen.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
 Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
 (Dalam Rupiah Penuh)

2. Penundaan kenaikan *lending rate* dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan.

	31 Desember 2012					
	Suku Bunga Mengambang / Suku Bunga Tetap					
	Mengambang		Tetap		Tidak Dikenakan Bunga	Jumlah
	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih Dari Satu Tahun	Kurang Dari Satu Tahun	Lebih Dari Satu Tahun		
Aset :						
Kas dan Bank	204.312.981.623	--	--	--	442.842.076.389	647.155.058.012
Pinjaman Yang Diberikan	--	--	23.057.566.281.910	3.329.779.429.389	--	26.387.345.711.299
Piutang Lainnya	--	--	--	--	--	--
Piutang Pihak Berelasi	--	--	--	--	--	--
Jumlah Aset Keuangan	204.312.981.623	--	23.057.566.281.910	3.329.779.429.389	442.842.076.389	27.034.500.769.311
Liabilitas :						
Pinjaman Bank	--	--	--	--	--	--
Pinjaman Obligasi	--	492.532.006.202	149.962.626.747	4.014.052.752.599	--	4.656.547.385.548
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	--	--	--	--	15.000.000.000
Utang Kepada Rekanan	--	--	--	--	41.826.400.843	41.826.400.843
Utang Kepada Nasabah	--	--	--	--	86.998.465.975	86.998.465.975
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	--	--	--	--	309.590.067.880	309.590.067.880
Pinjaman dari Pemerintah	--	--	--	--	--	--
Pusat dan Daerah	--	--	--	410.000.000.000	--	410.000.000.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	15.000.000.000	492.532.006.202	149.962.626.747	4.424.052.752.599	438.414.934.698	5.519.962.320.246

c. **Risiko Permodalan**

Adalah risiko yang muncul terkait dengan struktur permodalan atau rasio antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko *financial leverage*.

Risiko ini muncul apabila terjadi:

- Aktivitas operasional berfluktuasi sehingga pendapatan yang diterima berfluktuasi.
- Meningkatnya *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas.
- Rendahnya *retained earning* dibanding ekspansi usaha.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Pertumbuhan usaha dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 34,47% per tahun.
- Mengingat utang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, maka biaya bunga yang timbul berbanding lurus dengan pendapatan perusahaan.

e. **Risiko Reputasi**

Risiko Reputasi, yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan, atau adanya persepsi negatif terhadap perusahaan, memiliki sub risiko sebagai berikut :

Risiko Keamanan

Resiko keamanan merupakan resiko perusahaan yang dihadapi sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang/tidak kondusif yang ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminal dengan berbagai modus operandi, di mana Pegadaian menjadi salah satu sasaran kejahatan/perampokan.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi risiko :

- Melakukan peningkatan standar kualitas barang yang dijaminkan.
- Mencari alternatif-alternatif pendanaan yang mempunyai *cost of fund* yang lebih murah dan pencarian modal kerja dari berbagai sumber dengan berbagai jangka waktu yang sebagian besar lebih lama dari jangka waktu piutang.
- Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan, sehingga tercipta tenaga kerja yang profesional, yang dapat menunjang operasi perusahaan secara optimal.
- Melakukan restrukturisasi cabang-cabang.
- Membangun *corporate culture* dan *corporate image* melalui pencanangan dan sosialisasi terus berbakti untuk negeri.
- Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah dan seluruh aset Perusahaan.
- Mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi).
- Menempatkan aparat keamanan (TNI dan atau Kepolisian) di Cabang PT Pegadaian dan meningkatkan system penyimpanan barang jaminan, antara lain: pemasangan alarm, penggunaan CCTV, teralis dan penempatan brankas/k Luis.
- Membangun kerjasama penanganan keamanan untuk daerah yang tergabung (cluster) sehingga lebih efisien.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan:

	31 Desember 2012	
	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp
ASET		
Kas dan Bank	647.155.058.012	647.155.058.012
Pinjaman Yang Diberikan	26.553.855.654.256	26.387.345.711.299
Piutang Lainnya	34.665.556.643	34.665.556.643
Piutang Pihak Berelasi	5.282.141.029	5.282.141.029
LIABILITAS		
Pinjaman Bank	17.378.982.918.261	17.378.982.918.261
Pinjaman Obligasi	4.663.500.000.000	4.656.547.385.549
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	15.000.000.000
Pinjaman Pemerintah Pusat	410.000.000.000	410.000.000.000
Utang Kepada Nasabah	86.998.465.975	86.998.465.975

Metode dan asumsi untuk estimasi nilai wajar adalah untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun, atas nilai wajar tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai tercatatnya. Namun untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya, karena mempunyai jangka waktu yang kurang dari 5 tahun dan dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif baik untuk perhitungan *amortized cost* maupun perhitungan penurunan nilai *discounted cash flow*, sehingga nilai wajar (sama dengan *discounted cash flow*) yang merupakan nilai tercatat dikurangi dengan penurunan nilai.

Manajemen Permodalan

Perusahaan adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham-saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa keuangan, untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia serta usaha lain yang menguntungkan sehingga dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan UU PT No. 40 tahun 2007.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

Untuk menjalankan kegiatan usaha dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan modal dilaksanakan dengan mencadangkan atau menahan sebagian laba untuk pemupukan modal. Penambahan modal dari eksternal sesuai dengan ketentuan yang ada untuk saat ini tidak dimungkinkan. Komponen modal entitas adalah berupa Penyertaan Modal Pemerintah dan Saldo Laba, dimana Saldo Laba terbagi atas cadangan umum untuk modal kerja dan cadangan tujuan untuk investasi.

Kebijakan dividen/pembagian laba dilakukan setiap akhir periode setelah mendapatkan Persetujuan Laporan Tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laba dibagi dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut dividen, cadangan tujuan, cadangan umum, program kemitraan dan bina lingkungan.

45. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

1. Sesuai dengan Surat PT Bank Mandiri No.TOP.CRO/CLA.42/ADD/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Addendum VIII atas Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : KP-CRO/016/PK-KMK/2008 bahwa limit fasilitas Rp 5.500.000.000.000 diperpanjang terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2013 sampai dengan 20 Pebruari 2014.
2. Sesuai dengan Surat PT Bank Mandiri No. TOP.CRO/CLA.40/ADD/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Addendum I atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO-KP/050/KMK/12 bahwa limit fasilitas Rp 300.000.000.000 diperpanjang terhitung 21 Pebruari 2013 sampai dengan 20 Pebruari 2014.
3. Sesuai dengan Surat PT Bank Mandiri No. TOP.CRO/CLA.41/ADD/2013 tanggal 19 Pebruari 2013 perihal Addendum II atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : CRO-KP/206/PK-KMK/2011 bahwa limit fasilitas Rp 1.200.000.000.000 diperpanjang terhitung 21 Pebruari 2013 sampai dengan 20 Pebruari 2014.
4. Sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 13 tanggal 14 Januari 2013 perihal fasilitas dengan plafon Rp 2.600.000.000.000 dengan bunga 8,5% p.a. diperpanjang selama duabelas bulan sejak jatuh tempo atau terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 14 Januari 2014.
5. Sesuai dengan Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (4) 08 tanggal 14 Januari 2013 perihal fasilitas dengan plafon Rp 400.000.000.000 diperpanjang selama duabelas bulan sejak jatuh tempo atau terhitung sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan 14 Januari 2014.
6. Terkait dengan pengadaan Diamond Selector Culti II type DSII-861, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 76/PDT/2012/PTBTN tanggal 29 Januari 2013, menolak permohonan banding penggugat (Pegadaian). Atas putusan tersebut, penggugat (Pegadaian) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai saat ini, masih dalam proses Kasasi dan putusan pengadilan belum keluar.
7. Pada tanggal 4 Pebruari 2013 telah terjadi tindak pidana perampokan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Pasar Merdeka yang mengakibatkan sejumlah Barang Jaminan hilang dengan kerugian Perusahaan sebesar Rp 6.351.901.905 (62 potong), Mulia yang belum diambil Nasabah Rp 190.308.465 (23 keping), Jasa Titipan 8 (delapan) nasabah dan uang kas sebesar Rp 13.174.900.
8. Pada tanggal 25 Pebruari 2013 telah terjadi tindak pidana perampokan di PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Sariasih Cabang Syariah Padasuka yang mengakibatkan sejumlah Barang Jaminan hilang dengan kerugian Perusahaan sebesar Rp 1.934.060.000 (496 potong), Barang Jaminan Mulia 10 Keping senilai Rp 39.942.500 dan uang kas sebesar Rp 62.000.000.

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah Penuh)

46. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan isi dari laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi untuk terbit tanggal 27 Pebruari 2013.

Lampiran I – 1/2

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK (sebelumnya PERUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK*) LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Per 31 Desember 2012, 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	31 Desember 2012 Rp	31 Maret 2012 *) Rp	31 Desember 2011 *) Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	647.155.058.012	380.879.986.327	459.112.641.756
Pinjaman Yang Diberikan <i>(Setelah Dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per 31 Desember 2012, 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 166.509.942.957, Rp 175.637.727.719 dan Rp 188.357.885.191)</i>	26.387.345.711.299	25.481.741.512.234	23.576.329.886.425
Piutang Lainnya	34.665.556.643	14.529.399.596	16.323.935.747
Persediaan	30.794.362.329	13.361.076.126	30.602.405.764
Uang Muka	70.604.560.739	215.485.626.790	192.266.904.748
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1.236.656.434.238	1.246.049.846.397	1.178.524.120.608
Beban Dibayar di Muka	141.680.195.907	118.625.725.472	107.718.647.818
Jumlah Aset Lancar	28.548.901.879.167	27.470.673.172.942	25.560.878.542.866
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Kepada Pihak-Pihak Berelasi <i>(Setelah Dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai per 31 Desember 2012, 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 16.664.464.783, Rp 13.729.554.930 dan Rp 15.169.617.078)</i>	5.282.141.029	7.128.344.666	2.817.905.157
Aset Pajak Tanguhan	111.226.155.475	76.801.604.217	71.489.266.676
Aset Tetap <i>(Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2012, 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 594.217.623.838, Rp 532.467.052.692 dan Rp 513.511.288.137)</i>	548.661.263.875	517.856.064.328	518.807.998.150
Aset Lain-lain	97.826.573.021	90.805.642.662	65.359.243.735
Jumlah Aset Tidak Lancar	762.996.133.400	692.591.655.873	658.474.413.718
JUMLAH ASET	29.311.898.012.567	28.163.264.828.815	26.219.352.956.584

*) Sejak 31 Maret 2012 Perum Pegadaian ditutup dan sejak 1 April 2012 PT Pegadaian (Persero) dibuka

Lampiran I – 2/2

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK (sebelumnya PERUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK*) LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2012, 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	31 Desember 2012 Rp	31 Maret 2012 *) Rp	31 Desember 2011 *) Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman Bank	17.378.982.918.261	16.913.173.190.751	16.593.817.334.410
Pinjaman <i>Medium Term Notes</i> yang Akan Jatuh Tempo			
Dalam Waktu Satu Tahun	240.000.000.000	425.000.000.000	425.000.000.000
Pinjaman Obligasi yang Akan Jatuh Tempo			
Dalam Waktu Satu Tahun	149.962.626.747	--	--
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Utang Kepada Rekanan	41.826.400.843	31.342.681.921	31.919.876.762
Utang Kepada Nasabah	86.998.465.975	73.568.695.483	73.195.333.640
Utang Pajak	261.171.493.540	153.114.554.705	157.467.592.967
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	223.730.724.952	261.555.204.316	136.676.934.568
Pendapatan Diterima di Muka	13.229.510.125	14.011.565.450	13.373.077.774
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	309.590.067.880	256.649.219.478	242.938.096.873
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>18.720.492.208.323</u>	<u>18.143.415.112.104</u>	<u>17.689.388.246.994</u>
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman <i>Medium Term Notes</i> - Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	--	240.000.000.000	240.000.000.000
Pinjaman Obligasi - Setelah Dikurangi Bagian yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	4.506.584.758.802	4.655.165.507.407	3.655.959.648.985
Pinjaman Dari Pemerintah:			
Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000
Pendapatan Ditangguhkan	19.513.406.254	20.741.522.731	21.150.894.890
Liabilitas Imbalan Kerja	283.423.150.663	157.461.936.487	126.491.075.093
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<u>5.219.521.315.719</u>	<u>5.483.368.966.625</u>	<u>4.453.601.618.968</u>
Jumlah Liabilitas	<u>23.940.013.524.042</u>	<u>23.626.784.078.729</u>	<u>22.142.989.865.962</u>
EKUITAS			
Modal Awal	--	205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah	--	46.252.000.000	46.252.000.000
Modal Disetor			
Modal Dasar sebesar 1.000.000 saham masing-masing Rp 1.000.000 per saham			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar 251.252 saham masing-masing Rp 1.000.000 per saham	251.252.000.000	--	--
Saldo Laba:			
- Ditentukan Penggunaannya	3.215.809.922.622	2.348.875.803.694	2.348.875.803.694
- Belum Ditentukan Penggunaannya	1.904.822.565.903	1.936.352.946.392	1.476.235.286.928
Jumlah Ekuitas	<u>5.371.884.488.525</u>	<u>4.536.480.750.086</u>	<u>4.076.363.090.622</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>29.311.898.012.567</u>	<u>28.163.264.828.815</u>	<u>26.219.352.956.584</u>

*) Sejak 31 Maret 2012 Perum Pegadaian ditutup dan sejak 1 April 2012 PT Pegadaian (Persero) dibuka

Lampiran II

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK (sebelumnya PERUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK*) LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012, Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	2012 (9 Bulan) Rp	2012 *) (3 Bulan) Rp	2011 *) (12 Bulan) Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Sewa Modal	5.324.946.956.207	1.710.786.204.358	5.953.201.577.601
Pendapatan Administrasi	488.206.255.936	175.429.748.505	630.828.567.188
	<u>5.813.153.212.143</u>	<u>1.886.215.952.863</u>	<u>6.584.030.144.789</u>
Pendapatan Usaha Lainnya:			
Pendapatan Lainnya	19.921.467.534	5.278.911.168	16.897.821.697
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>5.833.074.679.677</u>	<u>1.891.494.864.031</u>	<u>6.600.927.966.486</u>
BEBAN USAHA			
Bunga dan Provisi	1.548.962.238.763	523.602.263.319	1.842.906.719.748
Pegawai	1.463.491.039.548	506.188.570.958	1.676.190.649.312
Umum	679.473.123.591	37.455.509.067	127.303.764.675
Administrasi Pemasaran	123.930.125.196	198.652.638.177	747.373.934.587
Penyusutan Aset Tetap	62.966.186.917	21.787.440.659	89.569.819.086
Direksi dan Komisaris	33.529.998.985	8.378.211.557	25.770.610.861
Amortisasi dan Penyisihan Piutang	31.538.000.925	3.149.318.291	28.616.973.143
Pendidikan dan Pelatihan	23.220.847.474	544.116.436	136.536.263.199
Jumlah Beban Usaha	<u>3.967.111.561.399</u>	<u>1.299.758.068.464</u>	<u>4.674.268.734.611</u>
LABA USAHA	<u>1.865.963.118.278</u>	<u>591.736.795.567</u>	<u>1.926.659.231.875</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Uang Kelebihan Lewat Waktu	35.887.144.527	5.243.825.007	29.037.602.814
Pendapatan Sewa Gedung	2.003.596.963	459.711.229	2.410.187.388
Pendapatan Jasa Giro	1.127.898.034	381.837.669	1.458.977.205
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap	13.276.627	--	179.520.506
Pendapatan Lainnya	61.512.549.762	15.887.440.642	44.388.777.493
Beban Lain-lain	(2.688.123.760)	(83.724.440)	(1.882.706.567)
Jumlah Pendapatan Lain-lain	<u>97.856.342.153</u>	<u>21.889.090.107</u>	<u>75.592.358.839</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN	<u>1.963.819.460.431</u>	<u>613.625.885.674</u>	<u>2.002.251.590.714</u>
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	553.539.105.250	158.820.563.750	563.019.130.000
Tangguhan	(34.424.551.257)	(5.312.337.541)	(37.002.826.214)
Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	<u>519.114.553.993</u>	<u>153.508.226.209</u>	<u>526.016.303.786</u>
LABA PERIODE BERJALAN	<u>1.444.704.906.438</u>	<u>460.117.659.465</u>	<u>1.476.235.286.928</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	<u>1.444.704.906.438</u>	<u>460.117.659.465</u>	<u>1.476.235.286.928</u>
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	<u>1.444.704.906.438</u>	<u>460.117.659.465</u>	<u>1.476.235.286.928</u>

*) Sejak 31 Maret 2012 Perum Pegadaian ditutup dan sejak 1 April 2012 PT Pegadaian (Persero) dibuka

Lampiran III

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK (sebelumnya PERUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK*) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012, Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	Modal Awal	Penyertaan Modal Pemerintah	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
	Rp	Rp	Ditentukan Penggunaannya Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2010 *)	205.000.000.000	46.252.000.000	1.865.162.562.133	1.179.788.385.692	3.296.202.947.825
Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan					
Pembagian Dividen	--	--	--	(648.883.612.131)	(648.883.612.131)
Dana Program Kemitraan	--	--	--	(23.595.766.000)	(23.595.766.000)
Dana Bina Lingkungan	--	--	--	(23.595.766.000)	(23.595.766.000)
Cadangan Umum	--	--	398.018.241.561	(398.018.241.561)	--
Cadangan Tujuan	--	--	85.695.000.000	(85.695.000.000)	--
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	--	--	483.713.241.561	(1.179.788.385.692)	(696.075.144.131)
Laba Bersih Tahun 2011	--	--	--	1.476.235.286.928	1.476.235.286.928
Saldo per 31 Desember 2011 *)	205.000.000.000	46.252.000.000	2.348.875.803.694	1.476.235.286.928	4.076.363.090.622
Laba Bersih Periode Berjalan (3 Bulan)	--	--	--	460.117.659.465	460.117.659.465
Saldo per 31 Maret 2012 *)	205.000.000.000	46.252.000.000	2.348.875.803.694	1.936.352.946.393	4.536.480.750.087
	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
	Rp	Rp	Ditentukan Penggunaannya Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya Rp	Rp
Saldo per 1 April 2012 *)	251.252.000.000	--	2.348.875.803.694	1.936.352.946.393	4.536.480.750.087
Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan					
Pembagian Dividen	--	--	--	(579.776.468.000)	(579.776.468.000)
Dana Program Kemitraan	--	--	--	(14.762.350.000)	(14.762.350.000)
Dana Bina Lingkungan	--	--	--	(14.762.350.000)	(14.762.350.000)
Cadangan Umum	--	--	758.266.118.928	(758.266.118.928)	--
Cadangan Tujuan	--	--	108.668.000.000	(108.668.000.000)	--
Jumlah Penggunaan Dana Selama Periode Berjalan	--	--	866.934.118.928	(1.476.235.286.928)	(609.301.168.000)
Laba Bersih Periode Berjalan (9 Bulan)	--	--	--	1.444.704.906.438	1.444.704.906.438
Saldo Per 31 Desember 2012	251.252.000.000	--	3.215.809.922.622	1.904.822.565.903	5.371.884.488.525

*) Sejak 31 Maret 2012 Perum Pegadaian ditutup dan sejak 1 April 2012 PT Pegadaian (Persero) dibuka

Lampiran IV – 1/2

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK (sebelumnya PERUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK*) LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012, Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	2012 (9 Bulan) Rp	2012 *) (3 Bulan) Rp	2011 *) (12 Bulan) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari:			
Penerimaan Sewa Modal	5.142.234.662.791	1.646.241.430.053	5.672.591.823.879
Pendapatan Administrasi	488.557.854.665	175.541.228.946	631.147.524.106
Pendapatan Usaha Lain	30.634.415.298	--	--
Pendapatan Lainnya	183.214.874.859	10.706.589.942	41.098.707.417
Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan	74.729.144.455.807	22.677.007.527.588	75.772.471.071.015
Pelunasan dari Piutang Lainnya	685.105.337.757	30.323.978.922	226.885.529.906
Penjualan Barang Lelang Perusahaan dan Aset Yang Disisihkan	1.985.938.724.452	143.783.838.149	515.834.669.467
Penerimaan Utang Nasabah	386.053.774.723	146.077.387.199	613.946.550.851
Penerimaan Utang Pajak	182.211.958.756	--	164.862.269.742
Penerimaan Utang Lainnya	241.749.000.122	7.626.864.560	316.046.941.617
Penjualan Mulia	33.303.924.819	--	--
Penerimaan Kembali Uang Muka	60.297.736.609	--	--
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Operasi	<u>84.148.446.720.658</u>	<u>24.837.308.845.359</u>	<u>83.954.885.088.000</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
Pembayaran Bunga Bank dan Obligasi	(1.542.161.389.422)	(491.549.548.373)	(1.825.199.654.195)
Beban Pegawai	(1.256.304.663.001)	(341.441.965.875)	(1.523.574.486.042)
Beban Umum	(686.914.016.776)	(177.880.750.783)	(1.013.724.772.503)
Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan	(77.249.227.835.976)	(24.616.429.902.152)	(81.737.886.099.732)
Pembayaran Utang Kepada Rekanan	(41.336.640.371)	(358.266.834.387)	(58.714.889.739)
Pembayaran Utang Kepada Nasabah	(51.313.243.545)	(15.313.722.761)	(75.990.175.911)
Pembayaran Utang Pajak	(679.525.438.293)	(138.400.579.562)	(670.924.552.805)
Pembayaran Utang Lainnya	(351.076.762.034)	(37.019.452.535)	(527.758.704.032)
Pemberian Piutang	(715.041.956.654)	(29.439.788.849)	(326.307.742.449)
Pembayaran Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	(157.722.834.350)	--	--
Pembelian Persediaan	(620.422.143.018)	--	--
Pembelian Mulia	(22.472.020.085)	--	--
Jumlah Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Operasi	<u>(83.373.518.943.525)</u>	<u>(26.205.742.545.277)</u>	<u>(87.760.081.077.408)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>774.927.777.133</u>	<u>(1.368.433.699.918)</u>	<u>(3.805.195.989.408)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Kas dari:			
Penjualan Aset Tetap	22.482.698	--	193.785.300
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Investasi	<u>22.482.698</u>	<u>--</u>	<u>193.785.300</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
Pembelian Aset Tetap	(90.183.747.657)	(29.154.811.852)	(98.715.548.475)
Jumlah Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Investasi	<u>(90.183.747.657)</u>	<u>(29.154.811.852)</u>	<u>(98.715.548.475)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	<u>(90.161.264.959)</u>	<u>(29.154.811.852)</u>	<u>(98.521.763.175)</u>

*) Sejak 31 Maret 2012 Perum Pegadaian ditutup dan sejak 1 April 2012 PT Pegadaian (Persero) dibuka

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010**

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERUM PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2011 DAN 2010**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Nama | : | Suwhono |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) | : | Jl. Masjid V No. 6 Rt 005 Rw 005
Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat |
| Nomor Telepon | : | (021) 3901461 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| | | |
| 2. Nama | : | Budyanto |
| Alamat Kantor | : | Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta |
| Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain) | : | Jl. Cipinang Jaya II No.48 RT.005 RW.007
Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta |
| Nomor Telepon | : | (021) 31924711 |
| Jabatan | : | Direktur Keuangan |

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Maret 2012

Direktur Utama, Direktur Keuangan,




Suwhono **Budyanto**

PERUM Pegadaian – Kantor Pusat

Jl. Kramat Raya 162, Jakarta – 10430, Kotak Pos 1090, Tel.315-5550 (Hunting) Fax.391-4221; 324-067
Telex : 61162, e-mail : sp@pegadaian.co.id, web site : www.pegadaian.co.id

Nomor : R/112.AGA/sat.2/2012

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ABDA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi
Perusahaan Umum Pegadaian

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian Perusahaan Umum Pegadaian ("Perusahaan") dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

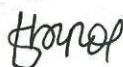
Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Pegadaian dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011, baik secara prospektif maupun retrospektif.

RSM! AAJ Associates

Laporan keuangan konsolidasian terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan usahanya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti diuraikan dalam Catatan 38.b, pada tanggal 13 Desember 2011 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Penyusunan Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan usulan tanggal pendirian Perseroan, usulan tanggal penutupan laporan posisi keuangan (neraca) Perum, tanggal pembukaan laporan posisi keuangan (neraca) Perseroan masih dalam proses. Laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup dampak yang berasal dari hal tersebut.



Saptoto Agustomo

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 27 Maret 2012

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2011 dan 2010**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2011 Rp	2010 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	2.e, 3	459.112.641.756	357.072.324.281
Pinjaman Yang Diberikan (setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 188.357.885.191 dan Rp 116.897.785.539)	2.f, 2.n, 4	23.576.329.886.425	18.079.061.031.676
Piutang Lainnya	5	16.323.935.747	13.619.865.553
Persediaan	2.h, 6	30.602.405.764	48.904.163.073
Uang Muka	7	192.266.904.748	124.505.128.860
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.o, 8	1.178.524.120.608	901.745.339.556
Beban Dibayar di Muka	2.o, 9	84.061.299.664	57.480.462.884
Pajak Dibayar di Muka	2.p, 19.a	--	39.396.710.924
Jumlah Aset Lancar		25.537.221.194.712	19.621.785.026.807
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Kepada Pihak-Pihak Berelasi (Setelah Dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 15.169.617.078 dan Rp 12.684.002.656)	2.d, 10	2.817.905.157	1.082.227.864
Aset Pajak Tangguhan	2.p, 19.d	71.489.266.676	34.486.440.460
Aset Tetap (Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 513.511.288.137 dan Rp 427.301.649.542)	2.i, 11	518.807.998.150	508.413.736.219
Aset Lain-lain	2.j, 2.k, 2.l, 12	89.016.591.889	117.275.411.376
Jumlah Aset Tidak Lancar		682.131.761.872	661.257.815.919
JUMLAH ASET		26.219.352.956.584	20.283.042.842.726

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Per 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2011 Rp	2010 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS LANCAR			
Pinjaman Bank	13	16.593.817.334.410	13.070.484.120.221
Pinjaman <i>Medium Term Notes</i> yang akan jatuh tempo			
Dalam Waktu Satu Tahun	14	425.000.000.000	--
Pinjaman Obligasi Yang Akan Jatuh Tempo			
Dalam Waktu Satu Tahun	15	--	336.139.920.968
Pinjaman Lainnya	16	15.000.000.000	15.000.000.000
Utang Kepada Rekanan	17	31.919.876.762	29.163.829.278
Utang Kepada Nasabah	18	73.195.333.640	64.454.806.979
Utang Pajak	2.p, 2.q, 19.b	157.467.592.967	89.327.407.847
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	20	136.676.934.568	75.253.902.705
Pendapatan Diterima di Muka	21.a	13.373.077.774	5.160.963.403
Utang Lancar Lainnya	23	242.938.096.873	160.174.831.848
Jumlah Liabilitas Lancar		17.689.388.246.994	13.845.159.783.249
LIABILITAS TIDAK LANCAR			
Pinjaman Obligasi - Setelah Dikurangi Bagian			
Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	15	3.655.959.648.985	2.657.440.706.486
Pinjaman <i>Medium Term Notes</i> - Setelah Dikurangi Bagian	14	240.000.000.000	--
Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun			
Pinjaman dari Pemerintah:			
Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	22	410.000.000.000	410.000.000.000
Pendapatan Ditangguhkan	21.b	21.150.894.890	22.788.383.526
Liabilitas Imbalan Kerja	2.m, 24	126.491.075.093	51.451.021.640
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar		4.453.601.618.968	3.141.680.111.652
Jumlah Liabilitas		22.142.989.865.962	16.986.839.894.901
EKUITAS			
Modal Awal	25	205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah		46.252.000.000	46.252.000.000
Saldo Laba:			
- Ditentukan Penggunaannya	25.a	2.348.875.803.694	1.865.162.562.133
- Belum Ditentukan Penggunaannya	25.b	1.476.235.286.928	1.179.788.385.692
Jumlah Ekuitas		4.076.363.090.622	3.296.202.947.825
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		26.219.352.956.584	20.283.042.842.726

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2011 Rp	2010 Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Sewa Modal	2.o, 26	5.953.201.577.601	4.887.100.269.659
Pendapatan Administrasi	2.o, 27	631.147.524.106	481.863.510.920
		<u>6.584.349.101.707</u>	<u>5.368.963.780.579</u>
Pendapatan Usaha Lainnya:			
Pendapatan Lainnya	2.o, 28	16.578.864.779	9.329.126.007
		<u>16.578.864.779</u>	<u>9.329.126.007</u>
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>6.600.927.966.486</u>	<u>5.378.292.906.586</u>
BEBAN USAHA			
Bunga dan Provisi	2.o, 29	1.842.906.719.748	1.573.453.742.911
Penyusutan Aset Tetap	2.i, 2.o, 30	89.569.819.086	79.859.739.674
Pegawai	2.o, 31	1.704.807.622.455	1.328.788.645.238
Umum	2.o, 32	1.036.984.573.322	845.682.926.556
Jumlah Beban Usaha		<u>4.674.268.734.611</u>	<u>3.827.785.054.379</u>
LABA USAHA		<u>1.926.659.231.875</u>	<u>1.550.507.852.207</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Uang Kelebihan Lewat Waktu	2.o, 18	29.037.602.814	23.658.824.171
Pendapatan Sewa Gedung	2.o, 33	2.410.187.388	3.489.966.147
Pendapatan Jasa Giro	34	1.458.977.205	1.336.541.145
Laba (Rugi) Penjualan Aktiva Tetap	2.i, 35, 11	179.520.506	(134.523.087)
Pendapatan Lainnya	2.o, 36.a	44.388.777.493	39.637.200.190
Beban Lain-lain	2.o, 36.b	(1.882.706.567)	(1.769.061.119)
Jumlah Pendapatan Lain-lain		<u>75.592.358.839</u>	<u>66.218.947.447</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		<u>2.002.251.590.714</u>	<u>1.616.726.799.654</u>
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak Kini	2.p, 19.c	563.019.130.000	428.541.301.000
Tanggungan	2.p, 19.d	(37.002.826.214)	8.397.112.962
Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		<u>526.016.303.786</u>	<u>436.938.413.962</u>
LABA TAHUN BERJALAN		<u>1.476.235.286.928</u>	<u>1.179.788.385.692</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK			
		--	--
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
		<u>1.476.235.286.928</u>	<u>1.179.788.385.692</u>
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :			
Pemilik Entitas Induk		<u>1.476.235.286.928</u>	<u>1.179.788.385.692</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal Awal	Penyertaan Modal Pemerintah	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2009		205.000.000.000	46.252.000.000	1.490.010.668.212	798.195.518.921	2.539.458.187.133
Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan						
Pembagian Dividen		--	--	--	(399.097.760.000)	(399.097.760.000)
Dana Program Kemitraan		--	--	--	(15.963.910.000)	(15.963.910.000)
Dana Bina Lingkungan		--	--	--	(7.981.955.000)	(7.981.955.000)
Cadangan Umum		--	--	232.948.893.921	(232.948.893.921)	--
Cadangan Tujuan		--	--	142.203.000.000	(142.203.000.000)	--
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	25b	--	--	375.151.893.921	(798.195.518.921)	(423.043.625.000)
Laba Bersih Tahun 2010	25b	--	--	--	1.179.788.385.692	1.179.788.385.692
Saldo per 31 Desember 2010		205.000.000.000	46.252.000.000	1.865.162.562.133	1.179.788.385.692	3.296.202.947.825
Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan						
Pembagian Dividen		--	--		(648.883.612.131)	(648.883.612.131)
Dana Program Kemitraan		--	--		(23.595.766.000)	(23.595.766.000)
Dana Bina Lingkungan		--	--		(23.595.766.000)	(23.595.766.000)
Cadangan Umum		--	--	398.018.241.561	(398.018.241.561)	--
Cadangan Tujuan		--	--	85.695.000.000	(85.695.000.000)	--
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	25b	--	--	483.713.241.561	(1.179.788.385.692)	(696.075.144.131)
Laba Bersih Tahun 2011	25b	--	--	--	1.476.235.286.928	1.476.235.286.928
Saldo per 31 Desember 2011		205.000.000.000	46.252.000.000	2.348.875.803.694	1.476.235.286.928	4.076.363.090.622

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2011 Rp	2010 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari:			
- Penerimaan Sewa Modal		5.672.591.823.879	4.607.605.209.689
- Pendapatan Administrasi	2.e, 2.o, 27	631.147.524.106	504.554.490.606
- Pendapatan Lainnya		41.098.707.417	38.113.975.806
- Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan		75.772.471.071.015	57.681.172.259.924
- Pelunasan dari Piutang Lainnya		226.885.529.906	92.840.761.097
- Penjualan BSL/BLP & Aset yang Disisihkan		515.834.669.467	595.475.618.792
- Penerimaan Hutang Nasabah		613.946.550.851	225.691.638.592
- Penerimaan Hutang Pajak		164.862.269.742	112.246.788.655
- Penerimaan Hutang Lainnya		316.046.941.617	191.571.597.612
Jumlah Penerimaan Kas Dari Aktivitas Operasi		<u>83.954.885.088.000</u>	<u>64.049.272.340.773</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
- Pembayaran Bunga Bank/Obligasi		(1.825.199.654.195)	(1.569.981.778.033)
- Beban Pegawai		(1.523.574.486.042)	(1.148.744.652.952)
- Beban Umum		(1.013.724.772.503)	(986.370.451.380)
- Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan		(81.737.886.099.732)	(62.266.830.047.156)
- Pembayaran Hutang Kepada Rekanan		(58.714.889.739)	(1.040.400.227)
- Pembayaran Hutang Kepada Nasabah		(75.990.175.911)	(60.521.605.579)
- Pembayaran Hutang Pajak		(670.924.552.805)	(492.206.178.000)
- Pembayaran Hutang Lainnya		(527.758.704.032)	(282.833.997.249)
- Pemberian Piutang		(326.307.742.449)	(87.946.501.746)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Operasi		<u>(87.760.081.077.408)</u>	<u>(66.896.475.612.322)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>(3.805.195.989.408)</u>	<u>(2.847.203.271.549)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Kas dari:			
- Penjualan Aset Tetap	2.i, 36, 11	193.785.300	34.499.700
Jumlah Penerimaan Kas Dari Aktivitas Investasi		<u>193.785.300</u>	<u>34.499.700</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
- Pembelian Aset Tetap		(98.715.548.475)	(68.056.616.958)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Investasi		<u>(98.715.548.475)</u>	<u>(68.056.616.958)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(98.521.763.175)</u>	<u>(68.022.117.258)</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan	2011 Rp	2010 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Kas dari:		
- Hutang Bank	11.476.485.398.753	9.711.407.975.347
- Hutang Obligasi	665.000.000.000	--
- Hutang Jangka Panjang Lainnya	1.000.000.000.000	--
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan	13.141.485.398.753	9.711.407.975.347
Pengeluaran Kas untuk:		
- Angsuran Hutang Bank	(7.953.152.184.564)	(5.893.155.139.223)
- Pelunasan Obligasi		
Obligasi IX Seri A	(336.500.000.000)	(211.000.000.000)
Obligasi IX seri C	--	(2.000.000.000)
Obligasi IX seri B	--	(13.050.000.000)
Obligasi IX seri D	--	(43.500.000.000)
- Pelunasan Hutang Jangka Panjang Lainnya	--	(1.350.000.000)
- Pembayaran Dividen Tahun Buku Berjalan	(648.883.612.131)	(399.097.760.000)
- Pembayaran Uang Muka Dividen Tahun Buku 2010	(150.000.000.000)	(120.000.000.000)
- Pembayaran Program Kemitraan	(23.595.766.000)	(15.963.910.000)
- Pembayaran Program Bina Lingkungan	(23.595.766.000)	(7.981.955.000)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Pendanaan	(9.135.727.328.695)	(6.707.098.764.223)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	4.005.758.070.058	3.004.309.211.124
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	102.040.317.475	89.083.822.317
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	357.072.324.281	267.988.501.964
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	459.112.641.756	357.072.324.281
Kas dan Bank terdiri dari:		
Kas	283.453.351.010	229.096.974.634
Bank	175.659.290.746	127.975.349.647
Jumlah	459.112.641.756	357.072.324.281

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a Pendirian

Pegadaian (selanjutnya Perusahaan) adalah suatu lembaga perkreditan, berdiri sejak jaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Menurut sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika VOC berdagang ke Indonesia. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya, VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles membubarkan Bank Van Leening dan mengizinkan setiap orang untuk mendirikan usaha pegadaian dengan ijin (licentie). Namun saat Belanda kembali berkuasa di tahun 1900 berdasarkan penelitian oleh lembaga peneliti yang dipimpin oleh Wolf van Westerode, disarankan agar kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah agar memberi manfaat bagi masyarakat. Pada tanggal 12 Maret 1901 pemerintah mengeluarkan Staatsblad No 131. Berdasarkan undang-undang ini didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 178 tanggal 3 Mei 1961 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, sebagai badan usaha negara di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan terbitnya Inpres No.17 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969, PN Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan PP No.103 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan dan bertujuan untuk:

- Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai
- Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia (kepercayaan), pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Selain penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, Perusahaan menjalankan usaha jasa gadai syariah (Rahn), sejak tanggal 10 Januari 2003.

Perusahaan berkantor pusat di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta, dengan 12 Kantor Wilayah, 717 Kantor Cabang Konvensional, 160 Kantor Cabang Syariah, dan 3.271 Unit Pelayanan Cabang (UPC) dan 438 Unit Pelayanan Syariah (UPS) diseluruh Indonesia per 30 Desember 2011.

Berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan dan Surat Menteri Keuangan RI No.1015/KMK.013/ 1991 tanggal 26 September 1991, modal awal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 205.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam Laporan Posisi Keuangan Pembukaan. Modal awal yang disetor Pemerintah tersebut adalah kumulatif laba bersih yang diperoleh Perjan Pegadaian. Secara bertahap mulai tahun 1991, Pemerintah Republik Indonesia memberikan tambahan modal sebagai

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp 46.252.000.000 melalui SK Menteri Keuangan RI masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Rp
0360/KM.3-42/SKOP/0391	30 Maret 1991	20.000.000.000
0136/KM.3-42/SKOP/0891	5 Agustus 1991	16.252.000.000
0151/MK.013/1992	29 Juni 1992	10.000.000.000
Jumlah		46.252.000.000

1.b Penawaran Umum Efek Perusahaan

Perusahaan telah menerbitkan emisi obligasi sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan jangka waktu masing-masing 5 tahun untuk obligasi tahun 1993, 1998, 2001 dan 2009 (Seri A), jangka waktu 8 tahun untuk obligasi tahun 1999, 2000, 2002, 2003 (Seri A) dan 2009 (Seri B) dan jangka waktu 15 tahun untuk obligasi tahun 2003 Seri B serta jangka waktu 10 tahun untuk obligasi tahun 2006, 2007 dan 2009 (Seri C).

Seluruh obligasi dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
1993	Obligasi I	11 Juni 1993 & 9 Juli 1998	50 milyar	Bunga 17,5% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang.
1994	Obligasi II	30 Juni 1994 & 18 Juli 1999	25 milyar	Bunga 13% tetap untuk 6 bulan pertama, selanjutnya mengambang yaitu 1% di atas tingkat bunga deposito 6 bulan bank pemerintah.
1996	Obligasi III	25 Juni 1996 & 12 Juli 2001	100 milyar	Bunga 17,75% tetap untuk tahun pertama, 4 tahun berikutnya mengambang 1,5 % di atas tingkat bunga deposito bank pemerintah & swasta.
1997	Obligasi IV	16 Juni 1997 & 3 Juli 2002	100 milyar	Bunga 14,75% tetap untuk tahun pertama, 4 tahun berikutnya mengambang 1% diatas tingkat bunga deposito bank pemerintah dan swasta.
1998	Obligasi V	23 Juni 1998 & 8 Juli 2003	64,6 milyar	Bunga Seri A1 49% tetap untuk tahun pertama, seterusnya mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium. Bunga Seri B2 mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium.
1999	Obligasi VI	24 Agt 1999 & 8 Sept 2007	135 milyar	Bunga 15,5% tetap untuk tahun pertama, 7 tahun berikutnya mengambang sebesar 1,75% di atas tingkat bunga rata-rata JIBOR 6 bulan.
2000	Obligasi VII	27 Juni 2000 & 21 Juli 2008	150 milyar	Bunga 15,625% tetap untuk tahun pertama, berikutnya mengambang 1,725% di atas tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah.
2001	Obligasi VIII	31 Mei 2001 & 12 Juni 2006	300 milyar	Bunga Seri A 19,25% tetap, cicilan 20% pokok per tahun Seri B 19,25% tetap, Seri C 0,50% tetap menurun per tahun 20,25% untuk tahun pertama, Seri D 19,25% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang sesuai dengan tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, maksimal 24,25% minimal 16,25%, Seri E 19,25% tetap untuk tahun pertama sampai tahun ketiga, selanjutnya mengambang sesuai tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, maksimal 24,25% minimal 16,25%.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2002	Obligasi IX	24 Mei 2002 & 6 Juni 2010	300 milyar	Bunga Seri A 18,25% tetap per tahun, Seri B 18,25% per tahun, amortisasi 10% tahun keempat emisi, 20% tahun kelima sampai dengan ketujuh 30% tahun kedelapan emisi, Seri C 18,25% tetap tahun Pertama, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maksimal 20,00% minimal 16,50%. Seri D dengan opsi jual pada tahun kelima, 18,25% tetap tahun pertama sampai dengan tahun kelima, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maksimal 20,00%, minimal 16,50%.
2003	Obligasi X	27 Juni 2003, 11 Juli 2011 & 2018	400 milyar	Bunga Seri A 12,9375% tetap per tahun dengan jangka waktu 8 tahun, Seri B dengan jangka waktu 15 tahun dengan tingkat bunga 13,125% per tahun tetap untuk tahun pertama sampai dengan ke tiga, selanjutnya tahun ke empat dan sampai dengan ke tahun kelima belas mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 3 bulan ditambah premi 1,0% per tahun maksimum 15,50%, minimum 10,50%.
2006	Obligasi XI	23 Mei 2006 & 23 Mei 2016	500 milyar	Bunga Seri A 13,10% per tahun tetap, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 13,10% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1,25% per tahun, maksimum 16,00%, minimum 10,00%.
2007	Obligasi XII	4 September 2007 & 2017	600 milyar	Bunga Seri A 10,025% per tahun tetap, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 10,025% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1% per tahun, maksimum 12,00%, minimum 8,00%.
2009	Obligasi XIII	1 Juli 2009, 2014, 2017 & 2019	1.500 milyar	Seri A1, tingkat bunga tetap 11,675% pertahun untuk tahun pertama sampai tahun ke-5. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp 350 miliar. Seri A2, tingkat bunga tetap 11,675% per tahun untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun ke-2 sampai tahun ke-5 yang besarnya berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi 3% per tahun dengan batas atas 13% dan batas bawah 10%. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp100 miliar. Seri B, tingkat bunga tetap 12,650% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun ke 8. Jangka waktu 8 tahun dengan jumlah Rp 650 miliar. Seri C, tingkat bunga tetap 12,875% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh. Jangka waktu 10 tahun dengan jumlah Rp 400 miliar.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2011	Obligasi Berkelanjutan I	11 Oktober 2011 dan 11 Oktober 2014, 2016, 2021	2.000 milyar	<p>Obligasi Berkelanjutan I, dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp2.trilyun yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.</p> <p>Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1 trilyun terdiri dari Seri A, B dan C.</p> <p>Seri A, jumlah pokok sebesar Rp250 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2014.</p> <p>Seri B, jumlah pokok sebesar Rp250 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2016.</p> <p>Seri C, jumlah pokok sebesar Rp500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun, jangka waktu 10 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2021.</p>

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 18 Pebruari 2010 yang telah diaktakan dalam Akta No.19 tanggal 18 Pebruari 2010 oleh notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH mengenai pengunduran diri PT Bank BNI Tbk selaku wali amanat Obligasi serta pergantian wali amanat yaitu mengganti PT Bank BNI Tbk dengan PT Bank Mega Tbk.

1.c Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Manajemen Perusahaan terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas:

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-366/S.MBU.1.1/2011 tanggal 15 Agustus 2011 mengenai penyampaian salinan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-191/MBU/2011 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perum Pegadaian, susunan Dewan Pengawas tahun 2011 terdiri dari:

Ketua	:	Cecep Sutiawan
Anggota	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Wiranto

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.KEP-121/MBU/2010 tanggal 8 Juli 2010, susunan Dewan Pengawas tahun 2010 terdiri dari :

Ketua	:	Cecep Sutiawan
Anggota	:	Raksaka Mahi
Anggota	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Wiranto

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Dewan Direksi :

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-18/MBU/2011 tanggal 31 Januari 2011, susunan Dewan Direksi tahun 2011 ditetapkan sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Suwhono
Direktur Pengembangan Usaha	:	Wasis Djuhar
Direktur Operasi	:	Moch. Edy Prayitno
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Sumanto Hadi
Direktur Keuangan	:	Budiyanto

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-74/MBU/2008 tanggal 28 April 2008, susunan Dewan Direksi tahun 2010 ditetapkan sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Chandra Purnama*
Direktur Pengembangan Usaha	:	Wasis Djuhar
Direktur Operasi	:	Moch. Edy Prayitno
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Sumanto Hadi
Direktur Keuangan	:	Budiyanto*

* Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-237/MBU/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Umum Pegadaian dan Keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No. KP-06/DP/GD/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian; jabatan Direktur Utama digantikan oleh Sdr. Budiyanto, Direktur Keuangan Perum Pegadaian.

Komite Audit:

Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengawas, Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian sebagai berikut:

- No.Kep-01/KP/DP/GD/2004 tanggal 1 Nopember 2004;
- No.Kep-01/KP/DP/GD/2005 tanggal 31 Oktober 2005;
- No.01/KP/DP/GD/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- No.05/KP/DP/GD/2007 tanggal 31 Oktober 2007

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No.KEP-01/KP/DP/GD/2010 tanggal 8 Januari 2010, susunan Komite Audit tahun 2011 & 2010 terdiri dari:

Ketua	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Syahrir Ika
Anggota	:	M. Iskandar

Komite Manajemen Risiko:

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No.KEP-03/KP/DP/GD/2010 tanggal 8 Januari 2010, susunan Komite Manajemen Risiko tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Suhadi Hadiwijoyo
Anggota	:	Muhamad Nur Sodik

Dewan Pengawas Syariah:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi Perum Pegadaian No.306/US.1.00/2010 tanggal 9 Desember 2010 susunan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Anggota	:	Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH.
Anggota	:	Dr. H. M. Cholil Nafis, Lc, MA.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan berperan dalam memperlancar koordinasi intern dalam organ Perum Pegadaian (Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) serta koordinasi ekstern antara Perum Pegadaian dengan *stakeholder*. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 2116/SDM.200322/2011 tanggal 13 Juli 2011, Sekretaris Perusahaan adalah Sriyanto, SE,MM.

Tugas Sekretaris Perusahaan adalah:

1. memastikan bahwa Perusahaan taat terhadap berbagai peraturan yang berlaku dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
2. menjalankan fungsi hubungan investor dan publikasi Perum Pegadaian.
3. menjalankan fungsi *corporate legal affair* atau *legal council*.

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi utama yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan adalah:

1. menangani masalah tata usaha dan rumah tangga Direksi;
2. melaksanakan fungsi hubungan masyarakat dan publikasi Perum Pegadaian (Liaison Officer);
3. mengurus keperluan dan kepentingan Direksi dan Dewan Pengawas yang berkaitan dengan tugas Direksi;
4. sebagai mediator pihak manajemen dengan publik;
5. menangani perkara yang masuk ke pengadilan;
6. menganalisa dan memberikan opini hukum atas masalah-masalah litigasi dan non litigasi;
7. menerbitkan buletin "Warta Pegadaian" dalam rangka penyebaran informasi baik ke dalam (karyawan) maupun ke luar (masyarakat).

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.3097/SDM.200322/2011 tanggal 9 September 2011, No. 3388/PSDM-BK.100321/2011 tanggal 17 Oktober 2011, dan No.3076/SDM.200322/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian, susunannya adalah sebagai berikut:

Kepala	:	Slamet Mulyatno
Inspektur	:	Agus Budiono Arie Putra Benyamin
Sekretaris	:	Ardianingtyas
Pemeriksa Madya	:	Ketut Suhardiono Wien Sumaryanto Jermia Tanga
Pemeriksa Muda	:	Suparlan Eko Supriyanto Akhmad Ramdoni Dyah Cahyaningsih Leonard Augustinus Sirait Agus Setiawan

Perum Pegadaian telah memiliki Piagam Audit Internal yang tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.S-476/SPI/VI/2010 tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Pegadaian.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Direksi	21.403.073.385	16.728.957.279
Dewan Pengawas, Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko	7.213.899.758	8.383.571.839
Jumlah	28.616.973.143	25.112.529.118

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Karyawan:

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (tidak diaudit) per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebagai berikut:

	2011	2010
Perusahaan	8.117	7.796
Entitas Anak (PT BLAG)	--	5

1.d Entitas Anak

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000 dan Akta Notaris Zacharias Omawele, SH No.13 tanggal 26 Juli 2000, Perusahaan memiliki secara langsung penyertaan saham pada Entitas anak yaitu PT Balai Lelang Artha Gasia (BLAG) sebesar 99,99% yang bergerak di bidang jasa lelang dan berlokasi di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta. BLAG mulai beroperasi secara komersial sejak bulan September tahun 2000 dan memiliki total aset sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Total Aset	5.135.486	5.135.486

Pada tahun 2010, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010, para pemegang saham memutuskan membekukan kegiatan operasional perseroan terkait dengan penurunan omzet yang relatif permanen dan ruang gerak usaha yang semakin sempit, melakukan restrukturisasi kepengurusan dan menyelesaikan hak dan liabilitas perseroan termasuk masalah sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Saldo Kepentingan Non Pengendali atas entitas anak adalah nihil, masing-masing per 31 Desember 2011 dan 2010.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", dan PSAK No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim".

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basic*), kecuali laporan arus kas.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Penerapan Standar Akuntansi Revisi

Perusahaan telah menerapkan perubahan atas beberapa standar yang wajib diterapkan pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 sebagai berikut :

- PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan; Menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
- PSAK No. 5 (Revisi 2009) : Segmen Operasi (Catatan 2.r)
- PSAK No. 7 (Revisi 2009) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi (Catatan 2.d)

Perusahaan mengungkapkan informasi terkait dengan penyajian laporan keuangan, segmen operasi dan pengungkapan pihak-pihak berelasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh keempat standar tersebut, sedangkan penerapan standar-standar tersebut tidak berdampak material terhadap kinerja Perusahaan. Selain standar-standar tersebut, Perusahaan menerapkan perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, namun dampaknya tidak material terhadap Perusahaan, sebagai berikut:

- PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas
- PSAK No. 3 (Revisi 2010) : Laporan Keuangan Interim
- PSAK No. 4 (Revisi 2009) : Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK No. 8 (Revisi 2009) : Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- PSAK No. 12 (Revisi 2009) : Bagian Partisipasi dalam Modal Ventura Bersama
- PSAK No. 15 (Revisi 2009) : Investasi pada Perusahaan Asosiasi
- PSAK No. 19 (Revisi 2010) : Aset Tak Berwujud
- PSAK No. 22 (Revisi 2010) : Kombinasi Bisnis
- PSAK No. 23 (Revisi 2010) : Pendapatan
- PSAK No. 25 (Revisi 2009) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK No. 48 (Revisi 2009) : Penurunan Nilai Aset
- PSAK No. 57 (Revisi 2009) : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
- PSAK No. 58 (Revisi 2009) : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Perusahaan memiliki divisi syariah dimana pencatatannya disusun berdasarkan PSAK No. 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" (catatan 4 dan 26); PSAK No. 102 "Akuntansi Murabahah" (catatan 4); dan PSAK No. 107 "Akuntansi Ijarah" (catatan 26).

2.c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung atau Perusahaan dapat mengendalikan investasi tersebut, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

1. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai dengan perjanjian investor lain;
2. kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
3. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
4. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Kepentingan non pengendali adalah bagian hasil usaha dan bagian aset bersih dari entitas anak yang tidak dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Porsi kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih anak Perusahaan jumlahnya tidak signifikan (0,01%), oleh karena itu untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak menyajikan kepentingan non pengendali.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi dan saldo antara Perusahaan dan anak Perusahaan telah dieliminasi. Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha.

2.d. Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain)
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut adalah sama dengan transaksi lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

2.e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2.f. Pinjaman Yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai asset keuangan (lihat catatan 2.n). Mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah, maka untuk mempermudah administrasi dilakukan penggolongan Uang Pinjaman (UP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu:

Pinjaman Usaha Gadai

Pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besarnya pinjaman (pagu kredit), masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Sewa Modal, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.1024/UI.I.00211/2006 tanggal 29 Desember 2006 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali dengan surat keputusan Direksi No. 56/UI.I.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Pebruari 2008 tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal dari 2008 s.d 2011		Jangka Waktu kredit
		Per 15 hari	Maksimum	
A	20.000 - 150.000	0,75%	6,00%	120 hari
B	151.000 - 500.000	1,20%	9,60%	120 hari
C1	505.000 - 1.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
C2	1.010.000 - 20.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
D1	20.050.000 - 50.000.000	1,00%	8,00%	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	1,00%	8,00%	120 hari

Selama tahun 2011, Perusahaan melakukan penyesuaian tarif sewa modal dan perubahan penggolongan uang pinjaman. Penyesuaian tarif sewa modal ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat Edaran No: 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, yang berlaku mulai tanggal 1 April 2011. Penggolongan tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal Mulai 1 April 2011		Jangka Waktu kredit
		Per 15 hari	Maksimum	
A	20.000 - 150.000	0,75%	6,00%	120 hari
B	151.000 - 500.000	1,20%	9,60%	120 hari
C1	505.000 - 1.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
C2	1.010.000 - 20.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
D1	20.050.000 - 50.000.000	1,00%	8,00%	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	1,00%	8,00%	120 hari

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Selain pengenaan sewa modal, kepada nasabah dikenakan biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.348/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, setiap pemberian kredit dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

No	Golongan Pinjaman	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	AKN	1 dari of UP
2	AK	1 dari of UP
3	AG	1 dari of UP
4	BK	1 dari of UP
5	BG	1 dari of UP
6	CK1	1 dari of UP
7	CG1	1 dari of UP
8	C2	1 dari of UP
9	D1 & D2	1 dari of UP
10	D1 & D2 Mobil	1 % dari UP, Minimum Rp 50.000

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.312/UL.3.00213/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan Surat Edaran Direksi No. 32/UL.3.00212/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2007, pengenaan biaya administrasi dibedakan antara gadai baru dan ulang gadai sebagai berikut:

Gadai baru

No.	Kredit Lama Berlanjut	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	Semua Golongan (A,B,C dan D)	1 % of UP
2	Khusus Barang Jaminan Mobil	1 % of Loan Minimum Rp 50.000

Ulang Gadai

No.	Kredit Lama Berlanjut	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	1 - 30 hari / days	0,2 % of UP
2	31 - 60 hari / days	0,4 % of UP
3	61 - 90 hari / days	0,6 % of UP
4	91 - 120 hari / days	0,8 % of UP

Berdasarkan SE No.49/OP.1.00211/2004 tanggal 11 Oktober 2004, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, terakhir berdasarkan SE No. 06/UL.1.00211/2008, tanggal 30 Januari 2008 sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran
A	20.000 - 150.000	95%
B	151.000 - 500.000	92%
C1	505.000 - 1.000.000	91%
C2	1.010.000 - 20.000.000	91%
D1	20.050.000 - 50.000.000	93%
D2	50.100.000 - 200.000.000	93%

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat Edaran Nomor: 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 April 2011 ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran
A	20.000 - 150.000	95%
B	151.000 - 1.000.000	92%
C	1.010.000 - 20.000.000	92%
D	20.000.000 - 500.000.000	93%

Usaha Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang Perubahan Prosentase Marhun Bih terhadap taksiran ditetapkan sebagai berikut:

Golongan	Plafon Marhun Bih Rp	Tarif Biaya Administrasi Rp	Jangka Waktu Kredit
A	20.000 - 150.000	1.000	120 hari
B	151.000 - 500.000	5.000	120 hari
C1	501.000 - 1.000.000	8.000	120 hari
C2	1.005.000 - 5.000.000	16.000	120 hari
C3	5.010.000 - 10.000.000	25.000	120 hari
C4	10.050.000 - 20.000.000	40.000	120 hari
D1	20.100.000 - 50.000.000	50.000	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	60.000	120 hari

Besar Prosentase Marhun Bih terhadap nilai taksiran adalah sebagai berikut:

Gol	Marhun Bih	% Marhun Bih		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	20.000 - 150.000	95%	95%	95%
B	151.000 - 500.000	92%	92%	92%
C1	501.000 - 1.000.000	91%	91%	91%
C2	1.005.000 - 5.000.000	91%	91%	91%
C3	5.010.000 - 10.000.000	91%	91%	91%
C4	10.050.000 - 20.000.000	91%	91%	91%
D1	20.100.000 - 50.000.000	93%	93%	93%
D2	50.100.000 - 200.000.000	93%	93%	93%

Tarif Ijarah

Berdasarkan SK Direksi No.08/US.1.00/2008 tanggal 12 Maret 2008, rumusan tarif Ijarah untuk produk Rahn adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Diskon Ijarah:

Besarnya Marhun Bih "P/N"	Muqasah (Diskon) X Tarif	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & Alat RT	Kendaraan Bermotor
≥ 85% x Taksiran / Estimasi	0%	80	85	90
80% - 84% x Taksiran / Estimasi	7%	74	79	84
75% - 79% x Taksiran / Estimasi	14%	69	73	77
70% - 74% x Taksiran / Estimasi	20%	64	68	72
65% - 69% x Taksiran / Estimasi	26%	59	63	67
60% - 64% x Taksiran / Estimasi	32%	54	58	61
55% - 59% x Taksiran / Estimasi	38%	50	53	56
50% - 54% x Taksiran / Estimasi	44%	45	48	50
45% - 49% x Taksiran / Estimasi	50%	40	43	45
40% - 44% x Taksiran / Estimasi	56%	35	37	40
35% - 39% x Taksiran / Estimasi	61%	31	33	35
30% - 34% x Taksiran / Estimasi	66%	27	28	31
25% - 29% x Taksiran / Estimasi	71%	23	25	26
20% - 24% x Taksiran / Estimasi	76%	19	20	22
15% - 19% x Taksiran / Estimasi	81%	15	16	17
10 - 14% x Taksiran / Estimasi	85%	Tarif khusus = (1% x Taksiran) per 120 hari		
< 10% x Taksiran / Estimasi	80%	Tarif khusus = (1% x Taksiran) per 120 hari		

Usaha Lain

Kredit Kreasi

Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Krasida

Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Besaran uang pinjaman Kredit Kreasi berdasarkan Surat Edaran Direksi No.61/US.2.00/2006 tanggal 13 Desember 2006 maksimum kredit kreasi sebesar Rp100.000.000 per nasabah, sedangkan Krasida terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.190/US.2.00/2006 tanggal 28 September 2006, batas minimum uang pinjaman kredit krasida sebesar Rp 20.000.000 per nasabah.

Secara umum Kreasi dan Krasida mempunyai kemiripan dalam hal pelaksanaan operasionalnya yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Kreasi	Krasida
1	Tujuan Kredit	Produktif	Produktif
2	Waktu Pelayanan	3 Hari	1-2 Jam
3	Tarif Sewa Modal	12% / tahun Flat	12% / tahun Flat
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman	1% dari Uang Pinjaman
5	Biaya Lainnya	Notaris, Akta Fidusia, Cek Fisik,	Materai dan Cek Fisik untuk
		Asuransi, Materai	Kendaraan Bermotor

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

No	Uraian	Kreasi	Krasida
6	Jenis Barang Jaminan (BJ)	BPKB Kendaraan Bermotor	Perhiasan Emas dan Kendaraan Bermotor
7	Penyimpanan BJ	Dipakai Nasabah untuk Alat Produksi	Disimpan di Pegadaian
8	Besarnya Pinjaman	70% dari Nilai Agunan	95% dari Nilai Agunan
9	Jangka Waktu Kredit	12 - 36 bulan	12 - 36 bulan
10	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap	Angsuran Tetap

Krista

Krista (**Kredit Usaha Rumah Tangga**) adalah pinjaman (Kredit) dalam jangka waktu maksimum 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada usaha rumah tangga sangat mikro (gurem) yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja.

Besaran uang pinjaman Kredit Krista berdasarkan Surat Edaran Direksi No.91/UL.2.00.22.2/2008 tanggal 24 Desember 2008 maksimum kredit Krista Rp 5.000.000, terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.65/UL.2.00.22.2/2009 tanggal 24 Agustus 2009, batas maksimum uang pinjaman kredit Krista sebesar Rp 8.000.000 per nasabah. Secara umum pelaksanaan operasional Krista sebagai berikut:

No	Uraian	Krista
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 3 hari
3	Tarif Sewa Modal	12% / Tahun Flat
4	Biaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman
5	Biaya Lainnya	Asuransi, Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Tanpa Barang Jaminan
7	Besarnya Pinjaman	Berdasarkan kelayakan usaha dan disyaratkan mempunyai agunan minimal sebesar 20 % dari pinjaman
8	Jangka Waktu Kredit	12 , 24 dan 36 Bulan
9	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap

Berdasarkan Surat Edaran No. 36/UL.2.00.22.2/2011 tanggal 29 April 2011 tentang penghentian sementara penyaluran Pegadaian Krista, disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian dan pengelolaan produk Krista yang baik maka dengan ini disampaikan bahwa sementara waktu terhitung mulai tanggal 11 Mei 2011 penyaluran Pegadaian Krista dihentikan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

KREMADA

Kremada (**Kredit Perumahan Swadaya**) adalah kredit yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang hanya dimanfaatkan untuk perumahan yang mencakup perbaikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan lingkungan perumahan. Dana berasal dari Pemerintah (Kementerian Negara Perumahan Rakyat). Penyaluran Kredit ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 062/UL.2.00.22.2/2006, tanggal 7 Desember 2006, tentang Penyaluran Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA).

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Berikut adalah skema KREMADA:

No	Uraian	Kremada
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1-2 Minggu
3	Tarif Sewa Modal	0%
4	Biaya Administrasi	9% per tahun dari Uang Pinjaman.
5	Biaya Lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Tanpa Barang Jaminan
7	Plafon Pinjaman	Perbaikan Rp 5.000.000 Pembangunan Rp 10.000.000
8	Nasabah	MBR yang Berkelompok
9	Jangka Waktu Kredit	Perbaikan: 12 Bulan Pembangunan: 24 bulan

Kresna

Kresna (Kredit Serba Guna) atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing pegawai (kemampuan mengangsur) sehingga tidak terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai, sedangkan jangka waktu kredit maksimum 36 bulan. Batas maksimum Uang Pinjaman dan jangka waktu kredit diatur oleh SK Direksi No.213/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

Adapun tingkat bunga pinjaman adalah 12 % per tahun flat. Tarif sewa modal Kresna ditetapkan melalui SK Direksi No. 212/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

SK Direksi No. 13/UL.3.00.22.3/03 tanggal 26 Januari 2004 menetapkan Biaya Administrasi Kresna sebesar 0,5% dari Pinjaman, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2004.

KTJG

KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) merupakan kredit yang diberikan kepada petani atas dasar hukum gadai melalui agen-agen yang ditunjuk Perum Pegadaian dengan barang jaminan berupa gabah kering giling. Tujuan pemberian KTJG adalah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melakukan pengolahan sawahnya mengingat belum diperolehnya dana dari hasil penjualan produk gabah yang sengaja ditunda penjualannya sambil menunggu kenaikan harga gabah yang cenderung menurun setelah panen.

KUCICA

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA) adalah jasa pengiriman uang, bekerjasama dengan Western Union, Perusahaan yang mempunyai jaringan luas, yang berkedudukan di Kanada. SE.54/UL.2.00.22.2/2007, tanggal 11 Oktober 2007, tentang Pelaksanaan Jasa Pengiriman Uang di Kantor Cabang Perum Pegadaian, menetapkan dimulainya operasi Jasa Kucica serta berlakunya Pedoman Operasional Kucica.

ARRUM

Berdasarkan SK. Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO Arrum dan No. 03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan Maksimum Nilai Pembiayaan ARRUM, menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit Arrum dengan jaminan fidusia, maksimum Uang Pinjaman Rp 50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan. Pasarnya adalah para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah. Biaya Administrasi Arrum adalah sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

No	Jenis Barang Jaminan	Biaya Administrasi Rp
1	Sepeda Motor	70.000
2	Mobil	200.000

Sedangkan tarif Ijarah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ijarah} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp 100.000}} \times \text{Rp 700} \times \text{Jangka Waktu (Bulan)}$$

MULIA

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 54/LB.1.00/2008 tentang Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi tanggal 25 September 2008, produk yang disebut MULIA ini diluncurkan dan mulai dioperasikan pada tanggal 28 Oktober 2008. Pembiayaan MULIA adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan MULIA adalah emas batangan bersertifikat internasional (LBMA-London Bullion Market Association) dengan jenis/varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram.

Pembiayaan murabahah ini mengenakan margin atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Margin atas transaksi pembiayaan murabahah tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009 perihal jangka waktu, uang muka dan margin pembiayaan MULIA. Berikut penetapan Margin Pembiayaan MULIA:

Jangka Waktu	Uang Muka	Margin
1 bulan	> 20% - 100%	3,00%
	> 25% - 30%	3,50%
	> 30% - 40%	3,25%
	> 40% - 50%	3,25%
	> 50% - 60%	3,00%
	> 60% - 70%	3,00%
	> 70% - 80%	2,90%
	> 80% - 90%	2,80%
	> 90% - 100%	2,50%
3 bulan	> 25% - 30%	6,00%
	> 30% - 40%	5,90%
	> 40% - 50%	5,80%
	> 50% - 60%	5,70%
	> 60% - 70%	5,60%
	> 70% - 80%	5,50%
	> 80% - 90%	5,00%
	> 90% - 100%	4,00%
6 bulan	> 30% - 40%	12,00%
	> 40% - 50%	11,50%
	> 50% - 60%	11,00%
	> 60% - 70%	10,50%
	> 70% - 80%	10,00%
	> 80% - 90%	8,50%
	> 90% - 100%	7,00%
12 bulan	> 35% - 40%	18,00%
	> 35% - 40%	18,00%
18 bulan	> 35% - 40%	18,00%
	> 35% - 40%	18,00%
	> 35% - 40%	18,00%
	> 35% - 40%	18,00%
	> 35% - 40%	18,00%
	> 35% - 40%	18,00%
	> 35% - 40%	18,00%
	> 35% - 40%	18,00%

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Jangka Waktu	Uang Muka	Margin
24 bulan	> 40% - 50%	17,00%
	> 50% - 60%	16,00%
	> 60% - 70%	15,00%
	> 70% - 80%	13,50%
	> 80% - 90%	11,00%
	> 90% - 100%	7,00%
	> 40% - 50%	22,00%
	> 50% - 60%	20,50%
	> 60% - 70%	18,50%
	> 70% - 80%	16,00%
36 bulan	> 80% - 90%	12,50%
	> 90% - 100%	7,80%
	> 45% - 50%	29,00%
	> 50% - 60%	28,50%
	> 60% - 70%	24,00%
	> 70% - 80%	20,00%
	> 80% - 90%	15,00%
	> 90% - 100%	8,60%

Atas transaksi pelunasan pembiayaan MULIA dipercepat maka Direksi Pegadaian menetapkan Prosentase Potongan Margin MULIA yang diatur dalam Surat Edaran No. 73/Lb.1.00/2008 perihal Potongan Marjin MULIA. Berikut Tabel Potongan Marjin MULIA:

Prosentase Potongan Marjin Mulia (dalam%)					
Jangka Waktu Pembiayaan					
Bulan Ke	6	12	18	24	36
1	50,00	75,00	83,00	88,00	91,66
2	40,00	68,19	78,12	84,00	89,04
3	30,00	61,38	73,24	80,00	86,42
4	20,00	54,57	68,36	76,00	84,00
5	10,00	47,76	63,48	72,00	81,18
6	-	40,95	59,00	69,00	78,56
7	-	34,14	53,72	65,00	75,94
8	-	27,33	48,84	61,00	73,32
9	-	20,52	43,96	57,00	71,00
10	-	13,71	39,08	53,00	68,08
11	-	7,00	34,00	50,00	65,46
12	-	-	29,32	46,00	62,84
13	-	-	24,44	42,00	60,22
14	-	-	19,56	38,00	58,00
15	-	-	14,68	34,00	54,98
16	-	-	10,00	31,00	52,36
17	-	-	4,92	27,00	49,74
18	-	-	-	23,00	47,12
19	-	-	-	19,00	45,00
20	-	-	-	15,00	41,88
21	-	-	-	12,00	39,26
22	-	-	-	8,00	36,64
23	-	-	-	4,00	34,02
24	-	-	-	-	31,00

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Prosentase Potongan Marjin Mulia (dalam%)					
Jangka Waktu Pembiayaan					
Bulan Ke	6	12	18	24	36
25	-	-	-	-	28,78
26	-	-	-	-	26,16
27	-	-	-	-	23,54
28	-	-	-	-	20,92
29	-	-	-	-	18,00
30	-	-	-	-	15,68
31	-	-	-	-	13,06
32	-	-	-	-	10,44
33	-	-	-	-	7,82
34	-	-	-	-	5,00
35	-	-	-	-	2,58
36	-	-	-	-	-

Unit Gadai Efek

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/UL.3.0022.3/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Unit Gadai Efek, telah dibentuk unit usaha baru yang bergerak di bidang pelayanan gadai dengan Barang Jaminan Saham/Efek. Unit usaha baru ini berkedudukan di Kantor Pusat Perum Pegadaian, Jl. Kramat Raya No. 162 Jakarta.

SK Direksi No. 44A/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Penyaluran Kredit Gadai Saham, ditetapkan jenis saham yang dapat dijaminkan, yaitu saham dalam kelompok LQ45 yang telah melalui proses Know Your Customer (KYC).

SK Direksi No. 44B/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Prosedur Operasional Kredit Gadai Saham, ditetapkan berlakunya Pedoman Operasional Kredit Gadai Saham.

SK Direksi No. 44C/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Tarif sewa modal dan Biaya Administrasi, ditetapkan tarif Sewa Modal secara fixed Rate. Tarif SM ditetapkan melalui Surat Edaran. Sedangkan Biaya Administrasi ditetapkan sebesar 0,125% per jangka waktu 90 hari.

SK Direksi No. 44D/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Maksimum dan Minimum Uang Pinjaman, ditetapkan bahwa minimum UP adalah 50 Juta Rupiah dan maksimum sebesar 50 Milyar rupiah.

SK Direksi No. 44E/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Kewenangan Dalam Penetapan dan Pemutusan Uang Pinjaman, ditetapkan anggota-anggota Komite Pemutus Kredit serta ditetapkan batas-batas wewenang masing-masing atas besaran uang pinjaman yang dapat diputuskan.

Secara umum pelaksanaan Gadai Efek sebagai berikut :

No	Uraian	Unit Gadai efek
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 2 hari
3	Tarif Sewa Modal	Harian, minimal 15 Hari
4	Biaya administrasi	0,125% per Jangka Waktu 90 Hari
5	Biaya Lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Saham dalam LQ 45, per transaksi untuk 1 jenis

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

No	Uraian	Unit Gadai efek
7	Plafon Pinjaman	Per Transaksi Minimum Rp 50.000.000 dan Maksimum Rp 50.000.000.000 dihitung paling banyak 50% dari harga pasar saham (closing price 1 hari sebelumnya).
8	Nasabah	Institusi atau Perorangan
9	Jangka Waktu Kredit	90 hari
10	<i>Top Up Call</i>	65%
11	Eksekusi	80%

Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Usaha No.91/Lb.1.00/2008 tanggal 2 Desember 2008 penyaluran kredit gadai efek dihentikan sampai dengan adanya keputusan Direksi lebih lanjut.

G-Lab (Unit Laboratorium Gemologi)

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 29/LB.1.00.2010 tentang pembentukan Laboratorium Gemologi tertanggal 31 Maret 2011 ditandatangani oleh Direktur Utama Chandra Purnama dibuatlah sebuah Buku Pedoman Operasional Pegadaian G-Lab yang dikelola, dikoordinir, dan di organisir oleh Divisi Usaha Lain.

Pegadaian G-Lab adalah singkatan dari Laboratorium Gemologi milik Perusahaan yang merupakan unit pelayanan di bidang pengujian dan atau penilaian batu berharga, logam mulia dan sertifikat khusus.

Jasa yang terdapat dalam unit pelayanan G-Lab yaitu :

1. Jasa Pengujian atau jasa taksiran
2. Jasa konsultasi
3. Jasa kursus

Organisasi pengelolaan dipimpin oleh jeneral manager usaha lain dan langsung bertanggungjawab ke Direksi Perusahaan.

Berikut adalah rincian masing-masing tarif atas jasa layanan yang diberikan:

a) Tarif Pengujian Logam adalah sebagai berikut:

No	Jenis yang Diuji	Tarif Jasa Pengujian
1	Emas	$1,25\% \times \text{Berat Barang (Gram)} \times \text{Karatase}/24 \times \text{Harga Pasar Setempat}$
2	Selain Emas	$\text{Rp } 500 \times \text{Berat Barang (Gram)}$

b) Tarif Gemstone Memo (*Gemstone Identification*):

No	Identifikasi	Biaya per Batu Rp
1	<i>Natural</i>	80.000
2	<i>Syntethic, Assembled</i>	50.000

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

c) Tarif Diamond Grading:

No	Total Berat Berlian	Rp
1	0,01-0,25 ct	80.000
2	0,26-0,50 ct	100.000
3	0,51-0,75 ct	150.000
4	0,76-1,00 ct	200.000
5	Penambahan karat berikutnya, setiap kelipatan 1 Karat	100.000

d) Tarif Gem Certificate:

No	Kualifikasi Batuan	Rp
1	Stone A	Minimal 150,000, Maksimal 650,000
2	Stone B	Minimal 125,000, Maksimal 400,000
3	Stone C	Minimal 100,000, Maksimal 250,000
4	Stone D	Minimal 80,000, Maksimal 100,000

e) Tarif Re-Checking:

No	Re-Checking	Rp
1	Memo	50.000
2	Certificate	100.000

f) Jasa Lainnya:

- a) Konsultasi dengan tarif Rp 250.000 per konsultasi
- b) Kursus dengan skema tarif sebagai berikut:

No	Jenis Kursus	Lamanya Kursus	Rp
1	Dasar Gemologi	4 x 1,5 jam	500.000
2	Gem Identification Basic	10 x 1,5 jam	4.000.000
3	Gem Identification Advanced	110 x 1,5 jam	7.000.000
4	Special Course	6 x 1,5 Jam	3.000.000

2.g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Pegawai.

Pinjaman Gadai yang bermasalah adalah PYD yang barang jaminannya dijadikan sebagai barang bukti perkara oleh pihak berwajib sampai ada keputusan dari Pengadilan. Nilai yang diakui sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar uang pinjaman yang tercatat dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan dibukukan pada saat barang jaminan diambil oleh pihak berwajib untuk dijadikan sebagai barang bukti perkara di Pengadilan.

Pinjaman fidusia bermasalah adalah pinjaman yang mengalami tunggakan lebih dari 3 bulan tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat di klaim ke pihak asuradur. Dalam hal ini penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk dan akan dipulihkan kemudian setelah Perusahaan berhasil mengeksekusi jaminan fidusia terkait.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pegawai merupakan penyisihan atas piutang TGR kepada pegawai yang sudah mendapatkan SK pembebanan Direksi (tidak termasuk didalamnya Kerugian Perusahaan yang Diperhitungkan (KPYD/K4TGR).

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Untuk pegawai yang masih tercatat sebagai pegawai aktif, ditetapkan penyisihan sebesar 10% per tahun dari saldo piutang tercatat, sedangkan untuk pegawai yang sudah diberhentikan atau meninggal ditetapkan sebesar 100% dari piutang tercatat.

Kebijakan mengenai cadangan kerugian penurunan nilai piutang disajikan pada catatan 2.n.

2.h. Persediaan

Persediaan emas dinilai berdasarkan harga perolehan dan harga pasar.

Persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan dan dicatat sebagai beban pada saat digunakan.

2.i. Aset Tetap

Mengacu ketentuan terbaru standar akuntansi atas aset tetap yang terdapat dalam PSAK 16 (Revisi 2007), Perusahaan menetapkan kebijakan untuk mencatat dan melaporkan aset tetap dengan menggunakan Model Biaya. Atas dasar model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan, kecuali tanah. Aset tetap selain bangunan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), sedangkan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan Permanen	20
Bangunan Tidak Permanen	10
Inventaris	4
Kendaraan Bermotor Roda Dua	4
Kendaraan Bermotor Roda Empat	8

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Laba atau rugi akibat penjualan aset tetap dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pembelian/pengadaan barang inventaris dengan harga satuan senilai Rp 1.000.000,- atau lebih dikapitalisasi, sedangkan bila kurang dari Rp 1.000.000,- dibebankan pada periode berjalan.

Perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya mengubah bentuk/bestek dan memperpanjang umur ekonomis yang nilainya Rp 20.000.000,- atau lebih dikapitalisasi, sedangkan biaya perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya tidak mengubah bentuk/bestek dan tidak memperpanjang umur ekonomis serta hanya bersifat pemeliharaan walaupun nilainya lebih besar dari Rp 20.000.000,- dibebankan pada periode berjalan.

Untuk rehabilitasi ringan yang tidak menambah atau memperpanjang umur ekonomis/masa manfaat dari bangunan yang bersangkutan, diakui sebagai beban umum.

Aset dalam penyelesaian (ADP) merupakan akumulasi biaya material dan biaya lainnya yang terkait dengan aset dalam penyelesaian tersebut. Pada saat aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap untuk digunakan, maka aset dalam penyelesaian dialihkan ke akun aset tetap yang sesuai.

Aset Tetap Yang Dikelola Pihak Lain Dalam Rangka Kerja Sama Operasi (KSO)

Tanah yang diserahkan oleh Perusahaan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dicatat sebagai Aset KSO dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar biaya perolehannya. Aset yang dibangun oleh Mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan Mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Perusahaan mencatat pengalihan Aset yang dibangun oleh mitra KSO sebagai Aset tetap dengan mengkredit pendapatan pengalihan Aset KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut.

2.j. Beban Ditangguhkan

Beban ditangguhkan adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu:

- Beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.
- Beban pengurusan legal hak atas tanah, diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah tersebut. Jenis atas tanah ini adalah hak guna bangunan yang mempunyai masa manfaat selama 20 tahun.
- Biaya RUF (*Revolving Underwriter Facility*) adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman sindikasi seperti biaya *arranger*, komitmen bank dan konsultan hukum/notaris, diamortisasi sepanjang jangka waktu fasilitas pinjaman RUF yaitu lima tahun.

2.k. Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP)

Peraturan mengenai lelang barang jaminan dan pengelolaan Barang Sisa Lelang (BSL) berlaku ketentuan Surat Edaran Direksi No.48/OP.1.00211/2003 dan No.49/OP.1.00211/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi No.44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Barang jaminan yang tidak laku dijual / lelang dibukukan sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP). BLP adalah barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo (barang kasep) dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perusahaan sebesar Harga Limit Lelang (HLL).

BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang Penjual/Pembeli 2% + Uang Miskin 0,7%. Bea Lelang dan Uang Miskin dihitung dari harga yang terbentuk pada saat lelang, yang kemudian disetor ke Kas Negara. Selanjutnya sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah ditetapkan / diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2006 dan Surat Edaran Direksi No. 44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006 setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin 0% atau dengan kata lain lelang tidak dikenakan uang miskin, dengan demikian untuk selanjutnya BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%.

BLP harus terjual dan penjualan dilakukan oleh Panitia Penjualan BLP. Pelaksanaan Penjualan dapat dilakukan oleh Kantor Cabang yang mempunyai harga pasar tertinggi dengan cara di bawah tangan atau dimutasi ke Cabang lain dan dapat dijual dengan cepat.

Harga penjualan ditetapkan sebagai berikut:

- BLP perhiasan emas, harga penjualannya tergantung pada harga yang tertinggi antara harga pasar pusat untuk lelang (HPPL) dan harga pasar daerah untuk lelang (HPPDL)
- BLP non emas, penjualannya ditetapkan minimal sebesar harga pembelian (H.Pb.BLP). Penjualan di bawah harga pembelian (H.Pb) harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Wilayah.

Penjualan BLP di bawah tangan adalah penjualan BLP yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses lelang, apabila di cabang bersangkutan tidak ada calon pembeli, BLP akan dikirim ke cabang lain dengan prosedur yang sama dengan maksud agar memperoleh harga yang paling menguntungkan.

Penjualan BLP diakui pada saat terjadinya pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, jika hasil penjualan BLP lebih tinggi/(rendah) dari harga perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai laba/(rugi) untuk periode berjalan dan dibukukan pada pendapatan/beban lainnya.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

2.1. Penyelesaian PYD Bermasalah

PYD bermasalah adalah pinjaman yang diketahui barang jaminannya ternyata ditaksir terlalu tinggi atau barang jaminannya berupa barang palsu. Setelah diketahui terjadinya kasus ini, maka Pimpinan Wilayah yang bersangkutan membentuk tim yang bertugas melakukan taksasi ulang agar dapat ditentukan nilai pasar wajar yang sebenarnya dari barang jaminan tersebut.

Berdasarkan nilai barang jaminan yang telah ditaksasi ulang, dilakukan pemindahan saldo dari akun PYD ke akun Aset Yang Disisihkan (AYD). Adapun potensi kerugian yang terjadi yaitu sebesar selisih antara nilai Uang Pinjaman (UP) yang Diberikan beserta Sewa Modal (SM) terhadap nilai hasil taksasi akan diproses sebagai beban kepada pegawai yang bertindak sebagai pelaku dalam kasus ini. Sementara menunggu selesainya proses penetapan tuntutan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan jumlah potensi kerugian direklasifikasi dari PYD ke pos Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR).

KPYD adalah kerugian yang ditetapkan sementara akibat taksiran tinggi yang dilakukan oleh pegawai/pelaku tindak kecurangan. Nilai KPYD ditetapkan sebesar Uang Pinjaman + Sewa Modal – AYD. Atas Kerugian Pinjaman YMH Diperhitungkan tidak dilakukan pencadangan karena nilai KPYD akan direklas ke Piutang atas nama pegawai terkait sesuai dengan SK Direksi sehingga resiko kerugian relatif kecil.

Sesuai ketentuan yang berlaku, AYD harus segera dijual dan apabila hasil penjualannya ternyata melebihi nilai taksasi, maka laba atas penjualan AYD tersebut akan mengurangi angka KPYD/K4TGR.

Terhadap AYD, manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian, karena AYD sudah dinyatakan dengan nilai pasar wajarnya.

Setelah dilakukan penetapan ganti rugi, maka selanjutnya saldo Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR) akan dipindahkan ke akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Penyelesaian atas piutang TGR selanjutnya dilakukan melalui pemotongan gaji tiap bulan.

2.m. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja yang diberikan Perusahaan meliputi:

- (1) Pensiun
- (2) Pesangon
- (3) Cuti Besar

Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pegadaian. Pendanaan atas program ini diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai sebesar 4,75% per bulan dan kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 11,75% dari gaji pokok pegawai. Peraturan Dana Pensiun Pegadaian diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. Kp.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 dan No. Kp.2/8/50 tanggal 5 April 1999 dan peraturan ini telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan No. 336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Pesangon

Perusahaan juga memberikan imbalan berupa jumlah *lumpsum* yang diberikan kepada pegawai tetap yang memasuki usia pensiun. Jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan. Peraturan tentang Uang Pesangon Persiapan Pensiun Pegawai (UP4) diatur dalam Peraturan Direksi Perum Pegadaian No.1817/Kp300325/2000 tanggal 6 Juni 2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) dan Surat Direksi No. 6393/SDM.300323/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penjelasan atas SK Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tidak tetap. Ketentuan hak dan besarnya Uang Cuti Besar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 12/SDM.300323/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan pada tahun 2010 diubah melalui Surat Keputusan Direksi No. 3871/SDM.300323/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang cuti pegawai, dan melalui Surat Edaran No. 87/SDM.300323/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Amandemen/Perubahan terhadap Peraturan Cuti Pegawai.

Perusahaan menerapkan PSAK 24 Revisi 2004 untuk mengestimasi beban dan liabilitas yang timbul dari penyelenggaraan kedua program tersebut. Perhitungan estimasi beban dan liabilitas tersebut menggunakan jasa aktuaris independen. Adapun kebijakan akuntansi yang dianut adalah sebagai berikut:

- (1) metode aktuarial yang dipergunakan : *Projected Unit Credit*
- (2) provisi imbalan kerja adalah nilai tunai liabilitas manfaat pensiun dan pesangon dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.
- (3) pengakuan biaya imbalan kerja meliputi biaya jasa kini, biaya bunga, imbalan hasil aset program, keuntungan/kerugian aktuarial, biaya jasa lalu.
- (4) keuntungan dan kerugian aktuarial yang dibebankan adalah jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program.
- (5) tarif diskonto : mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berjangka panjang,
- (6) tarif kenaikan gaji : mengacu pada rata-rata kenaikan berkala gaji pokok terkini,
- (7) usia pensiun : 56 tahun.

Dengan menggunakan acuan kebijakan akuntansi yang sama, Perusahaan juga mengevaluasi kecukupan imbalan jangka panjang yang diberikannya dengan ketentuan imbalan minimum yang wajib diberikan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 "Ketenagakerjaan" pasal 156 dan pasal 167. Apabila nilai imbalan dari kedua program tersebut, kurang dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka selisihnya akan dicatat dan dilaporkan sebagai tambahan beban dan liabilitas imbalan jangka panjang menurut undang-undang.

2.n. Aset dan Liabilitas Keuangan

Pada tahun 2006, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Kedua pernyataan ini menggantikan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Kedua pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.

Dalam rangka penerapan PSAK 50 (Revisi 2006) "Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Pengakuan dan Pengukuran", Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, sebagai berikut:

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- (1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan aset keuangan yang ditetapkan, diakui dalam "keuntungan/kerugian dalam Laporan Laba/Rugi".

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan bank, pinjaman yang diberikan, piutang lainnya dan piutang pihak berelasi.

(3) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

(4) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di saldo laba diakui pada laporan laba rugi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

(1) Liabilitas keuangan dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan diakui dalam "keuntungan/kerugian" dalam Laporan Laba/Rugi.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

- (2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya yang bisa diatribusikan untuk pinjaman bank dan pinjaman lainnya adalah biaya provisi, sedangkan untuk hutang obligasi adalah biaya emisi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi terdiri dari pinjaman bank, pinjaman obligasi, pinjaman bank, pinjaman lainnya, pinjaman pemerintah pusat dan daerah, dan hutang kepada nasabah.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Perusahaan menentukan secara individual jika terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan berupa pelanggaran kontrak pinjaman yaitu tunggakan pokok dan bunga di atas tiga kali tunggakan atau direfleksikan dengan tingkat kolektibilitas kredit macet. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual, maka perhitungan penurunan nilai menggunakan metode *discounted cash flow* dan/atau nilai wajar jaminan. Untuk pinjaman yang diberikan, dalam hal jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali sebesar nilai wajar agunan.

Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai, maka Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Perhitungan secara kolektif dilakukan berdasarkan rata-rata biaya penyisihan aset keuangan selama lima tahun terakhir.

Dampak atas penurunan nilai yang terjadi sebelum penerapan dibebankan pada tahun berjalan karena pemisahan atas dampak tersebut tidak dapat dilakukan oleh Perusahaan.

Sebelum 1 Januari 2010, seluruh pinjaman yang diberikan wajib dibentuk cadangan kerugian yang lebih dikenal dengan istilah "Penyisihan Penurunan PYD" sesuai dengan estimasi manajemen.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*). Sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*offer price*).

Untuk pinjaman yang diberikan dalam hal jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali sebesar nilai wajar agunan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

2.o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pendapatan sewa modal

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan sewa modal usaha gadai, jasa simpan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.

Sejak 1 Januari 2010 pendapatan sewa modal untuk instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk Kreasi, Krasida, Krista dan Kresna) diakui pada Laporan Laba Rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan sebagai persyaratan kredit.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan sewa modal yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan administrasi

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan administrasi seluruh instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk Kreasi, Krasida, Krista dan Kresna) yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi konsolidasian.

Sebelum 1 Januari 2010, seluruh pendapatan administrasi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman diakui secara cash basis sebagai pendapatan sesuai kontrak dan direklasifikasikan sebagai pendapatan administrasi pada laporan laba rugi konsolidasian.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan periode sewa dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

2.p. Pajak Penghasilan

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Seluruh perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (*liability method*). Besarnya Pajak tangguhan ditentukan dengan tarif pajak yang berlaku.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Koreksi

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2.q. Penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 42 dan 43, penggunaan laba Perusahaan Umum (Perum) ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 Bab III Pasal 59 dan 60, penggunaan laba Perum Pegadaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai berikut:

Pasal 59

- Setiap tahun buku, Perum Pegadaian wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan wajar lainnya.
- 45% dari sisa penyisihan laba bersih dipakai untuk cadangan umum sampai mencapai sekurang-kurangnya dua kali lipat dari modal yang ditempatkan, dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan/sumbangan ganti rugi.
- Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 60

- Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan sebagaimana tersebut dalam pasal 59, disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
- Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara, wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara BUMN dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-311/MBU/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian tahun buku 2010.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-362/MBU/2010 tanggal 24 Juni 2010 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian tahun buku 2009.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-383/MBU/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2008.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-487/MBU/2008 tanggal 9 Juni 2008 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2007.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-375/MBU/2007 tanggal 8 Juni 2007 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2006.

Mengacu pada PSAK 24 (Revisi 2004), Manajemen mencatat pembagian jasa produksi dan tantiem sebagai beban pada tahun yang bersangkutan, dan bukan sebagai distribusi laba.

2.r. Informasi Segmen

Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan yang mana entitas beroperasi.

Informasi segmen disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Informasi segmen primer Perusahaan didasarkan pada lokasi geografis aset.

2.s. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Oleh karena adanya ketidakpastian dalam membuat estimasi tersebut, hasil aktual yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. Kas Dan Bank

	2011 Rp	2010 Rp
Kas	283.453.351.010	229.096.974.634
Bank		
PT BRI (Persero) Tbk	133.273.411.735	86.959.080.259
PT Bank Syariah Mandiri	12.612.915.503	8.694.416.296
PT Bank Central Asia Tbk	10.679.316.335	9.379.121.716
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.878.590.195	9.328.254.807
PT BNI 46 (Persero) Tbk	4.608.732.047	7.459.706.843
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	653.987.720	2.030.400.916
PT Bank Bukopin Tbk	603.157.967	341.472.902
PT Bank CIMB Niaga Tbk	276.462.148	176.697.855
PT Bank DKI Syariah	98.540.640	--
PT Bank Permata Tbk	1.733.092	452.344
PT Bank Danamon Tbk	--	206.196
Bank Lainnya di Daerah	7.972.443.364	3.605.539.513
Sub Jumlah	175.659.290.746	127.975.349.647
Jumlah	459.112.641.756	357.072.324.281

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Seluruh kas dan bank tersebut diatas, tidak dibatasi penggunaannya dan tidak ada simpanan yang ditempatkan pada Bank yang berelasi dengan Perusahaan serta dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah.

Seluruh kas tunai (*cash in safe*) dan kas dalam perjalanan (*cash in transit*) telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat perampokan, penodongan dan kehilangan dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

- Kas Tunai (*Cash In Safe*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000 per lokasi per tahun dan Rp 52.675.629.715 total agregat per tahun.
- Kas Dalam Perjalanan (*Cash In Transit*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000 per lokasi per tahun dan Rp 52.675.629.715 per total agregat per tahun.

Selain itu Perusahaan telah mengasuransikan seluruh dana kas termasuk barang jaminan, aset dan barang inventaris Perusahaan yang berada di seluruh kantor Perum Pegadaian dan tempat lain kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat penggelapan/kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawan Perum Pegadaian (*fidelity guarantee/standard* Jasindo) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 500.000.000 setiap kejadian/karyawan/lokasi maksimum Rp 2.500.000.000 per tahun.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

4. Pinjaman Yang Diberikan (PYD)

Merupakan saldo pinjaman yang diberikan kepada nasabah (semuanya dalam mata uang Rupiah) per 31 Desember 2011 dan 2010 yang belum jatuh tempo dan diklasifikasikan berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Usaha Gadaai		
Golongan A	20.968.542.870	27.231.216.900
Golongan B	2.038.498.596.254	611.401.067.400
Golongan C	14.839.906.962.473	12.579.897.238.400
Golongan D	2.966.765.329.487	1.768.426.789.500
Sub Jumlah	19.866.139.431.084	14.986.956.312.200
Usaha Gadaai Syariah		
Marhun Bih Golongan A	863.186.000	806.880.500
Marhun Bih Golongan B	30.885.457.153	27.650.808.500
Marhun Bih Golongan C	1.543.525.233.900	985.269.780.800
Marhun Bih Golongan D	582.402.341.000	183.588.602.000
Sub Jumlah	2.157.676.218.053	1.197.316.071.800
Usaha Lain		
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	1.237.118.776.795	1.667.847.610.004
Kresna	194.496.595.101	180.284.073.891
Mulia	152.807.899.573	25.303.942.085
Kredit Ar-Rum	73.693.887.011	68.825.988.000
KUCICA	16.003.229.968	6.553.489.535
Kredit Tunda Jual Gabah	463.776.000	421.676.000
Gadai Efek	38.400.000	97.400.000
PYD Lainnya	66.331.661	--
Sub Jumlah	1.674.688.896.109	1.949.334.179.515
Jumlah Nilai Nominal	23.698.504.545.246	18.133.606.563.515

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	2011 Rp	2010 Rp
Pendapatan yang Belum Diamortisasi		
PYD Kreasi	47.670.787.807	43.760.597.612
PYD Krasida	3.913.066.099	2.868.317.452
PYD Kresna	11.304.812.205	9.223.302.007
PYD Krista	3.294.560.259	6.500.036.629
	<u>66.183.226.370</u>	<u>62.352.253.700</u>
Jumlah PYD Bruto	<u>23.764.687.771.616</u>	<u>18.195.958.817.215</u>
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PYD		
Kreasi	(26.632.142.956)	(8.263.488.632)
Usaha Gadai	(58.508.682)	--
Krasida	(7.073.613)	(175.088.031)
Kresna	(3.015.505.744)	(1.412.561.516)
Krista	<u>(158.644.654.196)</u>	<u>(107.046.647.360)</u>
	<u>(188.357.885.191)</u>	<u>(116.897.785.539)</u>
Jumlah PYD Bersih	<u>23.576.329.886.425</u>	<u>18.079.061.031.676</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai PYD tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

Kolektibilitas Pinjaman yang Diberikan per 31 Desember 2011 dan 2010 sebagai berikut:

	Tunggakan Angsuran	Umur (Hari)	2011 Rp	2010 Rp
<u>Lancar</u>				
PYD				
Golongan A,B,C, D dan KTJG	--	<120	19.866.603.207.084	14.987.377.988.200
Kresna	Tidak ada	--	190.666.989.411	171.963.878.496
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Tidak ada	--	860.667.505.821	1.236.821.402.216
Gadai Efek	--	<90	38.400.000	97.400.000
Logam Mulia	--	--	152.807.899.573	25.303.942.085
KUCICA	--	--	16.003.229.968	6.553.489.535
Kredit Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	--	--	64.323.062.017	58.106.320.164
PYD Lainnya	--	--	66.331.661	--
Marhun Bih				
Golongan A,B,C, dan D	--	<120	<u>2.157.676.218.053</u>	<u>1.197.316.071.800</u>
			23.308.852.843.588	17.683.540.492.496
<u>Dibawah Pengawasan Khusus (DPK)</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	Satu kali	--	5.276.202.140	5.200.657.591
Kresna	Satu kali	--	1.021.835.003	1.612.464.043
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Satu kali	--	<u>92.023.524.464</u>	<u>138.390.362.226</u>
			98.321.561.607	145.203.483.860
<u>Kurang Lancar (KL)</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	Dua Kali	--	2.398.559.856	2.698.061.346
Kresna	Dua Kali	--	279.293.800	686.824.200
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Dua Kali	--	<u>71.812.286.352</u>	<u>97.208.964.625</u>
			74.490.140.008	100.593.850.171

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	Tunggakan Angsuran	Umur (Hari)	2011 Rp	2010 Rp
<u>Diragukan (DR)</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	3 kali	--	648.419.067	1.660.425.063
Kresna	3 kali	--	77.499.601	262.884.200
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	3 kali	--	16.453.637.711	28.541.976.166
			<u>17.179.556.379</u>	<u>30.465.285.429</u>
<u>Macet</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	>3 kali	--	1.047.643.931	1.160.523.836
Kresna	>3 kali	--	2.450.977.286	5.758.022.952
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	>3 kali	--	196.161.822.447	166.884.904.771
			<u>199.660.443.664</u>	<u>173.803.451.559</u>
Jumlah Nilai Nominal			<u>23.698.504.545.246</u>	<u>18.133.606.563.515</u>

Pinjaman yang diberikan yang memiliki jangka waktu kredit 12 – 36 bulan adalah kredit Kreasi, Krasida dan Krista, untuk Kresna jangka waktu kredit maksimum 36 bulan, Kremada 12 – 24 bulan, dan Investa 90 hari.

Seluruh PYD dijamin oleh barang jaminan bergerak (lebih dari 90% adalah barang jaminan emas/likuid) yang ditaksir berdasarkan nilai wajar, apabila nasabah tidak melunasi pinjaman pada tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang.

Manajemen berpendapat bahwa Barang Jaminan yang diterima atas PYD yang diberikan cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya PYD tersebut.

Untuk pemberian PYD Kreasi dan Krista telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) untuk PYD yang disalurkan sampai dengan 31 Desember 2010 dan kepada PT. Jasindo untuk PYD yang disalurkan mulai Januari 2011 dengan jumlah yang dipertanggungkan sebesar uang pinjaman yang tercantum dalam perjanjian kredit pada saat ditandatangani perjanjian kredit.

Terhadap pemberian PYD Golongan C akan dikenakan biaya notaris, akta fidusia, cek fisik kendaraan bermotor, premi asuransi dan bea materai.

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, KREASI dan KRASIDA dan Gadai Syariah, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian / kerusakan / kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului / tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan / penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 18.900.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 atau Rp 700.000.000.000 selama periode pertanggungan untuk tahun 2011, sedangkan nilai pertanggungan sebesar Rp 14.493.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 60.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun untuk tahun 2010.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah, MULIA dan ARRUM, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian / kerusakan / kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului / tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungkan, perampokan/penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 1.750.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 atau Rp 700.000.000.000 selama periode pertanggungan untuk tahun 2011, sedangkan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.007.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 40.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun untuk tahun 2010.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, KREASI, KRASIDA, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana alam dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp18.900.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 atau Rp 700.000.000.000 selama periode pertanggungan untuk tahun 2011, sedangkan nilai pertanggungan Rp 14.493.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 60.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun untuk tahun 2010.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah, MULIA dan ARRUM, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana alam dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 1.750.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 atau Rp 700.000.000.000 selama periode pertanggungan untuk tahun 2011, sedangkan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.007.000.000.000 batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 60.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun untuk tahun 2010.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode, serta penyisihan yang dibentuk cukup untuk menutupi kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Marhun Bih dijadikan sebagai jaminan atas Pinjaman Bank dan Pinjaman Sindikasi yang diikat secara fidusia.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dengan tingkat kolektibilitas lancar, dibawah pengawasan khusus, dan kurang lancar masih dihitung pendapatan sewa modalnya, sedangkan untuk kolektibilitas diragukan dan macet tidak dikenakan lagi pendapatan sewa modalnya.

5. Piutang Lainnya

	2011 Rp	2010 Rp
Klaim Asuransi	9.739.207.181	8.872.436.264
Piutang Pegawai	2.239.100.316	4.144.918.997
Lain-lain	4.345.628.250	602.510.292
Jumlah	16.323.935.747	13.619.865.553

Piutang Klaim Asuransi merupakan piutang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berkenaan dengan pengajuan klaim atas penggantian kerugian terhadap barang jaminan dan klaim atas kerugian kredit dan Syariah yang masih dalam proses terhadap barang jaminan.

Piutang Pegawai merupakan pinjaman beberapa karyawan untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang tidak mendapat penggantian asuransi kesehatan yang akan diperhitungkan pada periode berikutnya bersamaan dengan pembayaran gaji karyawan.

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain seluruhnya lancar sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai piutang, beban penyisihan dan penghapusan piutang.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

6. Persediaan

	2011 Rp	2010 Rp
Persediaan Emas	3.731.525.564	16.429.198.079
Persediaan Barang	26.870.880.200	32.474.964.994
Jumlah	30.602.405.764	48.904.163.073

Saldo persediaan emas per 31 Desember 2011 dan 2010 merupakan persediaan emas MULIA pada unit Pegadaian 24.

Persediaan barang meliputi blanko Surat Bukti Kredit (SBK), jarum uji emas, kantong, barang cetak, alat tulis kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan komputer, prangko dan meterai.

Manajemen berpendapat bahwa untuk persediaan non emas tidak perlu diasuransikan, sedangkan untuk persediaan emas telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 110.000.000.000 pada tahun 2011. Perusahaan tidak memperhitungkan penyisihan atau penghapusan persediaan rusak atau usang dan tidak ada persediaan yang dijaminan serta tidak ada kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa selama periode pelaporan.

7. Uang Muka

	2011 Rp	2010 Rp
Uang Muka Dividen	150.000.000.000	120.000.000.000
Uang Muka Dinas	7.504.197.636	4.227.140.940
Uang Muka Lainnya	40.034.612	277.987.920
Jumlah	192.266.904.748	124.505.128.860

Uang muka dividen per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah pembayaran uang muka dividen berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN No. S-581/MBU/2011 tanggal 1 Nopember 2011 dan No. S-796/MBU/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal setoran Dividen Interim Tahun 2011 dan 2010, yang diperhitungkan dengan pembayaran dividen tahun 2011 dan 2010.

Uang muka dinas merupakan uang muka pembayaran atas transaksi pengeluaran yang sudah ada otorisasinya namun belum dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap, yang akan dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya, sesuai dengan Surat Edaran Direksi No.06/TR.4.00.100/2005 tanggal 21 Maret 2005.

8. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Merupakan saldo pendapatan sewa modal dan jasa simpan (ljarah) yang masih harus diterima per 31 Desember 2011 dan 2010 terdiri dari:

	2011 Rp	2010 Rp
Usaha Gadaai		
Sewa Modal Golongan A	726.360.094	916.619.967
Sewa Modal Golongan B	109.403.483.133	32.422.330.463
Sewa Modal Golongan C	795.031.208.045	701.556.139.065
Sewa Modal Golongan D	129.357.043.776	75.874.825.087
Sub Jumlah	1.034.518.095.048	810.769.914.582

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	2011 Rp	2010 Rp
Usaha Syariah		
Ijarah Golongan A	30.344.176	26.030.996
Ijarah Golongan B	1.542.516.288	1.359.782.172
Ijarah Golongan C	81.884.441.344	57.422.735.382
Ijarah Golongan D	18.491.202.574	177.864.372
Sub Jumlah	101.948.504.382	58.986.412.922
Usaha Lain		
Sewa Modal Gadai Efek	746.667	2.379.125
Ijarah Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	1.009.315.295	1.083.949.589
Sewa Modal Kresna	787.324.265	3.004.374.780
Sewa Modal Kreasi, Krasida, dan Kremada	20.112.024.096	18.125.339.385
Sewa Modal Krista	19.676.255.192	9.566.474.285
Sewa Modal Lainnya	471.855.663	206.494.888
Sub Jumlah	42.057.521.178	31.989.012.052
Jumlah	1.178.524.120.608	901.745.339.556

Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa modal yang masih harus diterima dapat terealisasi.

9. Beban Dibayar di Muka

	2011 Rp	2010 Rp
Sewa Gedung Kantor	72.414.102.750	46.687.489.030
Asuransi Dibayar Dimuka	11.543.861.914	10.711.112.049
Lain-lain	103.335.000	81.861.805
Jumlah	84.061.299.664	57.480.462.884

Sewa gedung kantor dibayar di muka merupakan pembayaran biaya sewa gedung kantor lama yang diperpanjang dan diamortisasi selama umur sewa.

Asuransi dibayar dimuka meliputi biaya asuransi barang jaminan dan aset tetap.

10. Piutang Kepada Pihak-Pihak Berelasi

	2011 Rp	2010 Rp
Piutang TGR	17.961.010.535	13.761.385.720
Piutang Lainnya	26.511.700	4.844.800
Sub Jumlah	17.987.522.235	13.766.230.520
Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai	(15.169.617.078)	(12.684.002.656)
Jumlah	2.817.905.157	1.082.227.864

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Piutang TGR merupakan piutang kepada karyawan Perusahaan berdasarkan penetapan Direksi atas sanksi tuntutan ganti rugi akibat tindak kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Piutang lainnya merupakan kekurangan kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh manajer cabang dan pengelola kantor cabang pembantu.

Selama tahun 2011 dan 2010, Manajemen membentuk tambahan penyisihan masing-masing sebesar Rp 2.485.614.422 dan Rp 394.064.470 berkenaan dengan piutang TGR yang sudah sulit untuk ditagih kembali karena para pegawai yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penyisihan piutang pegawai cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. Selain mengajukan Tuntutan Ganti Rugi kepada manajer cabang/karyawan kunci, juga melakukan upaya hukum berupa tuntutan pidana/perdata atau sanksi pemecatan atau skorsing akibat kelalaian atau kesalahan dalam operasional.

11. Aset Tetap

	31 Desember 2011				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan :					
Hak atas Tanah	132.282.556.318	14.435.643.373	--	369.208.305	147.087.407.996
Kepemilikan Langsung:					
Bangunan	405.201.133.631	8.507.591.243	100.000	33.135.647.289	446.844.272.163
Inventaris	315.204.635.923	18.617.070.916	7.650.000	35.536.457.181	369.350.514.020
Kendaraan	42.669.185.142	--	--	(367.112.641)	42.302.072.501
Aset Dalam Penyelesaian:					
Bangunan	11.541.948.073	41.371.068.046	186.035.300	(38.423.457.995)	14.303.522.824
Aset yang Belum Digunakan	28.815.926.674	15.784.174.897	--	(32.168.604.788)	12.431.496.783
Jumlah Harga Perolehan	935.715.385.761	98.715.548.475	193.785.300	(1.917.862.649)	1.032.319.286.287
Akumulasi Penyusutan :					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan	174.874.086.837	20.272.117.295	--	50.619.153	195.196.823.285
Inventaris	214.843.571.981	66.921.373.586	--	(2.621.634.562)	279.143.311.005
Kendaraan	37.583.990.724	2.376.328.205	--	(789.165.082)	39.171.153.847
	427.301.649.542	89.569.819.086	--	(3.360.180.491)	513.511.288.137
Nilai Buku	508.413.736.219				518.807.998.150

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	31 Desember 2010				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan :					
Hak atas Tanah	125.619.238.565	6.663.317.753	--	--	132.282.556.318
Kepemilikan Langsung:					
Bangunan	382.960.653.590	1.290.051.800	4.800.000	20.955.228.241	405.201.133.631
Inventaris	236.310.184.199	34.440.734.373	29.699.700	44.483.417.051	315.204.635.923
Kendaraan	43.188.919.513	--	--	(519.734.371)	42.669.185.142
Aset Dalam Penyelesaian:					
Bangunan	5.768.911.119	25.662.513.032	--	(19.889.476.078)	11.541.948.073
Aset yang Belum Digunakan	29.076.467.676	--	--	(260.541.002)	28.815.926.674
Jumlah Harga Perolehan	822.924.374.662	68.056.616.958	34.499.700	44.768.893.841	935.715.385.761
Akumulasi Penyusutan :					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan	156.391.513.213	18.621.454.932	138.881.308	--	174.874.086.837
Inventaris	159.050.544.863	59.063.308.014	3.270.280.896	--	214.843.571.981
Kendaraan	35.462.096.344	2.174.976.728	53.082.348	--	37.583.990.724
	350.904.154.420	79.859.739.674	3.462.244.552	--	427.301.649.542
Nilai Buku	472.020.220.242				508.413.736.219

Jenis Aset Tetap yang dijual termasuk nilai buku dan laba rugi yang diperoleh untuk masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Nilai Buku		
Tanah dan Bangunan	61.218.786	149.604.168
Inventaris	22	9.237.230
Jumlah	61.218.808	158.841.398
Hasil Penjualan		
Tanah dan Bangunan	183.495.008	4.800.000
Inventaris	57.244.306	20.518.316
Jumlah	240.739.314	25.318.316
Laba Penjualan (Catatan 35)		
Tanah dan Bangunan	122.276.222	(145.804.168)
Inventaris	57.244.284	11.281.081
Jumlah	179.520.506	(134.523.087)

Aset Dalam Penyelesaian Bangunan yang sudah selesai dan siap untuk digunakan telah direklasifikasi menjadi Aset Tetap - Bangunan Kepemilikan Langsung pada tahun 2011 dan 2010.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Aset dalam penyelesaian per 31 Desember 2011 dan 2010 terdiri dari:

Per 31 Desember 2011				
No	Keterangan	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Seharusnya Jadwal Selesai
1	Kanwil Jakarta I			
	Pembanguna Ruko CPP Pancoran Mas	706.158.000	95%	30 Maret 2011
2	Kanwil Manado			
	Pembangunan rumah dinas Karbas	284.658.000	95%	31 Januari 2012
3	Kanwil Palembang			
	Pembangunan gedung Kantor dan prasarana CPP Curup	235.996.500	50%	11 Maret 2012
	Pembangunan ruko CPP Panorama	520.000.000	95%	26 Januari 2012
4	Kanwil Surabaya			
	Pembangunan asrama Balai Diklat Surabaya	3.077.499.000	95%	10 Januari 2012
5	Kantor Pusat	3.069.238.000	95%	30 April 2012
6	Kanwil Pekanbaru			
	Pembangunan Gedung CPP Bagansiapiapi	930.936.000	50%	15 april 2012
	Pembangunan CPP Carina	287.702.000	50%	20 Maret 2012
	Pembangunan CPP Batam Sei Jodoh	330.370.000	95%	26 Januari 2012
	Pembangunan CPP Muka Kuning	244.179.000	50%	27 Maret 2012
	Pembangunan CPP Tanjungpinang Timur	249.485.000	25%	28 Maret 2012
	Pembangunan CPP Tanjung Pinang	248.924.000	50%	28 Maret 2012
7	Lain-lain (masing-masing dibawah 200jt)	4.118.377.324		
	Jumlah	14.303.522.824		
Per 31 Desember 2010				
No	Keterangan	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Seharusnya Jadwal Selesai
1	Kanwil Bandung			
	Renovasi rumah dinas CPP Cikudapateuh	226.058.750	84,22%	17 April 2011
2	Kanwil Balikpapan			
	Renovasi Gedung CPP Palangkaraya*	--	75%	12 Desember 2010
3	Kanwil Jakarta X			
	Pembangunan gedung & prasarana Tj Periuk	344.300.750	87%	30 Maret 2011
4	Kanwil Surabaya			
	Pembangunan gedung Diklat	1.587.058.100	71,25%	27 Maret 2011
5	Pembangunan Aplikasi	2.392.500.000	30%	30 Agustus 2011
6	Lain-lain (Masing-masing dibawah 200 juta)	6.992.030.473		
	Jumlah	11.541.948.073		

Seluruh kantor/gedung/bangunan milik sendiri atau yang disewa oleh Perusahaan dan Entitas Anak serta kantor afiliasinya yang berada di seluruh wilayah Indonesia beserta inventaris kantor yang berada didalamnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru-hara dan bencana alam dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 370.130.266.000 dan Rp 350.789.412.503 pada tahun 2011 dan 2010.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat kecelakaan, dan pencurian/kejahatan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 22.897.976.460 dan Rp 22.513.500.000 di tahun 2011 dan 2010.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset dalam penyelesaian.

12. Aset Lain-lain

	2011 Rp	2010 Rp
Beban Ditangguhkan Biaya Pembukaan Cabang Baru	23.936.447.174	68.297.064.548
Barang Jaminan Yang Disisihkan	27.654.018.959	20.655.048.177
Kerugian Perusahaan YMH Diperhitungkan (KPYD)	27.695.863.300	14.184.859.384
Barang Lelang Milik Perusahaan	3.490.240.212	5.152.521.926
Beban Hak Atas Tanah yang Ditangguhkan	4.833.951.063	4.280.741.709
Tanah Kerja Sama Operasi	1.406.071.181	1.406.071.181
Aset Lainnya	--	3.299.104.451
Jumlah	89.016.591.889	117.275.411.376

Beban ditangguhkan biaya pembukaan cabang baru adalah biaya atas sewa gedung kantor dan renovasinya, dan akan diamortisasi sebagai beban amortisasi pembukaan cabang baru selama masa sewa. Setiap tahun Perusahaan terus menambah jaringan usaha dengan membuka sejumlah kantor cabang dan unit pelayanan cabang diseluruh wilayah operasi Perusahaan sehingga menyebabkan tambahan kebutuhan biaya pembukaan cabang baru.

Beban hak tanah atas yang ditangguhkan adalah biaya perolehan hak atas tanah yang diamortisasi setiap tahun selama masa manfaatnya.

Saldo Tanah Kerja Sama Operasi merupakan harga perolehan tanah yang diserahkan oleh Perusahaan Kepada Mitra KSO untuk dibangun dan dikelola sesuai dengan perjanjian yaitu KSO tanah Cimahi dan KSO Salemba.

13. Pinjaman Bank

	2011 Rp	2010 Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.942.916.298.599	4.931.890.157.369
PT BRI (Persero) Tbk	4.858.401.153.540	4.246.385.408.518
PT Bank BNI (Persero) Tbk	2.940.585.172.691	1.480.851.937.402
PT Bank Central Asia Tbk	2.033.657.180.544	2.026.810.065.749
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	343.232.757.769	184.546.551.183
PT Bank Permata Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000
PT Bank DKI Syariah	175.000.000.000	--
PT Bank Permata Syariah	100.024.771.267	--
Jumlah	16.593.817.334.410	13.070.484.120.221

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pinjaman modal kerja pertama kali diberikan dengan plafon Rp 300.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 21 Februari 2003 yang dibuat di hadapan notaris Raharti Sudjardjati, S.H. Fasilitas pinjaman dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari plafon kredit.

Pada tahun 2009, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.17 yang dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH, M.Kn, nilai fasilitas pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000.

Pada tahun 2009 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit I Nomor: KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 21 April 2008 Akta Perjanjian Kredit No. 281 dan diganti dengan Perjanjian Kredit No.CBG.CBI.SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 nilai plafonnya menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit adalah 12 bulan sampai dengan 20 Februari 2010 dan tingkat bunga 13% per tahun (*reviewable*).

Pada tahun 2010 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit No.CBG.CBI/SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang telah di aktakan dengan Akta No.17 diganti dengan Perjanjian Kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 19 Februari 2010 dan selanjutnya diganti dengan perjanjian kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 9 April 2010 yang diaktakan dengan Akta Perjanjian Kredit No.6 nilai plafon ditingkatkan menjadi Rp 5.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit 12 bulan sampai dengan 20 Februari 2011 dan tingkat bunga 10,25% per tahun (*reviewable*).

Berdasarkan surat Bank Mandiri No.CBG.CB1/343/2010 tanggal 8 Desember 2010, tingkat bunga pinjaman menjadi sebagai berikut:

1. Sampai dengan baki debet sebesar Rp 4.590.940.000.000 dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun
2. Atas baki debet sebesar Rp 100.000.000.000 yang ditarik pada tanggal 12 Nopember 2010 dikenakan suku bunga 8,5% per tahun
3. Untuk penarikan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 200.000.000.000 akan dikenakan suku bunga 8,25% per tahun

Terdapat addendum V atas perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No: KC-CRO/016/PK-KMK/2008, No. 281 tanggal 21 April 2008 dan terakhir addendum VI dengan Akta No: TOP.CRO/CLA.51/ADD/2011 tanggal 18 Februari 2011, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja. Limit Fasilitas : Rp 5.500.000.000.000 , Jenis kredit : Kredit Modal Kerja, Sifat : Revolving, Jangka Waktu : 21 Februari 2011 - 20 Februari 2012, Provisi : 0,25% p.a. dari limit. Suku Bunga terdiri dari:

- Untuk baki debet > Rp 300 M - Rp 5,5 T = 10,00% p.a.
- Untuk baki debet Rp 100 M yang ditarik tanggal 12 Nopember 2010 = 8,50% p.a.
- Atas penarikan KMK Rp 200 M yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2010 = 8,25% p.a.

Mengacu perjanjian kredit yang dituangkan dalam akta No. 17 tanggal 16 Maret 2009 pasal 17 ayat 7, Perusahaan wajib :

- Memelihara *current ratio* di atas 110%.
- Memelihara total pinjaman maksimal tujuh kali modal sendiri.
- Melapor kepada bank apabila :
 - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan liabilitas yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
 - Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dijaminakan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.
 - Melunasi hutang kepada pemilik modal.
 - Memindahtangankan barang jaminan.
 - Membagikan dividen.
 - Mengubah susunan Direksi atau Dewan Pengawas dan melampirkan Surat Keputusan Menteri.
 - Membagikan laba sesuai penetapan Menteri.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Jaminan piutang lancar Perusahaan terhadap debiturnya yang diikat Fidusia sebesar Rp 5.500.000.000.000 *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan atas tambahan fasilitas KMK.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2011 dan 2010 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2011	2010
KMK I	9.50%	10.00%
KMK II	9.50%	8.50%
KMK III	9.50%	8.25%

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/K) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat dihadapan notaris Raharti Sudjardjati SH, fasilitas pinjaman dengan plafon sebesar Rp 300.000.000.000 tersebut berbunga 13% per tahun (*reviewable*) dan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2006. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai sebesar Rp 300.000.000.000.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 8 April 2009 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan, SH, plafon pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 3.500.000.000.000 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Februari 2010. Pinjaman tersebut dijamin dengan secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai jaminan sebesar Rp 3.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebagai berikut:

1. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) ditambah 3,25% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar atau lebih dari Rp 2.800.000.000.000.
2. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 3,50% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar Rp 2.300.000.000.000 sampai dengan Rp 2.800.000.000.000.
3. Sebesar SBI 1 (satu) bulan ditambah 3,75% per tahun. jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan kurang dari Rp 2.300.000.000.000.

Pada tahun 2010, plafon pinjaman dinaikkan kembali menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 30 Maret 2010, dan jatuh tempo tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat di hadapan notaris Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, SH, MM, MHum. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun.

Pada tahun 2011, berdasarkan akta No.18 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat di hadapan notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. BRI memberikan tambahan (suplesi) kredit atas Fasilitas KMK sebesar Rp 500 M menjadi Rp 5 T (sebelumnya Rp 4,5 T) selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 Februari 2011 - 28 Februari 2012. Selain itu terdapat perubahan suku bunga atas perpanjangan tersebut yang semula 10% turun menjadi 9,5%.

Mengacu perjanjian kredit pasal 10, Perusahaan wajib :

- Mempergunakan kredit yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, fasilitas KMK hanya dipergunakan untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi lainnya.
- Membayar bunga dan denda bunga yang telah ditentukan apabila setelah perjanjian kredit ini berakhir debitur menunggak atau fasilitas kredit dihentikan secara sepihak oleh pihak kreditur.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.
- Membayar pajak, biaya-biaya dan ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

- Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan administrasi pembukuan dan kondisi Perusahaan oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk kreditur.
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit Perusahaan.
- Menyimpan surat bukti kepemilikan jaminan sampai kreditnya lunas.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2011 dan 2010 atas fasilitas diatas adalah sebagai berikut :

Nama Fasilitas Pinjaman	2011	2010
KMK	9.50%	10.00%

c. **PT Bank BNI (Persero) Tbk**

Fasilitas pinjaman dari PT Bank BNI (Persero) pertama kali diperoleh pada tahun 2010, berdasarkan Akta Perjanjian No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 400.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dan suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan dari Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5%, dan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH disepakati penambahan plafon pinjaman menjadi sebesar Rp 2.600.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan di 4 Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5% sehingga menjadi 8,5% p.a, jatuh tempo tanggal 14 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadap notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH, Perusahaan memperoleh pinjaman kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 400.000.000.000 dan berdasarkan surat nomor KPS/2.4/266/R tentang persetujuan pemberian penambahan pemberian fasilitas kredit sebesar Rp 2.600.000.000.000 menjadi Rp 3.000.000.000.000. Jangka waktu kredit tersebut 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Fasilitas kredit berjalan atau sampai dengan tanggal 14 April 2011. Untukmaksimum fasilitas sampai dengan Rp 1.250.000.000.000, tingkat suku bunga ditetapkan berdasarkan rata-rata suku bunga deposito berjangka 12 bulan di empat bank (BRI,Mandiri,BNI,BCA) dan untuk fasilitas Rp 250.000.000.000 ditetapkan sebesar 8,5% p.a dan akan direview setiap saat.

Pada tanggal 31 Maret 2011 telah ditandatangani surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(2) 13 dengan maksimum plafon Rp 2.600.000.000.000 dengan bunga 8,5% p.a yang diperpanjang selama 12 bulan sejak jatuh tempo terhitung sejak tanggal 15 Januari 2011 s.d. 14 Januari 2012.

Pada tanggal 31 Maret 2011 terdapat surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (2) 08 yang berisi bahwa para pihak yang berkaitan setuju untuk mengadakan perubahan atas Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH dengan maksimum plafon Rp 400.000.000.000 sebagaimana telah diubah dengan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (1) 08 tanggal 12 Januari 2011. Perubahan tersebut termasuk perpanjangan masa kredit selama 12 bulan terhitung sejak 15 Januari 2011 sampai dengan 14 Januari 2012, termasuk perpanjangan sementara selama 3 bulan sejak jatuh tempo atau sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan 14 April 2011.

Berdasarkan surat Bank BNI No. KP5/2.4/1420/R tanggal 1 Oktober 2010 terdapat perubahan suku bunga sebagai berikut:

1. KMK sebesar Rp 1.250.000.000.000 suku bunga 9,5% per tahun
2. KMK sebesar Rp 1.750.000.000.000 suku bunga 8,5% per tahun

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 20, Perusahaan wajib :

- Memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimum 10 kali dan *current ratio* maksimum 1 kali.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

- Membayar seluruh liabilitas pajak, retribusi dan biaya lain yang dikenakan pemerintah.
- Menyerahkan Laporan Keuangan berupa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi setiap 3 bulan.
- Menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang telah disetujui Bank.
- Menyerahkan daftar tagihan kepada pihak ketiga secara periodik (triwulan).
- Melapor kepada bank apabila :
 - Adanya perkara yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, yang terjadi antara Perusahaan dengan pihak lain.
 - Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan Perusahaan serta barang agunan yang mempengaruhi kelangsungan usaha.
 - Adanya pengurus Perusahaan yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan.
 - Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perusahaan.
 - Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan Perusahaan untuk melunasi hutangnya.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2011 dan 2010 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2011	2010
KMK I (Rp 1,250 M)	9.44%	9.50%
KMK II (Rp 1,750 M)	8.50%	8.50%

d. **PT Bank Central Asia Tbk**

Fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 26 Juni 2000, yang dibuat di hadapan notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 50.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga 16% per tahun (*reviewable*), jatuh tempo tanggal 26 Juni 2001. Sejak tahun 2006 nilai fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas kredit lokal dan *time loan revolving* diubah menjadi sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	Rp 100.000.000.000	24 Juni 2010
<i>Time Loan Revolving</i>	Rp 1.200.000.000.000	24 Juni 2010

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.21 tanggal 23 Juli 2010 tentang Perubahan Kesepuluh atas Perjanjian Kredit No.21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat dihadapan notaries Ny Erly Soehandjojo, SH, menerangkan fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal (Rekening Koran)	Rp 100.000.000.000	26 Juni 2011
<i>Time Loan Revolving</i>	Rp 1.500.000.000.000	26 Juni 2011

Fasilitas *Money Market Loan* dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH, di Jakarta dan telah dilakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.33 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Erly Soehandjojo SH fasilitas *money market* loan diubah plafonnya menjadi Rp 500.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 24 Juni 2010.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 23 Juli 2010 tentang perubahan ketujuh atas Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Erly Soehandjojo S.H. di Jakarta menerangkan bahwa Perum Pegadaian telah menerima fasilitas pinjaman berjangka *Money Market* dengan plafon Rp 500.000.000.000 dan mengubah batas waktu pemberian fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 26 Juni 2010 dan berakhir tanggal 26 Juni 2011.

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang perubahan kesembilan atas perjanjian kredit No. 21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat dihadapan notaries Ny. Erly Soehandjojo yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan perubahan kedelapan atas perjanjian kredit No. 179/Add-KCK/2009 tanggal 17 Juli 2009 menerangkan fasilitas PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	100.000.000.000	26 Juli 2012
<i>Time loan Revolving</i>	1.500.000.000.000	26 Juli 2012

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 11, Perusahaan wajib memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimum 7 kali dan *current ratio* maksimum 1 kali.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2011 dan 2010 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2011	2010
Kredit Lokal	9.50%	10.50%
<i>Time loan</i>	8.75%	9.50%
<i>Money Market Loan</i>	8.25%	8.25%

Risiko barang jaminan ditanggung oleh Perum Pegadaian karena barang jaminan milik nasabah berada/disimpan oleh Perum Pegadaian. Apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah, penanggungjawabnya adalah Perum Pegadaian dan barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian, sebagaimana diperlakukan terhadap barang jaminan nasabah usaha gadai lainnya.

e. PT Bank Syariah Mandiri

Fasilitas pembiayaan musyarakah dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk pertama kali diterima tahun 2007 berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 22 Pebruari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH, nilai fasilitas Rp 50.000.000.000 jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2008, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nasabah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 56% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 44% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH, nilai fasilitas dinaikan menjadi Rp 100.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Maret 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nasabah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 40% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.3 tanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH nilai fasilitas diganti menjadi Rp 200.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Desember 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 63,26% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 36,74% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Pada tanggal 9 Desember 2010, berdasarkan Surat Penegasan No. 12/240/060/SPPA atas Addendum Akad Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar No. 12/411/060/AL-MUSYARAKAH, Bank menyetujui perpanjangan jangka waktu pembiayaan sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011.

Pada tanggal 25 Pebruari 2011, berdasarkan Perjanjian No.13/042060/SPPP menyatakan bahwa terdapat Perubahan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Perusahaan untuk cabang syariah mengenai perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan dari tanggal akad perjanjian dan penambahan pembiayaan modal kerja dari semula sebesar Rp 200.000.000.000 menjadi Rp 350.000.000.000.

Semua fasilitas yang jatuh tempo tahun 2011 tidak dilunasi, tetapi telah diperpanjang dengan beberapa yang ditambah fasilitas plafonnya. Apabila terdapat penurunan saldo hutang bank, penurunan saldo tersebut bukan merupakan pelunasan hutang, namun merupakan penempatan kelebihan likuiditas/penurunan sementara pinjaman perbankan, sebelum dipergunakan sebagai modal kerja pada bulan-bulan berikutnya secara bertahap.

f. PT Bank Permata Tbk

Fasilitas pinjaman (ketentuan khusus atau fasilitas *Overdraft*) dari PT Bank Permata Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 12 tanggal 25 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., M.Kn. Fasilitas dengan plafon sebesar Rp 100.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit dengan suku bunga pinjaman sebesar 10,25% dan jatuh tempo pada tanggal 25 Pebruari 2011.

Fasilitas pinjaman *Money Market* dari PT Bank Permata Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 25 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH., M.Kn dengan plafon sebesar Rp 200.000.000.000 dengan tingkat bunga 36% p.a dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit dan suku bunga yang berlaku ditetapkan oleh Bank yang disepakati semua pihak, dan jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2011.

Pada tanggal 25 April 2011, dibuat Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. MM/11/521/AMD/NBFI yang berisi bahwa para pihak terkait telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Money market tertanggal 25 Pebruari 2010 No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah SH, yang terakhir dirubah dengan Perubahan perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) tertanggal 24 Pebruari 2011. No. MM/11/253/AMD/FI berupa pemberian Fasilitas *Money Market* dari Bank Permata kepada Pegadaian sebesar Rp 200.000.000.000 berupa pemberian Fasilitas *Money Market* untuk jumlah tidak melebihi Rp 75.000.000.000. Jangka waktu Fasilitas *Money Market* akan berakhir pada 24 April 2011.

Pada tanggal 14 Juli 2011 telah dilakukan penandatanganan akad musyarokah no 19 tanggal 14 Juli 2011 dengan notaris Ny. Sjarmaeni S. Chandra, SH dengan fasilitas sebesar Rp 300.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatnganinya akad tersebut.

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 6, Perusahaan wajib :

- Menyerahkan Laporan posisi keuangan dan perhitungan Laba Rugi kepada Bank dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank.
- Menyerahkan Laporan Keuangan audit yang sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

- Melaporkan informasi keuangan dan lain-lain informasi mengenai kondisi atau operasi Perusahaan bila diperlukan atau diminta oleh Bank.
- Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum.
- Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank yang layak untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perusahaan dan memeriksa/mengaudit Perusahaan.
- Melapor kepada bank apabila :
 - Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Perusahaan yang nilainya minimal 10% dari nilai ekuitas Perusahaan.
 - Perusahaan melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan memperoleh sebagian besar asset atau saham dari Perusahaan lain atau bentuk usaha lain.
 - Melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Perusahaan.
 - Melakukan perubahan sifat dan kegiatan usaha Perusahaan.

Suku bunga rata-rata selama tahun 2011 dan 2010 atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2011	2010
MML I	8.75%	8.50%
MML II	8.75%	8.50%
MML III	8.75%	8.50%

g. PT Bank DKI Syariah

Fasilitas pinjaman musyarakah dari PT Bank DKI Syariah pertama kali diperoleh pada tahun 2011. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No.43 tanggal 20 September 2011, yang dibuat dihadapan notaris Dinah, SH. Fasilitas dengan plafon Rp 200.000.000.000,- dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan.

Fasilitas pinjaman yang diberikan bersifat *revolving* dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad dan akan berakhir pada tanggal 20 September 2012. Adapun nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

- Sebesar 68.52% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
- Sebesar 31.48% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Sesuai akad, hal-hal yang harus dipenuhi oleh Perusahaan selama fasilitas kredit adalah:

- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka Perusahaan akan dikenakan denda sebesar kerugian riil yang ditanggung oleh pihak bank dan denda sebesar 1.5% dari nisbah bagi hasil, dan akan disetorkan untuk dana kebajikan (infaq/shodaqoh/sosial).
- Menyalurkan transaksi keuangannya melalui rekeningnya di kreditur.
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit Perusahaan.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.
- Apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usaha, kerugian akan ditanggung bersama oleh para pihak secara proporsional sebesar porsi modal para pihak yang digunakan, namun tidak termasuk kerugian yang timbul akibat dari kesalahan yang disengaja oleh Perusahaan.

Mengacu pada akad pasal 12 ayat 2, Perusahaan wajib:

- Jaminan yang diberikan oleh *end user*/rahin kepada Bank harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pinjaman yang diberikan kepada rahin tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- Jaminan tagihan/piutang yang diagunkan kepada Bank adalah piutang dengan kolektibilitas yang lancar.
- Menyalurkan dana yang berasal dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah.
- Menjaga kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada rahin.
- Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* semesteran paling lambat 60 hari setelah akhir laporan, dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat 180 hari setelah akhir periode laporan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

- Memberitahukan kepada Bank apabila memperoleh pinjaman/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya.
- Mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank apabila akan mengajukan pinjaman/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya, yang dapat mengakibatkan *Debt to Equity Ratio* melampaui 10 kali.
- Menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum 10 kali dan menjaga tingkat *Non Performing Loan Gross* maksimal 5%.
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan pengurus (Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) ataupun Anggaran Dasar Perusahaan.
- Berliabilitas menjaga kualitas, reputasi, itikad baik, dan kualitas organisasi.
- Memberikan kuasa kepada Bank untuk memindahkan/mendebit dana dari rekening giro/pinjaman/deposito atas nama Perusahaan untuk pembayaran liabilitas-liabilitas kepada Bank.
- Melakukan pembaharuan/perpanjangan atas dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo dan melaporkan atau menyerahkan copy dokumen terkini kepada Bank.

h. PT Bank Permata Syariah

Fasilitas pinjaman musyarakah dari PT Bank DKI Syariah pertama kali diperoleh pada tahun 2011. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No.43 tanggal 20 September 2011, yang dibuat dihadapan notaris Dinah, SH. Fasilitas dengan plafon Rp 200.000.000.000,- dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan.

14. Utang Medium Term Notes (MTN)

	2011 Rp	2010 Rp
Jangka Pendek:		
Medium Term Notes Syariah Ijarah I	425.000.000.000	--
Jangka Panjang:		
Medium Term Notes II	240.000.000.000	--
Jumlah	665.000.000.000	--

Utang Syariah Ijarah

Fasilitas pinjaman dari PT Mandiri Sekuritas, yang kemudian diberi nama *Medium Term Notes* (MTN) Syariah Ijarah I pertama kali diterbitkan pada tahun 2011, berdasarkan Akta Perjanjian No. 42 tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Perum Pegadaian akan diterbitkan dalam beberapa tahap, dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan pada masing-masing tahap MTN Syariah Ijarah I, dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai akad, maka Perusahaan akan dikenakan Cicilan Imbalan Ijarah, yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima Perusahaan yang pembayarannya dilakukan pada setiap tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing tahap.

Hingga tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp 425.000.000.000,- yang dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

1. MTN Syariah Ijarah I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap I dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp100.000.000.000,-.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

MTN Syariah Ijarah I Tahap I berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 03 September 2012.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap I adalah sebesar Rp8.581.944.444,- yaitu 8,35% dari pinjaman, yang pembayarannya diatur sebagai berikut:

<u>Cicilan Imbalan Ijarah</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah yang dibayarkan</u>
Tahap I	23 Nopember 2011	Rp2.087.500.000,-
Tahap II	23 Pebruari 2011	Rp2.087.500.000,-
Tahap III	23 Mei 2012	Rp2.087.500.000,-
Tahap IV	03 September 2012	Rp2.319.444.444,-

2. MTN Syariah Ijarah I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap II dilakukan pada tanggal 27 September 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 125.000.000.000.

MTN Syariah Ijarah I Tahap II berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 07 Oktober 2012.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap II adalah sebesar Rp10.277.777.778,- yaitu 8% dari pinjaman, yang pembayarannya diatur sebagai berikut:

<u>Cicilan Imbalan Ijarah</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah yang dibayarkan</u>
Tahap I	27 Desember 2011	Rp2.500.000.000,-
Tahap II	27 Maret 2012	Rp2.500.000.000,-
Tahap III	27 Juni 2012	Rp2.500.000.000,-
Tahap IV	07 Oktober 2012	Rp2.777.777.778,-

3. MTN Syariah Ijarah I Perum Pegadaian Tahap III Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap III dilakukan pada tanggal 09 November 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 200.000.000.000,-.

MTN Syariah Ijarah I Tahap III berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2012.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap III adalah sebesar Rp 16.444.444.444 (enam belas milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setara dengan 8% (delapan persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, dengan rincian sebagai berikut:

<u>Cicilan Imbalan Ijarah</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah yang dibayarkan</u>
Tahap I	09 Pebruari 2012	Rp4.000.000.000,-
Tahap II	09 Mei 2012	Rp4.000.000.000,-
Tahap III	09 Agustus 2012	Rp4.000.000.000,-
Tahap IV	19 November 2012	Rp4.444.444.444,-

Sesuai dengan akad, apabila Perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran, baik pembayaran pinjaman maupun Cicilan Imbalan Ijarah, maka Perusahaan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang besarnya telah diatur pada tiap tahap pinjaman.

Mengacu pada akad, Perusahaan wajib:

- Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum.
- Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank yang layak untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perusahaan dan memeriksa/mengaudit Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

- Memberitahukan kepada wakil Bank yang ditunjuk keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempengaruhi usaha atau operasi Perusahaan.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan serta melakukan pembayaran pajak sebagaimana mestinya.
- Menyerahkan laporan keuangan in-house setiap tiga bulan.
- Menyerahkan laporan keuangan *audited* tahunan.
- Memelihara harta kekayaan dan semua aset agar dalam keadaan baik dan mengasuransikannya.
- Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Pengawas.
- Memelihara rasio likuiditas 1 : 1 dan *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 10 kali.

Medium Term Notes II

Selain MTN Syariah Ijarah I, Perum Pegadaian dan PT Mandiri Sekuritas juga mengadakan perjanjian kerjasama berupa fasilitas pinjaman lain. Fasilitas pinjaman dari PT Mandiri Sekuritas ini kemudian diberi nama *Medium Term Notes* (MTN II) Perum Pegadaian Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN, diterbitkan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Perjanjian No. 69 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

MTN sebesar Rp 240.000.000.000,- ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2013.

15. Pinjaman Obligasi

	2011 Rp	2010 Rp
Nilai Nominal		
a. Obligasi X	63.500.000.000	63.500.000.000
b. Obligasi XI	500.000.000.000	500.000.000.000
c. Obligasi XII	600.000.000.000	600.000.000.000
d. Obligasi XIII	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
e. Obligasi Berkelanjutan I	1.000.000.000.000	--
Sub Jumlah	<u>3.663.500.000.000</u>	<u>2.663.500.000.000</u>
Diskonto yang belum diamortisasi		
a. Obligasi X	(388.523.064)	(456.811.612)
b. Obligasi XI	(1.233.089.124)	(1.511.805.870)
c. Obligasi XII	(1.145.653.909)	(1.346.231.406)
d. Obligasi XIII	(2.212.007.096)	(2.744.444.626)
e. Obligasi Berkelanjutan I	(2.561.077.822)	--
Sub Jumlah	<u>(7.540.351.015)</u>	<u>(6.059.293.514)</u>
Nilai Bersih		
a. Obligasi X	63.111.476.936	63.043.188.388
b. Obligasi XI	498.766.910.876	498.488.194.130
c. Obligasi XII	598.854.346.091	598.653.768.594
d. Obligasi XIII	1.497.787.992.904	1.497.255.555.374
e. Obligasi Berkelanjutan I	997.438.922.178	--
Sub Jumlah	<u>3.655.959.648.985</u>	<u>2.657.440.706.486</u>

Rating masing-masing obligasi berdasarkan penilaian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) terhadap Obligasi X, XI, XII, dan XIII adalah AA (*Double A; Stable Outlook*). Rating Pemantauan Obligasi Tahun 2010 AA+.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan oleh perjanjian perwaliamanatan.

Berikut adalah penjelasan rinci atas obligasi:

a. Obligasi X Tahun 2003

Obligasi X Tahun 2003 diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*) dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	--	--
Obligasi Seri B	63.500.000.000	63.500.000.000
	63.500.000.000	63.500.000.000

Obligasi X Seri A sebesar Rp 336.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 11 Juli 2011 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,94% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi X Seri B Tahun 2004 sebesar Rp 63.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 15 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun untuk tahun pertama sampai ketiga dan bunga mengambang untuk tahun keempat sampai dengan tahun kelimabelas yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan ditambah premi tetap sebesar 1,00%, maksimal 15,50% dan minimal 10,50%.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi X selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2011	2010
Obligasi X Seri A	12,94%	12,94%
Obligasi X Seri B	10,50%	10,50%

Penerbitan obligasi X berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.39 tanggal 12 Mei 2003 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 5:1 sampai dengan 21 Juli 2008 selanjutnya maksimal 7 : 1

b. Obligasi XI Tahun 2006

Obligasi XI Tahun 2006 memiliki jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	400.000.000.000	400.000.000.000
Obligasi Seri B	100.000.000.000	100.000.000.000
	500.000.000.000	500.000.000.000

Emisi Obligasi XI Seri A Tahun 2006 sebesar Rp 400.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat, dengan jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Emisi Obligasi XI Seri B Tahun 2006 sebesar Rp 100.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,25 % pertahun, dengan batas atas sebesar 16,00% dan batas bawah 10,00 %.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XI selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut

Jenis Obligasi	2011	2010
Obligasi XI Seri A	13,10%	13,10%
Obligasi XI Seri B	10,00%	10,00%

Penerbitan obligasi XI berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.5 tanggal 10 April 2006 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

c. Obligasi XII Tahun 2007

Obligasi XII Tahun 2007 Seri A dan Seri B dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 4 September 2017 terdiri dari:

	2011 Rp	2010 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	370.000.000.000	370.000.000.000
Obligasi Seri B	230.000.000.000	230.000.000.000
	600.000.000.000	600.000.000.000

Obligasi XII Seri A Tahun 2007 sebesar Rp 370.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Obligasi XII Seri B Tahun 2007 sebesar Rp 230.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,00% per tahun, dengan batas atas sebesar 12,00% dan batas bawah 8,00%. Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XII selama tahun 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2011	2010
Obligasi XII Seri A	10,03%	10,03%
Obligasi XII Seri B	8,00%	8,00%

Penerbitan obligasi XII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.2 tanggal 4 Juli 2007 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

d. Obligasi XIII Tahun 2009 Seri A dengan jangka waktu 5 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2014, Seri B dengan jangka waktu 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2017, dan Seri C dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019 terdiri dari:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

	2011 Rp	2010 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A-1	350.000.000.000	350.000.000.000
Obligasi Seri A-2	100.000.000.000	100.000.000.000
Obligasi Seri B	650.000.000.000	650.000.000.000
Obligasi Seri C	400.000.000.000	400.000.000.000
	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000

Obligasi XIII Seri A-1 tahun 2009 sebesar Rp 350.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama sampai tahun kelima.

Obligasi XIII Seri A-2 tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 3% per tahun, dengan batas atas sebesar 13% dan batas bawah 10%.

Obligasi XIII Seri B tahun 2009 sebesar Rp 650.000.000.000 dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,650% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi XIII Seri C tahun 2009 sebesar Rp 400.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XIII selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2011	2010
Obligasi XIII Seri A-1	11,675%	11,675%
Obligasi XIII Seri A-2	11,675%	11,675%
Obligasi XIII Seri B	12,650%	12,650%
Obligasi XIII Seri C	12,875%	12,875%

Penerbitan obligasi XIII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.24 tanggal 12 Juni 2009 dengan PT Bank Mega Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing obligasi adalah sebagai berikut:

- Obligasi IX setiap tanggal 6 Maret, 6 Juni, 6 September dan 6 Desember
- Obligasi X Seri A setiap tanggal 11 Januari, 11 April, 11 Juni, dan 11 Oktober
- Obligasi X Seri B setiap tanggal 12 Maret, 12 Juni, 12 September, dan 12 Desember.
- Obligasi XI setiap tanggal 23 Pebruari, 23 Mei, 23 Agustus dan 23 Nopember.
- Obligasi XII setiap tanggal 4 Maret, 4 Juni, 4 September, dan 4 Desember.
- Obligasi XIII setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Rincian obligasi berdasarkan jumlah bagian yang jatuh tempo yang dibagi berdasarkan tahun jatuh tempo:

Uraian	Nilai Nominal	Tahun Jatuh Tempo
Utang Obligasi yang akan jatuh tempo	Rp	
Obligasi IX seri A (jatuh tempo ultah ke-8)	211.000.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri B (jatuh tempo ultah ke-8)	13.050.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri C (jatuh tempo ultah ke-8)	2.000.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri D (jatuh tempo ultah ke-8)	43.500.000.000	Tahun 2010
Jumlah Hutang Obligasi yang akan Jatuh Tempo	269.550.000.000	
Obligasi X seri A	336.500.000.000	Tahun 2011
Obligasi XIII seri A-1	350.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XIII seri A-2	100.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XI seri A	400.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XI seri B	100.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XII seri A	370.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XII seri B	230.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII seri B	650.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi X seri B	63.500.000.000	Tahun 2018
Obligasi XIII seri C	400.000.000.000	Tahun 2019
Jumlah Utang Obligasi Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	3.000.000.000.000	
Jumlah Utang Obligasi	3.269.550.000.000	

Obligasi X sebanyak 60% dari sisa pokok yang terutang, dijamin dengan tagihan Perusahaan yang diberikan kepada nasabah (PYD), sedangkan obligasi XI, XII dan XIII tidak dijamin dengan aset PYD. PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Mega, Tbk selaku wali amanat dalam rangka penerbitan obligasi diatas, tidak memiliki tagihan terhadap Perusahaan selaku kreditor.

Dalam perjanjian Perwaliamanatan dari tiap-tiap obligasi di atas tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan Perusahaan untuk membentuk dana pelunasan obligasi (*sinking fund*).

Rating masing-masing obligasi berdasarkan penilaian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) terhadap Obligasi X, XI, XII, dan XIII adalah AA+ (*Double A; Stable Outlook*). Untuk rating Pemantauan Obligasi Tahun 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan oleh perjanjian perwaliamanatan.

Berikut adalah penjelasan rinci atas obligasi:

a. Obligasi X Tahun 2003

Obligasi X Tahun 2003 diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*) dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Obligasi Seri B	63.500.000.000	63.500.000.000
Total	63.500.000.000	63.500.000.000

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi X Seri A sebesar Rp 336.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 11 Juli 2011 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,94% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi X Seri B Tahun 2004 sebesar Rp 63.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 15 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun untuk tahun pertama sampai ketiga dan bunga mengambang untuk tahun keempat sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan ditambah premi tetap sebesar 1,00%, maksimal 15,50% dan minimal 10,50%.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi X untuk periode 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010, adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Jenis Obligasi:		
Obligasi IX Seri A	12,94%	12,94%
Obligasi IX Seri B	10,50%	10,50%

Penerbitan obligasi X berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 39 tanggal 12 Mei 2003 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 5:1 sampai dengan 21 Juli 2008 selanjutnya maksimal 7 : 1

b. Obligasi XI Tahun 2006

Obligasi XI Tahun 2006 memiliki jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Jenis Obligasi:		
Obligasi Seri A	400.000.000.000	400.000.000.000
Obligasi Seri B	100.000.000.000	100.000.000.000
Total	500.000.000.000	500.000.000.000

Emisi Obligasi XI Seri A Tahun 2006 sebesar Rp 400.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat, dengan jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Emisi Obligasi XI Seri B Tahun 2006 sebesar Rp 100.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,25 % pertahun, dengan batas atas sebesar 16,00% dan batas bawah 10,00 %.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XI untuk periode 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Jenis Obligasi:		
Obligasi XI Seri A	13,10%	13,10%
Obligasi XI Seri B	10,00%	10,00%

Penerbitan obligasi XI berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 5 tanggal 10 April 2006 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

c. Obligasi XII Tahun 2007

Obligasi XII Tahun 2007 Seri A dan Seri B dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 4 September 2017 terdiri dari:

	2011 Rp	2010 Rp
Jenis Obligasi:		
Obligasi Seri A	370.000.000.000	370.000.000.000
Obligasi Seri B	230.000.000.000	230.000.000.000
Total	600.000.000.000	600.000.000.000

Obligasi XII Seri A Tahun 2007 sebesar Rp 370.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Obligasi XII Seri B Tahun 2007 sebesar Rp 230.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,00% per tahun, dengan batas atas sebesar 12,00% dan batas bawah 8,00%. Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XII untuk periode 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Jenis Obligasi:		
Obligasi XII Seri A	10,025%	10,025%
Obligasi XII Seri B	8,00%	8,00%

Penerbitan obligasi XII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 2 tanggal 4 Juli 2007 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

d. Obligasi XIII Tahun 2009 Seri A dengan jangka waktu 5 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2014, Seri B dengan jangka waktu 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2017 dan Seri C dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019 terdiri dari:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

	2011 Rp	2010 Rp
Jenis Obligasi:		
Obligasi Seri A -1	350.000.000.000	350.000.000.000
Obligasi Seri A -2	100.000.000.000	100.000.000.000
Obligasi Seri B	650.000.000.000	650.000.000.000
Obligasi Seri C	400.000.000.000	400.000.000.000
Total	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000

Obligasi XIII Seri A-1 tahun 2009 sebesar Rp 350.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama sampai tahun kelima.

Obligasi XIII Seri A-2 tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 3% per tahun, dengan batas atas sebesar 13% dan batas bawah 10%.

Obligasi XIII Seri B tahun 2009 sebesar Rp 650.000.000.000 dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,650% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi XIII Seri C tahun 2009 sebesar Rp 400.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XIII untuk periode 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Jenis Obligasi:		
Obligasi Seri A -1	11,675%	11,675%
Obligasi Seri A -2	10,00%	10,00%
Obligasi Seri B	12,650%	12,650%
Obligasi Seri C	12,875%	12,875%

Penerbitan obligasi XIII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No. 24 tanggal 12 Juni 2009 dengan PT Bank Mega Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

- a. Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), terdiri dari:

	2011 Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Seri A	250.000.000.000
Obligasi Seri B	250.000.000.000
Obligasi Seri C	500.000.000.000
Total	1.000.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri A akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2014.

Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri B akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2016.

Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri C akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2021.

	2011 Rp
Jenis Obligasi:	
Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri A	7,50%
Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri B	8,00%
Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri C	9,00%

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing obligasi adalah sebagai berikut:

- Obligasi IX setiap tanggal 6 Maret, 6 Juni, 6 September dan 6 Desember
- Obligasi X Seri A setiap tanggal 11 Januari, 11 April, 11 Juni, dan 11 Oktober
- Obligasi X Seri B setiap tanggal 12 Maret, 12 Juni, 12 September, dan 12 Desember.
- Obligasi XI setiap tanggal 23 Pebruari, 23 Mei, 23 Agustus dan 23 Nopember.
- Obligasi XII setiap tanggal 4 Maret, 4 Juni, 4 September, dan 4 Desember.
- Obligasi XIII setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.
- Obligasi Berkelanjutan Tahap I dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Rincian obligasi berdasarkan jumlah bagian yang jatuh tempo yang dibagi berdasarkan tahun jatuh tempo:

<u>Uraian</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Tahun Jatuh Tempo</u>
Hutang Obligasi yang akan jatuh tempo	Rp	
Obligasi XIII Seri A-1	350.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XIII Seri A-2	100.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XI Seri A	400.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XI Seri B	100.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XII Seri A	370.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XII Seri B	230.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII Seri B	650.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi X Seri B	63.500.000.000	Tahun 2018
Obligasi XIII Seri C	400.000.000.000	Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri A	250.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri B	250.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri C	500.000.000.000	Tahun 2021
Total	3.663.500.000.000	

Obligasi X sebanyak 60% dari sisa pokok yang terhutang, dijamin dengan tagihan Perusahaan yang diberikan kepada nasabah (PYD), sedangkan obligasi XI, XII dan XIII tidak dijamin dengan aset PYD.

PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Mega, Tbk selaku wali amanat dalam rangka penerbitan obligasi diatas, tidak memiliki tagihan terhadap Perusahaan selaku kreditor.

Dalam perjanjian Perwaliamanatan dari tiap-tiap obligasi di atas tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan Perusahaan untuk membentuk dana pelunasan obligasi (*sinking fund*).

16. Pinjaman Lainnya

Pinjaman lainnya merupakan pinjaman yang diperoleh dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan plafon sebesar Rp 15.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 036/PKS/YDSM/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008.

Pinjaman tersebut disediakan untuk membiayai pengembangan usaha mikro skala rumah tangga melalui penyaluran kredit KRISTA. Jangka waktu pembiayaan 5 tahun dan akan jatuh tempo bulan September 2013.

Bunga pinjaman dikenakan dengan mengacu tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 bulan.

Rata-rata tingkat bunga untuk periode 31 Desember 2011 dan 2010 sebesar 6,28% dan 7,00%.

17. Utang Kepada Rekanan

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	<u>Rp</u>	<u>Rp</u>
Utang Angsuran <i>Recovery</i>	6.004.732.565	6.015.420.524
Utang kepada Notaris dan Institusi Hukum	5.749.332.907	5.437.333.753
Titipan Premi Asuransi	5.634.363.586	6.244.176.926
Utang Pengadaan Barang dan Jasa	4.446.793.912	6.603.794.824
Utang Titipan Angsuran Nasabah KUMK	4.815.162.806	2.302.307.760
Utang Konsinyasi Persediaan MULIA	4.361.311.685	1.360.869.000
Utang Lainnya	908.179.301	1.199.926.491
Jumlah	31.919.876.762	29.163.829.278

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Utang pengadaan barang dan jasa per 31 Desember 2011 sebagian besar merupakan utang atas pengadaan barang Mulia dan sebagian kecil merupakan utang pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan inventaris serta pemeliharaan dan perbaikan aset tetap sehubungan pembukaan Unit Pelayanan Cabang dan Unit Pelayanan Syariah baru.

Titipan premi asuransi kepada PT Askrindo merupakan nilai premi asuransi yang telah dibayarkan oleh nasabah kreasi dan krista yang belum disetorkan ke PT Askrindo.

Utang kepada notaris dan institusi hukum adalah merupakan dana titipan dari nasabah kreasi yang akan digunakan untuk pembayaran biaya pengesahan perjanjian kredit dan akte jaminan.

Utang Angsuran *Recovery* Kredit UKM kepada PT Askrindo merupakan nilai setoran nasabah yang pinjamannya telah diklaim ke asuradur.

Tidak terdapat utang kepada pihak berelasi dengan Perusahaan.

18. Utang Kepada Nasabah

Saldo utang nasabah per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 73.195.333.640 dan Rp 64.454.806.979, berupa uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan, maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan.

Prosedur yang dilakukan Perusahaan untuk memberitahu nasabah mengenai uang kelebihan lelang mengacu Surat Edaran Direksi Nomor 12/UI.1.00211/2006 tanggal 14 Maret 2006 adalah:

- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah tentang jadwal lelang pada saat kredit telah jatuh tempo.
- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang tidak menghadiri lelang tentang uang kelebihan lelang yang melebihi Rp 20.000 yang merupakan hak nasabah terkait.

Pengambilan uang kelebihan tersebut dengan cara menunjukkan Surat Bukti Kredit (SBK) atau bukti lain yang sah.

19. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	2011 Rp	2010 Rp
Pajak Penghasilan 28 A	--	39.396.710.924
Total Pajak Dibayar Dimuka	--	39.396.710.924

Pajak dibayar di muka per 31 Desember 2011 bersaldo nihil, sedangkan Pajak dibayar di muka per 31 Desember 2010 merupakan kelebihan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan 25. Atas kelebihan ini, Perusahaan sudah mengajukan restitusi ke Dirjen Pajak. Pada tanggal 25 April 2011, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 No.00035/406/09/051/11 dengan menetapkan jumlah lebih bayar pajak adalah sebesar Rp 24.928.572.266. Atas SKPLB tersebut juga diterbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) No.80099/051-0096-2011 tanggal 11 Mei 2011 dan telah diperhitungkan dengan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMKP dengan rincian sebagai berikut:

SPMKP	24.928.572.266
Kompensasi Utang Pajak Pasal 21	(4.895.596.599)
Dikembalikan/Dibayarkan ke Perusahaan	20.032.975.667

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

b. Utang Pajak

	2011 Rp	2010 Rp
Pajak Penghasilan Pasal 29	78.649.431.256	41.488.202.003
Pajak Penghasilan Pasal 25	40.364.141.562	32.254.424.916
Pajak Penghasilan Pasal 21	37.733.285.046	14.927.616.422
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	294.947.669	266.719.512
Pajak Penghasilan Pasal 23	285.144.701	148.831.012
PPN	121.853.742	193.785.414
Pajak Bumi dan Bangunan	18.788.991	18.378.568
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	--	29.450.000
Jumlah	157.467.592.967	89.327.407.847

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

	2011 Rp	2010 Rp
Beban Pajak Kini	563.019.130.000	428.541.301.000
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(37.002.826.214)	8.397.112.962
Jumlah	526.016.303.786	436.938.413.962

Taksiran laba kena pajak Perusahaan, dan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Laba Konsolidasi	2.002.251.590.714	1.616.726.799.654
(Laba)/Rugi Anak Perusahaan	2.535.890	180.580.332
Laba Komersial	2.002.254.126.604	1.616.907.379.986
Beda Temporer:		
Biaya Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	71.460.099.652	116.897.785.539
Estimasi Beban Jasa Produksi yang Masih Harus Dibayar	68.369.188.953	29.718.020.025
Cadangan Tantiem	9.317.749.000	6.762.000.000
Penyusutan Aset Tetap	6.005.755.572	5.990.427.786
Beban Manfaat Karyawan	75.040.053.453	895.073.929
Beban Bunga yang belum diamortisasi - Obligasi	251.750.000	251.750.000
Penyisihan Piutang	2.485.614.422	72.850.882
Penyisihan Kerugian Klaim TGR	(104.921.660)	(826.290.840)
Pendapatan yang Belum Diamortisasi	(3.830.972.670)	(62.352.253.700)
	228.994.316.722	97.409.363.621

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

	2011 Rp	2010 Rp
Biaya Ulang Tahun RI/Pegadaian	2.558.631.845	1.909.754.443
Biaya Pemeliharaan Perbaikan dan eksplotasi mobil Dinas	1.214.912.710	1.376.385.419
Biaya Jamuan dan Representasi	870.859.265	723.685.552
Biaya Lainnya/ Sumbangan	573.262.600	532.319.910
Biaya Listrik, Telpon, Rehab Rumah Dinas	61.738.445	74.730.693
Biaya Denda Pajak	19.399.152.387	62.314.465
Biaya Perawatan Inventaris Rumah Jabatan	18.684.035	16.945.562
Laba Penjualan Aktiva Tetap	--	(21.168.359)
Pendapatan Jasa Giro	(1.458.977.205)	(1.336.541.145)
Pendapatan Sewa Gedung	(2.410.187.388)	(3.489.966.147)
	<u>20.828.076.694</u>	<u>(151.539.607)</u>
Laba Fiskal	<u>2.252.076.520.020</u>	<u>1.714.165.204.000</u>
Laba Fiskal (Dibulatkan)	<u>2.252.076.520.000</u>	<u>1.714.165.204.000</u>
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan	563.019.130.000	428.541.301.000
Kredit Pajak:		
- Angsuran PPh Pasal 25	(484.369.698.744)	(387.053.098.997)
Kurang (Lebih) Bayar PPh 29	<u>78.649.431.256</u>	<u>41.488.202.003</u>

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan dan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun 2010 telah sesuai dengan SPT PPh Badan yang disampaikan ke kantor pajak.

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat Aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak Aset dan liabilitas. Rincian Aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan Per 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2009	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi	31 Des 2010	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi	31 Des 2011
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan:					
Cadangan Penurunan Nilai					
Piutang Karyawan	4.083.734.547	(188.359.990)	3.895.374.557	(102.970.287)	3.792.404.270
Cadangan Penurunan Nilai PYD	--	29.224.446.385	29.224.446.385	17.865.024.913,00	47.089.471.298
Liabilitas Imbalan Kerja	12.645.736.929	217.018.481	12.862.755.410	18.760.013.363,00	31.622.768.773
Estimasi Beban Jasa Produksi YMH-D	23.622.698.860	(23.622.698.860)	--	--	--
Pendapatan/Biaya Unamortisasi PYD	--	(15.588.063.425)	(15.588.063.425)	(957.743.168,00)	(16.545.806.593)
Beban/Pendapatan Unamortisasi - Obligasi	--	62.937.500	62.937.500	(62.937.500,00)	--
Aset Tetap	2.531.383.088	1.497.606.947	4.028.990.035	1.501.438.893,00	5.530.428.928
	<u>42.883.553.423</u>	<u>(8.397.112.962)</u>	<u>34.486.440.461</u>	<u>37.002.826.214</u>	<u>71.489.266.676</u>
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	<u>42.883.553.423</u>	<u>(8.397.112.962)</u>	<u>34.486.440.460</u>	<u>37.002.826.214</u>	<u>71.489.266.676</u>

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aset pajak tangguhan dapat terpulihkan dalam tahun-tahun mendatang.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

20. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Merupakan beban bunga, pegawai dan umum yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut :

	2011 Rp	2010 Rp
Beban Bunga Bank	39.590.823.146	21.883.757.593
Beban Bunga Obligasi	22.556.839.410	22.556.839.410
Beban Umum	37.783.203.832	21.295.905.645
Beban Pegawai	36.746.068.180	9.517.400.057
Jumlah	136.676.934.568	75.253.902.705

21. Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan pendapatan sewa gedung yang di terima di muka dan pendapatan sewa gedung yang ditangguhkan sesuai dengan umur sewa, terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima di Muka

	2011 Rp	2010 Rp
a. Pendapatan Diterima di Muka		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Sewa Gedung Ditangguhkan Yang Akan diamortisasi dalam satu tahun	1.637.488.636	1.637.488.636
Sewa Gedung Diterima Dimuka	642.859.331	1.083.753.862
Pendapatan Marjin Mulia	10.444.441.607	1.835.137.705
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	648.288.200	604.583.200
Jumlah	13.373.077.774	5.160.963.403

b. Pendapatan Ditangguhkan

Pendapatan Ditangguhkan Sewa Gedung Harco (Catatan 37)		
Pendapatan Sewa Ditangguhkan	22.788.383.526	24.425.872.162
Sewa Gedung Ditangguhkan Yang Akan Diamortisasi Dalam Satu Tahun	(1.637.488.636)	(1.637.488.636)
Jumlah	21.150.894.890	22.788.383.526

22. Pinjaman Dari Pemerintah

	2011 Rp	2010 Rp
Pinjaman Pemerintah Pusat	410.000.000.000	410.000.000.000
Jumlah	410.000.000.000	410.000.000.000

Pinjaman Pemerintah Pusat

Pinjaman Pemerintah Pusat merupakan Surat Utang Pemerintah (SUP) sebesar Rp 410.000.000.000 adalah pinjaman untuk Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S-121/MK.06/2004 tanggal 14 April 2004 dan Perjanjian Pinjaman No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, dan diubah terakhir dengan Persetujuan Perubahan No.AMA-33/KP-019/DP3/2007 tanggal 8 Maret 2007. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2009 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

1. Tujuan penyaluran pinjaman untuk pendanaan kredit usaha mikro dan kecil untuk usaha produktif.
2. Persyaratan tingkat bunga dan jangka waktu pinjaman kepada emiten :
 - a. Tingkat bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 3 bulan yang ditetapkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember atas dasar lelang SBI terakhir sebelum tanggal penetapan tersebut.
 - b. Bunga dihitung sejak penarikan pinjaman dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember setiap tahun.
3. Tingkat bunga KUMK dari Perum Pegadaian kepada usaha mikro dan usaha kecil setinggi-tingginya sebesar tingkat bunga pinjaman tersebut (SBI 3 bulan) ditambah 12%.
4. Risiko tunggakan penerusan pinjaman pendanaan KUMK dari BUMN pengelola kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dan risiko tunggakan penyaluran KUMK dari LKP kepada usaha mikro dan usaha kecil sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing BUMN pengelola dan LKP.
5. Persyaratan lainnya, termasuk persyaratan denda, mengikuti ketentuan dalam keputusan Menteri Keuangan nomor : 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 yang telah diubah dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor : 74/KMK.06/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 serta ketentuan dalam perjanjian pinjaman pendanaan KUMK.

Rata-rata tingkat bunga selama tahun 2011 dan 2010 adalah 6,72% per tahun dan 6,96% per tahun Bunga dibayar setiap tanggal 6 Maret, 9 Juni, 9 September dan 9 Desember tiap tahunnya.

Berdasarkan perubahan perjanjian No.AMA-52/KP-019/DSM/2009 tanggal 13 Agustus 2009, dilakukan perubahan pasal 4 ayat 4 dari PP No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, Pemerintah menyetujui perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 10 Desember 2019.

Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan telah memenuhi pembatasan – pembatasan yang diwajibkan di atas.

23. Utang Lancar Lainnya

	2011 Rp	2010 Rp
Jasa Produksi	192.578.004.417	124.208.815.464
Iuran Taspen/THT dan Askes	23.769.107.973	17.237.459.069
Utang Tantiem	9.317.749.000	6.762.000.000
Utang Pegawai	5.484.005.242	3.976.177.262
Dana Sosial dan Dana Pendidikan	2.585.108.255	2.585.094.695
Bea Lelang	765.142.320	882.030.338
Program Kemitran dan Bina Lingkungan	227.768.227	314.807.535
Utang Subrogasi atau <i>Recovery</i>	258.636.235	148.755.969
Utang Lainnya	7.952.575.204	4.059.691.516
Jumlah	242.938.096.873	160.174.831.848

24. Liabilitas Imbalan Kerja

	2011 Rp	2010 Rp
Liabilitas Program Pensiun	41.902.294.866	(9.488.368.257)
Liabilitas Program Pesangon	75.627.747.650	38.546.418.514
Liabilitas Program Cuti Besar	8.961.032.577	22.392.971.383
Jumlah	126.491.075.093	51.451.021.640

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

a. Program Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 4,75% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 11,75% dari gaji pokok karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun Perum Pegadaian. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi No. KP.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan No. Kep-336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Untuk karyawan yang terhitung mulai bekerja sejak tahun 2007 ke atas, maka pengelolaan dana pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank BNI (Persero) Tbk.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2011 dan 2010 adalah:

	2011 Rp	2010 Rp
Aset Program	493.172.703.298	411.180.059.408
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	840.268.172.620	528.581.922.643
Defisit Pendanaan	347.095.469.322	117.401.863.235
Liabilitas Transisi yang belum diakui	--	--
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(305.193.174.456)	(126.890.231.492)
Beban Pensiun yang Masih Harus Dibayar	41.902.294.866	(9.488.368.257)

Rekonsiliasi perubahan saldo Beban Pensiun Yang Masih Harus Dibayar selama tahun 2011 dan 2010:

	2011 Rp	2010 Rp
Saldo Awal Tahun	(9.488.368.257)	31.891.137.289
Beban Pensiun Tahun Berjalan	102.095.196.160	25.595.061.900
Kontribusi Iuran ke Dana Pensiun	(50.704.533.037)	(66.974.567.446)
Saldo Akhir Tahun	41.902.294.866	(9.488.368.257)

Beban yang diakui pada tahun 2011 dan 2010 terdiri dari komponen sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Beban jasa kini	16.592.582.597	6.914.795.655
Beban bunga	37.000.734.585	47.865.557.433
-/- Imbal Hasil investasi	(41.118.005.940)	(33.207.657.030)
Dampak Perubahan Aktuarial yang Diakui	86.342.162.184	--
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	3.277.722.734	4.022.365.842
Beban Yang Diakui	102.095.196.160	25.595.061.900

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

b. Program Pesangon

Penyelenggaraan Program Pesangon (UP4) didasarkan pada Peraturan Direksi No. 1817/Kp300323/2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK). Manfaat Pesangon berupa pembayaran jumlah *lumpsum* diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

Rekonsiliasi status pendanaan program ini pada posisi 31 Desember 2011 dan 2010 adalah:

	2011 Rp	2010 Rp
Aset Program	--	--
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pesangon	445.057.790.028	305.825.433.198
Defisit Pendanaan	445.057.790.028	305.825.433.198
Liabilitas Transisi yang belum diakui	(63.803.063.487)	(69.038.491.815)
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	305.626.978.891	198.240.522.869
Beban Pesangon yang Masih Harus Dibayar	75.627.747.650	38.546.418.514

Rekonsiliasi perubahan saldo Beban Pesangon Yang Masih harus Dibayar selama tahun 2011 dan 2010 adalah:

	2011 Rp	2010 Rp
Saldo Awal Tahun	38.546.418.514	15.112.523.038
Beban yang Dibentuk	73.170.069.368	65.342.524.877
Pesangon yang Dibayarkan	(36.088.740.232)	(41.908.629.401)
Saldo Akhir Tahun	75.627.747.650	38.546.418.514

Beban yang dibentuk selama tahun 2011 dan 2010 adalah:

	2011 Rp	2010 Rp
Beban jasa kini	33.193.556.036	18.778.853.652
Beban bunga	21.407.780.324	28.186.257.829
Amortisasi Biaya Jasa Lalu (<i>Non Vested</i>)	5.235.428.327	5.235.428.328
Beban amortisasi liabilitas transisi Peserta 50th keatas (<i>vested</i>) dibebankan sekaligus	--	--
Peserta dibawah 50th (<i>diamortisasi</i> sisa masa kerja masing masing)	5.576.644.048	5.576.664.048
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	7.756.660.633	7.565.341.020
Beban Yang Diakui	73.170.069.368	65.342.544.877

c. Program Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tetap.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

	2011 Rp	2010 Rp
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Cuti Besar	92.854.578.234	72.113.380.586
Defisit Pendanaan	92.854.578.234	72.113.380.586
Liabilitas Transisi yang belum diakui	(22.673.613.581)	(24.190.905.316)
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(61.219.932.076)	(25.529.503.887)
Beban Cuti Besar yang Masih Harus Dibayar	8.961.032.577	22.392.971.383

Rekonsiliasi liabilitas manfaat karyawan diestimasi yang diakui di laporan posisi keuangan dan beban manfaat yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Saldo Awal Tahun	22.392.971.383	3.579.287.384
Beban Cuti Besar Tahun Berjalan	19.283.200.646	39.292.938.857
Pembayaran Cuti Besar	(32.715.139.452)	(20.479.254.858)
Saldo Akhir Tahun	8.961.032.577	22.392.971.383

Beban yang dibentuk selama tahun 2011 dan 2010 terdiri dari:

	2011 Rp	2010 Rp
Beban Jasa Kini	11.900.200.410	8.355.731.119
Beban Bunga	5.047.936.641	3.410.194.503
Dampak Perubahan Kurtailmen dan Penyelesaian	--	26.009.721.499
Amortisasi Akumulasi (Keuntungan)/Kerugian Aktuarial	817.771.859	--
Beban Amortisasi Liabilitas Transisi	1.517.291.736	1.517.291.736
Beban Yang Diakui	19.283.200.646	39.292.938.857

Asumsi Aktuarial

Per 31 Desember 2011 dan 2010, perhitungan beban dan liabilitas aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial yang tertuang dalam laporannya masing-masing yaitu:

Keterangan	31 Des 2011	31 Des 2010
Nomor Laporan	2028/KIS/LA/03/2012 2029/KIS/LA/03/2012 2030/KIS/LA/03/2012	1855/KIS/LA/03/2011 1856/KIS/LA/03/2011 1854/KIS/LA/03/2011
Tanggal Laporan	16 Maret 2012	21 Maret 2011

Adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Des 2011	31 Des 2010
Metode Perhitungan yang dipergunakan	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit
Tingkat Bunga Diskonto	7,00% p.a	10,50% p.a
Tingkat Bunga Imbal Hasil Investasi Aset Program	10.5% p.a	10.5% p.a
Tingkat kenaikan gaji berkala	7% per tahun	7% per tahun
Tabel mortalita	Tabel Mortalita Indonesia II	Tabel Mortalita Indonesia II
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Jumlah Pegawai	8,133	7.796 orang

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

25. Ekuitas

Merupakan Penyertaan Pemerintah yang berasal dari kekayaan bersih pada saat pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum, Penyertaan Modal Pemerintah, dan Saldo Laba dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Modal Awal	205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah	46.252.000.000	46.252.000.000
	251.252.000.000	251.252.000.000
Saldo Laba		
Ditentukan Penggunaannya	2.348.875.803.694	1.865.162.562.133
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.476.235.286.928	1.179.788.385.692
Jumlah Ekuitas	4.076.363.090.622	3.296.202.947.825

a. Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku (Catatan 2qr) dengan rincian sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Saldo Awal	1.865.162.562.133	1.490.010.668.212
Penambahan:		
Cadangan Umum	398.018.241.561	232.948.893.921
Cadangan Tujuan	85.695.000.000	142.203.000.000
Jumlah Penambahan	483.713.241.561	375.151.893.921
Saldo Akhir	2.348.875.803.694	1.865.162.562.133

b. Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi laba belum ditentukan penggunaannya berdasarkan surat dari Kementerian BUMN (Catatan 2.q) adalah sebagai berikut:

	2011 Rp	2010 Rp
Saldo Awal	1.865.162.562.133	1.490.010.668.212
Penambahan:		
Cadangan Umum	398.018.241.561	232.948.893.921
Cadangan Tujuan	85.695.000.000	142.203.000.000
Jumlah Penambahan	483.713.241.561	375.151.893.921
Saldo Akhir	2.348.875.803.694	1.865.162.562.133

Cadangan umum agar dikelola dengan baik sehingga dana cadangan tersebut dapat menghasilkan laba dan pengelolaannya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan cadangan tujuan agar digunakan sebagai sumber dana untuk investasi /belanja modal Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

c. Manajemen Modal

Perusahaan adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham-saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa keuangan, untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia serta usaha lain yang menguntungkan sehingga dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan PP103 tahun 2000, serta dengan persetujuan Menteri BUMN sesuai dengan Undang-undang BUMN No.19 Tahun 2003.

Untuk menjalankan kegiatan usaha dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan modal dilaksanakan dengan mencadangkan atau menahan sebagian laba untuk pemupukan modal. Penambahan modal dari eksternal sesuai dengan ketentuan yang ada untuk saat ini tidak dimungkinkan. Komponen modal entitas adalah berupa Penyertaan Modal Pemerintah dan Saldo Laba, dimana Saldo Laba terbagi atas cadangan umum untuk modal kerja dan cadangan tujuan untuk investasi.

Kebijakan dividen/pembagian laba dilakukan setiap akhir periode setelah mendapatkan Persetujuan Laporan Tahunan melalui Rapat Pembahasan Bersama. Laba dibagi dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut dividen, cadangan tujuan, cadangan umum, program kemitraan dan bina lingkungan.

26. Pendapatan Sewa Modal

	2011 Rp	2010 Rp
Sewa Modal Gadai KCA		
Sewa Modal Golongan A	4.503.981.799	5.655.479.226
Sewa Modal Golongan B	449.321.899.683	184.926.690.791
Sewa Modal Golongan C	4.079.307.420.853	3.624.893.808.645
Sewa Modal Golongan D	544.106.884.791	365.039.250.384
Sub Jumlah	<u>5.077.240.187.126</u>	<u>4.180.515.229.046</u>
Jasa Simpan/Ijarah Gadai Syariah		
Ijarah Golongan A	170.707.035	164.804.659
Ijarah Golongan B	9.007.983.374	7.660.995.683
Ijarah Golongan C	401.937.301.902	239.859.311.450
Ijarah Golongan D	73.641.964.122	48.886.446.165
Sub Jumlah	<u>484.757.956.433</u>	<u>296.571.557.957</u>
Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya		
Sewa Modal Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	300.979.853.662	358.528.056.404
Marjin Mulia	45.672.193.688	6.874.877.069
Sewa Modal Kresna	28.995.279.833	33.220.260.383
Ijarah Ar-Rum	15.484.679.625	9.504.224.950
Sewa Modal Kredit Tunda Jual Gabah	58.867.900	58.178.900
Sewa Modal Gadai Efek	12.447.334	1.827.884.950
Amanah	112.000	--
Sub Jumlah	<u>391.203.434.042</u>	<u>410.013.482.656</u>
Jumlah	<u>5.953.201.577.601</u>	<u>4.887.100.269.659</u>

Pendapatan sewa modal yang berasal dari amortisasi biaya transaksi atas produk Kreasi, Krasida, Kresna dan Krista selama tahun 2011 masing-masing sebesar Rp 3.908.691.779 Rp 1.042.144.906, Rp 2.077.040.798 dan (Rp 3.205.476.370), sedangkan untuk tahun 2010 masing-masing sebesar Rp 43.760.597.612, Rp 2.868.317.452, Rp 9.223.302.007 dan Rp 6.500.036.629.

Tidak ada pendapatan sewa modal yang memiliki pihak-pihak berelasi dengan Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

27. Pendapatan Administrasi

Merupakan pendapatan administrasi atas barang jaminan milik nasabah yang ditentukan berdasarkan golongan kredit, terdiri dari:

	2011 Rp	2010 Rp
Usaha Gadai		
Golongan A	984.083.439	1.279.274.536
Golongan B	59.107.377.152	22.618.614.009
Golongan C	444.474.508.308	384.658.468.080
Golongan D	75.864.179.574	51.450.747.034
	580.430.148.473	460.007.103.659
Usaha Syariah		
Golongan A	30.926.522	28.109.500
Golongan B	1.035.432.300	874.032.800
Golongan C	27.121.492.509	17.509.324.050
Golongan D	2.621.973.200	1.543.786.150
	30.809.824.531	19.955.252.500
Usaha Lainnya dan Syariah	19.907.551.102	1.901.154.761
Jumlah	631.147.524.106	481.863.510.920

Pendapatan Administrasi Usaha Lain merupakan pendapatan administrasi atas Kresna, Kreasi, Krasida, Kremada, Kredit Tunda Jual Gabah, dan Kredit Gadai Efek .

28. Pendapatan Usaha Lainnya

	2011 Rp	2010 Rp
Pendapatan Jasa Pengiriman Uang	15.267.343.499	7.676.430.980
Pendapatan Saham PT BLAG	--	20.900.000
Lainnya	1.311.521.280	1.631.795.027
Jumlah	16.578.864.779	9.329.126.007

29. Beban Bunga dan Provisi

Merupakan beban bunga dan provisi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.842.906.719.748 dan Rp 1.573.453.742.911, dengan perincian sebagai berikut :

	2011 Rp	2010 Rp
Bunga Bank Mandiri	529.292.222.645	470.551.218.380
Bunga BRI	429.532.511.868	372.672.250.257
Bunga Obligasi	350.912.179.449	377.295.913.763
Bunga PT Bank BNI (Persero) Tbk	225.554.286.554	85.623.171.521
Bunga PT Bank BCA Tbk	181.254.257.297	192.413.600.971
Bunga MTN PT Mandiri Sekuritas	8.263.378.020	--
Bunga Provisi, Administrasi dan Pengelolaan Pinjaman	44.159.120.993	34.409.282.508
Bunga Pinjaman SUP dan Pemerintah Daerah	28.590.819.034	27.147.680.511
Bagi Hasil Syariah Mandiri	27.264.530.943	--
Bunga PT Bank Permata Tbk	17.084.756.944	13.340.625.000
Biaya Bunga Pinjaman Damandiri	998.656.001	--
Jumlah	1.842.906.719.748	1.573.453.742.911

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

30. Beban Penyusutan Aset Tetap

Merupakan beban penyusutan bangunan, inventaris dan kendaraan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 89.569.819.086 dan Rp 79.859.739.674 (Catatan 11).

31. Beban Pegawai

Merupakan kompensasi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko serta pegawai seperti gaji, upah, tunjangan dan jasa produksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 dan masing-masing sebesar Rp 1.704.807.622.455 dan Rp 1.328.788.645.238.

32. Beban Umum

	2011 Rp	2010 Rp
Beban Keamanan	228.918.572.180	154.048.627.546
Beban Jasa <i>Outsourcing</i> Pegawai	166.803.750.878	92.853.146.673
Beban Sewa	118.449.881.450	90.682.647.195
Beban Perjalanan Dinas	111.123.958.340	105.920.888.704
Biaya Penyisihan Penurunan Nilai (Lihat Catatan 4)	71.460.099.652	116.897.785.539
Beban Operasional Perusahaan	72.455.180.102	36.609.802.305
Beban Listrik, Telpo, Air dan Gas	43.897.716.399	51.822.622.647
Beban Cetak/Alat Tulis Kantor	34.426.927.688	33.933.383.255
Beban Pemeliharaan	34.305.733.799	18.799.027.038
Beban Promosi	32.111.772.219	28.086.075.919
Beban Diklat	25.770.610.861	29.969.872.554
Beban Iklan	19.266.931.672	5.673.654.685
Beban Kendaraan	17.218.653.826	32.730.530.464
Beban Papan Nama	14.441.954.656	17.085.654.415
Beban Asuransi	14.079.038.977	12.052.624.071
Beban Konsultan	6.055.571.646	2.495.488.717
Biaya Penyisihan Lain	5.197.612.183	2.593.809.473
Lainnya	21.000.606.794	13.427.285.356
Jumlah	1.036.984.573.322	845.682.926.556

Beban Lainnya merupakan Beban Pemasaran, Beban Pengembangan, Beban Teknologi Informasi (TI), Beban Penelitian dan Pengembangan, dan Beban Izin Usaha.

33. Pendapatan Sewa Gedung

Merupakan pendapatan sewa atas bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 2.410.187.388 dan Rp 3.489.966.147.

Pihak-pihak yang menyewa gedung Perusahaan adalah PT Harco Indah dan perorangan atau masyarakat yang menggunakan gedung serbaguna "Langen Palikrama" serta yang menggunakan/menempati beberapa aset milik Perusahaan yang tersebar di beberapa daerah.

34. Pendapatan Jasa Giro

Merupakan pendapatan bunga atas rekening giro bersih setelah dikurangi pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1.458.977.205 dan Rp 1.336.541.145.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

35. Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap

Untuk periode 31 Desember 2011 dan 2010, Laba atas penjualan aset sebesar Rp 170.9170.212 dan mengalami kerugian pada tahun 2010 sebesar Rp 134.523.087.

36. Pendapatan dan Beban Lainnya

Pendapatan denda angsuran/keterlambatan kredit merupakan pendapatan yang diterima per kas dan Perusahaan tidak menetapkan kebijakan pengakuan pendapatan denda secara akrual.

	2011 Rp	2010 Rp
a. Pendapatan Lain-lain:		
Pendapatan Denda Angsuran/Keterlambatan Kredit	34.036.228.387	30.608.485.157
Laba Penjualan BLP, BJYD dan Marhun yang disisihkan	4.493.607.587	5.867.899.756
Kartu Nasabah Hilang	611.819.398	572.576.158
Pendapatan Selisih Perhitungan Kas	348.652.693	607.774.019
Pendapatan dari Kredit UKM yang <i>Recovery</i>	59.360.253	32.680.960
Lain-lain	4.839.109.175	1.947.784.140
Jumlah	44.388.777.493	39.637.200.190
b. Beban Lain-lain:		
Rugi Penjualan BLP, BJYD, dan Marhun yang disisihkan	1.580.414.443	1.746.516.991
Rugi Pertukaran/Pengalihan Aset Tetap	302.292.124	22.544.128
Jumlah	1.882.706.567	1.769.061.119

Pendapatan denda angsuran/keterlambatan kredit merupakan pendapatan yang diterima per kas dan Perusahaan tidak menetapkan kebijakan pengakuan pendapatan denda secara akrual.

37. Perikatan Jangka Panjang

a. Perikatan dengan PT Harco Indah

Pada tahun 1968 Perusahaan dengan PT Harco Indah, secara bersama-sama telah menandatangani Akta Persetujuan No. 224 tanggal 30 Mei 1968 Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, SH, akta ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perjanjian Tambahan No.178, tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, SH selanjutnya dibuat "*Perjanjian Build Operate and Transfer*" (BOT).

Berdasarkan Perjanjian BOT tersebut, PT Harco Indah berliabilitas membangun, mengelola dan menyerahkan kepada Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2000, gedung yang berlokasi di Jl. Samanhudi Raya No.133, Jakarta Pusat dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan. Pada tanggal 27 Januari 1997 gedung tersebut terbakar, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diserahkan sebagaimana diatur dalam perjanjian BOT karena tidak dapat dioperasikan.

Berdasarkan pasal 2 Akta Perjanjian Tambahan No.178 tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, SH, apabila terjadi kebakaran/huru-hara, maka PT Harco Indah wajib membangun kembali gedung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan PT Harco Indah mempunyai hak perpanjangan waktu hak guna penuh untuk jangka waktu selama gedung dilaksanakan perbaikan. PT Harco Indah wajib menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut pada Perusahaan pada tanggal 30 Nopember 2005 tanpa syarat dengan kondisi baik dan layak pakai serta sebelumnya telah diadakan pengecatan secara menyeluruh dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tanggal 30 Nopember 2005 PT Harco Indah telah menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut kepada Perusahaan dengan kondisi baik, layak pakai dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Selanjutnya gedung HARCO Pasar Baru tersebut disewakan senilai Rp 32.749.772.728 (bersih setelah pajak) kepada PT Harco Indah untuk jangka waktu 20 tahun (terhitung sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 30 Nopember 2025) sesuai dengan Surat Perjanjian yang dikuatkan dengan Akta No.6 tanggal 17 Nopember 2005, Notaris Buniarti Tjandra, SH.

b. Perikatan Dengan PT Graha Asadhana

Pada tahun 1993, Perusahaan dengan PT Graha Asadhana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No.62/UTE/IX/93 dan No.015/GA/DIR.UM/0993 tanggal 1 September 1993 tentang Pemanfaatan Tanah Perum Pegadaian di Jl. Salemba Raya No.2, Jakarta Pusat untuk Perkantoran dan Pertokoan dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).

PT Graha Asadhana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Graha Asadhana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersil. Tanggal pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal 28 Februari 1995.

PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai kepada Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000 yang dibayar 50% pada saat ditandatangani perjanjian ini dan 50% lagi pada saat pembangunan dinyatakan selesai. Selama jangka waktu pengelolaan PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai sebesar Rp 140.000.000 pertahun kepada Perusahaan. Pembayaran tahun pertama paling lambat tiga bulan sebelum ulang tahun pertama pengoperasian komersial, sedangkan pembayaran tahunan berikutnya wajib dilunasi paling lambat setiap tiga bulan setelah ulang tahun berikutnya tanggal pengoperasian komersial. Akun yang mencatat penerimaan dari PT Graha Asadhana adalah Pendapatan Lain-lain.

PT Graha Asadhana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada Perusahaan dalam keadaan terawat baik, lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung perkantoran dan pertokoan komersial.

c. KSO Pertokoan Komersial (Cimahi)

Pada tahun 2005, Perusahaan dengan PT Tapak Sarana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No. 397/SP.100231/2005 dan No.001/TS/PGDN/BOT/ 07/05 tanggal 07 Juli 2005 tentang Pemanfaatan Tanah Perum Pegadaian di Jl. Pasar Atas No.68, Cimahi, Jawa Barat untuk Pertokoan Komersial dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).

PT Tapak Sarana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Tapak Sarana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian. Selama masa pembangunan PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung dalam masa pembangunan (*construction all risk*) tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara dan bencana alam lainnya.

PT Tapak Sarana wajib membayar uang kompensasi sejumlah Rp 1.558.884.000 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Tahap pertama : 10% (sepuluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 155.888.400 dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian.
- Tahap kedua : 40% (empat puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 623.553.600 dibayarkan enam bulan setelah penandatanganan Perjanjian.
- Tahap ketiga : 50% (lima puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Rp 779.442.000 dibayarkan lima belas bulan setelah penandatanganan Perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersial yaitu tanggal 1 April 2006 sampai dengan 31 Maret 2026. Tanggal dimulainya pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal pertama setelah masa persiapan pengoperasian komersial gedung berakhir. Selama masa pengelolaan, PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung atas nama Perusahaan tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan bencana alam lainnya dengan klausul *all risk and full covered*.

PT Tapak Sarana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada Perusahaan dalam keadaan terawat baik lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung pertokoan komersial.

Perusahaan baru menerima pembayaran uang kompensasi tahap pertama (10% atau sebesar Rp 155.888.400) dan pembangunan tersebut berdasarkan Memorandum Perusahaan No.17/UL/II/2007, tanggal 29 Januari 2007 baru mencapai sekitar 33,60%. Berdasarkan hasil pembahasan antara kedua belah pihak (Perum Pegadaian dengan PT Tapak Sarana) tanggal 22 Januari 2007 dan Surat Pernyataan PT Tapak Sarana No. 0021/Dir-Bks/01/07 tanggal 23 Januari 2007, apabila sampai dengan tanggal 14 Maret 2007 PT Tapak Sarana tidak bisa membayar kekurangan uang kompensasi, maka kontrak/PKS bersedia diputus sampai dengan waktu yang ditentukan. PT Tapak Sarana tidak dapat memenuhi liabilitasnya.

Berkenaan dengan kegagalan PT Tapak Sarana memenuhi liabilitasnya membayar kompensasi Tahap II dan III sebagaimana diuraikan di atas, Perusahaan telah mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor gugatan 52/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 27 April 2009.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat No. 52/PDT.G/2009/PN.BB tanggal 31 Agustus 2009 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa PT Tapak Sarana (Tergugat) telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama (PKS) yang telah dibuat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 2.805.991.200 (dua milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Proyek Pembangunan Pertokoan komersial dengan sistem BOT dan menyerahkan kepemilikan Bangunan Pertokoan Komersial dengan sistem BOT tersebut yang telah berdiri di Cabang Perum Pegadaian Cimahi dari Tergugat kepada Penggugat.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.45/Pdt.BD/2009/PN.BB tanggal 11 September 2009.

Pada tanggal 9 September 2009, Pembanding yang semula Tergugat yaitu Dedi Sukardi, Direktur Utama PT Tapak Sarana mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Oktober 2009.

Atas banding ini, Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 22 Juli 2010 memutuskan :

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 31 Agustus 2009 nomor 52/Pdt.G/2009/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.

Atas Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi ini Pembanding semula Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 21 April 2011.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

- Pada tanggal 13 Juni 2011, Mahkamah Agung mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- Pada tanggal 1 Agustus 2011, Mahkamah Agung mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi bahwa berkas perkara kasasi telah diterima dan diregister pada tanggal 10 Juli 2011 dengan Registrasi Nomor 1508K/PDT/2011, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Perkara masih belum mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung.

38. Informasi Lain-Lain

- a. Pada tanggal 16 Januari 2003 nasabah yang bernama Ny.Sena Wiradjaja, melalui Kantor Pengacara Amir Indah & Partners menggugat Perum Pegadaian. Gugatan perdata tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2003 dengan No. Perkara.14/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tentang Gugatan Perdata Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 20.962.500.000 ditambah bunga 2% per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan Perdata tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi terhadap 32 potong barang jaminan atas nama nasabah Ny. Sena Wiradjaja yang hilang saat terjadinya pencurian di Kantor Cabang Kebayoran Baru, pada tanggal 12-13 September 1999. Nilai taksiran barang jaminan tersebut sebesar Rp 612.789.958. Pinjaman yang Diberikan (PYD) yang dijamin oleh Barang Jaminan tersebut sudah jatuh tempo, tetapi belum ditebus oleh nasabah bersangkutan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Nomor: 14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 2 Juli 2003 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I secara renteng bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 765.897.450 (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
- Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.139/SRT.PDT.BDG2003/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2003 dan menyerahkan memori banding tanggal 17 Februari 2004 dan telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Februari 2004 No. 14/PDT.G/2003/PN/JKT.PST.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.132/PDT/2004/PT.DKI tanggal 07 Maret 2005 dengan Amar Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 02 Juli 2003. Dengan dibatalkannya putusan PN Jakarta Pusat tersebut maka Perum Pegadaian pada pihak yang menang dalam perkara tersebut.

Berdasarkan putusan banding tersebut, Pihak Ny. Sena Widjaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perum Pegadaian selaku termohon kasasi mengajukan Kontra Memori kasasi pada tanggal 6 Oktober 2005 dan berkas permohonan tersebut telah dikirim ke Mahkamah Agung RI oleh PN Jakarta Pusat dan telah diterima dengan Nomor Register 2407 K/PDT/2005 tanggal 22 Desember 2005.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2407/K/PDT/2005 j.o. No.14/PDT.G/2003/PN.Jkt.Pst yang pemberituannya kepada Perusahaan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2009, permohonan kasasi yang diajukan Ny. Sena Wiradjaja telah ditolak.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol : S.TAP/13a/VIII/2005/Pidkor &WCC tentang Penghentian Penyidikan, berdasarkan resume hasil penyidikan tindak pidana korupsi dengan cara pemberian ganti rugi melebihi ketentuan dan pengeluaran barang jaminan tanpa tebusan pada Cabang Perum Pegadaian Kebayoran Baru Jakarta Selatan antara Perum Pegadaian dengan Nyonya Sena Wiradjaya terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2005. Dikarenakan peristiwa tersebut tindak pidana atau karena sebab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Perum Pegadaian atas laporan keuangan tahun 2003 dan pembiayaan dari dana masyarakat tahun buku 2005, 2006 dan 2007. Pelaksanaan dan penyelesaian gadai antara Perum Pegadaian dengan Nyonya Sena Wiradjaya dinyatakan selesai karena seluruh penjualan BLP/AYD sebesar total Rp 5.096.51 juta telah diterima oleh Perum Pegadaian seluruhnya.

- b. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2008, Perusahaan bermaksud untuk melakukan perubahan status badan hukum dari Perum menjadi Persero. Sehubungan dengan hal tersebut telah dibentuk Tim Persiapan Pemerseroan Perum Pegadaian sesuai dengan Surat Direksi No.26/SP.200.232/2008 tanggal 7 Januari 2008. Usulan perubahan bentuk badan hukum tersebut telah disampaikan ke Menteri Negara BUMN dan selanjutnya oleh Menteri BUMN telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan surat tanggal 3 April 2008 Nomor S-223/MBU/2008. Menanggapi surat tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan suratnya Nomor S-368/MK.06/2008 tanggal 23 Juli 2008 pada prinsipnya menyetujui perubahan bentuk badan hukum dari Perum menjadi Perseroan dan mengajukan agar dilakukan pembahasan bersama dengan membentuk tim terpadu antar departemen untuk melakukan kajian lebih lanjut.

Atas hasil kajian/pembahasan bersama tersebut secara prinsip perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) disetujui oleh Menteri Keuangan dengan suratnya tanggal 5 Oktober 2009 Nomor S-592/MK.06/2009 dan Menteri Negara BUMN dengan suratnya Nomor S-801/MBU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2005, saat ini sedang disusun Rancangan perubahan bentuk badan hukum (RPBBH) dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). RPBBH telah dikirimkan ke Menteri Negara BUMN dengan Surat Nomor 916/SP.300233/2010 tanggal 29 Oktober 2010 memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) PP 43 tahun 2005. Ringkasan RPBBH telah diumumkan di surat kabar Media Indonesia pada tanggal 18 Nopember 2011 (sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1) PP Nio. 43 tahun 2005) dan telah dikirimkan ke pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor dan karyawan. Surat pemberitahuan tidak keberatan/persetujuan untuk menjadi persero dari karyawan telah diteruskan kepada Menteri BUMN dengan surat Nomor 1026/SP.300233/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan surat persetujuan untuk menjadi persero dari pihak kreditor telah dikirimkan kepada Menteri Negara BUMN dengan surat nomor 1031/SP.300233/2010 tanggal 8 Desember 2010. Sampai dengan tanggal laporan, perubahan ini masih dalam proses di Kementerian BUMN.

Pada tanggal 9 Maret 2011, Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) kepada Presiden Republik Indonesia (RI). Pada tanggal 5 Mei 2011, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Presiden RI melalui surat Sekretaris Negara Republik Indonesia No.B-622/M.Sesneg/D-4/05/2011 mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perum menjadi Persero.

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri ini berlaku efektif apabila telah terbit Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Pengiriman Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum untuk dilakukan harmonisasi oleh Menteri Negara BUMN kepada Menteri Hukum dan HAM dengan surat nomor S-373/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011. Penyampaian hasil pengharmonisasian RPP dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Negara BUMN dengan surat Nomor PPE.PP.02.03-1215 tanggal 1 Agustus 2011. Pengiriman RPP dari Menteri Negara BUMN kepada Presiden RI untuk ditandatangani dengan Surat Nomor S-481/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011.

Pada tanggal 13 Desember 2011 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Penyusunan Draft Akte Pendirian, Anggaran Dasar dan usulan tanggal pendirian Perseroan, usulan tanggal penutupan Neraca Perum, tanggal pembukaan Neraca Perseroan masih dalam proses.

39. Informasi Segmen

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:

Wilayah	Daerah Operasi	Jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Sumatera	Pulau Sumatera	3 Kantor Wilayah yang terdiri dari 842 Kantor Operasional
Jawa	Pulau Jawa	5 Kantor Wilayah yang terdiri dari 2.158 Kantor Operasional
Kalimantan	Pulau Kalimantan	1 Kantor Wilayah yang terdiri dari 373 Kantor Operasional
Bali & Nusa Tenggara	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	1 Kantor Wilayah yang terdiri dari 442 Kantor Operasional
Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa)	Pulau Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya	2 Kantor Wilayah yang terdiri dari 771 Kantor Operasional

Informasi segmen Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Usaha Menurut Wilayah

	2011 Rp	2010 Rp
Sumatera	886.241.119.071	678.806.049.581
Jawa	3.155.726.636.265	2.631.703.005.983
Kalimantan	505.136.356.942	389.543.037.488
Bali & Nusa Tenggara	757.950.732.544	626.588.903.695
Sulmapa	1.295.873.121.664	1.051.651.909.839
Jumlah Pendapatan Usaha	6.600.927.966.486	5.378.292.906.586

b. Hasil Usaha Menurut Wilayah

	2011 Rp	2010 Rp
Sumatera	227.839.372.132	168.440.425.144
Jawa	655.988.833.586	492.493.016.039
Kalimantan	202.797.091.919	158.496.245.557
Bali & Nusa Tenggara	317.978.666.946	272.512.283.452
Sulmapa	522.055.267.292	458.565.882.015
Jumlah Laba Usaha	1.926.659.231.875	1.550.507.852.207
Pendapatan (Beban) Lain-lain	75.592.358.839	66.218.947.447
Laba Sebelum PPh Badan	2.002.251.590.714	1.616.726.799.654

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

c. Aset Menurut Wilayah

	2011 Rp	2010 Rp
Sumatera	3.712.256.391.303	2.639.840.962.280
Jawa	12.502.084.720.766	9.838.770.256.986
Kalimantan	2.036.181.504.545	1.429.356.386.058
Bali & Nusa Tenggara	2.792.444.171.653	2.278.369.589.677
Sulmapa	5.176.386.168.317	4.096.705.647.725
Jumlah Aset	26.219.352.956.584	20.283.042.842.726

d. Aset Tetap Menurut Wilayah

	2011 Rp	2010 Rp
- Sumatera	81.094.856.824	73.150.277.308
- Jawa	263.907.773.094	267.551.938.687
- Kalimantan	52.689.338.039	49.741.855.483
- Bali & Nusa Tenggara	50.013.705.150	47.431.764.082
- Sulmapa	71.102.325.043	70.537.900.659
Jumlah Aset Tetap	518.807.998.150	508.413.736.219

e. Beban Penyusutan Aset Tetap Menurut Wilayah

	2011 Rp	2010 Rp
- Sumatera	16.866.807.662	13.713.677.707
- Jawa	42.874.329.036	40.724.539.102
- Kalimantan	6.293.715.001	4.871.797.748
- Bali & Nusa Tenggara	8.831.432.823	6.335.125.492
- Sulmapa	14.703.534.564	14.214.599.625
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	89.569.819.086	79.859.739.674

f. Liabilitas Menurut Wilayah

	2011 Rp	2010 Rp
- Sumatera	70.156.491.357	26.681.443.482
- Jawa	21.968.377.561.596	16.908.427.310.778
- Kalimantan	25.743.957.613	18.008.546.937
- Bali & Nusa Tenggara	28.852.486.694	13.441.026.310
- Sulmapa	49.859.368.702	20.281.567.394
Jumlah Kewajiban	22.142.989.865.962	16.986.839.894.901

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

40. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

a. Sifat Hubungan dengan Pihak - Pihak Berelasi

Pihak - pihak Berelasi	Sifat Hubungan dengan Pihak - Pihak Berelasi	Sifat Transaksi
PT Balai Lelang Artha Gasia	Entitas Anak	Tidak ada
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	Berelasi	Tidak ada
Dana Pensiun Pegadaian	Berelasi	Setoran dana pensiun
PT Bank BRI (Persero)	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank Mandiri Tbk.	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank BNI (Persero) Tbk	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank DKI Syariah	Berelasi	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Berelasi	Imbalan Jasa Pertanggungan
PT. ASKRINDO (Persero)	Berelasi	Imbalan Jasa Pertanggungan
Direksi dan Dewan Pengawas	Manajemen Kunci	Remunerasi
Pemerintah Pusat	Berelasi	Fasilitas Kredit Modal Kerja

b. Giro Bank

	2011 Rp	2010 Rp
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.878.590.195	9.328.254.807
PT BRI (Persero) Tbk	133.273.411.735	86.959.080.259
PT BNI (Persero) Tbk	4.608.732.047	7.459.706.843
Total	142.760.733.977	103.747.041.909

c. Pinjaman Bank

	2011 Rp	2010 Rp
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.942.916.298.599	4.931.890.157.369
PT BRI (Persero) Tbk	4.858.401.153.540	4.246.385.408.518
PT BNI (Persero) Tbk	2.940.585.172.691	1.480.851.937.402
Total	13.741.902.624.830	10.659.127.503.289

d. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Kerja sama Asuransi Barang Jaminan Kredit KCA, Kreasi, Krasida dan Gadai Syariah, terhadap kemungkinan terjadinya resiko kerugian yang diakibatkan kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana Alam.

Kerja sama Asuransi atas pinjaman Yang Diberikan Kreasi dan Krista untuk kredit yang disalurkan mulai Januari 2011.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

e. PT ASKRINDO (Persero)

Kerja sama asuransi atas Pinjaman Yang Diberikan kreasi dan krista untuk kredit yang disalurkan sampai dengan 31 Desember 2010.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

f. Direksi dan Dewan Pengawas

Sifat transaksi antara Perum Pegadaian dan Direksi / Dewan Pengawas adalah remunerasi yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang lain (tunjangan cuti, perumahan, tantiem, kesehatan dll)

g. Pemerintah Pusat

Perum Pegadaian menerima pinjaman dari pemerintah Pusat berupa Surat Utang Pemerintah sebesar Rp. 410.000.000.000 adalah pinjaman untuk pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

41. Manajemen Risiko

Perum Pegadaian sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai menghadapi risiko sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit di Perusahaan merupakan risiko yang timbul atas pinjaman yang diberikan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, Perusahaan menghadapi risiko kredit dalam hal terjadi salah taksir terhadap barang jaminan milik nasabah yang berakibat penetapan pinjaman melebihi nilai barang jaminan atau turunnya nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan, apabila nasabah tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan. Jumlah maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai pinjaman yang diberikan dikarenakan kemungkinan adanya pemalsuan barang jaminan dan kecurangan yang dilakukan oleh penaksir.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kemampuan debitur/nasabah turun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.
- Turunnya nilai/kualitas barang jaminan yang diagunkan, sehingga pada saat dieksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Kredit gadai dijamin oleh *collateral* berupa barang yang dikuasai oleh Pegadaian.
- Komposisi barang yang dijaminkan sebesar 90% berupa emas, berlian sedangkan sisanya berupa jaminan non-emas (elektronik, kendaraan bermotor, kain, gerabah dan lain-lain)
- Perum Pegadaian mempunyai hak eksekusi atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya

Eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan adalah sebagai berikut :

	2011 Rp	2010 Rp
ASET		
Kas dan Bank	459.112.641.756	357.072.324.281
Pinjaman yang Diberikan	23.576.329.886.425	18.079.061.031.676
Piutang Lainnya	16.323.935.747	13.619.865.553
Piutang Pihak Berelasi	2.817.905.157	1.082.227.864
	24.054.584.369.085	18.450.835.449.374

Perusahaan tidak memiliki konsentrasi kredit yang signifikan.

b. Risiko Pendanaan

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perusahaan menghadapi kemungkinan risiko yang terkait dengan pendanaan, yaitu kemungkinan Perusahaan tidak dapat memenuhi liabilitas pembayaran jangka pendek. Hal itu dapat disebabkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat bunga di pasar, dan terkait dengan struktur permodalan, sehingga kemampuan Perusahaan untuk memberikan pinjaman menjadi berkurang.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Hal ini akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Perusahaan.

Risiko Pendanaan terdiri dari :

a. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Adalah kemungkinan Perum Pegadaian tidak dapat memenuhi liabilitas pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kreditur secara bersama menarik atau tidak memperpanjang pinjaman jangka pendeknya.
- Belum adanya kreditur pengganti.
- Kinerja keuangan menurun sehingga kepercayaan investor juga menurun.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- *Current Ratio* Pegadaian 140,55%, dimana 1,90% dari total aset merupakan kas dan setara kas sedangkan 88,77% merupakan outstanding pinjaman dengan jangka waktu kredit (*cash collection*) 4 bulan, sedangkan sebagian besar utang berjangka waktu kurang dari 1 tahun.
- Kinerja keuangan Pegadaian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan, sekalipun dalam kondisi krisis seperti yang terjadi di tahun 1998-1999.
- Terkait dengan kinerja keuangan yang baik, kepercayaan investor semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penilaian Pefindo untuk Obligasi Perum Pegadaian mendapat rating AA+ (*double A plus; stable outlook*) klasifikasi *investment grade*.
- Telah dilakukannya portofolio sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari 6 (enam) kreditur perbankan.

b. Risiko Suku Bunga

Adalah risiko yang terjadi karena fluktuasi tingkat suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan *cost of fund* maupun penurunan laba. Di samping itu, naiknya tingkat suku bunga sumber pendanaan Perusahaan, tidak dapat langsung diberlakukan kepada nasabah yang masih memiliki pinjaman sehingga mengurangi kemampuan Perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- a. Kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.
- b. Kenaikkan *lending rate* tidak dapat segera diberlakukan dengan pertimbangan daya beli masyarakat menurun (inflasi sangat tinggi).

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Besarnya suku bunga efektif sebagai berikut :

	2010 Rp
Aset	
Kas dan bank	5,00 - 8,00
Pinjaman yang Diberikan	9,00 - 10,80
Piutang Lainnya	non bearing interest
Liabilitas	
Pinjaman Bank	8,25 - 12,45
Pinjaman Obligasi	12,94 - 18,25
Pinjaman dari Pemerintah	5,00 - 8,88

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan *lending rate* sepenuhnya berada di bawah kontrol manajemen.
- Penundaan kenaikan *lending rate* dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan.

31 Desember 2011						
	Suku bunga mengambang/ Suku bunga tetap/				Tidak Dikenakan bunga/	Jumlah
	Floating rate		Fixed rate			
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun		
Aset						
Kas dan Bank	283.563.351.010	--	--	--	175.549.290.746	459.112.641.756
Pinjaman yang Diberikan	--	--	16.184.369.748.000	7.391.960.138.425	--	23.576.329.886.425
Piutang Lainnya	--	--	--	16.323.935.747	--	16.323.935.747
Piutang Pihak Berelasi	--	--	--	--	2.817.905.157	2.817.905.157
Jumlah Aset Keuangan	283.563.351.010	--	16.184.369.748.000	7.408.284.074.172	178.367.195.903	24.054.584.369.085
Liabilitas						
Pinjaman Bank	16.593.817.334.410	--	--	--	--	16.593.817.334.410
Pinjaman Obligasi	--	492.298.907.300	--	3.163.660.741.685	--	3.655.959.648.985
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	--	--	--	--	15.000.000.000
Utang Kepada rekanan	--	--	--	--	--	31.919.876.762
Utang Kepada Nasabah	--	--	--	--	--	73.195.333.640
Utang Lancar Lainnya	--	--	--	--	--	242.938.096.873
Pinjaman dari pemerintah Pusat	--	--	--	410.000.000.000	--	410.000.000.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	16.608.817.334.410	492.298.907.300	--	3.573.660.741.685	--	21.022.830.290.670
31 Desember 2010						
	Suku bunga mengambang/ Suku bunga tetap/				Tidak Dikenakan bunga/	Jumlah
	Floating rate		Fixed rate			
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun		
Aset						
Kas dan Bank	127.975.349.647	--	--	--	229.096.974.634	357.072.324.281
Pinjaman yang Diberikan	--	--	16.907.507.671.547	1.171.553.360.129	--	18.079.061.031.676
Piutang Lainnya	--	--	--	--	13.619.865.553	13.619.865.553
Piutang Hubungan Istimewa	--	--	--	--	1.082.227.864	1.082.227.864
Jumlah Aset Keuangan	127.975.349.647	--	16.907.507.671.547	1.171.553.360.129	243.799.068.051	18.450.835.449.374
Liabilitas						
Pinjaman Bank	13.070.484.120.221	--	--	--	--	13.070.484.120.221
Pinjaman Obligasi	63.043.188.388	429.004.390.687	336.139.920.968	2.165.393.127.411	--	2.993.580.627.454
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	--	--	--	--	15.000.000.000
Utang Kepada rekanan	--	--	--	--	29.163.829.278	29.163.829.278
Utang Kepada Nasabah	--	--	--	--	64.454.806.979	64.454.806.979
Utang Lancar Lainnya	--	--	--	--	160.174.831.848	160.174.831.848
Pinjaman dari pemerintah Pusat	--	--	--	410.000.000.000	--	410.000.000.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	13.148.527.308.609	429.004.390.687	336.139.920.968	2.575.393.127.411	253.793.468.105	16.742.858.215.780

c. Risiko Permodalan

Adalah risiko yang muncul terkait dengan struktur permodalan atau rasio antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko financial leverage.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Aktivitas operasional belfluktuasi sehingga pendapatan yang diterima belfluktuasi.
- Meningkatnya *Debt to Equity Ratio (DER)* yaitu perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

- Rendahnya *retained earning* dibanding ekspansi usaha.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Pertumbuhan usaha dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 20% per tahun.
- Mengingat utang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, maka biaya bunga yang timbul berbanding lurus dengan pendapatan Perusahaan.

c. Risiko Barang Jaminan

Perusahaan dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai barang jaminan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut Perusahaan berliabilitas untuk menyimpan dan memeliharanya sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan Perusahaan menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

d. Risiko Persaingan

Persaingan bisnis kini semakin ketat. Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, saling berlomba mengucurkan kredit kepada masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan. Keunggulan tersebut menyangkut keunggulan dalam bidang produk, harga, saluran distribusi maupun pelayanan. Jenis produk yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan dengan berbagai kemudahan yang diberikan dalam memperoleh kreditnya, sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar Perusahaan. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000 akan meningkatkan persaingan.

e. Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko yang dihadapi Perusahaan sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional Perusahaan sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan. Termasuk dalam risiko operasional ini adalah yang berdampak pada kehilangan peluang untuk menyalurkan kredit. Risiko Operasional juga mencakup kualitas sumber daya manusia terutama juru taksir sebagai ujung tombak dalam operasional Perusahaan.

f. Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat kegiatan usaha Perusahaan berhubungan dengan kepentingan umum, maka biasanya Pemerintah senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi Perusahaan apabila berpengaruh pada adanya perubahan atau penyesuaian dalam kegiatan operasional, salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000.

g. Risiko Teknologi

Merupakan resiko yang dihadapi Perusahaan terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu yang sulit dideteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksir Pegadaian. Di sisi lain apabila Perusahaan ingin terus mengikuti perkembangan teknologi diperlukan biaya investasi yang sangat besar.

h. Risiko Keamanan

Resiko keamanan merupakan resiko Perusahaan yang dihadapi sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang/tidak kondusif yang ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminal dengan berbagai modus operandi, di mana Pegadaian menjadi salah satu sasaran kejahatan/perampokan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010
(Dalam Rupiah Penuh)

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi risiko :

1. Melakukan peningkatan standar kualitas barang yang dijaminakan.
2. Mencari alternatif-alternatif pendanaan yang mempunyai *cost of fund* yang lebih murah dan pencarian modal kerja dari berbagai sumber dengan berbagai jangka waktu yang sebagian besar lebih lama dari jangka waktu piutang.
3. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan, sehingga tercipta tenaga kerja yang profesional, yang dapat menunjang operasi Perusahaan secara optimal.
4. Melakukan restrukturisasi cabang-cabang.
5. Membangun *corporate culture* dan *corporate image* melalui penanaman dan sosialisasi kerabat menggapai cita.
6. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah dan seluruh asset Perusahaan.
7. Mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi).
8. Menempatkan aparat keamanan (TNI dan atau Kepolisian) di Cabang PERUM Pegadaian dan meningkatkan system penyimpanan barang jaminan, antara lain : pemasangan alarm, penggunaan CCTV, teralis dan penempatan brankas/kluis.
9. Membangun kerjasama penanganan keamanan untuk daerah yang tergabung (cluster) sehingga lebih efisien.

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan :

	2011		2010	
	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp
ASET				
Kas dan Bank	459.112.641.756	459.112.641.756	357.072.324.281	357.072.324.281
Pinjaman Yang Diberikan	23.576.329.886.425	23.576.329.886.425	18.079.061.031.676	18.079.061.031.676
Piutang Lainnya	16.323.935.747	16.323.935.747	13.619.865.553	13.619.865.553
Piutang Pihak Berelasi	2.817.905.157	2.817.905.157	1.082.227.864	1.082.227.864
LIABILITAS				
Pinjaman Bank	16.593.817.334.410	16.593.817.334.410	13.070.484.120.221	13.070.484.120.221
Pinjaman Obligasi	3.655.959.648.985	3.655.959.648.985	2.993.580.627.454	2.993.580.627.454
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000
Utang Kepada Nasabah	73.195.333.640	73.195.333.640	64.454.806.979	64.454.806.979

Metode dan asumsi untuk estimasi nilai wajar adalah untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun, atas nilai wajar tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai tercatatnya. Namun untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya, karena mempunyai jangka waktu yang kurang dari 5 tahun dan dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif baik untuk perhitungan *amortized cost* maupun perhitungan penurunan nilai *discounted cash flow*, sehingga nilai wajar (sama dengan *discounted cash flow*) yang merupakan nilai tercatat dikurangi dengan penurunan nilai.

42. Revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan beberapa revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012, diantaranya, adalah sebagai berikut:

1. PSAK No. 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
2. PSAK No. 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
3. PSAK No. 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja
4. PSAK No. 34 (Revisi 2010) : Pajak Penghasilan
5. PSAK No. 46 (Revisi 2010) : Kontrak Konstruksi

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

- | | | | |
|-----|---------------------------|---|--|
| 6. | PSAK No. 50 (Revisi 2010) | : | Instrumen Keuangan : Penyajian |
| 7. | PSAK No. 53 (Revisi 2010) | : | Pembayaran Berbasis Saham |
| 8. | PSAK No. 60 | : | Instrumen Keuangan : Pengungkapan |
| 9. | PSAK No. 61 | : | Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah |
| 10. | ISAK No. 13 | : | Lindung Nilai Investasi Neto dalam kegiatan Usaha Luar Negeri |
| 11. | ISAK No. 15 | : | PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya |
| 12. | ISAK No. 16 | : | Perjanjian Konsesi Jasa |
| 13. | ISAK No. 18 | : | Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi |
| 14. | ISAK No. 20 | : | Pajak Penghasilan – Perubahan Status Pajak Entitas atau Pemegang Saham Entitas. |

Perusahaan belum menerapkan PSAK tersebut dalam periode 2011. Saat ini Manajemen sedang dalam mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh standar dan interpretasi standar tersebut yang penerapannya dipersyaratkan untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012.

43. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Posisi Keuangan

1. Berdasarkan Akta Perjanjian No. 83 tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Porbaningsih Adi Warsito, SH di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan Tahap II adalah sebagai berikut :

No	Penjamin dan Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan Tahap II	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Total (Rp)	Persentase
1	PT Bahana Securities (terafiliasi)	105.000.000.000	105.000.000.000	140.000.000.000	348.000.000.000	698.000.000.000	69,80
2	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	45.000.000.000	45.000.000.000	60.000.000.000	15.000.000.000	300.000.000.000	30,00
3	PT Indomitra Securities	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	0,10
4	PT Valbury Asia Sekuritas	-	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	0,10
Total		150.000.000.000	150.000.000.000	200.000.000.000	365.000.000.000	1.000.000.000.000	100,00

Sehubungan dengan telah dilakukan penawaran Obligasi tersebut pada tanggal 14 Februari 2012, Perusahaan telah menerima dana sebesar Rp 699.775.090.000 dari PT Bahana Securities dan sebesar Rp 299.903.610.000 dari PT Danareksa Sekuritas.

2. Pada tanggal 6 Februari 2012 telah dilakukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Sri Giyanto, selaku Direktur CV Cipta Sarana Berlian (CSB) dan selaku kuasa dari PT Inspira Adhi Mitra atas pengadaan Diamond Selector Culti II Type DSII-861 yang digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan sebanyak 2.507 unit dengan nilai pengadaan sebesar Rp 2.297.390.000. Setelah dilakukan perhitungan secara cermat dan seksama oleh Tim SPI, ditemukan dan disepakati, selisih nilai pengadaan sebesar Rp 1.670.640.000, dikurangi dengan yang sudah dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp 701.400.000 menjadi Rp 969.240.000, ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp 66.825.600, sehingga kerugian materiil sebesar Rp 1.036.065.000 dan kerugian immaterial berupa Diamond Selector yang disediakan tidak sesuai dengan kesepakatan di SPK dan PKS yang akan berdampak pada hasil pengujian barang jaminan berlian tidak akurat yang akan menurunkan rasa kepercayaan dari nasabah maupun masyarakat luas sebesar Rp 1.000.000.000, sehingga jumlah kerugian bagi Perusahaan sebesar Rp 2.036.065.000.
3. Pada tanggal 8 Maret 2012 telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasana (Perampokan) di Perum Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Lenteng Agung yang mengakibatkan sejumlah Barang Jaminan Hilang dengan kerugian Perusahaan sebesar Rp 1.294.982.513 (374 potong), uang kas sebesar Rp 33.368.500, sehingga total kerugian sebesar Rp 1.328.351.013.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2011 dan 2010

(Dalam Rupiah Penuh)

4. Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor : KEP-01/KP/DP/GD/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, antara lain memutuskan :
 1. Memberhentikan dengan hotmat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Komite Audit Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian :
 1. Djoko Hendratto - sebagai Ketua Komite Audit
 2. Syahrir Ika - sebagai Anggota Komite Audit
 3. Mochammad Iskandar - sebagai Anggota Komite Audit
 2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Komite Audit Perum Pegadaian :
 1. Djoko Hendratto - sebagai Ketua Komite Audit
 2. Syahrir Ika - sebagai Anggota Komite Audit
 3. Dr. Andi Wahyu Wibisana - sebagai Anggota Komite Audit
5. Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Penagawas Perum Pegadaian Nomor : KEP-02/KP/DP/GD/2011 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Perum Pegadaian, antara lain memutuskan :
 1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota-anggota Komite Audit Manajemen Risiko Perum Pegadaian :
 1. Ketut Sethyon - sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko
 2. Suhadi Hadiwijoyo - sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko
 3. Muhammad Nur Sodik - sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko
 2. Mengangkat nama-nama tersebut dibawah ini sebagai anggota Komite Manajemen Risiko Perum Pegadaian :
 1. Ketut Sethyon - sebagai Ketua Komite Manajemen Risiko
 2. Suhadi Hadiwijoyo - sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko
 3. Ir. Tattys Miranti Hedyana, MM - sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko

44. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diselesaikan pada tanggal 27 Maret 2012.

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2012 dan 2011, dan
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011**

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

Daftar Isi

Halaman

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Auditor Independen

**Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, serta
Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir
31 Maret 2012 dan 2011, dan
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011**

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PERUM PEGADAIAN DAN ANAK PERUSAHAAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 MARET 2012, 31 MARET 2011 DAN 31 DESEMBER 2011**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Suwhono
Alamat Kantor	:	Jl. Kramat Raya No.162 Jakarta
Alamat Domisili (sesuai KTP atau kartu identitas lain)	:	Jl. Masjid V No. 6 Rt 005 Rw 005 Bendungan Hilir Tanah Abang, Jakarta Pusat
Nomor Telepon	:	(021) 3901461
Jabatan	:	Direktur Utama

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan;
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar ;
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material ;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian interen dalam perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 30 April 2012

Direktur Utama,



Suwhono

Nomor : R/213.AGA/sat.3/2012

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ABDA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi
Perusahaan Umum Pegadaian

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan konsolidasian interim Perusahaan Umum Pegadaian ("Perusahaan") dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011. Laporan keuangan konsolidasian adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan konsolidasian berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian interim yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perum Pegadaian dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan telah menerapkan beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tertentu yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, baik secara prospektif maupun retrospektif. Tidak terdapat dampak yang material penerapan PSAK tertentu tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan Entitas Anak tanggal 31 Maret 2012 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian interim terlampir disusun dengan anggapan bahwa Perusahaan akan melanjutkan usahanya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Seperti diuraikan dalam Catatan 42, pada tanggal 13 Desember 2011 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2011 ("PP 51/2011") tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Selanjutnya, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn dan kemudian telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian disingkat PT Pegadaian (Persero). Laporan keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Maret 2012 dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, seperti disajikan terlampir, merupakan laporan keuangan konsolidasian penutup Perum Pegadaian yang di dalamnya mencakup laporan posisi keuangan penutup ("neraca penutup") Perum Pegadaian sebagaimana dimaksud oleh PP 51/2011 Pasal 4.



Saptoto Agustomo

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0499

Jakarta, 30 April 2012

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**
Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	2.e, 3	380.879.986.327	459.112.641.756
Pinjaman Yang Diberikan (setelah dikurangi Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 175.637.727.719 dan Rp 188.357.885.191)	2.f, 2.n, 4	25.481.741.512.234	23.576.329.886.425
Piutang Lainnya	5	14.529.399.596	16.323.935.747
Persediaan	2.h, 6	13.361.076.126	30.602.405.764
Uang Muka	7	215.485.626.790	192.266.904.748
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.o, 8	1.246.049.846.397	1.178.524.120.608
Beban Dibayar di Muka	2.o, 9	100.937.110.665	84.061.299.664
Pajak Dibayar di Muka	2.p, 19.a	—	—
Jumlah Aset Lancar		27.452.984.558.135	25.537.221.194.712
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Kepada Pihak-Pihak Berelasi (Setelah Dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 13.680.096.705 dan Rp 15.169.617.078)	2.d, 10	7.128.344.666	2.817.905.157
Aset Pajak Tangguhan	2.p, 19.d	76.801.604.217	71.489.266.676
Aset Tetap (Setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 532.467.052.692 dan Rp 513.511.288.137)	2.i, 11	517.856.064.328	518.807.998.150
Aset Lain-lain	2.j, 2.k, 2.l, 12	108.494.257.469	89.016.591.889
Jumlah Aset Tidak Lancar		710.280.270.680	682.131.761.872
JUMLAH ASET		28.163.264.828.815	26.219.352.956.584

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**
Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 Rp	2011 Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman Bank	13	16.913.173.190.751	16.593.817.334.410
Pinjaman <i>Medium Term Notes</i> yang akan jatuh tempo			
Dalam Waktu Satu Tahun	14	425.000.000.000	425.000.000.000
Pinjaman Lainnya	16	15.000.000.000	15.000.000.000
Utang Kepada Rekanan	17	31.342.681.921	31.919.876.762
Utang Kepada Nasabah	18	73.568.695.483	73.195.333.640
Utang Pajak	2.p, 2.q, 19.b	153.114.554.705	157.467.592.967
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	20	261.555.204.316	136.676.934.568
Pendapatan Diterima di Muka	21.a	14.011.565.450	13.373.077.774
Utang Lancar Lainnya	23	256.649.219.478	242.938.096.873
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		18.143.415.112.104	17.689.388.246.994
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pinjaman <i>Medium Term Notes</i> - Setelah Dikurangi Bagian			
Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	14	240.000.000.000	240.000.000.000
Pinjaman Obligasi - Setelah Dikurangi Bagian			
Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	15	4.655.165.507.407	3.655.959.648.985
Pinjaman dari Pemerintah:			
Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	22	410.000.000.000	410.000.000.000
Pendapatan Ditangguhkan	21.b	20.741.522.731	21.150.894.890
Liabilitas Imbalan Kerja	2.m, 24	157.461.936.487	126.491.075.093
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		5.483.368.966.625	4.453.601.618.968
Jumlah Liabilitas		23.626.784.078.729	22.142.989.865.962
EKUITAS			
Modal Awal	25	205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah		46.252.000.000	46.252.000.000
Saldo Laba:			
- Ditentukan Penggunaannya	25.a	2.348.875.803.694	2.348.875.803.694
- Belum Ditentukan Penggunaannya	25.b	1.936.352.946.392	1.476.235.286.928
Jumlah Ekuitas		4.536.480.750.086	4.076.363.090.622
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		28.163.264.828.815	26.219.352.956.584

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN**
Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Sewa Modal	2.o, 26	1.710.786.204.358	1.358.429.105.606
Pendapatan Administrasi	2.o, 27	175.541.228.946	140.608.471.385
		<u>1.886.327.433.304</u>	<u>1.499.037.576.991</u>
Pendapatan Usaha Lainnya:			
Pendapatan Lainnya	2.o, 28	5.167.430.727	3.561.398.542
		<u>5.167.430.727</u>	<u>3.561.398.542</u>
Jumlah Pendapatan Usaha		<u>1.891.494.864.031</u>	<u>1.502.598.975.533</u>
BEBAN USAHA			
Bunga dan Provisi	2.o, 29	523.602.263.320	421.696.239.747
Penyusutan Aset Tetap	2.i, 2.o, 30	21.787.440.659	21.916.358.239
Pegawai	2.o, 31	509.337.889.249	369.717.678.241
Umum	2.o, 32	245.030.475.237	199.559.132.133
		<u>1.299.758.068.465</u>	<u>1.012.889.408.360</u>
Jumlah Beban Usaha		<u>1.299.758.068.465</u>	<u>1.012.889.408.360</u>
LABA USAHA		<u>591.736.795.566</u>	<u>489.709.567.173</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Uang Kelebihan Lewat Waktu	2.o, 18	5.243.825.007	5.870.087.594
Pendapatan Sewa Gedung	2.o, 33	459.711.229	617.177.640
Pendapatan Jasa Giro	34	381.837.669	336.314.964
Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap	2.i, 35, 11	--	(5.879.554)
Pendapatan Lainnya	2.o, 36.a	15.887.440.642	14.315.226.538
Beban Lain-lain	2.o, 36.b	(83.724.440)	(1.696.909.708)
Jumlah Pendapatan Lain-lain		<u>21.889.090.107</u>	<u>19.436.017.474</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN BADAN		<u>613.625.885.673</u>	<u>509.145.584.647</u>
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	2.p, 19.c	158.820.563.750	159.884.554.500
Tangguhan	2.p, 19.d	(5.312.337.541)	(33.111.758.562)
Jumlah Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan		<u>153.508.226.209</u>	<u>126.772.795.938</u>
LABA PERIODE BERJALAN		<u>460.117.659.464</u>	<u>382.372.788.709</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
SETELAH PAJAK		--	--
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN			
		<u>460.117.659.464</u>	<u>382.372.788.709</u>
LABA YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :			
Pemilik Entitas Induk		<u>460.117.659.464</u>	<u>382.372.788.709</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**
Untuk Periode 3 bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	Modal Awal	Penyertaan Modal Pemerintah	Saldo Laba		Jumlah Ekuitas
				Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya	
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo per 31 Desember 2010		205.000.000.000	46.252.000.000	1.865.162.562.133	1.179.788.385.692	3.296.202.947.825
Laba Bersih Periode Berjalan	25b	—	—	—	382.372.788.709	382.372.788.709
Saldo per 31 Maret 2011		205.000.000.000	46.252.000.000	1.865.162.562.133	1.562.161.174.401	3.678.575.736.534
Saldo per 31 Desember 2010		205.000.000.000	46.252.000.000	1.865.162.562.133	1.179.788.385.692	3.296.202.947.825
Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan						
Pembagian Dividen		—	—	—	(648.883.612.131)	(648.883.612.131)
Dana Program Kemitraan		—	—	—	(23.595.766.000)	(23.595.766.000)
Dana Bina Lingkungan		—	—	—	(23.595.766.000)	(23.595.766.000)
Cadangan Umum		—	—	398.018.241.561	(398.018.241.561)	—
Cadangan Tujuan		—	—	85.695.000.000	(85.695.000.000)	—
Jumlah Penggunaan Dana Selama Tahun Berjalan	25b	—	—	483.713.241.561	(1.179.788.385.692)	(696.075.144.131)
Laba Bersih Tahun 2011		—	—	—	1.476.235.286.928	1.476.235.286.928
Saldo per 31 Desember 2011		205.000.000.000	46.252.000.000	2.348.875.803.694	1.476.235.286.928	4.076.363.090.622
Laba Bersih Periode Berjalan	25b	—	—	—	460.117.659.464	460.117.659.464
Saldo per 31 Maret 2012		205.000.000.000	46.252.000.000	2.348.875.803.694	1.936.352.946.392	4.536.480.750.086

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**

Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2012 dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	Catatan	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (1 Tahun) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan Kas dari:			
- Penerimaan Sewa Modal		1.646.241.430.053	5.672.591.823.879
- Pendapatan Administrasi	2f,2o,27	175.541.228.946	631.147.524.106
- Pendapatan Lainnya		10.706.589.942	41.098.707.417
- Pelunasan Pinjaman Yang Diberikan		22.677.007.527.588	75.772.471.071.015
- Pelunasan dari Piutang Lainnya		30.323.978.922	226.885.529.906
- Penjualan BSL/BLP & Aset yang Disisihkan		143.783.838.149	515.834.669.467
- Penerimaan Hutang Nasabah		146.077.387.199	613.946.550.851
- Penerimaan Hutang Pajak		--	164.862.269.742
- Penerimaan Hutang Lainnya		7.626.864.560	316.046.941.617
Jumlah Penerimaan Kas Dari Aktivitas Operasi		<u>24.837.308.845.359</u>	<u>83.954.885.088.000</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
- Pembayaran Bunga Bank/Obligasi		(491.549.548.373)	(1.825.199.654.195)
- Beban Pegawai		(341.441.965.875)	(1.523.574.486.042)
- Beban Umum		(177.880.750.783)	(1.013.724.772.503)
- Penyaluran Pinjaman Yang Diberikan		(24.616.429.902.152)	(81.737.886.099.732)
- Pembayaran Hutang Kepada Rekanan		(358.266.834.387)	(58.714.889.739)
- Pembayaran Hutang Kepada Nasabah		(15.313.722.761)	(75.990.175.911)
- Pembayaran Hutang Pajak		(138.400.579.562)	(670.924.552.805)
- Pembayaran Hutang Lainnya		(37.019.452.535)	(527.758.704.032)
- Pemberian Piutang		(29.439.788.849)	(326.307.742.449)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Operasi		<u>(26.205.742.545.277)</u>	<u>(87.760.081.077.408)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>(1.368.433.699.918)</u>	<u>(3.805.195.989.408)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan Kas dari:			
- Penjualan Aset Tetap	2i,35,11	--	193.785.300
Jumlah Penerimaan Kas Dari Aktivitas Investasi		<u>--</u>	<u>34.499.700</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
- Pembelian Aset Tetap		(29.154.811.852)	(98.715.548.475)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Investasi		<u>(29.154.811.852)</u>	<u>(68.056.616.958)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		<u>(29.154.811.852)</u>	<u>(68.022.117.258)</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

**PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)**

Untuk Periode 3 Bulan yang Berakhir pada 31 Maret 2012 dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

Catatan	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (1 Tahun) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan Kas dari:		
- Hutang Bank	16.165.827.308.727	11.476.485.398.753
- Hutang MTN	--	665.000.000.000
- Hutang Obligasi	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan	17.165.827.308.727	13.141.485.398.753
Pengeluaran Kas untuk:		
- Angsuran Hutang Bank	(15.846.471.452.386)	(7.953.152.184.564)
- Pelunasan Obligasi		
Obligasi IX Seri A	--	(336.500.000.000)
Obligasi IX seri C	--	--
Obligasi IX seri B	--	--
Obligasi IX seri D	--	--
- Pelunasan Hutang Jangka Panjang Lainnya	--	--
- Pembayaran Dividen Tahun Buku Berjalan	--	(648.883.612.131)
- Pembayaran Uang Muka Dividen	--	(150.000.000.000)
- Pembayaran Program Kemitraan	--	(23.595.766.000)
- Pembayaran Program Bina Lingkungan	--	(23.595.766.000)
Jumlah Pengeluaran Kas Untuk Aktivitas Pendanaan	(15.846.471.452.386)	(9.135.727.328.695)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.319.355.856.341	4.005.758.070.058
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	(78.232.655.429)	102.040.317.475
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	459.112.641.756	357.072.324.281
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	380.879.986.327	459.112.641.756
Kas dan Bank terdiri dari:		
Kas	269.586.409.777	283.453.351.010
Bank	111.293.576.550	175.659.290.746
Jumlah	380.879.986.327	459.112.641.756

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

1. Umum

1.a Pendirian

Pegadaian (selanjutnya Perusahaan) adalah suatu lembaga perkreditan, berdiri sejak jaman penjajahan Belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Menurut sejarah Pegadaian dimulai pada abad XVIII ketika VOC berdagang ke Indonesia. Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomiannya, VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank Van Leening didirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Pada tahun 1811 ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Gubernur Jendral Thomas Stamford Raffles membubarkan Bank Van Leening dan mengizinkan setiap orang untuk mendirikan usaha pegadaian dengan ijin (*licentie*). Namun saat Belanda kembali berkuasa di tahun 1900 berdasarkan penelitian oleh lembaga peneliti yang dipimpin oleh Wolf van Westerrode, disarankan agar kegiatan pegadaian ditangani oleh pemerintah agar memberi manfaat bagi masyarakat. Pada tanggal 12 Maret 1901 pemerintah mengeluarkan *Staatsblad* No 131. Berdasarkan undang-undang ini didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901. Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Pegadaian mempunyai tugas memberikan pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 178 tanggal 3 Mei 1961 Perusahaan Jawatan Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian, sebagai badan usaha negara di bawah naungan Departemen Keuangan. Dengan terbitnya Inpres No.17 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1969, PN Pegadaian beralih statusnya menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan PP No.103 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000, Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perusahaan dan bertujuan untuk:

- Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

- Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai
- Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia (kepercayaan), pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu adi serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Selain penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, Perusahaan menjalankan usaha jasa gadai syariah (Rahn), sejak tanggal 10 Januari 2003.

Perusahaan berkantor pusat di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta, dengan 12 Kantor Wilayah, 717 Kantor Cabang Konvensional, 160 Kantor Cabang Syariah, dan 3.271 Unit Pelayanan Cabang (UPC) dan 438 Unit Pelayanan Syariah (UPS) diseluruh Indonesia per 30 Desember 2011.

Berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan dan Surat Menteri Keuangan RI No.1015/KMK.013/ 1991 tanggal 26 September 1991, modal awal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp 205.000.000.000 sebagaimana tertuang dalam Laporan Posisi Keuangan Pembukaan. Modal awal yang disetor Pemerintah tersebut adalah kumulatif laba bersih yang diperoleh Perjan Pegadaian.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Secara bertahap mulai tahun 1991, Pemerintah Republik Indonesia memberikan tambahan modal sebagai Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp 46.252.000.000 melalui SK Menteri Keuangan RI masing-masing sebagai berikut:

Nomor	Tanggal	Rp
0360/KM.3-42/SKOP/0391	30 Maret 1991	20.000.000.000
0136/KM.3-42/SKOP/0891	5 Agustus 1991	16.252.000.000
0151/MK.013/1992	29 Juni 1992	10.000.000.000
Jumlah		46.252.000.000

1.b Penawaran Umum Efek Perusahaan

Perusahaan telah menerbitkan emisi obligasi 14 (empat belas) kali, dengan jangka waktu masing-masing 2 tahun untuk Obligasi Berkelanjutan I (Tahap 1 dan 2, masing-masing tahun 2011 dan 2012), 5 tahun untuk obligasi tahun 1993, 1998, 2001 dan 2009 (Seri A), jangka waktu 8 tahun untuk obligasi tahun 1999, 2000, 2002, 2003 (Seri A) dan 2009 (Seri B) dan jangka waktu 15 tahun untuk obligasi tahun 2003 Seri B serta jangka waktu 10 tahun untuk obligasi tahun 2006, 2007 dan 2009 (Seri C).

Seluruh obligasi dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
1993	Obligasi I	11 Juni 1993 & 9 Juli 1998	50 milyar	Bunga 17,5% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang.
1994	Obligasi II	30 Juni 1994 & 18 Juli 1999	25 milyar	Bunga 13% tetap untuk 6 bulan pertama, selanjutnya mengambang yaitu 1% di atas tingkat bunga deposito 6 bulan bank pemerintah.
1996	Obligasi III	25 Juni 1996 & 12 Juli 2001	100 milyar	Bunga 17,75% tetap untuk tahun pertama, 4 tahun berikutnya mengambang 1,5 % di atas tingkat bunga deposito bank pemerintah & swasta.
1997	Obligasi IV	16 Juni 1997 & 3 Juli 2002	100 milyar	Bunga 14,75% tetap untuk tahun pertama, 4 tahun berikutnya mengambang 1% diatas tingkat bunga deposito bank pemerintah dan swasta.
1998	Obligasi V	23 Juni 1998 & 8 Juli 2003	64,6 milyar	Bunga Seri A1 49% tetap untuk tahun pertama, seterusnya mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium. Bunga Seri B2 mengambang sesuai tingkat bunga JIBOR tiga bulan ditambah 3% premium.
1999	Obligasi VI	24 Agt 1999 & 8 Sept 2007	135 milyar	Bunga 15,5% tetap untuk tahun pertama, 7 tahun berikutnya mengambang sebesar 1,75% di atas tingkat bunga rata-rata JIBOR 6 bulan.
2000	Obligasi VII	27 Juni 2000 & 21 Juli 2008	150 milyar	Bunga 15,625% tetap untuk tahun pertama, berikutnya mengambang 1,725% di atas tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2001	Obligasi VIII	31 Mei 2001 & 12 Juni 2006	300 milyar	<p>Bunga Seri A 19,25% tetap, cicilan 20% pokok per tahun Seri B 19,25% tetap, Seri C 0,50% tetap menurun per tahun 20,25% untuk tahun pertama, Seri D 19,25% tetap untuk tahun pertama, selanjutnya mengambang sesuai dengan tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, maksimal 24,25% minimal 16,25%,</p> <p>Seri E 19,25% tetap untuk tahun pertama sampai tahun ketiga, selanjutnya mengambang sesuai tingkat bunga rata-rata deposito 6 bulan bank pemerintah ditambah 2,50% premi, maksimal 24,25% minimal 16,25%.</p>
2002	Obligasi IX	24 Mei 2002 & 6 Juni 2010	300 milyar	<p>Bunga Seri A 18,25% tetap per tahun, Seri B 18,25% per tahun, amortisasi 10% tahun keempat emisi, 20% tahun kelima sampai dengan ketujuh 30% tahun kedelapan emisi, Seri C 18,25% tetap tahun Pertama, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maksimal 20,00% minimal 16,50%. Seri D dengan opsi jual pada tahun kelima, 18,25% tetap tahun pertama sampai dengan tahun kelima, selanjutnya mengambang berdasarkan rata-rata bunga deposito Rupiah berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi tetap 2,50% per tahun, maksimal 20,00%, minimal 16,50%.</p>
2003	Obligasi X	27 Juni 2003, 11 Juli 2011 & 2018	400 milyar	<p>Bunga Seri A 12,9375% tetap per tahun dengan jangka waktu 8 tahun, Seri B dengan jangka waktu 15 tahun dengan tingkat bunga 13,125% per tahun tetap untuk tahun pertama sampai dengan ke tiga, selanjutnya tahun ke empat dan sampai dengan ke tahun kelima belas mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 3 bulan ditambah premi 1,0% per tahun maksimum 15,50%, minimum 10,50%.</p>
2006	Obligasi XI	23 Mei 2006 & 23 Mei 2016	500 milyar	<p>Bunga Seri A 13,10% per tahun tetap, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 13,10% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1,25% per tahun, maksimum 16,00%, minimum 10,00%.</p>
2007	Obligasi XII	4 September 2007 & 2017	600 milyar	<p>Bunga Seri A 10,025% per tahun tetap, jangka waktu 10 tahun; Seri B jangka waktu 10 tahun tingkat bunga 10,025% per tahun tetap untuk tahun pertama, selanjutnya tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh mengambang berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka 1 bulan ditambah premi 1% per tahun, maksimum 12,00%, minimum 8,00%.</p>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2009	Obligasi XIII	1 Juli 2009, 2014, 2017 & 2019	1.500 milyar	<p>Seri A1, tingkat bunga tetap 11,675% pertahun untuk tahun pertama sampai tahun ke-5. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp 350 miliar. Seri A2, tingkat bunga tetap 11,675% per tahun untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun ke-2 sampai tahun ke-5 yang besarnya berdasarkan tingkat bunga SBI berjangka waktu satu bulan ditambah premi 3% per tahun dengan batas atas 13% dan batas bawah 10%. Jangka waktu 5 tahun dengan jumlah Rp100 miliar. Seri B, tingkat bunga tetap 12,650% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun ke 8. Jangka waktu 8 tahun dengan jumlah Rp 650 miliar. Seri C, tingkat bunga tetap 12,875% per tahun untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh. Jangka waktu 10 tahun dengan jumlah Rp 400 miliar.</p>
2011	Obligasi Berkelanjutan I	11 Oktober 2011 dan 11 Oktober 2014, 2016, 2021	2.000 milyar	<p>Obligasi Berkelanjutan I, dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp2. triliun yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.</p> <p>Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun terdiri dari Seri A, B dan C.</p> <p>Seri A, jumlah pokok sebesar Rp250 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2014.</p> <p>Seri B, jumlah pokok sebesar Rp250 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2016.</p> <p>Seri C, jumlah pokok sebesar Rp500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun, jangka waktu 10 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2021.</p>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Tahun	Keterangan	Tanggal Efektif & Jatuh Tempo	Nominal (Rp)	Tingkat Bunga
2012	Obligasi Berkelanjutan I (Tahap II)	14 Februari dan 18 Februari 2013, Februari 2015, 2017, 2019	1.000 milyar	<p>Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap II dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 tahun sejak efektifnya Pemyataan Pendaftaran.</p> <p>Obligasi Berkelanjutan Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp 1 triliun terdiri dari Seri A, B, C dan D</p> <p>Seri A, jumlah pokok sebesar Rp150 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 6,60% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 370 terhitung terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 18 Februari 2013.</p> <p>Seri B, jumlah pokok sebesar Rp150 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2015.</p> <p>Seri C, jumlah pokok sebesar Rp200 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,5% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2017.</p> <p>Seri D, jumlah pokok sebesar Rp500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun, jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2019.</p>

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) pada tanggal 18 Februari 2010 yang telah diaktakan dalam Akta No.19 tanggal 18 Februari 2010 oleh notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH mengenai pengunduran diri PT Bank BNI Tbk selaku wali amanat Obligasi serta pergantian wali amanat yaitu mengganti PT Bank BNI Tbk dengan PT Bank Mega Tbk.

1.c Dewan Pengawas, Dewan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Manajemen Perusahaan terdiri atas Dewan Pengawas dan Direksi, masing-masing diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Pengawas:

Berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-366/S.MBU.1.1/2011 tanggal 15 Agustus 2011 mengenai penyampaian salinan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-191/MBU/2011 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perum Pegadaian, susunan Dewan Pengawas per 31 Maret 2012 dan per 31 Desember 2011 terdiri dari:

Ketua	:	Cecep Sutiawan
Anggota	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Wiranto

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Dewan Direksi :

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-18/MBU/2011 tanggal 31 Januari 2011, susunan Dewan Direksi per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 ditetapkan sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Suwhono
Direktur Pengembangan Usaha	:	Wasis Djuhar
Direktur Operasi	:	Moch. Edy Prayitno
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	:	Sumanto Hadi
Direktur Keuangan	:	Budiyanto*)

*) Selesai masa tugas berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor SK-156/MBU/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian

Komite Audit:

Untuk membantu melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengawas, Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian sebagai berikut:

- Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian sebagai berikut:
- No.Kep-01/KP/DP/GD/2004 tanggal 1 Nopember 2004;
- No.Kep-01/KP/DP/GD/2005 tanggal 31 Oktober 2005;
- No.01/KP/DP/GD/2006 tanggal 31 Oktober 2006;
- No.05/KP/DP/GD/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
- No.Kep-01/KP/DP/GD/2009 tanggal 1 April 2009;
- No. Kep-07/KP/Dp/GD/2009 tanggal 6 Oktober 2009.

Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor : KEP-01/KP/DP/GD/2012 tanggal 20 Pebruari 2012, susunan Komite Audit per 31 Maret 2012 terdiri dari :

Ketua	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Syahrir Ika
Anggota	:	Dr. Andi Wahyu Wibisana

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No.KEP-01/KP/DP/GD/2010 tanggal 8 Januari 2010, susunan Komite Audit 31 Desember 2011 terdiri dari:

Ketua	:	Djoko Hendratto
Anggota	:	Syahrir Ika
Anggota	:	M. Iskandar

Komite Manajemen Risiko:

Berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian Nomor : KEP-02/KP/DP/GD/2011 tanggal 20 Pebruari 2012, susunan Komite Manajemen Risiko per 31 Maret 2012 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Suhadi Hadiwijoyo
Anggota	:	Ir. Tattys Miranti Hedyana, MM

Berdasarkan surat keputusan Dewan Pengawas Perum Pegadaian No.KEP-03/KP/DP/GD/2010 tanggal 8 Januari 2010, susunan Komite Manajemen Risiko tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Ketut Sethyon
Anggota	:	Suhadi Hadiwijoyo
Anggota	:	Muhamad Nur Sodiq

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Dewan Pengawas Syariah:

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direksi Perum Pegadaian No.306/US.1.00/2010 tanggal 9 Desember 2010 susunan anggota Dewan Pengawas Syariah per 31 Maret 2012 dan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Anggota	:	Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH.
Anggota	:	Dr. H. M. Cholil Nafis, Lc, MA.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direksi, dan berperan dalam memperlancar koordinasi intern dalam organ Perum Pegadaian (Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) serta koordinasi ekstern antara Perum Pegadaian dengan *stakeholder*. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 2116/SDM.200322/2011 tanggal 13 Juli 2011, Sekretaris Perusahaan adalah Sriyanto, SE,MM.

Tugas Sekretaris Perusahaan adalah:

1. memastikan bahwa Perusahaan taat terhadap berbagai peraturan yang berlaku dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
2. menjalankan fungsi hubungan investor dan publikasi Perum Pegadaian.
3. menjalankan fungsi *corporate legal affair* atau *legal council*.

Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi utama yang dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan adalah:

1. menangani masalah tata usaha dan rumah tangga Direksi;
2. melaksanakan fungsi hubungan masyarakat dan publikasi Perum Pegadaian (Liaison Officer);
3. mengurus keperluan dan kepentingan Direksi dan Dewan Pengawas yang berkaitan dengan tugas Direksi;
4. sebagai mediator pihak manajemen dengan publik;
5. menangani perkara yang masuk ke pengadilan;
6. menganalisa dan memberikan opini hukum atas masalah-masalah litigasi dan non litigasi;
7. menerbitkan buletin "Warta Pegadaian" dalam rangka penyebaran informasi baik ke dalam (karyawan) maupun ke luar (masyarakat).

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.3097/SDM.200322/2011 tanggal 9 September 2011, No. 3388/PSDM-BK.100321/2011 tanggal 17 Oktober 2011, dan No.3076/SDM.200322/2011 tanggal 6 September 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum Pegadaian, susunannya adalah sebagai berikut:

Kepala	:	Slamet Mulyatno
Inspektur	:	Agus Budiono Arie Putra Benyamin
Sekretaris	:	Ardianingtyas
Pemeriksa Madya	:	Ketut Suhardiono Wien Sumaryanto Jermia Tanga
Pemeriksa Muda	:	Suparlan Eko Supriyanto Akhmad Ramdoni Dyah Cahyaningsih Leonard Augustinus Sirait Agus Setiawan

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Perum Pegadaian telah memiliki Piagam Audit Internal yang tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Pegadaian No.S-476/SPI/VI/2010 tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Pegadaian.

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Pengawas dan Komite Audit untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Direksi	2.287.867.950	21.403.073.385
Dewan Pengawas, Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko	861.450.341	7.213.899.758
Jumlah	3.149.318.291	28.616.973.143

Karyawan:

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (tidak diaudit) per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah masing-masing sebagai berikut:

	2012	2011
Perusahaan	8.079	7.757
Entitas Anak (PT BLAG)	--	--

1.d Entitas Anak

Sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.S-153/MK.1/2000 tanggal 25 April 2000 dan Akta Notaris Zacharias Omaweke, SH No.13 tanggal 26 Juli 2000, Perusahaan memiliki secara langsung penyertaan saham pada Entitas anak yaitu PT Balai Lelang Artha Gasia (BLAG) sebesar 99,99% yang bergerak di bidang jasa lelang dan berlokasi di Jalan Kramat Raya No.162 Jakarta. BLAG mulai beroperasi secara komersial sejak bulan September tahun 2000 dan memiliki total aset sebagai berikut:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Total Aset	2.600.000	2.600.000

Pada tahun 2010, sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 29 Juni 2010, para pemegang saham memutuskan membekukan kegiatan operasional perseroan terkait dengan penurunan omzet yang relatif permanen dan ruang gerak usaha yang semakin sempit, melakukan restrukturisasi kepengurusan dan menyelesaikan hak dan liabilitas perseroan termasuk masalah sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Saldo Kepentingan Non Pengendali atas entitas anak adalah nihil, masing-masing per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Laporan keuangan konsolidasian dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan berdasarkan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

2.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2.b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan", dan PSAK No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim".

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun tertentu dinyatakan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disajikan dengan menggunakan dasar akrual (*accrual basic*), kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas konsolidasian disusun berdasarkan metode langsung (*direct method*) dan dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan.

Penerapan Standar Akuntansi Revisi

Perusahaan telah menerapkan perubahan atas beberapa standar yang wajib diterapkan pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada, sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Januari 2011:

- PSAK No. 1 (Revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan; Menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
- PSAK No. 5 (Revisi 2009) : Segmen Operasi (Catatan 2.r)
- PSAK No. 7 (Revisi 2009) : Pengungkapan Pihak-Pihak yang Berelasi (Catatan 2.d)

Pada tanggal 1 Januari 2012, sebagai berikut:

- PSAK No. 24 (Revisi 2010) : Imbalan Kerja.
- PSAK No. 46 (Revisi 2010) : Akuntansi Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010) : Instrumen Keuangan : Penyajian
- PSAK No. 55 (Revisi 2011) : Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 60 : Instrumen Keuangan : Pengungkapan

Perusahaan mengungkapkan informasi terkait dengan penyajian laporan keuangan, segmen operasi dan pengungkapan pihak-pihak berelasi sesuai dengan yang disyaratkan oleh keempat standar tersebut, sedangkan penerapan standar-standar tersebut tidak berdampak material terhadap kinerja Perusahaan. Selain standar-standar tersebut, Perusahaan menerapkan perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011, namun dampaknya tidak material terhadap Perusahaan, sebagai berikut:

- PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas
- PSAK No. 3 (Revisi 2010) : Laporan Keuangan Interim

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

- PSAK No. 4 (Revisi 2009) : Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK No. 8 (Revisi 2009) : Peristiwa Setelah Periode Pelaporan
- PSAK No. 12 (Revisi 2009) : Bagian Partisipasi dalam Modal Ventura Bersama
- PSAK No. 15 (Revisi 2009) : Investasi pada Perusahaan Asosiasi
- PSAK No. 19 (Revisi 2010) : Aset Tak Berwujud
- PSAK No. 22 (Revisi 2010) : Kombinasi Bisnis
- PSAK No. 23 (Revisi 2010) : Pendapatan
- PSAK No. 25 (Revisi 2009) : Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan
- PSAK No. 48 (Revisi 2009) : Penurunan Nilai Aset
- PSAK No. 57 (Revisi 2009) : Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi
- PSAK No. 58 (Revisi 2009) : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"):

- ISAK No. 13 : Lindung Nilai Investasi Neto dalam kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK No. 15 : PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 16 : Perjanjian Konsesi Jasa
- ISAK No. 18 : Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010) : Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 16 (Revisi 2011) : Aset Tetap
- PSAK No. 18 (Revisi 2010) : Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK No. 30 (Revisi 2011) : Sewa
- PSAK No. 34 (Revisi 2010) : Kontrak Konstruksi
- PSAK No. 56 (Revisi 2011) : Laba per Saham
- PSAK No. 53 (Revisi 2010) : Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 61 : Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK"):

- ISAK No. 20 : Pajak Penghasilan – Perubahan Status Pajak Entitas atau Pemegang Saham Entitas.
- ISAK No. 23 : Sewa Operasi Insentif
- ISAK No. 24 : Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK No. 25 : Hak atas Tanah
- ISAK No. 26 : Penelitian Ulang Derivatif Melekat
- PPSAK No. 9 : Pencabutan ISAK 5

Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari Standar dan Interpretasi yang direvisi dan yang baru tersebut terhadap laporan keuangannya.

Perusahaan memiliki divisi syariah dimana pencatatannya disusun berdasarkan PSAK No. 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" (catatan 4 dan 26); PSAK No. 102 "Akuntansi Murabahah" (catatan 4); dan PSAK No. 107 "Akuntansi Ijarah" (catatan 26).

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

2.c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dengan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung atau Perusahaan dapat mengendalikan investasi tersebut, kecuali dalam keadaan yang jarang dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak diikuti dengan pengendalian.

Pengendalian juga ada ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang kekuasaan suara suatu entitas jika terdapat:

1. kekuasaan yang melebihi setengah hak suara sesuai dengan perjanjian investor lain;
2. kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian;
3. kekuasaan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan atau organ tersebut; atau
4. kekuasaan untuk memberikan suara mayoritas pada rapat dewan direksi dan dewan komisaris atau organ pengatur setara dan mengendalikan entitas melalui dewan direksi dan dewan komisaris atau organ tersebut.

Kepentingan non pengendali adalah bagian hasil usaha dan bagian aset bersih dari entitas anak yang tidak dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Porsi kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset bersih anak Perusahaan jumlahnya tidak signifikan (0,01%), oleh karena itu untuk tujuan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak menyajikan kepentingan non pengendali.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang disyaratkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi dan saldo antara Perusahaan dan anak Perusahaan telah dieliminasi. Penyajian laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan konsep satuan usaha.

2.d. Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor :

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - (iii) personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :
 - (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain)
 - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut adalah sama dengan transaksi lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Perusahaan.

2.e. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

2.f. Pinjaman Yang Diberikan

Pinjaman yang diberikan diklasifikasikan sebagai asset keuangan (lihat catatan 2.n). Mengacu pada nilai barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah, maka untuk mempermudah administrasi dilakukan penggolongan Uang Pinjaman (UP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu:

Pinjaman Usaha Gadai

Pinjaman yang diberikan dikelompokkan sesuai dengan besarnya pinjaman (pagu kredit), masing-masing berdasarkan nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat keputusan Direksi No.349/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Sewa Modal, yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, selanjutnya diubah dengan Surat Keputusan Direksi No.1024/UI.I.00211/2006 tanggal 29 Desember 2006 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Januari 2007 dan diubah kembali dengan surat keputusan Direksi No. 56/UI.I.00211/2008 tanggal 30 Januari 2008 ditetapkan tarif sewa modal baru (penurunan) yang berlaku mulai 1 Pebruari 2008 tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal dari 2008 s.d 2011		Jangka Waktu kredit
		Per 15 hari	Maksimum	
A	20.000 - 150.000	0,75%	6,00%	120 hari
B	151.000 - 500.000	1,20%	9,60%	120 hari
C1	505.000 - 1.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
C2	1.010.000 - 20.000.000	1,30%	10,40%	120 hari
D1	20.050.000 - 50.000.000	1,00%	8,00%	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	1,00%	8,00%	120 hari

Selama tahun 2011, Perusahaan melakukan penyesuaian tarif sewa modal dan perubahan penggolongan uang pinjaman. Penyesuaian tarif sewa modal ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat Edaran No: 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, yang berlaku mulai tanggal 1 April 2011. Penggolongan tarif sewa modal ditetapkan sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Tarif Sewa Modal Mulai 1 April 2011		Jangka Waktu kredit
		Per 15 hari	Maksimum	
A	20,000 - 150,000	0.75%	6.00%	120 hari
B	155,000 - 1000,000	1.20%	9.60%	120 hari
C	1,010,000 - 20,000,000	1,20%	9.60%	120 hari
D	20,050,000 - 200,000,000	1,00%	8,00%	120 hari

Selain pengenaan sewa modal, kepada nasabah dikenakan biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.348/OP.1.00211/2004 tanggal 29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, setiap pemberian kredit dikenakan biaya administrasi sebagai berikut:

No	Golongan Pinjaman	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	AKN	1 dari of UP
2	AK	1 dari of UP
3	AG	1 dari of UP
4	BK	1 dari of UP
5	BG	1 dari of UP
6	CK1	1 dari of UP
7	CG1	1 dari of UP
8	C2	1 dari of UP
9	D1 & D2	1 dari of UP
10	D1 & D2 Mobil	1 % dari UP, Minimum Rp 50.000

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.312/UL.3.00213/2007 tanggal 9 Mei 2007 dan Surat Edaran Direksi No. 32/UL.3.00212/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi Ulang Gadai yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 2007, pengenaan biaya administrasi dibedakan antara gadai baru dan ulang gadai sebagai berikut:

Gadai baru

No.	Kredit Lama Berlanjut	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	Semua Golongan (A,B,C dan D)	1 % of UP
2	Khusus Barang Jaminan Mobil	1 % of Loan Minimum Rp 50.000

Ulang Gadai

No.	Kredit Lama Berlanjut	Tarif Biaya Administrasi (Rp)
1	1 - 30 hari / days	0,2 % of UP
2	31 - 60 hari / days	0,4 % of UP
3	61 - 90 hari / days	0,6 % of UP
4	91 - 120 hari / days	0,8 % of UP

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan SE No.49/OP.1.00211/2004 tanggal 11 Oktober 2004, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang mulai berlaku tanggal 1 Oktober 2004, terakhir berdasarkan SE No. 06/UL.1.00211/2008, tanggal 30 Januari 2008 sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran
A	20.000 - 150.000	95%
B	151.000 - 500.000	92%
C1	505.000 - 1.000.000	91%
C2	1.010.000 - 20.000.000	91%
D1	20.050.000 - 50.000.000	93%
D2	50.100.000 - 200.000.000	93%

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 60/UG.2.00212/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 dan Surat Edaran Nomor: 10/UG.2.00212/2011 tanggal 16 Pebruari 2011 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal KCA dan Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 1 April 2011 ditetapkan sebagai berikut:

Golongan Pinjaman	Pagu Kredit (Rp)	Prosentase Uang Pinjaman Terhadap Taksiran
A	20.000 - 150.000	95%
B	155.000 - 1.000.000	92%
C	1.010.000 - 20.000.000	92%
D	20.050.000 - 200.000.000	93%

Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nomor 07/UG.2.00212/2012 tanggal 2 Februari tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor 35/UG.2.00212/2012 tentang Perubahan Penggolongan uang Pinjaman, Pembulatan Uang Pinjaman, Tarif Biaya administrasi dan Penetapan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA, besarnya persentase uang pinjaman terhadap taksiran nilai barang jaminan yang berlaku tanggal 01 Maret 2012, ditetapkan tarif biaya administrasi sebagai berikut :

1. Perubahan Penggolongan Uang Pinjaman :

Golongan Pinjaman	Uang Pinjaman
A	50.000 sd 500.000
B1	550.000 sd 1.000.000
B2	1.050.000 sd 2.500.000
B3	2.550.000 sd 5.000.000
C1	5.100.000 sd 10.000.000
C2	10.100.000 sd 15.000.000
C3	15.100.000 sd 20.000.000
D	20.100.000 ke atas

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

2. Pembulatan Uang Pinjaman

Golongan Pinjaman	Pembulatan Uang Pinjaman
A	Dibulatkan ke atas menjadi 10.000
B1	Dibulatkan ke atas menjadi 50.000
B2	Dibulatkan ke atas menjadi 50.000
B3	Dibulatkan ke atas menjadi 50.000
C1	Dibulatkan ke atas menjadi 100.000
C2	Dibulatkan ke atas menjadi 100.000
C3	Dibulatkan ke atas menjadi 100.000
D	Dibulatkan ke atas menjadi 100.000

3. Tarif Biaya Administrasi

Golongan Pinjaman	Tarif Biaya Administrasi
A	2.000
B1	8.000
B2	15.000
B3	25.000
C1	40.000
C2	60.000
C3	80.000
D	100.000

Usaha Syariah

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.91/US.1.00/2009 tanggal 26 Nopember 2009 tentang Perubahan Prosentase Marhun Bih terhadap taksiran ditetapkan sebagai berikut:

Golongan	Plafon Marhun Bih	Tarif Biaya Administrasi	Jangka Waktu Kredit
	Rp	Rp	
A	20.000 - 150.000	1.000	120 hari
B	151.000 - 500.000	5.000	120 hari
C1	501.000 - 1.000.000	8.000	120 hari
C2	1.005.000 - 5.000.000	16.000	120 hari
C3	5.010.000 - 10.000.000	25.000	120 hari
C4	10.050.000 - 20.000.000	40.000	120 hari
D1	20.100.000 - 50.000.000	50.000	120 hari
D2	50.100.000 - 200.000.000	60.000	120 hari

Besar Prosentase Marhun Bih terhadap nilai taksiran adalah sebagai berikut:

Gol	Marhun Bih	% Marhun Bih		
		Emas	Elektronik	Kendaraan
A	20.000 -150.000	95%	95%	95%
B	151.000 - 500.000	92%	92%	92%
C1	501.000 - 1.000.000	91%	91%	91%
C2	1.005.000 - 5.000.000	91%	91%	91%
C3	5.010.000 - 10.000.000	91%	91%	91%
C4	10.050.000 - 20.000.000	91%	91%	91%
D1	20.100.000 - 50.000.000	93%	93%	93%
D2	50.100.000 - 200.000.000	93%	93%	93%

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Tarif Ijarah

Berdasarkan SK Direksi No.08/US.1.00/2008 tanggal 12 Maret 2008, rumusan tarif ijarah untuk produk Rahn adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
1	Emas	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran / Rp 10.000 x tarif ijarah golongan A sampai dengan D2 x jangka waktu / 10

Diskon Ijarah:

Besarnya Marhun Blh "P/N"	Muqasah (Diskon) X Tarif	Tarif Ijarah Setelah Diskon (Rp)		
		Kantong	Elektronik & Alat RT	Kendaraan Bermotor
≥ 85% x Taksiran / Estimasi	0%	80	85	90
80% - 84% x Taksiran / Estimasi	7%	74	79	84
75% - 79% x Taksiran / Estimasi	14%	69	73	77
70% - 74% x Taksiran / Estimasi	20%	64	68	72
65% - 69% x Taksiran / Estimasi	26%	59	63	67
60% - 64% x Taksiran / Estimasi	32%	54	58	61
55% - 59% x Taksiran / Estimasi	38%	50	53	56
50% - 54% x Taksiran / Estimasi	44%	45	48	50
45% - 49% x Taksiran / Estimasi	50%	40	43	45
40% - 44% x Taksiran / Estimasi	56%	35	37	40
35% - 39% x Taksiran / Estimasi	61%	31	33	35
30% - 34% x Taksiran / Estimasi	66%	27	28	31
25% - 29% x Taksiran / Estimasi	71%	23	25	26
20% - 24% x Taksiran / Estimasi	76%	19	20	22
15% - 19% x Taksiran / Estimasi	81%	15	16	17
10 - 14% x Taksiran / Estimasi	85%	Tarif khusus = (1% x Taksiran) per 120 hari		
< 10% x Taksiran / Estimasi	80%	Tarif khusus = (1% x Taksiran) per 120 hari		

Usaha Lain

Kredit Kreasi

Kreasi (Kredit Angsuran Fidusia), merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) dengan konstruksi penjaminan secara fidusia dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Krasida

Krasida (Kredit Angsuran Sistem Gadai), adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran.

Besaran uang pinjaman Kredit Kreasi berdasarkan Surat Edaran Direksi No.61/US.2.00/2006 tanggal 13 Desember 2006 maksimum kredit kreasi sebesar Rp100.000.000 per nasabah, sedangkan Krasida terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.190/US.2.00/2006 tanggal 28 September 2006, batas minimum uang pinjaman kredit krasida sebesar Rp 20.000.000 per nasabah.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Secara umum Kreasi dan Krasida mempunyai kemiripan dalam hal pelaksanaan operasionalnya yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Kreasi	Krasida
1	Tujuan Kredit	Produktif	Produktif
2	Waktu Pelayanan	3 Hari	1-2 Jam
3	Tarif Sewa Modal	12% / tahun Flat	12% / tahun Flat
4	Blaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman	1% dari Uang Pinjaman
5	Blaya Lainnya	Notaris, Akta Fidusia, Cek Fisik,	Materai dan Cek Fisik untuk
		Asuransi, Materai	Kendaraan Bermotor
6	Jenis Barang Jaminan (BJ)	BPKB Kendaraan Bermotor	Perhiasan Emas dan Kendaraan Bermotor
7	Penyimpanan BJ	Dipakai Nasabah untuk Alat Produksi	Disimpan di Pegadalan
8	Besarnya Pinjaman	70% dari Nilai Agunan	95% dari Nilai Agunan
9	Jangka Waktu Kredit	12 - 36 bulan	12 - 36 bulan
10	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap	Angsuran Tetap

Krista

Krista (Kredit Usaha Rumah Tangga) adalah pinjaman (Kredit) dalam jangka waktu maksimum 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan yang diberikan oleh Perum Pegadaian kepada usaha rumah tangga sangat mikro (gurem) yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja.

Besaran uang pinjaman Kredit Krista berdasarkan Surat Edaran Direksi No.91/UL.2.00.22.2/2008 tanggal 24 Desember 2008 maksimum kredit Krista Rp 5.000.000, terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.65/UL.2.00.22.2/2009 tanggal 24 Agustus 2009, batas maksimum uang pinjaman kredit Krista sebesar Rp 8.000.000 per nasabah. Secara umum pelaksanaan operasional Krista sebagai berikut:

No	Uraian	Krista
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 3 hari
3	Tarif Sewa Modal	12% / Tahun Flat
4	Blaya Administrasi	1% dari Uang Pinjaman
5	Blaya Lainnya	Asuransi, Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Tanpa Barang Jaminan
7	Besarnya Pinjaman	Berdasarkan kelayakan usaha dan disyaratkan mempunyai agunan minimal sebesar 20 % dari pinjaman
8	Jangka Waktu Kredit	12 , 24 dan 36 Bulan
9	Cara Pelunasan	Angsuran Tetap

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Surat Edaran No. 36/UL.2.00.22.2/2011 tanggal 29 April 2011 tentang penghentian sementara penyaluran Pegadaian Krista, disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian dan pengelolaan produk Krista yang baik maka dengan ini disampaikan bahwa sementara waktu terhitung mulai tanggal 11 Mei 2011 penyaluran Pegadaian Krista dihentikan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

KREMADA

Kremada (Kredit Perumahan Swadaya) adalah kredit yang diberikan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang hanya dimanfaatkan untuk perumahan yang mencakup perbaikan rumah, pembangunan rumah dan perbaikan lingkungan perumahan. Dana berasal dari Pemerintah (Kementerian Negara Perumahan Rakyat). Penyaluran Kredit ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 062/UL.2.00.22.2/2006, tanggal 7 Desember 2006, tentang Penyaluran Kredit Perumahan Swadaya (KREMADA).

Berikut adalah skema KREMADA:

No	Uraian	Kremada
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1-2 Minggu
3	Tarif Sewa Modal	0%
4	Biaya Administrasi	9% per tahun dari Uang Pinjaman.
5	Biaya Lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Tanpa Barang Jaminan
7	Plafon Pinjaman	Perbaikan Rp 5.000.000 Pembangunan Rp 10.000.000
8	Nasabah	MBR yang Berkelompok
9	Jangka Waktu Kredit	Perbaikan: 12 Bulan Pembangunan: 24 bulan

Kresna

Kresna (Kredit Serba Guna) atau Kredit Serba Guna merupakan pemberian pinjaman kepada pegawai/karyawan dalam rangka kegiatan produktif/konsumtif dengan pengembalian secara angsuran.

Besar pinjaman disesuaikan dengan jumlah penghasilan masing-masing pegawai (kemampuan mengangsur) sehingga tidak terlalu memberatkan likuiditas bulanan pegawai, sedangkan jangka waktu kredit maksimum 36 bulan. Batas maksimum Uang Pinjaman dan jangka waktu kredit diatur oleh SK Direksi No.213/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

Adapun tingkat bunga pinjaman adalah 12 % per tahun flat. Tarif sewa modal Kresna ditetapkan melalui SK Direksi No. 212/US.2.00/2006, tanggal 29 Nopember 2006.

SK Direksi No. 13/UL.3.00.22.3/03 tanggal 26 Januari 2004 menetapkan Biaya Administrasi Kresna sebesar 0,5% dari Pinjaman, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2004.

KTJG

KTJG (Kredit Tunda Jual Gabah) merupakan kredit yang diberikan kepada petani atas dasar hukum gadai melalui agen-agen yang ditunjuk Perum Pegadaian dengan barang jaminan berupa gabah kering giling. Tujuan pemberian KTJG adalah untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dana untuk melakukan pengolahan sawahnya mengingat belum diperolehnya dana dari hasil penjualan produk gabah yang sengaja ditunda penjualannya sambil menunggu kenaikan harga gabah yang cenderung menurun setelah panen.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

KUCICA

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA) adalah jasa pengiriman uang, bekerjasama dengan Western Union, Perusahaan yang mempunyai jaringan luas, yang berkedudukan di Kanada. SE.54/UL.2.00.22.2/2007, tanggal 11 Oktober 2007, tentang Pelaksanaan Jasa Pengiriman Uang di Kantor Cabang Perum Pegadaian, menetapkan dimulainya operasi Jasa Kucica serta berlakunya Pedoman Operasional Kucica.

ARRUM

Berdasarkan SK. Direksi No. 01/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberlakuan PO Arrum dan No. 03/US.2.00/2008, tanggal 31 Januari 2008, tentang Batas Minimum dan Maksimum Nilai Pembiayaan ARRUM, menyatakan mulai beroperasinya jasa kredit Arrum dengan jaminan fidusia, maksimum Uang Pinjaman Rp 50 juta dengan masa kredit maksimum 36 bulan. Pasarnya adalah para pengusaha mikro yang menginginkan dasar syariah. Biaya Administrasi Arrum adalah sebagai berikut:

No	Jenis Barang Jaminan	Biaya Administrasi Rp
1	Sepeda Motor	70.000
2	Mobil	200.000

Sedangkan tarif ljarah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ljarah} = \frac{\text{Taksiran}}{\text{Rp 100.000}} \times \text{Rp 700} \times \text{Jangka Waktu (Bulan)}$$

MULIA

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 54/LB.1.00/2008 tentang Pembiayaan Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi tanggal 25 September 2008, produk yang disebut MULIA ini diluncurkan dan mulai dioperasikan pada tanggal 28 Oktober 2008. Pembiayaan MULIA adalah pembiayaan emas batangan kepada nasabah dengan pola angsuran untuk jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Emas Batangan yang dibiayai oleh pembiayaan MULIA adalah emas batangan bersertifikat internasional (LBMA-London Bullion Market Association) dengan jenis/varian unit 5 gram, unit 10 gram, unit 25 gram, unit 50 gram, unit 100 gram, unit 250 gram, dan unit 1.000 gram.

Pembiayaan murabahah ini mengenakan margin atas setiap transaksi berdasarkan jangka waktu pembiayaan. Margin atas transaksi pembiayaan murabahah tersebut diatur dalam Surat Edaran Direksi Nomor 16/US.100/2009 perihal jangka waktu, uang muka dan margin pembiayaan MULIA. Berikut penetapan Margin Pembiayaan MULIA:

Jangka Waktu	Uang Muka	Margin
1 bulan	> 20% - 100%	3,00%
	> 25% - 30%	3,50%
	> 30% - 40%	3,25%
	> 40% - 50%	3,25%
	> 50% - 60%	3,00%
	> 60% - 70%	3,00%
	> 70% - 80%	2,90%
	> 80% - 90%	2,80%
	> 90% - 100%	2,50%
	> 25% - 30%	6,00%
6 bulan	> 30% - 40%	5,90%

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Jangka Waktu	Uang Muka	Marjin
12 bulan	> 40% - 50%	5,80%
	> 50% - 60%	5,70%
	> 60% - 70%	5,60%
	> 70% - 80%	5,50%
	> 80% - 90%	5,00%
	> 90% - 100%	4,00%
	> 30% - 40%	12,00%
	> 40% - 50%	11,50%
	> 50% - 60%	11,00%
	> 60% - 70%	10,50%
	> 70% - 80%	10,00%
	> 80% - 90%	8,50%
18 bulan	> 90% - 100%	7,00%
	> 35% - 40%	18,00%
	> 40% - 50%	17,00%
	> 50% - 60%	16,00%
	> 60% - 70%	15,00%
	> 70% - 80%	13,50%
	> 80% - 90%	11,00%
	> 90% - 100%	7,00%
	> 40% - 50%	22,00%
	> 50% - 60%	20,50%
	> 60% - 70%	18,50%
	> 70% - 80%	16,00%
24 bulan	> 80% - 90%	12,50%
	> 90% - 100%	7,80%
	> 45% - 50%	29,00%
	> 50% - 60%	28,50%
	> 60% - 70%	24,00%
	> 70% - 80%	20,00%
	> 80% - 90%	15,00%
	> 90% - 100%	8,60%

Atas transaksi pelunasan pembiayaan MULIA dipercepat maka Direksi Pegadaian menetapkan Prosentase Potongan Margin MULIA yang diatur dalam Surat Edaran No. 73/Lb.1.00/2008 perihal Potongan Marjin MULIA. Berikut Tabel Potongan Marjin MULIA:

Prosentase Potongan Marjin Mulla (dalam%)					
Jangka Waktu Pembiayaan					
Bulan Ke	6	12	18	24	36
1	50,00	75,00	83,00	88,00	91,66
2	40,00	68,19	78,12	84,00	89,04
3	30,00	61,38	73,24	80,00	86,42
4	20,00	54,57	68,36	76,00	84,00
5	10,00	47,76	63,48	72,00	81,18
6	-	40,95	59,00	69,00	78,56
7	-	34,14	53,72	65,00	75,94
8	-	27,33	48,84	61,00	73,32

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Prosentase Potongan Marjin Mulla (dalam%)					
Jangka Waktu Pembiayaan					
Bulan Ke	6	12	18	24	36
9	-	20,52	43,96	57,00	71,00
10	-	13,71	39,08	53,00	68,08
11	-	7,00	34,00	50,00	65,46
12	-	-	29,32	46,00	62,84
13	-	-	24,44	42,00	60,22
14	-	-	19,56	38,00	58,00
15	-	-	14,68	34,00	54,98
16	-	-	10,00	31,00	52,36
17	-	-	4,92	27,00	49,74
18	-	-	-	23,00	47,12
19	-	-	-	19,00	45,00
20	-	-	-	15,00	41,88
21	-	-	-	12,00	39,26
22	-	-	-	8,00	36,64
23	-	-	-	4,00	34,02
24	-	-	-	-	31,00
25	-	-	-	-	28,78
26	-	-	-	-	26,16
27	-	-	-	-	23,54
28	-	-	-	-	20,92
29	-	-	-	-	18,00
30	-	-	-	-	15,68
31	-	-	-	-	13,06
32	-	-	-	-	10,44
33	-	-	-	-	7,82
34	-	-	-	-	5,00
35	-	-	-	-	2,58
36	-	-	-	-	-

Unit Gadai Efek

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 23/UL.3.0022.3/2007 tanggal 2 April 2007 tentang Unit Gadai Efek, telah dibentuk unit usaha baru yang bergerak di bidang pelayanan gadai dengan Barang Jaminan Saham/Efek. Unit usaha baru ini berkedudukan di Kantor Pusat Perum Pegadaian, Jl. Kramat Raya No. 162 Jakarta.

SK Direksi No. 44A/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Penyaluran Kredit Gadai Saham, ditetapkan jenis saham yang dapat dijaminkan, yaitu saham dalam kelompok LQ45 yang telah melalui proses Know Your Customer (KYC).

SK Direksi No. 44B/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Prosedur Operasional Kredit Gadai Saham, ditetapkan berlakunya Pedoman Operasional Kredit Gadai Saham.

SK Direksi No. 44C/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Tarif sewa modal dan Biaya Administrasi, ditetapkan tarif Sewa Modal secara fixed Rate. Tarif SM ditetapkan melalui Surat Edaran. Sedangkan Biaya Administrasi ditetapkan sebesar 0,125% per jangka waktu 90 hari.

SK Direksi No. 44D/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Maksimum dan Minimum Uang Pinjaman, ditetapkan bahwa minimum UP adalah 50 Juta Rupiah dan maksimum sebesar 50 Milyar rupiah.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

SK Direksi No. 44E/UL.3.0022 3/2007, tanggal 29 Juni 2007 tentang Batas Kewenangan Dalam Penetapan dan Pemutusan Uang Pinjaman, ditetapkan anggota-anggota Komite Pemutus Kredit serta ditetapkan batas-batas wewenang masing-masing atas besaran uang pinjaman yang dapat diputuskan.

Secara umum pelaksanaan Gadai Efek sebagai berikut :

No	Uraian	Unit Gadai efek
1	Tujuan Kredit	Produktif
2	Waktu Pelayanan	1 - 2 hari
3	Tarif Sewa Modal	Harian, minimal 15 Hari
4	Biaya administrasi	0,125% per Jangka Waktu 90 Hari
5	Biaya Lainnya	Materai
6	Jenis Barang Jaminan	Saham dalam LQ 45, per transaksi untuk 1 jenis
7	Plafon Pinjaman	Per Transaksi Minimum Rp 50.000.000 dan Maksimum Rp 50.000.000.000 dihitung paling banyak 50% dari harga pasar saham (closing price 1 hari sebelumnya).
8	Nasabah	Institusi atau Perorangan
9	Jangka Waktu Kredit	90 hari
10	<i>Top Up Call</i>	65%
11	Eksekusi	80%

Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Usaha No.91/Lb.1.00/2008 tanggal 2 Desember 2008 penyaluran kredit gadai efek dihentikan sampai dengan adanya keputusan Direksi lebih lanjut.

G-Lab (Unit Laboratorium Gemologi)

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 29/LB.1.00.2010 tentang pembentukan Laboratorium Gemologi tertanggal 31 Maret 2011 ditandatangani oleh Direktur Utama Chandra Purnama dibuatlah sebuah Buku Pedoman Operasional Pegadaian G-Lab yang dikelola, dikoordinir, dan di organisir oleh Divisi Usaha Lain.

Pegadaian G-Lab adalah singkatan dari Laboratorium Gemologi milik Perusahaan yang merupakan unit pelayanan di bidang pengujian dan atau penilaian batu berharga, logam mulia dan sertifikat khusus.

Jasa yang terdapat dalam unit pelayanan G-Lab yaitu :

1. Jasa Pengujian atau jasa taksiran
2. Jasa konsultasi
3. Jasa kursus

Organisasi pengelolaan dipimpin oleh jenderal manager usaha lain dan langsung bertanggungjawab ke Direksi Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Berikut adalah rincian masing-masing tarif atas jasa layanan yang diberikan:

a) Tarif Pengujian Logam adalah sebagai berikut:

No	Jenis yang Diuji	Tarif Jasa Pengujian
1	Emas	1,25% x Berat Barang (Gram) x Karatase/24 x Harga Pasar Setempat
2	Selain Emas	Rp 500 x Berat Barang (Gram)

b) Tarif Gemstone Memo (*Gemstone Identification*):

No	Identifikasi	Biaya per Batu (Rp)
1	<i>Natural</i>	80.000
2	<i>Synthetic, Assembled</i>	50.000

c) Tarif Diamond *Grading*:

No	Total Berat Berlian	Rp
1	0,01-0,25 ct	80.000
2	0,26-0,50 ct	100.000
3	0,51-0,75 ct	150.000
4	0,76-1,00 ct	200.000
5	Penambahan karat berikutnya, setiap kelipatan 1 Karat	100.000

d) Tarif Gem *Certificate*:

No	Kualifikasi Batuan	Rp
1	<i>Stone A</i>	Minimal 150.000, Maksimal 650.000
2	<i>Stone B</i>	Minimal 125.000, Maksimal 400.000
3	<i>Stone C</i>	Minimal 100.000, Maksimal 250.000
4	<i>Stone D</i>	Minimal 80.000, Maksimal 100.000

e) Tarif *Re-Checking*:

No	<i>Re-Checking</i>	Rp
1	Memo	50.000
2	<i>Certificate</i>	100.000

f) Jasa Lainnya:

a) Konsultasi dengan tarif Rp 250.000 per konsultasi

b) Kursus dengan skema tarif sebagai berikut:

No	Jenis Kursus	Lamanya Kursus	Rp
1	Dasar Gemologi	4 x 1,5 jam	500.000
2	<i>Gem Identification Basic</i>	10 x 1,5 jam	4.000.000
3	<i>Gem Identification Advanced</i>	110 x 1,5 jam	7.000.000
4	<i>Special Course</i>	6 x 1,5 Jam	3.000.000

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

2.g. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai atas Piutang Pegawai.

Pinjaman Gadai yang bermasalah adalah PYD yang barang jaminannya dijadikan sebagai barang bukti perkara oleh pihak berwajib sampai ada keputusan dari Pengadilan. Nilai yang diakui sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar uang pinjaman yang tercatat dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dan dibukukan pada saat barang jaminan diambil oleh pihak berwajib untuk dijadikan sebagai barang bukti perkara di Pengadilan.

Pinjaman fidusia bermasalah adalah pinjaman yang mengalami tunggakan lebih dari 3 bulan tetapi tidak memenuhi syarat untuk dapat di klaim ke pihak asuradur. Dalam hal ini penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk dan akan dipulihkan kemudian setelah Perusahaan berhasil mengeksekusi jaminan fidusia terkait.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Pegawai merupakan penyisihan atas piutang TGR kepada pegawai yang sudah mendapatkan SK pembebanan Direksi (tidak termasuk didalamnya Kerugian Perusahaan yang Diperhitungkan (KPYD/K4TGR).

Untuk pegawai yang masih tercatat sebagai pegawai aktif, ditetapkan penyisihan sebesar 10% per tahun dari saldo piutang tercatat, sedangkan untuk pegawai yang sudah diberhentikan atau meninggal ditetapkan sebesar 100% dari piutang tercatat.

Kebijakan mengenai cadangan kerugian penurunan nilai piutang disajikan pada catatan 2.n.

2.h. Persediaan

Persediaan emas dinilai berdasarkan harga perolehan dan harga pasar.

Persediaan barang dinilai berdasarkan harga perolehan dan dicatat sebagai beban pada saat digunakan.

2.i. Aset Tetap

Perusahaan menetapkan kebijakan untuk mencatat dan melaporkan aset tetap dengan menggunakan Model Biaya. Atas dasar model biaya, aset tetap dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Seluruh aset tetap disusutkan, kecuali tanah. Aset tetap selain bangunan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), sedangkan bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan Permanen	20
Bangunan Tidak Permanen	10
Inventaris	4
Kendaraan Bermotor Roda Dua	4
Kendaraan Bermotor Roda Empat	8

Aset tetap yang tidak digunakan lagi atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Laba atau rugi akibat penjualan aset tetap dicatat dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Pembelian/pengadaan barang inventaris dengan harga satuan senilai Rp 1.000.000,- atau lebih dikapitalisasi, sedangkan bila kurang dari Rp 1.000.000,- dibebankan pada periode berjalan.

Perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya mengubah bentuk/bestek dan memperpanjang umur ekonomis yang nilainya Rp 20.000.000,- atau lebih dikapitalisasi, sedangkan biaya

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

perbaikan/pemeliharaan gedung yang sifatnya tidak mengubah bentuk/bestek dan tidak memperpanjang umur ekonomis serta hanya bersifat pemeliharaan walaupun nilainya lebih besar dari Rp 20.000.000,- dibebankan pada periode berjalan.

Untuk rehabilitasi ringan yang tidak menambah atau memperpanjang umur ekonomis/masa manfaat dari bangunan yang bersangkutan, diakui sebagai beban umum.

Aset dalam penyelesaian (ADP) merupakan akumulasi biaya material dan biaya lainnya yang terkait dengan aset dalam penyelesaian tersebut. Pada saat aset dalam penyelesaian telah selesai dan siap untuk digunakan, maka aset dalam penyelesaian dialihkan ke akun aset tetap yang sesuai.

Aset Tetap Yang Dikelola Pihak Lain Dalam Rangka Kerja Sama Operasi (KSO)

Tanah yang diserahkan oleh Perusahaan untuk diusahakan dalam perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dicatat sebagai Aset KSO dalam kelompok Aset Lain-lain sebesar biaya perolehannya. Aset yang dibangun oleh Mitra KSO dalam rangka KSO dicatat dalam pembukuan Mitra KSO yang mengoperasikan aset tersebut dan akan dialihkan kepada Perusahaan pada akhir masa KSO atau saat penghentian perjanjian KSO.

Perusahaan mencatat pengalihan Aset yang dibangun oleh mitra KSO sebagai Aset tetap dengan mengkredit pendapatan pengalihan Aset KSO apabila memiliki kepastian tentang adanya manfaat ekonomi dari aset tersebut atau mengkredit penghasilan tangguhan (*deferred income*) apabila tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomi dari aset tersebut.

2.j. Beban Ditangguhkan

Beban ditangguhkan adalah beban-beban yang telah dikeluarkan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun, yaitu:

- Beban rehabilitasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.
- Beban pengurusan legal hak atas tanah, diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah tersebut. Jenis atas tanah ini adalah hak guna bangunan yang mempunyai masa manfaat selama 20 tahun.
- Biaya RUF (*Revolving Underwriter Facility*) adalah seluruh biaya yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman sindikasi seperti biaya *arranger*, komitmen bank dan konsultan hukum/notaris, diamortisasi sepanjang jangka waktu fasilitas pinjaman RUF yaitu lima tahun.

2.k. Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP)

Peraturan mengenai lelang barang jaminan dan pengelolaan Barang Sisa Lelang (BSL) berlaku ketentuan Surat Edaran Direksi No.48/OP.1.00211/2003 dan No.49/OP.1.00211/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang selanjutnya diubah dengan Surat Edaran Direksi No.44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006.

Barang jaminan yang tidak laku dijual / lelang dibukukan sebagai Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP). BLP adalah barang jaminan yang ditaksir wajar, tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo (barang kasep) dan tidak laku saat dilelang, kemudian dibeli oleh Perusahaan sebesar Harga Limit Lelang (HLL).

BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang Penjual/Pembeli 2% + Uang Miskin 0,7%. Bea Lelang dan Uang Miskin dihitung dari harga yang terbentuk pada saat lelang, yang kemudian disetor ke Kas Negara. Selanjutnya sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.40/PMK.07 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan telah ditetapkan / diberlakukan pada tanggal 30 Mei 2006 dan Surat Edaran Direksi No. 44/UI.1.00211/2006 tanggal 3 Oktober 2006 setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin 0% atau dengan kata lain lelang tidak dikenakan uang miskin, dengan demikian untuk selanjutnya BLP dicatat berdasarkan besarnya Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea Lelang Penjual/Pembeli 2%.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

BLP harus terjual dan penjualan dilakukan oleh Panitia Penjualan BLP. Pelaksanaan Penjualan dapat dilakukan oleh Kantor Cabang yang mempunyai harga pasar tertinggi dengan cara di bawah tangan atau dimutasi ke Cabang lain dan dapat dijual dengan cepat.

Harga penjualan ditetapkan sebagai berikut:

- BLP perhiasan emas, harga penjualannya tergantung pada harga yang tertinggi antara harga pasar pusat untuk lelang (HPPL) dan harga pasar daerah untuk lelang (HPPDL)
- BLP non emas, penjualannya ditetapkan minimal sebesar harga pembelian (H.Pb.BLP). Penjualan di bawah harga pembelian (H.Pb) harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Wilayah.

Penjualan BLP di bawah tangan adalah penjualan BLP yang dilakukan secara langsung tanpa melalui proses lelang, apabila di cabang bersangkutan tidak ada calon pembeli, BLP akan dikirim ke cabang lain dengan prosedur yang sama dengan maksud agar memperoleh harga yang paling menguntungkan.

Penjualan BLP diakui pada saat terjadinya pemindahan hak milik atau pemindahan penguasaan atas barang tersebut kepada pembeli, jika hasil penjualan BLP lebih tinggi/(rendah) dari harga perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai laba/(rugi) untuk periode berjalan dan dibukukan pada pendapatan/beban lainnya.

2.1. Penyelesaian PYD Bermasalah

PYD bermasalah adalah pinjaman yang diketahui barang jaminannya ternyata ditaksir terlalu tinggi atau barang jaminannya berupa barang palsu. Setelah diketahui terjadinya kasus ini, maka Pimpinan Wilayah yang bersangkutan membentuk tim yang bertugas melakukan taksasi ulang agar dapat ditentukan nilai pasar wajar yang sebenarnya dari barang jaminan tersebut.

Berdasarkan nilai barang jaminan yang telah ditaksasi ulang, dilakukan pemindahan saldo dari akun PYD ke akun Aset Yang Disisihkan (AYD). Adapun potensi kerugian yang terjadi yaitu sebesar selisih antara nilai Uang Pinjaman (UP) yang Diberikan beserta Sewa Modal (SM) terhadap nilai hasil taksasi akan diproses sebagai beban kepada pegawai yang bertindak sebagai pelaku dalam kasus ini. Sementara menunggu selesainya proses penetapan tuntutan ganti rugi kepada pegawai yang bersangkutan jumlah potensi kerugian direklasifikasi dari PYD ke pos Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR).

KPYD adalah kerugian yang ditetapkan sementara akibat taksiran tinggi yang dilakukan oleh pegawai/pelaku tindak kecurangan. Nilai KPYD ditetapkan sebesar Uang Pinjaman + Sewa Modal – AYD. Atas Kerugian Pinjaman YMH Diperhitungkan tidak dilakukan pencadangan karena nilai KPYD akan direklas ke Piutang atas nama pegawai terkait sesuai dengan SK Direksi sehingga resiko kerugian relatif kecil.

Sesuai ketentuan yang berlaku, AYD harus segera dijual dan apabila hasil penjualannya ternyata melebihi nilai taksasi, maka laba atas penjualan AYD tersebut akan mengurangi angka KPYD/K4TGR.

Terhadap AYD, manajemen tidak membentuk penyisihan kerugian, karena AYD sudah dinyatakan dengan nilai pasar wajarnya.

Setelah dilakukan penetapan ganti rugi, maka selanjutnya saldo Klaim Kepada Pegawai (KPYD/K4TGR) akan dipindahkan ke akun Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Penyelesaian atas piutang TGR selanjutnya dilakukan melalui pemotongan gaji tiap bulan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

2.m. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja yang diberikan Perusahaan meliputi:

- (1) Pensiun
- (2) Pesangon
- (3) Cuti Besar

Pensiun

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun yang pengelolaan dananya dilaksanakan oleh Dana Pensiun Pegadaian. Pendanaan atas program ini diperoleh dari potongan gaji pokok pegawai sebesar 4,75% per bulan dan kontribusi dari Perusahaan sebagai pemberi kerja sebesar 11,75% dari gaji pokok pegawai. Peraturan Dana Pensiun Pegadaian diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. Kp.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 dan No. Kp.2/8/50 tanggal 5 April 1999 dan peraturan ini telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan surat keputusan No. 336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Pesangon

Perusahaan juga memberikan imbalan berupa jumlah *lumpsum* yang diberikan kepada pegawai tetap yang memasuki usia pensiun. Jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan. Peraturan tentang Uang Pesangon Persiapan Pensiun Pegawai (UP4) diatur dalam Peraturan Direksi Perum Pegadaian No.1817/Kp300325/2000 tanggal 6 Juni 2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK) dan Surat Direksi No. 6393/SDM.300323/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang penjelasan atas SK Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 5 Januari 2009.

Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tidak tetap. Ketentuan hak dan besarnya Uang Cuti Besar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 12/SDM.300323/2009 tanggal 2 Januari 2009 dan pada tahun 2010 diubah melalui Surat Keputusan Direksi No. 3871/SDM.300323/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang cuti pegawai, dan melalui Surat Edaran No. 87/SDM.300323/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Amandemen/Perubahan terhadap Peraturan Cuti Pegawai.

Perusahaan menerapkan PSAK 24 Revisi 2004 untuk mengestimasi beban dan liabilitas yang timbul dari penyelenggaraan kedua program tersebut. Perhitungan estimasi beban dan liabilitas tersebut menggunakan jasa aktuaris independen. Adapun kebijakan akuntansi yang dianut adalah sebagai berikut:

- (1) metode aktuarial yang dipergunakan : *Projected Unit Credit*
- (2) provisi imbalan kerja adalah nilai tunai liabilitas manfaat pensiun dan pesangon dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan/kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui.
- (3) pengakuan biaya imbalan kerja meliputi biaya jasa kini, biaya bunga, imbalan hasil aset program, keuntungan/kerugian aktuarial, biaya jasa lalu.
- (4) keuntungan dan kerugian aktuarial yang dibebankan adalah jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program.
- (5) tarif diskonto : mengacu pada imbal hasil obligasi pemerintah berjangka panjang,
- (6) tarif kenaikan gaji : mengacu pada rata-rata kenaikan berkala gaji pokok terkini,
- (7) usia pensiun : 56 tahun.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Dengan menggunakan acuan kebijakan akuntansi yang sama, Perusahaan juga mengevaluasi kecukupan imbalan jangka panjang yang diberikannya dengan ketentuan imbalan minimum yang wajib diberikan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 "Ketenagakerjaan" pasal 156 dan pasal 167. Apabila nilai imbalan dari kedua program tersebut, kurang dari ketentuan perundang-undangan tersebut, maka selisihnya akan dicatat dan dilaporkan sebagai tambahan beban dan liabilitas imbalan jangka panjang menurut undang-undang.

2.n. Aset dan Liabilitas Keuangan

Pada tahun 2006, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Kedua pernyataan ini menggantikan PSAK 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Kedua pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.

Pada tahun 2010 dan 2011, IAI menerbitkan PSAK 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK 60 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011.

PSAK 50 (Revisi 2010) menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. PSAK 55 (Revisi 2011) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. Persyaratan penyajian informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK No. 50 (Revisi 2010) dan persyaratan pengungkapan informasi instrumen keuangan diatur dalam PSAK No. 60 (Revisi 2010). PSAK 60 (Revisi 2010) mensyaratkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan; dan sifat dan luas risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut.

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan, sebagai berikut:

Aset Keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

(1) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai aset diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan aset keuangan yang ditetapkan, diakui dalam "keuntungan/kerugian dalam Laporan Laba/Rugi".

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan yang diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Pinjaman yang diberikan dan piutang meliputi kas dan bank, pinjaman yang diberikan, piutang lainnya dan piutang pihak berelasi.

(3) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo.

(4) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana laba atau rugi diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi dari selisih kurs hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba dan rugi yang sebelumnya diakui di saldo laba diakui pada laporan laba rugi. Namun pendapatan bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.

Tidak ada aset keuangan yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

(1) Liabilitas keuangan dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu :

Nilai wajar liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah liabilitas keuangan yang ditujukan untuk diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan diakui dalam "keuntungan/kerugian" dalam Laporan Laba/Rugi.

Tidak ada liabilitas keuangan yang diklasifikasi sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

- (2) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dikategorikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Biaya yang bisa diatribusikan untuk pinjaman bank dan pinjaman lainnya adalah biaya provisi, sedangkan untuk hutang obligasi adalah biaya emisi.

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi terdiri dari pinjaman bank, pinjaman obligasi, pinjaman bank, pinjaman lainnya, pinjaman pemerintah pusat dan daerah, dan hutang kepada nasabah.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Perusahaan menentukan secara individual jika terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan berupa pelanggaran kontrak pinjaman yaitu tunggakan pokok dan bunga di atas tiga kali tunggakan atau direfleksikan dengan tingkat kolektibilitas kredit macet. Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual, maka perhitungan penurunan nilai menggunakan metode *discounted cash flow* dan/atau nilai wajar jaminan. Untuk pinjaman yang diberikan, dalam hal jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali sebesar nilai wajar agunan.

Untuk aset keuangan yang tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai, maka Perusahaan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif. Perhitungan secara kolektif dilakukan berdasarkan rata-rata biaya penyisihan aset keuangan selama lima tahun terakhir.

Dampak atas penurunan nilai yang terjadi sebelum penerapan dibebankan pada tahun berjalan karena pemisahan atas dampak tersebut tidak dapat dilakukan oleh Perusahaan.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (*bid price*). Sedangkan untuk liabilitas keuangan menggunakan harga jual (*offer price*).

Untuk pinjaman yang diberikan dalam hal jumlah dan saat penerimaan arus kas masa datang sulit ditentukan, penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah yang dapat diperoleh kembali sebesar nilai wajar agunan.

2.o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

Pendapatan sewa modal

Pendapatan sewa modal untuk instrumen keuangan yang *interest bearing* (produk Kreasi, Krasida, Krista dan Kresna) diakui pada Laporan Laba Rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Untuk usaha gadai, jasa simpanan syariah dan pinjaman fidusia diakui dengan menggunakan metode akrual.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh pendapatan administrasi yang diterima oleh Perusahaan sebagai persyaratan kredit.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan sewa modal yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

Pendapatan administrasi

Pendapatan administrasi seluruh instrumen keuangan yang interest bearing (produk Kreasi, Krasida, Krista dan Kresna) yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi konsolidasian.

Pendapatan usaha lainnya

Pendapatan sewa gedung yang diterima dimuka dan yang ditangguhkan diamortisasi sesuai dengan periode sewa dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban diakui pada saat terjadinya berdasarkan metode akrual.

2.p. Pajak Penghasilan

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Seluruh perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (liability method). Besarnya Pajak tangguhan ditentukan dengan tarif pajak yang berlaku.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi. Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

2.q. Penggunaan Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 42 dan 43, penggunaan laba Perusahaan Umum (Perum) ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap tahun buku Perum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal Perum
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 43

Penggunaan laba bersih Perum termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ditetapkan oleh Menteri.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.103 tahun 2000 Bab III Pasal 59 dan 60, penggunaan laba Perum Pegadaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai berikut:

Pasal 59

- Setiap tahun buku, Perum Pegadaian wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan, penyusutan dan pengurangan wajar lainnya.
- 45% dari sisa penyesihan laba bersih dipakai untuk cadangan umum sampai mencapai sekurang-kurangnya dua kali lipat dari modal yang ditempatkan, dana sosial dan pendidikan, jasa produksi, sumbangan dana pensiun dan sokongan/sumbangan ganti rugi.
- Penetapan persentase pembagian laba bersih Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 60

- Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan sebagaimana tersebut dalam pasal 59, disetorkan sebagai Dana Pembangunan Semesta.
- Dana Pembangunan Semesta yang menjadi hak Negara, wajib disetorkan ke Bendahara Umum Negara segera setelah Laporan Tahunan disahkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara BUMN dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagai berikut:

- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-311/MBU/2011 tanggal 9 Juni 2011 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian tahun buku 2010.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-362/MBU/2010 tanggal 24 Juni 2010 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian tahun buku 2009.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-383/MBU/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2008.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-487/MBU/2008 tanggal 9 Juni 2008 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2007.
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-375/MBU/2007 tanggal 8 Juni 2007 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Perum Pegadaian Tahun Buku 2006.

Mengacu pada PSAK 24 (Revisi 2004), Manajemen mencatat pembagian jasa produksi dan tantiem sebagai beban pada tahun yang bersangkutan, dan bukan sebagai distribusi laba.

2.r. Informasi Segmen

Efektif pada tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan yang mana entitas beroperasi.

Informasi segmen disusun dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha sedangkan segmen sekunder adalah segmen geografis.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Segmen usaha adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko imbalan segmen lain.

Segmen geografis adalah komponen Perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

Informasi segmen primer Perusahaan didasarkan pada lokasi geografis aset.

2.s. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Oleh karena adanya ketidakpastian dalam membuat estimasi tersebut, hasil aktual yang akan dilaporkan di masa mendatang mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. Kas Dan Bank

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Kas	<u>269.586.409.777</u>	<u>283.453.351.010</u>
Bank		
PT BRI (Persero) Tbk	72.099.592.463	133.273.411.735
PT BNI 46 (Persero) Tbk	13.659.435.133	4.608.732.047
PT Bank Central Asia Tbk	10.147.626.770	10.679.316.335
PT Bank Syariah Mandiri	9.400.995.679	12.612.915.503
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.537.150.376	4.878.590.195
PT Bank Bukopin Tbk	564.554.284	603.157.967
PT Bank CIMB Niaga Tbk	246.353.384	276.462.148
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	169.969.912	653.987.720
PT Bank DKI Syariah	68.280.147	98.540.640
PT Bank Permata Tbk	1.446.092	1.733.092
Bank Lainnya di Daerah	398.172.310	7.972.443.364
Sub Jumlah	<u>111.293.576.550</u>	<u>175.659.290.746</u>
Jumlah	<u>380.879.986.327</u>	<u>459.112.641.756</u>

Seluruh kas dan bank tersebut diatas, tidak dibatasi penggunaannya dan tidak ada simpanan yang ditempatkan pada Bank yang berelasi dengan Perusahaan serta dinyatakan dalam satuan mata uang rupiah.

Seluruh kas tunai (*cash in safe*) dan kas dalam perjalanan (*cash in transit*) telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat perampokan, penodongan dan kehilangan dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

- Kas Tunai (*Cash In Safe*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000 per lokasi per tahun dan Rp 52.675.629.715 total agregat per tahun.
- Kas Dalam Perjalanan (*Cash In Transit*) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 200.000.000 per lokasi per tahun dan Rp 52.675.629.715 per total agregat per tahun.

Selain itu Perusahaan telah mengasuransikan seluruh dana kas termasuk barang jaminan, aset dan barang inventaris Perusahaan yang berada di seluruh kantor Perum Pegadaian dan tempat lain kepada

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat penggelapan/kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan oleh karyawan Perum Pegadaian (*fidelity guarantee/standard* Jasindo) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 500.000.000 setiap kejadian/karyawan/lokasi maksimum Rp 2.500.000.000 per tahun.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

4. Pinjaman Yang Diberikan (PYD)

Merupakan saldo pinjaman yang diberikan kepada nasabah (semuanya dalam mata uang Rupiah) per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 yang belum jatuh tempo dan diklasifikasikan berdasarkan golongan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Usaha Gadai		
- PYD Golongan A	195.704.875.304	20.968.542.870
- PYD Golongan B	4.960.613.843.154	2.038.498.596.254
- PYD Golongan C	13.161.844.822.979	14.839.906.962.473
- PYD Golongan D	3.371.047.397.981	2.966.765.329.487
Sub Jumlah	21.689.210.939.418	19.866.139.431.084
Usaha Gadai Syariah		
- Marhun Bih Golongan A	936.103.500	863.186.000
- Marhun Bih Golongan B	32.868.900.500	30.885.457.153
- Marhun Bih Golongan C	1.738.007.306.700	1.543.525.233.900
- Marhun Bih Golongan D	703.275.248.000	582.402.341.000
Sub Jumlah	2.475.087.558.700	2.157.676.218.053
Usaha Lain		
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	1.008.935.969.352	1.237.118.776.795
Kresna	197.468.595.038	194.496.595.101
Mulia	140.511.971.650	152.807.899.573
Kredit Ar-Rum	68.889.999.835	73.693.887.011
KUCICA	13.420.964.813	16.003.229.968
Kredit Tunda Jual Gabah	406.926.000	463.776.000
Gadai Efek	38.400.000	38.400.000
Lainnya	205.640.261	66.331.661
Sub Jumlah	1.429.878.466.949	1.674.688.896.109
Jumlah Nilai Nominal	25.594.176.965.067	23.698.504.545.246
Pendapatan yang Belum Diamortisasi		
PYD Kreasi	44.573.060.747	47.670.787.807
PYD Krasida	4.519.796.362	3.913.066.099
PYD Kresna	12.011.452.889	11.304.812.205
PYD Krista	2.097.964.888	3.294.560.259
Sub Jumlah Gadai Syariah	63.202.274.886	66.183.226.370
Jumlah PYD Bruto	25.657.379.239.953	23.764.687.771.616

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai PYD		
Kreasi	(26.640.178.172)	(26.632.142.956)
Usaha Gadaai	(63.877.555)	(58.508.682)
Krasida	(6.969.828)	(7.073.613)
Kresna	(2.678.012.777)	(3.015.505.744)
Krista	(146.248.689.387)	(158.644.654.196)
Sub Jumlah	(175.637.727.719)	(188.357.885.191)
Jumlah PYD Bersih	25.481.741.512.234	23.576.329.886.425

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan penurunan nilai PYD tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode.

Kolektibilitas Pinjaman yang Diberikan per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 sebagai berikut:

	Tunggakan Angsuran	Umur (Hari)	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
<u>Lancar</u>				
<u>PYD</u>				
Golongan A,B,C, D dan KTJG	--	<120	21.689.617.865.418	19.866.603.207.084
Kresna	Tidak ada	--	179.424.702.637	190.666.989.411
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Tidak ada	--	669.137.424.907	860.667.505.821
Gadaai Efek	--	<90	38.400.000	38.400.000
MULIA	--	--	140.511.971.650	152.807.899.573
KUCICA	--	--	13.420.964.813	16.003.229.968
Kredit Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	--	--	68.889.999.835	64.323.062.017
PYD Lainnya	--	--	205.640.261	66.331.661
<u>Marhun Bih</u>				
Golongan A,B,C, dan D	--	<120	2.475.087.558.700	2.157.676.218.053
			25.236.334.528.221	23.308.852.843.588
<u>Dibawah Pengawasan Khusus (DPK)</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	Satu kali	--	--	5.276.202.140
Kresna	Satu kali	--	14.977.818.786	1.021.835.003
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Satu kali	--	82.277.433.168	92.023.524.464
			97.255.251.954	98.321.561.607
<u>Kurang Lancar (KL)</u>				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	Dua Kali	--	--	2.398.559.856
Kresna	Dua Kali	--	707.105.825	279.293.800
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	Dua Kali	--	55.916.587.403	71.812.286.352
			56.623.693.228	74.490.140.008

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

	Tunggakan Angsuran	Umur (Hari)	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Diragukan (DR)				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	3 kali	--	--	648.419.067
Kresna	3 kali	--	188.957.901	77.499.601
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	3 kali	--	16.425.901.289	16.453.637.711
			16.614.859.190	17.179.556.379
Macet				
Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	>3 kali	--	--	1.047.643.931
Kresna	>3 kali	--	2.170.009.889	2.450.977.286
Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	>3 kali	--	185.178.622.585	196.161.822.447
			187.348.632.474	199.660.443.664
Jumlah Nilai Nominal			25.594.176.965.067	23.698.504.545.246

Pinjaman yang diberikan yang memiliki jangka waktu kredit 12 – 36 bulan adalah kredit Kreasi, Krasida dan Krista, untuk Kresna jangka waktu kredit maksimum 36 bulan, Kremada 12 – 24 bulan, dan Investa 90 hari.

Seluruh PYD dijamin oleh barang jaminan bergerak (lebih dari 90% adalah barang jaminan emas/likuid) yang ditaksir berdasarkan nilai wajar, apabila nasabah tidak melunasi pinjaman pada tanggal jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang.

Manajemen berpendapat bahwa Barang Jaminan yang diterima atas PYD yang diberikan cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya PYD tersebut.

Untuk pemberian PYD Kreasi dan Krista telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) untuk PYD yang disalurkan sampai dengan 31 Desember 2010 dan kepada PT. Jasindo untuk PYD yang disalurkan mulai Januari 2011 dengan jumlah yang dipertanggungjawabkan sebesar uang pinjaman yang tercantum dalam perjanjian kredit pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit.

Terhadap pemberian PYD Golongan C akan dikenakan biaya notaris, akta fidusia, cek fisik kendaraan bermotor, premi asuransi dan bea materai.

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, KREASI dan KRASIDA dan Gadai Syariah, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian / kerusakan / kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului / tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungjawabkan, perampokan / penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 18.900.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 atau Rp 700.000.000.000 selama periode pertanggungan untuk 31 Maret 2012, sedangkan nilai pertanggungan sebesar Rp 18.900.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun untuk tahun 2011.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah, MULIA dan ARRUM, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian / kerusakan / kehilangan yang diakibatkan oleh tindakan pencurian baik yang didahului / tidak didahului oleh tindakan pengrusakan/pembongkaran ketika akan masuk atau keluar lokasi yang dipertanggungjawabkan, perampokan/penodongan, RSMD dan huru-hara dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 1.750.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 atau Rp 700.000.000.000 selama periode pertanggungan untuk 31 Maret 2012, sedangkan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.750.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun untuk tahun 2011.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Barang jaminan atas transaksi kredit KCA, KREASI, KRASIDA, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana alam dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp18.900.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 atau Rp 700.000.000.000 selama periode pertanggungan untuk 31 Maret 2012, sedangkan nilai pertanggungan Rp 18.900.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun untuk tahun 2011.

Barang jaminan atas transaksi kredit Gadai Syariah, MULIA dan ARRUM, seluruhnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo Takaful) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana alam dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 1.750.000.000.000 dengan batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 atau Rp 700.000.000.000 selama periode pertanggungan untuk 31 Maret 2012, sedangkan nilai pertanggungan sebesar Rp 1.750.000.000.000 batas pertanggungan per lokasi sebesar Rp 70.000.000.000 maksimum Rp 700.000.000.000 per tahun untuk tahun 2011.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode, serta penyisihan yang dibentuk cukup untuk menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dan Marhun Bih dijadikan sebagai jaminan atas Pinjaman Bank dan Pinjaman Sindikasi yang diikat secara fidusia.

Pinjaman Yang Diberikan (PYD) dengan tingkat kolektibilitas lancar, dibawah pengawasan khusus, dan kurang lancar masih dihitung pendapatan sewa modalnya, sedangkan untuk kolektibilitas diragukan dan macet tidak dikenakan lagi pendapatan sewa modalnya.

5. Piutang Lainnya

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Klaim Asuransi	9.591.929.157	9.739.207.181
Piutang Pegawai	3.423.656.607	2.239.100.316
Lain-lain	1.513.813.832	4.345.628.250
Jumlah	14.529.399.596	16.323.935.747

Piutang Klaim Asuransi merupakan piutang kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) berkenaan dengan pengajuan klaim atas penggantian kerugian terhadap barang jaminan dan klaim atas kerugian kredit dan Syariah yang masih dalam proses terhadap barang jaminan.

Piutang Pegawai merupakan pinjaman beberapa karyawan untuk biaya pengobatan anggota keluarganya yang tidak mendapat penggantian asuransi kesehatan yang akan diperhitungkan pada periode berikutnya bersamaan dengan pembayaran gaji karyawan.

Manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain seluruhnya lancar sehingga tidak dibentuk penyisihan penurunan nilai piutang, beban penyisihan dan penghapusan piutang.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

6. Persediaan

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Persediaan Emas	5.482.028.000	3.731.525.564
Persediaan Barang	7.879.048.126	26.870.880.200
Jumlah	13.361.076.126	30.602.405.764

Saldo persediaan emas per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 merupakan persediaan emas MULIA pada unit Pegadaian 24.

Persediaan barang meliputi blanko Surat Bukti Kredit (SBK), jarum uji emas, kantong, barang cetak, alat tulis kantor, perlengkapan kantor, perlengkapan komputer, prangko dan meterai.

Manajemen berpendapat bahwa untuk persediaan non emas tidak perlu diasuransikan, sedangkan untuk persediaan emas telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 110.000.000.000 per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011. Perusahaan tidak memperhitungkan penyisihan atau penghapusan persediaan rusak atau usang dan tidak ada persediaan yang dijaminan serta tidak ada kerugian persediaan yang jumlahnya material atau sifatnya luar biasa selama periode pelaporan.

7. Uang Muka

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Uang Muka Dividen	150.000.000.000	150.000.000.000
Uang Muka Pembelian MULIA	8.781.068.964	34.722.672.500
Uang Muka Dinas	56.498.242.500	7.504.197.636
Uang Muka Lainnya	206.315.326	40.034.612
Jumlah	215.485.626.790	192.266.904.748

Uang muka dividen per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah pembayaran uang muka dividen berdasarkan Surat Menteri Negara BUMN No. S-581/MBU/2011 tanggal 1 Nopember 2011 dan No. S-796/MBU/2010 tanggal 22 Desember 2010 perihal setoran Dividen Interim Tahun 2011 dan 2010, yang diperhitungkan dengan pembayaran dividen tahun 2011 dan 2010.

Uang muka dinas merupakan uang muka pembayaran atas transaksi pengeluaran yang sudah ada otorisasinya namun belum dilengkapi dokumen pendukung yang lengkap, yang akan dipertanggungjawabkan di bulan berikutnya, sesuai dengan Surat Edaran Direksi No.06/TR.4.00.100/2005 tanggal 21 Maret 2005.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

8. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Merupakan saldo pendapatan sewa modal dan jasa simpan (Ijarah) yang masih harus diterima per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 terdiri dari:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Usaha Gadai		
Sewa Modal Golongan A	2.858.476.674	726.360.094
Sewa Modal Golongan B	167.734.776.265	109.403.483.133
Sewa Modal Golongan C	775.174.616.839	795.031.208.045
Sewa Modal Golongan D	141.950.536.120	129.357.043.776
Sub Jumlah	1.087.718.405.898	1.034.518.095.048
Usaha Syariah		
Ijarah Golongan A	30.988.250	30.344.176
Ijarah Golongan B	1.585.356.350	1.542.516.288
Ijarah Golongan C	88.877.889.700	81.884.441.344
Ijarah Golongan D	27.431.631.650	18.491.202.574
Sub Jumlah	117.925.865.950	101.948.504.382
Usaha Lain		
Sewa Modal Gadai Efek	765.332	746.667
Ijarah Ar-Rum (Kreasi Sistem Syariah)	979.244.807	1.009.315.295
Sewa Modal Kresna	824.315.459	787.324.265
Sewa Modal Kreasi, Krasida, dan Kremada	19.497.642.943	20.112.024.096
Sewa Modal Krista	18.562.424.706	19.676.255.192
Sewa Modal Lainnya	541.181.302	471.855.663
Sub Jumlah	40.405.574.549	42.057.521.178
Jumlah	1.246.049.846.397	1.178.524.120.608

Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa modal yang masih harus diterima dapat terealisasi.

9. Beban Dibayar di Muka

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Sewa Gedung Kantor	93.597.574.472	72.414.102.750
Asuransi Dibayar Dimuka	7.270.461.993	11.543.861.914
Lain-lain	69.074.200	103.335.000
Jumlah	100.937.110.665	84.061.299.664

Sewa gedung kantor dibayar di muka merupakan pembayaran biaya sewa gedung kantor lama yang diperpanjang dan diamortisasi selama umur sewa.

Asuransi dibayar dimuka meliputi biaya asuransi barang jaminan dan aset tetap.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

10. Piutang Kepada Pihak-Pihak Berelasi

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Piutang TGR	20.657.771.770	17.961.010.535
Piutang Lainnya	150.669.601	26.511.700
Sub Jumlah	20.808.441.371	17.987.522.235
Cadangan Penyisihan Piutang Pegawai	(13.680.096.705)	(15.169.617.078)
Jumlah	7.128.344.666	2.817.905.157

Piutang TGR merupakan piutang kepada karyawan Perusahaan berdasarkan penetapan Direksi atas sanksi tuntutan ganti rugi akibat tindak kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh karyawan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Piutang lainnya merupakan kekurangan kas yang belum dipertanggungjawabkan oleh manajer cabang dan pengelola kantor cabang pembantu.

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Saldo Awal	15.169.617.078	12.684.002.656
Penambahan	1.127.601.823	2.485.614.422
Penyesuaian	(2.617.122.196)	--
Saldo Akhir	13.680.096.705	15.169.617.078

Untuk periode 3 bulan tahun 2012 Manajemen membentuk penyisihan sebesar Rp 1.127.601.823 dan untuk tahun 2011 (12 bulan), Manajemen membentuk tambahan penyisihan masing-masing sebesar Rp 2.485.614.422 berkenaan dengan piutang TGR yang sudah sulit untuk ditagih kembali karena para pegawai yang bersangkutan sudah tidak bekerja lagi di Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penyisihan piutang pegawai cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. Selain mengajukan Tuntutan Ganti Rugi kepada manajer cabang/karyawan kunci, juga melakukan upaya hukum berupa tuntutan pidana/perdata atau sanksi pemecatan atau skorsing akibat kelalaian atau kesalahan dalam operasional.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

11. Aset Tetap

	31 Maret 2012				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan :					
Hak atas Tanah	147.087.407.996	5.343.160.082	—	(867.427.018)	151.563.141.060
Kepemilikan Langsung:					
Bangunan	446.844.272.163	1.841.534.421	—	8.303.296.848	456.989.103.432
Inventaris	369.350.514.020	4.224.587.928	325.827.202	5.268.528.856	378.517.803.602
Kendaraan	42.302.072.501	17.918.600	—	(5.850.000)	42.314.141.101
Aset Dalam Penyelesaian:					
Bangunan	14.303.522.824	12.063.678.698	4.350.840.749	(7.802.869.530)	14.213.491.243
Aset yang Belum Digunakan	12.431.496.783	5.663.932.123	—	(11.369.992.324)	6.725.436.582
Jumlah Harga Perolehan	1.032.319.286.287	29.154.811.852	4.676.667.951	(6.474.313.168)	1.050.323.117.020
Akumulasi Penyusutan :					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan	195.196.823.285	5.192.636.057	—	—	200.389.459.342
Inventaris	279.143.311.005	13.671.917.774	—	—	292.815.228.779
Kendaraan	39.171.153.847	91.210.724	—	—	39.262.364.571
	513.511.288.137	18.955.764.555	—	—	532.467.052.692
Nilai Buku	518.807.998.150				517.856.064.328

	31 Desember 2011				
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Reklasifikasi Rp	Saldo Akhir Rp
Harga Perolehan :					
Hak atas Tanah	132.282.556.318	14.435.643.373	—	369.208.305	147.087.407.996
Kepemilikan Langsung:					
Bangunan	405.201.133.631	8.507.591.243	100.000	33.135.647.289	446.844.272.163
Inventaris	315.204.635.923	18.617.070.916	7.650.000	35.536.457.181	369.350.514.020
Kendaraan	42.669.185.142	—	—	(367.112.641)	42.302.072.501
Aset Dalam Penyelesaian:					
Bangunan	11.541.948.073	41.371.068.046	186.035.300	(38.423.457.995)	14.303.522.824
Aset yang Belum Digunakan	28.815.926.674	15.784.174.897	—	(32.168.604.788)	12.431.496.783
Jumlah Harga Perolehan	935.715.385.761	98.715.548.475	193.785.300	(1.917.862.649)	1.032.319.286.287
Akumulasi Penyusutan :					
Kepemilikan Langsung					
Bangunan	174.874.086.837	20.272.117.295	—	50.619.153	195.196.823.285
Inventaris	214.843.571.981	66.921.373.586	—	(2.621.634.562)	279.143.311.005
Kendaraan	37.583.990.724	2.376.328.205	—	(789.165.082)	39.171.153.847
	427.301.649.542	89.569.819.086	—	(3.360.180.491)	513.511.288.137
Nilai Buku	508.413.736.219				518.807.998.150

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Jenis Aset Tetap yang dijual termasuk nilai buku dan laba rugi yang diperoleh untuk masing-masing tahun adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Nilai Buku		
Tanah dan Bangunan	--	61.218.786
Inventaris	--	22
Jumlah	--	61.218.808
Hasil Penjualan		
Tanah dan Bangunan	--	183.495.008
Inventaris	--	57.244.306
Jumlah	--	240.739.314
Laba Penjualan (Catatan 34)		
Tanah dan Bangunan	--	122.276.222
Inventaris	--	57.244.284
Jumlah	--	179.520.506

Aset Dalam Penyelesaian Bangunan yang sudah selesai dan siap untuk digunakan telah direklasifikasi menjadi Aset Tetap - Bangunan Kepemilikan Langsung per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.

Aset dalam penyelesaian per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 terdiri dari:

Per 31 Maret 2012				
No	Keterangan	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Seharusnya Jadwal Selesai
1	Kanwil Bandung Pembangunan Ruko CPP Metro	748.102.718	95%	30 Maret 2012
2	Kanwil IX Surabaya Pembangunan CPP Mulyosari Termyn I	230.731.250	95%	30 Maret 2011
	Renovasi asrama lama diklat Surabaya	211.384.500	95%	30 april 2012
	Pembangunan Rektorat & Ruang klas bag brt	2749839400	95%	30 april 2012
	Pembangunan CPP Madiun	237.406.900	95%	30 Maret 2012
	Pembangunan CPP Dinoyo	237.178.900	95%	30 Maret 2012
3	Kanwil XVI Jakarta-2 Renovasi Interior Kanwil termin I	739.153.500	95%	30 april 2012
4	Kanwil XVII Palembang Pembangunan gedung ktr +prasarana CPP Curup	235.996.500	25%	30 Maret 2012
	Pembangunan gedung ktr +prasarana CPP Curup	235.996.500	25%	30 Maret 2012
	Pembangunan gedung ktr +prasarana CPP Curup	235.996.500	25%	30 Maret 2012
5	Kantor pusat	1.648.447.546	95%	30 april 2012
6	Kanwil Pekanbaru Pembangunan gedung CPP Bagansiapiapi	1.182.285.500	50%	15 april 2012
	Pembangunan CPP Carina	529.183.700	95%	20 maret 2012
	Pembangunan CPP Batam Sei Jodoh	346.888.500	50%	26 januari 2012
	Pembangunan CPP Muka Kuning	354.059.550	95%	27 maret 2012
	Pembangunan CPP Tanjungpinang Timur	424.124.500	25%	28 maret 2012
	Pembangunan CPP Tanjung Pinang	248.924.000	95%	28 maret 2012
	Pembangunan CPP Ciptapuri	230.318.000	95%	30 Maret 2012
	Pembangunan CPP Nangka	235.167.750	95%	30 Maret 2012
	pembangunan cpp duri	234.807.700	95%	30 Maret 2012
	Pembangunan CPP Bandar	213.473.550	95%	30 Maret 2012
	Pembangunan CPP Ulakkarang	235.102.200	95%	30 Maret 2012
7	Lain-lain (masing-masing dibawah 200jt)	2.468.922.079		
	Jumlah	14.213.491.243		

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Per 31 Desember 2011				
No	Keterangan	Jumlah	% Terhadap Kontrak	Seharusnya Jadwal Selesai
1	Kanwil Jakarta I Pembanguna Ruko CPP Pancoran Mas	706.158.000	95%	30 Maret 2011
2	Kanwil Manado Pembangunan rumah dinas Karbas	284.658.000	95%	31 Januari 2012
3	Kanwil Palembang Pembangunan gedung Kantor dan prasarana CPP Curup	235.996.500	50%	11 Maret 2012
	Pembangunan ruko CPP Panorama	520.000.000	95%	26 Januari 2012
4	Kanwil Surabaya Pembangunan asrama Balai Diklat Surabaya	3.077.499.000	95%	10 Januari 2012
5	Kantor Pusat	3.069.238.000	95%	30 April 2012
6	Kanwil Pekanbaru Pembangunan Gedung CPP Bagansiapiapi	930.936.000	50%	15 april 2012
	Pembangunan CPP Carina	287.702.000	50%	20 Maret 2012
	Pembangunan CPP Batam Sei Jodoh	330.370.000	95%	26 Januari 2012
	Pembangunan CPP Muka Kuning	244.179.000	50%	27 Maret 2012
	Pembangunan CPP Tanjungpinang Timur	249.485.000	25%	28 Maret 2012
	Pembangunan CPP Tanjung Pinang	248.924.000	50%	28 Maret 2012
7	Lain-lain (masing-masing dibawah 200jt)	4.118.377.324		
	Jumlah	14.303.522.824		

Seluruh kantor/gedung/bangunan milik sendiri atau yang disewa oleh Perusahaan dan Entitas Anak serta kantor afiliasinya yang berada di seluruh wilayah Indonesia beserta inventaris kantor yang berada didalamnya telah diasuransikan oleh Perusahaan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan terjadinya risiko kerugian akibat kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, kerusakan karena asap, RSMD, huru-hara dan bencana alam dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 370.130.266.000 dan Rp 350.789.412.503 per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.

Kendaraan telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat kecelakaan, dan pencurian/kejahatan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 22.897.976.460 dan Rp 22.513.500.000 per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan terjadinya risiko kerugian dan manajemen akan mengkaji ulang nilai pertanggungan tersebut setiap akhir periode. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan tidak terdapat biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aset dalam penyelesaian.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

12. Aset Lain-lain

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Beban Ditangguhkan Biaya Pembukaan Cabang Baru	17.962.802.043	23.936.447.174
Barang Jaminan Yang Disisihkan	30.524.397.650	27.654.018.959
Kerugian Perusahaan YMH Diperhitungkan (KPYD)	36.408.296.645	27.695.863.300
Barang Lelang Milik Perusahaan	16.838.655.374	3.490.240.212
Beban Hak Atas Tanah yang Ditangguhkan	5.354.034.576	4.833.951.063
Tanah Kerja Sama Operasi	1.406.071.181	1.406.071.181
Jumlah	108.494.257.469	89.016.591.889

Beban ditangguhkan biaya pembukaan cabang baru adalah biaya atas sewa gedung kantor dan renovasinya, dan akan diamortisasi sebagai beban amortisasi pembukaan cabang baru selama masa sewa. Setiap tahun Perusahaan terus menambah jaringan usaha dengan membuka sejumlah kantor cabang dan unit pelayanan cabang diseluruh wilayah operasi Perusahaan sehingga menyebabkan tambahan kebutuhan biaya pembukaan cabang baru.

Beban hak tanah atas yang ditangguhkan adalah biaya perolehan hak atas tanah yang diamortisasi setiap tahun selama masa manfaatnya.

Saldo Tanah Kerja Sama Operasi merupakan harga perolehan tanah yang diserahkan oleh Perusahaan Kepada Mitra KSO untuk dibangun dan dikelola sesuai dengan perjanjian yaitu KSO tanah Cimahi dan KSO Salemba.

13. Pinjaman Bank

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.679.031.256.855	5.942.916.298.599
PT Bank BRI (Persero) Tbk	4.978.284.466.415	4.858.401.153.540
PT Bank BNI (Persero) Tbk	2.921.671.822.691	2.940.585.172.691
PT Bank Central Asia Tbk	2.428.960.419.604	2.033.657.180.544
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	305.201.732.726	343.232.757.769
PT Bank Permata Syariah	200.023.492.460	100.024.771.267
PT Bank Permata Tbk	200.000.000.000	200.000.000.000
Bank DKI Syariah	200.000.000.000	175.000.000.000
Jumlah	16.913.173.190.751	16.593.817.334.410

a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pinjaman modal kerja pertama kali diberikan dengan plafon Rp 300.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.29 tanggal 21 Pebruari 2003 yang dibuat di hadapan notaris Raharti Sudjardjati, S.H. Fasilitas pinjaman dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari plafon kredit.

Pada tahun 2009, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.17 yang dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH, M.Kn, nilai fasilitas pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tahun 2009 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit I Nomor: KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 21 April 2008 Akta Perjanjian Kredit No. 281 dan diganti dengan Perjanjian Kredit No.CBG.CBI.SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 nilai plafonnya menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit adalah 12 bulan sampai dengan 20 Pebruari 2010 dan tingkat bunga 13% per tahun (*reviewable*).

Pada tahun 2010 terdapat perubahan Addendum Perjanjian Kredit No.CBG.CBI/SPPK.009/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang telah di aktakan dengan Akta No.17 diganti dengan Perjanjian Kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 19 Pebruari 2010 dan selanjutnya diganti dengan perjanjian kredit No.KP-CRO/016/PK-KMK/2008 tanggal 9 April 2010 yang diaktakan dengan Akta Perjanjian Kredit No.6 nilai plafon ditingkatkan menjadi Rp 5.500.000.000.000 dengan jangka waktu kredit 12 bulan sampai dengan 20 Pebruari 2011 dan tingkat bunga 10,25% per tahun (*reviewable*).

Berdasarkan surat Bank Mandiri No.CBG.CB1/343/2010 tanggal 8 Desember 2010, tingkat bunga pinjaman menjadi sebagai berikut:

1. Sampai dengan baki debet sebesar Rp 4.590.940.000.000 dikenakan suku bunga sebesar 10% per tahun
2. Atas baki debet sebesar Rp 100.000.000.000 yang ditarik pada tanggal 12 Nopember 2010 dikenakan suku bunga 8,5% per tahun
3. Untuk penarikan Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 200.000.000.000 akan dikenakan suku bunga 8,25% per tahun

Terdapat addendum V atas perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja No: KC-CRO/016/PK-KMK/2008, No. 281 tanggal 21 April 2008 dan terakhir addendum VI dengan Akta No: TOP.CRO/CLA.51/ADD/2011 tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Modal Kerja. Limit Fasilitas : Rp 5.500.000.000.000 , Jenis kredit : Kredit Modal Kerja, Sifat : Revolving, Jangka Waktu : 21 Pebruari 2011 - 20 Pebruari 2012, Provisi : 0,25% p.a. dari limit. Suku Bunga terdiri dari:

- Untuk baki debet > Rp 300 M - Rp 5,5 T = 10,00% p.a.
- Untuk baki debet Rp 100 M yang ditarik tanggal 12 Nopember 2010 = 8,50% p.a.
- Atas penarikan KMK Rp 200 M yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2010 = 8,25% p.a.

Mengacu perjanjian kredit yang dituangkan dalam akta No. 17 tanggal 16 Maret 2009 pasal 17 ayat 7, Perusahaan wajib :

- Memelihara *current ratio* di atas 110%.
- Memelihara total pinjaman maksimal tujuh kali modal sendiri.
- Melapor kepada bank apabila :
 - Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan liabilitas yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit.
 - Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang dijaminkan kepada Bank Mandiri, kepada pihak lain.
 - Melunasi hutang kepada pemilik modal.
 - Memindahtangankan barang jaminan.
 - Membagikan dividen.
 - Mengubah susunan Direksi atau Dewan Pengawas dan melampirkan Surat Keputusan Menteri.
 - Membagikan laba sesuai penetapan Menteri.

Jaminan piutang lancar Perusahaan terhadap debiturnya yang diikat Fidusia sebesar Rp 5.500.000.000.000 *cross collateral* dan *cross default* dengan jaminan atas tambahan fasilitas KMK.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Suku bunga rata-rata untuk periode 3 bulan tahun 2012 dan 2011 (12 bulan) atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012	2011
KMK I	9.50%	10.00%
KMK II	9.50%	8.50%
KMK III	9.50%	8.25%

b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/K) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 9 Mei 2005 yang dibuat dihadapan notaris Raharti Sudjardjati SH, fasilitas pinjaman dengan plafon sebesar Rp 300.000.000.000 tersebut berbunga 13% per tahun (*reviewable*) dan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2006. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai sebesar Rp 300.000.000.000.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 8 April 2009 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan, SH, plafon pinjaman dinaikkan menjadi sebesar Rp 3.500.000.000.000 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010. Pinjaman tersebut dijamin dengan secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai jaminan sebesar Rp 3.500.000.000.000 dengan tingkat bunga sebagai berikut:

1. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) ditambah 3,25% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar atau lebih dari Rp 2.800.000.000.000.
2. Sebesar Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 (satu) bulan ditambah 3,50% per tahun jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan sebesar Rp 2.300.000.000.000 sampai dengan Rp 2.800.000.000.000.
3. Sebesar SBI 1 (satu) bulan ditambah 3,75% per tahun. jika rata-rata penggunaan kredit (*outstanding*) dalam sebulan kurang dari Rp 2.300.000.000.000.

Pada tahun 2010, plafon pinjaman dinaikkan kembali menjadi sebesar Rp 4.500.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.42 tanggal 30 Maret 2010, dan jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2011, yang dibuat di hadapan notaris Yatty Sriyati Suhadiwiraatmaja, SH, MM, MHum. Pinjaman tersebut dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4.500.000.000.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun.

Pada tahun 2011, berdasarkan akta No.18 tanggal 24 Mei 2011, yang dibuat di hadapan notaris Indrasari K. Gunadharma, S.H., M.Kn. BRI memberikan tambahan (suplesi) kredit atas Fasilitas KMK sebesar Rp 500 M menjadi Rp 5 T (sebelumnya Rp 4,5 T) selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 28 Pebruari 2011 - 28 Pebruari 2012. Selain itu terdapat perubahan suku bunga atas perpanjangan tersebut yang semula 10% turun menjadi 9,5%.

Mengacu perjanjian kredit pasal 10, Perusahaan wajib :

- Mempergunakan kredit yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, fasilitas KMK hanya dipergunakan untuk modal kerja dan tidak diperbolehkan untuk investasi lainnya.
- Membayar bunga dan denda bunga yang telah ditentukan apabila setelah perjanjian kredit ini berakhir debitur menunggak atau fasilitas kredit dihentikan secara sepihak oleh pihak kreditur.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.
- Membayar pajak, biaya-biaya dan ongkos yang relevan dalam rangka pemberian kredit.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

- Setiap saat bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan administrasi pembukuan dan kondisi Perusahaan oleh kreditur atau pihak ketiga yang ditunjuk kreditur.
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit Perusahaan.
- Menyimpan surat bukti kepemilikan jaminan sampai kreditnya lunas.

Suku bunga rata-rata untuk periode 3 bulan tahun 2012 dan 2011 (12 bulan) atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012	2011
KMK	9.50%	10.00%

c. **PT Bank BNI (Persero) Tbk**

Fasilitas pinjaman dari PT Bank BNI (Persero) pertama kali diperoleh pada tahun 2010, berdasarkan Akta Perjanjian No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 400.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dan suku bunga pinjaman berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan dari Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5%, dan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH disepakati penambahan plafon pinjaman menjadi sebesar Rp 2.600.000.000.000 dijamin secara fidusia dengan Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga berdasarkan rata-rata bunga deposito berjangka 12 bulan di 4 Bank (BNI, BRI, Mandiri, dan BCA) yang diumumkan pada harian Kompas ditambah *spread* 3,5% sehingga menjadi 8,5% p.a, jatuh tempo tanggal 14 Januari 2011.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadap notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH, Perusahaan memperoleh pinjaman kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 400.000.000.000 dan berdasarkan surat nomor KPS/2.4/266/R tentang persetujuan pemberian penambahan pemberian fasilitas kredit sebesar Rp 2.600.000.000.000 menjadi Rp 3.000.000.000.000. Jangka waktu kredit tersebut 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo. Fasilitas kredit berjalan atau sampai dengan tanggal 14 April 2011. Untukmaksimum fasilitas sampai dengan Rp 1.250.000.000.000, tingkat suku bunga ditetapkan berdasarkan rata-rata suku bunga deposito berjangka 12 bulan di empat bank (BRI,Mandiri,BNI,BCA) dan untuk fasilitas Rp 250.000.000.000 ditetapkan sebesar 8,5% p.a dan akan direview setiap saat.

Pada tanggal 31 Maret 2011 telah ditandatangani surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No.(2) 13 dengan maksimum plafon Rp 2.600.000.000.000 dengan bunga 8,5% p.a yang diperpanjang selama 12 bulan sejak jatuh tempo terhitung sejak tanggal 15 Januari 2011 s.d. 14 Januari 2012.

Pada tanggal 31 Maret 2011 terdapat surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (2) 08 yang berisi bahwa para pihak yang berkaitan setuju untuk mengadakan perubahan atas Akta Perjanjian Kredit No. 8 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat dihadapan notaris R. Ay. Poppy Darmawan SH dengan maksimum plafon Rp 400.000.000.000 sebagaimana telah diubah dengan persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (1) 08 tanggal 12 Januari 2011. Perubahan tersebut termasuk perpanjangan masa kredit selama 12 bulan terhitung sejak 15 Januari 2011 sampai dengan 14 Januari 2012, termasuk perpanjangan sementara selama 3 bulan sejak jatuh tempo atau sejak tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan 14 April 2011.

Berdasarkan surat Bank BNI No. KP5/2.4/1420/R tanggal 1 Oktober 2010 terdapat perubahan suku bunga sebagai berikut:

1. KMK sebesar Rp 1.250.000.000.000 suku bunga 9,5% per tahun
2. KMK sebesar Rp 1.750.000.000.000 suku bunga 8,5% per tahun

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 20, Perusahaan wajib :

- Memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimum 10 kali dan *current ratio* maksimum 1 kali.
- Membayar seluruh liabilitas pajak, retribusi dan biaya lain yang dikenakan pemerintah.
- Menyerahkan Laporan Keuangan berupa laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi setiap 3 bulan.
- Menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang telah disetujui Bank.
- Menyerahkan daftar tagihan kepada pihak ketiga secara periodik (triwulan).
- Melapor kepada bank apabila :
 - Adanya perkara yang memengaruhi kegiatan usaha Perusahaan, yang terjadi antara Perusahaan dengan pihak lain.
 - Adanya perkara antara pengurus dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan harta kekayaan Perusahaan serta barang agunan yang mempengaruhi kelangsungan usaha.
 - Adanya pengurus Perusahaan yang melanggar Anggaran Dasar Perusahaan.
 - Adanya perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perusahaan.
 - Adanya hal-hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya usaha dan kemampuan Perusahaan untuk melunasi hutangnya.

Suku bunga rata-rata untuk periode 3 bulan tahun 2012 dan 2011 (12 bulan) atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012	2011
KMK I (Rp 1,250 M)	9.44%	9.50%
KMK II (Rp 1,750 M)	8.50%	8.50%

d. **PT Bank Central Asia Tbk**

Fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 26 Juni 2000, yang dibuat di hadapan notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. Fasilitas dengan plafon Rp 50.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan sebesar 100% dari limit kredit, dengan suku bunga 16% per tahun (*reviewable*), jatuh tempo tanggal 26 Juni 2001. Sejak tahun 2006 nilai fasilitas pinjaman ditingkatkan menjadi sebesar Rp 1.200.000.000.000.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Ery Soehandjojo SH fasilitas kredit lokal dan *time loan revolving* diubah menjadi sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	Rp 100.000.000.000	24 Juni 2010
<i>Time Loan Revolving</i>	Rp 1.200.000.000.000	24 Juni 2010

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.21 tanggal 23 Juli 2010 tentang Perubahan Kesepuluh atas Perjanjian Kredit No.21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat dihadapan notaries Ny Ery Soehandjojo, SH, menerangkan fasilitas yang diberikan adalah sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal (Rekening Koran)	Rp 100.000.000.000	26 Juni 2011
<i>Time Loan Revolving</i>	Rp 1.500.000.000.000	26 Juni 2011

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Fasilitas *Money Market Loan* dari PT Bank Central Asia Tbk pertama kali diperoleh berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Ery Soehandjojo SH, di Jakarta dan telah dilakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No.33 tanggal 24 Juni 2009 yang dibuat dihadapan notaris Ny. Ery Soehandjojo SH fasilitas *money market* loan diubah plafonnya menjadi Rp 500.000.000.000 dan jatuh tempo tanggal 24 Juni 2010.

Berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 23 Juli 2010 tentang perubahan ketujuh atas Akta Perjanjian Kredit No. 7 tanggal 5 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Ery Soehandjojo S.H. di Jakarta menerangkan bahwa Perum Pegadaian telah menerima fasilitas pinjaman berjangka *Money Market* dengan plafon Rp 500.000.000.000 dan mengubah batas waktu pemberian fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 26 Juni 2010 dan berakhir tanggal 26 Juni 2011.

Berdasarkan Akta No. 19 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang perubahan kesembilan atas perjanjian kredit No. 21 tanggal 16 Juli 2003 yang dibuat dihadapan notaries Ny. Ery Soehandjojo yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan perubahan kedelapan atas perjanjian kredit No. 179/Add-KCK/2009 tanggal 17 Juli 2009 menerangkan fasilitas PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

Fasilitas	Plafon	Jatuh Tempo
Kredit Lokal	100.000.000.000	26 Juli 2012
<i>Time loan Revolving</i>	1.500.000.000.000	26 Juli 2012

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 11, Perusahaan wajib memelihara *Debt to Equity Ratio* maksimum 7 kali dan *current ratio* maksimum 1 kali.

Suku bunga rata-rata untuk periode 3 bulan tahun 2012 dan 2011 (12 bulan) atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012	2011
Kredit Lokal	9.50%	10.50%
<i>Time loan</i>	8.75%	9.50%
<i>Money Market Loan</i>	8.25%	8.25%

Risiko barang jaminan ditanggung oleh Perum Pegadaian karena barang jaminan milik nasabah berada/disimpan oleh Perum Pegadaian. Apabila terjadi gagal bayar oleh nasabah, penanggungjawabnya adalah Perum Pegadaian dan barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian, sebagaimana diperlakukan terhadap barang jaminan nasabah usaha gadai lainnya.

e. PT Bank Syariah Mandiri

Fasilitas pembiayaan musyarakah dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk pertama kali diterima tahun 2007 berdasarkan Akta/Perjanjian Kredit No. 20 tanggal 22 Pebruari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH, nilai fasilitas Rp 50.000.000.000 jatuh tempo tanggal 22 Pebruari 2008, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nasabah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 56% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 44% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.15 tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH, nilai fasilitas dinaikan menjadi Rp 100.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Maret 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nasabah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 40% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Pada tahun 2009 berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.3 tanggal 10 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Notaris Ina Rosaina, SH nilai fasilitas diganti menjadi Rp 200.000.000.000 jatuh tempo tanggal 20 Desember 2010, dijamin dengan piutang gadai dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit pinjaman. Adapun Nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

1. Sebesar 63,26% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
2. Sebesar 36,74% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Pada tanggal 9 Desember 2010, berdasarkan Surat Penegasan No. 12/240/060/SPPA atas Addendum Akad Al-Musyarakah Pembiayaan Dana Berputar No. 12/411/060/AL-MUSYARAKAH, Bank menyetujui perpanjangan jangka waktu pembiayaan sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2011.

Pada tanggal 25 Pebruari 2011, berdasarkan Perjanjian No.13/042060/SPPP menyatakan bahwa terdapat Perubahan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Perusahaan untuk cabang syariah mengenai perpanjangan jangka waktu selama 12 bulan dari tanggal akad perjanjian dan penambahan pembiayaan modal kerja dari semula sebesar Rp 200.000.000.000 menjadi Rp 350.000.000.000.

Semua fasilitas yang jatuh tempo tahun 2011 tidak dilunasi, tetapi telah diperpanjang dengan beberapa yang ditambah fasilitas plafonnya. Apabila terdapat penurunan saldo hutang bank, penurunan saldo tersebut bukan merupakan pelunasan hutang, namun merupakan penempatan kelebihan likuiditas/penurunan sementara pinjaman perbankan, sebelum dipergunakan sebagai modal kerja pada bulan-bulan berikutnya secara bertahap.

f. PT Bank Permata Tbk

Fasilitas pinjaman (ketentuan khusus atau fasilitas *Overdraft*) dari PT Bank Permata Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No. 12 tanggal 25 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, SH., M.Kn. Fasilitas dengan plafon sebesar Rp 100.000.000.000 dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit dengan suku bunga pinjaman sebesar 10,25% dan jatuh tempo pada tanggal 25 Pebruari 2011.

Fasilitas pinjaman *Money Market* dari PT Bank Permata Tbk pertama kali diperoleh pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Perjanjian kredit No.13 tanggal 25 Pebruari 2010 yang dibuat dihadapan notaris Imas Fatimah, SH., M.Kn dengan plafon sebesar Rp 200.000.000.000 dengan tingkat bunga 36% p.a dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman yang Diberikan/PYD) dengan nilai penjaminan sebesar 100% dari limit kredit dan suku bunga yang berlaku ditetapkan oleh Bank yang disepakati semua pihak, dan jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2011.

Pada tanggal 25 April 2011, dibuat Surat Perubahan Perjanjian Kredit No. MM/11/521/AMD/NBFI yang berisi bahwa para pihak terkait telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Fasilitas Money market tertanggal 25 Pebruari 2010 No. 13 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah SH, yang terakhir dirubah dengan Perubahan perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) tertanggal 24 Pebruari 2011. No. MM/11/253/AMD/FI berupa pemberian Fasilitas *Money Market* dari Bank Permata kepada Pegadaian sebesar Rp 200.000.000.000 berupa pemberian Fasilitas *Money Market* untuk jumlah tidak melebihi Rp 75.000.000.000. Jangka waktu Fasilitas *Money Market* akan berakhir pada 24 April 2011.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tanggal 14 Juli 2011 telah dilakukan penandatanganan akad musyarakah no 19 tanggal 14 Juli 2011 dengan notaris Ny. Sjarmaeni S. Chandra, SH dengan fasilitas sebesar Rp 300.000.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan sejak ditandatanganinya akad tersebut.

Mengacu pada perjanjian kredit pasal 6, Perusahaan wajib :

- Menyerahkan Laporan posisi keuangan dan perhitungan Laba Rugi kepada Bank dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Bank.
- Menyerahkan Laporan Keuangan audit yang sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
- Melaporkan informasi keuangan dan lain-lain informasi mengenai kondisi atau operasi Perusahaan bila diperlukan atau diminta oleh Bank.
- Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum.
- Mengijinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank yang layak untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perusahaan dan memeriksa/mengaudit Perusahaan.
- Melapor kepada bank apabila :
 - Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Perusahaan yang nilainya minimal 10% dari nilai ekuitas Perusahaan.
 - Perusahaan melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan memperoleh sebagian besar asset atau saham dari Perusahaan lain atau bentuk usaha lain.
 - Melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Perusahaan.
 - Melakukan perubahan sifat dan kegiatan usaha Perusahaan.

Suku bunga rata-rata untuk periode 3 bulan tahun 2012 dan 2011 (12 bulan) atas fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Fasilitas Pinjaman	2012	2011
MML I	8.75%	8.50%
MML II	8.75%	8.50%
MML III	8.75%	8.50%

g. PT Bank DKI Syariah

Fasilitas pinjaman musyarakah dari PT Bank DKI Syariah pertama kali diperoleh pada tahun 2011. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No.43 tanggal 20 September 2011, yang dibuat dihadapan notaris Dinah, SH. Fasilitas dengan plafon Rp 200.000.000.000,- dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan.

Fasilitas pinjaman yang diberikan bersifat *revolving* dengan jangka waktu pinjaman selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akad dan akan berakhir pada tanggal 20 September 2012. Adapun nisbah bagi hasil ditetapkan sebagai berikut:

- Sebesar 68.52% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Perum Pegadaian.
- Sebesar 31.48% dari pendapatan Ijarah (jasa simpan) untuk Bank.

Sesuai akad, hal-hal yang harus dipenuhi oleh Perusahaan selama fasilitas kredit adalah:

- Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka Perusahaan akan dikenakan denda sebesar kerugian riil yang ditanggung oleh pihak bank dan denda sebesar 1.5% dari nisbah bagi hasil, dan akan disetorkan untuk dana kebajikan (infaq/shodaqoh/sosial).
- Menyalurkan transaksi keuangannya melalui rekeningnya di kreditur.
- Memberitahukan kepada kreditur tentang adanya permohonan pernyataan pailit Perusahaan.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

- Apabila terjadi kerugian dalam kegiatan usaha, kerugian akan ditanggung bersama oleh para pihak secara proporsional sebesar porsi modal para pihak yang digunakan, namun tidak termasuk kerugian yang timbul akibat dari kesalahan yang disengaja oleh Perusahaan.

Mengacu pada akad pasal 12 ayat 2, Perusahaan wajib:

- Jaminan yang diberikan oleh *end user/rajin* kepada Bank harus diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pinjaman yang diberikan kepada *rajin* tidak dapat dijamin kepada pihak lain.
- Jaminan tagihan/piutang yang diagunkan kepada Bank adalah piutang dengan kolektibilitas yang lancar.
- Menyalurkan dana yang berasal dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah.
- Menjaga kelancaran pembiayaan yang diberikan kepada *rajin*.
- Menyampaikan laporan keuangan *unaudited* semesteran paling lambat 60 hari setelah akhir laporan, dan laporan keuangan *audited* tahunan paling lambat 180 hari setelah akhir periode laporan.
- Memberitahukan kepada Bank apabila memperoleh pinjaman/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya.
- Mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank apabila akan mengajukan pinjaman/pembiayaan dari Bank/Lembaga Keuangan lainnya, yang dapat mengakibatkan *Debt to Equity Ratio* melampaui 10 kali.
- Menjaga *Debt to Equity Ratio* maksimum 10 kali dan menjaga tingkat *Non Performing Loan Gross* maksimal 5%.
- Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila terjadi perubahan pengurus (Dewan Pengawas dan Dewan Direksi) ataupun Anggaran Dasar Perusahaan.
- Berliabilitas menjaga kualitas, reputasi, itikad baik, dan kualitas organisasi.
- Memberikan kuasa kepada Bank untuk memindahkan/mendebit dana dari rekening giro/pinjaman/deposito atas nama Perusahaan untuk pembayaran liabilitas-liabilitas kepada Bank.
- Melakukan pembaharuan/perpanjangan atas dokumen-dokumen yang telah jatuh tempo dan melaporkan atau menyerahkan copy dokumen terkini kepada Bank.

h. PT Bank Permata Syariah

Fasilitas pinjaman musyarakah dari PT Bank Permata Syariah pertama kali diperoleh pada tahun 2011. Berdasarkan Akta perjanjian kredit No.43 tanggal 20 September 2011, yang dibuat dihadapan notaris Dinah, SH. Fasilitas dengan plafon Rp 200.000.000.000,- dijamin secara fidusia oleh Piutang (Pinjaman Yang Diberikan/PYD) dengan nilai Penjaminan 100% dari limit penjaminan.

14. Utang *Medium Term Notes* (MTN)

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Jangka Pendek:		
<i>Medium Term Notes</i> Syariah Ijarah I	425.000.000.000	425.000.000.000
Jangka Panjang:		
<i>Medium Term Notes</i> II	240.000.000.000	240.000.000.000
Jumlah	<u>665.000.000.000</u>	<u>665.000.000.000</u>

Utang Syariah Ijarah

Fasilitas pinjaman dari PT Mandiri Sekuritas, yang kemudian diberi nama *Medium Term Notes* (MTN) Syariah Ijarah I pertama kali diterbitkan pada tahun 2011, berdasarkan Akta Perjanjian No. 42 tanggal 23 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

Fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Perum Pegadaian akan diterbitkan dalam beberapa tahap, dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan pada masing-masing tahap MTN

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Syariah Ijarah I, dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai akad, maka Perusahaan akan dikenakan Cicilan Imbalan Ijarah, yaitu sejumlah dana yang harus dibayarkan sebagai imbalan atas manfaat yang diterima Perusahaan yang pembayarannya dilakukan pada setiap tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing tahap.

Hingga tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp 425.000.000.000,- yang dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, dengan rincian sebagai berikut:

1. MTN Syariah Ijarah I Perum Pegadaian Tahap I Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap I dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp100.000.000.000,-.
MTN Syariah Ijarah I Tahap I berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 03 September 2012.
Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap I adalah sebesar Rp8.581.944.444,- yaitu 8,35% dari pinjaman, yang pembayarannya diatur sebagai berikut:

<u>Cicilan Imbalan Ijarah</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah yang dibayarkan</u>
Tahap I	23 Nopember 2011	Rp2.087.500.000,-
Tahap II	23 Pebruari 2011	Rp2.087.500.000,-
Tahap III	23 Mei 2012	Rp2.087.500.000,-
Tahap IV	03 September 2012	Rp2.319.444.444,-

2. MTN Syariah Ijarah I Perum Pegadaian Tahap II Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap II dilakukan pada tanggal 27 September 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 125.000.000.000.

MTN Syariah Ijarah I Tahap II berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 07 Oktober 2012.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap II adalah sebesar Rp10.277.777.778,- yaitu 8% dari pinjaman, yang pembayarannya diatur sebagai berikut:

<u>Cicilan Imbalan Ijarah</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah yang dibayarkan</u>
Tahap I	27 Desember 2011	Rp2.500.000.000,-
Tahap II	27 Maret 2012	Rp2.500.000.000,-
Tahap III	27 Juni 2012	Rp2.500.000.000,-
Tahap IV	07 Oktober 2012	Rp2.777.777.778,-

3. MTN Syariah Ijarah I Perum Pegadaian Tahap III Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN Syariah Ijarah I Tahap III dilakukan pada tanggal 09 November 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 200.000.000.000,-.

MTN Syariah Ijarah I Tahap III berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal pencairan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 November 2012.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah Tahap III adalah sebesar Rp 16.444.444.444 (enam belas milyar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) atau setara dengan 8% (delapan persen) dari Sisa Imbalan Ijarah, dengan rincian sebagai berikut:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

<u>Cicilan Imbalan Ijarah</u>	<u>Tanggal</u>	<u>Jumlah yang dibayarkan</u>
Tahap I	09 Pebruari 2012	Rp4.000.000.000,-
Tahap II	09 Mei 2012	Rp4.000.000.000,-
Tahap III	09 Agustus 2012	Rp4.000.000.000,-
Tahap IV	19 November 2012	Rp4.444.444.444,-

Sesuai dengan akad, apabila Perusahaan mengalami keterlambatan pembayaran, baik pembayaran pinjaman maupun Cicilan Imbalan Ijarah, maka Perusahaan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang besarnya telah diatur pada tiap tahap pinjaman.

Mengacu pada akad, Perusahaan wajib:

- Memelihara pembukuan, administrasi dan catatan-catatan yang cukup mengenai usaha yang dijalankan Perusahaan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum.
- Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank yang layak untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perusahaan dan memeriksa/mengaudit Perusahaan.
- Memberitahukan kepada wakil Bank yang ditunjuk keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempengaruhi usaha atau operasi Perusahaan.
- Memenuhi peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan serta melakukan pembayaran pajak sebagaimana mestinya.
- Menyerahkan laporan keuangan in-house setiap tiga bulan.
- Menyerahkan laporan keuangan *audited* tahunan.
- Memelihara harta kekayaan dan semua aset agar dalam keadaan baik dan mengasuransikannya.
- Memberitahukan secara tertulis setiap perubahan tentang anggaran dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Pengawas.
- Memelihara rasio likuiditas 1 : 1 dan *Debt to Equity Ratio* maksimal sebesar 10 kali.

Medium Term Notes II

Selain MTN Syariah Ijarah I, Perum Pegadaian dan PT Mandiri Sekuritas juga mengadakan perjanjian kerjasama berupa fasilitas pinjaman lain. Fasilitas pinjaman dari PT Mandiri Sekuritas ini kemudian diberi nama *Medium Term Notes* (MTN II) Perum Pegadaian Tahun 2011, yang selanjutnya disebut dengan MTN, diterbitkan pada tahun 2011 berdasarkan Akta Perjanjian No. 69 tanggal 28 Desember 2011 yang dibuat di hadapan notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH.

MTN sebesar Rp 240.000.000.000,- ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan, dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2013.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

15. Pinjaman Obligasi

	2012 Rp	2011 Rp
Nilai Nominal		
a. Obligasi X	63.500.000.000	63.500.000.000
b. Obligasi XI	500.000.000.000	500.000.000.000
c. Obligasi XII	600.000.000.000	600.000.000.000
d. Obligasi XIII	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000
e. Obligasi Berkelanjutan I	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
f. Obligasi Berkelanjutan II	1.000.000.000.000	--
Sub Jumlah	4.663.500.000.000	2.663.500.000.000
Diskonto yang belum diamortisasi		
a. Obligasi X	(371.027.290)	(388.523.064)
b. Obligasi XI	(1.163.217.984)	(1.233.089.124)
c. Obligasi XII	(1.095.371.396)	(1.145.653.909)
d. Obligasi XIII	(2.078.531.021)	(2.212.007.096)
e. Obligasi Berkelanjutan I	(2.443.625.900)	(2.561.077.822)
f. Obligasi Berkelanjutan II	(1.182.719.002)	--
Sub Jumlah	(8.334.492.593)	(7.540.351.015)
Nilai Bersih		
a. Obligasi X	63.128.972.710	63.111.476.936
b. Obligasi XI	498.836.782.016	498.766.910.876
c. Obligasi XII	598.904.628.604	598.854.346.091
d. Obligasi XIII	1.497.921.468.979	1.497.787.992.904
e. Obligasi Berkelanjutan I	997.556.374.100	997.438.922.178
f. Obligasi Berkelanjutan II	998.817.280.998	--
Sub Jumlah	4.655.165.507.407	3.655.959.648.985

Rating masing-masing obligasi berdasarkan penilaian PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) terhadap Obligasi X, XI, XII, dan XIII adalah AA (*Double A; Stable Outlook*). Rating Pemantauan Obligasi Tahun 2010 AA+. Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan Perusahaan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan oleh perjanjian perwaliamanatan.

Berikut adalah penjelasan rinci atas obligasi:

a. Obligasi X Tahun 2003

Obligasi X Tahun 2003 diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	--	--
Obligasi Seri B	63.500.000.000	63.500.000.000
	63.500.000.000	63.500.000.000

Obligasi X Seri A sebesar Rp 336.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 11 Juli 2011 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,94% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi X Seri B Tahun 2004 sebesar Rp 63.500.000.000 memiliki jangka waktu pelunasan 15 tahun yang jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2018 dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,125% per tahun untuk tahun pertama sampai ketiga dan bunga mengambang untuk tahun keempat sampai dengan tahun kelimabelas yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu tiga bulan ditambah premi tetap sebesar 1,00%, maksimal 15,50% dan minimal 10,50%.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi X selama tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2012	2011
Obligasi X Seri B	10,50%	10,50%

Penerbitan obligasi X berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.39 tanggal 12 Mei 2003 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 5:1 sampai dengan 21 Juli 2008 selanjutnya maksimal 7 : 1

b. Obligasi XI Tahun 2006

Obligasi XI Tahun 2006 memiliki jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	400.000.000.000	400.000.000.000
Obligasi Seri B	100.000.000.000	100.000.000.000
	500.000.000.000	500.000.000.000

Emisi Obligasi XI Seri A Tahun 2006 sebesar Rp 400.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat, dengan jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Emisi Obligasi XI Seri B Tahun 2006 sebesar Rp 100.000.000.000 diterbitkan tanpa warkat jangka waktu 10 tahun, akan jatuh tempo tanggal 23 Mei 2016. Tingkat bunga tetap sebesar 13,10% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,25 % pertahun, dengan batas atas sebesar 16,00% dan batas bawah 10,00 %.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XI selama tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut

Jenis Obligasi	2012	2011
Obligasi XI Seri A	13,10%	13,10%
Obligasi XI Seri B	10,00%	10,00%

Penerbitan obligasi XI berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.5 tanggal 10 April 2006 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

c. Obligasi XII Tahun 2007

Obligasi XII Tahun 2007 Seri A dan Seri B dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 4 September 2017 terdiri dari:

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
 dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A	370.000.000.000	370.000.000.000
Obligasi Seri B	230.000.000.000	230.000.000.000
	600.000.000.000	600.000.000.000

Obligasi XII Seri A Tahun 2007 sebesar Rp 370.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Obligasi XII Seri B Tahun 2007 sebesar Rp 230.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 September 2017 memiliki tingkat bunga tetap sebesar 10,025% untuk tahun pertama dan bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 1,00% per tahun, dengan batas atas sebesar 12,00% dan batas bawah 8,00%. Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XII selama tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2012	2011
Obligasi XII Seri A	10,03%	10,03%
Obligasi XII Seri B	8,00%	8,00%

Penerbitan obligasi XII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.2 tanggal 4 Juli 2007 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

- d. Obligasi XIII Tahun 2009 Seri A dengan jangka waktu 5 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2014, Seri B dengan jangka waktu 8 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2017, dan Seri C dengan jangka waktu 10 tahun yang jatuh tempo tanggal 1 Juli 2019 terdiri dari:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Nilai Nominal		
Obligasi Seri A-1	350.000.000.000	350.000.000.000
Obligasi Seri A-2	100.000.000.000	100.000.000.000
Obligasi Seri B	650.000.000.000	650.000.000.000
Obligasi Seri C	400.000.000.000	400.000.000.000
	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000

Obligasi XIII Seri A-1 tahun 2009 sebesar Rp 350.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama sampai tahun kelima.

Obligasi XIII Seri A-2 tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000.000 dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,675% untuk tahun pertama bunga mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima yang besarnya ditentukan berdasarkan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu satu bulan ditambah premi sebesar 3% per tahun, dengan batas atas sebesar 13% dan batas bawah 10%.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi XIII Seri B tahun 2009 sebesar Rp 650.000.000.000 dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2017 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,650% untuk tahun pertama sampai tahun kedelapan.

Obligasi XIII Seri C tahun 2009 sebesar Rp 400.000.000.000 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,875% untuk tahun pertama sampai tahun kesepuluh.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi XIII selama tahun 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Jenis Obligasi	2012	2011
Obligasi XIII Seri A-1	11,675%	11,675%
Obligasi XIII Seri A-2	11,675%	11,675%
Obligasi XIII Seri B	12,650%	12,650%
Obligasi XIII Seri C	12,875%	12,875%

Penerbitan obligasi XIII berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan No.24 tanggal 12 Juni 2009 dengan PT Bank Mega Tbk, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- Memelihara likuiditas yaitu rasio antara aset lancar dibanding hutang lancar minimum 1:1
- Memelihara rasio liabilitas terhadap ekuitas maksimal 10:1

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing obligasi adalah sebagai berikut:

- Obligasi IX setiap tanggal 6 Maret, 6 Juni, 6 September dan 6 Desember
- Obligasi X Seri A setiap tanggal 11 Januari, 11 April, 11 Juni, dan 11 Oktober
- Obligasi X Seri B setiap tanggal 12 Maret, 12 Juni, 12 September, dan 12 Desember.
- Obligasi XI setiap tanggal 23 Pebruari, 23 Mei, 23 Agustus dan 23 Nopember.
- Obligasi XII setiap tanggal 4 Maret, 4 Juni, 4 September, dan 4 Desember.
- Obligasi XIII setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.

- e. Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap dan/atau mengambang dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi ini terbagi dalam dua tahap, yang pertama disebut dengan Obligasi Berkelanjutan I Perum Pegadaian Tahap I tahun 2011 dengan tingkat bunga tetap, yang selanjutnya disebut dengan Obligasi Berkelanjutan Tahap I dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), terdiri dari:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Jenis Obligasi :		
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	250.000.000.000	250.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	250.000.000.000	250.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	500.000.000.000	500.000.000.000
	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri A akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2014.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,0% per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri B akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2016.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,0% per tahun dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Pembayaran bunga pertama Obligasi Berkelanjutan Tahap I Seri C akan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal hari ulang tahun ke-10 (sepuluh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 11 Oktober 2021.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi Berkelanjutan I Tahap I untuk periode 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
Jenis Obligasi :		
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	7,5%	7,5%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	8,00%	8,00%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	9,00%	9,00%

- f. Obligasi Berkelanjutan Tahap II dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun terdiri dari :

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Jenis Obligasi :		
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II seri A	150.000.000.000	--
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II seri B	150.000.000.000	--
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II seri C	200.000.000.000	--
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II seri D	500.000.000.000	--
	1.000.000.000.000	--

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A, jumlah pokok sebesar Rp150 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 6.6% per tahun, jangka waktu 370 hari. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ke 370 terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 18 Februari 2013.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B, jumlah pokok sebesar Rp.150 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7.25% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-3 (tiga) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2015.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C, jumlah pokok sebesar Rp.200 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7.5% per tahun, jangka waktu 5 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-5 (lima) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2017.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D, jumlah pokok sebesar Rp.500 milyar, tingkat bunga tetap sebesar 7.75% per tahun, jangka waktu 7 tahun. Pembayaran bunga pertama pada tanggal 14 Mei 2012, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo pada tanggal hari ulang tahun ke-7 (tujuh) terhitung sejak tanggal emisi, yaitu 14 Februari 2019.

Tingkat suku Bunga rata-rata Obligasi Berkelanjutan I Tahap II untuk periode 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
Jenis Obligasi :		
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri A	6,66%	0
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri B	7,25%	0
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri C	7,5%	0
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Seri D	7,75%	0

Jadwal pembayaran bunga untuk masing-masing obligasi adalah sebagai berikut:

- Obligasi IX setiap tanggal 6 Maret, 6 Juni, 6 September dan 6 Desember
- Obligasi X Seri A setiap tanggal 11 Januari, 11 April, 11 Juni, dan 11 Oktober
- Obligasi X Seri B setiap tanggal 12 Maret, 12 Juni, 12 September, dan 12 Desember.
- Obligasi XI setiap tanggal 23 Pebruari, 23 Mei, 23 Agustus dan 23 Nopember.
- Obligasi XII setiap tanggal 4 Maret, 4 Juni, 4 September, dan 4 Desember.
- Obligasi XIII setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, dan 1 Oktober.
- Obligasi Berkelanjutan ITahap I dilakukan pada tanggal 11 Januari 2012

31 Maret 2012

Rincian obligasi berdasarkan jumlah bagian yang jatuh tempo yang dibagi berdasarkan tahun jatuh tempo:

Uraian	Nilai Nominal	Tahun Jatuh Tempo
Hutang Obligasi yang akan jatuh tempo	Rp	
Obligasi XIII seri A-1	350.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XIII seri A-2	100.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XI seri A	400.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XI seri B	100.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XII seri A	370.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XII seri B	230.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII seri B	650.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi X seri B	63.500.000.000	Tahun 2018
Obligasi XIII seri C	400.000.000.000	Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri A	250.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri B	250.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Seri C	500.000.000.000	Tahun 2021
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A	150.000.000.000	Tahun 2013
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri B	150.000.000.000	Tahun 2015
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri C	200.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri D	500.000.000.000	Tahun 2019
Total	4.663.500.000.000	

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

31 Desember 2011

Rincian obligasi berdasarkan jumlah bagian yang jatuh tempo yang dibagi berdasarkan tahun jatuh tempo:

Uraian	Nilai Nominal	Tahun Jatuh Tempo
	Rp	Rp
Utang Obligasi yang akan jatuh tempo		
Obligasi IX seri A (jatuh tempo ultah ke-8)	211.000.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri B (jatuh tempo ultah ke-8)	13.050.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri C (jatuh tempo ultah ke-8)	2.000.000.000	Tahun 2010
Obligasi IX seri D (jatuh tempo ultah ke-8)	43.500.000.000	Tahun 2010
Jumlah Hutang Obligasi yang akan Jatuh Tempo	<u>269.550.000.000</u>	
 Obligasi X seri A	336.500.000.000	Tahun 2011
Obligasi XIII seri A-1	350.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XIII seri A-2	100.000.000.000	Tahun 2014
Obligasi XI seri A	400.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XI seri B	100.000.000.000	Tahun 2016
Obligasi XII seri A	370.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XII seri B	230.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi XIII seri B	650.000.000.000	Tahun 2017
Obligasi X seri B	63.500.000.000	Tahun 2018
Obligasi XIII seri C	400.000.000.000	Tahun 2019
Jumlah Utang Obligasi Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	<u>3.000.000.000.000</u>	
 Jumlah Utang Obligasi	<u>3.269.550.000.000</u>	

Obligasi X sebanyak 60% dari sisa pokok yang terutang, dijamin dengan tagihan Perusahaan yang diberikan kepada nasabah (PYD), sedangkan obligasi XI, XII dan XIII tidak dijamin dengan aset PYD.

PT Bank Negara Indonesia, Tbk dan PT Bank Mega, Tbk selaku wali amanat dalam rangka penerbitan obligasi diatas, tidak memiliki tagihan terhadap Perusahaan selaku kreditor.

Dalam perjanjian Perwaliamanatan dari tiap-tiap obligasi di atas tidak terdapat persyaratan yang mengharuskan Perusahaan untuk membentuk dana pelunasan obligasi (*sinking fund*).

16. Pinjaman Lainnya

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
- Yayasan Dana Sejahtera Mandiri	15.000.000.000	15.000.000.000
Jumlah	<u>15.000.000.000</u>	<u>15.000.000.000</u>

Pinjaman lainnya merupakan pinjaman yang diperoleh dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan plafon sebesar Rp 15.000.000.000 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. 036/PKS/YDSM/X/2008 tanggal 7 Oktober 2008.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Pinjaman tersebut disediakan untuk membiayai pengembangan usaha mikro skala rumah tangga melalui penyaluran kredit KRISTA. Jangka waktu pembiayaan 5 tahun dan akan jatuh tempo bulan September 2013.

Bunga pinjaman dikenakan dengan mengacu tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 bulan.

Rata-rata tingkat bunga untuk periode 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar 6,28% dan 6,28%.

17. Utang Kepada Rekanan

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Utang Pengadaan Barang dan Jasa	707.628.436	4.446.793.912
Titipan Premi Asuransi	5.128.808.316	5.634.363.586
Utang Kepada Notaris dan Institusi Hukum	5.259.370.374	5.749.332.907
Utang Angsuran Recovery	4.823.889.002	6.004.732.565
Utang Titipan Angsuran Nasabah KUMK	5.504.453.651	4.815.162.806
Utang Konsinyasi Persediaan MULIA	7.939.743.840	4.361.311.685
Utang Subrogasi	1.978.788.302	--
Utang Lainnya	--	908.179.301
Jumlah	31.342.681.921	31.919.876.762

Utang pengadaan barang dan jasa per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 sebagian besar merupakan utang atas pengadaan barang Mulia dan sebagian kecil merupakan utang pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan inventaris serta pemeliharaan dan perbaikan aset tetap sehubungan pembukaan Unit Pelayanan Cabang dan Unit Pelayanan Syariah baru.

Titipan premi asuransi kepada PT Askrindo merupakan nilai premi asuransi yang telah dibayarkan oleh nasabah kreasi dan krista yang belum disetorkan ke PT Askrindo.

Utang kepada notaris dan institusi hukum adalah merupakan dana titipan dari nasabah kreasi yang akan digunakan untuk pembayaran biaya pengesahan perjanjian kredit dan akte jaminan.

Utang Angsuran *Recovery* Kredit UKM kepada PT Askrindo merupakan nilai setoran nasabah yang pinjamannya telah diklaim ke asuradur.

Tidak terdapat utang kepada pihak berelasi dengan Perusahaan.

18. Utang Kepada Nasabah

Saldo utang nasabah per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp 73.568.695.483 dan Rp 73.195.333.640, berupa uang kelebihan nilai penjualan lelang barang jaminan dari pokok pinjaman, sewa modal (bunga) dan bea lelang, yang belum diambil oleh nasabah. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh nasabah bersangkutan, maka dinyatakan kadaluarsa dan diakui sebagai pendapatan oleh Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Prosedur yang dilakukan Perusahaan untuk memberitahu nasabah mengenai uang kelebihan lelang mengacu Surat Edaran Direksi Nomor 12/UI.1.00211/2006 tanggal 14 Maret 2006 adalah:

- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah tentang jadwal lelang pada saat kredit telah jatuh tempo.
- Kantor cabang mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada nasabah yang tidak menghadiri lelang tentang uang kelebihan lelang yang melebihi Rp 20.000 yang merupakan hak nasabah terkait.

Pengambilan uang kelebihan tersebut dengan cara menunjukkan Surat Bukti Kredit (SBK) atau bukti lain yang sah.

19. Perpajakan

a. Pajak Dibayar di Muka

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Pajak Penghasilan 28 A	--	--
Total Pajak Dibayar Dimuka	--	--

Pajak dibayar di muka per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 bersaldo nihil.

b. Utang Pajak

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Pajak Penghasilan Pasal 29		
Periode 3 Bulan Tahun 2012	11.765.906.750	--
Periode 12 Bulan Tahun 2011	78.649.431.256	78.649.431.256
Pajak Penghasilan Pasal 25	49.018.219.000	40.364.141.562
Pajak Penghasilan Pasal 21	12.825.312.546	37.733.285.046
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	426.703.648	294.947.669
Pajak Penghasilan Pasal 23	264.245.931	285.144.701
PPN	93.013.556	121.853.742
Pajak Bumi dan Bangunan	18.472.018	18.788.991
Jumlah	153.114.554.705	157.467.592.967

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Beban Pajak Kini	158.820.563.750	563.019.130.000
Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan	(5.312.337.541)	(37.002.826.214)
Jumlah	153.508.226.209	526.016.303.786

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Taksiran laba kena pajak Perusahaan, dan pajak penghasilan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2011 sebagai berikut:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Laba Konsolidasi	613.625.885.673	2.002.251.590.714
(Laba)/Rugi Anak Perusahaan	--	2.535.890
Laba Komersial	613.625.885.673	2.002.254.126.604
Beda Temporer:		
Blaya Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(12.720.157.472)	71.460.099.652
Estimasi Beban Jasa Produksi YMH Dibayar	--	68.369.188.953
Cadangan Tantlem	--	9.317.749.000
Penyusutan Aset Tetap	1.507.215.132	6.005.755.572
Beban Manfaat Karyawan	30.970.861.394	75.040.053.453
Beban Bunga Yg Belum Diamortisasi - Obligasi	--	251.750.000
Penyisihan Piutang Atas KPYD	--	2.485.614.422
Penyisihan Kerugian Klaim TGR	(1.489.520.373)	(104.921.660)
Penyisihan Piutang Non Usaha	--	--
Pendapatan/Blaya yang Belum Diamortisasi-PYD	2.980.951.484	(3.830.972.670)
	<u>21.249.350.165</u>	<u>228.994.316.722</u>
Beda Tetap :		
Blaya Ulang Tahun RI/Pegadaian	660.614.650	2.558.631.845
Blaya Pemel Perbaikan dan Eksploitasi Mobil Dinas	--	1.214.912.710
Blaya Pemel Perbaikan dan Rumah Dinas	188.932.172	870.859.265
Blaya Jamuan dan Representasi	270.076.815	573.262.600
Blaya Lainnya/Sumbangan	127.230.300	61.738.445
Blaya Listrik, Telpon, Rehap Rumah Dinas	9.386.748	19.399.152.387
Blaya Denda Pajak	9.335.563	18.684.035
Blaya Perawatan Inventaris Rumah Jabatan	4.047.697	--
Laba Penjualan Aktiva Tetap	(21.055.671)	--
Pendapatan Jasa Giro	(381.837.669)	(1.458.977.205)
Pendapatan Sewa Gedung	(459.711.229)	(2.410.187.388)
	<u>407.019.376</u>	<u>20.828.076.694</u>
Laba Fiskal	<u>635.282.255.214</u>	<u>2.252.076.520.020</u>
Laba Fiskal (Dibulatkan)	635.282.255.000	2.252.076.520.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Badan:		
- Tarif 25% x Laba Fiskal Dibulatkan	158.820.563.750	563.019.130.000
Kredit Pajak:		
- Angsuran PPh Pasal 25	(147.054.657.000)	(484.369.698.744)
Kurang (Lebih) Bayar PPh 29	11.765.906.750	78.649.431.256

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

d. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat Aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak Aset dan liabilitas. Rincian Aset dan liabilitas pajak tangguhan Perusahaan Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2010	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi (12 Bulan)	31 Des 2011	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi (3 Bulan)	31 Mar 2012
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset Pajak Tangguhan:					
Cadangan Penurunan Nilai					
Piutang Karyawan	3.895.374.557	(102.970.287)	3.792.404.270	(372.380.094)	3.420.024.176
Cadangan Penurunan Nilai PYD	29.224.446.385	17.865.024.913	47.089.471.298	(3.180.039.368)	43.909.431.930
Liabilitas Imbalan Kerja	12.862.755.410	18.760.013.363	31.622.768.773	7.742.715.349	39.365.484.122
Pendapatan/Biaya Unamortisasi PYD	(15.588.063.425)	(957.743.168)	(16.545.806.593)	745.237.871	(15.800.568.722)
Beban/Pendapatan Unamortisasi - Obligasi	62.937.500	(62.937.500)	—	—	—
Aset Tetap	4.028.990.035	1.501.438.893	5.530.428.928	376.803.783	5.907.232.711
	<u>34.486.440.462</u>	<u>37.002.826.214</u>	<u>71.489.266.676</u>	<u>5.312.337.541</u>	<u>76.801.604.217</u>
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	34.486.440.462	37.002.826.214	71.489.266.676	5.312.337.541	76.801.604.217

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh aset pajak tangguhan dapat terpulihkan dalam tahun-tahun mendatang.

20. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Merupakan beban bunga, pegawai dan umum yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut :

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Beban Bunga Bank dan Obligasi	71.643.538.093	39.590.823.146
Beban Pegawai	146.715.363.304	22.556.839.410
Beban Umum	27.956.415.508	37.783.203.832
Beban Konsultan	15.239.887.411	36.746.068.180
Jumlah	261.555.204.316	136.676.934.568

21. Pendapatan Diterima di Muka dan Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan pendapatan sewa gedung yang di terima di muka dan pendapatan sewa gedung yang ditangguhkan sesuai dengan umur sewa, terdiri dari:

a. Pendapatan Diterima di Muka

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
a. Pendapatan Diterima di Muka		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Sewa Gedung Ditangguhkan Yang Akan diamortisasi dalam satu tahun	1.228.116.477	1.637.488.636
Sewa Gedung Diterima Dimuka	1.505.171.579	642.859.331
Pendapatan Marjin Mulla	11.278.277.394	10.444.441.607
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	-	648.288.200
Jumlah	14.011.565.450	13.373.077.774
b. Pendapatan Ditangguhkan		
Pendapatan Ditangguhkan Sewa Gedung Harco (Catatan 33)		
Pendapatan Sewa Ditangguhkan	22.788.383.526	22.788.383.526
Sewa Gedung Ditangguhkan Yang Akan Diamortisasi Dalam Satu Tahun	(2.046.860.795)	(1.637.488.636)
Jumlah	20.741.522.731	21.150.894.890

22. Pinjaman Dari Pemerintah

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Pinjaman Pemerintah Pusat	410.000.000.000	410.000.000.000
Jumlah	410.000.000.000	410.000.000.000

Pinjaman Pemerintah Pusat

Pinjaman Pemerintah Pusat merupakan Surat Utang Pemerintah (SUP) sebesar Rp 410.000.000.000 adalah pinjaman untuk Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) sesuai dengan Surat Menteri Keuangan No.S-121/MK.06/2004 tanggal 14 April 2004 dan Perjanjian Pinjaman No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, dan diubah terakhir dengan Persetujuan Perubahan No.AMA-33/KP-019/DP3/2007 tanggal 8 Maret 2007. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2009 dengan tingkat bunga sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan yang ditetapkan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

1. Tujuan penyaluran pinjaman untuk pendanaan kredit usaha mikro dan kecil untuk usaha produktif.
2. Persyaratan tingkat bunga dan jangka waktu pinjaman kepada emiten :
 - a. Tingkat bunga sebesar tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu 3 bulan yang ditetapkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember atas dasar lelang SBI terakhir sebelum tanggal penetapan tersebut.
 - b. Bunga dihitung sejak penarikan pinjaman dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 Maret, 10 Juni, 10 September dan 10 Desember setiap tahun.
3. Tingkat bunga KUMK dari Perum Pegadaian kepada usaha mikro dan usaha kecil setinggi-tingginya sebesar tingkat bunga pinjaman tersebut (SBI 3 bulan) ditambah 12%.
4. Risiko tunggakan penerusan pinjaman pendanaan KUMK dari BUMN pengelola kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) dan risiko tunggakan penyaluran KUMK dari LKP kepada usaha mikro dan usaha kecil sepenuhnya ditanggung oleh masing-masing BUMN pengelola dan LKP.
5. Persyaratan lainnya, termasuk persyaratan denda, mengikuti ketentuan dalam keputusan Menteri Keuangan nomor : 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 yang telah diubah dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor : 74/KMK.06/2004 tanggal 20 Pebruari 2004 serta ketentuan dalam perjanjian pinjaman pendanaan KUMK.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Rata-rata tingkat bunga selama periode 3 bulan untuk tahun 2012 dan 2011 adalah 6,17% per tahun dan 6,72% per tahun Bunga dibayar setiap tanggal 6 Maret, 9 Juni, 9 September dan 9 Desember tiap tahunnya.

Berdasarkan perubahan perjanjian No.AMA-52/KP-019/DSM/2009 tanggal 13 Agustus 2009, dilakukan perubahan pasal 4 ayat 4 dari PP No.KP-019/DP3/2004 tanggal 14 Mei 2004, Pemerintah menyetujui perpanjangan jangka waktu pinjaman sampai dengan 10 Desember 2019.

Manajemen berpendapat bahwa Perusahaan telah memenuhi pembatasan – pembatasan yang diwajibkan di atas.

23. Utang Lancar Lainnya

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Jasa Produksi	192.575.252.792	192.578.004.417
Iuran Taspen/THT dan Askes	36.176.724.064	23.769.107.973
Utang Tantiem	9.338.551.756	9.317.749.000
Utang Pegawai	5.824.876.106	5.484.005.242
Dana Sosial dan Dana Pendidikan	2.585.094.695	2.585.108.255
Bea Lelang	819.437.724	765.142.320
Program Kemitran dan Bina Lingkungan	119.935.305	227.768.227
Utang Subrogasi atau <i>Recovery</i>	200.656.211	258.636.235
Utang Lainnya	9.008.690.825	7.952.575.204
Jumlah	256.649.219.478	242.938.096.873

24. Liabilitas Imbalan Kerja

	2012	2011
	Rp	Rp
Liabilitas Program Pensiun	61.495.418.954	41.902.294.866
Liabilitas Program Pesangon	86.134.479.441	75.627.747.650
Liabilitas Program Cuti Besar	9.832.038.092	8.961.032.577
Jumlah	157.461.936.487	126.491.075.093

a. Program Pensiun

Manfaat Pensiun diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lainnya yang diatur dalam peraturan dana pensiun. Besarnya manfaat pensiun yang diberikan ditentukan oleh masa kerja karyawan dan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun terakhir (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Pendanaan program pensiun ini dibentuk setiap bulan dari iuran karyawan sebesar 4,75% dan iuran yang ditanggung Perseroan sebesar 11,75% dari gaji pokok karyawan.

Pengelolaan dana program pensiun dilakukan oleh Dana Pensiun Perum Pegadaian. Adapun peraturan dana pensiunnya yang terakhir kali ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi No. KP.2/43/8 tanggal 10 Desember 1998 telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan No. Kep-336/KM.17/1999 tanggal 8 September 1999.

Untuk karyawan yang terhitung mulai bekerja sejak tahun 2007 ke atas, maka pengelolaan dana pensiun dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank BNI (Persero) Tbk.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Rekonsiliasi status pendanaan program ini per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Aset Program	514.274.806.963	493.172.703.298
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pensiun	874.379.319.595	840.268.172.620
Defisit Pendanaan	360.104.512.632	347.095.469.322
Liabilitas Transisi yang belum diakui	--	--
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(298.609.093.678)	(305.193.174.456)
Beban Pensiun yang Masih Harus Dibayar	61.495.418.954	41.902.294.866

Rekonsiliasi perubahan saldo Beban Pensiun Yang Masih Harus Dibayar per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Saldo Awal Tahun	41.902.294.866	(9.488.368.257)
Beban Pensiun Tahun Berjalan	32.379.468.111	102.095.196.160
Kontribusi Iuran ke Dana Pensiun	(12.786.344.023)	(50.704.533.037)
Saldo Akhir Tahun	61.495.418.954	41.902.294.866

Beban yang dibentuk selama periode 3 bulan tahun 31 Maret 2012 dan tahun 2011 terdiri dari:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Beban jasa kini	4.206.441.725	16.592.582.597
Beban bunga	14.704.693.021	37.000.734.585
-/- Imbal Hasil Investasi	(12.329.317.582)	(41.118.005.940)
Dampak Perubahan Aktuarial yang Diakui	21.585.540.546	86.342.162.184
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	4.212.110.401	3.277.722.734
Beban Yang Diakui	32.379.468.111	102.095.196.160

b. Program Pesangon

Penyelenggaraan Program Pesangon (UP4) didasarkan pada Peraturan Direksi No. 1817/Kp300323/2000, jo Peraturan Direksi No. 15A/SDM.300323/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (UKPHK). Manfaat Pesangon berupa pembayaran jumlah *lumpsum* diberikan kepada karyawan yang memasuki usia pensiun atau berhenti bekerja oleh sebab lain yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut. Adapun jumlah *lumpsum* yang diberikan ditentukan berdasarkan besarnya gaji terakhir dikalikan dengan angka indeks tertentu yang besarnya ditentukan oleh golongan gaji pegawai yang bersangkutan. Penyelenggaraan program imbalan ini didanai secara internal Perusahaan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
 dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Rekonsiliasi status pendanaan program ini per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Aset Program	--	--
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Pesangon	455.388.578.466	445.057.790.028
Defisit Pendanaan	455.388.578.466	445.057.790.028
Liabilitas Transisi yang belum diakui	(62.494.206.405)	(63.803.063.487)
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(306.759.892.620)	(305.626.978.891)
Beban Pesangon yang Masih Harus Dibayar	86.134.479.441	75.627.747.650

Rekonsiliasi perubahan saldo Beban Pesangon Yang Masih harus Dibayar per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 adalah:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Saldo Awal Tahun	75.627.747.650	38.546.418.514
Beban yang Dibentuk	21.254.779.718	73.170.069.368
Pesangon yang Dibayarkan	(10.748.047.927)	(36.088.740.232)
Saldo Akhir Tahun	86.134.479.441	75.627.747.650

Beban yang dibentuk selama periode 3 bulan tahun 31 Maret 2012 dan tahun 2011 terdiri dari:

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Beban jasa kini	8.494.227.002	33.193.556.036
Beban bunga	7.788.511.325	21.407.780.324
Amortisasi Biaya Jasa Lalu (<i>Non Vested</i>)	1.308.857.082	5.235.428.327
Peserta dibawah 50th (diamortisasi sisa masa kerja masing masing)	354.267.110	5.576.644.048
Amortisasi Laba/Rugi Aktuarial	3.308.917.199	7.756.660.633
Beban Yang Diakui	21.254.779.718	73.170.069.368

c. Program Cuti Besar

Program cuti besar diberikan selama 2 (dua) tahun bagi pegawai yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun terus menerus dan berlaku kelipatannya dengan tetap membayarkan penghasilan penuh kecuali tunjangan tetap.

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Nilai Tunai Liabilitas Manfaat Cuti Besar	87.613.283.220	92.854.578.234
Defisit Pendanaan	87.613.283.220	92.854.578.234
Liabilitas Transisi yang belum diakui	(22.294.290.647)	(22.673.613.581)
Laba/Rugi Aktuarial yang belum diakui	(55.486.954.481)	(61.219.932.076)
Beban Cuti Besar yang Masih Harus Dibayar	9.832.038.092	8.961.032.577

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Rekonsiliasi liabilitas manfaat karyawan diestimasi yang diakui di laporan posisi keuangan dan beban manfaat yang diakui dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Saldo Awal Tahun	8.961.032.577	22.392.971.383
Beban Cuti Besar Tahun Berjalan	5.620.562.659	19.283.200.646
Pembayaran Cuti Besar	(4.749.557.144)	(32.715.139.452)
Saldo Akhir Tahun	9.832.038.092	8.961.032.577

Beban yang dibentuk selama periode 3 bulan tahun 31 Maret 2012 dan tahun 2011 terdiri dari:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Beban Jasa Kini	2.950.377.972	11.900.200.410
Beban Bunga	1.624.955.119	5.047.936.641
Dampak Perubahan Kurtallmen dan Penyelesaian	--	--
Amortisasi Akumulasi (Keuntungan)/Kerugian Aktuaria	665.906.634	817.771.859
Beban Amortisasi Liabilitas Transisi	379.322.934	1.517.291.736
Beban Yang Diakui	5.620.562.659	19.283.200.646

Asumsi Aktuarial

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011, perhitungan beban dan liabilitas aktuarial tersebut di atas dihitung oleh aktuaris independen PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuaria yang tertuang dalam laporannya masing-masing yaitu:

Keterangan	31 Mar 2012	31 Des 2011
Nomor Laporan	2112/KIS/LA/04/2012 2113/KIS/LA/04/2012 2114/KIS/LA/04/2012	2028/KIS/LA/03/2012 2029/KIS/LA/03/2012 2030/KIS/LA/03/2012
Tanggal Laporan	5 April 2012	16 Maret 2012

Adapun asumsi aktuarial yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret 2012	31 Des 2011
Metode Perhitungan yang dipergunakan	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit
Tingkat Bunga Diskonto	7,00% p.a	7,00% p.a
Tingkat Bunga Imbal Hasil Investasi Aset Program	10.5% p.a	10.5% p.a
Tingkat kenaikan gaji berkala	7% per tahun	7% per tahun
Tabel mortalita	Tabel Mortalita Indonesia II	Tabel Mortalita Indonesia II
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Jumlah Pegawai	8,074	8.133 orang

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

25. Ekuitas

Merupakan Penyertaan Pemerintah yang berasal dari kekayaan bersih pada saat pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Umum, Penyertaan Modal Pemerintah, dan Saldo Laba dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Modal Awal	205.000.000.000	205.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah	46.252.000.000	46.252.000.000
	<u>251.252.000.000</u>	<u>251.252.000.000</u>
Saldo Laba		
Ditentukan Penggunaannya	2.348.875.803.694	2.348.875.803.694
Belum Ditentukan Penggunaannya	1.936.352.946.392	1.476.235.286.928
Jumlah Ekuitas	<u>4.536.480.750.086</u>	<u>4.076.363.090.622</u>

a. Saldo Laba Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku (Catatan 2qr) dengan rincian sebagai berikut:

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
Saldo Awal	2.348.875.803.694	1.865.162.562.133
Penambahan:		
Cadangan Umum	--	398.018.241.561
Cadangan Tujuan	--	85.695.000.000
Jumlah Penambahan	--	<u>483.713.241.561</u>
Saldo Akhir	<u>2.348.875.803.694</u>	<u>2.348.875.803.694</u>

b. Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya

Merupakan saldo laba yang pada tanggal laporan posisi keuangan belum ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Distribusi laba belum ditentukan penggunaannya berdasarkan surat dari Kementerian BUMN (Catatan 2.q) adalah sebagai berikut:

	Pembagian atas Saldo Laba	
	2011	2010
	Rp	Rp
Saldo Awal	1.476.235.286.928	1.179.788.385.692
Pembagian Laba Bersih:		
Dividen	--	(648.883.612.131)
Cadangan Umum	--	(398.018.241.561)
Cadangan Tujuan	--	(85.695.000.000)
Dana Program Kemitraan	--	(23.595.766.000)
Dana Bina Inggungan	--	(23.595.766.000)
Sub Jumlah	--	<u>(1.179.788.385.692)</u>
Laba Periode Berjalan	460.117.659.464	1.476.235.286.928
Jumlah	<u>1.936.352.946.392</u>	<u>1.476.235.286.928</u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Cadangan umum agar dikelola dengan baik sehingga dana cadangan tersebut dapat menghasilkan laba dan pengelolaannya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan cadangan tujuan agar digunakan sebagai sumber dana untuk investasi /belanja modal Perusahaan.

c. Manajemen Modal

Perusahaan adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham-saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa keuangan, untuk menyalurkan pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia serta usaha lain yang menguntungkan sehingga dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan sesuai dengan PP103 tahun 2000, serta dengan persetujuan Menteri BUMN sesuai dengan Undang-undang BUMN No.19 Tahun 2003.

Untuk menjalankan kegiatan usaha dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka pengelolaan modal dilaksanakan dengan mencadangkan atau menahan sebagian laba untuk pemupukan modal. Penambahan modal dari eksternal sesuai dengan ketentuan yang ada untuk saat ini tidak dimungkinkan. Komponen modal entitas adalah berupa Penyertaan Modal Pemerintah dan Saldo Laba, dimana Saldo Laba terbagi atas cadangan umum untuk modal kerja dan cadangan tujuan untuk investasi.

Kebijakan dividen/pembagian laba dilakukan setiap akhir periode setelah mendapatkan Persetujuan Laporan Tahunan melalui Rapat Pembahasan Bersama. Laba dibagi dan ditetapkan penggunaannya sebagai berikut dividen, cadangan tujuan, cadangan umum, program kemitraan dan bina lingkungan.

26. Pendapatan Sewa Modal

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
Sewa Modal Gadai KCA		
Sewa Modal Golongan A	3.241.976.440	1.228.731.010
Sewa Modal Golongan B	212.335.492.834	44.369.188.177
Sewa Modal Golongan C	1.056.885.306.721	1.013.503.567.079
Sewa Modal Golongan D	185.114.620.916	104.601.910.081
Sub Jumlah	<u>1.457.577.396.911</u>	<u>1.163.703.396.347</u>
Jasa Simpan/Ijarah Gadai Syariah		
Ijarah Golongan A	45.350.974	37.237.787
Ijarah Golongan B	2.322.512.612	2.059.124.730
Ijarah Golongan C	128.138.252.756	80.888.218.322
Ijarah Golongan D	38.386.043.526	12.413.095.114
Sub Jumlah	<u>168.892.159.868</u>	<u>95.397.675.953</u>
Sewa Modal dan Pendapatan Usaha Lainnya		
Sewa Modal Kreasi, Krasida, Kremada, dan Krista	55.567.407.080	84.811.540.947
Marjin Mulla	16.052.461.493	4.082.921.984
Sewa Modal Kresna	8.723.236.935	7.037.256.810
Ijarah Ar-Rum	3.965.644.913	3.383.143.254
Sewa Modal Kredit Tunda Jual Gabah	1.930.500	8.737.300
Sewa Modal Gadai Efek	1.698.658	4.433.011
Amanah	4.268.000	--
Sub Jumlah	<u>84.316.647.579</u>	<u>99.328.033.306</u>
Jumlah	<u>1.710.786.204.358</u>	<u>1.358.429.105.606</u>

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Pendapatan sewa modal yang berasal dari amortisasi pendapatan transaksi atas produk Kreasi, Krasida, Kresna dan Krista untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011 masing-masing sebesar sebagai berikut:

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
Kreasi	(3.097.727.060)	2.797.270.530
Krasida	606.730.263	179.800.791
Kresna	706.640.684	444.232.809
Krista	(1.196.595.371)	(266.041.738)
Total	(2.980.951.484)	3.155.262.392

Tidak ada pendapatan sewa modal yang memiliki pihak-pihak berelasi dengan Perusahaan.

27. Pendapatan Administrasi

Merupakan pendapatan administrasi atas barang jaminan milik nasabah yang ditentukan berdasarkan golongan kredit, terdiri dari:

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
Usaha Gadai		
Golongan A	1.336.481.940	275.158.600
Golongan B	43.645.656.240	5.489.301.090
Golongan C	97.528.962.620	108.202.658.742
Golongan D	20.221.327.499	14.837.029.400
	162.732.428.299	128.804.147.832
Usaha Syariah		
Golongan A	7.953.350	8.082.022
Golongan B	273.813.600	254.887.600
Golongan C	8.437.698.550	5.832.079.100
Golongan D	1.113.628.550	430.234.000
	9.833.094.050	6.525.282.722
Usaha Lainnya dan Syariah	2.975.706.597	5.279.040.831
Jumlah	175.541.228.946	140.608.471.385

Pendapatan Administrasi Usaha Lain merupakan pendapatan administrasi atas Kresna, Kreasi, Krasida, Kremada, Kredit Tunda Jual Gabah, dan Kredit Gadai Efek .

28. Pendapatan Usaha Lainnya

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
Pendapatan Jasa Pengiriman Uang	3.783.527.420	3.561.398.542
Lainnya	1.383.903.307	--
Jumlah	5.167.430.727	3.561.398.542

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

29. Beban Bunga dan Provisi

Merupakan beban bunga dan provisi dengan rincian sebagai berikut :

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	132.415.374.949	127.900.422.897
PT Bank BRI (Persero) Tbk	111.197.210.952	99.334.243.933
Bunga Obligasi	107.741.871.452	88.170.546.875
PT Bank BNI (Persero) Tbk	62.907.236.460	40.471.966.993
PT Bank BCA Tbk	50.811.255.658	46.739.754.658
Bunga Provisi, Administrasi dan Pengelolaan Pinjaman	18.613.581.324	8.605.149.889
Bagi Hasil Syariah Mandiri	14.905.249.812	--
Bunga MTN PT Mandiri Sekuritas	13.237.500.000	--
Bunga Pinjaman SUP dan Pemerintah Daerah	6.491.948.477	6.709.501.726
PT Bank Permata Tbk	3.954.722.221	3.764.652.776
Bagi Hasil Bank Muamalat	878.092.176	--
Damandiri	448.219.839	--
Jumlah	523.602.263.320	421.696.239.747

30. Beban Penyusutan Aset Tetap

Merupakan beban penyusutan bangunan, inventaris dan kendaraan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011, masing-masing sebesar Rp 21.787.440.659 dan Rp 21.916.358.239.

31. Beban Pegawai

Merupakan kompensasi Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Risiko serta pegawai seperti gaji, upah, tunjangan dan jasa produksi untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011 dan masing-masing sebesar sebagai berikut:

	31 Maret 2012 (3 Bulan) Rp	31 Maret 2011 (3 Bulan) Rp
Gaji pokok	49.189.680.100	44.351.018.692
Tunjangan Tunjangan	348.309.920.075	288.707.931.479
Biaya Kesejahteraan	34.630.676.842	24.333.358.974
Biaya Pegawai Tidak tetap	548.975.400	338.988.703
Biaya Uang Sumbangan Perumahan	1.066.280.787	2.066.600.571
Biaya Dana Pensiun	72.443.037.754	7.251.995.200
Biaya Gaji Direksi	3.149.318.291	2.667.784.622
JUMLAH	509.337.889.249	369.717.678.241

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

32. Beban Umum

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
Beban Keamanan	66.185.290.076	43.706.857.232
Beban Jasa <i>Outsourcing</i> Pegawai	45.952.212.593	24.752.534.634
Beban Sewa	30.806.400.258	28.690.233.828
Beban Perjalanan Dinas	29.592.053.438	23.613.855.010
Beban Operasional Perusahaan	11.530.706.003	9.394.793.107
Beban Listrik, Telpon, Air dan Gas	10.076.449.363	12.570.571.961
Beban Pemeliharaan	10.005.570.093	5.158.442.387
Beban Cetak/Alat Tulis Kantor	9.673.166.065	7.167.071.086
Beban Promosi	8.419.242.903	6.606.866.035
Beban Diklat	8.378.211.557	4.651.604.554
Beban Papan Nama	4.037.033.757	2.131.225.845
Beban Asuransi	3.713.571.418	3.452.003.740
Blaya Penyisihan Lain	2.660.653.719	438.633.900
Beban Konsultan	1.574.764.269	2.145.954.750
Beban Iklan	1.562.843.490	1.824.127.806
Beban Kendaraan	1.394.005.124	7.915.500.895
Blaya Penyisihan (Pemulihan) Penurunan Nilai	(12.720.157.472)	11.667.509.790
Lainnya	12.188.458.583	3.671.345.573
Jumlah	245.030.475.237	199.559.132.133

Beban Lainnya merupakan Beban Pemasaran, Beban Pengembangan, Beban Teknologi Informasi (TI), Beban Penelitian dan Pengembangan, dan Beban Izin Usaha.

33. Pendapatan Sewa Gedung

Merupakan pendapatan sewa atas bangunan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 459.711.229 dan Rp 617.177.640.

Pihak-pihak yang menyewa gedung Perusahaan adalah PT Harco Indah dan perorangan atau masyarakat yang menggunakan gedung serbaguna "Langen Palikrama" serta yang menggunakan/menempati beberapa aset milik Perusahaan yang tersebar di beberapa daerah.

34. Pendapatan Jasa Giro

Merupakan pendapatan bunga atas rekening giro bersih setelah dikurangi pajak untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp 381.837.669 dan Rp 336.314.964.

35. Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap

Untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2012 dan 2011, kerugian atas penjualan aset masing-masing sebesar Rp Nihil dan Rp 5.879.554.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

36. Pendapatan dan Beban Lainnya

Pendapatan denda angsuran/keterlambatan kredit merupakan pendapatan yang diterima per kas dan Perusahaan tidak menetapkan kebijakan pengakuan pendapatan denda secara akrual.

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
a. Pendapatan Lain-lain:		
Pendapatan Denda Angsuran/Keterlambatan Kredit	7.564.008.462	8.740.792.697
Laba Penjualan BLP, BJYD dan Marhun yang disisihkan.	1.386.822.967	426.531.015
Kartu Nasabah Hilang	161.575.003	146.479.713
Pendapatan Selisih Perhitungan Kas	84.315.595	47.731.494
Pendapatan dari Kredit UKM yang <i>Recovery</i>	13.080.251	1.442.235
Lain-lain	6.677.638.364	4.952.249.384
Jumlah	15.887.440.642	14.315.226.538
b. Beban Lain-lain:		
Rugi Penjualan BLP, BJYD, dan Marhun yang disisihkan	83.689.341	1.628.698.108
Rugi Pertukaran/Pengalihan Aset Tetap	35.099	68.211.600
Jumlah	83.724.440	1.696.909.708

Pendapatan denda angsuran/keterlambatan kredit merupakan pendapatan yang diterima per kas dan Perusahaan tidak menetapkan kebijakan pengakuan pendapatan denda secara akrual.

37. Perikatan Jangka Panjang

a. Perikatan dengan PT Harco Indah

Pada tahun 1968 Perusahaan dengan PT Harco Indah, secara bersama-sama telah menandatangani Akta Persetujuan No. 224 tanggal 30 Mei 1968 Notaris Mohamad Said Tadjoeidin, SH, akta ini telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Perjanjian Tambahan No.178, tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, SH selanjutnya dibuat "*Perjanjian Build Operate and Transfer*" (BOT).

Berdasarkan Perjanjian BOT tersebut, PT Harco Indah berliabilitas membangun, mengelola dan menyerahkan kepada Perusahaan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Oktober 2000, gedung yang berlokasi di Jl. Samanhudi Raya No.133, Jakarta Pusat dalam keadaan baik dan dapat dioperasikan. Pada tanggal 27 Januari 1997 gedung tersebut terbakar, sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk diserahkan sebagaimana diatur dalam perjanjian BOT karena tidak dapat dioperasikan.

Berdasarkan pasal 2 Akta Perjanjian Tambahan No.178 tanggal 30 Juni 1988 Notaris Buniarti Tjandra, SH, apabila terjadi kebakaran/huru-hara, maka PT Harco Indah wajib membangun kembali gedung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan PT Harco Indah mempunyai hak perpanjangan waktu hak guna penuh untuk jangka waktu selama gedung dilaksanakan perbaikan. PT Harco Indah wajib menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut pada Perusahaan pada tanggal 30 Nopember 2005 tanpa syarat dengan kondisi baik dan layak pakai serta sebelumnya telah diadakan pengecatan secara menyeluruh dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tanggal 30 Nopember 2005 PT Harco Indah telah menyerahkan Gedung HARCO beserta fasilitasnya yang melekat pada gedung tersebut kepada Perusahaan dengan kondisi baik, layak pakai dan semua sarana/fasilitas dapat berfungsi dengan baik.

Selanjutnya gedung HARCO Pasar Baru tersebut disewakan senilai Rp 32.749.772.728 (bersih setelah pajak) kepada PT Harco Indah untuk jangka waktu 20 tahun (terhitung sejak tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 30 Nopember 2025) sesuai dengan Surat Perjanjian yang dikukuhkan dengan Akta No.6 tanggal 17 Nopember 2005, Notaris Buniarti Tjandra, SH.

b. Perikatan Dengan PT Graha Asadhana

Pada tahun 1993, Perusahaan dengan PT Graha Asadhana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No.62/UTE/IX/93 dan No.015/GA/DIR.UM/0993 tanggal 1 September 1993 tentang Pemanfaatan Tanah Perum Pegadaian di Jl. Salemba Raya No.2, Jakarta Pusat untuk Perkantoran dan Pertokoan dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).

PT Graha Asadhana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Graha Asadhana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersil. Tanggal pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal 28 Pebruari 1995.

PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai kepada Perusahaan sebesar Rp 1.000.000.000 yang dibayar 50% pada saat ditandatangani perjanjian ini dan 50% lagi pada saat pembangunan dinyatakan selesai. Selama jangka waktu pengelolaan PT Graha Asadhana wajib membayar uang tunai sebesar Rp 140.000.000 pertahun kepada Perusahaan. Pembayaran tahun pertama paling lambat tiga bulan sebelum ulang tahun pertama pengoperasian komersial, sedangkan pembayaran tahunan berikutnya wajib dilunasi paling lambat setiap tiga bulan setelah ulang tahun berikutnya tanggal pengoperasian komersial. Akun yang mencatat penerimaan dari PT Graha Asadhana adalah Pendapatan Lain-lain.

PT Graha Asadhana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada Perusahaan dalam keadaan terawat baik, lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung perkantoran dan pertokoan komersial.

c. KSO Pertokoan Komersial (Cimahi)

Pada tahun 2005, Perusahaan dengan PT Tapak Sarana secara bersama-sama telah menandatangani perjanjian KSO No. 397/SP.100231/2005 dan No.001/TS/PGDN/BOT/ 07/05 tanggal 07 Juli 2005 tentang Pemanfaatan Tanah Perum Pegadaian di Jl. Pasar Atas No.68, Cimahi, Jawa Barat untuk Pertokoan Komersial dengan sistem *Build Operate and Transfer* (BOT).

PT Tapak Sarana bersedia membangun Perkantoran dan Pertokoan atas biaya PT Tapak Sarana dan selanjutnya akan mengelola secara komersial sesuai dengan ketentuan perjanjian. Selama masa pembangunan PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung dalam masa pembangunan (*construction all risk*) tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara dan bencana alam lainnya.

PT Tapak Sarana wajib membayar uang kompensasi sejumlah Rp 1.558.884.000 dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Tahap pertama : 10% (sepuluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 155.888.400 dibayarkan pada saat penandatanganan Perjanjian.
- Tahap kedua : 40% (empat puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 623.553.600 dibayarkan enam bulan setelah penandatanganan Perjanjian.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

- Tahap ketiga : 50% (lima puluh persen) dari pembayaran kompensasi yaitu sebesar Rp 779.442.000 dibayarkan lima belas bulan setelah penandatanganan Perjanjian.

Perusahaan memberikan hak penuh untuk mengelola gedung selama jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal pengoperasian komersial yaitu tanggal 1 April 2006 sampai dengan 31 Maret 2026. Tanggal dimulainya pengoperasian adalah tanggal peresmian penggunaan gedung paling lambat tanggal pertama setelah masa persiapan pengoperasian komersial gedung berakhir. Selama masa pengelolaan, PT Tapak Sarana wajib mengasuransikan gedung atas nama Perusahaan tidak terbatas pada bahaya kebakaran, gempa bumi, huru-hara, dan bencana alam lainnya dengan klausul *all risk and full covered*.

PT Tapak Sarana wajib mengelola dan memelihara gedung, agar pada akhir jangka waktu pengelolaan, gedung diserahkan kepada Perusahaan dalam keadaan terawat baik lengkap dan layak untuk dioperasikan sebagai gedung pertokoan komersial.

Perusahaan baru menerima pembayaran uang kompensasi tahap pertama (10% atau sebesar Rp 155.888.400) dan pembangunan tersebut berdasarkan Memorandum Perusahaan No.17/UL/II/2007, tanggal 29 Januari 2007 baru mencapai sekitar 33,60%. Berdasarkan hasil pembahasan antara kedua belah pihak (Perum Pegadaian dengan PT Tapak Sarana) tanggal 22 Januari 2007 dan Surat Pernyataan PT Tapak Sarana No. 0021/Dir-Bks/01/07 tanggal 23 Januari 2007, apabila sampai dengan tanggal 14 Maret 2007 PT Tapak Sarana tidak bisa membayar kekurangan uang kompensasi, maka kontrak/PKS bersedia diputus sampai dengan waktu yang ditentukan. PT Tapak Sarana tidak dapat memenuhi liabilitasnya.

Berkenaan dengan kegagalan PT Tapak Sarana memenuhi liabilitasnya membayar kompensasi Tahap II dan III sebagaimana diuraikan di atas, Perusahaan telah mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan nomor gugatan 52/Pdt.G/2009/PN.BB tanggal 27 April 2009.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat No. 52/PDT.G/2009/PN.BB tanggal 31 Agustus 2009 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa PT Tapak Sarana (Tergugat) telah melakukan wanprestasi atas perjanjian kerjasama (PKS) yang telah dibuat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp 2.805.991.200 (dua milyar delapan ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Proyek Pembangunan Pertokoan komersial dengan sistem BOT dan menyerahkan kepemilikan Bangunan Pertokoan Komersial dengan sistem BOT tersebut yang telah berdiri di Cabang Perum Pegadaian Cimahi dari Tergugat kepada Penggugat.

Atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.45/Pdt.BD/2009/PN.BB tanggal 11 September 2009.

Pada tanggal 9 September 2009, Pembanding yang semula Tergugat yaitu Dedi Sukardi, Direktur Utama PT Tapak Sarana mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Oktober 2009.

Atas banding ini, Pengadilan Tinggi Bandung pada tanggal 22 Juli 2010 memutuskan :

- a. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tertanggal 31 Agustus 2009 nomor 52/Pdt.G/2009/PN.BB, yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Atas Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi ini Pembanding semula Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 21 April 2011.

- Pada tanggal 13 Juni 2011, Mahkamah Agung mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi untuk melengkapi kekurangan dokumen.
- Pada tanggal 1 Agustus 2011, Mahkamah Agung mengirimkan surat kepada Pemohon Kasasi bahwa berkas perkara kasasi telah diterima dan diregister pada tanggal 10 Juli 2011 dengan Registrasi Nomor 1508K/PDT/2011, sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Perkara masih belum mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung.

38. Informasi Lain-Lain

- a. Pada tanggal 16 Januari 2003 nasabah yang bernama Ny.Sena Wiradjaja, melalui Kantor Pengacara Amir Indah & Partners menggugat Perum Pegadaian. Gugatan perdata tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2003 dengan No. Perkara.14/PDT.G/2003/PN.JKT.PST tentang Gugatan Perdata Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp 20.962.500.000 ditambah bunga 2% per bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan Perdata tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi terhadap 32 potong barang jaminan atas nama nasabah Ny. Sena Wiradjaja yang hilang saat terjadinya pencurian di Kantor Cabang Kebayoran Baru, pada tanggal 12-13 September 1999. Nilai taksiran barang jaminan tersebut sebesar Rp 612.789.958. Pinjaman yang Diberikan (PYD) yang dijamin oleh Barang Jaminan tersebut sudah jatuh tempo, tetapi belum ditebus oleh nasabah bersangkutan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat Nomor: 14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 2 Juli 2003 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian oleh Pengadilan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I secara renteng bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum tersebut.
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp 765.897.450 (tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh Rupiah).
- Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp 179.000 (seratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya No.139/SRT.PDT.BDG2003/PN.JKT.PST tanggal 14 Juli 2003 dan menyerahkan memori banding tanggal 17 Pebruari 2004 dan telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Pebruari 2004 No. 14/PDT.G/2003/PN/JKT.PST.

Berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.132/PDT/2004/PT.DKI tanggal 07 Maret 2005 dengan Amar Putusan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.14/PDT.G/2003/PN-JKT-PST tanggal 02 Juli 2003. Dengan dibatakannya putusan PN Jakarta Pusat tersebut maka Perum Pegadaian pada pihak yang menang dalam perkara tersebut.

Berdasarkan putusan banding tersebut, Pihak Ny. Sena Widjaya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Perum Pegadaian selaku termohon kasasi mengajukan Kontra Memori kasasi pada tanggal 6 Oktober 2005 dan berkas permohonan tersebut telah dikirim ke Mahkamah Agung RI oleh PN Jakarta Pusat dan telah diterima dengan Nomor Register 2407 K/PDT/2005 tanggal 22 Desember 2005.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2407/K/PDT/2005 j.o. No.14/PDT.G/2003/PN.Jkt.Pst yang pemberituannya kepada Perusahaan disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Mei 2009, permohonan kasasi yang diajukan Ny. Sena Wiradjaya telah ditolak.

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol : S.TAP/13a/VIII/2005/Pidkor &WCC tentang Penghentian Penyidikan, berdasarkan resume hasil penyidikan tindak pidana korupsi dengan cara pemberian ganti rugi melebihi ketentuan dan pengeluaran barang jaminan tanpa tebusan pada Cabang Perum Pegadaian Kebayoran Baru Jakarta Selatan antara Perum Pegadaian dengan Nyonya Sena Wiradjaya terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2005. Dikarenakan peristiwa tersebut tindak pidana atau karena sebab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang penyidikan dihentikan demi hukum.

Berdasarkan Surat dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 8 Juli 2011 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Perum Pegadaian atas laporan keuangan tahun 2003 dan pembiayaan dari dana masyarakat tahun buku 2005, 2006 dan 2007. Pelaksanaan dan penyelesaian gadai antara Perum Pegadaian dengan Nyonya Sena Wiradjaya dinyatakan selesai karena seluruh penjualan BLP/AYD sebesar total Rp 5.096.51 juta telah diterima oleh Perum Pegadaian seluruhnya.

- b. Pada tanggal 6 Pebruari 2012 telah di lakukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Sri Giyanto, selaku Direktur CV Cipta Sarana Berlian (CSB) dan selaku kuasa dari PT Inspira Adhi Mitra atas pengadaan Diamond Selector Culti II Type DSII-861 yang digunakan untuk keperluan operasional Perusahaan sebanyak 2.507 unit dengan nilai pengadaan sebesar Rp 2.297.390.000. Setelah dilakukan perhitungan secara cermat dan seksama oleh Tim SPI, ditemukan dan disepakati, selisih nilai pengadaan sebesar Rp 1.670.640.000, dikurangi dengan yang sudah dibayarkan oleh tergugat sebesar Rp 701.400.000 menjadi Rp 969.240.000, ditambah dengan denda keterlambatan sebesar Rp 66.825.600, sehingga kerugian materiil sebesar Rp 1.036.065.000 dan kerugian immaterial berupa Diamond Selector yang disediakan tidak sesuai dengan kesepakatan di SPK dan PKS yang akan berdampak pada hasil pengujian barang jaminan berlian tidak akurat yang akan menurunkan rasa kepercayaan dari nasabah maupun masyarakat luas sebesar Rp 1.000.000.000, sehingga jumlah kerugian bagi Perusahaan sebesar Rp 2.036.065.000.
- c. Pada tanggal 8 Maret 2012 telah terjadi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasana (Perampokan) di Perum Pegadaian Unit Pelayanan Cabang Lenteng Agung yang mengakibatkan sejumlah Barang Jaminan Hilang dengan kerugian Perusahaan sebesar Rp 1.294.982.513 (374 potong), uang kas sebesar Rp 33.368.500, sehingga total kerugian sebesar Rp 1.328.351.013.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

39. Informasi Segmen

Informasi segmen Perusahaan disajikan berdasarkan geografis dibagi dalam 5 (lima) wilayah yang terdiri dari:

Wilayah	Daerah Operasi	Jumlah Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Sumatera	Pulau Sumatera	3 Kantor Wilayah yang terdiri dari 829 Kantor Operasional
Jawa	Pulau Jawa	5 Kantor Wilayah yang terdiri dari 2.153 Kantor Operasional
Kalimantan	Pulau Kalimantan	1 Kantor Wilayah yang terdiri dari 368 Kantor Operasional
Bali & Nusa Tenggara	Pulau Bali dan Nusa Tenggara	1 Kantor Wilayah yang terdiri dari 445 Kantor Operasional
Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulmapa)	Pulau Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya	2 Kantor Wilayah yang terdiri dari 746 Kantor Operasional

Informasi segmen Perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Usaha Menurut Wilayah

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
Sumatera	274.630.250.471	193.854.461.345
Jawa	895.615.011.494	730.957.910.646
Kalimantan	150.655.807.040	105.055.843.475
Bali & Nusa Tenggara	204.821.166.021	175.875.040.286
Sulmapa	365.772.629.005	296.855.719.781
Jumlah Pendapatan Usaha	1.891.494.864.031	1.502.598.975.533

b. Hasil Usaha Menurut Wilayah

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
Sumatera	108.116.536.554	71.078.929.624
Jawa	152.820.019.887	149.321.075.913
Kalimantan	71.990.471.912	48.386.497.085
Bali & Nusa Tenggara	90.258.207.756	83.303.406.315
Sulmapa	166.997.059.455	137.619.658.236
Jumlah Laba Usaha	590.182.295.564	489.709.567.173
Pendapatan (Beban) Lain-lain	23.445.680.858	19.436.017.474
Laba Sebelum PPh Badan	613.627.976.422	509.145.584.647

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
 dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

c. Aset Menurut Wilayah

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Sumatera	4.099.074.021.889	3.712.256.391.303
Jawa	13.306.660.947.842	12.502.084.720.766
Kalimantan	2.232.368.701.315	2.036.181.504.545
Bali & Nusa Tenggara	3.052.713.647.108	2.792.444.171.653
Sulmapa	5.472.447.510.661	5.176.386.168.317
Jumlah Aset	28.163.264.828.815	26.219.352.956.584

d. Aset Tetap Menurut Wilayah

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
- Sumatera	88.674.663.411	81.094.856.824
- Jawa	256.075.801.964	263.907.773.094
- Kalimantan	51.735.543.245	52.689.338.039
- Bali & Nusa Tenggara	51.492.295.693	50.013.705.150
- Sulmapa	69.877.760.015	71.102.325.043
Jumlah Aset Tetap	517.856.064.328	518.807.998.150

e. Beban Penyusutan Aset Tetap Menurut Wilayah

	2012 (3 Bulan) Rp	2011 (3 Bulan) Rp
- Sumatera	3.448.547.410	4.339.499.149
- Jawa	10.055.044.171	9.989.626.304
- Kalimantan	1.603.289.128	1.544.122.654
- Bali & Nusa Tenggara	1.877.235.957	2.169.243.478
- Sulmapa	4.803.323.993	3.873.866.654
Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	21.787.440.659	21.916.358.239

f. Liabilitas Menurut Wilayah

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
- Sumatera	56.910.609.929	70.156.491.357
- Jawa	23.473.420.518.519	21.968.377.561.596
- Kalimantan	22.128.580.794	25.743.957.613
- Bali & Nusa Tenggara	23.110.629.175	28.852.486.694
- Sulmapa	51.213.740.312	49.859.368.702
Jumlah Liabilitas	23.626.784.078.729	22.142.989.865.962

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

40. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

a. Sifat Hubungan dengan Pihak - Pihak Berelasi:

Pihak - pihak Berelasi	Sifat Hubungan dengan Pihak - Pihak Berelasi	Sifat Transaksi
PT Balai Lelang Artha Gasia	Entitas Anak	Tidak ada
Yayasan Kesejahteraan Pegadaian Permata	Yayasan Kesejahteraan	Tidak ada
Dana Pensiun Pegadaian	Program Dana Pensiun	Setoran dana pensiun
PT Bank BRI (Persero)	BUMN	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank Mandiri Tbk.	BUMN	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank BNI (Persero) Tbk	BUMN	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Bank DKI Syariah	BUMD	Rekening Giro dan Fasilitas Kredit Modal Kerja
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	BUMN	Imbalan Jasa Pertanggungan
PT Askindo (Persero)	BUMN	Imbalan Jasa Pertanggungan
Direksi dan Dewan Pengawas	Manajemen Kunci	Remunerasi
Pemerintah Pusat	Pemerintah	Fasilitas Kredit Modal Kerja

b. Giro Bank

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Bank		
PT BRI (Persero) Tbk	72.099.592.463	133.273.411.735
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.537.150.376	4.878.590.195
PT BNI (Persero) Tbk	13.659.435.133	4.608.732.047
Total	90.296.177.972	142.760.733.977

c. Pinjaman Bank

	31 Maret 2012 Rp	31 Desember 2011 Rp
Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.679.031.256.855	4.858.401.153.540
PT BRI (Persero) Tbk	4.978.284.466.415	5.942.916.298.599
PT BNI (Persero) Tbk	2.921.671.822.691	343.232.757.759
Total	13.578.987.545.961	11.144.550.209.898

d. PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Kerja sama Asuransi Barang Jaminan Kredit KCA, Kreasi, Krasida dan Gadai Syariah, terhadap kemungkinan terjadinya resiko kerugian yang diakibatkan kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang kerusakan karena asap, RSMD, huru hara dan bencana Alam.

Kerja sama Asuransi atas pinjaman Yang Diberikan Kreasi dan Krista untuk kredit yang disalurkan mulai Januari 2011.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi menggunakan kebijakan harga dan syarat transaksi yang disepakati oleh para pihak.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

e. PT Askrindo (Persero)

Kerja sama asuransi atas Pinjaman Yang Diberikan kreasi dan krista untuk kredit yang disalurkan sampai dengan 31 Maret 2012.

f. Direksi dan Dewan Pengawas

Sifat transaksi antara Perusahaan dan Direksi / Dewan Pengawas adalah remunerasi yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang lain (tunjangan cuti, perumahan, tantiem, kesehatan dan lain-lain).

g. Pemerintah Pusat

Perusahaan menerima pinjaman dari Pemerintah Pusat berupa Surat Utang Pemerintah sebesar Rp 410.000.000.000 yang digunakan untuk pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).

41. Manajemen Risiko

Perum Pegadaian sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai menghadapi risiko sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit di Perusahaan merupakan risiko yang timbul atas pinjaman yang diberikan. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, Perusahaan menghadapi risiko kredit dalam hal terjadi salah taksir terhadap barang jaminan milik nasabah yang berakibat penetapan pinjaman melebihi nilai barang jaminan atau turunnya nilai barang jaminan yang dapat menimbulkan kerugian Perusahaan, apabila nasabah tidak dapat membayar atau melakukan pelunasan. Jumlah maksimum risiko kredit adalah sebesar nilai pinjaman yang diberikan dikarenakan kemungkinan adanya pemalsuan barang jaminan dan kecurangan yang dilakukan oleh penaksir.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kemampuan debitur/nasabah turun sehingga tidak dapat melunasi pinjamannya.
- Turunnya nilai/kualitas barang jaminan yang diagunkan, sehingga pada saat dieksekusi tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Kredit gadai dijamin oleh *collateral* berupa barang yang dikuasai oleh Pegadaian.
- Komposisi barang yang dijaminkan sebesar 90% berupa emas, berlian sedangkan sisanya berupa jaminan non-emas (eletronik, kendaraan bermotor, kain, gerabah dan lain-lain)
- Perum Pegadaian mempunyai hak eksekusi atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya

Eksposur maksimum risiko kredit Perusahaan adalah sebagai berikut :

	31 Maret 2012	31 Desember 2011
	Rp	Rp
ASET		
Kas dan Bank	380.879.986.327	459.112.641.756
Pinjaman yang Diberikan	25.481.741.512.234	23.576.329.886.425
Piutang Lainnya	14.529.399.596	16.323.935.747
Piutang Pihak Berelasi	7.128.344.666	2.817.905.157
	25.884.279.242.823	24.054.584.369.085

Perusahaan tidak memiliki konsentrasi kredit yang signifikan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

b. Risiko Pendanaan

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, Perusahaan menghadapi kemungkinan risiko yang terkait dengan pendanaan, yaitu kemungkinan Perusahaan tidak dapat memenuhi liabilitas pembayaran jangka pendek. Hal itu dapat disebabkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat bunga di pasar, dan terkait dengan struktur permodalan, sehingga kemampuan Perusahaan untuk memberikan pinjaman menjadi berkurang. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya akan menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Perusahaan.

Risiko Pendanaan terdiri dari :

a. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Adalah kemungkinan Perum Pegadaian tidak dapat memenuhi liabilitas pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para krediturnya.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Kreditur secara bersama menarik atau tidak memperpanjang pinjaman jangka pendeknya.
- Belum adanya kreditur pengganti.
- Kinerja keuangan menurun sehingga kepercayaan investor juga menurun.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- *Current Ratio* Pegadaian 140,55%, dimana 1,90% dari total aset merupakan kas dan setara kas sedangkan 88,77% merupakan outstanding pinjaman dengan jangka waktu kredit (*cash collection*) 4 bulan, sedangkan sebagian besar utang berjangka waktu kurang dari 1 tahun.
- Kinerja keuangan Pegadaian dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan, sekalipun dalam kondisi krisis seperti yang terjadi di tahun 1998-1999.
- Terkait dengan kinerja keuangan yang baik, kepercayaan investor semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penilaian Pefindo untuk Obligasi Perum Pegadaian mendapat rating AA+ (*double A plus; stable outlook*) klasifikasi *investment grade*.
- Telah dilakukannya portofolio sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari 6 (enam) kreditur perbankan.

b. Risiko Suku Bunga

Adalah risiko yang terjadi karena fluktuasi tingkat suku bunga di pasar sehingga akan berdampak pada kenaikan *cost of fund* maupun penurunan laba. Di samping itu, naiknya tingkat suku bunga sumber pendanaan Perusahaan, tidak dapat langsung diberlakukan kepada nasabah yang masih memiliki pinjaman sehingga mengurangi kemampuan Perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- a. Kondisi makro ekonomi tidak kondusif sehingga tingkat suku bunga meningkat.
- b. Kenaikkan *lending rate* tidak dapat segera diberlakukan dengan pertimbangan daya beli masyarakat menurun (inflasi sangat tinggi).

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Besarnya suku bunga efektif sebagai berikut :

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011
 dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

	Tingkat Suku Bunga Efektif
Aset	
Kas dan bank	5,00 - 8,00
Pinjaman yang Diberikan	9,00 - 10,80
Piutang Lainnya	non bearing interest
Liabilitas	
Pinjaman Bank	8,25 - 12,45
Pinjaman Obligasi	12,94 - 18,25
Pinjaman dari Pemerintah	5,00 - 8,88

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Keputusan untuk menaikkan atau menurunkan *lending rate* sepenuhnya berada di bawah kontrol manajemen.
- Penundaan kenaikan *lending rate* dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan.

	31 Maret 2012					
	Suku bunga mengambang/		Suku bunga tetap/			
	<i>Floating rate</i>		<i>Fixed rate</i>		Tidak Dikenakan bunga/	Jumlah
	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun		
Aset						
Kas dan Bank	111.293.576.550	--	--	--	269.586.409.777	380.879.986.327
Pinjaman yang Diberikan	--	--	24.519.006.257.656	962.735.254.578	--	25.481.741.512.234
Piutang Lainnya	--	--	--	14.529.399.596	--	14.529.399.596
Piutang Pihak Berelasi	--	--	--	--	7.128.344.666	7.128.344.666
Jumlah Aset Keuangan	111.293.576.550	--	24.519.006.257.656	977.264.654.174	276.714.754.443	25.884.279.242.823
Liabilitas						
Pinjaman Bank	16.913.173.190.751	--	--	--	--	16.913.173.190.751
Pinjaman Obligasi	--	429.212.634.043	--	4.225.952.873.364	--	4.655.165.507.407
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	--	--	--	--	15.000.000.000
Utang Kepada rekanan	--	--	--	--	31.342.681.921	31.342.681.921
Utang Kepada Nasabah	--	--	--	--	73.568.695.483	73.568.695.483
Utang Lancar Lainnya	--	--	--	--	256.649.219.478	256.649.219.478
Pinjaman dari pemerintah Pusat	--	--	--	410.000.000.000	--	410.000.000.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	16.928.173.190.751	429.212.634.043	--	4.635.952.873.364	361.560.596.882	22.354.899.295.040

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

31 Desember 2011						
Suku bunga mengambang/ Suku bunga tetap/						
Floating rate		Fixed rate				
Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Kurang dari satu tahun	Lebih dari satu tahun	Tidak Dikenakan bunga/		
					Jumlah	
Aset						
Kas dan Bank	283.563.351.010	—	—	—	175.549.290.746	459.112.641.756
Pinjaman yang Diberikan	—	—	16.184.369.748.000	7.391.960.138.425	—	23.576.329.886.425
Piutang Lainnya	—	—	—	16.323.935.747	—	16.323.935.747
Piutang Hubungan Istimewa	—	—	—	—	2.817.905.157	2.817.905.157
Jumlah Aset Keuangan	283.563.351.010	—	16.184.369.748.000	7.408.284.074.172	178.367.195.903	24.054.584.369.085
Liabilitas						
Pinjaman Bank	16.593.817.334.410	—	—	—	—	16.593.817.334.410
Pinjaman Obligasi	—	492.298.907.300	—	3.163.660.741.685	—	3.655.959.648.985
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	—	—	—	—	15.000.000.000
Utang Kepada rekanan	—	—	—	—	31.919.876.762	31.919.876.762
Utang Kepada Nasabah	—	—	—	—	73.195.333.640	73.195.333.640
Utang Lancar Lainnya	—	—	—	—	242.938.096.873	242.938.096.873
Pinjaman dari pemerintah Pusat	—	—	—	410.000.000.000	—	410.000.000.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	16.608.817.334.410	492.298.907.300	—	3.573.660.741.685	348.053.307.275	21.022.830.290.670

c. Risiko Permodalan

Adalah risiko yang muncul terkait dengan struktur permodalan atau rasio antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas. Munculnya risiko ini merupakan akumulasi dari risiko operasi dan risiko financial *leverage*.

Risiko ini muncul apabila terjadi :

- Aktivitas operasional belfluktuasi sehingga pendapatan yang diterima belfluktuasi.
- Meningkatnya *Debt to Equity Ratio (DER)* yaitu perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas.
- Rendahnya *retained earning* dibanding ekspansi usaha.

Probabilitas risiko ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan :

- Pertumbuhan usaha dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan rata-rata di atas 20% per tahun.
- Mengingat utang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, maka biaya bunga yang timbul berbanding lurus dengan pendapatan Perusahaan.

c. Risiko Barang Jaminan

Perusahaan dalam menyalurkan uang pinjaman kepada masyarakat mewajibkan para nasabah untuk menyerahkan barang bergerak sebagai barang jaminan. Terhadap barang jaminan milik nasabah tersebut Perusahaan berliabilitas untuk menyimpan dan memeliharanya sampai dengan dilakukan pelunasan oleh nasabah. Atas penyimpanan barang jaminan Perusahaan menghadapi risiko barang jaminan rusak atau hilang.

d. Risiko Persaingan

Persaingan bisnis kini semakin ketat. Lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, saling berlomba mengucurkan kredit kepada masyarakat dengan berbagai keunggulan dan kemudahan. Keunggulan tersebut menyangkut keunggulan dalam bidang produk, harga, saluran distribusi maupun pelayanan. Jenis produk yang ditawarkan pun sangat bervariasi dan dengan berbagai kemudahan yang diberikan dalam memperoleh kreditnya, sehingga dapat mempengaruhi pangsa pasar Perusahaan. Selain itu dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000 akan meningkatkan persaingan.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

e. Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko yang dihadapi Perusahaan sehubungan dengan sistem operasional, prosedur dan kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan operasional Perusahaan sehingga dapat mengganggu kelancaran operasi dan kualitas pelayanan. Termasuk dalam risiko operasional ini adalah yang berdampak pada kehilangan peluang untuk menyalurkan kredit. Risiko Operasional juga mencakup kualitas sumber daya manusia terutama juru taksir sebagai ujung tombak dalam operasional Perusahaan.

f. Risiko Peraturan Pemerintah

Mengingat kegiatan usaha Perusahaan berhubungan dengan kepentingan umum, maka biasanya Pemerintah senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan Pemerintah dapat menimbulkan dampak yang cukup berarti bagi Perusahaan apabila berpengaruh pada adanya perubahan atau penyesuaian dalam kegiatan operasional, salah satunya adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat sejak tanggal 5 Maret 2000.

g. Risiko Teknologi

Merupakan resiko yang dihadapi Perusahaan terkait dengan perkembangan teknologi yang mampu membuat barang jaminan emas palsu yang sulit dideteksi, sehingga lolos dari pengamatan penaksir Pegadaian. Di sisi lain apabila Perusahaan ingin terus mengikuti perkembangan teknologi diperlukan biaya investasi yang sangat besar.

h. Risiko Keamanan

Resiko keamanan merupakan resiko Perusahaan yang dihadapi sehubungan dengan situasi keamanan yang kurang/tidak kondusif yang ditandai dengan semakin meningkatnya tindak kriminal dengan berbagai modus operandi, di mana Pegadaian menjadi salah satu sasaran kejahatan/perampokan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengurangi risiko :

1. Melakukan peningkatan standar kualitas barang yang dijamin.
2. Mencari alternatif-alternatif pendanaan yang mempunyai *cost of fund* yang lebih murah dan pencarian modal kerja dari berbagai sumber dengan berbagai jangka waktu yang sebagian besar lebih lama dari jangka waktu piutang.
3. Pelatihan dan pengembangan SDM yang intensif dan berkesinambungan, sehingga tercipta tenaga kerja yang profesional, yang dapat menunjang operasi Perusahaan secara optimal.
4. Melakukan restrukturisasi cabang-cabang.
5. Membangun *corporate culture* dan *corporate image* melalui penanaman dan sosialisasi kerabat menggapai cita.
6. Mengasuransikan barang jaminan milik nasabah dan seluruh asset Perusahaan.
7. Mengasuransikan pinjaman yang disalurkan kepada nasabah untuk Kredit Angsuran Fidusia (Kreasi).
8. Menempatkan aparat keamanan (TNI dan atau Kepolisian) di Cabang PERUM Pegadaian dan meningkatkan system penyimpanan barang jaminan, antara lain : pemasangan alarm, penggunaan CCTV, teralis dan penempatan brankas/k Luis.
9. Membangun kerjasama penanganan keamanan untuk daerah yang tergabung (cluster) sehingga lebih efisien.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan :

	2012		2011	
	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp
ASET				
Kas dan Bank	380.879.986.327	380.879.986.327	459.112.641.756	459.112.641.756
Pinjaman Yang Diberikan	25.657.379.239.953	25.481.741.512.234	23.764.687.771.616	23.576.329.886.425
Piutang Lainnya	14.529.399.596	14.529.399.596	16.323.935.747	16.323.935.747
Piutang Pihak Berelasi	20.808.441.371	7.128.344.666	17.987.522.235	2.817.905.157
LIABILITAS				
Pinjaman Bank	16.913.173.190.751	16.913.173.190.751	16.913.173.190.751	16.913.173.190.751
Pinjaman Obligasi	4.663.500.000.000	4.655.165.507.407	2.663.500.000.000	3.655.959.648.985
Pinjaman Lainnya	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000	410.000.000.000
Utang Kepada Nasabah	73.568.695.483	73.568.695.483	73.195.333.640	73.195.333.640

Metode dan asumsi untuk estimasi nilai wajar adalah untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang memiliki jatuh tempo dibawah satu tahun, atas nilai wajar tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan nilai tercatatnya. Namun untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan mendekati nilai tercatatnya, karena mempunyai jangka waktu yang kurang dari 5 tahun dan dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif baik untuk perhitungan *amortized cost* maupun perhitungan penurunan nilai *discounted cash flow*, sehingga nilai wajar (sama dengan *discounted cash flow*) yang merupakan nilai tercatat dikurangi dengan penurunan nilai.

42. Perubahan Bentuk Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2008, Perusahaan bermaksud untuk melakukan perubahan status badan hukum dari Perum menjadi Persero. Sehubungan dengan hal tersebut telah dibentuk Tim Persiapan Pemerseroan Perum Pegadaian sesuai dengan Surat Direksi No.26/SP.200.232/2008 tanggal 7 Januari 2008. Usulan perubahan bentuk badan hukum tersebut telah disampaikan ke Menteri Negara BUMN dan selanjutnya oleh Menteri BUMN telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dengan surat tanggal 3 April 2008 Nomor S-223/MBU/2008. Menanggapi surat tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan suratnya Nomor S-368/MK.06/2008 tanggal 23 Juli 2008 pada prinsipnya menyetujui perubahan bentuk badan hukum dari Perummen jadi Perseroan dan mengajukan agar dilakukan pembahasan bersama dengan membentuk tim terpadu antar departemen untuk melakukan kajian lebih lanjut.

Atas hasil kajian/pembahasan bersama tersebut secara prinsip perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) disetujui oleh Menteri Keuangan dengan suratnya tanggal 5 Oktober 2009 Nomor S-592/MK.06/2009 dan Menteri Negara BUMN dengan suratnya Nomor S-801/MBU/2009 tanggal 5 Nopember 2009.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2005, saat ini sedang disusun Rancangan perubahan bentuk badan hukum (RPBBH) dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). RPBBH telah dikirimkan ke Menteri Negara BUMN dengan Surat Nomor 916/SP.300233/2010 tanggal 29 Oktober 2010 memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) PP 43 tahun 2005. Ringkasan RPBBH telah diumumkan di surat kabar Media Indonesia pada tanggal 18 Nopember 2011 (sesuai ketentuan pasal 38 ayat (1) PP Nio. 43 tahun 2005) dan telah dikirimkan ke pihak-pihak yang berkepentingan seperti kreditor dan karyawan. Surat pemberitahuan tidak keberatan/persetujuan untuk menjadi persero dari karyawan telah diteruskan kepada Menteri BUMN dengan surat Nomor 1026/SP.300233/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan surat persetujuan untuk menjadi persero dari pihak kreditor telah dikirimkan kepada Menteri Negara BUMN dengan surat nomor 1031/SP.300233/2010 tanggal 8 Desember 2010.

PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Per 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011

Serta Untuk Periode Tiga Bulan yang Berakhir 31 Maret 2012 dan 2011

dan Tahun yang Berakhir 31 Desember 2011

(Dalam Rupiah Penuh)

Pada tanggal 9 Maret 2011, Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) kepada Presiden Republik Indonesia (RI). Pada tanggal 5 Mei 2011, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari Presiden RI melalui surat Sekretaris Negara Republik Indonesia No.B-622/M.Sesneg/D-4/05/2011 mengenai penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perum menjadi Persero.

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri ini berlaku efektif apabila telah terbit Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum. Pengiriman Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum untuk dilakukan harmonisasi oleh Menteri Negara BUMN kepada Menteri Hukum dan HAM dengan surat nomor S-373/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011. Penyampaian hasil pengharmonisasian RPP dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Negara BUMN dengan surat Nomor PPE.PP.02.03-1215 tanggal 1 Agustus 2011. Pengiriman RPP dari Menteri Negara BUMN kepada Presiden RI untuk ditandatangani dengan Surat Nomor S-481/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011.

Pada tanggal 13 Desember 2011 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Persero (Persero) PT Pegadaian atau disingkat PT Pegadaian (Persero) Nomor 01 tanggal 1 April 2012 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-17525.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 4 April 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, telah disahkan Badan Hukum Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian disingkat PT Pegadaian (Persero).

42. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diselesaikan pada tanggal 30 April 2012.

Seperti diungkapkan dalam Catatan 1.c., berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-18/MBU/2011 tanggal 31 Januari 2011, susunan Dewan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Suwhono
Direktur Pengembangan Usaha	: Wasis Djuhar
Direktur Operasi	: Moch. Edy Prayitno
Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia	: Sumanto Hadi
Direktur Keuangan	: Budiyanto*)

*) Selesai masa tugas berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah Sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Nomor SK-6/MBU/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Dengan demikian terdapat kekosongan Direktur Keuangan PERUM Pegadaian pada tanggal 31 Maret 2012.

Lampiran IV – 2/2

PT PEGADAIAN (Persero) DAN ENTITAS ANAK (sebelumnya PERUM PEGADAIAN DAN ENTITAS ANAK*) LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Lanjutan)

Untuk Periode 9 (Sembilan) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012, Periode 3 (Tiga) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2012 dan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011
(Dalam Rupiah Penuh)

	2012 (9 Bulan) Rp	2012 *) (3 Bulan) Rp	2011 *) (12 Bulan) Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan Kas dari:			
Pinjaman Bank	8.376.329.868.096	16.165.827.308.727	11.476.485.398.753
Pinjaman Obligasi	--	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Pinjaman MTN	--	--	665.000.000.000
Pengembalian Uang Muka Dividen	150.000.000.000	--	--
Jumlah Penerimaan Kas dari Aktivitas Pendanaan	<u>8.526.329.868.096</u>	<u>17.165.827.308.727</u>	<u>13.141.485.398.753</u>
Pengeluaran Kas untuk:			
Angsuran Pinjaman Bank	(7.910.520.140.586)	(15.846.471.452.386)	(7.953.152.184.564)
Pelunasan Pinjaman MTN	(425.000.000.000)	--	--
Pelunasan Pinjaman Obligasi	--	--	(336.500.000.000)
Pembayaran Dividen	(579.776.468.000)	--	(648.883.612.131)
Pembayaran Uang Muka Dividen	--	--	(150.000.000.000)
Pembayaran Dana Program Kemitraan	(14.762.350.000)	--	(23.595.766.000)
Pembayaran Dana Bina Lingkungan	(14.762.350.000)	--	(23.595.766.000)
Jumlah Pengeluaran Kas untuk Aktivitas Pendanaan	<u>(8.944.821.308.586)</u>	<u>(15.846.471.452.386)</u>	<u>(9.135.727.328.695)</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>(418.491.440.490)</u>	<u>1.319.355.856.341</u>	<u>4.005.758.070.058</u>
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	266.275.071.684	(78.232.655.429)	102.040.317.475
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	380.879.986.328	459.112.641.756	357.072.324.281
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	<u>647.155.058.012</u>	<u>380.879.986.327</u>	<u>459.112.641.756</u>
Kas dan Bank Akhir Periode terdiri dari:			
Kas	442.842.076.389	269.586.409.777	283.453.351.010
Bank	204.312.981.623	111.293.576.550	175.659.290.746
Jumlah Kas dan Bank	<u>647.155.058.012</u>	<u>380.879.986.327</u>	<u>459.112.641.756</u>

*) Sejak 31 Maret 2012 Perum Pegadaian ditutup dan sejak 1 April 2012 PT Pegadaian (Persero) dibuka